



**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 56 TAHUN 2016**

tentang

**PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2017**



RKPD

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2017**



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 56 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017;
 - b. bahwa dalam menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang berdampak pada perubahan urusan dan Perangkat Daerah yang terlibat maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 perlu disesuaikan dengan Perangkat Daerah yang baru.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Perubahan atas Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4697);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 digunakan sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2017.

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 22 November 2016

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 22 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 56

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.1.1. Proses Penyusunan	I-2
1.1.2. Prinsip dan Pendekatan Penyusunan	I-5
1.2. Landasan Hukum	I-6
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.3.1. RPJM Nasional	I-9
1.3.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017	I-9
1.3.3. RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah	I-9
1.3.4. RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031	I-11
1.3.5. RPJPD 2005-2025	I-12
1.3.6. RPJMD Kota Magelang	I-12
1.3.7. Rencana Pembangunan Sektoral	I-12
1.3.8. Rencana Kerja (Renja) – OPD	I-12
1.4. Maksud dan Tujuan	I-14
1.4.1. Maksud	I-14
1.4.2. Tujuan	I-14
1.5. Sistematika RKPD	I-15
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN	
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Aspek Geografi	II-1
2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah	II-1
2.1.1.2. Topografi	II-4
2.1.1.3. Geologi	II-5
2.1.1.4. Hidrologi	II-5
2.1.1.5. Klimatologi	II-6
2.1.1.6. Penggunaan Lahan	II-7
2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah	II-9
2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana	II-13
2.1.2. Aspek Demografi	II-15
2.2. Aspek Kesejahteraan Rakyat	II-19
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-20
2.2.1.1. Produk Domestik Bruto (PDRB)	II-21

2.2.1.2.	Perkembangan Harga (Inflasi)	II-27
2.2.1.3.	Investasi	II-29
2.2.1.4.	Indeks Gini.....	II-31
2.2.1.5.	Indeks Williamson.....	II-31
2.2.1.6.	Penduduk Miskin	II-32
2.2.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-36
2.2.2.1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-36
2.2.2.2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	II-40
2.2.2.3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	II-41
2.2.3.	Fokus Seni Budaya Olahraga Ilmu Pengetahuan dan Agama	II-43
2.2.3.1.	Seni Budaya	II-43
2.2.3.2.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	II-44
2.2.3.3.	Agama	II-47
2.3.	Aspek Pelayanan Umum	II-48
2.3.1.	Urusan Pelayanan Wajib	II-48
2.3.1.1.	Pendidikan	II-48
2.3.1.2.	Kesehatan	II-61
2.3.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-67
2.3.1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-79
2.3.1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-82
2.3.1.6.	Sosial	II-85
2.3.2.	Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-86
2.3.2.1.	Ketenagakerjaan	II-86
2.3.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-92
2.3.2.3.	Pangan	II-94
2.3.2.4.	Pertanahan	II-99
2.3.2.5.	Lingkungan Hidup	II-100
2.3.2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-108
2.3.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	II-109
2.3.2.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	II-111
2.3.2.9.	Perhubungan	II-112
2.3.2.10.	Komunikasi dan Informatika	II-116
2.3.2.11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-120
2.3.2.12.	Penanaman Modal	II-122
2.3.2.13.	Kepemudaan dan Olahraga	II-123
2.3.2.14.	Statistik	II-124
2.3.2.15.	Persandian	II-125
2.3.2.16.	Kebudayaan	II-126
2.3.2.17.	Perpustakaan	II-128
2.3.2.18.	Kearsipan	II-128
2.3.3.	Fokus Urusan Pelayanan Pilihan	II-129

2.3.3.1.	Kelautan dan Perikanan	II-129
2.3.3.2.	Pariwisata	II-131
2.3.3.3.	Pertanian	II-135
2.3.3.4.	Kehutanan	II-142
2.3.3.5.	Energi dan Sumber Daya Mineral	II-143
2.3.3.6.	Perdagangan	II-143
2.3.3.7.	Perindustrian	II-145
2.3.3.8.	Transmigrasi	II-146
2.3.4.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-146
2.3.4.1.	Perencanaan	II-146
2.3.4.2.	Keuangan	II-148
2.3.4.3.	Kepegawaian dan Pendidikan	II-149
2.3.4.4.	Penelitian dan Pengembangan	II-151
2.3.5.	Fungsi Lain	II-152
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II-154
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-156
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-158
2.4.2.1.	Sistem Perkotaan Kota Magelang	II-160
2.4.2.2.	Sistem Pergerakan Wilayah Kota Magelang	II-161
2.4.2.3.	Sistem Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	II-164
2.4.2.4.	Prasarana Persampahan	II-165
2.4.3.	FOkus Iklim Berinvestasi	II-171
2.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia	II-173
2.4.5.	Perkembangan Smart City di Kota Magelang	II-175
2.4.5.1.	Ekonomi	II-177
2.4.5.2.	Sosial	II-178
2.4.5.3.	Lingkungan	II-180
2.4.5.4.	Enabler	II-181
2.5.	Rekapitulasi Capaian Kinerja Hingga Tahun	II-182
2.6.	Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Magelang Hingga Tahun 2015	II-195
2.6.1.	Misi 1	II-195
2.6.2.	Misi 2	II-198
2.6.3.	Misi 3	II-201
2.6.4.	Misi 4	II-206
2.6.5.	Misi 5	II-210
2.6.6.	Misi 6	II-216
2.7.	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-275
2.7.1.	Urusan Wajib Pendidikan	II-275
2.7.2.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-278
2.7.3.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-287
2.8.	Dinamika Lingkungan Strategis	II-290

2.8.1. Kajian Kebijakan Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Internasional	II-290
2.8.2. Kebijakan Pembangunan Lainnya	II-293
2.8.3. Kebijakan Pembangunan Daerah RPJPD Kota Magelang 2005-2025	II-294
2.9. Analisa Faktor Internal dan Eksternal	II-296
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2017.....	III-1
3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016	III-1
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	III-4
3.1.2. Perkembangan Harga (Inflasi)	III-6
3.1.3. Investasi	III-7
3.1.4. Perdagangan Internasional (Ekspor)	III-7
3.1.5. Indeks Gini (Gini Ratio/Gini Index)	III-8
3.1.6. Indeks Williamson (Williamson Index)	III-9
3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.....	III-9
3.2.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016.....	III-10
3.2.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017	III-11
3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-11
3.3.1. Proyeksi Keuangan dan Kerangka Pendanaan	III-14
3.3.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-15
3.3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-28
3.3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-34
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Visi Misi Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD 2005-2025.....	IV-1
4.1.1. Visi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021	IV-1
4.1.2. Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021	IV-2
4.1.3. Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021	IV-7
4.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2017	IV-19
4.2.1. Tema Pembangunan Tahun 2017	IV-19
4.2.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2017	IV-20
4.3. Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target SDGs Kota Magelang	IV-117
4.3.1. Sustainable Development Goals (SDGs)	IV-117
4.4. Arah Pengembangan wilayah Terpadu Kota Magelang	IV-120
4.4.1. Arah Pengembangan Eksternal Wilayah	IV-120
4.4.2. Arah Pengembangan Internal Wilayah	IV-122
4.5. Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IV-132
4.5.1. Urusan Pendidikan	IV-132
4.5.2. Urusan Kesehatan	IV-132
4.5.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV-133
4.5.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV-133
4.5.5. Urusan Pangan	IV-133

4.5.6. Urusan Lingkuagn Hidup	IV-133
4.5.7. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	IV-134
4.5.8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV-134
4.5.9. Urusan Perhubungan	IV-134
4.5.10. Urusan Komunikasi dan Informatika	IV-134
4.5.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	IV-134
4.5.12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga	IV-135
4.5.13. Urusan Kebudayaan	IV-135
4.5.14. Urusan Pariwisata	IV-135
4.5.15. Urusan Pertanian	IV-135
4.5.16. Urusan Perdagangan	IV-135
4.5.17. Urusan Pemerintahan Umum	IV-135
4.6. Inovasi Pembangunan	IV-136
4.6.1. Inovasi Proses Perencanaan Pembangunan	IV-136
4.6.2. Inovasi Program/Kebijakan Pembangunan	IV-141
BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH.....	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Prinsip Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2017	I-5
Tabel I.2	Pendekatan Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2017	I-6
Tabel II.1	Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang	II-2
Tabel II.3	Rata-Rata Curah Hujan Per Hari di Kota Magelang (mm) Tahun 2009-2015.....	II-6
Tabel II.4	Luas Tanah(Ha) Menurut Penggunaannya di Kota Magelang Tahun 2009-2015.....	II-8
Tabel II.	Tabel Peristiwa Bencana Alam dan Wabah Penyakit di Kota Magelang Tahun 2012-2015	II-15
Tabel II.5	Kepadatan Penduduk di Kota Magelang Tahun 2011-2015.....	II-15
Tabel II.6	Kepadatan Penduduk per Kelurahan di Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-16
Tabel II.7	Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin dan tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Magelang Tahun 2009-2014 dan prediksi tahun 2015 (dalam jiwa dan persen)	II-17
Tabel II.8	Banyak Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga di Kota Magelang Tahun – 2011-2015	II-17
Tabel II.9	Banyak Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-17
Tabel II.10	Penduduk Menurut Mata Pencarian Di Kota Magelang	II-18
Tabel II.11	Penduduk Usia Kerja Usia 15-64 tahun di Kota Magelang Kategori Angkatan Kerja dan - Bukan Angkatan Kerja Tahun 2011-2015	II-19
Tabel II.12	Penduduk Berdasarkan Agama Dan Keyakinan Yang Dipeluk Tahun 2011-2015 Di Kota - Magelang	II-19
Tabel II.13	Realisasi Indikator Makro Indonesia Tahun 2010-2015	II-20
Tabel II.14	Realisasi Indikator Makro Jawa Tengah Tahun 2010-2015	II-21
Tabel II.15	PDRB Kota Magelang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Kontribusi Sektoral Tahun 2010-2015 (2010= 100 dalam juta Rupiah)	II-21
Tabel II.16	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Kontan dan Kontribusi Sektoral Tahun 2010-2015 (2010= 100 dalam juta Rupiah)	II-23
Tabel II.17	Pertumbuhan PDRB adhb dan adhk Menurut Lapangan Tahun 2011-2012 dan Prediksi – 2013-2015	II-24
Tabel II.18	PDRB per Kapita Kota Magelang Tahun 2010-2013 dan Tahun 2014-2015.....	II-27
Tabel II.19	Perbandingan Laju Inflasi Kota Magelang Tahun 2010-2015	II-28
Tabel II.20	PDRB Penggunaan Sektor Investasi Tahun 2010-2012 dan Prediksi Tahun 2013-2015 (Juta rupiah).....	II-30
Tabel II.21	Indeks Gini Kota Magelang Tahun 2011-2015.....	II-31
Tabel II.22	Indeks Williamson Kota Magelang Tahun 2011-2015.....	II-32
Tabel II.23	Statistik Kemiskinan Kota Magelang Tahun 2010-2014.....	II-33
Tabel II.24	Jumlah Keluarga dalam Rumah Tangga dengan status kesejahteraan 40% Terendah	II-34
Tabel II.25	Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) dalam rumah tangga dengan status kesejahteraan 40% terendah.....	II-35
Tabel II.26	Data Kriminalitas yang tertangani	II-36
Tabel II.27	Komponen Penyusun IPM Kota Magelang dan Sekitarnya Tahun 2010-2015.....	II-37

Tabel II.28	Usia Harapan Hidup (Tahun) Penduduk Kota Magelang dan Daerah sekitar	II-38
Tabel II.29	IPG Kota Magelang Tahun 2010-2014	II-36
Tabel II.30	Data Komponen IPG Kota Magelang dan sekitarnya	II-37
Tabel II.31	IDG Kota Magelang Tahun 2010-2014'	II-42
Tabel II.32	KOMponen Penyusun IDG di Kota Magelang dan Wilayah sekitarnya	II-42
Tabel II.33	Perkembangan Seni dan Budaya Kota Magelang Tahun 2011-2015.....	II-43
Tabel II.34	Perkembangan Kepemudaan Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-44
Tabel II.35	Perkembangan Olahraga Kota Magelang Tahun 2011-2015.....	II-44
Tabel II.36	Jumlah SEkolah Ruang Kelas dan Rombongan Belajar Kota Magelang 2011-2015.....	II-48
Tabel II.37	Angka Partisipasi Kasar Paud Kota Magelang Tahun 2011-2015.....	II-49
Tabel II.38	Indikator Pendidikan Dasr Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-50
Tabel II.39	Indikator Pendidikan Menengah Kota Magelang Tahun 2011-2015.....	II-55
Tabel II.40	Indikator Pendidikan Formal Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-57
Tabel II.41	Jumlah USia 25 Tahun ke atas berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahunb 2015	II-58
Tabel II.42	Angka Pendiikan yang ditamatkan Penduduk di Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-58
Tabel II.43	JUmlah Guru dan Pendidikan Guru Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-59
Tabel II.44	Ketersediaan Guru di Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-60
Tabel II.45	Indikator Derajat Kesehatan Kota Magelang Tahun 2011-2015.....	II-61
Tabel II.46	Capaian KInerja Urusan Kesehatan Kota Magelang Tahun 2011-2015.....	II-63
Tabel II.47	KInerja Sub Urusan Sumber Daya Air Tahun 2011-2015	II-67
Tabel II.48	Kebutuhan air irigasi dengan pengairan teknis di Kota Magelang	II-68
Tabel II.49	Kinerja Sub Urusan Air Minum Tahun 2011-2015.....	II-66
Tabel II.50	Potensi Sumber Air Baku Kota Magelang.....	II-69
Tabel II.51	Kinerja sub urusan persampahan Tahun 2011-2015	II-70
Tabel II.52	Kinerja Sub Air Limbah Tahun 2011-2015.....	II-72
Tabel II.53	Kinerja Sub Drainase Tahun 2011-2015.....	II-73
Tabel II.54	Kinerja Sub Urusan Bangunan Gedung Tahun 2011-2015.....	II-74
Tabel II.55	Kinerja Sub Urusan Jalan Tahun 2011-2015	II-74
Tabel II.56	Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2011-2015	II-77
Tabel II.57	Kinerja sub urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh Tahun 2011-2015.....	II-80
Tabel II.58	Luas Kawasan Perumahan Dan Pemukiman Kumuh Kota Magelang.....	II-81
Tabel II.59	Kinerja Sub Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman KumuhTahun 2011-2015... .	II-82
Tabel II.60	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlin- dungan Masyarakat Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-82
Tabel II.61	Karakteristik Pemilih Kota Magelang 2011-2015	II-84
Tabel II.62	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Kota Magelang Tahun 2011-2015.....	II-85
Tabel II.63	Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kota Magelang Tahun 2011-2015.....	II-86
Tabel II.64	Komponen Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-87
Tabel II.65	Komposisi Penduduk Bukan Angkatan Kerja.....	II-88
Tabel II.66	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-93

Tabel II.67	Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun – 2011-2015	II-95
Tabel II.68	Jumlah Produksi Komoditas Pangan dan Konsumsi Penduduk	II-95
Tabel II.69	Tingkat Konsumsi Energi, Tingkat Konsumsi Pangan, dan Skor PPH Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-98
Tabel II.70	Konsumsi Energi Berdasarkan Konsumsi Kelompok Pangan Penduduk Kota Magelang – Tahun 2011-2015	II-98
Tabel II.71	Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2011-2015	II-99
Tabel II.72	Kinerja Bidang Pencemaran Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan-Hidup Tahun 2011-2015	II-100
Tabel II.73	Kinerja Bidang Keanekaragaman Hayati (Kehati) Tahun 2011-2015	II-104
Tabel II.74	Kinerja Bidang Keanekaragaman Hayati (Kehati) Tahun 2011-2015	II-105
Tabel II.75	Kinerja Bidang Persampahan Tahun 2011-2015	II-106
Tabel II.76	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah tahun 2011-2015	II-106
Tabel II.77	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-108
Tabel II.78	Capain Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-110
Tabel II.79	Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	II-111
Tabel II.80	Indikator Kinerja Angkutan Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-112
Tabel II.81	Indikator Kinerja Lalu lintas Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-114
Tabel II.82	Indikator Kinerja Informasi dan Komunikasi Publik Kota Magelang tahun 2011-2015	II-116
Tabel II.83	Indikator Kinerja Aplikasi Informatika Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-118
Tabel II.84	Persentase Koperasi Aktif di Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-120
Tabel II.85	Perkembangan Jumlah Koperasi dan Anggota Koperasi Tahun 2011-2015	II-121
Tabel II.86	Perkembangan Jumlah UMKM di Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-121
Tabel II.87	Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-122
Tabel II.88	Perkembangan Jumlah Investasi di Kota Magelang (2011-2015)	II-122
Tabel II.89	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-123
Tabel II.90	Kondisi Olah Raga Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-124
Tabel II.91	Cakupan Penyediaan Data Makro dalam Data GO Kota Magelang	II-124
Tabel II.92	Capaian Kinerja Urusan Persandian Kota Magelang Tahun 2010-2015	II-125
Tabel II.93	Aktifitas Seni dan Budaya Kota Magelang 2011-2015	II-126
Tabel II.94	Daftar Benda Cagar Budaya Kota Magelang	II-127
Tabel II.95	Hasil Kinerja Urusan Perpustakaan Pemerintah Kota Magelang Periode 2011-2015	II-128
Tabel II.96	Penerapan Pengelolaan Arsip Baku Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-129
Tabel II.97	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-130
Tabel II.98	Perkembangan Jumlah Ikan yang Ditebarkan di Sawah dan Kolam di Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-131
Tabel II.99	Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Magelang Tahun 2010-2015	II-132
Tabel II.100	Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap PAD Kota Magelang Tahun 2011-2014	II-133
Tabel II.101	Hotel Bintang di Kota Magelang	II-135

Tabel II.102	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2011-2015 ..	II-136
Tabel II.103	Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, Produktivitas Padi, Jagung, dan – Ketela Pohon di Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-138
Tabel II.104	Data Kelompok Tani Tanaman Hias dan Bunga di Kota Magelang Tahun 2015	II-139
Tabel II.105	Produksi Buah-buahan (Ton) Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-139
Tabel II.106	Perkembangan Produksi Daging Ayam, Telur, dan Susu Tahun 2010-2015	II-140
Tabel II.107	Perkembangan Produksi Daging Sapi, Kerbau, Kambing, dan Domba (kg) di Kota Mage- lang Tahun 2010-2015	II-141
Tabel II.108	Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-143
Tabel II.109	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-144
Tabel II.110	Sarana Perdagangan Kota Magelang Tahun 2011 – 2015	II-144
Tabel II.111	Capaian Kinerja Sektor Industri Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-145
Tabel II.112	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi	II-146
Tabel II.113	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-147
Tabel II.114	Rekapitulasi Realisasi PBB P-2 Kota Magelang Tahun 2008-2015	II-149
Tabel II.115	Penilaian Objek Pajak Atas Bangunan di Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-149
Tabel II.116	Penggunaan Instrumen Analisis Standar Biaya Perencanaan dalam Penyusunan Anggaran di Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-149
Tabel II.117	Realisasi Diklat BKD Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-150
Tabel II.118	Jumlah PNS Kota Magelang Menurut Pendidikan Selama Tahun 2011-2015	II-150
Tabel II.119	Tingkat Pelanggaran Etika Aparat Selama Tahun 2011-2015	II-151
Tabel II.120	Penerapan Hasil Krenova	II-152
Tabel II.121	Indikator Kinerja (Outcome)	II-154
Tabel II.122	PDRB Per Kapita Kota Magelang Tahun 2010-2015 (menggunakan tahun dasar 2010) ...	II-156
Tabel II.123	Tabel Perbandingan Indeks Gini, Konsumsi Non Makanan, LPE dan Pengeluaran Per Ka- pita Riil Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-157
Tabel II.124	PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK dan ADHB Tahun 2010-2012 dan Prediksi Ta- -hun 2013-2015 (2010=100 dalam Juta Rupiah)	II-157
Tabel II.125	Banyaknya Koperasi di Kota Magelang Berdasarkan Jenis Usaha dan Jumlah Anggota Tahun 2012- 2015	II-158
Tabel II.126	Sarana Peribadatan di Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-160
Tabel II.127	Kondisi Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi, Fungsi dan Status di Kota Magelang – Tahun 2013 – 2015	II-161
Tabel II.128	Rute Angkutan Kota Berdasarkan Nomor Trayek	II-163
Tabel II.129	Trayek dan Jumlah Armada Angkutan Perbatasan di Kota Magelang	II-164
Tabel II.130	Jumlah Pelanggan Air Minum, Total Pemakaian Air Minum, Jumlah Rumah Tangga dan Prosentase RT yang menggunakan air bersih di Kota Magelang Tahun 2010 - 2015	II-165
Tabel II.131	Prosentase Sampah Terangkut Tahun 2010 – 2015	II-166
Tabel II.132	Lokasi TPS dan Transfer depo	II-166
Tabel II.133	Kampung Organik	II-167
Tabel II.134	Bank Sampah Kota Magelang	II-169

Tabel II.135	Kampung Organik Dan Bank Sampah	II-170
Tabel II.136	Jumlah Demo dan Angka Kriminalitas Kota Magelang Tahun 2011-2015.....	II-171
Tabel II.137	Realisasi PAD terhadap Potensi PAD Kota Magelang Tahun 2010-2014	II-172
Tabel II.138	Tabel Kenaikan/ Penurunan PAD Tahun 2010-2014	II-173
Tabel II.139	Retribusi Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Magelang	II-173
Tabel II.140	Angka Beban Tanggungan Penduduk Kota Magelang Tahun 2011-2015.....	II-174
Tabel II.141	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Penduduk Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-174
Tabel II.142	Penilaian Kota Magelang berdasar GSCM	II-177
Tabel II.143	Rekapitulasi Capaian Kinerja Hingga Akhir Periode RPJMD Kota Magelang	II-182
Tabel II.144	Tabel Capaian Indikator Sasaran Misi 1	II-196
Tabel II.145	Tabel Capaian Indikator Sasaran Misi 2	II-199
Tabel II.146	Tabel Capaian Indikator Sasaran Misi 3	II-202
Tabel II.147	Tabel Capaian Indikator Sasaran Misi 4	II-207
Tabel II.148	Tabel Capaian Indikator Sasaran Misi 5	II-211
Tabel II.149	Tabel Capaian Indikator Sasaran Misi 6	II-216
Tabel II.150	Tabel Capaian Indikator Sasaran Misi 6	II-218
Tabel II.151	Sasaran dan Indikator RPJPD 2005-2025	II-294
Tabel II.152	Persentase Penduduk Miskin	II-301
Tabel II.153	Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan dan Gol Umur	II-302
Tabel II.154	Distribusi Pendapatan di Kota Magelang menurut Koefisien Gini dan Kriteria Bank Dunia Tahun 2011-2014.....	II-309
Tabel II.155	Keterkaitan Isu Strategis RKPD Kota Magelang Dengan Nasional Regional dan Internasional.....	II-324
Tabel III.1	Asumsi Makro Dasar Kota Magelang Tahun 2017.....	III-1
Tabel III.2	Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Lapangan Usahan Pembentuk PDRB Kota Magelang Tahun 2017	III-2
Tabel III.3	Prediksi PDRB per Kapita Kota Magelang Tahun 2015 dan Tahun 2017	III-6
Tabel III.4	Perkembangan Inflasi Indonesia, Jawa Tengah dan Kota Magelang (dalam persen) Tahun 2012-2015 dan Prediksi Inflasi Kota Magelang Tahun 2016-2021	III-6
Tabel III.5	Prediksi Investasi Kota Magelang Tahun 2015-2017	III-7
Tabel III.6	Prediksi Ekspor Atas Dasar Harga Berlaku Kota Magelang Tahun 2015-2017	III-8
Tabel III.7	Indeks Gini Kota Magelang, Jawa Tengah dan Nasional.....	III-8
Tabel III.8	Indeks Williamson Kota Magelang Tahun 2011 – 2013 dan Prediksi Tahun 2014-2015.....	III-9
Tabel III.9	Proyeksi Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2017-2021	III-10
Tabel III.10	Realisasi dan Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2013-2017 (dalam Satuan Rupiah)	III-14
Tabel III.11	Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang Selama Tahun 2011-2015 (dalam rupiah)	III-17
Tabel III.12	Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2011-2015 (dalam Rupiah dan %)	III-19

Tabel III.13	Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2011-2015.....	III-20
Tabel III.14	Kontribusi Retribusi Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2011-2015	III-20
Tabel III.15	Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Peme- -rintah Kota Magelang Tahun 2011-2015	III-21
Tabel III.16	Kontribusi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2011-2015.....	III-21
Tabel III.17	Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Ma- -gelang Tahun 2011-2015 (dalam rupiah dan persen)	III-22
Tabel III.18	Kontribusi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Terhadap Dana Perimbangan Tahun 2011-2015 -(dalam rupiah dan Persen)	III-22
Tabel III.19	Kontribusi Dana Alokasi Umum Terhadap Dana Perimbangan Tahun 2011-2015 (dalam – - rupiah dan Persen).....	III-23
Tabel III.20	Kontribusi Dana Alokasi Khusus Terhadap Dana Perimbangan Tahun 2011-2015 (dalam – rupiah dan Persen).....	III-23
Tabel III.21	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Proporsinya Terhadap Pendapatan – APBD Pemerintah Kota Magelang	III-24
Tabel III.22	Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2011-2015	III-25
Tabel III.23	Kontribusi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2011-2015	III-25
Tabel III.24	Kontribusi Bantuan khusus dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2011-2015	III-25
Tabel III.25	Realisasi dan Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota magelang Tahun 2014- 2018 (dalm Satuan Rupiah).....	III-26
Tabel III.26	Struktur Belanja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2011-2015	III-31
Tabel III.27	Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Magelang Tahun 2011-2015	III-31
Tabel III.28	Realisasi dan Prediksi Belanja Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2014- 2018 (dalam Satuan Rupiah).....	III-32
Tabel III.29	Realisasi dan Prediksi Pembiayaan Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2014- 2018 (dalam Satuan Rupiah).....	III-35
Tabel IV.1	Penjelsan Visi	IV-2
Tabel IV.2	Keterkaitan Tujuan Sasaran Indikator dan Target	IV-10
Tabel IV.3	Keterkaitan Sasaran STRategi dan Arah Kebijakan	IV-15
Tabel IV.4	Keterkaitan antara Tema RKP, RKPd Provinis dan RKPd Kota Magelang	IV-20
Tabel IV.5	Koneksitas antara Prioritas Nasional, Provinsi dan Prioritas Tema RKPd Kota Magelang	IV-34
Tabel IV.6	Koneksitas antara Sasaran dan Program prioritas Kota Magelang dengan Prioritas - Nasional dan Provinsi.....	IV-51
Tabel IV.2	Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah	IV-138
Tabel IV.2	Inovasi Program /Kebijakan Pembangunan Daerah	IV-141

Tabel V.1	Kategorisasi Program Prioritas	V-1
Tabel V.2	Program Prioritas Tema Tahun 2017.....	V-2
Tabel V.3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	V-5
Tabel V.4	Program Prioritas Hasil Musrenbang RKPD Kota Magelang Tahun 2017.....	V-5
Tabel V.5	Tema FGD dalam Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2017	V-15
Tabel V.6	Program Penanggulangan Kemiskinan	V-16
Tabel V.7	Program Kota Layak ANak	V-24
Tabel V.8	Program Manajemen Persampahan	V-36
Tabel V.9	Program Penguatan Implementasi MKSB	V-37
Tabel V.10	Penguatan Implementasi RAD MEA.....	V-40
Tabel V.11	Penguatan Implementasi Masterplan Smart City	V-42
Tabel V.12	Penguatan Implementasi Masterplan Smart City	V-42
Tabel V.13	Program Prioritas SDGs	V-47
Tabel V.14	Akomodasi Pokok Pokok Pikiran DPRD	V-55
Tabel V.15	Rekapitulasi Pagu Indikatif Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017	V-90

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD tahun 2017	I-4
Gambar I.2	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya	I-8
Gambar I.3	Kedudukan Dokumen RKPD Kota Magelang dengan Dokumen Perencanaan dan Spasial	I-9
Gambar II.1	Peta Kependudukan Kota Magelang di Jawa Tengah	II-1
Gambar II.2	Luas daerah Kota Magelang	II-2
Gambar II.4	Peta Rencana Pola Ruang Kota Magelang	II-12
Gambar II.5	Peta Rawan Bencana Kota Magelang	II-14
Gambar II.6	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang (dalam persen) Tahun 2011-2012 dan Prediksi 2013 - 2015	II-26
Gambar II-7	Grafik Perkembangan laju Inflasi Kota Magelang Tahun 2010-2015 (%).....	II-28
Gambar II-8	Grafik Perkembangan laju Inflasi Kota Magelang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2015 (dalam %).....	II-29
Gambar II-9	Grafik Perkembangan Perkembangan Rumah Tangga dengan Status Sejahtera.....	II-33
Gambar II-10	Perbandingan IPM Indonesia, Jawa Tengah dan Kota Magelang Tahun 2010-2015.....	II-37
Gambar II-11	Pertumbuhan IPM Kota Magelang Tahun 2010-2015 dan Prediksi Tahun 2016.....	II-37
Gambar II-12	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Magelan Tahun 2011-2015	II-38
Gambar II.13	Perkembangan Pengeluaran per Kapita disesuaikan di Kota Magelang 2011-2014	II-39
Gambar II.14	Percepatan Pertumbuhan IPM dan IPG Kota Magelang 2011-2014 (%)	II-41
Gambar II.15	Grafik APK PAUD Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-50
Gambar II.16	APM dan APK SD/MI/Paket A Tahun 2011-2015	II-51
Gambar II.17	APM dan APK SMP/MTS/Paket B Tahun 2011-2015	II-52
Gambar II.18	APTs SD/MI/PAket A/dan SMP/MTS/Paket B Tahun 2011-2015.....	II-53
Gambar II.19	Jumlah Putus Sekolah Tingkat SD SMP di Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-53
Gambar II-20	Angka Kelulusan SD dan SMP di Kota Magelang Tahun 2011-2015.....	II-54
Gambar II.21	Grafik Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP, SMP ke SMA Tahun 2011-2015.....	II- 54
Gambar II.22	Angka Partisipasi Murni (APM) dan (APK) SMA/MA/Paket C Kota Magelang Tahun 2011-2015.....	II-55
Gambar II.23	APS SMA/SMK/MA/Paket C Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-56
Gambar II.24	Jumlah Siswa Putus Sekolah tingkat SMA Kota Magelang Tahun 2011-2015.....	II-56
Gambar II.25	Angka Kelulusan SMA Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-57
Gambar II.26	Grafik Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-60
Gambar II.27	Jumlah Kematian Ibu di Kota Magelang	II-62
Gambar II.28	Jumlah kasus kematian bayi di Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-63
Gambar II.29	Jumlah Penduduk yang Bersekolah di Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-88
Gambar II.30	Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-89
Gambar II.31	Kasus yang terselesaikan melalui PB.....	II-89
Gambar II.32	Target dan Realisasi Kerja ditempatkan	II-90
Gambar II.33	Penempatan Tenaga Kerja menurut Mekanismenya	II-90

Gambar II.34	Besaran KHL dan UMK Kota Magelang Tahun 2011-2015.....	II-91
Gambar II.35	Capaian Indikator Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2010-2015.....	II-92
Gambar II.37	Grafik Perkembangan Luas lahan Pertanian Tahun 2007-2015	II-96
Gambar II.38	Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-124
Gambar II.39	Jumlah Produksi Perikanan budidaya Kota Magelang Tahun 2011-2015	II-130
Gambar II.40	Perkembangan Jumlah Wisatawan Kota Magelang Tahun 2011-2015.....	II-133
Gambar II.41	Grafik Pergembangan Luas Lahan Sawah Tahun 2011-2015	II-137
Gambar II.42	Perkembangan Populasi Ternak Sapi Perah & Sapi Potong Tahun 2010-2015.....	II-141
Gambar II.42	Realisasi PAD terhadap potensi PAD Tahun 2010-2014	II-172
Gambar II.43	Level Kematangan smart city	II-176
Gambar II.44	Grafik Radar Tingkat Kematangan Kota Magelang berdasar GSCM	II-176
Gambar II.45	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Magelang Tahun 2011-2015.....	II-302
Gambar II.46	Perbandingan Koefisien Gini Kota Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2010-2014.....	II-309
Gambar III.1	Grafik Prediksi Struktur Ekonomi Kota Magelang Tahun 2017	III-3
Gambar III.2	Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan perolehan PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kota Mage- -lang Tahun 2011-2014 dan Prediksi Tahun 2015-2021	III-3
Gambar III.3	Grafik Prediksi Kontribusi NTB lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (dalam persen) -Tahun 2015-2017.....	III-4
Gambar III.4	Grafik Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Lapangan usaha (dalam Persen) Tahun 2015 dan -2017	III-5
Gambar IV.1	Gambar Tema dan arah Kebijakan Tahun 2017	IV-19
Gambar IV.2	Piramida Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.....	IV-25
Gambar IV.3	Konstelasi Kota Magelang dengan Kawasan Sekitarnya	IV-121
Gambar IV.4	Peta Rencana Pembagian BWK.....	IV-123
Gambar IV.5	Peta Pola Ruang BWK I	IV-124
Gambar IV.6	Peta Pola Ruang BWK II	IV-126
Gambar IV.7	Peta Pola Ruang BWK III	IV-127
Gambar IV.8	Peta Pola Ruang BWK IV	IV-129
Gambar IV.9	Peta Pola Ruang BWK V	IV-131
Daftar Matriks Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2017		V-92

BAB. I

PENDAHULUAN

-  **Latar Belakang**
-  **Landasan Hukum**
-  **Hubungan Antar Dokumen**
-  **Maksud dan Tujuan**
-  **Sistematika RKPD**



RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA MAGELANG TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makna pembangunan daerah harus secara strategis mampu dirasakan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat. Pada prinsipnya pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah salah satunya adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin baiknya Indeks Pembangunan Manusia serta indikator indikator lainnya yang terukur.

Hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, yang pada hakekatnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sangat diperhatikan. Sedangkan daerah juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan kekhasan daerah.

Dihadapkan pada idealisme tersebut, maka sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional dan terutama bagi daerah.

Merujuk pada kerangka legislasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur dan mengamankan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Mengingat aturan pelaksanaan di bawah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 belum terbit, maka kiranya masih relevan menjadikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD dijadikan sebagai pijakan penyusunan perencanaan.

Memenuhi amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kota Magelang telah menyusun dokumen RPJPD Kota Magelang 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009. Untuk dokumen RPJMD Tahap I (2005-2010) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005, sedang RPJMD Tahap II (2011-2015) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015. Sementara itu RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Magelang No 1 Tahun 2016.

1.1.1 Proses Penyusunan

RKPD Kota Magelang Tahun 2017 ini merupakan tahun pertama perencanaan tahap III RPJMD 2016-2021 dan disusun ke dalam 6 (enam) tahapan yaitu : persiapan penyusunan RKPD; penyusunan rancangan awal RKPD; penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2017, Tim penyusun terdiri dari personil lintas OPD di jajaran OPD yang dipandang mampu untuk memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu untuk memudahkan koordinasi penyusunan, dilakukan melalui rapat rapat koordinasi serta memanfaatkan media sosial melalui group Tim Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2017. Hal ini merupakan terobosan teknokratis yang cukup memberikan kemudahan dan kecepatan koordinasi kerja tim.

Proses penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif maupun politis.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan rentang cakup agar substansi RKPD Kota Magelang semakin efektif, maka berbagai terobosan dan inovasi baik inovasi proses perencanaan maupun inovasi pada tataran kebijakan telah dilakukan yang melibatkan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom up/top down maupun politis.

Merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD merupakan tahapan selanjutnya. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja OPD dan melakukan sinkronisasi dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Selanjutnya perlu melakukan evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Provinsi yang merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan Provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan

evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana.

Dengan memperhatikan relevansinya kebijakan, pada prinsipnya sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu daerah karena beberapa karakteristik:

Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.

1. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Sementara itu kebijakan lainnya memiliki dampak strategis bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik:

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Dalam praktiknya, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2017, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.

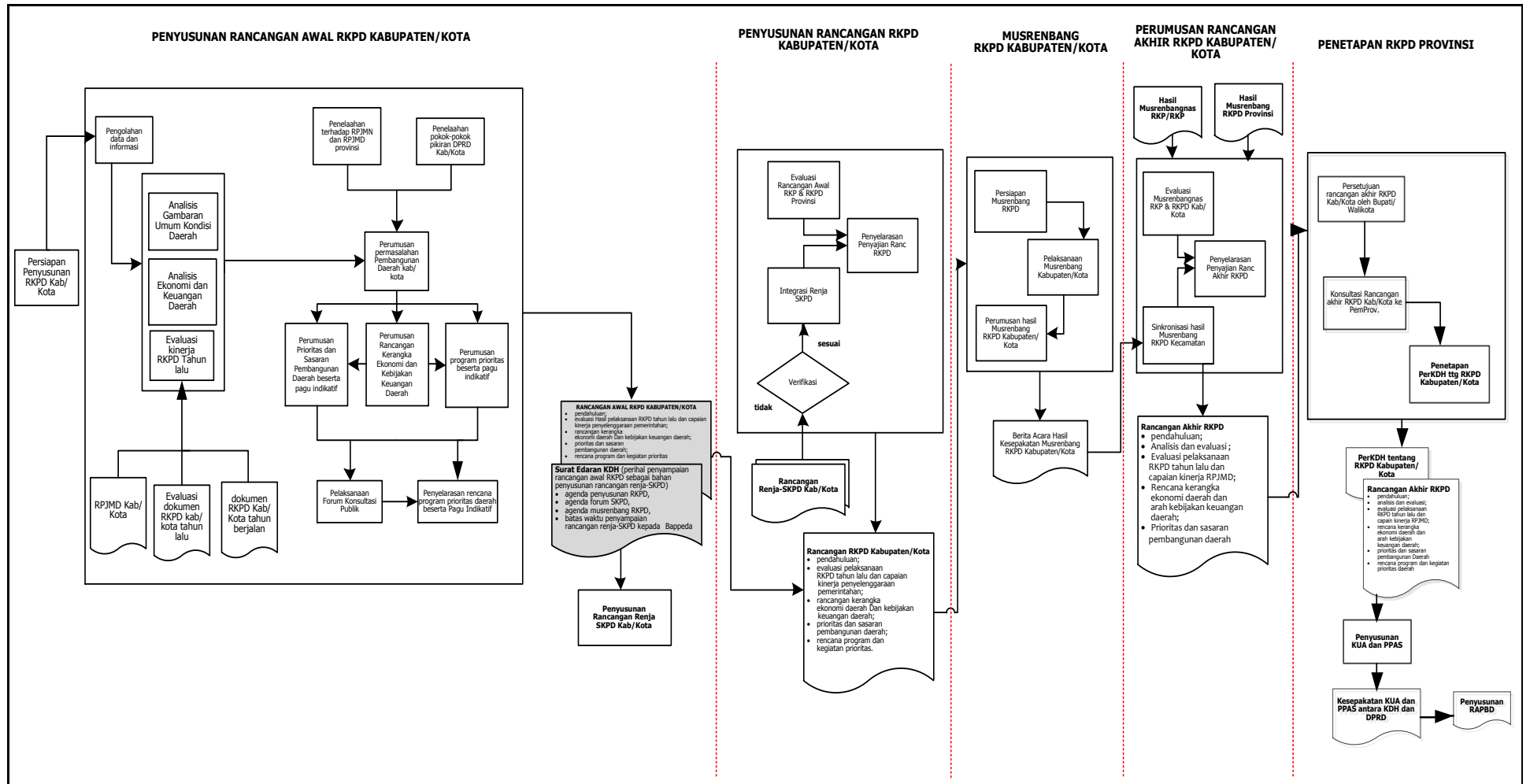
Pelaksanaan Forum SKPD (pada saat itu masih menggunakan nomenklatur SKPD) yang mengkombinasikan hasil Musrenbang Kecamatan sekaligus mengkonfirmasi hasil FGD yang diakomodir oleh SKPD terkait sesuai Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan dan Berita Acara Hasil FGD menjadi langkah selanjutnya yang ditempuh. Setelah itu dilakukan Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap OPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja OPD pada OPD terkait.

Hasil rancangan RKPD ini sebagai bahan dalam Musrenbang tingkat Kota Magelang yang merupakan forum konfirmasi atas keseluruhan hasil Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan serta hasil rancangan Renja OPD yang telah terverifikasi.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang kemudian dilakukan penyelarasan Rancangan Akhir RKPD dengan memperhatikan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Rancangan RKP pada saat Musrenbang Nasional. Hasil Penyelarasan Akhir ini kemudian dilakukan konsultasi kepada TAPD sebelum ditetapkan melalui Peraturan Walikota.

Proses perumusan RKPD Kota Magelang Tahun 2017 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:

Gambar I.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2017



1.1.2 Prinsip dan Pendekatan Penyusunan

Penyusunan RKPD Kota Magelang tahun 2017, disusun dengan metode swakelola. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa RKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan publik, sehingga menjadi kewajiban aparat pemerintah daerah untuk menyusun dan mengimplementasikannya.

Untuk memastikan output hasil penyusunan yang berkualitas, taat regulasi dan operasional, maka pendekatan dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2017 melibatkan beberapa prinsip sebagai berikut :

Tabel I.1

Prinsip Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2017

PRINSIP	INDIKATOR
KETERKAITAN	Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kota Magelang Tahun 2017 yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD
	Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kota Magelang Tahun 2017 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Provinsi 2017
KONSISTENSI	Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Magelang Tahun 2015 dengan isu strategis
	Terwujudnya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan
	Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2017 dengan pagu anggaran OPD
	Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2017 dengan program/kegiatan OPD
KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN	Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan Kota Magelang Tahun 2017
	Tersedianya kerangka kebijakan keuangan daerah Kota Magelang Tahun 2017
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan manusia
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan sektor unggulan
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan tata kelola dan reformasi birokrasi
KETERUKURAN	Tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program, dan output kegiatan tahun 2017 dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) –berdasarkan matrik
	Tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya
INOVASI KEBIJAKAN	Tersedianya kebijakan pembangunan yang inovatif yang ditunjukkan oleh penerapan konsep holistik- tematik, integratif, dan spasial dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
	Tersedianya informasi usulan dan justifikasi penetapan hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dalam lingkup Kota Magelang

Merujuk pada regulasi, maka penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2017 dilakukan dengan beberapa pendekatan penyusunan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom up/top down serta politik. Sedangkan secara *out of the box*, untuk memberikan ruang kreatif dan inovasi agar pencapaian pembangunan dapat terakselerasi dengan baik, maka inovasi baik secara proses perencanaan maupun kebijakan program pembangunan menjadi sudut pendekatan lain yang ditempuh. Detil konfigurasi pendekatan penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel I.2

Pendekatan Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2017

KRITERIA	PARAMETER
DARI BAWAH (BOTTOM-UP)	1. Usulan dari Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2017
	2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2017
DARI ATAS (TOP-DOWN)	3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2017 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2017
	4. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2017 dan RKP 2017
TEKNOKRATIK	5. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2017
	6. Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kota Magelang Tahun 2017
POLITIK	7. Pertimbangan dan Pendapat DPRD Kab/Kota dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2017
	8. Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2017
INOVASI	9. Inovasi pada proses perencanaan
	10. Inovasi program dan kebijakan pembangunan daerah

Sebagai catatan, pada saat proses penyusunan RKPD Kota Magelang 2017 dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Magelang 2016-2021. Namun demikian, Visi dan Misi serta program unggulan kepala daerah terpilih digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Magelang 2017. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI tanggal 4 Maret 2016 Nomor 050/795/SJ tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, dimana dalam butir 2.a disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD 2017 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RKP 2017 serta memperhatikan visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Sasaran pokok RPJPD mengacu pada Bab IV RPJPD Kota Magelang 2005-2025, yang secara spesifik mengatur target yang harus dicapai dalam Tahap ke-III RPJPD yaitu untuk tahun 2016-2020. Sedangkan arah kebijakan tahun 2017 sesuai dengan arah kebijakan yang ada dalam Rancangan Awal RPJMD 2016-2021, khususnya pada Bab VI dan tidak mengalami perubahan sampai dengan penetapan RPJMD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 ini adalah:

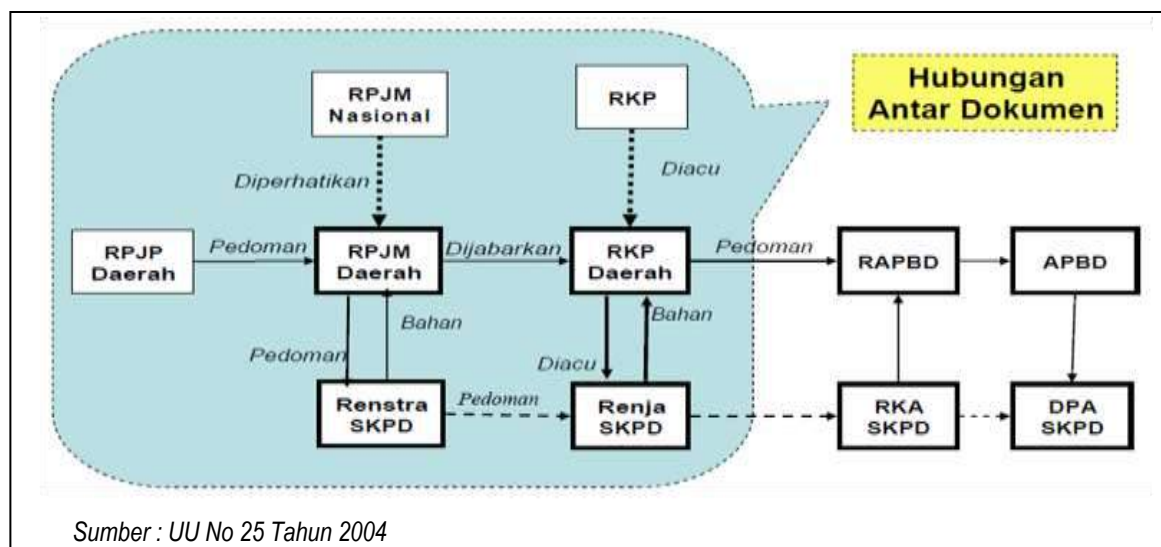
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018;
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;

26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/020753 Tanggal 23 Desember 2015 perihal Arah Kebijakan Pembangunan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2017 bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jateng.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, Rancangan awal RKPD Kota yang berpedoman pada RPJMD Kota tersebut juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Oleh karena itu, RKPD Kota Magelang tahun 2016 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Magelang Tahun 2011-2015, mengacu pada RPJMD Provinsi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018, serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019.

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2017 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang), yaitu sebagai berikut:



Gambar I.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya

Selain itu penyusunan RPKD Kota Magelang tidak terlepas dari dokumen tata ruang wilayah sebagaimana penjelasan gambarl berikut ini :

Sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/020753 Tanggal 23 Desember 2015 perihal Arah Kebijakan Pembangunan sebagai pedoman penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2017 bagi Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, diharapkan setiap daerah agar Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku dengan :

1. Memperhatikan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, yaitu :
 - a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
 - b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
 - c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
 - d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
 - e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
 - f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
 - g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis.
 - h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
 - i. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
2. Mepedomani hasil evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan dokumen rencana tata ruang.
3. Mepedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
4. Memperhatikan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) Tahun 2016-2030.
5. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2015 dan rencana target capaian Tahun 2016, baik yang dibiayai dari APBD (Provinsi dan Kabupaten/Kota), APBN, dana-dana bantuan (diantaranya DAK, DII, Dekon, TP, Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa, Hibah, Bansos) dan Masyarakat/Swasta serta hasil evaluasi RAPBD Tahun 2015 dan 2016.
6. Mengutamakan upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya, dengan sasaran pokok meliputi:
 - a. **Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2017** diprediksi **sebesar 5,4-5,8%** dengan asumsi : beroperasinya berbagai infrastruktur pendukung pembangunan wilayah; berjalannya realisasi investasi pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan semakin optimalnya potensi kawasan industri; meningkatnya penggunaan kredit perbankan untuk investasi; UMR Jawa Tengah yang kompetitif; serta membaiknya perekonomian negara tujuan ekspor Jawa Tengah.
 - b. **Inflasi** diprediksi pada kisaran **4,5±1** dengan asumsi : terjaminnya kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan dan terjaganya ekspektasi positif masyarakat; optimalnya informasi ketersediaan kebutuhan masyarakat (pasokan, harga dan distribusi); meningkatnya koordinasi TPID baik tingkat

provinsi dan kabupaten/kota; sinergisnya dukungan pembiayaan pembangunan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

- c. **Percepatan** penurunan angka **kemiskinan** menjadi **11,30 - 10,83%** pada Tahun 2017 melalui strategi : (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; (iii) pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Selain itu dibangun sinergitas program dan pendanaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui : pola sharing program dan pendanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota (akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur) dan pengembangan kegiatan-kegiatan tematik (TMMD Tematik, Kuliah Kerja Nyata Tematik/kerjasama dengan Perguruan Tinggi serta CSR Tematik) dengan fokus prioritas lokasi pada daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi.

- d. **Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka** menjadi **4,49 - 4,27%** pada Tahun 2017.

7. Memperhatikan kewenangan dan tugas fungsi masing-masing kabupaten/kota dan OPD Provinsi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Memperhatikan dan mempedomani aturan, prosedur dan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai 3 TEPAT (sasaran, administrasi dan waktu), dengan pendekatan :
 - a. Holistik, yaitu pendekatan multisektor (koordinatif);
 - b. Integratif, yaitu mempunyai fokus dan tujuan yang jelas;
 - c. Kewilayahan, yaitu jelas lokus yang akan disasar.
9. Meningkatkan kemanfaatan, keterkaitan dan keserasian pembangunan antar sektor, wilayah serta pelaku pembangunan secara lebih terpadu dan berkesinambungan berbasis pengembangan potensi kawasan, melalui pelaksanaan multilateral meeting antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota serta melibatkan pihak swasta/dunia usaha.
10. Membangun dan meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk partai politik dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus guna mendorong peran aktif masyarakat dan menjamin hak masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik sebagai mekanisme *check and balances*.
11. Memantapkan kondusivitas wilayah/daerah sebagai antisipasi kerawanan sosial.
12. Meningkatkan kelengkapan, akurasi, validasi dan pemanfaatan data dan informasi dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah.
13. Meningkatkan sinkronisasi dan kualitas perencanaan penganggaran pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengutamakan belanja publik/produktif yang mampu memberikan dampak/multiplier effect tinggi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3.4 RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031

Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2017 secara konsisten diupayakan untuk memperhatikan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 guna mewujudkan pembangunan yang komprehensif, berwawasan lingkungan dengan ketaatan terhadap tata dan pola ruang. Dengan demikian pengendalian terhadap pelanggaran dan

penggunaan lahan tetap terjaga. Pada akhirnya tujuan-tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan tetap berwawasan lingkungan dan mampu mengurangi kesejangan antar wilayah di Kota Magelang.

1.3.5 RPJPD 2005-2025

RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025 dipayungi dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025. Dalam Bab IV diatur beberapa sasaran pokok yang harus dicapai diakhir tahun perencanaan. Sedangkan Tahapan yang harus dicapai pada tahun 2016-2020 adalah pada dasarnya untuk meningkatkan dan memantapkan upaya menyejahterakan masyarakat melalui optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani dan media masa, khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan. Hal itu pada akhirnya untuk membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat dengan memanfaatkan peran dan fungsi Kota Magelang sebagai kota jasa.

1.3.6 RPJMD Kota Magelang

RKPD Kota Magelang Tahun 2017 ini merupakan tahun pertama perencanaan RPJMD Kota Magelang 2016-2021, untuk dilaksanakan tahun 2017. Artinya merupakan tahun pertama paska berakhirnya RPJMD Kota Magelang 2011-2015. Tema dasar perencanaan tahun pertama adalah **Membangun Kolaborasi dan Konektivitas**: melalui penumbuhan kolaborasi dan konektivitas antar pelaku pembangunan, membangun konektivitas antara wilayah, memantapkan fungsi kota jasa, membangun landasan untuk mengembangkan kota cerdas, kota inklusif dan kota hijau serta pemerataan pelayanan dan penyelesaian permasalahan yang masih ada.

1.3.7 Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2017 juga memperhatikan beberapa dokumen pembangunan sektoral baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kota Magelang. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di maksud antara lain : Masterplan Kota Sejuta Bunga, Pencapaian *SDGs*, *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, RAD Pengurangan Resiko Bencana dan Pedoman PUG di Jawa Tengah.

1.3.8 Rencana Kerja (Renja) – OPD

Di level OPD, dokumen Renja OPD di susun dalam basis tahunan. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2017 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2017. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Renja OPD, adalah sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan **Rancangan Renja OPD Tahun 2017**, adalah sebagai berikut:
 - a. Mengacu pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2017, yang digunakan sebagai acuan perumusan program,

kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD Tahun 2017, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2017.

- b. Mengacu pada Renstra OPD Tahun 2016-2021, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD.
 - c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
 - d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja OPD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
 - e. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan OPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
 - f. Substansi Matriks sebagai bagian tidak terpisahkan dari rancangan Renja OPD Tahun 2017 memuat:
 - 1) program dan kegiatan;
 - 2) lokasi kegiatan;
 - 3) indikator kinerja;
 - 4) kelompok sasaran; dan
 - 5) pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2018
 - g. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
 - h. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan **IKU** (Indikator Kinerja Utama) dan **SPM** (Standar Pelayanan Minimal) dengan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
 - i. Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 merupakan pelaksanaan Renja tahun pertama Renstra OPD Kota Magelang Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, penyusunan Renja OPD Tahun 2017 perlu mempertimbangkan indikator kinerja dan target indikator kinerja Renja 2017 dapat mengacu pada target indikator kinerja RPJMD 2016-2021 maupun Renstra OPD 2016-2021.
2. Mengakomodir hasil-hasil **Focus Group Discussion (FGD)** terkait prioritas yang akan dilaksanakan oleh OPD Tahun 2017.
 3. Memperhatikan Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) sesuai Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara,

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan harapan agar dapat memberikan koridor dan standar format baik dari segi cakupan substansi maupun tingkat kedetailan dokumen Renja-OPD sehingga dapat memudahkan proses penelaahan dalam rangka penyusunan Rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2017.

4. Untuk mendukung akuntabilitas dari program-kegiatan yang diusulkan dalam Renja OPD harus dilengkapi dengan Pra RKA dengan mengimplementasikan **Analisis Standar Belanja (ASB)** Kota Magelang .
5. Menyiapkan program kegiatan yang akan disusun dengan strategi **Pengarusutamaan Gender (PUG)**, yaitu :
 - a. Program/kegiatan berdampak langsung bagi masyarakat, mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender serta Indeks Pemberdayaan Gender;
 - b. Program/Kegiatan utamadari masing-masing OPD sesuai urusan yang menjadi kewenangannya sesuai Indikator Kinerja Kunci, Indikator SPM dan Indikator Utama OPD yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada Indeks Pembangunan Gender;
 - c. Program/kegiatan yang sifatnya terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau kelembagaan;
 - d. Program/kegiatan pada huruf a dan b merupakan program/kegiatan yang berkelanjutan, dan **masing-masing OPD minimal 1 Program dan 2 Kegiatan strategis responsive gender**;
 - e. Menyusun **Gender Budget Statement (GBS)** atau Pernyataan Anggaran Gender yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari (pra) **RKA OPD Responsif Gender Tahun 2017**.
 - f. GBS **harus dilampirkan** dan akan diverifikasi bersamaan dengan verifikasi Rancangan Renja OPD Tahun 2017.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017.
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2017.

1.4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

PERATURAN WALIKOTA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA MAGELANG TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian berbagai aspek kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan dan isu strategis.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2015 dan perkiraan tahun 2016, serta tantangan dan target makro ekonomi tahun 2017 yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2015 dan capaian kinerja yang direncanakan, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan usulan OPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2016 yang lalu.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH





Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Berisi simpulan dan penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kota Magelang Tahun 2017 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Kota Magelang, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB. II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

-  **Aspek Geografi dan Demografi**
-  **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**
-  **Aspek Pelayanan Umum**
-  **Aspek Daya Saing Daerah**
-  **Rekapitulasi Capaian Kinerja Hingga Tahun**
-  **Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Magelang
- Hingga Tahun 2015**
-  **Permasalahan Pembangunan Daerah**
-  **Dinamika Lingkungan Strategis**
-  **Analisa Faktor Internal dan Eksternal**
-  **Isu Strategis**



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Kota Magelang memiliki entitas unik yang potensial untuk dapat dimaksimalkan. Sebagai salah satu Kota tertua di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan luas sekitar 0.06% dari keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Tengah, kota ini terletak tepat di tengah pulau Jawa seakan menjadi penghubung kedua kota utama di bagian tengah Pulau Jawa melalui jalur arteri primernya. Letak Kota ini secara historis-morfologis berbentuk linear dengan kecenderungan arah utara-selatan yang dominan menyebabkan kuatnya jalur transportasi yang menghubungkan Yogyakarta dan Semarang. Hal ini menjadi keunggulan lokal dan daya tarik yang bersifat geografis alami. Keberhasilan manajemen kota akan menjadikan Kota Magelang sebagai Kota jasa yang sejahtera sebagaimana Visi Jangka Panjang Kota Magelang Tahun 2005-2025.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Dari sisi administratif Kota Magelang terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang serta berada di persilangan lalu lintas ekonomi dan transportasi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung. Kota Magelang juga berada pada persimpangan jalur wisata lokal maupun regional antara Yogyakarta-Borobudur-Kopeng-Ketep Pass dan dataran tinggi Dieng, disamping obyek wisata yang berada di dalam Kota Magelang sendiri yaitu Kawasan wisata Taman Kyai Langgeng. Letak strategis Kota Magelang ini juga ditunjang dengan penetapan Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Kawasan ini merupakan andalan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi unggulan utama meliputi industri besar, menengah dan kecil yang menghasilkan berbagai produk; pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa, termasuk perguruan tinggi dan simpul pariwisata. Posisi tersebut menjadikan Kota Magelang sebagai kota kecil dengan nilai strategis dalam katagori sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah (PKW) yang didukung dengan kondisi sarana prasarana yang memadai sehingga diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap daerah sekitarnya dan juga mampu melayani beberapa kabupaten dan Kota yang berada disekitarnya.

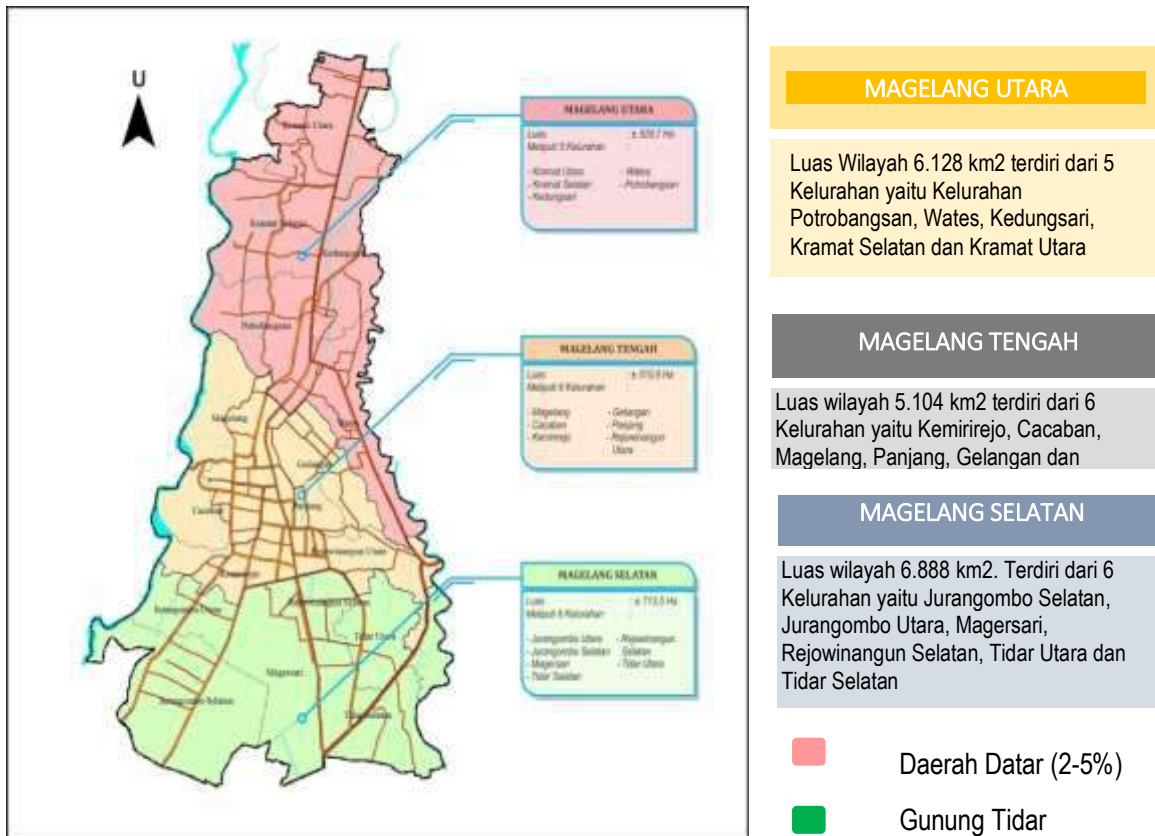


Sumber : Dokumen Perencanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis , 2015

Gambar 2.1 Peta Kedudukan Kota Magelang di Jawa Tengah

Batas wilayah administratif Kota Magelang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Elo/Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Progo/ Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.



Gambar II.2 Luas daerah Kota Magelang menurut Kecamatan

Luas wilayah Kota Magelang 1.812 Ha (18,12 km²) secara administratif terbagi atas 3 kecamatan dan 17 kelurahan yang rata-ratanya luas wilayahnya tidak lebih dari 2 km². Kelurahan yang memiliki wilayah terluas adalah Kelurahan Jurangombo Selatan yaitu sekitar 226 ha (atau sekitar 12,49% dari luas total) dan yang terkecil adalah Kelurahan Panjang yaitu sekitar 35 Ha (atau sekitar 1,9% dari luas total). Gambaran secara rinci luas tiap kecamatan/ kelurahan di Kota Magelang Tahun 2013, dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel II.1
Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang

No.	Kecamatan dan Kelurahan	Luas / Area (Km ²)	Persentase (%)
01.	KEC. MAGELANG SELATAN	6,89	38,01
	1. Kel. Jurangombo Utara	0,58	3,17
	2. Kel. Jurangombo Selatan	2,26	12,49
	3. Kel. Magersari	1,38	7,60
	4. Kel. Tidar Utara	0,97	5,35
	5. Kel. Tidar Selatan	1,27	7,00

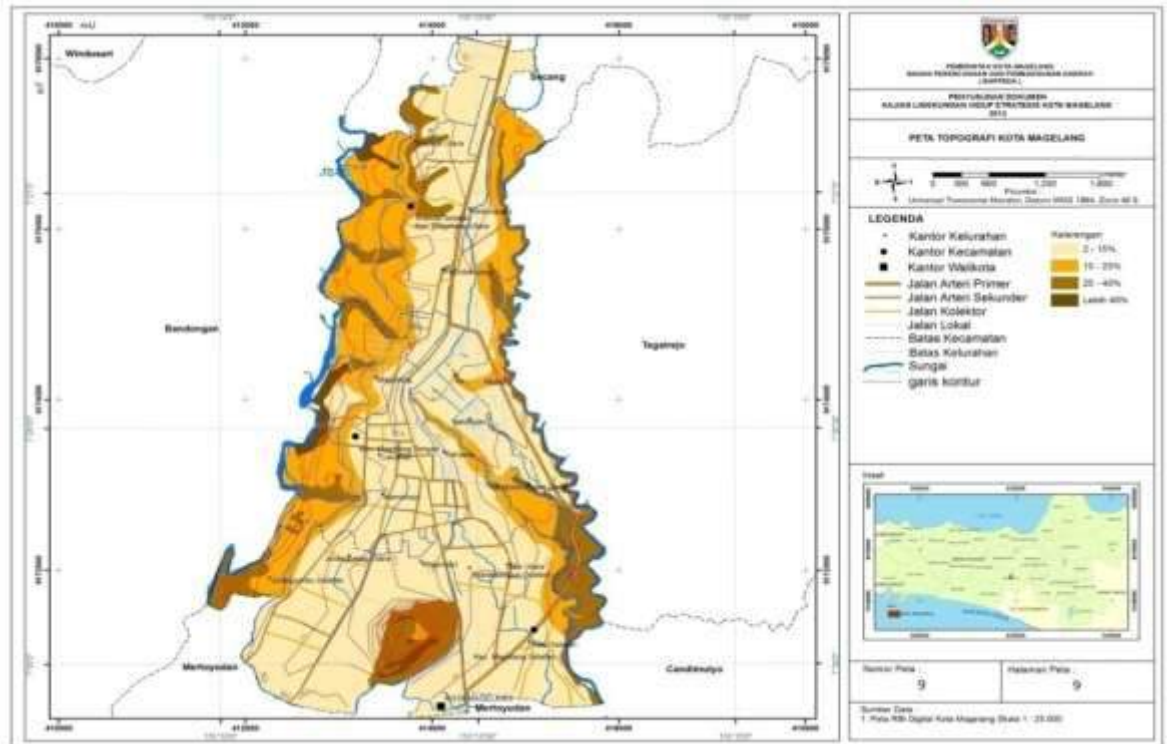
No.	Kecamatan dan Kelurahan	Luas / Area (Km ²)	Persentase (%)
	6. Kel. Rejowinangun Selatan	0,43	2,39
02.	KEC. MAGELANG TENGAH	5,10	28,17
	1. Kel. Magelang	1,25	6,88
	2. Kel. Kemirirejo	0,88	4,86
	3. Kel. Cacaban	0,83	4,56
	4. Kel. Rejowinangun Utara	0,99	5,48
	5. Kel. Panjang	0,35	1,90
	6. Kel. Gelangan	0,81	4,49
03.	KEC. MAGELANG UTARA	6,13	33,82
	1. Kel. Wates	1,17	6,47
	2. Kel. Potrobangsari	1,30	7,17
	3. Kel. Kedungsari	1,33	7,36
	4. Kel. Kramat Utara	0,86	4,77
	5. Kel. Kramat Selatan	1,46	8,05
	JUMLAH	18,12	100,00

Sumber: Kota Magelang Dalam Angka, 2015

Berdasarkan gambaran tersebut di atas dapat dilihat bahwa peluang pengembangan wilayah tetap diupayakan di seluruh wilayah agar keramaian kota bisa tersebar merata ke hampir seluruh sudut kota. Beberapa tahun terakhir Pemerintah Kota memberi perhatian lebih terhadap pengembangan wilayah utamanya pada pada wilayah perbatasan, daerah pinggiran Kota dan beberapa area strategis yang di anggap mampu untuk berkembang dan memacu pertumbuhan beberapa daerah di sekitarnya.

2.1.1.2 Topografi

Secara topografi dan fisiografis, Kota Magelang dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : KLHS Kota Magelang, 2015

Gambar II.2 Gambar peta topografi Kota Magelang

Kota Magelang merupakan wilayah dataran yang di kelilingi oleh Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro dan Sumbing, Pegunungan Gianti, Menoreh, Andong dan Telomoyo. Kota Magelang termasuk dataran rendah dengan sudut kemiringan relatif bervariasi. Morfologi pendataran antar gunung api, medannya landai, berelief sedang-halus. Dilihat dari ketinggiannya, Kota Magelang berada di ketinggian antara 375–500 mdpl dengan titik ketinggian tertinggi pada Gunung Tidar yaitu 503 mdpl, dan keberadaannya selain sebagai kawasan lindung juga berfungsi sebagai paru-paru kota yang menjadikan iklim Kota Magelang selalu berhawa sejuk dan sebagai daerah hijau kota (paru-paru kota). Keberadaan Gunung Tidar yang merupakan hutan lindung dengan kemiringan hingga 30–40% ini berada di sebelah timur kompleks AKMIL.

Kemiringan topografi yang terjal berada di bagian barat (sepanjang Sungai Progo) dan di sebelah timur (di sekitar Sungai Elo) sampai dengan kemiringan 15-30%. Di sekitar daerah timur kompleks AKMIL ke Utara hingga daerah di sekitar RSJ Magelang, dengan kemiringan 2–5%.

Dengan kondisi topografi tersebut, maka kawasan permukiman pada umumnya berlokasi di daerah yang relatif datar, tetapi dengan kondisi luas lahan yang terbatas ada kemungkinan arah pengembangan permukiman ke daerah-daerah yang bertopografi dan kolektor kontur tajam mengingat terbatasnya wilayah Kota Magelang sementara kebutuhan masyarakat terhadap permukiman semakin hari semakin meningkat. Hal ini yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah khususnya akan bahaya longsor pada daerah permukiman yang dibangun pada daerah dengan topografi dan kontur yang tajam. Bentuk fisik Kota Magelang saat ini relatif memanjang mengikuti jaringan jalan arteri. Dengan kondisi fisik tersebut, kecenderungan pertumbuhan alamiah Kota Magelang adalah ke arah utara dan selatan dengan dominasi area terbangun di daerah yang mempunyai topografi relatif datar.

2.1.1.3 Geologi

Struktur dan karakteristik geologi Kota Magelang berupa dataran alluvium yang tersebar sampai di bagian selatan dan tempat-tempat di pinggir Sungai Progo dan Sungai Elo. Dataran ini tersusun oleh batuan hasil rombakan bebatuan yang lebih tua, yang bersifat lepas.

Kondisi geologi Kota Magelang juga tidak bisa dilepaskan dari keberadaannya di tengah wilayah Kabupaten Magelang, dimana secara umum wilayah tersebut tersusun dari 4 formasi batuan, yaitu batuan sedimen (berupa formasi andesit tua yang terdiri dari breksi, andesit, tufa, tufa lapili, anglomerat dan lava andesit), batuan gunung api (berupa material yang dihasilkan gunung api yang terdiri dari breksi piroklastik, lelehan lava, batuan pasir tufaan dan lahar), batuan beku trobosan (berupa andesit dan desit) serta batuan endapan alluvial (berupa material lepas terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lanau, lumpur dan lempung disepanjang tepian sungai-sungai besar seperti sungai Progo dan Elo). Dalam klasifikasi tersebut, formasi batuan di Kota Magelang termasuk batuan gunung api, sehingga litologi yang menempati Kota Magelang sebagian besar batuan pasir tufaan (lepas) dan breksi.

Potensi kandungan tanah Kota Magelang sebagian besar berupa batu pasir lepas dan konglomerat. Hasil produksi gunung berapi yang merupakan endapan kwarter. Ditinjau dari satuan morfologi, pendataran alluvium tersebar sampai di bagian selatan dan tempat-tempat di pinggir Sungai Progo dan Sungai Elo. Tersusun oleh batuan hasil rombakan batuan yang lebih tua, yang bersifat lepas. Umumnya berada pada ketinggian antara 250 – 350 m, ber relief halus dengan kemiringan sebesar 3-8 %. Daerah ini dialiri oleh Sungai Progo dan Sungai Elo yang mengalir dengan pola Sum Meander.

Litologi yang menempati daerah Kota Magelang sebagian besar berupa batu pasir lepas dan konglomerat. Hasil produksi gunung berapi yang merupakan endapan kwarter. Sifat batuan pasir dan breksi/konglomerat sangat porous (kelulusan air tinggi), serta penurunan terhadap beban kecil, mendekati nol (0). Daya dukung terhadap bangunan berkisar antara 5kg/ cm² – 19 kg/ cm².

Dilihat dari kondisi yang ada di wilayah Kota Magelang berkaitan dengan keadaan geologi maka di dalam pembangunan perlu diingat terkait dengan kondisi Kelerengan alam yang cukup curam di sekitar Sungai Progo dan Sungai Elo serta pengaturan treatment pembuangan – pembuangan limbah agar tidak mencemari lingkungan mengingat porositas tanah yang cukup tinggi. Kewaspadaan pada resiko bencana terutama pada daerah bantaran sungai dengan kelerengan curam adalah tanah longsor mengingat sebagian besar tanah berupa batuan pasir dan breksi/ konglomerat yang memiliki kelulusan air yang tinggi.

2.1.1.4 Hidrologi

Kota Magelang merupakan kota dengan pasokan air melimpah. Sumber air di Kota Magelang dapat digolongkan dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan merupakan air limbah dan air hujan. Potensi air hujan perlu dilestarikan dengan membuat sumur resapan. Sedangkan potensi air tanahnya juga tergantung pada pelestarian pemanfaatan air permukaan yaitu air hujan. Kota Magelang dibatasi juga oleh dua sungai yang cukup besar yaitu Sungai Elo di sebelah Timur dan Sungai Progo di sebelah Barat. Keberadaan Sungai Progo dan Sungai Elo menurut hasil penelitian geologi yang dilakukan PDAM Kota Magelang didapat bahwa aquifer terdapat di kedalaman 10 – 30 m dan 90 – 120 m.

Air tanah di Kota Magelang kurang menguntungkan jika dikembangkan mengingat air tanah yang ada mayoritas cukup dalam dengan aquifer yang dangkal, sehingga sulit untuk dikembangkan (dipompa). Untuk kebutuhan air bersih Kota Magelang sampai saat ini bergantung pada sumber-sumber air yang ada di luar wilayah Kota Magelang yaitu dari mata air yang berada di wilayah Kabupaten Magelang dan satu-satunya mata air yang berada di Kawasan Kota Magelang adalah Mata Air Tuk Pecah. Di kawasan Kota Magelang juga terdapat 2 (dua) saluran air yaitu: (i) Kali Bening (Kali Kota), dan (ii) Kali Progo Manggis. Saluran tersebut juga dapat berfungsi sebagai saluran irigasi teknis dan juga dapat berfungsi sebagai saluran irigasi dan sumber air untuk menyirami taman-taman kota, maka potensi tersebut merupakan penunjang untuk mencapai kebersihan dan keindahan kota.

Berdasarkan data pemakaian air minum pada tahun 2014 sebesar 7.405.096m³ dan perkiraan kebutuhan air bersih perorangan adalah sebesar 60 liter/hari maka jika dikalikan dengan jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2014 kapasitas mata air yang tersedia masih mampu untuk mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Magelang walaupun masih mengandalkan sumber air yang berasal dari kabupaten Magelang. Ketersediaan air dirasa masih mencukupi kebutuhan akan air bersih masyarakat Kota Magelang selama tidak ada faktor lain yang mempengaruhi distribusi seperti kebocoran pipa distribusi.

2.1.1.5 Klimatologi

Kota Magelang mempunyai temperatur maksimum 32°C dan terendah 20°C, dengan kelembaban sekitar 88,8%, dengan kondisi yang demikian maka Kota Magelang termasuk wilayah beriklim sejuk. Berdasarkan data iklim diketahui rata-rata curah hujan bulanan di kawasan berkisar antara 234 mm dan termasuk dalam kategori Bulan Basah (>200 mm per bulan) sepanjang tahun. Rata-rata curah hujan harian (7.10 mm) memungkinkan ketersediaan air untuk tanaman tercukupi.

Tabel II.3
Rata-Rata Curah Hujan Per Hari Kota Magelang (mm) Tahun 2009-2015

Bulan	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
01. Januari	24,31	9,07	20,90	22,58	19,04	16,61	16,92
02. Februari	21,10	27,95	20,89	23,44	18,63	22,05	27,76
03. Maret	29,33	12,74	34,10	24,69	22,00	19,21	22,09
04. April	32,65	16,05	16,05	20,28	15,74	23,47	22,50
05. Mei	23,94	11,71	24,00	11,89	17,94	17,77	6,63
06. Juni	10,13	12,75	21,50	20,40	10,44	8,25	44,67
07. Juli	0,00	18,23	40,00	10,00	17,00	13,57	0,00
08. Agustus	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
09. September	0,00	9,77	0,00	0,00	2,00	2,33	0,00
10. Oktober	7,11	16,91	16,11	16,80	20,44	16,91	0,00
11. November	10,78	5,37	12,43	20,42	13,00	12,56	12,87
12. Desember	14,47	6,67	28,17	17,70	14,25	23,12	28,55
Jumlah	173,82	159,41	234,15	188,20	170,48	170,59	181,99
Rata-rata	14,49	13,28	19,51	15,68	14,21	15,10	21,74

Sumber: Kota Magelang dalam Angka, 2015.

Menurut data Badan Pengelolaan Sumber Daya Air, dalam kurun waktu Tahun 2015 rata – rata curah hujan per hari sebanyak 21.74 mm dengan total curah hujan sepanjang tahun 2015 sebanyak 181.99 mm.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 maka jumlah rata-rata curah hujan perhari mengalami peningkatan. Kondisi pada tahun 2015 merupakan rata –rata curah hujan tertinggi dalam tujuh tahun terakhir ini. Perlu diwaspadai juga adanya bencana terkait dengan tingginya curah hujan pada bulan – bulan tertentu seperti bulan Pebruari, Maret, April, Juni dan Desember. Curah hujan meningkat sangat tajam pada bulan Juni di mana rata-rata curah hujan per harinya 44.67 mm. Apabila diperhatikan dari topografi, geologi, hidrologi dan klimatologi Kota Magelang serta posisinya yang dikelilingi oleh sungai dengan kontur wilayah yang curam dan memiliki kemiringan relatif tinggi khususnya pada daerah dengan kelerengan curam serta sifat tanah yang memiliki kelulusan air yang tinggi sehingga perlu diperhatikan kemungkinan adanya bencana seperti longsor, banjir atau bencana lain seperti wabah penyakit terkait dengan cuaca yang ekstrim.

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Sesuai dengan karakteristik perkotaan, dari luas total wilayah Kota Magelang sebesar 1.812 Ha, tata guna lahan di Kota Magelang didominasi pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman sementara lahan pertanian semakin tahun semakin berkurang luasnya atau menunjukkan pola yang menurun seiring dengan perkembangan Kota Magelang sebagai Kota Jasa yang semakin pesat. Penggunaan tanah di Kota Magelang terdiri dari akomodasi dan rekreasi, hutan, industri non pertanian, industri pengolahan pertanian, instalasi, jalan, jasa kesehatan, jasa pelayanan umum, jasa pemerintahan, jasa pendidikan, kuburan/makam, lembaga/usaha, pasar, pekarangan, perbengkelan, perdagangan umum, pergudangan, perikanan, perkantoran, pertanian tanah basah, pertanian tanah kering, perumahan teratur, perumahan tidak teratur, prasarana transportasi, rekreasi dan akomodasi, rel kereta api, saluran, sarana olahraga, sarana peribadatan, sungai, tanah kota, dan tanah kosong.

Kebutuhan masyarakat akan lahan menjadikan Lahan pertanian banyak yang berubah peruntukannya menjadi rumah tinggal, perumahan, pekarangan, gudang maupun untuk kegiatan ekonomi seperti ruko dan rumah makan.

Dari luas lahan secara keseluruhan di Kota Magelang pada tahun 2015, terdiri dari lahan untuk penggunaan Tanah Sawah sekitar 191.76 Ha dan Tanah Bukan Sawah (Tanah Kering) sekitar 1.620,23 Ha. Dalam tiga tahun terakhir ini alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Magelang relatif cukup besar. Potensi pengembangan wilayah di Kota Magelang sebagaimana kawasan berkarakteristik perkotaan banyak mengalami kendala terkait dengan keterbatasan lahan. Data dari kantor BPN Magelang mencatat adanya perubahan alih fungsi lahan di tahun 2014 seluas 3.0046 Ha dengan rincian alih fungsi lahan sawah seluas 2.43 Ha, dan tegal/kebun seluas 0,57 Ha yang beralih fungsi menjadi perumahan/halaman/ bangunan seluas 3.0046 Ha. Tingginya Alih fungsi lahan pertanian tersebut bisa dilihat dari beberapa tahun terakhir ini. Data Luas lahan pertanian pada tahun 2009 seluas 210.55 Ha menjadi 191.76 Ha pada tahun 2015 atau mengalami penyusutan setiap tahunnya rata–rata seluas $\pm 2,68$ Ha.

Tingginya alih fungsi lahan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi ciri khas wilayah perkotaan. Meningkatnya alih fungsi lahan setiap tahun memberi tantangan bagi jaminan ketahanan pangan masyarakat Kota Magelang selain juga membawa konsekuensi penurunan PDRB sektor pertanian, namun di sisi lain kemungkinan mempengaruhi kenaikan PDRB sektor jasa konstruksi dan sektor jasa lainnya. Dampak lain dari alih fungsi lahan yang perlu menjadi perhatian terkait dengan alih fungsi lahan atau tantangan lainnya terkait dengan peningkatan lahan terbangun di Kota Magelang adalah menurunnya tingkat dan fungsi tanah menjadi

lahan kritis, menurunnya daya dukung lingkungan dan ketidaktercapaian target 30% dari Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang serta keterbatasan kebutuhan penyediaan air bersih dan fasilitas umum seiring dengan pertumbuhan bangunan di kota Magelang.

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau seringkali sulit ditemukan khususnya diperkotaan, karena tingginya pemanfaatan ruang untuk kawasan terbangun. Lahan kritis dapat didefinisikan sebagai lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Fungsi yang dimaksud pada definisi tersebut adalah fungsi produksi dan fungsi tata airnya. Fungsi produksi berkaitan dengan fungsi tanah sebagai sumber unsur hara bagi tumbuhan dan fungsi tata air berkaitan dengan fungsi tanah sebagai tempat berjangkarnya akar dan menyimpan air tanah.

Gambaran penggunaan lahan di Kota Magelang dari tahun 2009 hingga tahun 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.4
Luas Tanah (Ha) Menurut Penggunaannya di Kota Magelang 2009-2015

No	Jenis Sawah	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	TANAH SAWAH	201.42	199.96	197.64	194.20	191.76
	Pengairan Teknis	201.42	199.96	197.64	194.20	191.76
	Pengairan ½ Teknis	-	-	-	-	-
	Tadah Hujan	-	-	-	-	-
	Lainnya	-	-	-	-	-
2.	TANAH KERING	1,610.58	1,612.03	1,614.35	1,617.79	1,620.23
	Pekarangan/lahan Untuk Bangunan dan Halaman	1.339.31	1.341.48	1.344.45	1.348.13	1.351.14
	Tegal/kebun/Ladang/ Huma	10.11	9.25	8.60	8.36	7.79
	Tambak	-	-	-	-	-
	Kolam/Tebat/Empang	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68
	Perkebunan/Hutan Rakyat	99.56	99.56	99.56	99.56	99.56
	Industri	51.97	51.97	51.97	51.97	51.97
	Lainnya (Makam dll)	102.95	103.09	103.09	103.09	103.09
	JUMLAH	1,812	1,812	1,812.	1,812	1,812

Sumber: Kota Magelang dalam Angka Tahun 2011-2015, diolah.

Kecenderungan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan fisik sarana prasarana perkotaan termasuk permukiman menyebabkan berkurangnya lahan pertanian selain itu masalah yang timbul di antaranya, Kepemilikan lahan yang dimiliki masyarakat sendiri sehingga sulit dikendalikan, terbatasnya ketersediaan lahan yang akan dijadikan dan ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan sebagai penopang pangan baik tingkat Provinsi maupun nasional serta penyusutan luas lahan pertanian tersebut membawa dampak pada penurunan produksi dan produktivitas pertanian di Kota Magelang

Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satu upaya perlindungan lahan pertanian produktif terhadap alih fungsi lahan sawah melalui Peraturan Daerah Kota Magelang terkait LP2B. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Magelang perlu merumuskan kebijakan insentif kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani yang lahan sawahnya ditetapkan sebagai LP2B.

Selain hal tersebut perlu adanya upaya tersendiri dari Pemerintah Kota Magelang untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan – kawasan

permukiman yang padat penduduk. Sementara untuk meningkatkan ketahanan pangan dan peningkatan kontribusi sektor pertanian, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam lima tahun terakhir di antaranya pengelolaan lahan pertanian secara produktif, pengembangan kultur jaringan, Perencanaan Pengembangan Minawisata dan Perencanaan Pengembangan Budidaya jamur, Perencanaan Pengembangan Urban Farming dan Perencanaan Pengembangan Florikultura.

2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Faktor-faktor yang merupakan daya dukung kota, dan yang menjadi potensi bagi pengembangan kota telah diakomodasi kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Magelang Tahun 2005-2025 dan juga dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2011-2031. Kedua dokumen tersebut menjadi landasan bagi pengembangan wilayah Kota Magelang, agar diarahkan untuk bisa lebih merata kesemua wilayah kota.

Potensi Pengembangan wilayah di Kota Magelang, akan lebih diarahkan untuk menjadi kota jasa. Faktor pendukung sebagai kota jasa, adalah posisi strategis kota yang berada pada simpul jalur ekonomi dan wisata regional yang dipadukan dengan penataan fisik wajah kota yang sudah dilaksanakan sampai tahun 2013, akan menjadi potensi yang dominan dalam mempertegas fungsi kota sebagai kota jasa.

Potensi Pengembangan Kota Magelang sebagaimana terdapat dalam Rencana Pola Ruang Kota Magelang adalah sebagai berikut :

A. Kawasan Lindung

Arahan penggunaan lahan kawasan lindung Kota Magelang berdasarkan Rencana Pola Ruang Kota Magelang Tahun 2011-2031 adalah:

- 1. Kawasan Perlindungan Setempat** meliputi : sempadan sungai dan ruang terbuka hijau (hutan kota). Kota Magelang memiliki kawasan hutan lindung dan hutan wisata yang keberadaannya penting untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau kota, yaitu kawasan konservasi Gunung Tidar. Kelestarian Gunung Tidar perlu di jaga dan dipertegas fungsinya, jika tidak semakin lama kawasan ini akan semakin mengalami degradasi lingkungan, menginggit letak kawasan ini sangat strategis dinilai dari sudut pandang investasi.
- 2. Kawasan Rawan Bencana Longsor** merupakan kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana longsor. Bencana tanah longsor merupakan melimpahnya volume air yang berlebih umumnya dari air hujan yang tidak bisa diserap oleh lapisan tanah dan vegetasi di kawasan resapan air daerah (hulu) sehingga semakin lama air dapat mengikis tanah dan akhirnya terjadi longsor. Daerah-daerah yang termasuk kawasan rawan bencana longsor di Kota Magelang meliputi daerah yang terdapat di sekitar DAS Progo dan Elo.

B. Kawasan Budidaya

Arahan penggunaan lahan kawasan budidaya Kota Magelang berdasarkan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 adalah :

- 1. Kawasan Permukiman** diarahkan menyebar di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada di wilayah Kota Magelang dengan luas keseluruhan \pm 701,36 ha. Secara eksisting perumahan di Kota Magelang memiliki kepadatan yang sangat tinggi, sehingga pengembangannya dimasa mendatang diarahkan secara vertikal. Selain itu diperlukan pengembangan rumah susun untuk mencukupi kebutuhan perumahan bagi masyarakat

yang tidak memiliki lahan untuk bermukim. Kawasan yang masih memungkinkan adanya pengembangan permukiman adalah BWK III dan V.

2. **Kawasan Perdagangan/Jasa** diarahkan di sekitar jalan arteri primer di BWK IV khusus untuk perdagangan/jasa skala regional, jalan arteri sekunder di BWK I, BWK II, BWK IV dan BWK V dan jalan lokal primer/sekunder di BWK I dengan luas keseluruhan $\pm 120,86$ ha.
3. **Kawasan Perkantoran** diarahkan untuk dikembangkan di kawasan perkantoran antara lain meliputi perkantoran pusat pemerintahan, kantor dinas/instansi pemerintahan Kota Magelang, kantor instansi vertikal di Kota Magelang, kantor pemerintahan kecamatan, maupun sarana perkantoran niaga. Fasilitas/ kegiatan lain yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan ekonomi, sosial dan budaya yang layak dan dapat dikembangkan di kawasan perkantoran antara lain meliputi kantor pemerintah kelurahan, kantor niaga dan perbankan, koperasi, kantor jasa, gedung pertemuan, museum, fasilitas kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, rekreasi/olah raga skala lokal, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan perkantoran diarahkan di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada di wilayah Kota Magelang dengan luas keseluruhan $\pm 48,76$ ha.
4. **Kawasan Pendidikan** diarahkan menyebar di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada di wilayah Kota Magelang agar sistem pelayanan kepada masyarakat merata. Luas keseluruhannya $\pm 107,92$ ha.
5. **Kawasan Kesehatan.** Rencana pengembangan fasilitas kesehatan diarahkan tersebar pada seluruh wilayah perkotaan guna pemeratakan sistem pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan kawasan kesehatan diarahkan di BWK I, BWK II, BWK III dan BWK V dengan luas keseluruhan $\pm 42,46$ ha.
6. **Kawasan Peribadatan.** Ketersediaan fasilitas peribadatan di Kota Magelang jika dilihat pada kondisi eksisting yang ada saat ini sudah sangat mencukupi. Sehingga dalam pengembangannya hanya berorientasi pada perbaikan atau peningkatan kondisi dari fasilitas peribadatan yang ada. Pengembangan kawasan peribadatan penting diarahkan di seluruh unit BWK yang ada di Kota Magelang dengan luas keseluruhan $\pm 2,80$ ha.
7. **Kawasan Rekreasi/Olah Raga.** Rencana pengembangan kawasan rekreasi di Kota Magelang diarahkan dalam dua bentuk, yaitu *rekreasi terbuka* dan *rekreasi tertutup*. Untuk rekreasi terbuka direncanakan dengan memanfaatkan arena olahraga, lapangan dan taman-taman kota yang direncanakan ada di setiap pusat kawasan sebagai sarana interaksi sosial bagi masyarakatnya. Untuk rekreasi yang tertutup direncanakan berbentuk sarana rekreasi bioskop, tempat olahraga, arena permainan dan sebagainya. Fasilitas rekreasi tersebut berada pada kawasan pusat kota dan sub pusat kota, serta kawasan perdagangan terutama yang berupa pasar swalayan.
Fasilitas dan/atau kegiatan lain yang mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang layak dan dapat dikembangkan di kawasan rekreasi/ olahraga antara lain fasilitas rekreasi/olah raga skala lokal, kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, gedung pertemuan, gedung kesenian/ pertunjukan, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan rekreasi olah raga diarahkan di BWK II, BWK III dan BWK V dengan luas keseluruhan $\pm 89,39$ ha.
8. **Kawasan Industri/Perdagangan.** Dalam penataan ruang untuk industri, diprioritaskan untuk industri sedang dan industri kecil/rumah tangga yang rata-rata berkembang di kawasan permukiman, sehingga perlu diatur dengan dukungan penyediaan prasarana sarana seperti pengelolaan limbah dan *showroom* sekaligus outlet

sebagai sarana promosi dan pemasaran. Pengembangan kawasan industri/ perdagangan diarahkan di **BWK IV** dengan luas keseluruhan ± 68,03 ha.

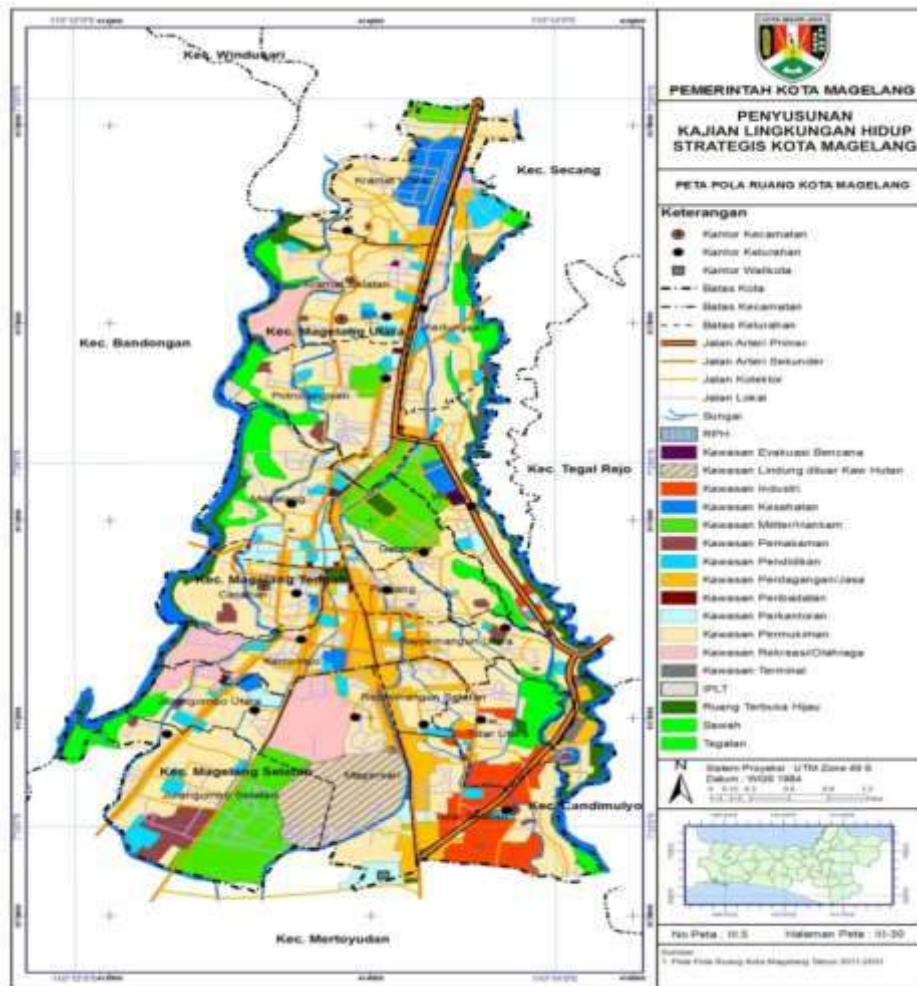
9. **Kawasan Militer.** Sebagaimana kondisi yang ada saat ini, di luar kawasan-kawasan milik TNI yang pemanfaatannya untuk fungsi non kemiliteran lain (seperti lapangan golf, gedung pertemuan A. Yani, gelanggang remaja dan lainnya) berada di BWK II, BWK III dan BWK V dengan luas keseluruhan ± 151,05 ha.
10. **Kawasan Pertanian.** Pengembangan kawasan pertanian diarahkan di BWK II, BWK III, BWK IV dan BWK V dengan luas keseluruhan ± 185,56 ha.
11. **Kawasan Terbuka Non Hijau.** Adapun RTNH yang ada di Kota Magelang, meliputi : plaza, parkir, lapangan olahraga, tempat bermain dan rekreasi, pembatas (median jalan), dan koridor rumah. Pengembangan RTNH merupakan salah satu alternatif untuk pengganti RTH yang bisa di terapkan pada kawasan-kawasan padat Kota.
12. **Kawasan Transportasi (Terminal).** Sarana (fasilitas) terminal yang diarahkan untuk dikembangkan di kawasan terminal antara lain meliputi terminal regional, terminal angkutan kota dan terminal barang. Fasilitas dan/atau kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dikembangkan di kawasan terminal antara lain fasilitas perdagangan skala lokal (kios), kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan terminal diarahkan di BWK I, BWK II dan BWK IV dengan luas keseluruhan ± 4,85 ha.
13. **Kawasan Pemakaman.** Kawasan pemakaman merupakan kawasan budidaya yang mempunyai fungsi utama dan satu-satunya sebagai tempat pemakaman umum ataupun taman makam pahlawan. Pengembangan kawasan pemakaman diarahkan di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada di Kota Magelang dengan luas keseluruhan ± 35,65 ha.
14. **Kawasan Khusus Sektor Informal.** Pengembangan kawasan khusus sektor informal untuk PKL secara umum dapat dikembangkan di daerah-daerah yang merupakan simpul-simpul perdagangan, memiliki tingkat aksesibilitas untuk dijangkau dengan berjalan kaki, ruang terbuka aktif, daerah-daerah yang memiliki tingkat keramaian dan merupakan area bebas yang cukup luas dan memiliki potensi untuk dikunjungi penduduk sebagai lokasi untuk bersantai dan melepas lelah. Arah pengembangan kawasan khusus sektor informal untuk PKL dapat dikembangkan dan ditata di kawasan Jalan Jenggolo dengan melakukan penutupan akses di malam hari di Jalan Pajajaran dan Jalan Pajang. Kawasan khusus ini diperuntukan bagi pedagang kuliner khas Kota Magelang dan sekitar (yang berupa makanan unggulan). Area untuk mewadahi PKL di waktu siang hari adalah di sepanjang jalan Pemuda dengan memanfaatkan jalur lambat. Pengembangan PKL di sebelah utara Kota Magelang akan diakomodasi di Kawasan Armada Estate dengan membuka waktu jualan di siang dan malam hari di sekitar tanah kosong milik Armada Estate.

Rencana Tata Ruang Kota Magelang secara Umum membagi Kota Magelang menjadi 5 (lima) Bagian Wilayah Kota (BWK) selain itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang juga memuat adanya kebijakan dan strategi dalam penataan ruang yaitu adanya Kawasan strategis kota artinya wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota Magelang terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Rencana pengembangan kawasan strategis Kota meliputi:

- a. Kawasan strategis untuk pertahanan dan keamanan;

- b. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- c. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- d. Kawasan strategis sosial budaya.

Secara spasial rencana pola ruang Kota Magelang dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :



Sumber : KLHS RTRW Kota Magelang, 2013

Gambar II.4

Peta Rencana Pola Ruang Kota Magelang

Skenario pengembangan Kota Magelang adalah dengan menciptakan pusat-pusat kegiatan baru yang berfungsi sebagai generator pertumbuhan ekonomi. Kota Magelang juga dirancang dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan perekonomian, kesehatan, dan pendidikan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota dan/atau regional. Potensi pengembangan wilayah Kota Magelang pada masa-masa mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan Sidotopo sebagai pusat pelayanan pendidikan, perdagangan dan jasa, pada kawasan ini direncanakan untuk mewedahi pendirian perguruan tinggi negeri;
- b. Kawasan Sukarno Hatta sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi dan perdagangan jasa, pada kawasan ini sudah disiapkan sebidang lahan untuk pembangunan pasar induk yang dipadukan dengan pergudangan;
- c. Kawasan Kebonpolo sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi dan perdagangan,

- d. Kawasan Alun-alun sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan perkantoran, Kawasan Alun-Alun juga sebagai kawasan pusat kota yang mewadahi kegiatan rekreasi masyarakat;
- e. Kawasan GOR Samapta sebagai pusat pelayanan rekreasi dan olahraga, saat ini sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan stadion madya dengan kapasitas 15.000 penonton, disamping itu terdapat juga kolam renang standar internasional;
- f. Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan kesehatan;
- g. Kawasan Objek Wisata Taman Kyai Langgeng sebagai kawasan pusat pelayanan rekreasi dan olahraga, dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kawasan, maka pada lokasi sekitar Taman Kyai Langgeng telah dibangun Showroom Mudalrejo yang mewadahi pemasaran hasil-hasil UMKM Kota Magelang.

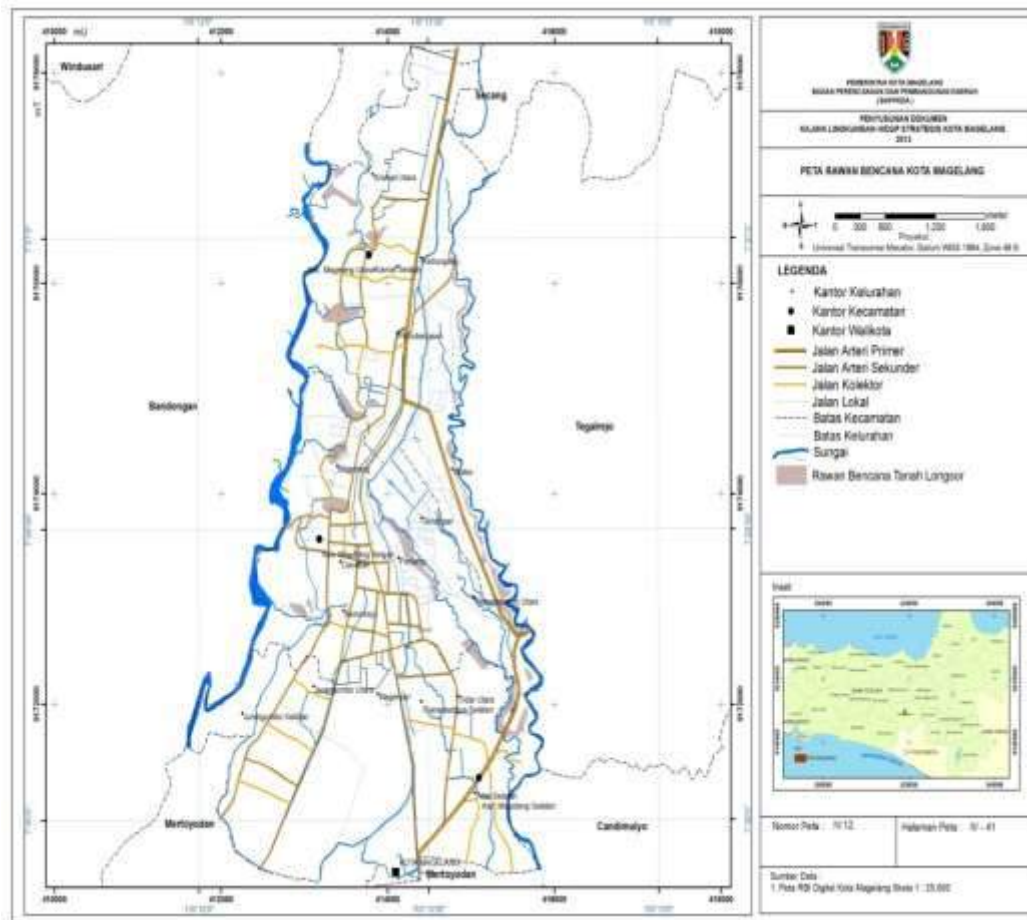
2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi topografi, geologi, hidrologi, dan klimatologi Kota Magelang, perlu kewaspadaan terhadap bencana seperti longsor atau bencana lain khususnya pada daerah dengan kelerengan curam. Bentuk-bentuk bencana yang sering terjadi di Kota Magelang pada umumnya adalah bencana tanah longsor. Kondisi tersebut terutama disebabkan karena sebagian wilayah Kota Magelang termasuk dalam wilayah dengan tingkat kelerengan yang cukup tinggi. Pada musim penghujan ada beberapa wilayah di Kota Magelang yang rawan terjadi longsor, khususnya di bagian barat yaitu pada lereng-lereng yang cukup terjal di sepanjang Sungai Progo dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Elo. Data yang ada menunjukkan bahwa terdapat wilayah khusus rawan bencana longsor karena sifat kelerengan tanah dan persungaiannya, yaitu: a). Wilayah Barat Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Progo meliputi Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Magelang Utara, Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Magelang, Kelurahan Cacaban; b) Wilayah Timur Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Elo meliputi Kelurahan Kedungsari, Rejowinangun Utara dan Kelurahan Wates. Upaya mitigasi bencana perlu dilakukan mengingat banyak rumah penduduk dibangun pada daerah lereng yang rentan longsor.

Tidak hanya longsor, bencana yang sangat memungkinkan terjadi di wilayah perkotaan adalah kebakaran. Kelurahan yang memiliki potensi (rawan) bencana kebakaran karena faktor kepadatan penduduk dan jaringan jalan yang sempit (3-6 meter) yaitu: Kramat Utara dan Selatan, Potrobangsari, Cacaban, Panjang, Kemirirejo, Rejowinangun Utara, Rejowinangun Selatan. Banyaknya pemukiman padat penduduk dengan jalan sempit menyulitkan evakuasi dan pemadaman bencana kebakaran. Untukantisipasi terhadap bencana kebakaran, kebijakan Pemerintah Kota Magelang adalah meningkatkan manajemen penanganan bencana kebakaran, peningkatan kapasitas personil di unit pemadam kebakaran, dan meningkatkan kualitas mobil pemadam kebakaran.

Dilihat dari kejadian dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, di Kota Magelang telah terjadi beberapa bencana antara lain: Dampak ikutan letusan gunung Merapi tahun 2010 berupa limpasan pengungsian; Limpasan abu vulkanik: Angin puting beliung; Kebakaran pasar, dan dampaknya pada perdagangan di Kota Magelang; Endemik penyakit menular DBD (Demam Berdarah) dan Muntaber; Pohon tumbang. Hal yang perlu diwaspadai terkait dengan bencana banjir perkotaan adalah banjir yang diakibatkan banjir limpasan atau limpasan air drainase karena hujan dan drainase tersumbat dan banjir bandang atau banjir kiriman yang melanda wilayah tepi

sungai Progo dan Elo. Wilayah-wilayah yang memiliki potensi rawan bencana banjir karena faktor air melimpah antara lain adalah: Potrobangsari, Cacaban, Kemirirejo, Panjang, Tidar Utara, Rejowinangun Utara.



Sumber : Dokumen Perencanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kota Magelang, 2013

Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Kota Magelang

Selain hal tersebut di atas, bencana yang perlu mendapat perhatian dari adalah konflik sosial. Prioritas pencegahan dan penanganan bencana sosial perlu dialokasikan pada wilayah yang memiliki: pusat perdagangan dan tujuan pergerakan atau transportasi; wilayah dengan tingkat sosial ekonomi yang berada di level pra-sejahtera; wilayah dengan kondisi pemukiman belum tertata atau kumuh, perkembangan kawasan yang kurang sehat dengan tingkat kepadatan tinggi.

Fungsi penanggulangan bencana di Kota Magelang mengacu pada pedoman yang ada pada Pola Penanggulangan Bencana Nasional Dalam Rangka untuk Mengurangi Dampak yang Ditimbulkan oleh Bencana Terutama di Daerah Perkotaan. Adapun strategi umum yang diterapkan Pemerintah Kota Magelang terkait dengan penanggulangan bencana meliputi tahap pencegahan, tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan tahap rekonstruksi.

Tabel II.

Tabel Peristiwa Bencana Alam dan Wabah Penyakit di Kota Magelang Tahun 2012 -2015

No	Keterangan	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah lokasi bencana di Kota Magelang	0	26	48	30
2	Jumlah perkiraan kerugian akibat bencana (juta rupiah)	0	445	164,45	505.58
3	Jumlah wabah /Endemi pada manusia (kasus)				
a.	Cikungunya	0	22	60	2
b.	Demam Berdarah	47	152	69	158
c.	Hepatitis	0	0	11	2
d.	Tuberkolosis	NA	100	120	158
e.	AIDS	NA	5	7	10
f.	HIV	NA	10	19	14

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2015

2.1.2 Aspek Demografi

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kota Magelang jumlah penduduk pada tengah tahun 2015 diprediksi sebanyak 121.653 jiwa sementara jumlah penduduk Kota Magelang pada pertengahan tahun 2014 sebanyak 120.930 jiwa. Jumlah penduduk ini berada pada wilayah Kota Magelang yang memiliki luas 18.12km². Apabila kita melihat perkembangan tingkat kepadatan penduduk di Kota Magelang pada beberapa tahun terakhir menunjukkan trend yang meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk di Kota Magelang yang meningkat. Semakin tinggi kepadatan penduduk mengindikasikan pada tingkat kerapatan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun, sehingga bisa dikatakan semakin tinggi beban lingkungan hidup

Tabel II.5
Kepadatan Penduduk di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk (jiwa)	119.210	119.647	120.158	120.615	120.952
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	6.579	6.603	6.631	6.656	6.675

Sumber: BPS, 2008-2015 (proyeksi menggunakan data dasar hasil sensus Penduduk 2010)

Data kepadatan penduduk Kota Magelang berdasarkan DispendukCapil Kota Magelang menyebutkan bahwa pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk sebanyak 132.261 jiwa, kepadatan penduduk Kota Magelang sebesar 7.299 jiwa/km². Jumlah ini sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan data tahun 2014 dan tahun 2013, yang mana pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Magelang sebanyak 131.703 jiwa dengan tingkat kepadatan 7.268 jiwa/km². Sementara pada tahun 2013 dengan jumlah penduduk 130.836 jiwa, tingkat kepadatan penduduknya sebesar 7.221 jiwa/km². Kepadatan penduduk pada tahun 2011 dan 2012 berturut – turut sebesar 7.150 jiwa/km² dan 7.227 jiwa/km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 129.556 jiwa dan 130.955 jiwa pada tahun 2012.

Data Dispendukpencapil Kota Magelang menunjukkan kepadatan penduduk tertinggi tahun 2015 di Kelurahan Rejowinangun selatan (20.849 jiwa/km²), disusul Kelurahan Panjang (19.454 jiwa/km²) dan Rejowinangun Utara (12.640 jiwa/km²). Sementara Kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif kecil ada di Jurangombo Selatan (3.122 jiwa/km²) dan Kelurahan Tidar Selatan (4.567 jiwa/km²). Kepadatan penduduk yang relatif tinggi ini merupakan salah satu permasalahan bagi pemerintah terkait dengan penataan

ruang dan kota serta pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Keterbatasan lahan untuk permukiman merupakan masalah yang khas bagi wilayah perkotaan terutama bagi Kota Magelang yang merupakan kota terkecil dengan wilayah yang terbatas. Data kepadatan penduduk secara lebih rinci per kelurahan akan ditampilkan pada tabel di bawah ini

Tabel II.6
Kepadatan Penduduk per kelurahan di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Kecamatan / Kelurahan	2011		2012		2013		2014		2015	
	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km ²)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km ²)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km ²)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km ²)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km ²)
MAGELANG SELATAN										
Jurangombo Utara	3.810	6.626	4.236	7.367	3.848	6.691	4.302	7.482	4.337	7.478
Jurangombo Selatan	7.711	3.406	6.864	3.032	7.821	3.468	6.951	3.070	7.056	3.122
Magersari	7.772	5.644	8.682	6.305	7.834	5.689	8.780	6.376	8.816	6.388
Tidar Utara	7.630	7.865	8.394	8.654	7.672	7.909	8.493	8.756	8.540	8.804
Tidar Selatan	5.550	4.374	5.793	4.565	5.569	4.388	5.748	4.530	5.787	4.567
Rejowinangun Selatan	7.665	17.702	8.954	20.679	7.767	17.938	8.986	20.753	8.965	20.849
MAGELANG TENGAH										
Magelang	10.359	8.314	7.963	6.391	6.963	5.88	7.913	6.351	7.913	6.330
Kemirirejo	5.016	5.700	6.230	7.080	4.993	5.674	6.026	12.606	6.190	7.034
Cacaban	7.590	9.189	8.237	9.971	7.768	9.404	8.214	9.944	8.231	9.917
Rejowinangun Utara	10.359	10.432	12.407	12.494	10.566	10.640	12.518	12.606	12.514	12.640
Panjang	5.741	16.641	6.864	19.896	5.722	16.596	6.766	19.612	6.809	19.454
Gelangan	7.294	8.961	8.284	10.177	7.344	9.022	8.250	10.135	8.298	10.244
MAGELANG UTARA										
Wates	8.023	6.840	9.023	7.692	7.921	6.753	9.188	7.833	9.202	7.865
Potrobangsari	8.798	6.773	8.880	6.836	7.988	6.149	8.992	6.922	8.966	6.897
Kedungsari	6.478	4.846	7.421	5.563	7.191	5.391	7.475	1.334	7.533	5.664
Kramat Utara	3.569	4.131	4.749	5.497	5.730	6.632	4.860	5.625	4.955	5.763
Kramat Selatan	7.303	5.009	17.974	5.469	7.480	5.130	8.061	5.529	8.148	5.581

Sumber: Kota Magelang Dalam Angka 2011-2015

Selanjutnya dapat dilihat pertumbuhan penduduk berdasarkan *sex ratio*. *Sex ratio* adalah perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Berdasarkan tabel penduduk berdasarkan jenis kelamin di atas, maka *sex ratio* Kota Magelang Tahun 2015 sebesar $(59.591/ 61.361 \times 100) = 97,12$, artinya setiap 100 perempuan dalam suatu kawasan di Kota Magelang, akan terdapat pula sebanyak 97 pria di dalamnya. Rasio perbandingan penduduk antara laki-laki dan perempuan di Kota Magelang bisa di katakan cukup seimbang

Tabel II.7
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Magelang Tahun 2009-2014 dan prediksi Tahun 2015 (dalam jiwa dan persen)

Jenis Kelamin	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Laki-Laki	58.445	58.686	58.905	59.160	59.384	59.591
Perempuan	60.268	60.524	60.742	60.998	61.231	61.361
Jumlah Total	118.443	119.210	119.647	120.158	120.615	120.952
Sex Ratio	96,98	96,96	96,98	96,99	96,98	97,12
Laju Pertumbuhan(%)		0.42	0.37	0.43	0.38	0.28

Sumber: BPS, 2011-2015 (data jumlah penduduk tahun 2011 menyesuaikan hasil sensus Penduduk 2010)

Tabel II.8
Banyak Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah penduduk	129.556	130.955	130.836	131.703	132.261
Jumlah rumah tangga	39.672	40.623	41.246	41.853	42.433
Rata-rata anggota RT	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2011-2015

Data penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Magelang memperlihatkan bahwa komposisi terbesar penduduk adalah pada usia produktif 15 tahun sd 64 tahun. Hal ini merupakan modal Sumber Daya bagi Kota Magelang apabila Pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan berbagai kebijakan dan program kegiatan yang dapat mengoptimalkan sumber daya manusianya menjadi sumber daya yang berkualitas dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel II.9
Banyak Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk				
	2011	2012	2013	2014	2015
0 - 4 tahun	8.690	8.732	8.246	8.154	7.968
5 - 9 tahun	9.173	9.213	9.601	9.528	9.529
10 - 14 tahun	9.524	9.564	10.101	10.234	10.061
15 - 19 tahun	10.573	10.621	10.263	10.221	10.365
20 - 24 tahun	9.079	9.128	9.954	10.076	10.170
25 -29 tahun	9.522	8.566	9.532	9.322	9.338
30 - 34 tahun	9.092	9.134	10.962	10.806	10.390
35 - 39 tahun	9.103	9.141	10.364	10.410	10.429
40 - 44 tahun	9.252	9.288	10.485	10.274	10.180
45 -49 tahun	8.724	8.763	9.833	10.158	10.115
50 - 54 tahun	7.769	7.803	9.127	9.082	9.241
55 - 59 tahun	5.949	3.974	7.431	7.746	7.978
60 - 64 tahun	3.710	3.724	5.150	5.618	6.000
65 -69 tahun	3.240	3.252	3.207	3.381	3.523
70 -74 tahun	2.527	2.533	2.983	2.897	2.880

<i>Kelompok Umur</i>	<i>Jumlah Penduduk</i>				
	2011	2012	2013	2014	2015
75+	2.878	2.892	3.597	3.796	4.094

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2011-2015

Tingkat kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian di suatu daerah sangat tergantung pada sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Salah satu sumber daya daerah yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat adalah penduduk. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang lengkap dan tingkat kesejahteraan penduduk. Mata pencaharian penduduk Kota Magelang cukup beragam, tapi pada umumnya bergerak di bidang perdagangan dan usaha. Data penduduk Kota Magelang menurut mata pencarian pada tahun 2010-2015 sebagai berikut ini:

Tabel II.10
Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kota Magelang Tahun 2010-2015

<i>Mata Pencaharian</i>	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
						<i>Jumlah</i>	<i>%</i>	<i>+/-</i>
1. Pertanian	212	206	215	215	217	215	0.19	(2)
2. Buruh Tani	51	54	60	60	61	67	0.06	6
Pengusaha	13.089	12.762	12.680	12.476	12.349	12.269	10.72	(80)
4. Buruh Industri	22.259	23.074	23.599	23.682	24.248	24.466	21.38	218
5. Buruh Bangunan	8.818	8.932	9.058	9.006	9.096	9.124	7.97	28
Pedagang	2.950	3.022	3.040	3.002	2.978	2.961	2.59	(17)
Angkutan	194	220	227	233	240	245	0.21	5
8. PNS/TNI/Polri	5.843	5.909	5.925	5.825	5.810	5.766	5.04	(44)
Guru/Dosen	1.484	1.442	1.436	1.447	1.452	1.463	1.28	11
Pensiunan	3.837	3.813	3.772	3.667	3.608	3.622	3.18	(149)
Lain - lain	51.266	53.961	52.890	53.376	53.962	54.244	47.40	282
JUMLAH	110.003	113.395	112.902	112.989	114.021	114.442	100	

Sumber : Kota Magelang Dalam Angka, 2010-2015

Mata pencaharian penduduk Kota Magelang cukup beragam, seperti halnya fenomena yang banyak terjadi di daerah perkotaan, dengan jumlah penduduk bermata pencaharian sebagai petani relatif kecil. Mata pencaharian terbanyak adalah sebagai buruh industri yaitu sebesar 24.466 jiwa (21.38%) dan pengusaha 12.269 jiwa (10.72%). Sedangkan mata pencaharian paling kecil adalah sebagai petani yaitu sebanyak 215 jiwa (0,19%) dan buruh tani 67 jiwa (0,06%). Struktur ini membawa konsekuensi bagi PD yang menangani ketenagakerjaan untuk menjaga stabilitas hubungan industrial dan keadilan bagi hak – hak pekerja.

Penduduk usia kerja di Kota Magelang pada tahun 2015 sebesar 94.883 jiwa. Jumlah ini terdiri dari penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 33.823 jiwa dan 61.060 jiwa merupakan penduduk angkatan kerja. Persentase penduduk bekerja terhadap penduduk usia kerja di Kota Magelang sebesar 60.21% dimana jumlah penduduk bekerja pada tahun 2015 sebesar 57.133 jiwa. Jumlah penduduk tidak bekerja/sedang mencari kerja sebesar 3.927 jiwa (4.14%). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.11
Penduduk Usia Kerja Usia 15 - 64 tahun di Kota Magelang Kategori Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2011-2015

Tahun	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja	Penduduk Usia Kerja/ Tenaga Kerja
	Bekerja	Mencari Kerja (Pengangguran)		
2011	58.919	5.319 (5.85%)	26.752	90.990
2012	57.669	5.501 (6.05%)	27.775	90.945
2013	58.110	4.241 (4.69%)	28.101	90.452
2014	59.628	4.754 (5.06%)	29.625	94.007
2015	57.133	3.927 (4.14%)	33 823	94 883

Sumber: 1. DataGo Kota Magelang, 2016

2. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang, 2016

Kondisi Kota Magelang relatif kondusif. Konflik antar umat beragama nyaris tidak pernah terjadi di Kota Magelang. Masyarakat hidup berdampingan secara damai dalam keanekaragaman agama yang mereka peluk. Kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing – masing yang di akui pemerintah menjadi prioritas pemerintah dalam menjamin hak asasi masyarakat dalam berkeyakinan. Hal ini menjadi modal dasar bagi Pemerintah Kota Magelang dalam mencanangkan Kota Religius untuk periode lima tahun ke depan. Statistik penduduk Kota Magelang berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluk disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel II.12
Penduduk Berdasarkan Agama dan Keyakinan yang dipeluk Tahun 2011 - 2015 di Kota Magelang

Agama /Keyakinan	Jumlah Pemeluk Agama dan Keyakinan				
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Islam	107.627	109.678	109.841	110.856	111.610
Kristen	12.904	12.923	12.770	12.711	12.616
Katholik	7.525	7.517	7.397	7.232	7.241
Hindu	149	146	145	149	150
Budha	658	664	658	639	620
Konghuchu	9	8	8	8	7
Lainnya	23	19	17	17	17

Sumber : Sistem Informasi Profil Daerah Kota Magelang, 2011-2015

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat dan hal ini tercermin di dalam berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun kebijakan pembangunan daerah, baik propinsi maupun Kota/ Kabupaten. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi daerah,

peningkatan kualitas pembangunan, mengoptimalkan potensi daerah serta menjaga stabilitas daerah. Pemerintah Kota Magelang berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang dengan mensinergikan sektor-sektor ekonomi strategis sedemikian hingga tercipta stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan menelurkan SDM yang potensial dan produktif. Keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan meningkatnya angka IPM, rendahnya pengangguran dan turunnya Indeks Kemiskinan Masyarakat, melalui berbagai program dan kegiatan.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada fokus ini akan memberikan gambaran terkait kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kota Magelang. Beberapa indikator yang dipergunakan untuk merepresentasikan fokus ini adalah :1) Produk Domestik Regional Bruto yang meliputi (pertumbuhan ekonomi/pertumbuhan PDRB kontribusi sektoral, dan PDRB per kapita); 2) Laju inflasi; 3)Indeks Gini/pemerataan pendapatan; dan 4). Indeks ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional).

Kondisi perekonomian Kota Magelang tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian nasional dan kondisi perekonomian Propinsi Jawa Tengah. Fluktuasi inflasi nasional dalam beberapa tahun terakhir ini membawa pengaruh pada nilai pertumbuhan ekonomi nasional. Inflasi nasional yang relatif tinggi pada tahun 2013 dan 2014 yang mencapai 8.38% menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, di mana pada tahun 2013 dan 2015 pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 5.02% Turunnya harga minyak dunia dan menguatnya kurs dollar dalam dua tahun terakhir ini membawa pengaruh dalam perekonomian nasional dan berimbas pada kondisi perekonomian di daerah. Berbagai kebijakan paket ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dapat mengerem laju inflasi walaupun belum sepenuhnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan ke tiga tahun 2015 sebesar 4.73% dengan laju inflasi pada tahun tersebut sebesar 3.35%.

Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada awal tahun 2016 berpotensi meningkatkan besaran skala ekonomi (*economic of scale*) dan memunculkan tantangan pada kinerja perekonomian nasional dan daerah. Asumsi ekonomi makro Nasional pada tahun 2016 dengan nilai inflasi sebesar 4.7% dan nilai tukar dollar Amerika sebesar US\$ 13.900 diharapkan perekonomian daerah dapat tumbuh sebesar 5.3% dan nilai pengangguran sebesar 5.2 – 5.5%. Berbagai kebijakan pemerintah yang di lakukan diharapkan dapat mampu mengurangi kemiskinan sehingga diharapkan angka kemiskinan pada tahun 2016 sebesar 9-10% , indeks gini 0.39 dan IPM sebesar 70.10. Inventaris beberapa realisasi indikator makro nasional lain berdasarkan data tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel II.13
Realisasi Indikator Makro Indonesia, Tahun 2010-2015

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Pertumbuhan Ekonomi (%)*	6,38	6,17	6,03	5,58	5,02	4,79	5.66
Tingkat PengangguranTerbuka (%)	7,14	6,56	6,14	6,25	5,94	6.18	6.36
IPM**	66,53	67,09	67,7	68,31	68,9	69.55	68.01
Inflasi (%)	6,96	3,79	4,3	8,38	8,36	3,45	5.86
Indeks Gini	0,38	0,41	0,41	0,41	0,41	0.40	0.40

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
%Penduduk Miskin	13,33	12,49	11,96	11,37	11,25	11,22	11,94

Sumber: BPS RI, 2016

Kondisi perekonomian Provinsi Jawa Tengah relatif lebih stabil apabila dibandingkan dengan kondisi nasional, walaupun kondisi inflasi dalam lima tahun terakhir ini mempunyai kesamaan pola dengan kondisi inflasi nasional. Kisaran pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir ini sekitar 5.2%, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5.68 tahun 2014. Inventaris beberapa realisasi indikator makro provinsi Jawa Tengah lain berdasarkan data tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel II.14
Realisasi Indikator Makro Jawa Tengah Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Pertumbuhan Ekonomi (%)*	5,3	5,34	5,14	5,3	5,4	5,29
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,93	5,63	6,02	5,68	5,31	5,65
IPM**	66,64	67,21	68,02	68,78	69,49	68,02
Inflasi (%)	2,68	4,3	7,98	8,22	2,73	5,47
Indeks Gini	0,38	0,38	0,39	0,39	na	0,38
Persentase Penduduk Miskin (Maret-%)	15,76	15,34	14,56	14,46	13,58	14,68

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016

2.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kemampuan Ekonomi Daerah juga dapat direpresentasikan melalui produktivitas total daerah yang tercermin pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di semua sektor atau lapangan usaha. Perhitungan PDRB yang dilakukan pada tahun 2015 berbeda dengan perhitungan PDRB pada tahun – tahun sebelumnya. Perhitungan PDRB pada tahun 2015 mengacu pada Standar rekomendasi internasional yaitu System of National Accounts (SNA) 2008 yang menyediakan informasi aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi dan akumulasi harta. Adapun tahun dasar perhitungan menggunakan tahun dasar 2010 di mana pada tahun tersebut kondisi perekonomian Indonesia relatif stabil. Sektor pembentuk PDRB juga mengalami perubahan dari 9 menjadi 17 sektor. Perubahan ini disusun melalui perubahan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga kondisi perekonomian wilayah dapat dipersandingkan secara internasional.

Tabel II.15
PDRB Kota Magelang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Kontribusi Sektoral Tahun 2010-2015 (2010=100 dalam Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013*	2014**	2015***
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	93.388,08 (2.33)	98.201,75 (2.20)	104.683,39 (2.14)	116.293,58 (2.17)	120.367,23 (2.03)	130.678,47 (2.01)
Penggalian	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	565.082,95 (14.09)	684.330,06 (15.33)	746.652,98 (15.28)	812.114,50 (15.16)	931.859,31 (15.75)	1.013.535,85 (15.57)
Pengadaan Listrik dan Gas	12.078,66 (0.30)	13.768,75 (0.31)	15.425,53 (0.32)	16.666,48 (0.31)	17.257,01 (0.29)	19.111,02 (0.29)

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013*	2014**	2015***
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.164,17 (0.18)	7.455,82 (0.17)	7.411,28 (0.15)	7.621,25 (0.14)	8.044,19 (0.14)	8.417,55 (0.13)
Konstruksi	732.475,35 (18.26)	773.514,05 (17.33)	858.646,48 (17.57)	918.311,37 (17.14)	1.012.603,08 (17.12)	1.116.719,99 (17.15)
Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	658.763,55 (14.43)	742.328,02 (14.63)	771.564,88 (15.79)	833.066,81 (15.55)	880.551,58 (14.88)	942.253,31 (14.47)
Transportasi dan pergudangan	284.068,60 (7.08)	295.979,95 (6.63)	314.331,52 (6.43)	351.780,16 (6.57)	403.943,42 (6.83)	470.836,63 (7.23)
Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	230.876,25 (5.76)	256.558,86 (5.75)	274.817,74 (5.62)	304.199,77 (5.68)	342.124,31 (5.78)	382.469,35 (5.87)
Informasi dan Komunikasi	194.369,53 (4.85)	215.949,17 (4.84)	232.915,64 (4.77)	248.510,92 (4.64)	284.882,99 (4.82)	307.703,73 (4.73)
Jasa Keuangan dan Asuransi	200.087,47 (4.99)	219.320,36 (4.91)	243.683,72 (4.99)	265.211,16 (4.95)	284.010,20 (4.80)	306.260,55 (4.70)
Real Estate	138.883,41 (3.46)	151.296,80 (3.39)	158.000,20 (3.23)	173.221,64 (3.23)	191.763,10 (3.24)	212.385,65 (3.26)
Jasa Perusahaan	12.105,05 (0.30)	13.880,19 (0.31)	15.387,73 (0.31)	16.994,48 (0.32)	18.732,66 (0.32)	20.445,59 (0.31)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	528.286,70 (13.17)	552.407,47 (12.37)	613.776,42 (12.56)	660.077,14 (12.32)	703.193,64 (11.89)	752.550,20 (11.56)
Jasa Pendidikan	174.715,61 (4.36)	239.545,88 (5.37)	310.843,40 (6.36)	387.046,30 (7.23)	440.078,24 (7.44)	516.492,00 (7.93)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	89.955,25 (2.24)	106.223,75 (2.38)	125.257,66 (2.56)	138.266,12 (2.58)	156.742,75 (2.65)	173.033,53 (2.66)
Jasa Lainnya	88.417,54 (2.20)	93.789,22 (2.10)	94.247,90 (1.93)	106.925,77 (2.01)	119.677,13 (2.00)	137.478,43 (2.11)
JUMLAH	4.010.718,18	4.255.662,20	4.887.646,47	5.356.307,45	5.915.830,84	6.510.371,85

Sumber : Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang dalam Analisis PDRB Kota Magelang, 2016

Keterangan: *Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka prediksi derivative

Tabel di atas memperlihatkan kondisi produktivitas Kota Magelang selama lima tahun terakhir yang tercermin di dalam 17 sektor PDRB. Nilai PDRB Kota Magelang pada tahun 2014 secara agregat atas dasar harga berlaku (5.915.830,85 juta rupiah) tumbuh 10.45 persen dari capaian angka tahun sebelumnya (5.356.307,45 juta rupiah). produktivitas daerah pada tahun 2015 diprediksi hampir sama dengan kondisi tahun 2014. PDRB Tahun 2015 berdasarkan harga konstan sebesar 5.241.660, 00 juta rupiah dengan pertumbuhannya sebesar 5.10

Struktur perekonomian Kota Magelang didominasi oleh 4 sektor unggulan yaitu Sektor Konstruksi, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial. Kontribusi keempat sektor unggulan tersebut pada tahun 2014 berdasarkan harga konstan adalah, sektor konstruksi sebesar 16.76%, sektor Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15.88%, Sektor Industri Pengolahan sebesar 15.17%, dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 11.20%. Keempat lapangan usaha ini menyumbang berturut-turut 1,08%; 0,71%; 0,28% dan 2,66% terhadap total NTB lapangan usaha yang sama di Jawa Tengah pada periode tahun 2014.

Komposisi peran lapangan usaha pembentuk PDRB atas dasar harga berlaku yang ditinjau dari distribusi terhadap PDRB total pada tahun 2015 diprediksi masih relatif sama dengan pola tahun-tahun sebelumnya yang didominasi oleh lapangan usaha Konstruksi, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Prediksi pada tahun 2015, keempat sektor ini masih merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB Kota Magelang.

Sektor konstruksi pada tahun 2014 tumbuh sebesar 2.12%. Sementara sektor industri pengolahan mengalami laju pertumbuhan tertinggi di antara empat sektor pembentuk PDRB terbesar di Kota Magelang yaitu sebesar 7%. Sektor ini merupakan kegiatan ekonomi dibidang perubahan secara kimia atau fisik dari mahan, unsur, komponen menjadi produk baru. Sektor kedua yang mengalami laju pertumbuhan yang relatif tinggi setelah sektor industri pengolahan adalah sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh sebesar 3.11%. Sektor yang pertumbuhannya relatif kecil yaitu sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang tumbuh hanya sebesar 0.51%. Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan produktivitas daerah berdasarkan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan beserta dengan kontribusi sektor PDRB sebagai berikut:

Tabel II.16
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan dan Kontribusi sektoral Tahun 2010-2015
(2010=100 dalam Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013*	2014**	2015***
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	93.388,08 (2.33)	96.341,65 (2.26)	98.182,37 (2.19)	100.977,97 (2.12)	102.614,98 (2.06)	103.687,09 (1.98)
Penggalian	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	565.082,95 (14.09)	615.817,06 (14.47)	660.615,63 (14.73)	707.152,92 (14.87)	756.622,79 (15.17)	797.981,49 (15.22)
Pengadaan Listrik dan Gas	12.078,66 (0.30)	13.701,98 (0.32)	15.908,74 (0.35)	17.812,17 (0.37)	18.388,16 (0.37)	19.358,22 (0.37)
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.164,17 (0.18)	7.334,20 (0.17)	7.306,77 (0.16)	7.345,64 (0.15)	7.545,25 (0.15)	7.682,69 (0.15)
Konstruksi	732.475,35 (18.26)	739.662,01 (17.38)	791.369,61 (17.65)	818.377,68 (17.21)	835.695,22 (16.76)	861.015,61 (16.43)
Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	658.763,55 (16.43)	717.208,45 (16.85)	730.825,83 (16.30)	767.954,43 (16.15)	791.805,87 (15.88)	822.791,44 (15.70)
Transportasi dan pergudangan	284.068,60 (7.08)	295.246,81 (6.94)	312.535,46 (6.97)	344.421,27 (7.24)	373.225,72 (7.48)	412.280,33 (7.87)
Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	230.876,25 (5.76)	245.054,80 (5.76)	252.103,91 (5.62)	263.888,24 (5.55)	281.211,68 (5.64)	294.000,72 (5.61)
Informasi dan Komunikasi	194.369,53 (4.85)	212.669,09 (5.00)	234.771,59 (5.24)	255.630,11 (5.38)	297.579,12 (5.97)	334.580,68 (6.38)
Jasa Keuangan dan Asuransi	200.087,47 (4.99)	208.442,29 (4.90)	214.434,16 (4.78)	224.119,33 (4.71)	229.343,21 (4.60)	234.669,11 (4.48)

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013*	2014**	2015***
Real Estate	138.883,41 (3.46)	148.282,55 (3.48)	154.353,38 (3.44)	167.087,52 (3.51)	175.397,92 (3.52)	185.052,88 (3.53)
Jasa Perusahaan	12.105,05 (0.30)	13.136,95 (0.31)	14.214,79 (0.32)	15.211,81 (0.31)	16.332,85 (0.33)	17.291,12 (0.33)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	528.286,70 (13.17)	540.680,55 (12.70)	546.939,79 (12.20)	561.491,84 (11.81)	558.632,28 (11.20)	567.813,51 (10.83)
Jasa Pendidikan	174.715,61 (4.36)	211.713,15 (4.97)	251.436,06 (5.61)	290.296,18 (6.10)	314.698,55 (6.31)	340.803,17 (6.50)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	89.955,25 (2.24)	99.349,33 (2.33)	108.676,18 (2.42)	113.912,31 (2.40)	123.661,61 (2.48)	129.139,38 (2.46)
Jasa Lainnya	88.417,54 (2.20)	91.021,33 (2.14)	90.593,80 (2.02)	99.589,76 (2.09)	104.621,24 (2.10)	113.512,57 (2.17)
JUMLAH	4.010.718,18	4.255.662,21	4.484.268,07	4.755.269,18	4.987.376,45	5.241.660,00

Sumber : Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang dalam Analisis PDRB Kota Magelang, 2016

Keterangan: *Angka sementara
** Angka sangat sementara
*** Angka prediksi derivative

Nilai PDRB Kota Magelang pada tahun 2014 secara agregat atas dasar harga konstan adalah 4.987.376,44 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 4.07 persen. Nilai ini sedikit melambat apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun dari capaian angka tahun sebelumnya yaitu 5.35 persen (4.755.269,18 juta rupiah). Laju pertumbuhan ini sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan riil Propinsi Jawa Tengah yang sebesar 5.42% dan nasional sebesar 5.02%.

Laju pertumbuhan dan produktivitas daerah pada tahun 2015 diprediksi hampir sama dengan kondisi tahun 2014. Perolehan PDRB atas dasar harga berlaku Kota Magelang tahun 2014 mencapai 5,9 triliun rupiah dengan pertumbuhan 10,45% dan berkembang 147,5% dari kondisi tahun dasar. Nilai ini memberikan sumbangan 0,64% terhadap perolehan PDRB Jawa Tengah. PDRB Tahun 2015 berdasarkan harga konstan sebesar 5.241.660, 00 juta rupiah dengan pertumbuhannya sebesar 5.10. Hasil produksi barang dan jasa di tahun 2015 ini diperkirakan tumbuh 10,05% berdasarkan harga berlaku dibandingkan tahun 2014 sebesar 5,9 triliun rupiah. Pertumbuhan riil berdasarkan harga konstan pada tahun 2015 sebesar 5.10%. Pertumbuhan positif ini tidak lepas dari peningkatan permintaan lokal terhadap produk/jasa Kota Magelang seiring dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat, investasi yang mulai tumbuh, naiknya harga beberapa komoditas global, dan intensifnya perbaikan serta pembangunan infrastruktur.

Tabel II.17
Pertumbuhan PDRB adhb dan adhk Menurut Lapangan
Tahun 2011-2012 dan Prediksi 2013-2015

LAPANGAN USAHA	Pertumbuhan PDRB adhb					Pertumbuhan PDRB adhk				
	2011	2012	2013*	2014**	2015***	2011	2012	2013*	2014**	2015***
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.15	6.60	11.09	3.50	8.57	3.16	1.91	2.85	1.62	1.04
Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	21.10	9.11	8.77	14.74	8.76	8.98	7.27	7.04	7.00	5.47
Pengadaan Listrik dan Gas	13.99	12.03	8.04	3.54	10.74	13.44	16.11	11.96	3.23	5.28
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	4.07	0.60	2.83	5.55	4.64	2.37	0.37	0.53	2.72	1.82

LAPANGAN USAHA	Pertumbuhan PDRB adhb					Pertumbuhan PDRB adhk				
	2011	2012	2013*	2014**	2015***	2011	2012	2013*	2014**	2015***
Daur Ulang										
Konstruksi	5.60	11.01	6.95	10.27	10.28	0.98	6.99	3.41	2.12	3.03
Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	12.69	3.94	7.79	5.70	7.01	8.87	1.99	5.08	3.11	3.91
Transportasi dan pergudangan	4.19	6.20	11.91	14.83	16.56	3.94	5.86	10.20	8.36	10.46
Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	11.12	7.12	10.69	12.47	11.79	6.14	2.88	4.67	6.56	4.55
Informasi dan Komunikasi	11.10	7.86	6.70	14.64	8.01	9.41	10.39	8.88	16.41	12.43
Jasa Keuangan dan Asuransi	9.61	11.11	8.83	7.09	7.83	4.18	2.87	4.52	2.33	2.32
Real Estate	8.94	4.43	9.63	10.70	10.75	6.77	4.09	8.25	4.97	5.50
Jasa Perusahaan	14.66	10.86	10.44	10.23	9.14	8.52	8.20	7.01	7.37	5.87
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.57	11.11	7.54	6.53	7.02	2.35	1.16	2.66	0.51	1.64
Jasa Pendidikan	37.11	29.76	24.51	13.70	17.36	21.18	18.76	15.46	8.41	8.30
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18.09	17.92	10.39	13.36	10.39	10.44	9.39	4.82	8.56	4.43
Jasa Lainnya	6.09	0.48	13.45	11.93	14.87	2.94	0.47	9.93	5.05	8.50
JUMLAH	11.32	9.48	9.59	10.46	10.05	6.11	5.37	6.04	4.88	5.10

Sumber : Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang dalam Analisis PDRB Kota Magelang, 2016

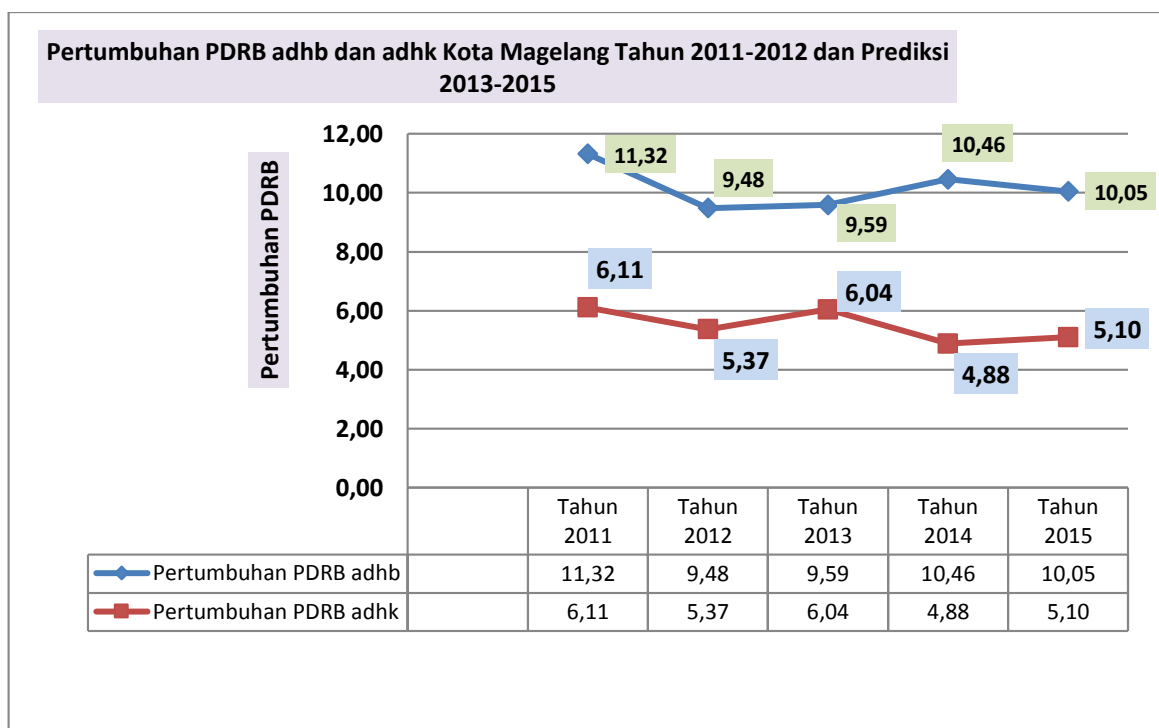
Dari 17 lapangan usaha pembentuk PDRB di Kota Magelang pada tahun 2015, tidak ada satu pun lapangan usaha yang diprediksi mengalami kontraksi pertumbuhan namun beberapa lapangan usaha masih tumbuh riil di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi secara umum dengan pertumbuhan ekonomi terendah dialami oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (1,04%). Hal ini sangat wajar terjadi di Kota karena keterbatasan lahan pertanian. Berdasarkan register Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan sampai dengan Semester I-2015 area persawahan di Kota Magelang efektif hanya sebesar 11,53%.

Namun demikian beberapa lapangan usaha dengan kontribusi dominan memiliki persentase pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan lapangan usaha lain dengan NTB yang lebih kecil. Pertumbuhan tertinggi atas dasar harga konstan pada tahun 2015 diprediksi dicapai oleh lapangan informasi dan komunikasi (12.43%); sektor transportasi dan perdagangan (10.46%); sektor jasa lainnya (8.50%) dan sektor jasa pendidikan (8.30%). Ketiga sektor ini selain sektor informasi dan komunikasi mengalami percepatan pertumbuhan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun sektor informasi dan komunikasi di prediksi mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2015 dimana pada tahun 2014 sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 16.41% namun sektor ini merupakan sektor yang pertumbuhannya diprediksi paling tinggi apabila dibandingkan dengan sektor lainnya pada tahun 2015. Secara umum seluruh lapangan usaha mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan riil PDRB Kota Magelang yang mencapai 5,10%.

Kondusifnya kondisi perekonomian nasional dan lokal memberikan atmosfer segar dan prediksi perolehan PDRB Kota Magelang di tahun 2015 yang lebih baik. Diprediksi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang pada tahun

2015 mencapai 5,10% dengan PDRB sebesar 5,2 triliun rupiah dan diperkirakan akan melaju fluktuatif dengan kecenderungan naik.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah tercermin pada seberapa besar hasil produktivitas dapat dinikmati oleh penduduk di daerah tersebut. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering dipergunakan di dalam mengukur atau menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah. Nilai ini diperoleh dengan membagi jumlah total PDRB dalam satu waktu tertentu dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Nilai ini setidaknya bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan meskipun nilai yang diperoleh belum tentu mencerminkan nilai yang benar - benar diperoleh masyarakat Sementara yang dimaksud pendapatan disini adalah nilai tambah bruto (upah, gaji, laba, sewa tanah, bunga uang, penyusutan dan pajak tak langsung neto), bukan nilai produksi (perkalian dari jumlah produksi dengan harga satuannya). Nilai tambah bruto merupakan bagian dari nilai produksi.



Sumber : BPS Kota Magelang, 2016

Gambar 2.6
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang (dalam persen) Tahun 2011-2012 dan Prediksi 2013-2015

Pada grafik di atas memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Magelang relatif stabil pada kisaran 5 % - 6%. Nilai pertumbuhan ini tidak lepas dari adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi pada skala regional Jawa Tengah maupun Nasional. Apabila diperbandingkan dengan data pertumbuhan ekonomi nasional dalam rentang tahun 2013 dan prediksi 2015, kondisi Pertumbuhan Ekonomi di Kota Magelang sedikit lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi skala nasional. Sementara apabila di persandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah dalam dua tahun terakhir ini yaitu tahun 2014 dan 2015 maka kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa tengah pada tahun 2015 sebesar 5.4% di dominasi oleh

Industri pengolahan (35,5%), pertanian, kehutanan dan perikanan (15.5%) dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (13.3%). Pertumbuhan pada tahun 2015 lebih tinggi di dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2014 di pengaruhi oleh beberapa hal di antaranya pergerakan harga pada tahun 2015 lebih stabil , penurunan nilai inflasi yang cukup tajam pada tahun 2015 (apabila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 8.22%) terlebih disebabkan karena turunnya harga bahan bakar minyak pada awal tahun 2015. Kondisi ekonomi makro regional dan nasional membawa pengaruh terhadap kondisi perekonomian Kota Magelang termasuk kondisi pertumbuhan ekonomi. Di bawah ini di tampilkan grafik pertumbuhan ekonomi Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagai berikut :

Tabel II.18
PDRB Per Kapita Kota Magelang Tahun 2010-2013 dan Prediksi Tahun 2014-2015
(menggunakan tahun dasar 2010)

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**	2015***
Jumlah Penduduk pada tengah tahun (jiwa)	118.443	119.210	119.647	120.158	120.615	120.952
PDRB Per Kapita atas dasar Harga Berlaku (Rp/kapita/tahun)	33.926.459,42	37.641.932,95	41.086.815,37	44.732.069,37	49.023.243,20	43.216.359,11
Pertumbuhan adhb (%)		10,95	9,15	8,87	9,59	8,55
PDRB Per Kapita atas dasar Harga Konstan (Rp/kapita/tahun)	33.926.459,42	35.880.665,48	37.695.912,71	39.712.625,31	41.329.337,22	43.020.847,03
Pertumbuhan adhk (%)		5.76	5.06	5.35	4.07	4.09

Sumber : Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang, 2016

Keterangan: *Angka sementara
**Angka sangat sementara
***Angka prediksi derivative

Berdasarkan data resmi BPS Kota Magelang, PDRB per kapita dari 120.615 jiwa penduduk pertengahan tahun di Kota Magelang pada tahun 2014 mencapai Rp. 4.085.270,- per bulan atas dasar harga berlaku dan Rp. 3.444.111,- per bulan atas dasar harga konstan. Angka ini tumbuh 9,59% dan secara riil tumbuh 4,07%. Dengan prediksi pertumbuhan penduduk tengah tahun Kota Magelang sebesar 120.952 jiwa (deviasi 0,04%) dan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 dipredikasi sebesar 5,1% (deviasi +/- 0.14%) diperoleh PDRB per kapita tahun 2015 sebesar 4,43 juta rupiah per bulan (tumbuh 8.55 % atas dasar harga berlaku).

2.2.1.2 Perkembangan Harga (Inflasi)

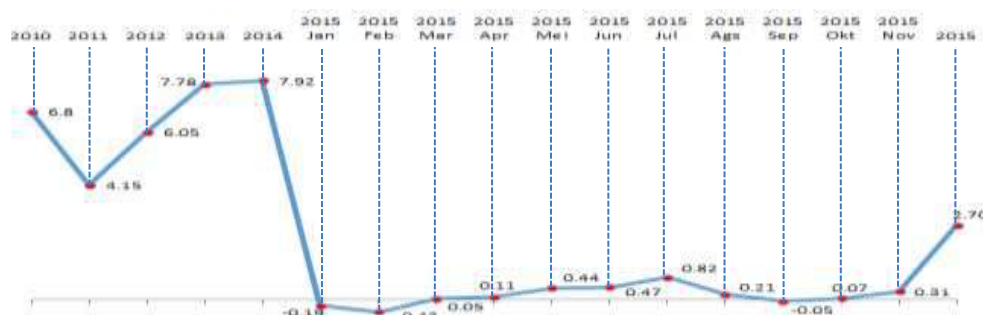
Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Inflasi ini akan menggambarkan besarnya perubahan harga barang - barang dan jasa yang beredar di pasaran. Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung inflasi dengan mempergunakan IHK. Adapun yang dimaksud dengan IHK adalah besarnya biaya paket barang-barang dan jasa yang menunjukkan konsumsi masyarakat perkotaan. Angka ini merupakan hasil survey pemantauan harga-harga komoditas barang-barang yang ada di masyarakat setiap minggu.

Tabel II.19
Perbandingan Laju Inflasi Kota Magelang Tahun 2010 -2015 (dalam %)

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Laju Inflasi (%)	4.15	6.05	7.78	7.92	2.70
IHK	129.14	136.95	147.61	118.27	121.47

Sumber: BPS Kota Magelang, 2016

Tren perubahan harga level inflasi di Kota Magelang tahun 2010 - 2015 menunjukkan tren yang hampir sama dan berfluktuasi ke arah yang sama pada kisaran 6-7%. Inflasi di Kota Magelang mengalami penurunan yang sangat tajam pada tahun 2015, dimana inflasi pada tahun tersebut sebesar 2.70%. Deflasi pada tahun 2015 di Kota Magelang terjadi pada 2 bulan pertama sebesar 0,19% pada bulan Januari dan 0,43% pada bulan Februari dan juga terjadi di bulan September (0,05%). Penurunan inflasi yang sangat tajam tersebut dikhawatirkan juga akan membawa pengaruh terhadap kondisi perekonomian di daerah walaupun kondisi perekonomian di Kota Magelang secara umum tidak bisa terlepas dari kondisi perekonomian di tingkat atasnya atau kondisi perekonomian global yang bergerak dinamis dan membawa pengaruh seperti kestabilan nilai tukar rupiah; fluktuasi tingkat suku bunga SBI; harga minyak dunia serta kebijakan ekonomi nasional terkait dengan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kota Magelang terus berupaya untuk menjaga stabilitas tersebut antara lain melalui pemantauan distribusi, pemeliharaan manajemen pasar tradisional, pengendalian harga melalui koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan upaya penganeekaragaman kreativitas dan inovasi konsumsi pangan.

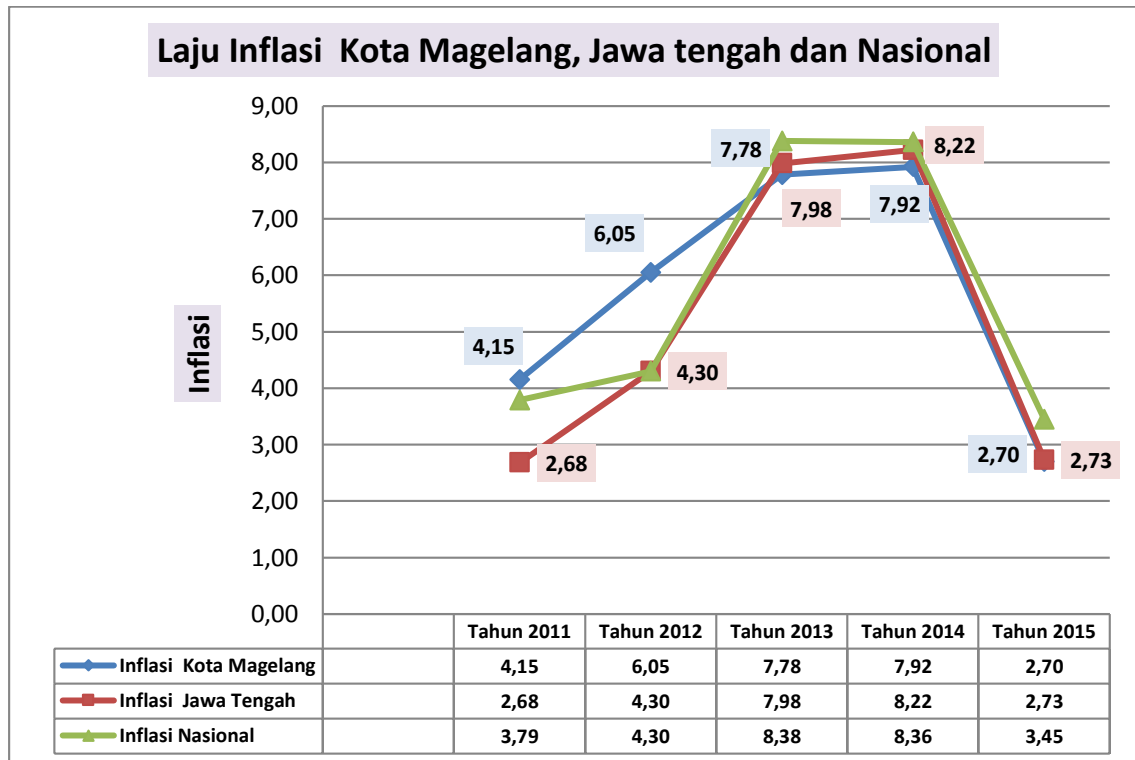


Sumber: BPS Kota Magelang, 2016

Gambar 2.7
Grafik Perkembangan Laju Inflasi Kota Magelang Tahun 2010-2015 (dalam %)

Perbaikan kinerja ekonomi Kota Magelang tahun 2015 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat dan terjaganya inflasi. Capaian inflasi Kota Magelang pada tahun 2015 lebih baik dari target (5,33%). Perkembangan harga pada tahun 2015 cukup dinamis dengan inflasi bulan Desember mencapai 0,87% (IHK 121,47) dan inflasi 2,7% year on year di akhir tahun, lebih rendah dari inflasi tahun 2015 Jawa Tengah (2,73%) dan nasional 3,35%. Angka inflasi ini menurun tajam jika dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2014 yang mencapai 7,92%. Hal ini terlebih disebabkan karena penurunan harga Bahan Bakar Minyak di awal tahun. Penurunan tersebut berimbas pada turunnya harga beberapa komoditas terutama pada kelompok pengeluaran angkutan. Tidak adanya kenaikan harga BBM sepanjang tahun menyebabkan stabilnya beberapa komoditas harga yang mendorong rendahnya inflasi di akhir tahun. Hal ini dapat dilihat dari lebih terjaganya inflasi di Kota Magelang pada

tiga tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 apabila di perbandingkan dengan laju inflasi pada skala regional Jawa Tengah maupun pada skala Nasional. Gambar di bawah ini memperlihatkan pertumbuhan Inflasi Kota Magelang apabila di perbandingkan dengan pertumbuhan inflasi di Jawa Tengah dan Nasional sebagai berikut



Sumber: BPS Kota Magelang, 2016

Gambar 2.8
Grafik Perkembangan Laju Inflasi Kota Magelang, Jawa tengah dan Nasional
Tahun 2010-2015 (dalam %)

2.2.1.3 Investasi

Pemerintah daerah dituntut untuk memacu daya saing dalam rangka meningkatkan kompetisi ekonomi termasuk diantaranya menghadapi tantangan dinamika ketenagakerjaan, kompetensi pasar, kesenjangan pendapatan dan tantangan perekonomian yang lain. Salah satu upaya Pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan menumbuhkan daya tarik dan investasi di daerah. Investasi pada dasarnya merupakan *engine of growth* roda pembangunan yang dapat meningkatkan peranan sektor-sektor ekonomi. Peran investasi sangat besar dalam menumbuhkan perekonomian di daerah karena memiliki peran pengganda untuk meningkatkan produktifitas, memacu pertumbuhan dan berpeluang meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan peluang investasi dilaksanakan dengan meningkatkan daya tarik investasi, yaitu dengan perbaikan pelayanan perijinan melalui perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi, pemberian insentif investasi, penciptaan keamanan dan ketertiban kota, pembangunan infrastruktur daerah, reformasi birokrasi, mengembangkan penanaman modal dan investasi daerah, meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, serta mendorong tumbuhnya industri kreatif atau industri gaya hidup. Hal lain yang tidak kalah penting dalam menumbuhkan investasi di Kota Magelang adalah dengan

meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

PDRB sektor investasi dibentuk oleh dua sektor utama, yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan *inventory* (Perubahan sstok ini meliputi persediaan barang mentah, barang setengah jadi dan barang jadi). Pembentukan modal tetap bruto meliputi berbagai macam pengeluaran untuk pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru yang dihasilkan di suatu wilayah (*region*) atau impor yang selanjutnya dipergunakan sebagai alat produksi barang atau jasa. Perhitungan PMTB ini dapat diperoleh berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh tiap-tiap lapangan usaha atau juga berdasarkan arus barang.

Tabel II. 20
PDRB Penggunaan Sektor Investasi Tahun 2010-2012 dan Prediksi Tahun 2013-2015 (Juta rupiah)

Uraian	Tahun					
	2010	2011	2012	2013*	2014**	2015***
Harga Berlaku						
PMTB	1.965.504,29	2.154.075,73	2.472.798,70	2.584.328,42	2.804.515,20	2.920.862,16
Perubahan Inventory	17.239,22	197.535,70	284.010,22	319.475,23	195.879,68	Prediksi pertumbuhan 76.94
Harga Konstan						
PMTB	1.965.504,29	2.016.304,05	2.178.009,67	2.245.575,55	2.274.517,48	
Perubahan Inventory	17.239,22	179.942,60	325.544,73	211.622,40	118.548,99	

Sumber: BPS Kota Magelang, 2016

Keterangan: *Angka sementara
**Angka sangat sementara
***Angka prediksi derivative

Pergerakan laju pertumbuhan sektor investasi ini dalam kurun waktu 5 tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan cukup berfluktuatif dengan rata - rata laju pertumbuhan per tahun berdasarkan harga berlaku sebesar 12,37%. Rata-rata pertumbuhan sektor investasi ini lebih tinggi apabila di dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan pada periode lima tahun yang lalu dimana rata - rata pertumbuhan sektor investasi ini sebesar 7.90%.

PMTB merupakan seluruh pengadaan barang modal yang digunakan sebagai aset tetap. Pada tahun 2014 PMTB di Kota Magelang mencapai 2,8 triliun rupiah tumbuh 8,52% dari tahun 2013 dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 47,41%. Diprediksi komponen ini akan naik distribusinya terhadap PDRB padatahun 2015 menjadi 47,73%. Selain itu Konsumsi Lembaga Non Profit pada tahun 2015 juga diprediksi naik dengan distribusi menjadi 1,39% setelah pada tahun 2014 hanya sebesar 1,29%. Secara rill (berdasarkan harga konstan), komponen penggunaan PMTB pada tahun 2015 diprediksi memiliki pertumbuhan ekonomi masing-masing 4,14% dan 28,42%. Tingkat inflasi di Kota Magelang yang diperkirakan stabil dengan kecenderungan menurun diharapkan dapat meningkatkan keyakinan dan daya beli konsumen sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga dapat tetap terjaga.

2.2.1.4 Indeks Gini (Gini Ratio/Gini Index)

Indeks Gini atau koefisien gini merupakan salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks gini memiliki kisaran 0 sampai dengan 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Indeks gini Kota Magelang dalam rentang waktu 2006 sampai dengan 2010 masuk dalam kriteria ketimpangan rendah, sementara setelahnya masuk dalam kriteria ketimpangan sedang karena berada di atas 0.3. Nilai ini masih berada di bawah indeks Gini Provinsi Jawa Tengah. Antara tahun 2012-2013 terdapat penurunan yang cukup signifikan, yang menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Kota Magelang semakin baik atau ketimpangan pendapatan antar penduduk kian menipis. Selanjutnya pada akhir tahun 2014 gini rasio akan turun kembali yang kondisi tersebut juga diperkirakan akan terjadi pula di tahun 2015.

Tabel II.21
Indeks Gini Kota Magelang Tahun 2011-2015

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Indek Gini Kota Magelang	0.34	0.37	0.33	0.36	0.3438-0.3762
Indek Gini Jawa Tengah	0.38	0.38	0.39	0.39	0.38

Sumber: BPS Kota Magelang, 2016

2.2.1.5 Indeks Wiliamson (Wiliamson Index)

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah. Ukuran ketimpangan pendapatan merupakan salah satu ukuran yang dipergunakan untuk menganalisis seberapa besar kesenjangan antar wilayah/antar daerah. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa suatu daerah memiliki kesenjangan yang tinggi jika terdapat banyak orang miskin. Akan tetapi, ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa suatu daerah mengalami kesenjangan yang tinggi jika ada sekelompok orang kaya di tengah-tengah masyarakat yang umumnya masih miskin. Pendapat masyarakat tersebut lebih cenderung mengarah ke distribusi pendapatan yang melihat kesenjangan antar kelompok masyarakat, sedangkan untuk kesenjangan pembangunan antar daerah lebih melihat ke perbedaan antar daerah.

Indeks Wiliamson merupakan ukuran yang dipergunakan untuk melihat kesenjangan antar daerah Apabila angka indeks kesenjangan Williamson semakin mendekati nol, maka menunjukkan kesenjangan yang semakin kecil dan bila angka indeks menunjukkan semakin mendekati satu maka menunjukkan kesenjangan yang makin melebar. Kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah kesenjangan ada pada kesenjangan level rendah, sedang, atau tinggi. Berikut ini adalah kriterianya:

- Kesenjangan level rendah, jika $IW < 0,35$
- Kesenjangan level sedang, jika $0,35 \leq IW \leq 0,5$
- Kesenjangan level tinggi, jika $IW > 0,5$

Dengandata dasar PDRB Kabupaten/Kota se wilayah propinsi serta dihitung dengan formula tertentu (indeks williamson), kita dapat mengetahui sampai seberapa jauh ketimpangan wilayah yang terjadi dalam wilayah tertentu yang lebih luas dan dalam waktu tertentu.

Tabel II.22
Indeks Williamson Kota Magelang tahun 2011 - 2015

Tahun	Indeks Williamson Kota Magelang (adhb)	Indeks Williamson Kota Magelang (adhk)	Indeks Williamson Propinsi Jawa Tengah (adhb)	Indeks Williamson Propinsi Jawa Tengah (adh)
2011	0.0812	0.0888	0.6961	0.6373
2012	0.0857	0.0909	0.6932	0.6616
2013	0.1353	0.1364	0.6951	0.6579
2014*	0.1325	0.1349		
2015*	0.1304	0.1338		

Sumber: 1. BPS Kota Magelang, 2016

2. Prediksi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang, 2016

Keterangan : *Angka Sementara

Tabel di atas memberikan gambaran terkait Indeks Williamson Kota Magelang maupun propinsi Jawa Tengah untuk tahun 2011-2013. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa kesenjangan wilayah di Kota Magelang, hingga tahun 2013 termasuk relatif tinggi dilihat dari angka Indeks Williamson Kota Magelang yang relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan indeks Williamson Jawa Tengah. Meskipun demikian pada tahun 2014 hingga 2016 diharapkan ketimpangan perekonomian Kota Magelang semakin kecil.

2.2.1.6 Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita perbulan lebih kecil dari Garis Kemiskinan. Pengukuran kemiskinan di Indonesia dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Makro dan Pendekatan Mikro.

Pada pendekatan makro metode yang digunakan untuk menghitung kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dengan sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) dan BPS pertama kali menghitung kemiskinan tahun 1984. Data menunjukkan jumlah penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan estimasi.

Pendekatan mikro menggunakan metode pendekatan kualitatif, didasarkan pada Indeks atau PMT dari ciri-ciri rumah tangga miskin (variabel non-moneter) yang dapat dikumpulkan dengan mudah. Data menunjukkan jumlah rumah tanggasaran (menurut kategori Rumah Tangga Sangat Miskin, Sangat Miskin, Hampir Miskin atau ranking) dan dapat menunjukkan data *by name by address*. Sumber data yang digunakan adalah hasil pendataan PSE05, PPLS08, PPLS2011, PBDT 2011 dan PBDT 2015.

Dalam pendekatan makro garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan minimum setiap individu. Dimensi lain yang perlu

diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan adalah tingkat kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran

masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Melalui indikator ini dapat ditunjukkan kesenjangan dan kedalaman tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai disparitas pengeluaran di antara penduduk miskin.

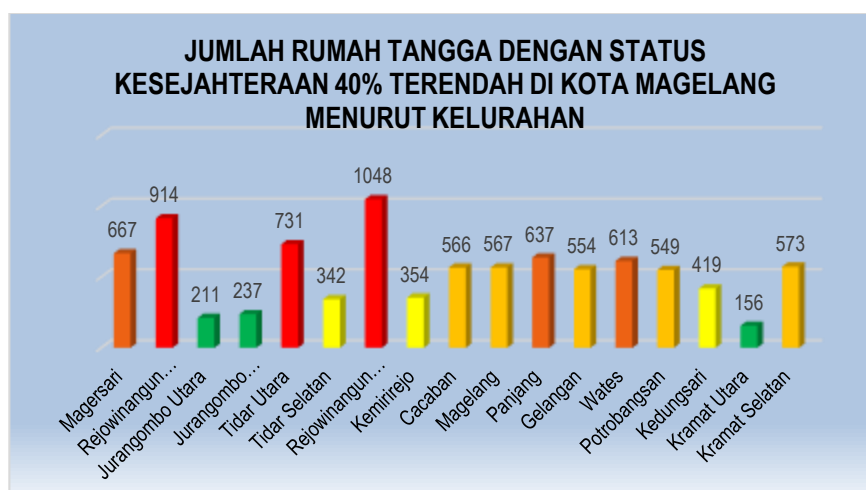
Tabel II.23
Statistik Kemiskinan di Kota Magelang tahun 2010-2014

Indikator	2011	2012	2013	2014
Jumlah Penduduk (jiwa)	119.210	119.647	120.158	120.615
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	13.100	12.100	11.800	11.019
Jumlah Penduduk Miskin (persen)	11,06	10,31	9,8	9,14
P1	1,61	1,48	1,45	0,94
P2	0,36	0,33	0,37	0,20
Garis Kemiskinan	280.877	304.695	350.554	376.143

Sumber: BPS Kota Magelang, 2016

Keberhasilan pembangunan di Kota Magelang menyebabkan tren pertumbuhan penduduk miskin dari tahun 2010-2014 semakin menurun. Dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 376.143,- pada tahun 2014 penduduk miskin di Kota Magelang mencapai 11.019 jiwa (9,14%). Jumlah ini menurun sebesar 0,66% dibandingkan tahun 2013 yaitu semula 11.800 jiwa (9,8%). Sampai dengan akhir tahun 2015 diprediksi persentase penduduk miskin akan terus menurun mencapai 8,64%.

Kondisi yang baik juga terlihat dari indikator P1 dan P2. Pada periode Maret 2010–Maret 2014, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Magelang menunjukkan tren menurun dari 1,61 pada bulan Maret 2010 menjadi 0,94 pada Maret 2014. Setelah pada tahun 2013 Indeks Keparahan Kemiskinan sempat naik 0,04 poin, pada tahun 2014 turun 0,05 poin menjadi 0,20. Kecilnya nilai P1 dan P2 menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Magelang cukup rendah. Data kemiskinan dengan pendekatan mikro didapat dari hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 yang dilaksanakan pada bulan Juli 2015 dengan hasil sebagai berikut :



Sumber: TNP2K, 2016, diolah

Gambar 2.9
Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 Kota Magelang

Dari data hasil PBDT 2015 terlihat bahwa dari tiga kecamatan yang memiliki rumahtangga dengan status kesejahteraan dibawah 40 % terendah yang paling adalah di Kecamatan Magelang Tengah yaitu di Kelurahan Rejowinangun Utara. Sementara di Kecamatan Magelang Selatan ada dua kelurahan yang harus mendapat perhatian dengan melihat jumlah rumahtangga dengan status kesejahteraan dibawah 40 % terendah yang besar yaitu di kelurahan Rejowinangun Selatan dan Kelurahan Tidar Utara. Batang warna hijau menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan di kelurahan tersebut sudah cukup baik yaitu terlihat dengan jumlah rumah tangga dengan status kesejahteraan dibawah 40 % terendah yang kecil yaitu di Kelurahan Jurangombo Utara dan Jurangombo Selatan di Kecamatan Magelang Selatan dan Kelurahan Kramat Utara di Kecamatan Magelang Utara.

Tabel II.24
Jumlah Keluarga dalam Rumah Tangga dengan Status Kesejahteraan 40 % Terendah di Kota Magelang Menurut Kelurahan

Wilayah	Jumlah Keluarga dalam Rumah tangga				Total
	1	2	3	4 - 6	
Kec. Magelang Selatan	2865	219	17	1	3102
Magersari	554	103	10	0	667
Rejowinangun Selatan	869	44	0	1	914
Jurangombo Utara	173	36	2	0	211
Jurangombo Selatan	210	24	3	0	237
Tidar Utara	718	12	1	0	731
Tidar Selatan	341	0	1	0	342
Kec. Magelang Tengah	3506	193	25	2	3726
Rejowinangun Utara	989	52	7	0	1048
Kemirirejo	344	9	1	0	354
Cacaban	518	46	2	0	566
Magelang	502	55	9	1	567
Panjang	613	21	2	1	637
Gelangan	540	10	4	0	554
Kec. Magelang Utara	2204	96	10	0	2310
Wates	598	15	0	0	613
Potrobangsari	534	15	0	0	549
Kedungsari	366	45	8	0	419
Kramat Utara	148	8	0	0	156
Kramat Selatan	558	13	2	0	573
Kota Magelang	8575	508	52	3	9138

Sumber : BPS Kota Magelang, 2016

Dari jumlah keluarga dalam rumah tangga dengan status kesejahteraan dibawah 40 % terendah terlihat masih banyak keluarga yang tinggal bersama dalam satu rumah atau tergabung dalam satu rumah tangga yaitu bergabung dalam pengelolaan keuangan dan makan dalam satu dapur. Dalam tabel diatas terlihat sekitar 563 Keluarga masih tergabung dalam rumahtangga yang masing masing tergabung dalam 2 sampai 6 keluarga dalam satu rumah tangga.

Tabel II.25
Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) dalam Rumah Tangga dengan Status Kesejahteraan 40 % Terendah di Kota Magelang Menurut Kelurahan

Wilayah	Anggota Rumah tangga (ART)			Total
	1 - 4	5 - 8	9 - 12	
Kec. Magelang Selatan	2261	820	21	3102
Magersari	457	207	3	667
Rejowinangun Selatan	722	192	0	914
Jurangombo Utara	151	57	3	211
Jurangombo Selatan	164	70	3	237
Tidar Utara	519	204	8	731
Tidar Selatan	248	90	4	342
Kec. Magelang Tengah	2836	871	19	3726
Rejowinangun Utara	762	280	6	1048
Kemirirejo	266	86	2	354
Cacaban	420	145	1	566
Magelang	445	117	5	567
Panjang	535	101	1	637
Gelangan	408	142	4	554
Kec. Magelang Utara	1737	553	20	2310
Wates	460	148	5	613
Potrobangsari	372	169	8	549
Kedungsari	306	109	4	419
Kramat Utara	128	27	1	156
Kramat Selatan	471	100	2	573
Kota Magelang	6834	2244	60	9138

Sumber : BPS Kota Magelang, 2016

Jumlah anggota rumah tangga (ART) dalam rumah tangga dengan status kesejahteraan dibawah 40 % terendah relatif masih banyak. Semakin banyak anggota rumah tangga mengindikasikan semakin beratnya beban

dalam rumah tangga tersebut. Berdasarkan data PBDT 2015, dari total 9.138 rumah tangga yang ada hampir sepertiganya yaitu sekitar 2.304 rumah tangga mempunyai ART lebih dari 5 orang.

2.2.1.7 Angka Kriminalitas yang Tertangani

Selama kurun waktu 2011-2015, jumlah kriminalitas di Kota Magelang berada dalam tren yang menurun. Hal ini merepresentasikan kinerja pencegahan terhadap kriminalitas dari berbagai stakeholders. Statistik jumlah kriminalitas selama 2011-2015 sebagaimana nampak pada tabel berikut :

Tabel II.26
Data Kriminalitas yang Tertangani di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Kriminalitas		Rasio (%)	Angka Kriminalitas yang Tertangani
	Lapor	Selesai		
2011	242	164	67,77	13.75
2012	184	134	72,83	11.20
2013	132	90	68.18	7.49
2014	149	108	72.48	8.95
2015	171	134	78,36	11.08

Sumber : Polres Magelang Kota, 2011-2016, diolah

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa berdasarkan kejadian tindak kriminalitas yang dari tahun ke tahun makin menurun, menunjukkan tingkat kondusivitas yang makin baik. Selain itu rasio penanganan terhadap kriminalitas sejak tahun 2013 terus meningkat, meskipun belum mampu melebihi rasio pada tahun 2011. Kondisi ini sangat penting bagi iklim usaha yang kondusif dan prasyarat utama menuju daya saing daerah.

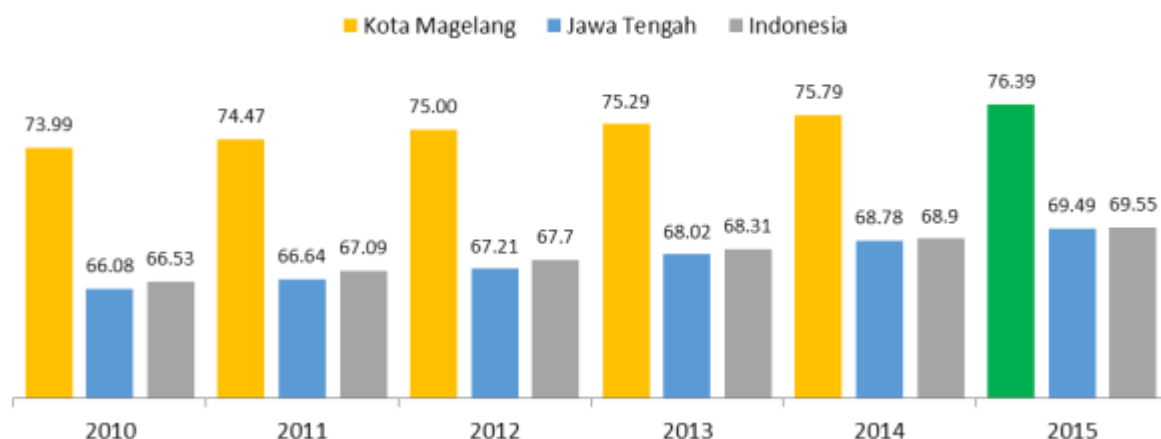
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial digambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Kemiskinan, Ketenagakerjaan.

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

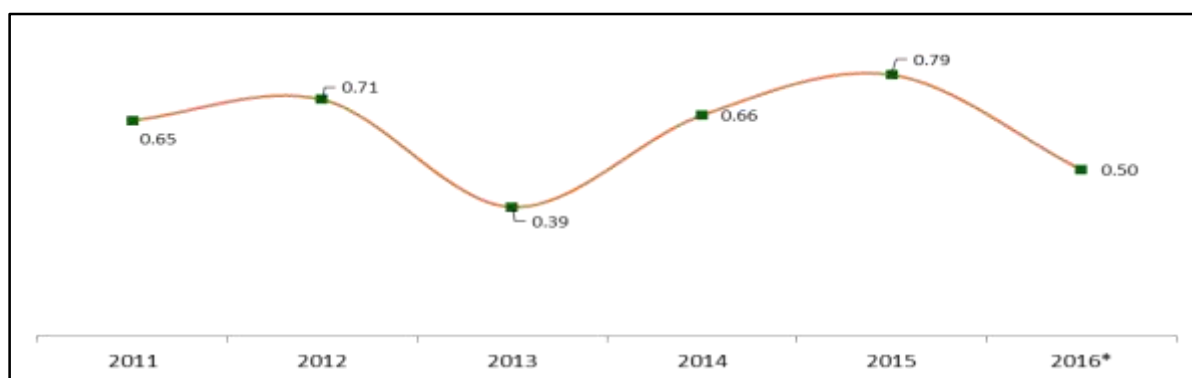
IPM merupakan indikator makro yang dapat menggambarkan ukuran kinerja pembangunan pemerintahan. Sejak tahun 2015 Indonesia telah menerapkan metode baru dalam perhitungan IPM dengan penyesuaian publikasi IPM dari tahun 2010-2014 yang serentak diterapkan juga pada level daerah.

IPM Kota Magelang dalam kurun waktu tahun 2010-2015 berhasil meraih posisi ke-4 di antara IPM 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dengan IPM yang mencapai 76,39 (laju 0,79%), IPM Kota Magelang masuk dalam kategori sedang menuju tinggi. IPM tersebut berada di bawah IPM Kota Salatiga (80,96), Kota Semarang (80,23) dan Kota Surakarta (80,14) yang masing-masing memiliki kategori sangat tinggi. Sedangkan apabila dibandingkan dengan IPM Jawa Tengah (69,49) dan Nasional (69,55) yang keduanya termasuk dalam kategori IPM sedang, IPM Kota Magelang memiliki angka yang lebih tinggi. Selanjutnya indeks ini pada tahun 2016 diprediksi memiliki kecenderungan naik hingga mencapai 76,77.



Sumber: BPS, 2016 (diolah)

Gambar 2.10
Perbandingan IPM Indonesia, Jawa Tengah dan Kota Magelang
Tahun 2010-2015



Sumber: 1. BPS Kota Magelang, (diolah)
2. Prediksi Kantor Penelitian Pengembangan dan Statistik

Gambar 2.11
Pertumbuhan IPM Kota Magelang Tahun 2010-2015 dan Prediksi Tahun 2016

Beberapa statistik tersebut di atas mengindikasikan prestasi tersendiri pada performa pembangunan Pemerintah Kota Magelang selama tahun 2010-2015. Realisasi program dan kegiatan selama periode tersebut terbukti mampu meningkatkan derajat dan kualitas pembangunan Manusia di Kota Magelang dengan rata-rata pertumbuhan 0,62% sejak tahun 2010 yang juga tercermin pada beberapa indikator komposit sebagai berikut:

Tabel II.27
Komponen Penyusun IPM Kota Magelang dan Sekitarnya Tahun 2010-2015

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rp/kapita/thn)	IPM
2010	76,39	12,22	10,08	9.681	73,99
2011	76,44	12,33	10,14	9.922	74,47
2012	76,49	12,49	10,20	10.169	75,00
2013	76,54	12,65	10,22	10.258	75,29
2014	76,57	12,98	10,27	10.344	75,79
2015					
Kota Magelang	76,58	13,10	10,28	10.793	76,39
Kota Surakarta	77,00	14,14	10,36	13.604,00	80,14
Kota Salatiga	76,83	14,97	9,81	14.600,00	80,96

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rp/kapita/thn)	IPM
Kota Semarang	77,20	14,33	10,20	13.589,00	80,23
Kota Pekalongan	74,11	12,59	8,28	11.253,00	72,69
Kota Tegal	74,12	12,46	8,27	11.748,00	72,96
Purworejo	74,03	13,04	7,65	9.305,00	70,37
Wonosobo	71,02	11,43	6,11	9.736,00	65,70
Kab. Magelang	73,27	12,14	7,19	8.182,00	67,13
Jawa Tengah	73,96	12,38	7,03	9.930,00	69,49
Indonesia	70,78	12,55	7,84	10.149,67	68,90

Sumber: BPS, 2016

Gambaran mengenai capaian indikator-indikator pembentuk IPM di Kota Magelang adalah sebagai berikut:

a. Angka Harapan Hidup (Dimensi Kesehatan)

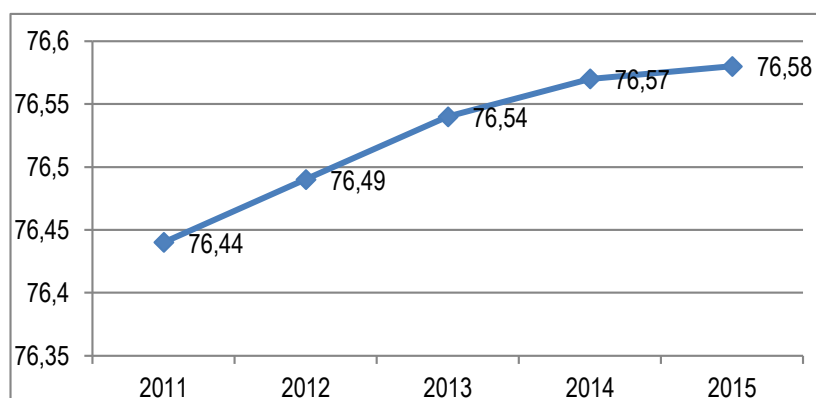
Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan komponen pembentuk IPM dari dimensi kesehatan. AHH, yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, di Kota Magelang pada tahun 2015 mencapai 76,58 tahun. Terjadi peningkatan AHH sebesar 0,19 poin apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2011. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya yaitu Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung.

Tabel II.28
Usia Harapan Hidup (tahun) Penduduk Kota Magelang dan Daerah Sekitar

Tahun	Kota Magelang	Kabupaten Magelang	Kabupaten Temanggung
2011	76,44	73,07	75,22
2012	76,49	73,14	75,26
2013	76,54	73,21	75,31
2014	76,57	73,25	75,34
2015	76,58	73,27	75,35

Sumber : BPS Kota Magelang, 2011-2016

Meskipun dengan pergerakan lambat AHH di Kota Magelang selalu meningkat sejak tahun 2010 dan diprediksi akan memiliki tren pertumbuhan positif di tahun 2016 mencapai 76,64 tahun.



Gambar 2.12
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Magelang Tahun 2011-2015

b. Dimensi Pendidikan

b.1 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

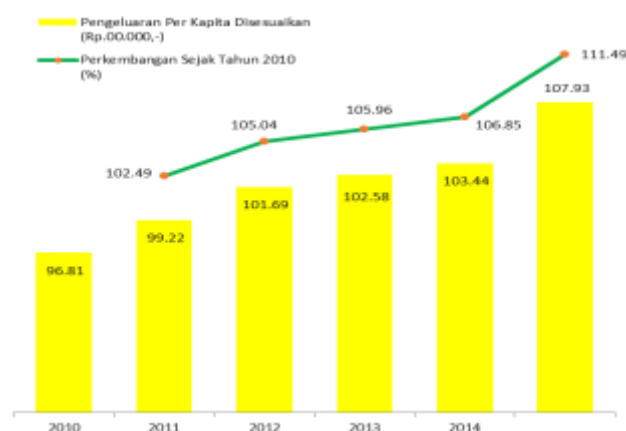
Kualitas pembangunan pada sektor pendidikan dapat terlihat dari indeks pendidikan yang merupakan komposit dari Indeks Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling/EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling/MYS). Sampai dengan tahun 2015 indeks pengetahuan di Kota Magelang mencapai 0,7066 tumbuh 0,0311 poin dari kondisi tahun 2010.

Tingginya nilai indeks ini terlebih berasal dari kontribusi angka harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas yang mencapai 13,1 tahun (setara level pertama perguruan tinggi) dengan indeks 0,728. Pada level provinsi dan nasional angka ini lebih tinggi namun masih sedikit tertinggal dari Kota Salatiga, Surakarta dan Semarang. HLS tahun 2016 diprediksi tumbuh 1,46% mencapai 13,29 tahun (deviasi +/- 0,043).

Di sisi lain angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Magelang masih perlu mendapat perhatian intens. Walaupun Kota Magelang memiliki RLS yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitar, namun angka ini masih tergolong cukup rendah. Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah penduduk Kota Magelang usia 25 tahun ke atas berada pada angka 10,28 tahun (indeks 0,685) relatif stabil sejak tahun 2010 dan bergerak sangat lambat. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk 25 tahun ke atas di Kota Magelang hanya memiliki pendidikan formal tertinggi pada level 1 sekolah menengah atas. RLS tahun 2016 diprediksi tumbuh 0,58% mencapai 10,34 tahun (deviasi +/- 0,012).

c. Dimensi Standar Hidup layak

Standar hidup layak pada komponen IPM diproksi berdasarkan nilai pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Standar Hidup Layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak membaiknya kondisi ekonomi berikut pemerataannya. Pada **Gambar II.** terlihat, tahun 2015 indikator ini mencapai Rp. 10.793.000/kapita/tahun tumbuh 4,34%. Sejak tahun 2010 pengeluaran per kapita disesuaikan di Kota Magelang mampu berkembang 111,49%. Indeks pengeluaran penduduk Kota Magelang tumbuh dari 0,691 di tahun 2010 mencapai 0,725 pada tahun 2015. Di tahun 2016 pengeluaran per kapita penduduk kota magelang diprediksi mencapai Rp. 10.886.000/kapita/tahun (deviasi +/- 67,24) tumbuh 0,86%.



Sumber : BPS Kota Magelang, 2011-2016 (diolah)

Gambar 2.13
Perkembangan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Kota Magelang Tahun 2011-2014

2.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Sejak tahun 1995 hingga 2009 IPG dihitung dengan menggunakan metode lama yang tidak mengukur ketimpangan antar gender yang terjadi namun hanya disparitas dari masing masing komponen IPM untuk setiap gender. Angka IPG metode ini tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM. Pada Tahun 2014, UNDP melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru yang merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada IPM. IPG metode baru merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM, dengan menggunakan rasio IPM perempuan dengan laki-laki. (UNDP, 2004).

Dimensi yang digunakan dalam penghitungan masih sama yaitu :

- 1) Umur panjang dan hidup sehat (e_0 = angka harapan hidup menurut jenis kelamin)
- 2) Pengetahuan/pendidikan (HLS dan RLS menurut jenis kelamin)
- 3) Standar hidup layak (angka pengeluaran perkapita menurut jenis kelamin yang didapat dari data sekunder berupa upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk laki laki dan perempuan).

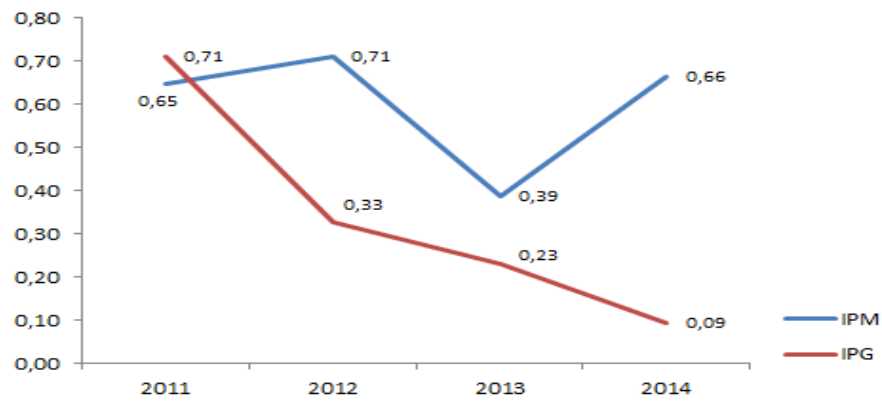
Perubahan metodologi yang terjadi menyebabkan perubahan interpretasi dari angka IPG. Metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM, semakin kecil selisih angka IPG dan IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara laki laki dan perempuan. Dengan metode baru interpretasi angka IPG berubah dengan menggunakan angka 100 yang dijadikan patokan karena angka tersebut merupakan rasio paling sempurna, yaitu semakin kecil jarak IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki laki dan perempuan dan semakin besar jarak angka IPG ke nilai 100, maka makin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki laki dan perempuan.

Tabel II.29
IPG Kota Magelang Tahun 2010-2014

Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2010	94,16
2011	94,83
2012	95,14
2013	95,36
2014	95,45
Jateng 2014	91,89
Indonesia 2014	90,34

Sumber: BPS Kota Magelang, 2016

Pencapaian pembangunan gender di Kota Magelang menunjukkan peningkatan dalam 4 tahun terakhir seiring dengan kenaikan IPG dan mendekati angka 100. Hal ini berarti bahwa jarak angka IPG semakin kecil ke nilai 100 yaitu kesetaraan pembangunan antara laki laki dan perempuan sudah tercipta meskipun terus harus diupayakan untuk mendekati kesempurnaan.



Sumber: BPS RI, 2015 (diolah)

Gambar 2.14
Percepatan Pertumbuhan IPM dan IPG Kota Magelang, 2011-2014 (%)

IPG Kota Magelang meningkat dari 94,16 pada tahun 2010 menjadi 95,45 pada tahun 2014, lebih tinggi daripada indeks pada skala provinsi dan nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam 3 dimensi pembangunan di Kota Magelang selama periode 2010-2014 terus mengalami peningkatan.

Data IPM terpilah gender tahun 2015 sampai dengan saat ini belum dipublikasikan secara resmi. Berdasar data tahun 2014, sebagaimana kecenderungan pada umumnya, harapan hidup kaum perempuan di Kota Magelang (78,49 tahun) lebih panjang daripada kaum laki-laki (74,52 tahun), sama halnya dengan kondisi di Kabupaten Magelang dan Temanggung. Namun Angka HLS, RLS dan pengeluaran per kapita perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Perkembangan Angka HLS tersebut berbeda dengan daerah sekitar. Angka HLS perempuan di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung lebih tinggi dari pada laki-laki. Maka diperlukan perhatian lebih besar terhadap tingkat pendidikan kaum perempuan di Kota Magelang untuk memperkecil kesenjangan dengan kaum laki-laki.

Tabel II.30
Data Komponen Pembentuk IPG Kota Magelang dan Wilayah Sekitar Tahun 2014

Indikator	Kota Magelang		Kab Magelang		Kab Temanggung	
	L	P	L	P	L	P
Angka Harapan Hidup (tahun)	74,52	78,49	71,27	75,11	73,33	77,24
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,26	12,88	11,85	12,87	11,55	11,88
Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,89	9,91	7,55	6,83	7,03	5,97
Pengeluaran perkapita yang disesuaikan (Rp.000,-)	11.868	10.265	11.799	7.402	9.666	8.010

Sumber: BPS RI, 2015

2.2.2.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG menunjukkan apakah perempuan dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi IDG mencakup peran aktif perempuan dalam berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Capaian pembangunan gender (IPG) memiliki hubungan positif dengan capaian pemberdayaan gender (IDG). Meningkatnya pembangunan gender di suatu wilayah harus diiringi dengan meningkatnya pemberdayaan gendernya, yang artinya IPG suatu wilayah tinggi maka nilai IDG nya juga seharusnya tinggi.

Tabel II.31
IDG Kota Magelang Tahun 2010-2014

Tahun	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2010	65,29	94,16
2011	66,29	94,83
2012	67,29	95,14
2013	68,03	95,36
2014	78,82	95,45

Sumber: BPS Kota Magelang, 2015

Pada tahun 2010 IDG Kota Magelang sebesar 65,29 dengan tren naik sehingga pada tahun 2014 mampu mencapai 78,82. Hal ini menunjukkan semakin baiknya peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi. Angka tersebut lebih tinggi dari angka IDG rata-rata provinsi Jawa Tengah, yang berada pada angka 74,46 atau menempati posisi nomor 4 se-Indonesia. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, IDG Kota Magelang berada di peringkat ke-3 di bawah Kabupaten Temanggung yang mampu mencapai IDG sebesar 81,65 (peringkat ke-6 se-Indonesia) dan Kota Salatiga (80,36).

Keterwakilan perempuan di Kota Magelang dalam parlemen di tahun 2014 mencapai 24% hampir memenuhi kuota yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan bahwa kuota perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik sekurang-kurangnya 30%. Sementara itu persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Kota Magelang pada tahun 2014 mencapai 45,02% lebih tinggi dari keterwakilan di parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan sosial cukup baik hampir setara dengan laki-laki.

Tabel II.32
Komponen Penyusun IDG di Kota Magelang dan Wilayah Sekitar Tahun 2014

Wilayah	% Keterlibatan Perempuan di Parlemen	% Perempuan sebagai Tenaga Profesional	% Sumbangan Pendapatan Perempuan
Kota Magelang	24,00	45,02	41,11
Kab. Magelang	14,00	36,94	37,22
Temanggung	31,11	44,42	41,74
Purworejo	17,78	48,28	32,63
Wonosobo	4,44	38,12	23,31
Jateng	24,00	45,67	33,46
Indonesia	17,32	45,61	35,64

Sumber: BPS RI, 2015

Proporsi angkatan kerja perempuan di Kota Magelang dari 45,96% di tahun 2013 terus menurun menjadi hanya 44,53% di tahun 2015. Kondisi tersebut selaras dengan persentase penganggur kaum perempuan yang meningkat dari tahun ke tahun dari 26,10% di tahun 2013 menjadi 34,86% di tahun 2015. Perlu upaya lebih dari

Pemerintah Kota Magelang untuk mendorong peran dan partisipasi perempuan baik sebagai objek maupun subjek pembangunan sehingga optimalisasi kapabilitas kaum perempuan dapat tercapai dengan baik.

2.2.3 Fokus Seni Budaya , Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Agama

Analisis kinerja atas fokus seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator jumlah grup kesenian, jumlah gedung kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga.

2.2.3.1 Seni – Budaya

Seni Budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi. Jumlah kelompok seni dan budaya di Kota Magelang selama periode 2011-2014 cenderung konstan, namun mengalami peningkatan jumlah yang cukup tinggi dari 164 buah pada tahun 2014 menjadi 222 pada tahun 2015. Terjadinya lonjakan jumlah kelompok seni dan budaya yang cukup tinggi pada tahun 2015 salah satunya disebabkan adanya momentum Ayo Ke Magelang 2015 yang disemarakkan dengan berbagai event-event seni dan budaya. Kelompok seni dan budaya di Kota Magelang meliputi kelompok-kelompok kubro siswo, kuntulan, ketoparak, jathilan/ reog, wayang orang, dagelan/ lawak, karawitan/ panembromo, orkes keroncong, samproh/ kasidah, orkes melayu, group band, sanggar tari, seni lukis/seni rupa, tari jawa tradisional, tari topeng ireng, wayang kulit, dalang, dekorasi, seni pahat, paduan suara dan campursari.

Berbagai aktivitas kebudayaan, kesenian dan aktivitas lainnya saat ini dapat difasilitasi di Gedung Kesenian Kota Magelang. Gedung Kesenian Kota Magelang menempati lantai 2 eks Gedung Sasana Bumi Kyai Sepanjang yang digunakan bersama dengan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selesai dibangun pada tahun 2013. Kota Magelang mempunyai 5 museum sebagai media untuk menunjukkan perubahan sosial serta pertumbuhan budaya dan ekonomi yang menggambarkan sebuah peradaban budaya daerah, dan sejarah perjuangan bangsa. Kelima museum tersebut yaitu Museum Pangeran Diponegoro, Museum Taman Abdul Jalil, Museum Asuransi Bumi Putera, Museum BPK RI dan Museum Jenderal Sudirman.

Tabel II.33
Perkembangan Seni dan Budaya Kota Magelang Tahun 2011 – 2015

NO	URAIAN	CAPAIAN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Grup Kesenian	160	160	162	164	222
2	Jumlah Gedung Kesenian	0	0	1	1	1
3	Museum	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang, 2011-2015

2.2.3.2 Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda sebagai generasi penerus bangsa mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan. Pemuda sebagai generasi muda merupakan pemegang estafet kepemimpinan dan pembangunan daerah, oleh karena itu diperlukan sumberdaya manusia pemuda yang berkualitas yang mampu menjadi pilar, penggerak dan pengawal jalannya pembangunan daerah. Aktivitas pemuda yang diindikasikan dari jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Magelang selama 2011 – 2015 menunjukkan trend peningkatan dari 7 kegiatan menjadi 20 kegiatan pada tahun 2015. Sedangkan dari sisi organisasi, jumlah organisasi pemuda relatif stagnan selama periode 2011-2015 walaupun telah meningkat dari 28 buah pada tahun 2011 menjadi 31 pada tahun 2015.

Tabel II.34
Perkembangan Kepemudaan Kota Magelang Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kegiatan kepemudaan	7	13	20	15	20
2.	Jumlah organisasi pemuda	28	31	31	31	31

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang, 2011-2015

Dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga dan meningkatkan kesehatan masyarakat, dilaksanakan berbagai even/ kegiatan olahraga. Jumlah even/ kegiatan olahraga pada periode 2011-2015 juga relatif konstan, walaupun terdapat penambahan 2 buah dari 32 pada tahun 2011 menjadi 34 pada tahun 2015. Dalam upaya memfasilitasi aktifitas olahraga, Kota Magelang memiliki berbagai fasilitas olahraga diantaranya gedung olahraga. Jumlah gedung olahraga Kota Magelang selama 2011-2015 meningkat dari 27 buah pada tahun 2011 menjadi 36 buah pada tahun 2015.

Tabel II.35
Perkembangan Olahraga Kota Magelang Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah even/ kegiatan olahraga yang diselenggarakan	32	32	32	32	34
2.	Jumlah gedung olahraga	27	27	28	28	36

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang, 2011-2015

2.2.3.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi salah satu unggulan dari Kota Magelang, sebagai unggulan kompetitif dari sisi Sumber Daya Manusia. Beberapa warga Kota Magelang telah berhasil mengharumkan nama Kota Magelang baik di tingkat Provinsi, Nasional, bahkan Internasional. Beberapa prestasi tersebut antara lain:

- Baharuddin Maghfuri, siswa SMA Negeri 1 Kota Magelang, meraih Medali Perunggu Olimpiade Sains Nasional (2005) Bidang Kimia.
- Rizka Rahmani, siswa SD Mutual 1 Kota Magelang, meraih Medali Perak Olimpiade Sains dan Matematika JSM Se-Jateng DIY (2006) bidang Sains.
- Ahmad Priatama, siswa SMA Negeri 1 Kota Magelang, meraih Medali Perunggu Olimpiade Sains Nasional (2007) Bidang Komputer.
- Andrew S dan Liwiryon Sudarso, siswa SMP Negeri 1 Kota Magelang, memenangkan kontes Imagine Ristek 2011 kategori Rule of Robo Cup tingkat nasional yang diselenggarakan di Jakarta, dan mewakili Indonesia ke kontes robot internasional di Istanbul Turki.
- SMP Negeri 1 Kota Magelang Menduduki peringkat pertama nasional dalam perolehan nilai hasil ujian nasional (UN) 2012/2013, dengan nilai rata-rata hasil UN 9,14.
- Jingga Mutiara, siswa SMP 1 Kota Magelang meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional (OSN) mata

pelajaran IPS di Padang akhir Mei 2014. Keberhasilan itu mengulangi prestasi kakak kelasnya, Gabriella Krista Anindit, yang juga meraih medali perak OSN mata pelajaran IPS di Batam tahun 2013.

- Fun Nagede Adinsyah (medali perunggu cabang ekonomi), Kurniawati Yuli Ashari (medali perak, cabang ekonomi), dan Husen Wahyu Adi (medali emas, cabang astronomi). Ketiganya berasal dari SMA Negeri 1 Kota Magelang, mengikuti Olimpiade Sains SMA 2013, yang diselenggarakan oleh ITB.
- Immanuel William Suryowidagdo, siswa SMP Negeri 1 Kota Magelang, meraih peringkat 16 dunia di World Robotic Olimpiade (WRO) Sochi, Rusia (2014).
- Achmad Haulian Yoga, siswa SMP Negeri 1 Kota Magelang, meraih juara matematika Sains dan Bahasa Inggris (MSI) tingkat nasional (2014).
- Siti Mokaromah dari SMK Negeri 2 Kota Magelang, meraih juara 1 bidang Matematika Non Teknologi, Olimpiade Sain Terapan Nasional (OSTN) tingkat Jawa Tengah (17-19 Maret 2015).

Pada bidang pendidikan, SD Muhammadiyah Satu Alternatif (MUTUAL) menorehkan prestasi yang membanggakan, dimana dalam Ujian Nasional tahun 2016 ini, SD Mutual menempati ranking pertama untuk nilai rata-rata nilai ujian terbaik se-Jawa Tengah. Tidak hanya itu saja, salah satu siswanya yaitu Nabila memperoleh nilai sempurna 10,00 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. Untuk tingkat Kota Magelang, prestasi hasil UN Tertinggi dari SD Mutual ini sudah diraih selama 9 tahun berturut-turut.

Untuk tingkat SMP, SMP Negeri 1 Magelang juga kembali mengulang prestasi tahun lalu, yaitu mempertahankan ranking pertama untuk nilai rata-rata nilai Ujian Nasional terbaik tingkat Jawa Tengah dan Tingkat Nasional dalam Ujian Nasional tingkat SMP/MTsN. Ini adalah sebuah prestasi yang membanggakan bagi anak-anak Kota Magelang.

Sedangkan untuk tingkat SMA/MA/SMK, prestasi yang juga ditorehkan oleh anak-anak SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 2 Kota Magelang. SMA Negeri 1 Magelang memperoleh ranking pertama untuk nilai rata-rata nilai ujian Nasional terbaik tingkat Jawa Tengah pada katagori IPS, sedang SMKN 2 Kota Magelang memperoleh ranking pertama untuk nilai rata-rata nilai ujian Nasional terbaik tingkat Jawa Tengah.

Untuk prestasi perseorangan, anak-anak SMA Negeri 1 Kota Magelang juga menorehkan prestasi yang tidak kalah membanggakan dalam Olimpiade sains tingkat Jawa Tengah, yaitu dengan menyabet juara pertama tingkat Jawa Tengah. Pada bidang Matematika, Fata Nugraha meraih juara pertama, bidang Fisika diraih oleh Pandega Abyan, dan dalam bidang Kebumian Kenny Putri Kinasih meraih juara pertama tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Jingga Mutiara meraih juara pertama tingkat Nasional untuk bidang Kebumian.

Selain itu, pada lomba pidato Bahasa Inggris tingkat Jawa Tengah, siswa SMP Negeri 1 Magelang juga meraih juara ketiga, Aulia Tri Hastuti dari SMA Negeri 1 Magelang meraih juara ketiga lomba Cipta Puisi tingkat Jawa Tengah, dan pada katagori Lomba melukis tingkat SLB se-Jawa Tengah, siswa SLB Negeri Magelang meraih juara kedua yang diraih oleh Fransiska Intan Deliana.

Selain prestasi yang diraih siswa-siswinya, ada pula prestasi yang diraih warga dari aneka kegiatan terkait IPTEK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Magelang, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang dengan kegiatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat

(KRENOVA). Sejak tahun 2005 hingga 2016 (kecuali tahun 2012 dan 2014), Kota Magelang selalu masuk peringkat 20 besar di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Kota Magelang mendapat anugerah prestasi tertinggi di tingkat nasional di bidang IPTEK, yaitu penghargaan Anugrah RISTEK dari Pemerintah Pusat selama 3 tahun berturut-turut (2009 -2011). Penghargaan ini diberikan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang telah menunjukkan kontribusi optimal dalam membangun IPTEK, sebagai dasar penyelesaian masalah-masalah aktual yang dihadapi daerah guna mendorong daya saing daerah. Selain Anugrah RISTEK, penghargaan lain yang sudah diterima adalah, Best Practice APEKSI, Penghargaan 102 Inovasi (tahun 2010), dan Penghargaan 103 Inovasi (tahun 2011). Sedangkan pada 2012 penghargaan yang sebelumnya diberikan kepada Kabupaten/kota telah dialihkan pada Provinsi, sehingga pemerintah Kota Magelang tidak memiliki peluang mendapatkannya.

Sebagai upaya Pemerintah memfasilitasi dan menggali kemampuan sumber daya manusia di lembaga penelitian dan pengembangan baik pemerintah, swasta dan perguruan tinggi dan mendorong peran aktif mereka dalam rangka mendukung upaya penyelesaian masalah-masalah pembangunan dalam jangka pendek dan menengah, maka Pemerintah Kota Magelang mulai tahun 2010 melaksanakan kegiatan Riset Unggulan Daerah (RUD). Selain itu, RUD dilaksanakan dalam rangka membangun jaringan keterpaduan kerjasama antara peneliti dalam bidang yang sama dan menumbuhkan kapasitas inovasi sejalan kemajuan teknologi, dan memanfaatkan berbagai sumberdaya riset yang tersedia di daerah untuk kegiatan litbang daerah. Aplikasi RUD yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2015 bisa dilihat pada Tabel II.45 berikut :

Tabel II.36
Daftar Hasil Riset Unggulan Daerah

Tahun	Judul
2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangkit Listrik Terbaru Hybrid Convertible Tenaga Angin dan Matahari untuk Lampu Penerangan yang Tidak Terganggu Kondisi Listrik Byar Pet dari PLN; 2. Peningkatan Pendapatan Petani Bercocok Tanam Tumpang Sari; 3. Pengembangan Model Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan Dasar di Kota Magelang.
2011	Perakitan dan pembuatan kendaraan Spyder, bekerjasama antara BPPT-Putra Agung Setia dan Pemerintah Kota Magelang.
2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi / pemanfaatan LPG kemasan tabung 12 kg untuk bahan bakar kendaraan sebagai solusi penghematan energi sektor transportasi; 2. Tabulampot pada Berbagai Ukuran Pot dan Dosis Pupuk NPK Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Strobery Guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kota Magelang; 3. Pembangkit Tenaga Mikrohidro Model Drum.
2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Program Magelang Kota Sejuta Bunga sebagai Dasar Perancangan Model Pemberdayaan Masyarakat "Multi Directional Cycle". 2. Pemanfaatan Tong "Takashimura" untuk Pembuatan Kompos dalam Skala Rumah Tangga bagi Warga Tidar Baru RT 01/XI Magersari, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang. 3. Menggali Potensi Aliran Sungai sebagai Sumber Energi Alternatif Terbarukan. Studi Kasus: Aliran Kali Manggis dan Kalibening Kota Magelang.
2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi Masyarakat terhadap City Branding Magelang Kota Sejuta Bunga dan Model Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal. Studi kasus: Peserta didik dan pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah Umum Kota Magelang.

Tahun	Judul
	2. Kajian Daya Guna Mesin Pencacah Sampah Organik. 3. Videotron dalam Percepatan Pembangunan. Studi kasus: Peran Videotron dalam Percepatan Pembangunan Kota Magelang.
2015	1. Efektifitas Pelatihan Kerja dalam Pengurangan Pengangguran Kota Magelang. 2. Pengembangan Residu Sampah Plastik Kota Magelang menuju Ketahanan Energi Kota Magelang. 3. Pengaruh Penataan Kuliner Kota Magelang terhadap Pendapatan Masyarakat.

Sumber: Kantor Litbang dan Statistik, 2015

Dari sisi pelayanan masyarakat, Pemerintah Kota Magelang juga telah melengkapi diri dengan beragam teknologi demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, beberapa di antaranya adalah:

- Web resmi Pemerintah Kota Magelang, untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat secara cepat.
- Web resmi SKPD, dimana di dalam *website* tersebut terdapat aplikasi dan informasi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
- Penggunaan Sistem Informasi untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan layanan, seperti e-KTP (KTP Elektronik), SIMPUS (SIM PUSKESMAS), Perijinan, SIM Keuangan, DataGO, dan lain-lain.
- DataGO sedang dikembangkan untuk menjadi pusat data terpadu Kota Magelang. Diharapkan, masyarakat luas dapat mengakses dan menggunakan data terbaru di Kota Magelang dari situs ini.
- *Free-access* WiFi & Internet di beberapa tempat umum, seperti Alun-alun.
- *Traffic Management Center*, yang memantau kondisi lalu lintas di beberapa titik dengan menggunakan CCTV.

2.2.3.4 Agama

Sikap saling toleransi dan menghargai satu sama lain menjadi kunci harmonisnya kehidupan antar umat beragama di Kota Magelang. Berkaca pada apa yang terjadi di beberapa daerah, dimana kerusuhan terjadi karena adanya friksi antar umat beragama maka perlu dikembangkan sikap saling terbuka dengan membangun sistem dialog lintas agama. Dialog yang terbuka dapat menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan yang pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan. Pada tahun 2011, sebagian besar yaitu 84,86% penduduk Kota Magelang memeluk Agama Islam, kemudian Kristen Protestan 9,46%, Katolik sebesar 5,13%, Budha 0,36%, Hindu 0,11%, Kong-Hu-Chu sebesar 0,05%, dan lainnya sebesar 0,02%.

Kerukunan antar umat beragama di Kota Magelang ditunjukkan dengan tersedianya tempat peribadatan yang diantaranya berdekatan lokasinya. Jumlah tempat peribadatan di tahun 2011 adalah 145 unit masjid, 191 unit musholla, 2 unit gereja Katolik, 28 unit gereja Kristen Protestan, dan 1 unit vihara. Adapun jumlah jemaah haji yang diberangkatkan pada tahun 2010 sebanyak 238 orang, meningkat 18,41% dari tahun 2009 yang berjumlah 201 orang. Pada tahun 2011, 209 orang diberangkatkan ke Tanah Suci, turun sebesar 12,18% dari tahun 2010. Jumlah ini kemudian menurun lagi di tahun 2012 dengan jumlah jemaah haji sebanyak 148 orang. Pada tahun 2013, jumlah jemaah haji dari Kota Magelang sebanyak 171 orang, dan pada 2014, berkurang menjadi 166 orang. Jumlah jemaah haji di tahun 2015 sedikit menurun menjadi 157 orang.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Urusan Pelayanan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah (ada 24 urusan wajib), yaitu bidang urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar: (i) pendidikan, (ii) kesehatan, (iii) pekerjaan umum dan penataan ruang, (iv) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (v) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, (vi) sosial, (vii) ketenagakerjaan, (viii) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (ix) pangan, (x) pertanahan, (xi) lingkungan hidup, (xii) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (xiii) pemberdayaan masyarakat dan desa, (xiv) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (xv) perhubungan, (xvi) komunikasi dan informatika, (xvii) koperasi, usaha kecil dan menengah, (xviii) penanaman modal, (xix) kepemudaan dan olahraga, (xx) statistik, (xxi) persandian, (xxii) kebudayaan, (xxiii) perpustakaan, (xxiv) kearsipan. Gambaran masing-masing penjelasan urusan pelayanan wajib tersebut adalah sebagai berikut:

2.3.1.1 Pendidikan

Kota Magelang memiliki berbagai fasilitas pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal yang cukup lengkap sejak dari jenjang pendidikan TK, tingkat dasar (SD), tingkat pertama (SLTP), tingkat atas (SMU dan SMK), SLB, hingga Perguruan Tinggi. Ketersediaan sarana prasarana pendidikan di Kota Magelang selengkapnya dapat dilihat pada paparan tabel berikut:

Tabel II.36

Jumlah Sekolah, Ruang Kelas, dan Rombongan Belajar Kota Magelang Tahun 2011-2015

JENJANG	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah	75	75	75	73	75
	Jumlah Ruang Kelas	851	545	547	541	542
	· Rusak Berat	2	0	0	21	15
	· Rusak Ringan	59	13	91	93	34
	· Baik	790	532	456	427	493
	Jumlah Rombel	525	541	528	532	535
Madrasah Ibtidaiyah	Jumlah Sekolah	2	2	2	2	2
	Jumlah Ruang Kelas	12	12	12	12	15
	· Rusak Berat	0	0	2	2	1
	· Rusak Ringan	4	4	2	2	4
	· Baik	8	8	8	8	10
	Jumlah Rombel	12	12	12	12	14
Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah	20	20	22	21	21
	Jumlah Ruang Kelas	270	270	320	235	299
	· Rusak Berat	0	0	0	0	4
	· Rusak Ringan	15	15	11	21	28
	· Baik	255	255	309	214	267
	Jumlah Rombel	284	284	342	242	363
Madrasah Tsanawiyah	Jumlah Sekolah	2	2	2	2	2
	Jumlah Ruang Kelas	39	39	43	43	45
	· Rusak Berat	0	0	0	0	0
	· Rusak Ringan	0	0	0	0	3
	· Baik	39	39	43	43	42
	Jumlah Rombel	39	39	42	124	45
Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah	12	12	12	12	12
	Jumlah Ruang Kelas	167	167	179	82	210
	· Rusak Berat	0	0	0	0	0

JENJANG	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
	· Rusak Ringan	3	3	0	0	23
	· Baik	164	164	179	82	187
	Jumlah Rombel	161	167	171	178	185
Sekolah	Jumlah Sekolah	19	19	21	21	20
Menengah	Jumlah Ruang Kelas	244	244	239	251	249
Kejuruan	· Rusak Berat	0	0	6	5	1
	· Rusak Ringan	8	8	35	17	18
	· Baik	236	236	198	229	230
	Jumlah Rombel	271	244	300	293	309
Madrasah	Jumlah Sekolah	2	2	2	2	2
Aliyah	Jumlah Ruang Kelas	36	36	35	35	40
	· Rusak Berat	0	0	0	0	0
	· Rusak Ringan	5	5	3	0	0
	· Baik	31	31	32	35	40
	Jumlah Rombel	36	36	38	40	41

Sumber: Profil Pendidikan Kota Magelang 2011-2015

Tabel di atas menyediakan beberapa informasi pokok tentang jumlah sekolah, jumlah ruang kelas dan kondisinya, dan jumlah rombongan belajar pada setiap jenjang pendidikan. Jumlah sekolah jenjang SD, SMP, MI, MTs, MA dan SMA relatif konstan.

Dilihat dari sisi kondisi ruang kelas (rusak berat, rusak ringan, dan baik), ditemukan data bahwa sebagian besar ruang kelas pada semua jenjang pendidikan kondisinya sudah baik, tetapi masih ada beberapa yang mengalami rusak berat. Pada tingkat SD, MI, SMP dan SMK masih ditemukan kondisi beberapa ruang kelas yang rusak berat, dengan jumlah ruang kelas yang mengalami rusak berat terbanyak terdapat pada jenjang SD sebanyak 15 ruang. Sedangkan pada Madrasah Ibtidaiyah, SMA dan Madrasah Aliyah sudah tidak ditemukan lagi ruang kelas yang mengalami rusak berat.

A. Pendidikan PAUD

Usia Dini merupakan masa emas perkembangan, dimana pada usia tersebut terjadi lonjakan luar biasa pada perkembangan anak yang tidak terjadi pada periode berikutnya. Para ahli menyebutnya sebagai usia emas perkembangan (golden age). Untuk melejitkan potensi tersebut, setiap anak membutuhkan asupan gizi yang baik, perlindungan kesehatan, pengasuhan dan rangsangan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 (pasal 28) bahwa PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, dan PAUD diselenggarakan dalam jalur pendidikan formal seperti: Taman Kanak-kanak, Raodhatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat, sedangkan pada PAUD jalur non formal seperti: Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD atau bentuk lain yang sederajat serta jalur pendidikan informal seperti PAUD dalam keluarga atau PAUD diselenggarakan oleh lingkungan.

Tabel II.37

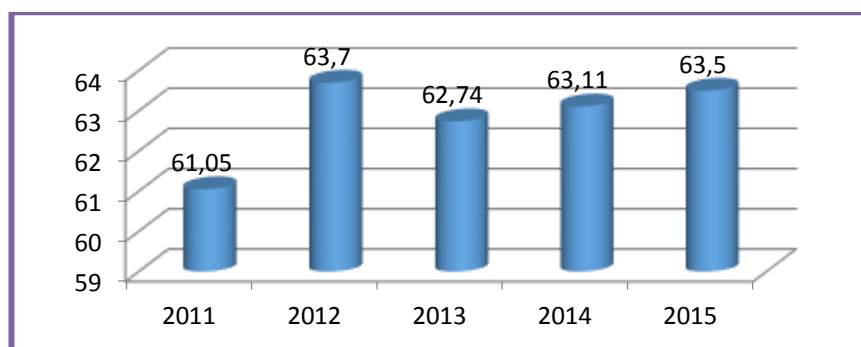
Angka Partisipasi Kasar PAUD Kota Magelang Tahun 2011-2015

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	APK PAUD	61,05%	63,70%	62,74%	63,11%	63,50%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Magelang, 2011-2015

Pemerintah Kota Magelang menyadari pentingnya pembangunan sumber daya manusia mulai sejak dini, oleh karena itu Pemerintah Kota Magelang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan PAUD diantaranya: SBS TK dan KB, Publikasi dan Sosialisasi PAUD, Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD, Penyelenggaraan PAUD, Lomba Semarak Anak Tingkat Kota, Parenting Education, Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan Model Pembelajaran PAUD. Di samping itu juga terdapat beberapa kegiatan yang mendapatkan bantuan dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah, diantaranya: APE PAUD, Pengembangan PAUD Unggulan/terpadu, APE-Indoor, APE-Outdoor, Sarpras PAUD Formal, Peningkatan kualitas Pendidik PAUD (S1/D4). Selain itu terdapat pula kegiatan yang bersumber dana dari APBN Pemerintah diantaranya: BOP PAUD (TK, KB, SPS, TPA, TPQ), Peningkatan kualitas Pendidik PAUD TK, dan Fungsional Pendidik TK.

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan dalam pembangunan pendidikan PAUD telah mampu meningkatkan capaian indikator Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Magelang selama lima tahun, dari 61,05% pada tahun 2011 meningkat menjadi 63,50% pada tahun 2015.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Magelang, 2011-2015

Gambar 2.15
Grafik APK Pendidikan Anak Usia Dini (APUD) Kota Magelang Tahun 2011-2015

B. Pendidikan Dasar

Kota Magelang memiliki berbagai fasilitas pendidikan dasar yang cukup memadai dan berkualitas, sehingga tidak hanya dinikmati warga Kota Magelang saja, tetapi juga banyak warga sekitar Kota Magelang yang memilih menyekolahkan putra putrinya di Kota Magelang. Kinerja pendidikan dasar di Kota Magelang selama kurun waktu 5 tahun terlihat sebagaimana tabel di bawah ini:

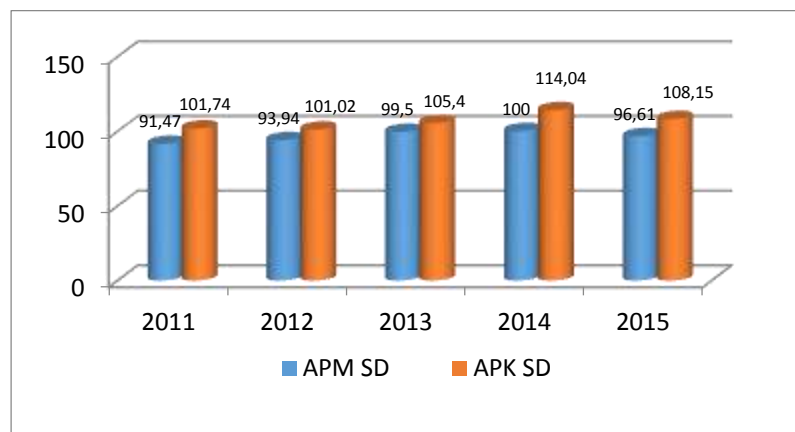
Tabel II.38
Indikator Pendidikan Dasar Kota Magelang Tahun 2011-2015

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	91,47%	93,94%	99,50%	100%	96,61%
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	72,10%	74,59%	75,82%	84,81%	74,62%
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	101,74%	101,02%	105,40%	114,04%	108,15%
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	99,99%	91,25%	80,67%	94,08%	81,92%
5	Angka rata-rata lama sekolah SD/MI	6	6	6	6	6,13

6	Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs	3	3	3	3	3,03
7	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI	1,9	1,9	2,8	1,9	1,9
8	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	2,37	2,37	2,1	2,37	2,37
9	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	0,169	0,098	0,089	0,084	0,170
10	Rasio guru/ murid	1 : 11	1 : 11	1 : 11	1 : 11	1 : 11
11	Rasio guru/ murid per kelas rata-rata	1 : 10 : 31	1 : 10 : 31	1 : 10 : 31	1 : 10 : 31	1 : 10 : 31
12	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	0,01	0	0,03	0,05	0,01
13	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs/ Paket B	0,11	0	0,21	0,39	0,37
14	Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100
15	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B	99,53	99,37	99,87	100	100
16	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	154,65%	134,30%	134,80%	135%	149,34%
17	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA	147,06%	170,3%	168,1%	192,13%	151,34%

Sumber: 1. Dinas Pendidikan Kota Magelang, 2011-2015
2. BPS Kota Magelang, 2011-2015

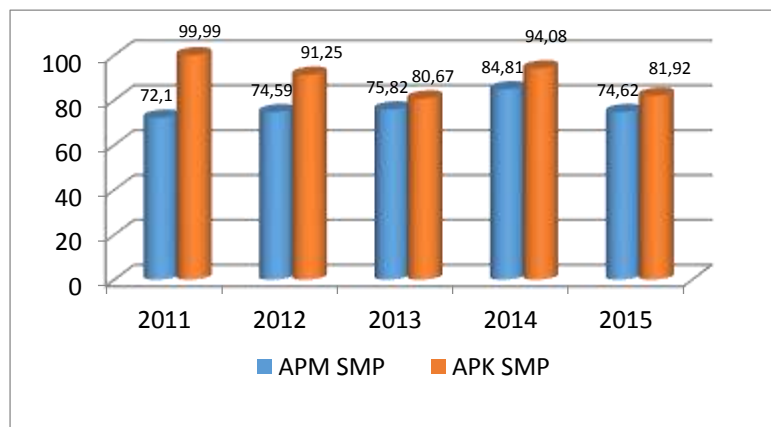
Berbagai upaya pembangunan pendidikan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Magelang telah mampu meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam mengenyam pendidikan dasar, diindikasikan dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Capaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Kota Magelang selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2011 sampai 2015 menunjukkan trend yang semakin meningkat, dari 91,47% pada tahun 2011 meningkat menjadi 96,61% pada tahun 2015. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A juga menunjukkan trend peningkatan. APK SD/MI/Paket A pada tahun 2012 hingga 2014 meningkat cukup tinggi dari 101,74% pada tahun 2011 meningkat menjadi 114,04% pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 108,15%, namun capaian APK SD/MI/Paket A tahun 2015 tersebut masih lebih tinggi daripada kondisi tahun 2011.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Magelang, 2011-2015

Gambar 2.16
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Pada jenjang SMP, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B selama kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan dari 72,1% pada tahun 2011 meningkat menjadi 74,62% pada tahun 2015. Namun sebaliknya, apabila ditinjau dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B selama 5 tahun mengalami penurunan dari 99,99% pada tahun 2011 turun menjadi 81,92% pada tahun 2015.

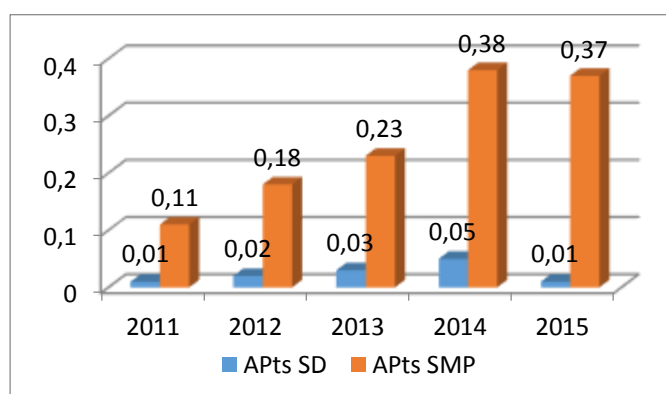


Sumber: Dinas Pendidikan Kota Magelang, 2011-2015, diolah

Gambar 2.17
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Angka Putus Sekolah (APts) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam prosentase. Hasil perhitungan APts ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APts berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

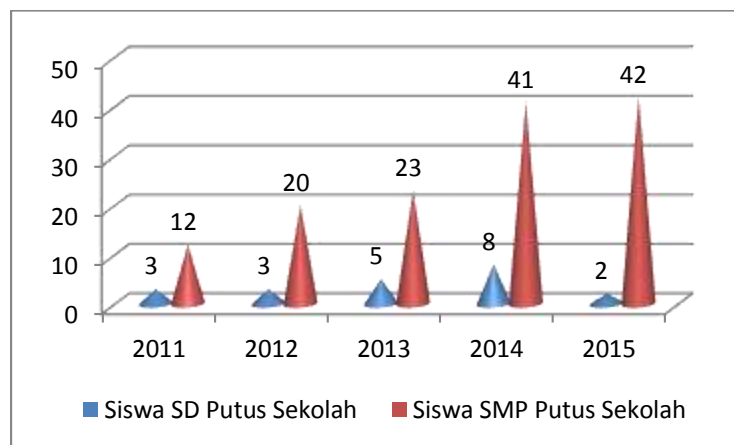
Angka Putus Sekolah (APts) siswa di tingkat SD dan SMP di Kota Magelang fluktuatif, mempunyai pola yang sama, mengalami trend kenaikan pada periode 2011 sampai 2014, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2015. Angka Putus Sekolah (APts) SD di Kota Magelang pada tahun 2010 pada kisaran 0,01, mengalami kenaikan menjadi 0,02 pada tahun 2012, dan naik kembali sebesar 0,3 pada tahun 2013. Pada tahun 2014 APts SD kembali mengalami kenaikan menjadi 0,05, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 0,01. Kondisi yang hampir sama juga dijumpai pada jenjang SMP. Angka Putus Sekolah SMP di Kota Magelang selama kurun waktu 5 tahun dari 2011-2014 juga mengalami kenaikan, sedangkan tahun 2015 mengalami penurunan. APts SMP pada tahun 2011 sebesar 0,11, naik menjadi 0,18 pada tahun 2012, naik kembali menjadi 0,23 pada tahun 2013 dan kembali mengalami kenaikan menjadi 0,38 pada tahun 2014. Pada tahun 2015, Angka Putus Sekolah SMP mengalami penurunan hingga mencapai 0,37.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Magelang, 2011-2015

Gambar 2.18
Angka Putus Sekolah (APts) SD/MI/PaketA dan SMP/MTS/Paket B di Kota Magelang
Tahun 2011-2015

Apabila ditinjau secara lebih mendalam, jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SMP cukup besar dibandingkan siswa pada jenjang SD. Pada jenjang SD, Angka Putus Sekolah relatif konstan, dengan rata-rata jumlah siswa putus sekolah selama kurun waktu tahun 2011 sampai 2015 sebanyak 3 siswa setiap tahunnya. Pada jenjang SMP, selama kurun waktu 5 tahun terjadi peningkatan jumlah siswa putus sekolah dari 12 siswa pada tahun 2011 menjadi 42 siswa pada tahun 2015, dengan rata-rata jumlah siswa putus sekolah cukup besar yaitu 28 siswa.



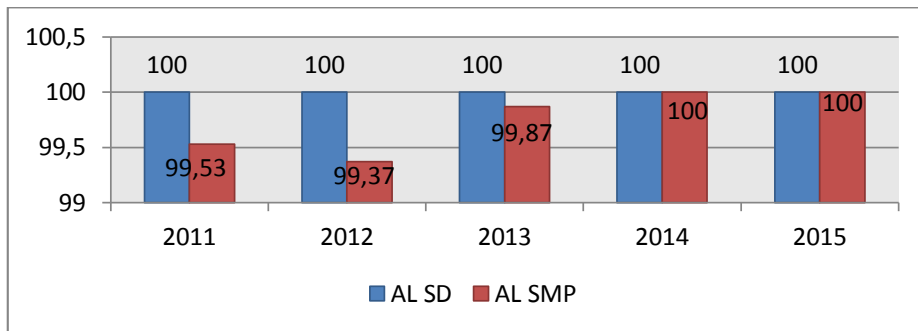
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Magelang, 2011-2015, diolah

Gambar 2.19
Jumlah Siswa Putus Sekolah tingkat SD dan SMP di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Ada empat faktor yang menyebabkan Anak Putus Sekolah. Faktor pertama yang menyebabkan anak putus sekolah adalah faktor ekonomi, Faktor ekonomi yang dimaksudkan adalah ketidakmampuan keluarga si anak untuk membiayai segala proses yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah dalam satu jenjang tertentu. Faktor kedua yang menyebabkan anak putus sekolah adalah rendahnya atau kurangnya minat anak untuk bersekolah. Rendahnya minat anak dapat disebabkan oleh perhatian orang tua yang kurang, fasilitas belajar yang kurang, dan pengaruh lingkungan sekitarnya, apalagi pada masa SMP karena pada masa itu anak sedang mencari jati dirinya sendiri. Minat yang kurang dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan misalnya tingkat pendidikan masyarakat rendah yang diikuti oleh rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Ada pula anak putus sekolah karena malas untuk pergi sekolah karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya. Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya selain itu adalah peranan lingkungan. Faktor ketiga adalah latar belakang rumah tangga atau orang tua yang tidak harmonis / broken home, biasanya dialami pada masa SMP karena pada masa itu anak sedang mencari jati dirinya sendiri, sehingga sangat sulit untuk dinasehati orang tuanya. Itu berakibat hubungan sang orang tua dengan anak menjadi tidak harmonis lagi. Faktor keempat, adalah budaya. Faktor budaya yang dimaksudkan di sini

adalah terkait dengan kebiasaan masyarakat disekitarnya. Yaitu, rendahnya kesadaran orang tua atau masyarakat dalam menyekolahkan anaknya lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan. Mereka beranggapan tanpa bersekolah pun anak-anak mereka dapat hidup layak seperti anak lainnya yang bersekolah.

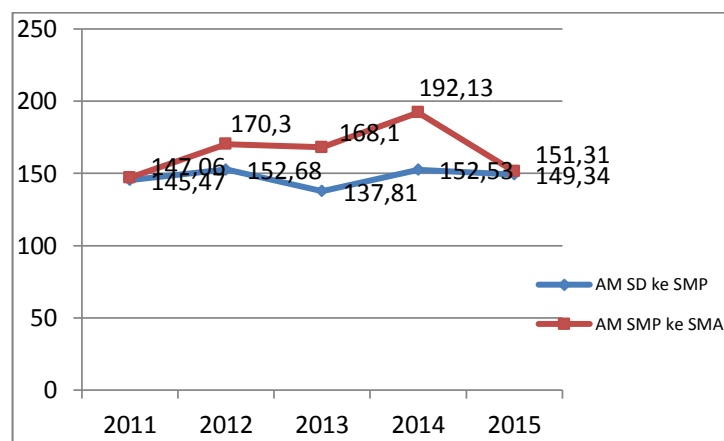
Kualitas pendidikan di Kota Magelang yang cukup baik salah satunya diindikasikan dari Angka Kelulusan yang tinggi pada jenjang pendidikan dasar. Angka Kelulusan tingkat SD selama kurun waktu 5 tahun dari 2011 sampai 2015 dapat mencapai 100%. Angka kelulusan pada jenjang SMP juga relatif tinggi, mengalami trend peningkatan dari 99,53% pada tahun 2011 hingga mencapai 100% tahun 2015.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Magelang, 2011-2015, diolah

Gambar 2.20
Angka Kelulusan SD dan SMP di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Angka Melanjutkan penduduk Kota Magelang selama kurun waktu lima tahun dari SD ke SMP relatif sama. Angka melanjutkan dari SD ke SMP pada tahun 2011 sebesar 145,47%, cenderung konstan dalam kurun waktu 5 tahun dan mencapai 149,34 pada tahun 2015. Angka melanjutkan dari SMP ke SMA selama periode 2011 sampai 2015, setelah sempat mengalami trend kenaikan dari 147,06 pada tahun 2011 naik menjadi 192,13 pada tahun 2014, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 151,31 pada tahun 2015.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Magelang, 2011-2015, diolah

Gambar 2.21
Grafik Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP, dan dari SMA ke SMA di Kota Magelang Tahun 2011-2015

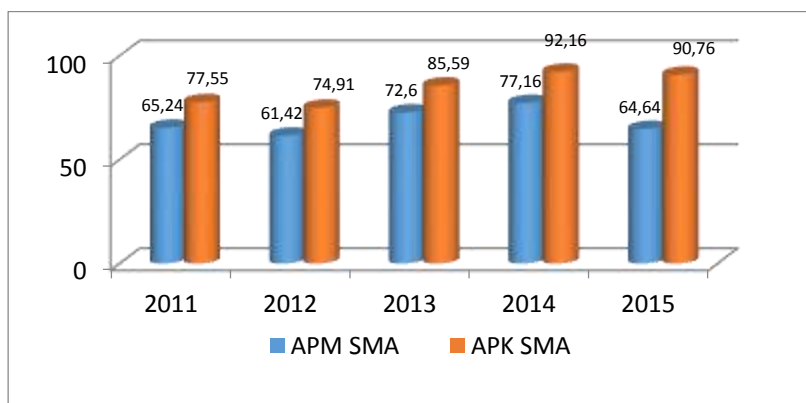
C. Pendidikan Menengah

Capaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Paket C Kota Magelang selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2011 sampai 2015 fluktuatif. APM SMA/SMK/MA/Paket C Kota Magelang dari tahun 2011 sampai 2014 menunjukkan trend peningkatan dari 65,24% pada tahun 2011 menjadi 77,16% pada tahun 2014, namun menurun menjadi 64,64% pada tahun 2015. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/Paket C menunjukkan trend peningkatan dalam rentang waktu 2011 sampai 2015. APK SMA/MA/Paket C pada tahun 2011 sebesar 77,55% meningkat terus sampai dengan tahun 2014 sebesar 92,16, namun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2015 pada kisaran 90,76%.

Tabel II.39
Indikator Pendidikan Menengah Kota Magelang Tahun 2011-2015

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	65,24%	61,42%	72,60%	77,16%	64,64%
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	77,55%	74,91%	85,59%	92,16%	90,76%
3	Angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK/MA	3	3	3	3	3
4	Angka pendidikan yang ditamatkan	3,62	3,62	3,62	3,62	3,11
5	Rasio guru terhadap murid	01:10	01:10	1 : 11	01:11	01:16
6	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	01:10:29	01:10:30	1:11:31	01:11:31	01:11:31
7	Angka Putus Sekolah (APts) SMA/MA/ Paket C	0,83%	0,72%	0,49%	0,48%	0,22%
8	Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/ Paket C	99,57%	99,86%	99,79%	99,89%	99,97%

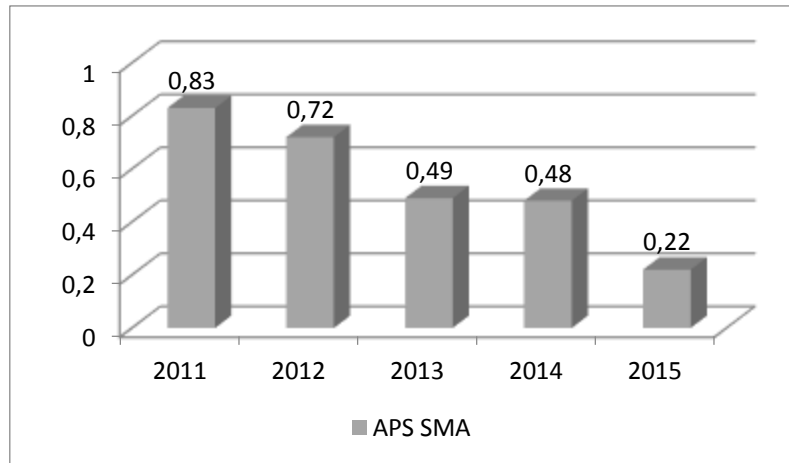
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Magelang, 2011-2015



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Magelang, 2011-2015

Gambar 2.22
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/Paket C di Kota Magelang Tahun 2011-2015

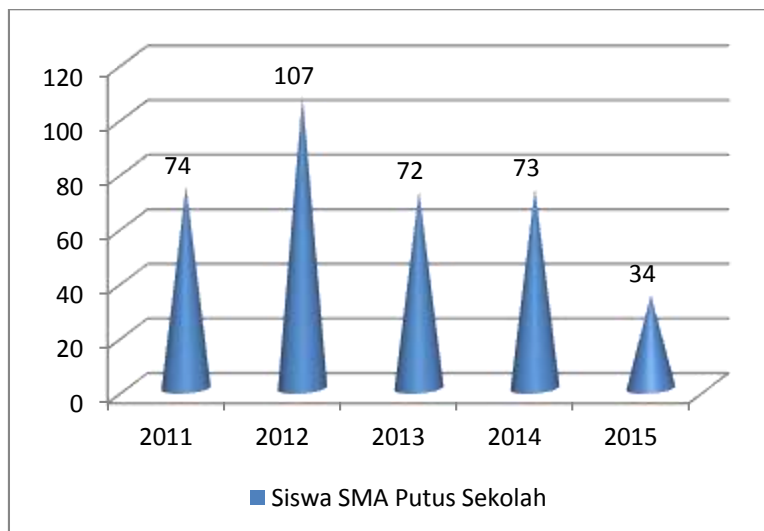
Pada jenjang SMA masih banyak ditemukan siswa putus sekolah dibandingkan pada jenjang pendidikan dasar. Angka putus sekolah SMA Kota Magelang terus mengalami penurunan dari 0,83 pada tahun 2011 menurun sampai 0,22 pada tahun 2015. Namun demikian, walaupun Angka Putus Sekolah jenjang SMA Kota Magelang sudah menunjukkan penurunan sampai tahun 2015, namun masih tergolong cukup tinggi.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Magelang, 2011-2015

Gambar 2.23
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C di Kota Magelang Tahun 2011-2015

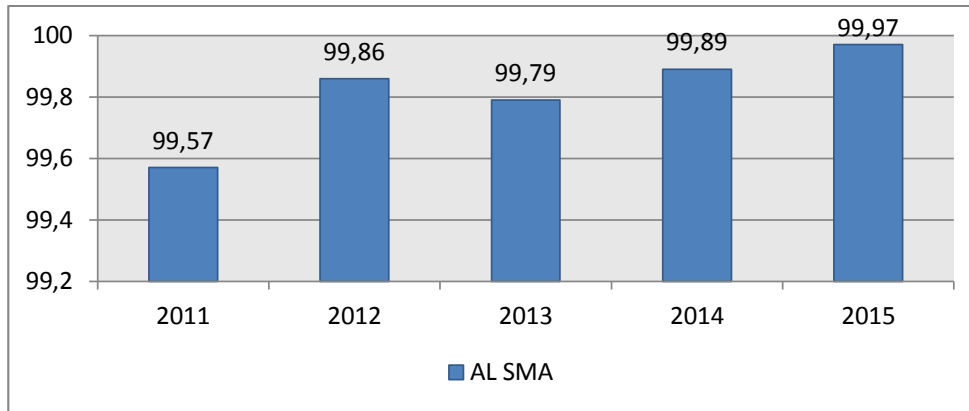
Apabila ditinjau secara lebih dalam, jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SMA lebih besar dibandingkan siswa pada jenjang pendidikan dasar. Jumlah siswa putus sekolah pada tingkat SMA selama kurun waktu 5 tahun terjadi penurunan jumlah siswa putus sekolah dari 74 siswa pada tahun 2011 menjadi 34 siswa pada tahun 2015, dengan rata-rata jumlah siswa putus sekolah setiap tahun berjumlah 72 siswa. Jumlah siswa putus sekolah pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 74 siswa pada tahun 2011 meningkat menjadi 107 pada tahun 2012.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Magelang, 2011-2015, diolah

Gambar 2.24
Jumlah Siswa Putus Sekolah tingkat SMA di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Pada jenjang SMA, angka kelulusan selama kurun waktu 5 tahun juga menunjukkan peningkatan, dari 99,57% pada tahun 2011 meningkat terus hingga mencapai 99,97% pada tahun 2015.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Magelang, diolah

Gambar 2.25
Angka Kelulusan SMA di Kota Magelang Tahun 2011-2015

D. Pendidikan Non Formal

Pemerintah Kota Magelang melaksanakan berbagai program dalam upaya pengentasan buta aksara. Beberapa program yang dilaksanakan diantaranya: Program Keaksaraan Usaha Mandiri, Program Taman Bacaan Masyarakat, Program Jaring Garap (JAGA), Program Peningkatan Pendidikan Dasar (Kejar Paket A Setara SD), Keaksaraan Terintegrasi Kecakapan Hidup, dan Peningkatan Pemanfaatan Mitra Kerja. Berbagai program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Magelang telah mampu meningkatkan angka melek huruf. Selama lima tahun, capaian indikator Angka Melek Huruf di Kota Magelang menunjukkan peningkatan, dari 94,14% pada tahun 2011 meningkat menjadi 97% pada tahun 2015. Kota Magelang merupakan salah satu dari sembilan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah dinyatakan bebas buta aksara. Kesembilan kabupaten/kota yang telah dinyatakan bebas buta aksara diantaranya: Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Pekalongan, Demak, Jepara, Sragen dan Sukoharjo, sedang kota yang sudah bebas buta aksara yaitu Kota Magelang dan Kota Pekalongan.

Tabel II.40
Indikator Pendidikan Formal Kota Magelang Tahun 2011-2015

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka melek huruf	94,14%	95%	98%	98,89	97%
2	Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	93%	94%	75%	68,75	100%
3	Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	73,91%	92%	94%	85,47	98,90%
4	Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	69,01%	84%	79%	89,95	99,35%
5	usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan	82,44%	54%	51%	51%	60%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Magelang, 2011-2015 diolah

E. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Indikator RLS adalah jenjang tertinggi dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang usia 25 tahun ke atas. Angka RLS dihitung berdasarkan data SUSENAS BPS. Potret RLS di Kota Magelang juga tampak pada struktur pendidikan penduduk Kota Magelang dimana pada tahun 2015 struktur penduduk (usia 25 tahun ke atas) menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan sebanyak 41,27% berpendidikan tertinggi tingkat SMA/ sederajat, 20,45% tamat SD dan 19,41% yang tamat Sarjana.

Tabel II.41
Jumlah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Berdasar Tingkat Pendidikan
di Kota Magelang Tahun 2015

Kecamatan/Kelurahan	TBTSD		TSD		SMP		SMA		D2-S1		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Magelang Selatan	234	610	2.904	4.095	2.414	2.287	5.616	4.976	2.116	2.150	27.402
Rejowinangun Selatan	43	137	622	905	567	551	1.240	1.032	344	337	5.778
Magersari	56	143	723	939	513	512	1.020	903	296	265	5.370
Jurangombo Utara	16	47	221	344	223	215	617	566	289	292	2.830
Jurangombo Selatan	17	63	212	386	247	282	940	915	683	717	4.462
Tidar Utara	74	153	677	927	540	439	1.056	906	282	312	5.366
Tidar Selatan	28	67	449	594	324	288	743	654	222	227	3.596
Magelang Utara	84	295	1.325	2.235	1.625	1.951	5.410	5.077	3.217	3.265	24.484
Wates	15	76	346	612	445	519	1.378	1.216	592	593	5.792
Potrobangsari	22	49	280	520	404	521	1.318	1.244	687	723	5.768
Kedungsari	20	74	274	482	330	372	1.103	1.025	536	572	4.788
Kramat Utara	4	15	107	135	103	168	597	598	619	600	2.946
Kramat Selatan	23	81	318	486	343	371	1.014	994	783	777	5.190
Magelang Tengah	184	530	2.581	4.072	2.733	2.940	7.191	6.463	2.789	2.799	32.282
Kemirirejo	23	45	262	420	323	332	930	896	486	520	4.237
Cacaban	22	96	316	542	394	468	1.217	1.145	584	565	5.349
Rejowinangun Utara	86	177	988	1.380	801	761	1.508	1.286	475	449	7.911
Magelang	21	76	292	520	375	481	1.204	1.103	580	534	5.186
Panjang	18	72	378	625	416	469	1.003	899	299	287	4.466
Gelangan	14	64	345	585	424	429	1.329	1.134	365	444	5.133
Kota Magelang	502	1.435	6.810	10.402	6.772	7.178	18.217	16.516	8.122	8.214	84.168

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Tahun 2016

TBTSD : Tidak/Belum Tamat SD

TSD : Tamat SD

Hal tersebut selaras dengan data APT untuk penduduk usia 5 tahun ke atas sejak tahun 2011-2015 yang didominasi oleh tamatan SMA dengan kecenderungan naik.

Tabel II.42
Angka Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kota Magelang Usia 5 Tahun ke Atas, Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Penduduk Usia 5+ (jiwa)	APT SD (%)	APT SMP (%)	APT SMA (%)
2011	121.014	20,36	16,57	33,13
2012	122.473	19,85	16,43	33,01
2013	122.590	19,14	16,49	32,86
2014	123.549	18,40	16,69	33,09
2015	124.293	17,83	16,78	33,27

Sumber: Kota Magelang Dalam Angka, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (diolah)

B. Tenaga Pendidik

Guru merupakan salah satu komponen terpenting dan strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dilaksanakan melalui peningkatan kualifikasi yang disinergikan dengan peningkatan kompetensi dan uji sertifikasi guru. Untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, Pemerintah Kota Magelang melakukan beberapa strategi dan program utama yaitu peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan melaksanakan sertifikasi pendidik, pembinaan kelompok kerja guru (KKG), pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi, pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, workshop manajemen perencanaan terpadu, dan penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal.

Ketersediaan dan kapasitas guru turut menentukan derajat kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa kualifikasi guru dipersyaratkan minimal S1/D4. Selanjutnya pada pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualitas akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Komposisi guru di Kota Magelang secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.43
Jumlah Guru dan Pendidikan Guru Kota Magelang Tahun 2011-2015

NO.	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Guru SD	914	927	905	886	897
	Lulusan S1/DIV	511	585	666	670	746
2	Guru MI	23	23	24	22	22
	Lulusan S1/DIV	18	18	20	20	22
	Jumlah Guru SD/MI	937	950	974	908	919
3	Guru SMP	665	665	689	667	648
	Lulusan S1/DIV	597	597	638	608	612
4	Guru MTs	87	87	88	93	96
	Lulusan S1/DIV	81	81	82	88	94
	Jumlah Guru SMP/MTs	752	752	777	760	744
5	Guru SMA	449	449	844	937	454
	Lulusan S1/DIV	428	428	628	923	438
6	Guru MA	85	85	87	81	84
	Lulusan S1/DIV	70	70	74	72	76
7	Guru SMK	839	839	865	867	842
	Lulusan S1/DIV	772	772	803	815	792
	Jumlah Guru SMA/MA/SMK	1.373	1.373	1.796	1.885	1.380
Total Jumlah Guru		3.062	3.075	3.502	3.553	3.043
Total Guru S1/DIV		2.477	2.551	2.911	3.196	2.780

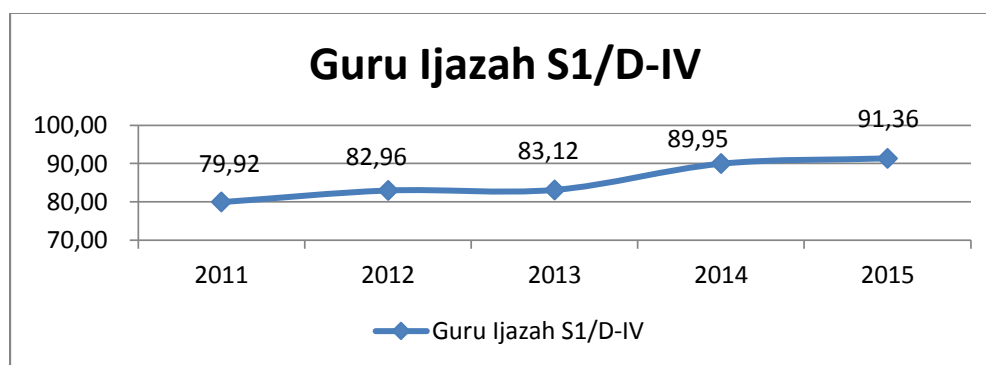
Sumber: Profil Pendidikan Kota Magelang 2011-2015

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa secara umum jumlah guru pada jenjang pendidikan dasar selama periode 2011-2015 relatif stagnan. Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah, setelah mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014, jumlah guru mengalami penurunan pada tahun 2015. Apabila dilihat dari persyaratan pendidikan formal yang harus dipenuhi oleh seorang guru pada semua tingkatan pendidikan paling

rendah harus berpendidikan setingkat S1 (Sarjana), terlihat bahwa pada semua jenjang pendidikan dapat digolongkan sudah banyak yang memenuhi persyaratan tersebut.

Prosentase guru yang sudah memenuhi syarat berpendidikan minimal S1/DIV tertinggi pada MI yang sudah mencapai 100%, yaitu dari 22 guru semuanya sudah berpendidikan S1/D4, diikuti pada MTs sebesar 97,92%. Urutan selanjutnya adalah pada tingkat SMA yang sudah mencapai 96,48%, diikuti pada SMP sebesar 94,44%. Sedangkan prosentase guru yang memenuhi persyaratan pendidikan terendah adalah pada SD, dari 897 guru, baru 746 guru yang sudah berpendidikan S1/D4.

Berbagai upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Magelang telah berhasil meningkatkan proporsi Guru yang memenuhi kualifikasi. Secara umum, jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 selama kurun waktu 2011-2015 menunjukkan trend peningkatan. Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 pada tahun 2011 sebanyak 2.477 guru dari 3.062 guru atau 80,89%. Pada tahun 2012, jumlah guru yang memenuhi kualifikasi sebanyak 2.551 guru dari 3.075 guru atau 82,96%, mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2011. Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi meningkat kembali pada tahun 2013, 2014 dan tahun 2015. Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 pada tahun 2015 sebanyak 2.780 guru dari 3.043 guru atau sudah mencapai 91,36%. Namun demikian secara keseluruhan, jumlah guru di Kota Magelang setelah mengalami kenaikan pada periode tahun 2011 sampai 2014, mengalami penurunan pada tahun 2015.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Magelang 2011-2015, diolah

Gambar 2.26

Grafik Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Selanjutnya untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan diindikasikan salah satunya dari rasio guru per siswa. Rasio guru per siswa pada semua jenjang relatif konstan pada periode 2011-2015. Rasio guru per murid tertinggi pada jenjang SMU/SMK/MA yaitu sebesar 908,79, diikuti pada jenjang SMP/MTs sebesar 855,76, sedangkan terendah pada jenjang SD/MI sebesar 614,30, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.44
Ketersediaan Guru Kota Magelang Tahun 2011-2015

KETERSEDIAAN GURU		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	937	950	927	908	919
1.2.	Jumlah Murid	15.407	15.597	15.239	15.126	14.960
1.3.	Rasio (per 10.000)	608,17	609,09	608,31	600,29	614,30

2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	752	752	777	760	744
2.2.	Jumlah Murid	10.186	10.186	10.691	11.010	8.694
2.3.	Rasio (per 10.000)	738,27	738,27	726,78	690,28	855,76
3	SMU/SMK/MA					
3.1	Jumlah Guru	1.373	1.373	1.796	1.885	1.380
3.2	Jumlah Murid	14.360	14.360	15.104	16.753	15.185
	Rasio (per 10.000)	956,13	956,13	1.189,09	1.125,17	908,79

Sumber: Profil Pendidikan Kota Magelang 2011-2015

2.3.1.2 Kesehatan

Berdasar perolehan AHH, indeks kesehatan Kota Magelang pada tahun 2014 mencapai 0,8703, terus naik sejak tahun 2010 yang hanya berada pada angka 0,8675. Hal tersebut perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan dengan perbaikan secara kontinu terhadap kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan, sebagai komponen pembentuk AHH, meningkat signifikan. Berdasarkan indikator-indikator derajat kesehatan Kota Magelang selama lima tahun terakhir, secara umum dapat dikatakan bahwa kesehatan masyarakat Kota Magelang terus meningkat. Namun demikian perlu upaya keras untuk kesehatan ibu dan anak, khususnya penurunan kematian ibu dan bayi karena angkanya cenderung meningkat. Kondisi derajat kesehatan Kota Magelang sejak tahun 2011-2015 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.45
Indikator Derajat Kesehatan Kota Magelang Tahun 2011-2015

No	Indikator Derajat Kesehatan					
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Kematian Ibu Maternal (MMR)/100.000 KH	53,05	159,57	55,62	126,18	187,50
2	Jumlah kasus kematian ibu	1	3	1	2	3
3	Angka Kematian Balita/ AKABA (CMR)/ 1.000 KH	9,55	17,55	17,80	14,51	16,25
4	Angka Kematian Bayi/ AKB (IMR)/ 1.000 KH	8,49	16,49	15,02	13,25	15,63
5	Balita Gizi buruk	0,83 %	0,31 %	0,41 %	0,91 %	0,31 %
6	Bayi dengan Asi Eksklusif	16,24 %	24,20 %	16,92 %	52,01 %	53,7 %
7	Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).	1,2 %	3,83 %	5,73 %	5,74 %	6,06 %
8	Angka kesakitan DBD/ 100.000 penduduk	31.87	39.53	126.94	57.18	130.93
9	Angka Prevalensi TB/ 100.000 penduduk	27.20	103.44	394.18	353.02	128.33
10	Angka Keberhasilan Pengobatan (Treatment Success Rate = TSR) TB	50%	24.39%	32%	32.67%	66.41%
11	Angka prevalensi HIV AIDS pada penduduk berusia 15-49 tahun	0.012%	0.011%	0.023%	0.039%	0.038%
12	Persentase Kasus Penyakit Diabetes Militus (DM)	8.370	11.209	7.630	NA	15.524
	Persentase Kasus Hipertensi Essensial	26.491	25.295	25.056	NA	21.798

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang 2011-2015, diolah

Dinas Kesehatan Kota Magelang mencatat 3 kasus kematian Ibu di tahun 2015 yang disebabkan oleh sepsis (1 kasus) dan pre eklampsia (2 kasus). Jumlah ini meningkat dari tahun 2014 yang mencapai 2 kasus. Jumlah kematian ibu melahirkan di Kota Magelang sebenarnya relatif rendah dibandingkan daerah lain. Namun bila dibandingkan dengan pertumbuhan kelahiran bayi hidup maka angka kematian ibu tersebut relatif tinggi sehingga

upaya meminimalisasi kejadian perlu dioptimalkan. Diantara upaya tersebut adalah perbaikan sistem rujukan melalui optimalisasi fasilitas Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas), karena mayoritas kematian ibu melahirkan terjadi di rumah sakit.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2016

Gambar 2.27
Jumlah Kematian Ibu di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Optimalisasi SPGDT dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan puskesmas diharapkan meningkatkan ketepatan waktu pemberian rujukan dari puskesmas ke rumah sakit, sehingga meminimalisir resiko kematian ibu. SPGDT adalah sistem informasi untuk melihat dokter jaga, jumlah kamar yang tersisa di Rumah Sakit, jumlah kamar Rumah Sakit dan dokter jaga. Penyediaan informasi-informasi tersebut dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan meningkatkan akurasi dan kecepatan penyediaan informasi.

Ketepatan pemberian rujukan juga dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pelayanan puskesmas, dengan cara perbaikan kapasitas tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dasar untuk ibu dan anak. Apabila kasus-kasus ibu melahirkan dengan faktor penyulit dapat diatasi di puskesmas maka rujukan ke rumah sakit dapat ditekan.

Angka kematian bayi pada tahun 2015 juga naik menjadi 15,63 per 1.000 kelahiran hidup (25 kasus) setelah sebelumnya di tahun 2014 sebesar 13,25 per 1.000 kelahiran hidup (21 kasus). Kenaikan ini terlebih disebabkan oleh faktor langsung berupa kasus kelahiran prematur dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Pada tahun 2011-2015 angka kematian bayi di Kota Magelang berada di atas 10, jauh lebih tinggi dari angka kematian bayi di Jawa Tengah. Sebagai perbandingan, angka kematian bayi di Jawa Tengah pada tahun 2014 adalah 10,08, dan menunjukkan tren menurun sejak tiga tahun terakhir, sedangkan Kota Magelang mencapai 13,25 dan menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan naik.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2015(diolah)

Gambar 2.28
Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Balita di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Jumlah kematian balita memiliki kecenderungan turun dengan AKABA yang berfluktuasi tergantung dari pertumbuhan bayi lahir hidup. Pada tahun 2015 terjadi 1 kasus kematian balita karena diare yang menyebabkan AKABA sebesar 0,63 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan AKABA terkecil sejak tahun 2011.

Jumlah balita gizi buruk di tahun 2015 sebanyak 17 balita (0,21%) naik dari tahun 2014 yang hanya sebesar 0,16% (14 kasus). Demikian juga dengan jumlah balita dengan status gizi kurang yang tumbuh 6,95%. Peningkatan ini terlebih disebabkan oleh munculnya penyakit penyerta yaitu TBC dan penyakit kelainan darah yang menyebabkan menurunnya fungsi organ balita dalam menyerap zat gizi pada makanan.

Mencermati kasus-kasus kematian ibu melahirkan serta kematian bayi dan balita yang terjadi di Kota Magelang nampak bahwa kurangnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat menjadi faktor penyebab signifikan. Kematian bayi karena BBLR sebenarnya dapat dicegah melalui asuhan kehamilan yang optimal sedangkan kematian balita karena diare dapat dihindari dengan menjaga sanitasi lingkungan serta kebersihan asupan makanan.

Kondisi derajat kesehatan masyarakat Kota Magelang pada dasarnya merupakan hasil dari upaya kesehatan yang dilaksanakan. Kinerja urusan kesehatan terkait dengan upaya kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.46
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kota Magelang Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio posyandu per 100 balita	2.09	2.26	2.24	2.31	2.36
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk	0.16	0.155	0.168	0.17	0.23
Rasio Rumah sakit per 1000 penduduk	0.069	0.08	0.0670	0.07	0.0579
Rasio dokter per 1000 penduduk	1.56	1.35	1.16	1.2	1.37
Rasio tenaga paramedis per 1000 penduduk	10,53		10.07	10.15	12.26
Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	63%	65.52%	81.94%	56.99%	93%
Cakupan Jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan Masyarakat Rentan	94,45%	98,37%	100%	100%	100%
Cakupan pelayanan kesehatan puskesmas untuk masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar untuk pasien masyarakat miskin	154,13%	150,24%	159,99%	125,92%	148,20%

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%
Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase sarana kesehatan milik pemerintah yang menuju universal design	0	0	0	0	0
Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan	94.45%	88.48%	92.65%	91.77%	85%
Cakupan pengawasan obat dan makanan	50%	50%	50%	50%	66%
Persentase rumah sehat	89.93%	90.74%	89.43%	88.53%	83.43%
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (perkiraan ibu hamil dengan komplikasi sebesar 20% dari total ibu hamil)	100%	65,71%	93%	110.39%	141.75%
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	94.42%	92,84%	95.60%	94,84%	92.41%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,95%	100%	99,94%	99,94%	100%
Cakupan Pelayanan Nifas	100%	100%	100%	100%	99.87%
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (perkiraan neonatus dengan komplikasi sebesar 15% dari total neonatus)	100%	35,11%	46,72%	47,95%	46.3%
Cakupan kunjungan bayi	95,36%	93,72%	96,72%	92,71%	95,63%
Cakupan Pelayanan Anak Balita	58.41%	87.51%	84.89%	88.05%	88.20%
Jumlah Puskesmas Ramah Anak	0	0	0	0	0
Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan					A
Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Terakreditasi	0	0	0	0	0
Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	58.58%	52.29%	48.51%	64.06%	69.06%
Jumlah puskesmas santun usila	0	0	0	0	0
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	92.13%	89.22%	93%	96.52%	95.94%
Cakupan Puskesmas Pembantu (PUSTU)	70.59%	70.59%	70.59%	70.59%	70.59%
Posyandu aktif					83,25%

Sumber: Profil Kesehatan Kota Magelang, 2011-2015

Sarana kesehatan yang ada di Kota Magelang dari tahun ke tahun jumlahnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini karena jumlah sarana kesehatan yang ada telah memenuhi standar pelayanan minimal. Berdasarkan tabel di atas, hanya rasio puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik yang cenderung meningkat, dari 0,16 pada tahun 2011 menjadi 0,23 pada tahun 2015. Peningkatan tersebut dikarenakan bertambahnya jumlah klinik sedangkan jumlah puskesmas tetap yaitu sebanyak 5 puskesmas dan puskesmas pembantu sebanyak 12. Selain itu Kota Magelang juga memiliki 32 puskesmas keliling. Peningkatan sarana ini berbeda dengan rasio rumah sakit yang menurun.

Pada tahun 2011 rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Magelang mencapai 0,069 dengan keberadaan 7 rumah sakit (terdiri dari 5 rumah sakit umum dan 3 rumah sakit khusus). Namun pada tahun 2015 rasio ini menurun menjadi 0,0579 per 1.000 penduduk dikarenakan berkurangnya jumlah rumah sakit menjadi 7

akibat penurunan satu rumah sakit bersalin menjadi rumah bersalin. Meskipun terjadi penurunan namun jumlah rumah sakit yang ada saat ini sudah memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal penyediaan rumah sakit.

Sejalan dengan ketersediaan sarana kesehatan, jumlah tenaga medis (dokter) dan paramedis (bidan dan perawat) di Kota Magelang juga sudah memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal meskipun terjadi penurunan rasio dokter dari 1,45 pada tahun 2011 menjadi 1,37 per 1.000 penduduk pada tahun 2015. Terdapat 63 dokter umum, 78 dokter spesialis dan 25 dokter gigi untuk melayani sebanyak 120.779 penduduk pada tahun 2015. Jumlah tersebut menurun dari tahun 2011 saat terdapat 88 dokter umum, 75 dokter spesialis dan 23 dokter gigi untuk melayani 118.805 penduduk. Sedangkan untuk tenaga paramedis terjadi peningkatan jumlah dari 1.282 orang pada tahun 2011 menjadi 1.481 orang pada tahun 2015 sehingga terjadi peningkatan rasio dari 10,53 menjadi 12,26. Meskipun kuantitas sarana dan tenaga kesehatan telah mencukupi namun perlu peningkatan kualitas sarana dan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah posyandu, juga patut diapresiasi. Rasio posyandu per 100 balita pada tahun 2011 sebesar 2,09 kemudian meningkat menjadi 2,36 pada tahun 2015. Peningkatan rasio tersebut terjadi karena penurunan jumlah balita dari 10.131 balita pada tahun 2011 menjadi 8.077 balita pada tahun 2015, sedangkan jumlah posyandu tetap sebanyak 197. Pelibatan masyarakat akan menjadi faktor positif dalam akselerasi perbaikan kondisi kesehatan masyarakat.

Capaian kinerja cakupan komplikasi kebidanan yang ditanganisecara riil telah mencapai 100% sejak tahun 2011 hingga tahun 2015. Namun dikarenakan perubahan formula dalam perhitungan indikator ini pada tahun 2012 maka hasil perhitungan pada tahun 2012 hingga 2015 menjadi berbeda dengan tahun 2011. Sejak tahun 2012 digunakan angka perkiraan sasaran ibu hamil dengan komplikasi kebidanan sebesar 20% dari total ibu hamil sebagai bilangan pembagi. Maka ketika secara riil ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang ada kurang dari 20% capaian kerjanya menjadi kurang dari 100%, seperti yang terjadi pada tahun 2012 dan 2013. Sebaliknya ketika secara riil jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan melebihi 20% maka capaian kerjanya menjadi lebih dari 100%, seperti yang terjadi pada tahun 2014 dan 2015. Hal ini serupa dengan perhitungan indikator neonatus dengan komplikasi yang ditangani.

Capaian kinerja neonatus dengan komplikasi yang ditangani secara riil telah mencapai 100% sejak tahun 2011 hingga tahun 2015. Namun dikarenakan perubahan formula dalam perhitungan indikator ini pada tahun 2012 maka hasil perhitungan pada tahun 2012 hingga 2015 menjadi berbeda dengan tahun 2011. Sejak tahun 2012 digunakan angka perkiraan sasaran neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 15% dari total neonatus sebagai bilangan pembagi. Maka ketika secara riil neonatus dengan komplikasi yang ada kurang dari 15% capaian kerjanya menjadi kurang dari 100%, seperti yang terjadi pada tahun 2012 hingga tahun 2015. Dengan kondisi riil semua neonatus dengan komplikasi ditemukan dan ditangani maka capaian kinerja kurang dari 100% justru bagus karena menandakan neonatus dengan komplikasi yang ada tidak mencapai 15% dari total neonatus yang ada.

Sementara itu, capaian cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di tahun 2011 hingga 2014 capaiannya terus meningkat, bahkan pada tahun 2012 telah mencapai 100%. Pada tahun 2014 untuk cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan capaian kerjanya adalah 99,94%. Dari 1.579 orang sasaran ibu bersalin, sebanyak 1.578 orang yang mendapat pertolongan persalinan. Angka ini analog dengan tahun 2013, dengan kinerja yang sama namun sasaran

yang lebih banyak 1.795 orang sasaran ibu bersalin, sebanyak 1.794 orang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Untuk indikator Cakupan Desa/Kelurahan Univesal Child Immunization(UCI) dari tahun 2011-2014 telah mampu mencapai dan mempertahankan 100% capaian sebagaimana tahun 2010. Secara terminologi cakupan desa/kelurahan UCI mengandung pengertian bahwa desa/kelurahan dimana > 80% dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Sebanyak 17 kelurahan atau seluruh kelurahan yang ada di Kota Magelang telah melaksanakan UCI. Meskipun demikian, capaian 100% dalam 5 tahun terakhir harus dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Manfaat imunisasi dalam jangka panjang akan mampu menjamin generasi yang sehat dan berdaya saing.

Hal yang sama terjadi pada capaian indikator cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan. Prestasi 100% capaian selama lima tahun berturut turut (2010-2014) tentu merupakan hal yang membanggakan, meskipun demikian tidak boleh berhenti dan lengah. Pada tahun 2014 ini, capaian 100% tidak cukup berkualitas karena secara kasus meningkat dari 12 kasus di tahun 2013 menjadi 14 kasus di tahun 2014. Adanya kasus balita gizi buruk setiap tahun tidak selalu mencerminkan tingginya angka kemiskinan di Kota Magelang ataupun rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini lebih dikarenakan faktor penyebab timbulnya balita gizi buruk yang sangat banyak dan kompleks, antara lain karena kurang makan makanan yang bergizi dalam waktu yang lama, menderita penyakit bawaan terutama penyakit infeksi serta mengalami gangguan fungsi saluran pencernaan.

Kinerja positif juga terjadi pada indikator cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, dengan capaian sebesar 100%. Hal ini dikarenakan dari 69 penderita DBD yang dilaporkan, seluruhnya tertangani dengan baik. Tetapi pada tahun 2014, jumlahnya menurun sangat signifikan. Capaian tahun 2014 sekaligus merefleksikan capaian berturut-turut sejak tahun 2010 hingga 2013 yang 100%. Kampanye pencegahan untuk menekan jumlah penderita DBD harus terus digalakkan. *Fogging* juga menjadi upaya lain untuk melokalisir sebaran DBD.

Capaian kinerja cakupan pelayanan puskesmas untuk pasien masyarakat miskin merupakan perbandingan antara jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di puskesmas dengan jumlah seluruh masyarakat miskin di Kabupaten/Kota. Pada tahun 2014 capaian indikator ini mencapai 125,92%. Capaian ini sedikit menurun dari tahun 2013 yang berada pada titik 159,99%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2010 yang mencapai angka 167,68% angka tahun tahun berikutnya menjadi makin mengecil capaiannya. Hal ini mengindikasikan dua fakta. Pertama, semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat miskin kota. Kedua, sarana kesehatan strata 1 yang ada di Kota Magelang tidak hanya menerima pasien masyarakat miskin yang berasal dari Kota Magelang, akan tetapi juga menerima pasien masyarakat miskin yang berasal dari daerah-daerah di sekitar Kota Magelang seperti Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang dan Puworejo serta daerah lainnya. Bahkan RSUD Tidar Magelang telah menjadi pusat rujukan regional. Ke depan peran rumah sakit di Kota Magelang akan semakin strategis dalam skema Kota Magelang yang ditunjuk sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Indikator yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kesehatan adalah cakupan kunjungan bayi. Mengingat salah satu program pemerintah adalah menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Cakupan kunjungan bayi juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan manajemen program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Merujuk pada capaian 2010 yang berada pada angka 92,99%,

maka capaian pada tahun-tahun berikutnya mengalami fluktuasi positif dengan kisaran antara 96,77% hingga 105,17%. Raihan tertinggi 105,17% terjadi pada tahun 2014 dengan fakta bahwa terdapat 1.585 bayi lahir hidup, sedangkan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar oleh dokter, bidan dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan adalah sebanyak 1.667 bayi.

Terkait dengan visi dan misi Walikota Magelang terpilih maka beberapa hal terkait urusan kesehatan menjadi perhatian pemerintah, antara lain:

1. Ketersediaan puskesmas ramah anak
2. Ketersediaan puskesmas ramah/ santun usila
3. Ketersediaan sarana kesehatan menuju universal design
4. Ketersediaan sarana kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang Urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang meliputi penanganan sub urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Jalan dan penataan ruang. Kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang antara lain ditunjukkan dengan 23 indikator yang terbagi ke beberapa sub urusan sebagai berikut :

A. Sumber Daya Air

Kota Magelang dibatasi juga oleh dua sungai yang cukup besar yaitu Sungai Elo di sebelah Timur dan Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Elo di sebelah timur yang masuk dalam Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak. WS Progo-Opak-Serang memiliki luas total 4.993,85 km² yang terdiri dari DAS Progo, Opak, Serang, Tangsi, Elo, Oyo. Sungai Progo menurut hasil penelitian geologi yang dilakukan PDAM Kota Magelang didapat bahwa aquifer terdapat di kedalaman 10 – 30 m dan 90 – 120 m, dengan total panjang 138 Km dan luas DAS seluas 2.380 Km². Sementara itu didalam kota sendiri dilalui oleh 2 saluran Kali Manggis dan Kali Bening yang membelah Kota Magelang dari utara ke selatan yang merupakan kesatuan wilayah irigasi Saluran Progomanggis-Kali Bening dengan luas 3.663 Ha. Indikator kinerja yang menggambarkan kinerja Sub Urusan Sumber Daya Air pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.47
Kinerja Sub Urusan Sumber Daya Air Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Rasio jaringan irigasi	95%	96%	96%	96%	96%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang, 2011-2015

Air irigasi masih tersedia dengan lancar ditunjukkan dengan indikator tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sebesar 100%, secara hitungan ketersediaan air irigasi tersebut > 100 % karena pasokan air dari irigasi Kali Manggis dan Kali Bening untuk memasok wilayah irigasi Saluran Progomanggis-Kali Bening dengan luas 3.663 Ha atau kebutuhan air irigasi sebesar 4395,6 L/dt yang meliputi daerah irigasi Kota dan Kabupaten Magelang. Sedangkan kebutuhan air irigasi sawah di Kota Magelang

tidak lebih dari 241,7 L/dt dan semakin menurun seiring berkurangnya luas lahan sawah dengan pengairan teknis tiap tahunnya hingga tahun 2015 kebutuhan air irigasi hanya sebesar 230,112 L/dt. Penurunan kebutuhan air irigasi di Kota Magelang sebagaimana Tabelberikut:

Tabel II.48
Kebutuhan air irigasi sawah dengan Pengairan Teknis di Kota Magelang

	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Luas Lahan Sawah dgn Pengairan Teknis (Ha)	201.42	199.96	197.64	194.20	191.76
Kebutuhan air irigasi (L/dt)	241.704	239.952	237.168	233.04	230.112

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang, 2011-2015

Dampak penurunan luas lahan pertanian yang perlu menjadi perhatian yaitu berubahnya fungsi saluran irigasi menjadi saluran drainase disebabkan banyaknya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian yang menyebabkan kondisi air irigasi dimungkinkan tidak sampai ke petak sawah yang terakhir. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan kegiatan perikanan agar sumber air yang ada dapat dimanfaatkan.

Prasarana irigasi di Kota Magelang terdiri dari 5 Km saluran irigasi kota, 9,7 Km saluran irigasi kali manggis dan 7,85 Km saluran irigasi Kalibening, untuk panjang irigasi tersier 10,5 Km terdiri dari bangunan permanen 9,45 Km dan tanah 1,05 Km. Mengingat kondisi kedepan dalam Perda RTRW konversi lahan persawahan selama 20 tahun mendatang menjadi permukiman yang diijinkan sebesar 100 Ha, maka akan terjadi perubahan fungsi dari saluran irigasi menjadi fungsi yang lain. Oleh karena itu perlu diidentifikasi lahan persawahan yang mana yang kemungkinan akan terjadi konversi menjadi permukiman.

Jaringan Irigasi merupakan satu kesatuan infrastruktur pendukung utama sektor pertanian khususnya untuk pertanian lahan basah. Rasio jaringan irigasi di Kota Magelang rata-rata diatas 95 % dibanding lahan pertanian yang tidak beririgasi teknis.

B. Air Minum.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Kewajiban Pemerintah Kota menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dengan penyelenggara baik BUMD, Koperasi, maupun kelompok masyarakat.

Capaian Indikator kinerja Sub Urusan Air Minum pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selengkapnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.49
Kinerja Sub Urusan Air Minum Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	95,4%	94,38%	94,32%	94,22%	94%
2.	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan	79,50	80,20	80,62%	81,50%	82,50%

Ketersediaan air bersih untuk masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari, namun karena masyarakat mempunyai sumber air baku sendiri dari mata air dan sumur, maka target pemenuhan air bersih dari PDAM tidak 100% melainkan sebesar 94%.

Untuk kualitas kesehatan air bersih yang dimiliki masyarakat perlu selalu dipantau secara rutin/berkala melalui instansi terkait dengan cara pengambilan sampel air untuk diteliti di laboratorium. Apabila air tersebut tidak baik untuk dikonsumsi maka masyarakat direkomendasikan untuk memasang sambungan rumah (SR) air bersih dari PDAM.

Sumber-sumber air yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku pada sistem penyediaan air minum PDAM Kota Magelang saat ini adalah bersumber dari mata air. Total kapasitas sumber yang digunakan dari 7 (tujuh) mata air adalah 967,46 lt/det, sedangkan kapasitas produksi saat ini mencapai 509,60 lt/det dan kapasitas distribusi total 463,22 lt/det, sehingga apabila dilihat dari kapasitas sumber yang ada dengan kapasitas produksi, masih terdapat sisa pada sumber sebesar 457,85 lt/det.

Potensi sumber air baku di Kota Magelang baik air permukaan maupun air tanah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.50
Potensi Sumber Air Baku Kota Magelang

No	Sumber Air Baku	Debit
Air Permukaan		
1	Kali Progo	Debit minimum adalah 7,38 m ³ /dt
2	Kali Elo	Debit minimum adalah 3,71 m ³ /dt
Air Tanah		
1	Mata Air Kalimas 1	Debit sebesar 82,56 lt/det, Kapasitas produksi sebesar 82,05 lt/det, kapasitas yang belum termanfaatkan sebesar 0,51 lt/det
2	Mata Air Kalimas 2	Debit sebesar 144,92 lt/det, kapasitas produksi sebesar 87,10 lt/det kapasitas yang masih belum termanfaatkan sebesar 57,82 lt/det.
3	Mata Air Wulung	Debit sebesar 39,84 lt/det, kapasitas produksi sebesar 36,21, kapasitas yang belum termanfaatkan saat ini adalah 3,63 lt/det
4	Mata Air Kelagen	Debit sebesar 62,41 lt/det, kapasitas produksi sebesar 32,84 lt/det, kapasitas yang belum termanfaatkan adalah sebesar 29,57 lt/det.
5	Mata Air Kanoman 1	Debit sebesar 330,41 lt/det, kapasitas produksi sebesar 64,99 lt/det, kapasitas yang belum termanfaatkan sebesar 265,42 lt/det
6	Mata Air Kanoman 2	Debit sebesar 67,32 lt/det, kapasitas produksi sebesar 67,32 lt/det
7	mata air tuk pecah	Debit sebesar 240 lt/det, kapasitas produksi sebesar 139,10 lt/det, kapasitas yang belum termanfaatkan sebesar 100,90 lt/det

Sumber: RISPAM Kota Magelang, 2010-2020

PDAM telah memenuhi indikator kinerja ini, karena realisasi targetnya telah melampaui target yang ditetapkan MDGs yaitu sebesar 68,87% masyarakat yang mengakses air bersih/air minum. Namun pelayanan air bersih belum sepenuhnya selama 24 jam mengalir terus, ada wilayah tertentu yang tidak terlayani, kondisi ini perlu disikapi dengan melakukan identifikasi wilayah tertentu mana yang tidak terlayani selama 24 jam dan agar masyarakat perlu diberi informasi secara jelas kapan waktu air bersih mengalir kapan berhenti. Mengingat kondisi yang dihadapi masih seperti itu maka perlu diperhitungkan berapa ambang batas pelayanan air bersih kepada masyarakat kota Magelang, dan strategi penanganan untuk menambah debit air bersih agar permasalahan air bersih dapat diatasi.

Dari data *Base Line* yang bekerja sama dengan program P2KKP hingga tahun 2015 ketersediaan akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter /orang sebesar 82.50% atau sebesar 99.401 jiwa yang terdiri dari jaringan perpipaan 80,5 % dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) sekitar 2 %. Dari tahun 2011 hingga 2015 terjadi peningkatan rata-rata diatas 1000 jiwa/tahun.

C. Persampahan

Kegiatan penanganan sampah menurut UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pemilahan sampah adalah pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Pengumpulan sampah adalah pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Pengangkutan sampah adalah membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

Kinerja penanganan sampah di Kota Magelang sub urusan persampahan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.51
Kinerja Sub Urusan Persampahan Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio Penanganan Sampah Perkotaan (pengangkutan)	80,05%	82,5%	84,8%	89,87%	95%
2.	Prosentase Penanganan Sampah di TPSA	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang, 2011-2015

Realisasi rasio penanganan sampah perkotaan sampai dengan tahun 2015 adalah 95 %. Volume produksi sampah Kota Magelang mencapai 160,58 m³/hari. Dengan rasio pengangkutan sampah perkotaan 95 %, maka jumlah yang terangkut hanya 152,55 m³/hari sementara sisanya 8,029 m³/hari (5 %) tercecer. Jadi sampah bisa diangkut tapi daya tampung depo/TPS yang terbatas, sehingga ada yang tercecer/luber di sekitar transfer depo dan TPS.

Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di TPSA, khususnya efisiensi dalam angkutan sampah, dibangun Stasiun Peralihan Antara (SPA). Sampah kota yang masuk ke SPA akan dipadatkan kemudian

dipindahkan ke truk besar untuk dibawa ke TPSA. Selain kegiatan pemadatan dan pemindahan sampah, di SPA juga dapat dilakukan pengolahan sampah 3R.

Tingkat disiplin warga maupun tenaga pengangkut sampah di wilayah kelurahan yang tidak mentaati batas waktu atau jam, sehingga adanya sampah yang menginap di tranfer depo (tidak terangkut). Dari sampah secara keseluruhan 25% adalah sampah an organik sedangkan 75% nya adalah sampah organik dimana dalam 24 jam akan membusuk sehingga sebagian kecil dari sampah organik yang tertinggal di TPST akan membusuk dan meninggalkan bau.

Keterbatasan lahan menyebabkan Kota Magelang tidak mempunyai TPSA yang berlokasi di wilayah Kota Magelang sendiri namun harus berlokasi di luar wilayah Kota Magelang yaitu di Desa Banyuurip Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. Dengan luas 7,8 hektar tersebut diperkirakan masih bisa digunakan hingga tahun 2016, namun karena adanya perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang di lokasi tersebut akan digunakan sebagai kawasan perkebunan, maka harus segera dilakukan pemindahan lokasi TPSA.

Kerjasama antara Pemerintah Kota Magelang dan Pemerintah Kabupaten Magelang sangat minim hanya sebatas jual beli tanah, perijinan, dan pembayaran pajak diluar pengelolaan TPA Banyuurip. Dalam hubungan tersebut tidak terdapat perjanjian atau MoU antara kedua pihak sehingga timbul ketidakjelasan tindakan apabila terjadi permasalahan karena tidak memiliki dasar yang kuat. Kerjasama pengelolaan TPA Banyuurip tersebut sudah berlangsung cukup lama dan dimulai sebelum era otonomi daerah namun keberadaanya masih sangat diperlukan oleh Kota Magelang dan masyarakat Desa Banyuurip yang menggantungkan hidupnya pada TPA Banyuurip baik sebagai pemulung maupun pekerja harian lepas.

Rancangan awal TPA Banyuurip adalah menggunakan metode sanitary landfill dimana sampah dibuang dalam sel dan setelah 3 hari diurug dengan tanah. Pada perjalanan waktu Kondisi TPA Banyuurip berubah menjadi controlled landfill, yaitu sarana pengurugan sampah yang bersifat antara sebelum mampu melaksanakan operasi sanitary landfill, dimana sampah yang telah diurug dan dipadatkan di area pengurugan dilakukan penutupan dengan tanah penutup setiap 7 hari. Ini disebabkan pembuatan maupun pengelolaan TPA dengan sistem sanitary landfill membutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya operasional yang mahal dimulai dari pengadaan alat berat, penyediaan tanah penutup, operasi dan pemeliharaan, sampai penyediaan tenaga yang terdidik dalam mengelola sanitary landfill. Di sisi lain kemampuan keuangan Pemerintah Pusat maupun alokasi keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota saat ini di dalam mengelola sampah masih sangat terbatas. Demikian halnya dengan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari hasil pengelolaan sampah tidak pernah mampu menutupi keperluan operasionalnya. Sehingga masih terjadi ketidakseimbangan antara biaya operasional dan pendapatan di dalam pengelolaan sampah. Selain itu, penerapan sistem sanitary landfill juga membutuhkan lokasi berupa lahan yang cukup luas dan memenuhi persyaratan teknis tertentu. Sementara tidak semua Pemerintah Daerah memiliki lahan yang cukup dan sesuai dengan persyaratan lokasi TPA. Realisasi prosentase penganan sampah di TPSA sampai dengan tahun 2015 adalah 100%.

D. Air Limbah.

Kota Magelang merupakan Kota kecil dengan luas wilayah $\pm 18,12$ Km² dengan kepadatan perumahan yang cukup tinggi, dalam pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota menggunakan 2 sistem yakni :

- a. Sistem *Offsite* (sistem penampungan, pengaliran dan pengolahan secara terpusat)

Sistem terpusat ini meliputi jamban pribadi dan jamban umum yang disambungkan dengan sistem perpipaan yang dialirkan

dan diolah secara terpusat.

b. Sistem *Onsite* (sistem penampungan, pengaliran dan pengolahan secara setempat)

Sistem setempat ini meliputi jamban pribadi maupun jamban umum yang menggunakan tangki septic tank sendiri tanpa adanya penggabungan dengan KM/ WC lain, system ini merupakan system yang dominan digunakan oleh tiap – tiap Rumah Tangga di Kota Magelang.

Dalam rangka mendukung proses pengelolaan air limbah domestik ini Pemerintah Kota Magelang membangun Instalasi Pembuangan Limbah Terpadu (IPLT) yang berlokasi di Kampung Dumpoh, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara untuk pembuangan akhir lumpur tinja dari Jamban Pribadi dan Umum baik yang di angkut oleh mobil tinja Swasta maupun Pemerintah dengan jumlah penerima manfaat Seluruh Masyarakat Kota Magelang, Volume limbah tinja yang terangkut di Kota Magelang kurang lebih 2.25 m³/hari (1 unit truck penyedot limbah tinja).

Kinerja sub urusan air limbah pada urusan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.52
Kinerja Sub Air Limbah Tahun 2011-2015

No	Indikator	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tersedianya sistem air limbah yang memadai	92%	93%	93%	94%	94%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang, 2011-2015

Jumlah timbulan air limbah domestik Kota Magelang di Tahun 2015 diestimasikan sebesar 11.816.849 ltr/hari untuk 42.433 KK, sedang ketersediaan pusat pengelolaan air limbah domestik (*sistem off site*)hingga tahun 2015 sebanyak 16 unit dengan kapasitas 50 - 166 m³/unit. Jumlah rumah tangga yang tersambung pusat pengelolaan air limbah domestik (IPAL Komunal) sebanyak 1.600 KK, dan sebanyak 38.287 KK yang menggunakan septictank (*sistem on site*)terjadi peningkatan dibanding Tahun 2011 sebesar 31.624 KK, sedang di tahun 2015 masih 2.545 KK belum menggunakan system pengelolaan air limbah (langsung ke sungai dan lain-lain)

Realisasi pertahun indikator kinerja ini kecil karena ketergantungan yang sangat besar dari alokasi dana pemerintah pusat, maupun provinsi dengan program SLBM dan STBM. Sedangkan kemampuan pemerintah kota Magelang untuk penyediaan lahan bagi system tersebut asetya kebanyakan menggunakan aset tanah eks bengkok dan semakin lama semakin berkurang luasannya.

E. Drainase

Sistem jaringan drainase di Kota Magelang terdiri dari sistem jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier. Jaringan drainase primer menghubungkan jaringan drainase sekunder menuju badan air Sungai Progo dan Elo, sedang jaringan drainase sekunder sebagai pengumpul jaringan drainase tersier yang melewati cathment area di kawasan permukiman yang dialirkan ke jaringan drainase primer, total panjang sistem drainase primer dan sekunder 235,7 Km, dengan capaian kinerja layanan sistem drainase pada indikator kinerja sub urusan drainase selengkapny sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.53
Kinerja Sub Urusan Drainase Tahun 2011-2015

No	Indikator					
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang, 2011-2016

Untuk Kota Magelang, indikator tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun tercapai sebesar 100%, hal tersebut menggambarkan bahwa Kota Magelang sudah tersedia jaringan drainase baik tersier, sekunder hingga primer dengan total panjang 235,7 km. Pembagian system jaringan drainase di Kota Magelang sebagai berikut:

- a) badan air sebagai muara drainase di Kota Magelang yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo.
- b) saluran drainase primer meliputi Irigasi Kali Bening, Irigasi Kali Manggis, Irigasi Kali Ngaran, Irigasi Kali Kedali, dan Irigasi Kali Gandekan.
- c) saluran drainase sekunder meliputi saluran penggelontor Kali Kota, ruas jalan arteri dan kolektor perkotaan di wilayah Daerah; dan
- d) saluran drainase tersier terdapat di ruas jalan lokal dan jalan lingkungan di seluruh unit lingkungan kawasan permukiman yang ada di wilayah Daerah

Dikarenakan kondisi kontur Kota Magelang seperti punggung kerbau yang sisi Barat dan Timur cenderung berkontur turun hingga kemiringan 40% diujung wilayah, sehingga air dapat mengalir secara gravitasi. Keberadaan Sungai Progo pada sisi Barat dan Sungai Elo pada sisi Timur, dijadikan badan air yang menampung aliran drainase primer sehingga di Kota Magelang terbebas dari genangan lebih dari 30cm selama 2 jam.

Jaringan drainase salah satunya bertujuan untuk mengurangi adanya genangan air disepanjang jalan, secara berkala dan rutin dilakukan peningkatan/pemeliharaan terhadap saluran drainase yang meliputi normalisasi, penggantian konstruksi drainase dengan U-ditch, pembuatan tutup saluran/gril besi dan resapan air (Biopori), serta tiap tahun dilakukan peningkatan saluran drainase perkotaan sesuai dengan masterplan drainase Kota Magelang. Panjang saluran drainase Kota Magelang sebesar 235,7 Km dengan kondisi 82,97 % dalam keadaan baik. Kedepannya perlu merintis pembangunan saluran Shipon yang menghubungkan jaringan drainase primer ke Sungai Progo dan Elo yang melintasi saluran irigasi Kali Manggis dan kali Bening.

F. Bangunan Gedung

Penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Magelang diantaranya pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Jumlah bangunan gedung di Kota Magelang pada Tahun 2015 sejumlah 35.132 unit yang ber IMB baru 7.922 unit. Kinerja sub urusan bangunan gedung tergambar pada indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.54
Kinerja Sub Urusan Bangunan Gedung Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	20.28%	20.835%	21.39%	21.945%	22.5%
2	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota Kota Magelang, 2011-2015

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kota Magelang dihitung dengan berdasarkan jumlah bangunan ber-IMB dibandingkan dengan jumlah bangunan secara keseluruhan di Kota Magelang. Target RPJMD pada tahun 2015 yaitu 50% dari jumlah bangunan keseluruhan di Kota Magelang sudah ber-IMB.

Pada akhir tahun 2015, Kota Magelang baru mampu mencapai 22.5% atau 7.992 unit bangunan ber IMB dari 35.132 unit bangunan diseluruh Kota Magelang. Hal ini memperlihatkan Kota Magelang masih dalam mencapai target RPJM. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan yang muncul salah satunya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam ber-IMB kurang. IMB merupakan izin mendirikan bangunan yang bertujuan untuk menjaga keselamatan manusia yang berada dalam bangunan tersebut.

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi:

- Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung.
- Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.
- Pelestarian/pemugaran.

RPJMD Kota Magelang mentargetkan pada tahun akhir yaitu tahun 2015 tidak ada masyarakat yang tidak terlayani dalam pengurusan IMB di Kota Magelang. Hal ini sesuai dengan SPM yang mentargetkan pada tahun 2014 di kabupaten/kota pencapaian penerbitan IMB adalah 100%. Pada akhir tahun 2015, indikator terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kota Magelang sudah mencapai 100% yang artinya seluruh masyarakat yang mengajukan untuk mengurus IMB dapat 100% terlayani.

G. Jalan

Kota Magelang secara administratif terletak di persilangan lalu lintas ekonomi dan transportasi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung, dilalui jalan Nasional sepanjang 13,512 Km, jalan Provinsi 3,92 dan jalan Kabupaten/kota sepanjang 77,964 Km. Secara umum kondisi jalan yang melalui kota magelang kondisinya baik. Indikator kinerja yang menggambarkan kinerja sub urusan Jalan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.55
Kinerja Sub Urusan Jalan Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Proporsi Panjang Jalan kota Magelang dengan kondisi baik	75%	80%	85%	88,5%	90%

2.	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota	96,37%	97,76%	99,2%	99,2%	99,67%
3.	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	87,51%	89,13%	93,51%	93,51%	94,27%
4.	tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	63,92%	64,38%	64,83%	64,83%	65,59%
5.	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	76%	76%	75%	75%	75%
6.	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	58,23%	58,92%	59,32	60,36%	61,12%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang, 2011-2016

Proporsi Panjang Jalan kota Magelang dengan kondisi baik Tahun 2015 sudah mencapai lebih dari 90 % atau sekitar 118,23 Km, kondisi tersebut tiap tahun selalu meningkat 3 – 5 % dari Tahun 2011, hal ini di dukung adanya dukungan pendanaan dari DAU, DAK, dan APBD Provinsi Jawa Tengah. Untuk menjaga agar kondisi jalan tetap dalam kondisi baik, maka kegiatan yang diperlukan adalah melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala pada jaringan jalan yang terdiri dari 118,915 Km jalan kota, 4,023 Km merupakan jalan provinsi dan 8,430 Km jalan nasional.

Kondisi jalan rusak sering terjadi di ruas jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Urip Sumoharjo, kedua ruas jalan tersebut merupakan ruas jalan arteri primer yang menghubungkan Yogyakarta – Semarang, dan merupakan jalur jalan utama untuk dilalui kendaran-kendaraan berat seperti Truk bermuatan pasir. Pemeliharaan jalan arteri primer merupakan kewenangan pusat.

Indikator Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota hampir mendekati 100%, yang berarti hampir seluruh pusat-pusat kegiatan di Kota Magelang terhubung oleh jaringan jalan. Jaringan jalan baru yang dibangun dari tahun 2011 hingga 2015 sebagian besar dibangun dengan memanfaatkan jalan inspeksi saluran irigasi yaitu Kali Bening di Jalan Tentara Genie Pelajar Utara dan Jalan Penghubung Kelurahan Cacaban dan Kelurahan Kemirirejo.

Struktur ruang dan pola ruang yang menetapkan pusat Kota, pusat BWK dan pusat Lingkungan serta pembagian kawasan-kawasan budi daya sebagai dasar merencanakan jalan-jalan penghubung baru. Oleh karena itu percepatan untuk menetapkan peraturan daerah RDTRK dan percepatan penyusunan RTBL sangat diperlukan untuk mengimbangi tuntutan kebutuhan ruang terhadap dinamika masyarakat kota di pusat-pusat kegiatan baru yang ditetapkan dalam Perda RTRWK dan raperda RDTRK.

Direncanakan hingga akhir tahun 2015 panjang jalan penghubung ke pusat-pusat kegiatan sepanjang 131 km, realisasi hingga tahun 2015 baru terbangun 99.67 % atau sekitar 130,9 km. Dikarenakan jalan baru yang berada di utara Jalan Genie Pelajar yang menghubungkan Kawasan Olah Raga Gor Samapta dengan kawasan permukiman Perum Korpri baru pada tahap pondasi jalan, belum ada perkerasan. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran.

Indikator Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman, untuk penilaian indikator instansi terkait masih menggunakan data asumsi kondisi jalan di Kota Magelang yang sudah baik, sehingga capaian indikatornya jauh melampaui target 60% menjadi 94,27%. Untuk menghitung indikator

kinerja ini belum bisa dipenuhi, karena peralatan yang diperlukan belum diadakan, alat tersebut antara lain *Roughometer*. Alat ini penting diadakan karena dapat mengetahui kondisi jalan yang tidak rata yang mengganggu kenyamanan jalan. Kenyamanan jalan sangat penting untuk mewujudkan Kota Magelang menjadi Kota Tujuan (*destination*).

Untuk aspek mobilitas dengan indikator tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan dari target SPM sebesar 100 %, tahun 2015 tercapai 75%, kondisi ini menggambarkan bahwa masyarakat belum terlayani sepenuhnya oleh jaringan jalan di Kota Magelang, dikarenakan sesuai SPM angka mobilitas ditentukan dengan tingkat kepadatan penduduk, dimana dengan tingkat kepadatan penduduk Kota Magelang Tahun 2015 sebesar 6.665 jiwa/km² atau rata-rata diatas 6.000 jiwa/km² dari Tahun 2011 hingga 2016, sesuai SPM angka mobiltasnya paling rendah sekitar 2 km/10.000 jiwa untuk kepadatan penduduk > 5.000 jiwa/km².

Indikator tersedianya jalan yang menjamin perjalanan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana sebesar 65,59% mengisyaratkan bahwa beberapa ruas jalan di Kota Magelang masih dalam kondisi lancar. Kecepatan rata-rata yang tidak terpenuhi berada di ruas jalan arteri primer yaitu mulai jalan A Yani, Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Sukarno Hatta, dengan kecepatan kurang dari batas kecepatan minimal yang ditetapkan yaitu 60 Km/jam. Pertemuan antara jalan Urip Sumoharjo, Jalan Magelang Kopeng dan Jalan Sukarno Hatta, sering terjadi kemacetan yang panjang hingga lebih dari 1 Km. Hal ini yang paling menyebabkan kecepatan rencana tidak terpenuhi.

Selain jalan arteri primer, ruas jalan utama kota di pusat kota yang di dominasi oleh kawasan perdagangan dan jasa juga sering terjadi kemacetan karena keberadaan parkir di badan jalan. Penataan parkir yang menempati badan jalan perlu dilakukan untuk menjaga kecepatan rencana di jalan-jalan kota minimal 20 – 40 km/jam terpenuhi.

Indikator tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan dengan keadaan selamat, tercapai 61,12% ditahun 2015 dan sudah melebihi target SPM yang ditetapkan sebesar 60 %. Penekanan indikator tersebut yaitu pada kriteria keselamatan ruas jalan berupa kepadatan lalu lintas, kelas jalan, lebar badan dan bahu jalan, tipe perkerasan, perlengkapan jalan, dan fasilitas pejalan kaki.

Ruas jalan kota Magelang yang sudah memenuhi kriteria keselamatan sepanjang 80,29 Km diantaranya jalan Jalan Gatot subroto, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Pahlawan, Jalan Tentara Geni Pelajar dan beberapa jalan kolektor diluar pusat kota.

Pemenuhan kriteria keselamatan yang dilakukan Pemerintah Kota sehingga terjadi peningkatan dari tahun 2011 sebesar 58,23 % menjadi 61,12 % diantaranya dengan penyediaan perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, pemeliharaan perkerasan dan penyediaan jalur pejalan kaki. Di Tahun 2015 Jalan Urip Sumoharja sepanjang 3.9 Km yang menjadi kewenangan pemerintah pusat juga telah dilakukan pelebaran badan jalan, penyediaan perlengkapan jalan serta penyediaan jalur pejalan kaki.

H. Penataan Ruang

Dasar penataan ruang di Kota Magelang adalah Perda RTRW Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011–2031. RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana struktur dan pola ruang wilayah Daerah serta dalam menetapkan kawasan strategis,memantapkan

pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang. kinerja sub urusan penataan ruang tergambar pada indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.56
Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	50%	50%	50%	50%	50%
2	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	16.70%	16.70%	16.78%	18,57%	18,57%
6	Tersedianya dokumen RTRW dan Perda RTRW 2010 -2030, RDTRK dan Perda RDTRK 2010 -2020, RTH, dan RTBL Kawasan Strategis Lingkungan Hidup (Gunung Tidar)	50%	50%	50%	50%	50%
7	Tersedianya sarana informasi Rencana tata Ruang Wilayah Kota Magelang kepada masyarakat	50%	50%	60%	100%	100%
8	Rasio Ijin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukan ruang	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: 1. Bappeda Kota Magelang, 2011-2015

2. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota Kota Magelang, 2011-2015

Informasi berupa peta analog adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk cetakan yang dapat digandakan, mudah diakses pada jam kerja, dan tanpa dipungut biaya. Sementara Informasi berupa peta digital adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk peta yang didigitasi, yang dapat dengan mudah diakses.

Pada akhir tahun 2015, Kota Magelang baru mencapai 50% dalam pelaksanaan indikator tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.

Informasi mengenai peta RTRW Kota Magelang sudah dipasang sampai ke seluruh desa. Selain menyebarkan informasi ke desa, informasi mengenai RTRW Kota Magelang juga dipasang di beberapa tempat publik seperti di sekitaran Alon-alon Kota Magelang. Hal ini dapat memberikan informasi atau sosialisasi secara baik kepada masyarakat umum tentang rencana tata ruang Kota Magelang dalam 20 tahun mendatang. Tentunya

sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat ikut mendukung rencana tersebut karena hal ini demi keberlanjutan tata ruang Kota Magelang 20 tahun mendatang. Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) perlu dilakukan terus menerus dan lebih luas supaya masyarakat akan lebih memahami Rencana Tata Ruang.

Peta tersebut sudah mendapat koreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia. Kendala penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang ada pada peta analog dan digital rencana rinci (RDTR). Ada 5 BWP yang harus disusun RDTR nya, dari kelima BWP tersebut yang sudah dalam pembahasan raperda ada 4 BWP yaitu BWP I, II, III, dan V. Sedangkan untuk BWP IV masih dalam tahap revisi pada tahun anggaran 2015. Belum selesainya proses legalisasi RDTR menjadi produk hukum berdampak pada belum dapat disampaikannya informasi rencana tata ruang kepada masyarakat.

Konsultasi publik dalam penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang adalah bentuk pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagai bentuk *participatory planning*, yang memenuhi syarat inklusi dan mampu menjaring aspirasi masyarakat.

Dalam SPM rumus yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator adalah presentase jumlah pertemuan konsultasi publik pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah pertemuan konsultasi publik seharusnya pada Kabupaten/Kota tersebut. Dalam hal ini hasil yang diharapkan adalah dalam bentuk persen (%).

RPJMD Kota Magelang menargetkan pada tahun 2015 konsultasi publik terlaksana. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam setiap penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang di Kota Magelang terlaksana konsultasi publik yang artinya sama dengan 100%. Realisasi di Kota Magelang pada setiap tahun sudah terlaksana konsultasi publik dalam setiap penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang. Artinya Kota Magelang sampai pada akhir tahun 2015 sudah mencapai 100% dan memenuhi target. Konsultasi publik di Kota Magelang dilaksanakan per kelurahan dan kecamatan dengan menghadirkan stake holder, ketua RT dan RW.

Kota Magelang telah memiliki Perda RTRW Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peta yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk pemberian izin pemanfaatan ruang. Untuk Perda RTRW Kota Magelang sampai pada saat ini sudah tersedia. Sehingga realisasi di Kota Magelang sudah mencapai 100%.

Perda RDTR atau rencana rinci dari RTRW di Kota Magelang masih dalam proses hukum untuk resmi menjadi dasar hukum. Namun dokumen rencana RDTR di semua BWP Kota Magelang sudah tersusun. Pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan di Kota Magelang dilakukan berdasarkan SPM yaitu dengan menelaah dan memeriksa terlebih dahulu kesesuaian izin yang diajukan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka permohonan izin dibatalkan, dan jika sudah sesuai maka izin tersebut dapat disetujui.

Tindakan awal pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang adalah suatu bentuk pelayanan yang responsive kepada masyarakat terhadap segala bentuk pengaduan atas pelanggaran di bidang penataan ruang, dengan melakukan tindakan awal paling lama 5 (lima) hari. Tindakan awal dilakukan sebelum kasus diidentifikasi dan ditangani. Tindakan awal terdiri atas :

- Penelaahan dan pemeriksaan aduan terhadap Perda RTR terkait,
- Tinjauan ke lapangan,
- Menjawab aduan dengan surat

Pada RPJMD, pada tahun 2015 Kota Magelang memasang target 100% untuk Indikator Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5

(lima) hari kerja. Realisasi indikator ini dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dapat mencapai 100% sesuai dengan target RPJMD.

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota Magelang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Target indikator ini adalah 20 % dari luas wilayah Kota Magelang. Penyediaan RTH publik bukan merupakan hal yang mudah untuk suatu kabupaten/kota.

Indikator tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan pada tahun 2015 baru terealisasi sebesar 18,57%. Kekurangan luasan RTH sebesar 1,43% atau seluas 25,9 hektar sangat sulit dipenuhi, mengingat keterbatasan lahan di Kota Magelang. Program dan kegiatan pada bidang RTH harus difokuskan pada upaya peningkatan jumlah (kuantitas) luasan, tidak hanya pada peningkatan kualitas aspek visual (estetika) dari RTH khususnya taman kota. Peningkatan kuantitas lahan RTH dilakukan dengan pembebasan lahan pada sepadan Jalan dan Sungai, pemenuhan Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar 10% bagi pengembang serta pembebasan melalui pembelian tanah masyarakat untuk RTH.

Sampai tahun 2015 Kota Magelang baru memiliki dokumen RTRW Kota Magelang. Dokumen RDTRK sampai pada tahun 2015 masih dalam proses Perda. RTBL Kawasan Strategis Lingkungan Hidup (Gunung Tidar) belum tersedia. Dari 75% target yang harus dicapai pada tahun 2015 sesuai dengan RPJMD, Kota Magelang masih mencapai 50% pada akhir tahun 2013. Belum ada rencana rinci yang ditetapkan menjadi peraturan daerah, meskipun naskah akademik sudah ada. Hal ini terkait dengan dinamika perubahan kebijakan di tingkat pusat dan provinsi terkait proses legalisasi raperda RDTR, dan waktu yang dibutuhkan sangat panjang karena proses yang rumit. Selain itu terkait kelengkapan data spasial materi peta RDTR yang harus memenuhi syarat Badan Informasi Geospasial (BIG).

Sarana informasi tata ruang wilayah Kota Magelang kurang memenuhi target dari 75% yang ditargetkan hanya mencapai 60%. Informasi tata ruang kepada masyarakat masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tata ruang. Sarana informasi bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata ruang, Hal ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga tata ruang dan ikut menegakkan tata ruang di Kota Magelang.

Capaian realisasi indikator jumlah ijin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukan sudah mencapai target yaitu 100%. Hal ini didukung oleh koordinasi yang baik antara Bappeda (selaku sekretaris BKPRD), KPPT (instansi pemberi ijin tertentu), dan kantor pertanahan (terkait izin IPPT) yang mensyaratkan setiap proses sertifikasi dan alih fungsi lahan.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberi kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat menjadi kesatuan fungsional berwujud tata ruang fisik, ekonomi dan sosial budaya serta mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup. Kinerja pembangunan urusan Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain ditunjukkan dengan 7 indikator yang terbagi menjadi beberapa sub urusan yang ditangani sebagai berikut :

A. Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh

Amanat Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar pada tahun 2019.

Pemerintah melakukan pola penanganan kawasan kumuh antara lain melalui pencegahan, peningkatan kualitas dan pengelolaan. Kinerja sub urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh tergambar pada indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.57
Kinerja sub urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh Tahun 2011-2015

No	Indikator	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	92%	93%	93%	94%	94%
2.	Rasio rumah layak huni	91,92 %	91,59 %	92,35 %	92,48 %	92,53 %
3.	Rasio lingkungan permukiman kumuh	4 %	3,97 %	3,92 %	3,92 %	3,91 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang, 2011-2016

Indikator ini sama dengan indikator Tersedianya system air limbah yang memadai, dimana rumah tinggal yang bersanitasi berarti harus memiliki system pengelolaan limbah yang memadai. Khusus untuk kawasan padat hunian dan bangunan, penyediaan rumah tinggal bersanitasi akan menghadapi masalah ketersediaan tanah. Peran pemerintah sangat strategis untuk penyelesaian masalah ini melalui penyediaan *septic tank communal* dalam dokumen SSK yang telah disusun.

Partisipasi masyarakat sangat menentukan untuk menyukseskan program-program untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi, karena masih terdapat kawasan rawan sanitasi di Kota Magelang, yang diakibatkan oleh kesadaran masyarakat masih rendah mengenai BAB.

Rumah layak huni secara nasional SPMnya dari Kementerian Perumahan Rakyat 100% dengan kurun waktu tahun 2009-2025, untuk mempercepat terwujudnya indikator kinerja tersebut perlu dukungan kesepakatan kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) antara PD terkait, dengan maksud agar dilakukan survey data RTLH akan memudahkan untuk melaksanakan program rumah layak huni. Permasalahannya yaitu sebagian besar penanganan RTLH terkendala dengan masalah kepemilikan aset yang belum jelas.

Indikator ini memerlukan data jumlah rumah layak huni dan jumlah rumah keseluruhan rumah di suatu wilayah. Untuk mengetahui jumlah rumah layak huni terlebih dahulu ditetapkan kriteria rumah layak huni, setelah itu baru dilakukan survey yang melibatkan PD terkait, seperti DKPTK, DPU, Bappeda, Kantor Statistik, Kantor Litbang dan Statistik, BPMPKB.

Dari data ppls tahun 2011 jumlah rumah tidak layak huni di kota Magelang sebesar 5.746 rumah, ditargetkan hingga tahun 2015 dapat mengurangi rumah tidak layak huni sebesar 4.866 rumah, hingga tahun 2015

sudah ada 1.475 unit rumah yang ditangani. Beberapa program pengurangan rumah tidak layak huni yang sudah terlaksana di Kota Magelang melalui pembiayaan APBD Kota, APBD Provinsi, PNPM, dan BPS.

Dalam mensikapi Keterbatasan lahan dan semakin tingginya harga tanah di wilayah perkotaan menjadi kendala dalam penyediaan rumah layak huni, pembangunan perumahan di arahkan pada pembangunan rumah susun. Hingga tahun 2015 Pemerintah Kota Magelang sudah memiliki 2 (dua) unit *Twin Block* Rusunawa yang berada di Kelurahan Porobangsari dan Kelurahan Tidar Utara.

Permasalahan untuk menentukan rasio lingkungan permukiman kumuh yang dihadapi hingga tahun 2015 yaitu belum adanya Surat Keputusan Walikota tentang lingkungan permukiman kumuh, yang diawali dengan penelitian / kajian penentuan kriteria lingkungan permukiman kumuh dan melaksanakan survey. Baru Tahun 2014 dilakukan identifikasi Kawasan kumuh, dan pada Tahun 2015 baru ditetapkan luasan kawasan kumuh melalui Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 050/280/112-310 Tahun 2015 dengan luasan sekitar 121,17 hektar.

Tabel II.58
Luas Kawasan Perumahan Dan Pemukiman Kumuh Kota Magelang

No	Lokasi	Luas Kawasan Kelurahan	Luas Kawasan Kumuh	Satuan
1.	Kecamatan Magelang Utara			
a.	Kelurahan Potrobangsari	130,00	16,20	Ha
b.	Wates	117,00	6,60	Ha
c.	Kramat Utara	86,00	6,59	Ha
d.	Kramat Selatan	146,00	9,26	Ha
e.	Kedungsari	133,00	6,37	Ha
2.	Kecamatan Magelang Tengah			Ha
a.	Kelurahan Cacaban	83,00	5,62	Ha
b.	Kelurahan Gelangan	81,00	3,41	Ha
c.	Kelurahan Kemirirejo	88,00	3,89	Ha
d.	Kelurahan Magelang	125,00	3,84	Ha
e.	Kelurahan Panjang	35,00	3,88	Ha
f.	Kelurahan Rejowinangun Utara	99,00	13,62	Ha
3.	Kecamatan Magelang Selatan			Ha
a.	Kelurahan Tidar Utara	97,00	8,46	Ha
b.	Kelurahan Tidar Selatan	127,00	11,98	Ha
c.	Kelurahan Jurangombo Selatan	226,00	2,95	Ha
d.	Kelurahan Jurangombo Utara	58,00	4,24	Ha
e.	Kelurahan Rejowinangun Selatan	43,00	6,71	Ha
f.	Kelurahan Magersari	138,00	7,55	Ha
	JUMLAH	1.812,00	121,17	Ha

Sumber : Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 050/280/112-310 Tahun 2015

Untuk mencapai target kawasan kumuh 0 % di tahun 2019 beberapa strategi penanganan yang harus dilaksanakan, diantaranya program pemerintah Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU merupakan program Kolaborasi antara Pemerintah Daerah sebagai nakoda, masyarakat, dan swasta.

B. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Kinerja sub urusan prasarana, sarana, dan utilitas tergambar pada indikator kinerja sebagaimana tabel berikut.:

Tabel II.59
Kinerja Sub Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	87,04%	88,07%	89,01%	89,11%	89,52%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang, 2011-2016

Indikator cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebesar 89,52% masih dibawah target SPM. Indikator ini diperoleh dari jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu dikalikan 100%, oleh karena itu dalam proses perhitungan indikator kinerja ini diperlukan data jumlah yang lingkungan yang didukung kelengkapan PSU (jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik).

Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman ditujukan dalam rangka mendorong terbangunnya rumah-rumah baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk perumahan bagi PNS, TNI dan POLRI, akan tetapi masih diperlukan pemeliharaan rutin dan juga peningkatan kualitas PSU sehingga lebih optimal dalam pencapaian target.

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Keberhasilan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dari kondusivitas wilayah berdasarkan aspek keamanan dan ketertiban serta situasi

politik di dalamnya. Kondusivitas wilayah merupakan prasyarat bagi daerah untuk pelaksanaan pembangunan dan peningkatan daya saing dalam berbagai aspek. Kondisi Kota Magelang selama kurun waktu 2011-2015 menggambarkan situasi yang cukup kondusif. Namun demikian masih dijumpai beberapa situasi gangguan keamanan ketertiban masyarakat antara lain unjuk rasa dan tindak pidana, meskipun dalam skala kecil.

Tabel II.60
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Kriminalitas	20,30	15,38	10,99	12,35	14,14
2	Jumlah demonstrasi	9	7	6	5	14
	a. Politik	2	0	0	0	0
	b. Ekonomi	7	7	1	3	2
	c. Lainnya	0	0	5	2	12
3	Tingkat partisipasi politik	-	-	-	79,21%	75,23%
4	Frekuensi koordinasi FKUB	1	3		2	3
5	Penyelesaian Penegakan Perda	85,25%	87,87%	91,1%	90,1%	89%
6	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	5,03	5,01	4,66	4,89	4,96
7	Cakupan patroli petugas Satpol PP	1	1	1	1	3

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
8	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	64,26	61,85	65,08	64,83	68,79
9	Jumlah petugas linmas di kota	766	740		782	832
10	Rasio Pos Kamling per Kelurahan	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41
11	Rasio siskamling aktif	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
12	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)	90,27%	97,44%	88,75%	97,18%	93,92%

Sumber: 1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang, 2016
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang, 2016

Unjuk rasa pada tuntutan di ranah politik muncul 2 kasus pada tahun 2011, namun kemudian tidak pernah muncul lagi hingga tahun 2015. Sementara itu unjuk rasa di ranah ekonomi relatif berada pada tren menurun sedangkan tuntutan lainnya berfluktuasi. Secara total sejak tahun 2011 mengalami penurunan namun demikian pada tahun 2015 terjadi kenaikan kejadian unjuk rasa. Terjadinya unjuk rasa sesungguhnya tidak serta merta dapat dipandang sebagai gangguan, melainkan bentuk peningkatan kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan semakin kondusifnya iklim demokrasi. Hal tersebut mutlak diperlukan dalam upaya meningkatkan transparansi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Untuk menjaga kondusivitas wilayah, Kota Magelang hingga tahun 2015 didukung oleh 60 personil polisi pamong praja dan 832 petugas linmas. Jumlah polisi pamong praja sejak tahun 2011-2015 tidak bertambah, bahkan sempat berkurang menjadi 59 orang pada tahun 2013 dan 2014. Hal ini menyebabkan rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk relatif tetap yaitu 5. Jumlah tersebut belum memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan Permendagri No 60 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, jumlah kebutuhan polisi pamong praja ditentukan berdasarkan total skor dari indikator-indikator pada kriteria umum dan kriteria teknis yang ditetapkan. Untuk Kota Magelang yang mendapat total skor <500 maka kebutuhan minimal personil Polisi Pamong Praja sebesar 150 orang.

Tidak hanya kekurangan personil polisi pamong praja, Kota Magelang juga menghadapi keterbatasan petugas linmas. Hingga tahun 2015 hanya terdapat 832 petugas sehingga rasio petugas linmas per 10.000 penduduk sebesar 68.8. Rasio tersebut meningkat 4 poin bila dibandingkan dengan angka tahun 2011 sebesar 64. Meskipun meningkat namun jumlah tersebut masih jauh di bawah standar minimal jumlah petugas linmas dalam satu kota yang seharusnya sesuai dengan jumlah RT karena di setiap RT minimal terdapat 1 petugas linmas. Berdasarkan standar tersebut maka di Kota Magelang seharusnya terdapat minimal 1014 sesuai dengan jumlah RT yang ada.

Meskipun kekurangan personil polisi pamong praja dan petugas linmas namun tingkat penyelesaian penegakan perda dan pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan) relatif baik. Untuk penyelesaian penegakan perda pada tahun 2015 sebesar 89% atau meningkat 3,75% dibandingkan tahun 2011. Sedangkan untuk penyelesaian pelanggaran K3 terjadi kenaikan sebesar 3,65%.

Menghadapi kendala-kendala tersebut di atas tidak menyurutkan upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan terus dilakukan, diantaranya dengan pembentukan Kader Siaga Tramtib (KST) pada tahun 2015. Total jumlah KST Kota Magelang adalah 153 orang sehingga di masing-masing kelurahan terdapat 8 hingga 9 anggota KST. Kader KST berasal dari anggota masyarakat yang ditugaskan di setiap kelurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan, deteksi dan penanganan dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi solusi terhadap kurangnya jumlah petugas linmas dan

Polisi PP di Kota Magelang, karena KST juga diberi kewenangan untuk dapat menyelesaikan gangguan yang terjadi di tingkat kelurahan, sehingga diharapkan mengurangi beban permasalahan yang harus diselesaikan pada tingkat kota.

Peran serta masyarakat melalui pos kamling juga sangat penting dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Hingga tahun 2015 terdapat 262 pos kamling sehingga bila dibandingkan dengan jumlah kelurahan, sebanyak 17, maka rasio pos kamling per kelurahan mencapai 15,41. Namun bila dilihat dari keaktifannya hanya 178 pos kamling yang rutin melaksanakan kegiatan pengamanan lingkungan sehingga rasio pos kamling aktif baru mencapai 0,68 atau 68%. Untuk itu diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif yang disertai peningkatan sarana kelengkapan pos kamling.

Dilihat dari kondisi perpolitikan, situasi Kota Magelang relatif stabil selama lima tahun terakhir. Puncaknya adalah melalui perhelatan Pemilu baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pilkada dapat berjalan dengan kondusif, tertib, demokratis dan nirkerusuhan. Tingkat partisipasi pemilih dalam berbagai level Pemilu cukup tinggi baik dari aspek jumlah maupun pilah gender sebagaimana nampak pada tabel. Namun demikian sejak pemilu legislatif, Pilpres hingga Pilkada masih menunjukkan adanya fluktuasi.

Tabel II.61
Karakteristik Pemilih Kota Magelang
2011-2015

Item	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Pemilih	-	-	94.302	95.418	90.210
a. Laki-laki	-	-	45.237	45.701	43.043
b. Perempuan	-	-	49.065	49.717	47.167
Tingkat Partisipasi Pemilih	-	-	66,70%	79,21%	75,15%
a. Laki-laki	-	-	63,17%	76,94%	73,06%
b. Perempuan	-	-	69,96%	81,31%	77,06%

Sumber : Profil Daerah Kota Magelang Tahun 2015

Kota Magelang juga intensif melaksanakan pembangunan bidang Hukum dan HAM yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka penataan, pengawasan dan penegakan produk hukum daerah. Akselerasi yang telah dilakukan meliputi penetapan Perda, Penindakan terhadap pelanggar Perda serta bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu yang berperkara di pengadilan. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat telah dilaksanakan penyuluhan hukum di 17 Kelurahan. Sementara itu untuk bidang Hak Asasi Manusia (HAM), telah terbit Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Tahun 2015-2019 yang ditindaklanjuti melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015. Di tingkat Kota Magelang pada tahun 2016 ini akan disusun RAD HAM menyesuaikan terbitnya peraturan tersebut.

Pada bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, Kota Magelang telah menyusun RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Beberapa hal yang dilakukan antara lain :

- 1) Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada lembaga PTSP serta penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu maupun prosedur;

- 2) Transparansi perencanaan dan penganggaran melalui publikasi dokumen yang dapat diakses melalui situs www.magelangkota.go.id;
- 3) Transparansi proses pengadaan barang dan jasa melalui website LPSE;
- 4) Keterbukaan Informasi Publik.

2.3.1.6 Sosial

Untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pembangunan sosial diarahkan pada tiga sasaran yaitu peningkatan sarana sosial, prosentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, serta PMKS yang memperoleh bantuan sosial.

Penanganan PMKS tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Dalam kaitan ini panti sosial milik pemerintah memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dalam penanganan PMKS melalui peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.62
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Kota Magelang Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah sarana sosial	11	11	8	13	12
	Panti jompo	2	2	2	2	2
	Panti asuhan	2	2	2	2	2
	Panti rehabilitasi	2	2	2	2	2
	Lainnya	5	5	2	7	6
2	Persentase penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	2.80%	6.15%	8.45%	8.4%	35,02%
3	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	2.20%	8%	3%	4.90%	12,92%
4	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	0	8.5%	11%	7.7%	7.7%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kota Magelang, 2016

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial penerima jaminan sosial meningkat pada tahun 2013 menjadi 11% namun kemudian menurun menjadi 7,7% pada tahun 2014 dan 2015. Meskipun terjadi fluktuasi bila dilihat dari persentasenya namun jumlah penerima jaminan sosial tetap dari tahun 2011 - 2013 sebanyak 72 orang dan pada tahun 2014 dan tahun 2015 menurun menjadi 70 orang. Artinya bahwa jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial relatif meningkat dari tahun 2013 hingga 2015. Hingga pada tahun 2015 tercatat jumlah lanjut usia tidak potensial di Kota Magelang yang seharusnya menerima jaminan sosial sebanyak 723 orang sedangkan jumlah penyandang cacat fisik dan mental sebesar 185 orang. Berdasarkan perbandingan antara jumlah total penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang ada di Kota Magelang dengan mereka yang menerima bantuan sosial maka masih terdapat lebih dari 92,3% (838 orang) lainnya yang belum dan perlu mendapat bantuan sosial.

Jumlah penerima jaminan sosial tersebut di atas sesuai alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk Kota Magelang yaitu 70 orang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, bantuan sosial diberikan secara berkelanjutan sesuai dengan keuangan negara. Selama ini bantuan berkelanjutan diberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya

yang diterimakan setiap tiga bulan sekali selama sepuluh bulan setiap tahunnya langsung kepada penerima jaminan sosial melalui kantor pos terdekat.

Untuk PMKS yang tertangani pada tahun 2015 mengalami kenaikan sejak tahun 2011 hingga tahun 2015. Berdasarkan laporan kegiatan pemutakhiran dan pemetaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial di Kota Magelang tahun 2015, jumlah PMKS di Kota Magelang ada sebanyak 8.420 orang. Sedangkan berdasarkan realisasi kegiatan bidang sosial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang, jumlah PMKS yang mendapatkan pembinaan, pelatihan dan bantuan adalah sebanyak 2.949 orang ditambah dengan 1 yayasan. Dengan demikian nilai capaian kinerja dari penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Magelang yang mendapatkan bantuan sosial adalah 35,02%. Capaian ini menunjukkan masih ada sebanyak 64,98% PMKS yang belum mendapatkan bantuan sosial. Tetapi dari angka tersebut bisa kita lihat upaya maksimal yang sudah dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial sudah menekan laju pertumbuhan tersebut sehingga jumlah PMKS tahun 2015 yang diberikan bantuan bertambah dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

Meskipun jumlah PMKS yang tertangani belum mencapai 30% namun persentase penanganan terhadap PMKS pada tahun 2015 telah mencapai 35,02%. Angka ini jauh meningkat bila dibandingkan tahun 2011 yang hanya mencapai 2,80%. Peningkatan pesat tersebut terjadi karena upaya penanganan terhadap PMKS tidak hanya berupa pemberian bantuan sosial namun juga pembinaan dan pelatihan sehingga akhirnya diharapkan PMKS memiliki ketrampilan untuk memampukan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan.

2.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Ketenagakerjaan

Permasalahan ketenagakerjaan di Kota Magelang hampir sama dengan kondisi ketenagakerjaan secara nasional di antaranya masalah tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, rendahnya produktivitas pekerja/buruh dan rendahnya kualifikasi pekerja/buruh. Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja menimbulkan pengangguran. Sedangkan kondisi lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pencari kerja belum memadai, diikuti dengan rendahnya kompetensi tenaga kerja, sehingga turut memberikan kontribusi terhadap rendahnya produktivitas pekerja. Beberapa indikator yang dapat dilihat untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pencari Kerja yang Ditempatkan, Prosentase Pencapaian UMK terhadap KHL dan Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dan Tingkat Penyelesaian Hubungan Industrial. Adapun hasil kinerja ketenagakerjaan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel II.63
Capaian Kinerja Urusan ketenagakerjaan Kota Magelang Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,6%	69,46%	68,93%	68,5%	64,35%
2.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	91,72%	91,29%	93,20%	92,62%	93,57%
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,28%	8,71%	6,80%	7,38%	6,43%
4.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	66,05%	82,85%	74,80%	98,1%	98,55%

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
5.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan :	53,06%	56,67%	80,07%	70,72%	63,18%
a.	Berbasis kompetensi	40,82%	69,16%	74,9%	79,37%	77,61%
b.	Berbasis masyarakat	59,18%	30,84%	43,44%	53,57%	-
c.	Kewirausahaan	59,18%	70%	71,2%	79,21%	82,52%
6.	Angka Sengketa pengusaha dengan pekerja	7	2	1	9	9
7.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100%	100%	100%	100%	66,67%
8.	Rasio KHL/ UMK	92,09%	95,39%	97,46%	100,03%	97,54%
9.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	59,07%	53%	62,48%	56,87%	67,08%
10.	Besaran pemeriksaan perusahaan	76%	35%	67%	84%	79,41%
11.	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	2,89%	2,33%	4,90%	5,45%	7,41%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang, 2016

Secara umum kondisi ketenagakerjaan dalam lima tahun terakhir cukup kondusif dan menunjukkan perbaikan kinerja. Hal ini terlihat dari tingkat kesempatan kerja yang cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu Tahun 2011 – 2015 yang berkisar antara 91% - 93%. Tingkat kesempatan kerja mengindikasikan seberapa peluang seseorang untuk memasuki pasar kerja. Dengan tingkat kesempatan kerja diatas 90 persen maka kondisi ketenagakerjaan di Kota Magelang tergolong baik.

Indikator-indikator utama dalam menilai kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Angka ini berguna untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka ini berguna untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Magelang menunjukkan tren menurun, dimana berkisar antara 70% - 64% dalam kurun waktu Tahun 2011 – 2015. Hal ini terlihat dari peningkatan penduduk usia kerja yang diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk bukan angkatan kerja, sementara jumlah angkatan kerja menurun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa jumlah pasokan tenaga kerja yang siap memasuki pasar kerja (labor supply) menurun. Kondisi ini diikuti dengan tren yang menurun dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) dimana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berkisar antara 8% - 6%.

Tabel II.64
Komponen Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Magelang Tahun 2011-2015

No	Tahun	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja	Penduduk Usia Kerja
		Bekerja	Pengangguran		
1	2011	58.919	5.319	26.750	90.990
2	2012	57.669	5.501	27.775	90.945
3	2013	58.110	4.241	28.101	90.452

No	Tahun	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja	Penduduk Usia Kerja
		Bekerja	Pengangguran		
4	2014	59.628	4.754	29.625	94.007
5	2015	57.133	3.927	33.823	94.883

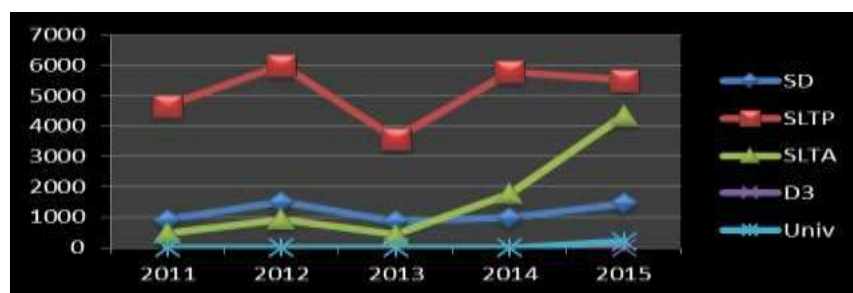
Sumber: Sakernas, Agustus 2011 – 2015

Selama 5 (lima) tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Magelang menunjukkan tren menurun (rata-rata penurunan per tahun 1,4%). Penurunan yang cukup besar terjadi di tahun 2011 yaitu turun sebesar 5% dari tahun 2010. Namun selain mengalami penurunan angka TPT juga mengalami peningkatan meskipun tidak besar, yaitu pada tahun 2012 sebesar 0,4% dan pada tahun 2014 sebesar 0,9%. Dari Tabel II....dapat dilihat bahwa dari tahun 2008 sampai 2014 angka TPT memiliki tren menurun, sedangkan angka TPAK memiliki fluktuasi di kisaran angka 60% - 70%. Kondisi ini disebabkan karena banyak warga Kota Magelang yang bekerja di luar wilayah. Untuk semakin menurunkan angka pengangguran, maka diperlukan situasi yang kondusif untuk investasi/industri, sehingga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Melihat angka rata-rata lama sekolah yang masih kurang dari 12 tahun, sebaiknya juga dapat disiapkan lembaga-lembaga pendidikan non-formal untuk meningkatkan kemampuan angkatan kerja, sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi di dunia kerja.

Tabel II.65
Komposisi Penduduk Bukan Angkatan Kerja

No	Tahun	Angkatan Kerja		
		Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya
1	2011	6.072	15.359	5.321
2	2012	8.450	15.077	4.248
3	2013	4.896	17.783	5.422
4	2014	8.549	16.043	5.033
5	2015	11.542	17.113	5.168

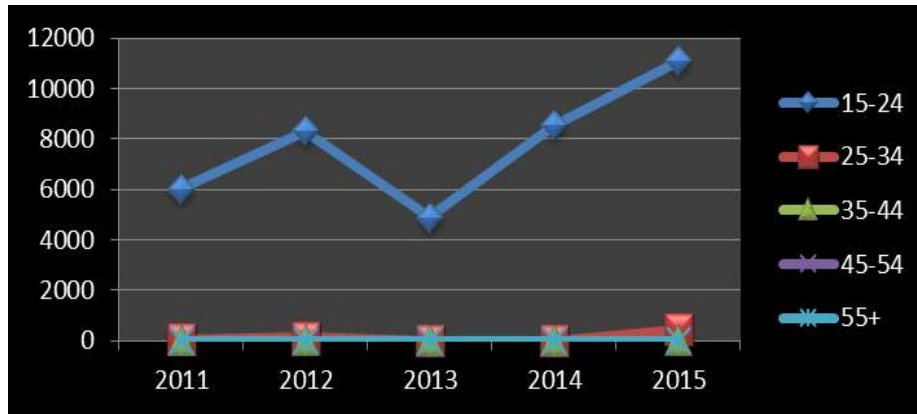
Sumber :Sakernas Agustus 2011 – 2015



Sumber :Sakernas Agustus 2011 – 2015

Gambar 2.29
Grafik Jumlah Penduduk yang Bersekolah di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Apabila dilihat lebih mendalam lagi sebagaimana terlihat dalam grafik diatas maka jumlah penduduk bukan angkatan kerja yang akan menjadi angkatan kerja (sekolah) selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pendidikan yang ditempuh adalah SLTP dan SD meskipun di dua tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan di pendidikan tinggi serta SLTA. Adapun jumlah penduduk usia kerja yang masih bersekolah sebagian besar berumur antara 15 - 24 tahun dan sisanya berumur antara 25 - 34 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM di Kota Magelang.



Sumber : Sakernas Agustus 2011 – 2015

Gambar 2.30

Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Jika dilihat dari sisi jumlah penduduk bukan angkatan kerja terlihat bahwa komposisinya menunjukkan tren peningkatan pada jumlah penduduk yang bersekolah. Meningkatnya penduduk yang bersekolah menunjukkan adanya peningkatan kualitas pasokan tenaga kerja (*labor supply*) di tahun-tahun mendatang. Dalam lima tahun terakhir, penduduk usia kerja menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan ini menunjukkan karakteristik bonus demografi yang diprediksi akan dialami oleh bangsa Indonesia.

Indikator lain dari situasi ketenagakerjaan yang kondusif adalah sengketa antara pengusaha dengan pekerja dapat diselesaikan melalui perjanjian bersama, melalui peran mediator. Jumlah kasus yang terselesaikan melalui perjanjian bersama (PB) yang difasilitasi oleh mediator dari Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:



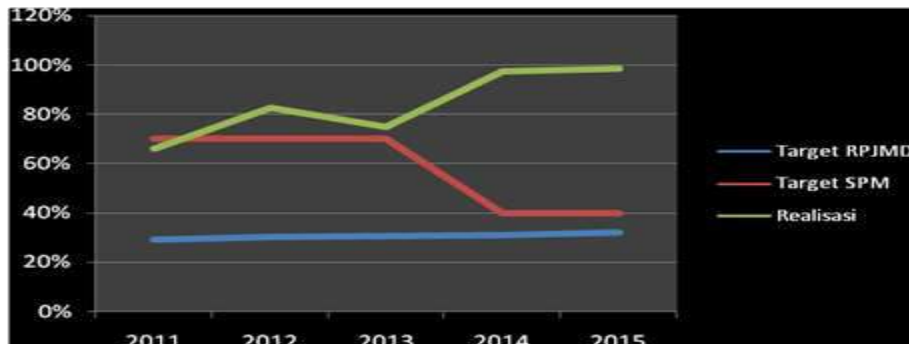
Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang, 2010-2015

Gambar 2.31

Kasus yang terselesaikan melalui PB

Indikator diatas merupakan indikator kinerja mediator ketenagakerjaan yang ada di Disnakertransos Kota Magelang, dimana keberhasilan memediasi kedua belah pihak dengan output perjanjian bersama/kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa perlu meneruskan kasus yang ada ke jenjang pengadilan/mahkamah agung. Pada tahun 2015, dari 9 kasus yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang, ada 6 kasus yang bisa diselesaikan dengan perjanjian bersama, sementara 3 kasus tidak menemukan kata sepakat antara tenaga kerja dengan pengguna tenaga kerja sehingga diteruskan ke jenjang pengadilan.

Pada kurun waktu lima tahun terakhir persentase pencari kerja yang ditempatkan mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang, 2011 – 2016, diolah

Gambar 2.32
Target dan Realisasi pencari kerja ditempatkan

Capaian kinerja ini dilaksanakan melalui fasilitasi penempatan tenaga kerja yang dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme yaitu melalui *matching system* dimana petugas antar kerja melakukan penawaran kepada pencari kerja sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan melalui *job fair* dimana perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan pencari kerja bertemu secara langsung dalam suatu waktu tertentu. Adapun lowongan pekerjaan yang tersedia didapatkan oleh pengantar kerja melalui *job canvassing* ke perusahaan-perusahaan di wilayah Kota Magelang dan sekitarnya maupun perusahaan yang secara aktif mengirimkan kebutuhan tenaga kerja baik melalui surat dan fax maupun pemanfaatan bursa kerja online yang telah tersedia.

Peningkatan yang cukup signifikan ini dipicu oleh kebijakan pemerintah pada Tahun 2014 yang tidak mensyaratkan kartu AK-1 sebagai persyaratan pendaftaran akan tetapi diwajibkan pada saat pemberkasan. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi dalam pendaftaran dan penyebaran informasi pasar kerja membantu kenaikan capaian kinerja dimaksud.

Namun demikian, sesuai dengan mekanisme penempatannya, lebih dari 90 persen para pencari kerja bekerja dalam lingkup propinsi Jawa Tengah, sementara yang bekerja ke luar propinsi / luar negeri kurang dari 10 persen saja sebagaimana terlihat dalam gambar dibawah ini :



Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang, 2015

Gambar 2.33
Penempatan Tenaga Kerja Menurut Mekanismenya

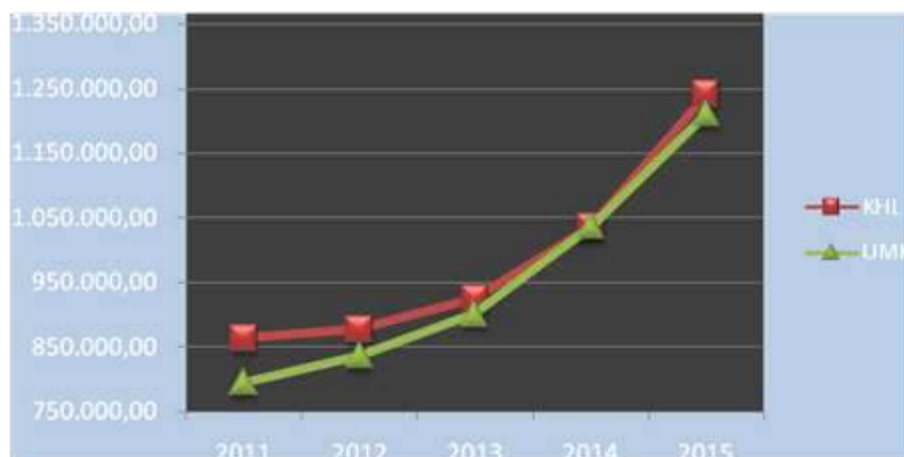
Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pelatihan berbasis kompetensi yang diampu oleh UPTD Balai Latihan Kerja dan pelatihan kewirausahaan yang diampu oleh Bidang Perluasan Kesempatan Kerja. Secara umum capaian kinerja pencari kerja terlatih telah melampaui target RPJMD maupun SPM.

Namun demikian, pelatihan yang ada saat ini belum mengikuti standar yang ditetapkan KKNi serta belum melalui proses sertifikasi keahlian. Sementara, era Masyarakat Ekonomi Asean telah dimulai sehingga sangat

urgent untuk menerapkan standar kompetensi yang diberlakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Diharapkan hal ini akan menambah daya saing pencari kerja yang berasal dari Kota Magelang disamping akan membangun kepercayaan masyarakat secara luas akan kualitas hasil pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja Kota Magelang.

Selain itu, Lembaga Pelatihan Swasta yang ada saat ini juga belum ada yang terakreditasi oleh badan akreditasi lembaga pelatihan, sehingga hal ini juga sangat berpengaruh terhadap kualitas/daya saing para lulusan pelatihan kerja di lembaga swasta.

Kenaikan UMK yang terjadi setiap tahun sementara kondisi ekonomi secara regional yang kurang stabil cukup berpengaruh terhadap kondisi perusahaan dan memicu penutupan perusahaan atau pergantian manajemen perusahaan yang berdampak pada pengurangan pegawai maupun pergantian pegawai. Secara general besaran UMK tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Adapun besaran UMK dan KHL dari Tahun 2010- 2016 dapat dilihat pada Gambar 2.32



Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang, 2011-2015

Gambar 2.34
Besaran KHL dan UMK Kota Magelang Tahun 2011-2015

Di tahun 2015 terjadi penurunan besaran KHL terhadap UMK dibandingkan Tahun 2014, hal ini disebabkan adanya kesepakatan dewan pengupahan yang didasarkan pada kenaikan KHL yang cukup tinggi (Rp. 1.241.486,-) dibandingkan KHL pada Tahun 2014 (Rp. 1.036.666,-) sementara kondisi ekonomi global berpengaruh terhadap kemampuan finansial perusahaan/pengguna tenaga kerja. Untuk mencegah adanya PHK/lay off maka dicapai kesepakatan besaran UMK terhadap KHL Kota Magelang sebesar 97,57 persen.

Dalam 6 tahun berjalan, peningkatan UMK hanya berkisar 80 persen saja. Apabila dibandingkan dengan daerah lain peningkatan ini masih dianggap wajar baik dari sisi perusahaan sebagai pemberi kerja maupun dari sisi tenaga kerja/buruh. Peran Instansi ketenagakerjaan dalam hal ini sebagai fasilitator dan mediator bagi pengusaha dan tenaga kerja sangat baik, sehingga capaian kinerja dimaksud dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2015, jumlah tenaga kerja secara keseluruhan sebanyak 12.722 orang terdiri dari 4320 orang tenaga kerja wanita dan 8402 orang tenaga kerja pria. Menurut data dari Kantor BPJS ketenagakerjaan Kota Magelang, jumlah tenaga kerja yang telah mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan sebanyak 8534 orang yang berasal dari 255 pengguna tenaga kerja dari 272 pengguna tenaga kerja yang ada di wilayah Kota Magelang. Hal ini menjadi indikator bahwa

sebagian besar pengguna tenaga kerja telah menyadari pentingnya penerapan norma ketenagakerjaan dimana hak buruh/tenaga kerja menjadi perhatian pengguna tenaga kerja dan diharapkan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Secara umum, capaian indikator dari tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang, 2011-2015

Gambar 2.35

Capaian Indikator Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Magelang Tahun 2010 – 2015

Dari grafik diatas terlihat bahwa jumlah kepersertaan jamsostek selama lima tahun terakhir telah melampaui SPM yang ditetapkan oleh Kemenaker RI yaitu sebesar 50 persen. Meskipun demikian, pembinaan kepada perusahaan untuk memperhatikan hak-hak pekerjaannya harus terus dilakukan agar capaian indikator ini dapat mencapai 100 persen di tahun mendatang.

Jumlah perusahaan yang ada saat ini sebanyak 272 perusahaan sementara yang telah diperiksa penerapan norma ketenagakerjaannya dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren menurun, hal ini disebabkan oleh jumlah perusahaan makin meningkat sementara kapasitas pengawas ketenagakerjaan stagnan sehingga tidak semua perusahaan bisa diperiksa. Sementara untuk indikator pengujian peralatan di perusahaan mengalami peningkatan tren. Hal ini dipicu oleh adanya personil pengawas ketenagakerjaan yang telah lulus spesialis K3 sehingga personil pemeriksa K3 bertambah.



Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang, 2011-2015

Gambar 2.36

Realisasi Pengujian Alat dan Pemeriksaan Perusahaan di Kota Magelang Tahun 2011 - 2015

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi isu besar di Indonesia beberapa tahun terakhir karena meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini kemudian menjadi salah satu aspek pengarusutamaan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah nasional (RPJM Nasional) Tahun 2015-2020. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang terus berupaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan capaian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel II.66
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	15,70%	15,75%	15,67%	15,94%	13,15%
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	10,68%	9,81%	14%	15,67%	16,73%
3	Persentase keterwakilan politik perempuan di parlemen	12%	12%	12%	24%	24%
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	60,6 %	60,79 %	61,8 %	60,55 %	55,88%
5	Persentase tenaga kerja di bawah umur	0%	0%	0%	0%	0%
6	Rasio KDRT	0,15%	0,11%	0,02%	0,09%	0,07%
7	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100%	100%	94%	100%

Sumber: 1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Magelang, 2011-2015
2. Kajian Analisis Gender Kota Magelang, 2015

Sejak tahun 2011-2015, terjadi fluktuasi tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta. Pada lembaga pemerintah, hal ini lebih disebabkan karena adanya mutasi dan pensiun yang eksis pada tahun tahun dimaksud. Pada tahun 2011 angka partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mencapai 15,70% kemudian sedikit naik pada tahun 2012 menjadi 15,75% dan mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 15,67%. Angka ini pada tahun 2014 adalah mencapai 15,94% atau naik 0,33% dari tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan menjadi 13,15%. Upaya *affirmative action* atas partisipasi perempuan harus terus dioptimalkan.

Pada lembaga swasta, keterlibatan perempuan secara umum terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Terjadi peningkatan sebesar 6,05% antara tahun 2011 hingga 2015, meskipun partisipasi angkatan kerja perempuan menurun 4,18% pada periode tersebut. Nampak bahwa terjadi peningkatan kapasitas perempuan, terutama dilihat dari aspek tingkat pendidikan, sehingga semakin mampu bersaing dengan laki-laki. Penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam hal ini terjadi karena semakin banyak perempuan yang memilih meneruskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada bekerja.

Jumlah anak perempuan usia 15 tahun ke atas yang sudah mempunyai kemampuan baca tulis di Kota Magelang pada tahun 2011 telah mencapai 95,10%. Capaian tersebut terus meningkat hingga tahun 2013 dengan angka 96,69%. Sedangkan pada tahun 2014 adalah tercatat sebanyak 51.313 orang dari 53.277 anak perempuan usia lebih dari 15 tahun. Sehingga nilai capaian untuk indikator angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas mencapai 96,31%. Sementara itu pada tahun 2015 jumlah anak perempuan di atas 15 tahun yang melek huruf sejumlah 51498 dari 53518 anak perempuan di atas 15 tahun atau sebesar 96,23%. Hal ini sejalan dengan angka IPG Kota Magelang yang terus meningkat.

Indikator partisipasi angkatan kerja perempuan, dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi landai. Untuk Kota Magelang pada tahun 2011 baseline adalah 60,6% pada tahun 2011, sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi 60,79% dan naik melebihi tahun 2010 pada angka 61,8% pada tahun 2013. Sementara itu pada tahun 2014 hanya sebesar 60,55%. Di akhir tahun 2015 angkanya turun lagi menjadi 55,88%.

Kinerja positif dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga ditunjukkan dengan menurunnya rasio KDRT dari tahun hingga tahun 2015. Terjadi penurunan rasio KDRT sebesar 0,08% bila membandingkan angka pada tahun 2011 dan 2015. Pada tahun 2011 terjadi 60 kasus KDRT diantara 39.457 rumah tangga (yang dihitung berdasarkan jumlah KK) sehingga rasio KDRT mencapai 0,15%. Sedangkan pada tahun 2015 terjadi 30 kasus KDRT diantara 42.433 rumah tangga sehingga rasio KDRT menjadi 0,07%.

Tren positif penurunan rasio KDRT tidak terlepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan korban, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 8);
2. Perda Kota Magelang no 11 tahun 2012 dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
3. Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
4. Peraturan Walikota Magelang nomor 9 tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang RAD KLA

Upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Magelang juga sudah didukung dengan keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Cahaya Magelang. P2TP2A Cahaya Magelang sudah didukung dengan konselor/ psikolog, pengacara dan tokoh agama, selain petugas tetap yang ada.

Munculnya kebijakan-kebijakan terkait perlindungan anak tidak terlepas dari upaya mewujudkan Magelang sebagai Kota Layak Anak, yang dicanangkan pada tahun 2011. Hanya setahun setelah pencanangan tersebut Kota Magelang meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak dengan kategori Madya. Selanjutnya pada tahun 2013 disusun RAD Kota Layak Anak Kota Magelang Tahun 2014-2018. Mekanisme monitoring dan evaluasi dalam upaya pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan Focused Group Discussion (FGD) Kota Layak Anak dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang.

Meskipun belum mampu memenuhi 31 indikator yang ada dalam lima kluster KLA namun Pemerintah Kota Magelang telah melakukan inisiasi program dan kegiatan untuk pencapaian target di semua kluster tersebut. Beberapa hal penting yang telah dilaksanakan antara lain meliputi:

- Akte kelahiran gratis
- Pembentukan forum anak di setiap kelurahan
- Pelibatan anak dalam perencanaan pembangunan (dalam konsultasi publik, FGD dan musrenbang RKPD)
- Pengembangan informasi ramah anak, diantaranya melalui pengembangan taman bacaan dan perpustakaan keliling
- Penetapan Zona Selamat Sekolah
- Penetapan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

2.3.2.3 Pangan

Ketahanan pangan merupakan tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, harga terjangkau, aman dikonsumsi dan halal, berbasis pada pemanfaatan kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah. Secara umum, ketahanan pangan mencakup 4 aspek, yaitu: kecukupan (*sufficiency*), akses (*access*), keterjaminan (*security*), dan waktu (*time*) (Baliwaty, 2004). Dengan adanya aspek tersebut, maka ketahanan pangan dipandang menjadi suatu sistem yang merupakan rangkaian dari tiga komponen utama, yaitu: ketersediaan dan stabilitas pangan (*food availability dan stability*), kemudahan memperoleh pangan (*food accessibility*), dan pemanfaatan pangan.

Berikut ini adalah capaian kinerja Pemerintah Kota Magelang dalam penyelenggaraan urusan ketahanan pangan tahun 2011 hingga 2015:

Tabel II.67
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Jangka Menengah Kota Magelang
Tahun 2011-2015

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Adanya regulasi ketahanan pangan	ada	ada	ada	ada	Ada
2	Ketersediaan pangan utama	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat kerawanan pangan dan gizi	11.78%	10.34%	10.06%	8.77%	0.90%
4	Ketersediaan dan cadangan pangan					
	- Ketersediaan energi (Kkal/kap/th)	1974.72	1980.55	2340.69	2345.2	2295.26
	- Ketersediaan protein (gram/kap/th)	57.97	58.33	63.91	64.13	65.01
5	Distribusi dan akses pangan					
	- Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan daerah	71%	78%	96.30%	96%	98%
	- Stabilitas harga dan pasokan pangan	83%	100%	87%	100%	100%
6	Penganekaragaman dan keamanan pangan					
	- Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89.8%	92.2%	93.6%	94.5%	95%
	- Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penanganan kerawanan pangan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: RKPD Kota Magelang Tahun 2013- 2017

Adanya Regulasi Ketahanan Pangan. Dalam rangka penyelenggaraan urusan ketahanan pangan, Pemerintah Kota Magelang telah membentuk Dewan Ketahanan Pangan. Bahkan Dewan Ketahanan Pangan ini telah diperkuat dengan regulasi daerah, yaitu Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2010.

Ketersediaan Pangan Utama. Ketersediaan pangan penduduk Kota Magelang sangat bergantung pada produksi komoditas pangan luar daerah. Hal ini disebabkan karena rendahnya produksi komoditas pangan Kota Magelang. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk Kota Magelang, komoditas pangan didatangkan dari luar daerah. Ketidakseimbangan antara produksi komoditas pangan lokal dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk Kota Magelang tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel II.68
Jumlah Produksi Komoditas Pangan dan Konsumsi Penduduk Kota Magelang Tahun 2011-2015

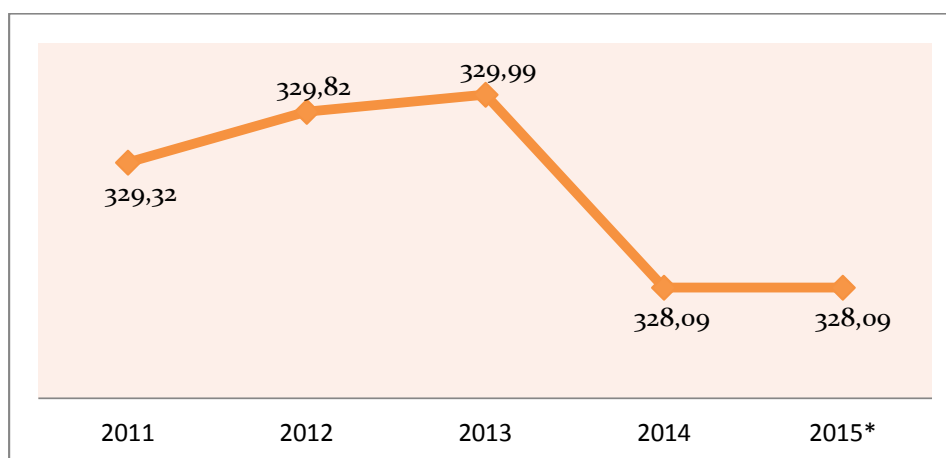
Komoditas Pangan	2011		2012		2013		2014		2015*	
	Produksi Pangan	Konsumsi Penduduk	Produksi Pangan	Konsumsi Penduduk	Produksi Pangan	Konsumsi Penduduk	Produksi Pangan	Konsumsi Penduduk	Produksi Pangan	Konsumsi Penduduk
Padi (ton)	3.131,98	12.006,74	3.272	12.052,37	3.206	11.174,32	3.182	13.515,49	3.245,69	13.645,91
Jagung (ton)	19,50	57,90	58,12	0	53,88	0	72,40	12	133,43	
Ketela Pohon (ton)	126	916,07	44,68	919,56	22	852,56	14	9.400,50	13,5	7.023,10
Daging Ruminansia (kg)	604.292	222.585,26	668.122	223.431,23	1.068.197	207.153,66	1.131.821	627.504,8	1.105.006	582.225,6

Daging Unggas (kg)	712.017	532.660,68	3.022.127	534.685,14	6.699.056	495.731,88	1.921.418	1.351.548,8	6.154.971	2.231.864,8
Telur (kg)	44.02	771.972	1,130,960	774.906	65,428	718.452	85,727	1.206.740	45.665	1.237.229,4
Susu (kg)	36.432	288.202,88	86,410	289.298,24	90,890.87	268.222,08	66,363	3.813.298,4	187,136	1.431.304,6

Sumber: 1. Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Magelang,
2. Kota Magelang dalam Angka, 2011-2015

Keterangan: *angka sementara

Rendahnya produksi komoditas pangan disebabkan karena keterbatasan lahan yang digunakan untuk usaha pertanian, akibat maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian untuk kebutuhan perumahan, pertokoan dan industri. Berikut ini perkembangan luas lahan pertanian (sawah, tegal/ladang, kolam/empang, perkebunan) Kota Magelang tahun 2007 hingga 2015:



Sumber: 1. Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Magelang
2. Kota Magelang dalam Angka Tahun 2008-2015

Keterangan: *angka sementara

Gambar 2.37
Grafik Perkembangan Luas Lahan Pertanian Kota Magelang Tahun 2007-2015

Grafik diatas menunjukkan bahwa, selama lima tahun terakhir ini (2011 hingga 2015) lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi lahan non pertanian adalah sebesar 1,23 ha (0,37%). Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2011, maka pada tahun 2013 terdapat peningkatan penggunaan lahan pertanian sebesar 0,20%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh bertambahnya luas lahan sawah di Kota Magelang.

Penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian di Kota Magelang adalah: tingginya harga tanah, nilai profitabilitas rendah, dan tingginya permintaan untuk perumahan. Ditambah lagi, sebagian besar lahan pertanian Kota Magelang terletak di tengah perumahan, sehingga sangat memungkinkan beralih fungsi menjadi perumahan. Hal ini tentunya merupakan ancaman bagi ketahanan pangan di Kota Magelang.

Pemerintah Kota Magelang perlu mempertahankan keberadaan lahan pertanian dan dikelola dengan sebaik-baiknya, agar terwujud ketahanan pangan dan pelestarian sumberdaya alam. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian diantaranya: melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta membeli lahan pertanian produktif milik rakyat untuk dikelola menjadi lahan pertanian abadi.

Tingkat Kerawanan Pangan dan Gizi. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, dan justifikasi Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat kerawanan pangan dan gizi di Kota Magelang tahun 2015 adalah 0,90%. Bila

dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 (11,78%), maka tingkat kerawanan pangan dan gizi tahun 2015 telah menurun sebesar 92,36%.

Rawan pangan dan gizi yang terjadi di Kota Magelang disebabkan karena masih tingginya angka kemiskinan. Sehingga ketidakmampuan ekonomi menyebabkan masih ada rumah tangga yang tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya dalam periode yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya perbaikan kondisi ketahanan pangan penduduk miskin oleh seluruh pemangku kepentingan, baik lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah.

Ketersediaan dan Cadangan Pangan. Berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII tahun 2004, agar seseorang dapat hidup sehat dan dapat aktif menjalankan aktivitas sehari-hari secara produktif, maka pola konsumsi pangan penduduk harus memenuhi syarat, yaitu: Angka Kecukupan Gizi (AKG) ketersediaan energi adalah sebesar 2.200 Kkal/kapita/hari, dan AKG ketersediaan protein sebesar 57 gram/kapita/hari. Sementara, berdasarkan hasil WNPG X tahun 2012, standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) ketersediaan energi adalah sebesar 2.400 Kkal/kap/hari, dan AKG ketersediaan protein adalah sebesar 63 gram/kapita/hari.

Capaian indikator ketersediaan energi pada tahun 2015 adalah sebesar 2295,26 Kkal/kap/th (meningkat sebesar 11,18% dari tahun 2011). Namun demikian, jika mengacu pada hasil WNPG X tahun 2012, maka capaian indikator ketersediaan energi penduduk Kota Magelang belum memenuhi rekomendasi. Bahkan pada tahun-tahun sebelumnya (2011 hingga 2014) indikator ketersediaan energi penduduk Kota Magelang juga belum memenuhi rekomendasi WNPG.

Namun demikian, capaian indikator ketersediaan protein di tahun 2015 telah mencapai 65,01 gram/kap/th atau meningkat sebesar 7,28% dari tahun 2011. Capaian indikator ketersediaan protein di Kota Magelang pada tahun 2011, 2013, 2014, dan 2015 telah memenuhi rekomendasi WNPG. Belum tercapainya indikator ketersediaan protein pada tahun 2012, dan indikator ketersediaan energi pada tahun 2011-2015 nampaknya berkorelasi dengan rendahnya produksi pangan asal Kota Magelang, sebagai akibat dari maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Sehingga, ketersediaan energi, dan protein sangat bergantung dari produksi komoditas pangan luar Kota Magelang.

Distribusi dan Akses Pangan. Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan daerah, serta stabilitas harga dan pasokan pangan merupakan indikator untuk mengetahui capaian kinerja distribusi dan akses pangan. Capaian indikator ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan daerah pada tahun 2015 adalah sebesar 98% (meningkat 38,03% dari tahun 2011).

Begitu pun indikator stabilitas harga dan pasokan pangan pada tahun 2015 telah mencapai 100% (meningkat 20,48% dari tahun 2011).

Dukungan infrastruktur yang memadai dan lancarnya transportasi memudahkan distribusi pangan di Kota Magelang. Pengumpulan informasi pasokan harga dan akses pangan daerah dilakukan terhadap komoditas pangan, diantaranya: beras, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi jalar, ubi kayu, bawang merah, bawang putih, cabe merah keriting, cabe merah besar, daging sapi, daging ayam kampung, daging ayam negeri, telur ayam kampung, telur ayam negeri, ikan, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau sangat menentukan pola konsumsi pangan penduduk.

Meskipun demikian, harga pangan selama tahun 2011 hingga 2015 sangat berfluktuatif, bergantung pada: kebijakan Pemerintah Pusat dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan import pangan, kurangnya pasokan pangan menjelang hari raya keagamaan, serta ekspektasi/harapan pedagang yang ingin mendapat keuntungan lebih. Komoditas cabe, dan bawang merah seringkali mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena kurangnya pasokan lokal akibat perubahan musim. Sementara komoditas telur dan daging, baik daging sapi maupun daging unggas harganya juga akan meningkat pada saat bulan ramadhan, dan hari raya. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menstabilkan harga komoditas pangan tersebut adalah melalui operasi pasar.

Penganekaragaman dan Keamanan Pangan. Capaian keseimbangan gizi dan keanekaragaman pangan yang dikonsumsi oleh penduduk (skor PPH) Kota Magelang untuk hidup sehat, aktif dan produktif pada tahun 2015 adalah sebesar 94,6% (meningkat sebesar 5,34 % dari skor PPH tahun 2011). Meskipun demikian, konsumsi pangan penduduk Kota Magelang masih belum ideal, karena masih berada dibawah 100%. Dibutuhkan upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup. Berikut ini capaian AKE, AKP, dan PPH Kota Magelang tahun 2011 hingga 2015:

Tabel II.69
Tingkat Konsumsi Energi, Tingkat Konsumsi Pangan, dan Skor PPH Kota Magelang Tahun 2011-2015

No	URAIAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Tingkat Konsumsi Energi (%AKE)	89,8	90	106,4	106,6	104,33
2	Tingkat Konsumsi Protein (%AKP)	101,3	101,9	111,7	112	113,65
3	Skor PPH	89,8	92,2	93,6	94,5	94,6

Sumber: UPTB Ketahanan Pangan Kota Magelang, 2011-2015

Pola konsumsi pangan penduduk yang mengacu pada Pola Pangan Harapan merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program diversifikasi pangan. Program diversifikasi pangan bukan bertujuan untuk mengganti bahan pangan pokok beras dengan sumber karbohidrat lain, tetapi untuk mendorong peningkatan sumber zat gizi yang cukup kualitas dan kuantitas, baik komponen gizi makro maupun gizi mikro.

Jika dilihat dari **Tabel II.67** capaian energi berdasarkan konsumsi kelompok pangan padi-padian dan umbi-umbian penduduk Kota Magelang pada tahun 2013 hingga 2015 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Sebaliknya, capaian energi berdasarkan konsumsi kelompok pangan hewani sejak tahun 2012 hingga 2015 semakin menurun. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015, tingginya proporsi sumber karbohidrat dalam pola konsumsi pangan penduduk menunjukkan bahwa kemiskinan adalah faktor utama yang menyebabkan kekurangan gizi.

Sehingga diperlukan perbaikan pola konsumsi pangan penduduk sesuai dengan kaidah asupan gizi seimbang.

Tabel II.70
Konsumsi Energi Berdasarkan Konsumsi Kelompok Pangan Penduduk Kota Magelang Tahun 2011-2015

No	Kelompok Pangan	Standar Energi Kkal/kap/hr	Capaian Energi Kkal/kap/hr				
			2011	2012	2013	2014	2015

No	Kelompok Pangan	Standar Energi Kkal/kap/hr	Capaian Energi Kkal/kap/hr				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Padi-padian	1000	865.0	880.0	1,102.2	1,106.4	1,109.7
2	Umbi-umbian	120	124.6	124.3	238.8	247.0	213.5
3	Pangan Hewani	240	270.6	217.6	201.9	219.5	212.8
4	Minyak dan lemak	200	71.6	99.9	165.1	105.1	129.9
5	Buah/biji berminyak	60	37.6	66.3	65.5	62.9	57.6
6	Kacang-kacangan	100	217.1	140.3	155.6	169.3	136.8
7	Gula	100	93.2	98.7	69.4	58.4	60.8
8	Sayur dan buah	120	106.3	153	116.1	145.6	149.0
9	Lainnya	60	9.3	19.6	13.4	17.8	16.3

Sumber: UPTB Ketahanan Pangan Kota Magelang, 2011-2015

Sementara itu, untuk indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan selama tahun 2011 hingga 2015 telah tercapai 100%. Permasalahan yang sering terjadi adalah:

1. Masih adanya penggunaan bahan tambahan makanan (zat aditif kimia) seperti: MSG, pewarna tekstil, pemanis buatan, pengawet, pengental, pemucat, serta anti gumpal; dan
2. Adanya pencemaran bahan kimia (pestisida) pada beberapa komoditas pangan seperti: sayur, dan buah-buahan.

2.3.2.4 Pertanahan

Wewenang pemerintah daerah dalam urusan pertanahan terbatas sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah pusat diantaranya pemberian Ijin Lokasi. Ijin Lokasi diwajibkan bagi setiap perusahaan baik perorangan maupun badan hukum yang akan menanamkan modal dengan memanfaatkan lahan/tanah di Kota Magelang. Pemanfaatan lahan/tanah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031. Kinerja Urusan Pertanahan tergambar pada tabel berikut:

Tabel II.71
Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Ijin Lokasi	0	0	0	0	0
2	Rasio Ijin Lokasi yang sesuai dengan peruntukan ruang	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: 1. Bappeda Kota Magelang, 2011-2015

2. BPN Kota Magelang, 2011-2015

Hingga Tahun 2015 capaian realisasi indikator jumlah ijin lokasi yang sesuai dengan peruntukan ruang masih 0% dikarenakan dari Tahun 2011 hingga 2015 tidak ada Ijin Lokasi yang dikeluarkan di Kota Magelang. Perijinan terkait pemanfaatan ruang di Kota Magelang dengan luasan masih di bawah ketentuan Ijin Lokasi atau < 1 hektar. Ketentuan mengenai Ijin Lokasi baru ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang melalui Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ijin Lokasi. Untuk Ijin Lokasi sesuai Peraturan Menteri ditetapkan oleh Walikota Magelang atas rekomendasi teknis dari Kantor Pertanahan.

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Kota Magelang memiliki keterbatasan sumber daya alam sehingga anugrah lingkungan yang bersih dan sehat harus terus dijaga. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup saat ini merupakan salah satu hal penting karena salah satu tujuan pembangunan abad melenium atau Millenium Development Goals (MDGs) 2015 adalah memastikan keberlanjutan Lingkungan hidup. Lingkungan juga merupakan tempat bagi kelangsungan kehidupan makhluk yang didalamnya terdapat air, tanah, dan udara harus bersih atau paling tidak berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak mempengaruhi kesehatan dan aktifitas masyarakat.

Berbagai persoalan yang akan dihadapi oleh kota Magelang dimasa yang akan datang yang berhubungan dengan lingkungan hidup adalah yaitu penyediaan air bersih, sanitasi, persoalan limbah kota yaitu sampah padat, limbah cair, dan polusi udara juga akan semakin meningkat.

Urusan Lingkungan Hidup di Kota Magelang meliputi Bidang Pencemaran Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Pengaduan Lingkungan Hidup dan persampahan. Kinerja urusan lingkungan hidup antara lain ditunjukkan dengan 17 indikator pada beberapa sub Bidang yang ditangani sebagai berikut :

A. Pencemaran Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja yang menggambarkan kinerja Bidang Pencemaran Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada urusan Lingkungan Hidup sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.72
Kinerja Bidang Pencemaran Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	55%	65%	66,67%	66,67%	66,67%
2.	Jumlah industri berpotensi mencemari udara	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Tidak ada
3.	Tersedianya Dokumen SLHD	ada	ada	ada	ada	Ada
4.	Penegakan hukum lingkungan hidup	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
5.	Pencemaran status mutu air pada kegiatan industri	-	-	-	-	-
6.	Tersedianya NSPK pengolahan dan pembuangan Air limbah Domestik dan Industri, serta Bahan Berbahaya dan Beracun (non-fisik)	tidak ada	tidak ada	tidak ada	belum ada	Ada
7.	Rasio ketersediaan IPAL	77	77	77	78	82
8.	Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan dministrative dan teknis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
	pengecahan pencemaran air					
9.	Prosentase (%) jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Prosentase (%) prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan status kerusakannya	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Prosentase (%) jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2011-2015

Analisis dampak lingkungan (dikenal dengan nama AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup.

Realisasi pada tahun 2015 adalah 66,67 %. Cakupan pengawasan terhadap AMDAL dicapai dengan cara menentukan jenis usaha yang sudah menyusun dokumen AMDAL terhadap jumlah usaha yang wajib menyusun dokumen AMDAL.

Jumlah usaha yang wajib menyusun dokumen AMDAL tahun 2014 ini sebanyak 3 buah, yaitu Taman Kyai Langgeng, GOR Samapta (DELH) dan Borobudur International Golf (DELH). Sementara yang sudah menyusun dokumen AMDAL hingga tahun 2014 ini baru GOR Samapta dan Borobudur International Golf. Sementara Taman Kyai Langgeng sampai saat ini belum menyusun dokumen lingkungan tersebut

Indikator Jumlah industri berpotensi mencemari udara realisasi dari tahun 2013 - 2015 tidak ada, hal ini disebabkan sampai tahun 2015 ini belum diinventaris jumlah semua industri tersebut.

Saat ini sudah disahkan Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sudah dilakukan sosialisasi antara KLH dengan pemilik usaha dan atau kegiatan dalam upaya pencegahan pencemaran udara.

Dokumen SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah) ini rutin disusun oleh KLH setiap 1 tahun sekali. Dokumen ini memuat berbagai informasi yang berkaitan dengan : (1) Kondisi lingkungan hidup dan kecenderungannya yang berisi mengenai sumber daya alam (lahan dan hutan, keanekaragaman hayati, air, udara, laut dan pesisir, iklim) dan bencana alam. (2) Tekanan terhadap lingkungan yang berisi mengenai demografi, permukiman, kesehatan, pertanian, industri, pertambangan, energi, transportasi, pariwisata dan limbah B3. (3) Upaya pengelolaan lingkungan yang berisi tentang rehabilitasi lingkungan, AMDAL, penegakan hukum, peran serta masyarakat dan kelembagaan.

Indikator Penegakan hukum lingkungan hidup realisasi sampai dengan tahun 2015 adalah tidak ada. Hal ini dikarenakan belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan serta rendahnya pemahaman

masyarakat dan aparat terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan, disisi lain pemerintah belum menyusun prosedur dan tata cara pengajuan izin lingkungan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan terkini.

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dicapai dengan cara menentukan jenis usaha yang akan dipantau dalam rangka pemantauan kualitas air limbah yang dihasilkan usaha tersebut terhadap badan air.

Realisasi indikator Tersedianya NSPK pengolahan dan pembuangan Air limbah Domestik dan Industri, serta Bahan Berbahaya dan Beracun (non-fisik) dari tahun 2013 – 2014 adalah tidak tersedia NSPK dan baru pada tahun 2015 ini terealisasi NSPK dengan disahkannya Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 2015

Realisasi indikator rasio ketersediaan IPAL pada tahun 2015 adalah 82 % dan selalu meningkat dari tahun 2011 sebesar 77%. Rasio ketersediaan IPAL dicapai dengan cara menentukan jenis usaha yang sudah memiliki IPAL terhadap jumlah usaha yang ada di Kota Magelang yang wajib memiliki IPAL.

Jumlah usaha yang sudah memiliki dokumen lingkungan tahun 2014 ini sebanyak 85 buah, dan belum semuanya memiliki IPAL (karena sebagai syarat direkomendasikan dokumen lingkungan suatu usaha adalah sudah dimilikinya IPAL).

Beberapa kendala terkait penyediaan IPAL diantaranya: kurangnya kesadaran pemilik usaha penghasil limbah untuk mengolah limbahnya sebelum dilepas ke lingkungan, tidak semua perusahaan yang sudah menyusun dokumen UKL-UPL melaksanakan apa yang tertuang dalam dokumen, seperti pembuatan IPAL, terbatasnya lahan untuk lokasi pembuatan IPAL, khususnya industri tahu, dan biaya operasional dan pemeliharaan IPAL yang dianggap cukup mahal oleh perusahaan.

Kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan administratif (memiliki dokumen lingkungan UKL-UPL) hingga tahun 2015 ini sebanyak 85 perusahaan. Dan sebagai syarat dikeluarkannya rekomendasi kelayakan lingkungan dari Kantor Lingkungan Hidup adalah apabila perusahaan telah memiliki IPAL (memenuhi syarat teknis pencegahan pencemaran air). Namun pengawasan kegiatan usaha di tahun 2015 ini hanya dapat dilakukan untuk 6 kegiatan dikarenakan keterbatasan anggaran.

Dalam istilah lingkungan hidup, setiap kegiatan usaha harus dipantau secara kontinu, mulai dari kepatuhan dalam pengurusan dokumen lingkungan, kepatuhan dalam melaksanakan dokumen lingkungan (diwujudkan dengan pembuatan IPAL), kepatuhan dalam menjaga kinerja IPAL agar berlangsung optimal, kepatuhan dalam menjaga kualitas air limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari air hingga kepatuhan dalam melaporkan pelaksanaan isi dari dokumen lingkungan ke KLH secara berkala (6 bulan sekali). Hal inilah yang menyebabkan KLH harus memantau usaha dan atau kegiatan tersebut setiap tahunnya. Sesuai SPM, jumlah usaha yang diawasi seharusnya terus bertambah tiap tahunnya. Sehingga sampai dengan tahun 2013 (tahun terakhir SPM 2009-2013) menjadi 100%.

Sedangkan regulasi SPM untuk tahun 2014-2015 belum ada, Adapun target SPM untuk tahun-tahun selanjutnya antar daerah menjadi rancu dalam penterjemahannya. Menurut petunjuk dari BLH Propinsi untuk SPM selanjutnya memakai acuan dengan target setiap tahun 100 % .

Karena keterbatasan secara teknis (SDM KLH) hingga keterbatasan anggaranlah yang menyebabkan hanya 10 usaha kegiatan yang dijadikan target pengawasan dan berhasil diawasi dari tahun 2014 s/d tahun 2105

ini.

Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Pencemaran udara selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara, salah satunya berasal dari kegiatan sumber tidak bergerak dimana yang paling dominan adalah industri. Pencegahan pencemaran udara dapat dilakukan dengan mengurangi atau mencegah terjadinya pencemaran udara.

Persyaratan administratif adalah persyaratan terkait sistem perizinan antara lain izin usaha, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Persyaratan teknis adalah persyaratan sesuai dengan kelayakan prosedur pengendalian pencemaran udara. Persyaratan teknis antara lain melakukan pengolahan emisi udara sehingga memenuhi baku mutu emisi yang telah ditetapkan, cerobong dilengkapi lubang sampling, lantai kerja, tangga, dan pagar pengaman limbah, serta melakukan pemantauan emisi secara rutin atau sewaktu-waktu sesuai keperluan. Pengendalian pencemaran udara tidak bergerak adalah kegiatan dalam rangka untuk mengendalikan pencemaran udara dari jenis usaha dan/atau kegiatan.

Realisasi dari tahun 2013-2014 tidak ada. Tidak tercapainya indikator ini atau tidak ada usaha yang diawasi pada tahun 2013 dan 2014 ini dikarenakan tidak terdapat industri di Kota Magelang yang berpotensi mencemari udara dan diwajibkan mempunyai dokumen lingkungan (UKL/UPL atau DPLH atau AMDAL atau DELH). Kriteria untuk dijadikan target SPM ini adalah untuk perusahaan yang diwajibkan mempunyai dokumen lingkungan dan cerobong yang memenuhi spesifikasi persyaratan SNI. Target SPM ini ditujukan untuk industri semen, pulp, kertas, PLTU, batubara, besi baja dan ketel uap.

Banyak usaha dan atau kegiatan di Kota Magelang yang sebenarnya memiliki potensi mencemari udara namun secara administrasi tidak diwajibkan memiliki dokumen lingkungan dan secara teknis belum memiliki upaya pencegahan pencemaran udara yang sesuai dengan kelayakan prosedur pengendalian pencemaran udara, misalnya banyak yang sudah memiliki cerobong asap, namun tidak memenuhi syarat sesuai SNI 19-7117.1-2005 (Emisi Gas Buang-Sumber Tidak Bergerak). Sebagai contoh industri tahu. Industri tahu sangat mencemari kualitas udara sebagai hasil samping dari pembakaran arang yang merupakan bagian dari proses produksinya. Para pemilik usaha tahu sebenarnya sudah berinisiatif untuk membuat cerobong asap, namun kenyataannya tidak memenuhi syarat karena ketinggian cerobong hanya beberapa meter dan terbuat dari bambu. Ketinggian cerobong asap dan bahan pembuatannya harus disesuaikan dengan syarat SNI 19-7117.1-2005 (Emisi Gas Buang-Sumber Tidak Bergerak). Para pemilik usaha tahu merasa keberatan, mengingat usaha ini hanya home industri yang omsetnya kecil. Selain itu apabila akan dibuat cerobong asap komunal, perlu dicari lokasi lahan yang akan digunakan untuk pembuatan cerobong asap dan dana investasi yang cukup besar. Sehingga solusi untuk mengurangi pencemaran udara dari kegiatan industri tahu bisa dilakukan dengan penanaman pohon di sekitar lokasi usaha. Diharapkan dengan penanaman pohon, dapat menyerap polutan emisi gas CO₂ yang dihasilkan industri tahu.

Di Kota Magelang juga sudah ada kegiatan usaha yang menghasilkan polutan dan sudah memiliki cerobong asap, yaitu PT. Kencana Sari Jaya (industri kayu). Namun cerobong ini juga tidak sesuai dengan SNI dan kinerjanya belum maksimal, terbukti dengan adanya pengaduan dari masyarakat sekitar lokasi usaha yang mengeluhkan adanya pencemaran udara dari usaha kayu ini pada tahun 2014.

B. Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Indikator kinerja yang menggambarkan kinerja bidang Keanekaragaman Hayati (Kehati) pada urusan Lingkungan Hidup sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.73
Kinerja Bidang Keanekaragaman Hayati (Kehati) Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Prosentase (%) prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan status kerusakannya	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup, 2011-2015

Prosentase luas lahan dan/atau tanah untuk biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya, diinformasikan sebesar 100% di tiap tahunnya hingga Tahun 2015.

Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Status kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah kondisi tanah di tempat dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Lahan untuk produksi biomassa adalah areal yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagai kawasan untuk produksi biomassa (seperti lahan pertanian, lahan perkebunan, kawasan hutan tanaman, ruang terbuka hijau perkotaan). Penyampaian informasi status kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah hasil pengukuran kriteria baku kerusakan tanah yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, atau papan pengumuman.

Kota Magelang mempunyai luas wilayah 1812 hektar. Dalam rencana tata ruang wilayah Kota Magelang, terdapat rencana pemanfaatan lahan untuk produksi biomassa (lahan pertanian, tegal/kebun, hutan dan lainnya) tahun 2015 seluas 43,1 hektar. Adapun realisasi untuk tahun 2015 adalah 100 %.

Sebagai pendukung produksi biomassa dan konservasi keanekaragaman hayati Di Kota Magelang terdapat Gunung Tidar dengan luasan sebesar 69 ha. Di Gunung Tidar terdapat beberapa jenis tanaman hutan hujan tropis dan hewan. Hewan yang dilestarikan keberadaannya hingga saat ini adalah kera, dan burung.

Dalam rangka mempertahankan kelestarian sumber daya alam hayati Gunung Tidar, selanjutnya akan dikembangkan menjadi Kebun Raya. Kebun Raya adalah suatu kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ (di luar habitat aslinya). Kebun raya memiliki kekhasan tersendiri sesuai dengan karakteristik sumber daya alam hayati yang terdapat di kawasan tersebut.

Selain sebagai kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ, kebun raya juga dapat dimanfaatkan sebagai:

- 1) Tempat penelitian, dan pendidikan pendidikan botani seperti inventarisasi, eksplorasi tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai ilmu pengetahuan dan ekonomi, langka dan endemik, dan lain-lain;

- 2) Salah satu tempat tujuan rekreasi bagi masyarakat. Agar masyarakat dapat mengaktualisasikan dirinya dengan pengetahuan yang berkaitan dengan tumbuhan atau vegetasi.

C. Pengaduan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja yang menggambarkan kinerja bidang Keaneekaragaman Hayati (Kehati) pada urusan Lingkungan Hidup sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.74
Kinerja Bidang Keaneekaragaman Hayati (Kehati) Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Prosentase (%) jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup, 2011-2015

Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti tiap tahunnya juga terinformasikan sebesar 100%.

Meningkatnya pembangunan di berbagai sektor telah mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut dan didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menyebabkan makin meningkatnya pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Salah satu upaya pemerintah kabupaten/kota untuk menyikapi kondisi tersebut dengan peningkatan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat.

Dalam rangka menjamin hak dan peran setiap orang, instansi lingkungan hidup di kabupaten/kota wajib mengelola pengaduan masyarakat. Tanggung jawab pengelolaan ini sebagai bentuk pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Sehingga setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada bupati/walikota atau kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

Realisasi sampai dengan tahun 2013 tidak ada pengaduan, realisasi sampai dengan tahun 2014 adalah ada 5 pengaduan dan realisasi pada tahun 2015 ada 1 kasus pengaduan. Indikator ini adalah merupakan Standar Pelayanan Minimal yang selesai sampai dengan tahun 2013. Namun hingga saat ini regulasi SPM yang baru belum disusun. Sehingga tahun 2014 sampai dengan 2015 adalah tahun peralihan.

Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dicapai dengan cara menentukan jumlah pengaduan yang dapat diatasi oleh KLH dari jumlah pengaduan masyarakat yang diterima KLH. Jumlah pengaduan yang diterima oleh KLH pada tahun 2015 ini ada 1 (satu) pengaduan. Pengaduan diterima tanggal 5 Juni 2015 oleh bapak Marsono, SPd (Ketua RT 4/4 Kedungsari), melaporkan pencemaran Peternakan Sapi Perah, dimana pihak pengusaha sapi perah melanggar kesepakatan awal untuk tetap menjaga kesehatan lingkungan. Dan masalah tersebut semuanya sudah ditindaklanjuti dan berhasil diselesaikan KLH.

D. Persampahan

Indikator kinerja yang menggambarkan kinerja bidang Persampahan pada urusan Lingkungan Hidup sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.75
Kinerja Bidang Persampahan Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Penduduk terlayani jaringan sampah	95%	95%	95%	95%	96%
2.	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	3,14	3,12	3,11	3,09	3,08
3.	Jumlah Pengolahan Sampah terpadu	1	1	1	1	2

Kota Magelang memiliki keterbatasan sumber daya alam sehingga anugrah lingkungan yang bersih dan sehat harus terus dijaga. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup saat ini merupakan salah satu hal penting karena salah satu tujuan pembangunan abad melenium atau Millenium Development Goals (MDGs) 2015 adalah memastikan keberlanjutan Lingkungan hidup. Lingkungan juga merupakan tempat bagi kelangsungan kehidupan makhluk yang didalamnya terdapat air, tanah, dan udara harus bersih atau paling tidak berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak mempengaruhi kesehatan dan aktifitas masyarakat.

Berbagai persoalan yang akan dihadapi oleh kota Magelang dimasa yang akan datang yang berhubungan dengan lingkungan hidup adalah yaitu penyediaan air bersih, sanitasi, persoalan limbah kota yaitu sampah padat, limbah cair, dan polusi udara juga akan semakin meningkat.

Tabel II.76
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2010 –2015

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah sampah yang ditangani (m ³ /hari)	170,06	164,78	172,45	186,72	118,54	136,75
2	Jumlah volume produksi sampah (m ³ /hari)	207,18	193,94	208,85	217,92	139,39	160,58
3	Persentase	82,08%	84,96%	82,57%	85,68%	85,04%	85,16%

Sumber : Kantor DKPTK Kota Magelang DDA Kota Mgl Tahun 2015

Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat kota Magelang mencapai 160,58 m³ per hari. Jumlah tersebut menurun jauh bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 207,18 m³. Tetapi bila melihat tahun 2014 jumlah sampah yang dihasilkan naik dari 139,39 m³ menjadi 160,58 m³ atau naik sebesar 13,19 %. Dalam periode tahun 2010-2015 jumlah sampah yang diproduksi tertinggi berada di tahun 2013 yaitu sebesar 217,92 m³. Melihat begitu besar jumlah sampah yang dihasilkan maka menjadikan pemikiran bersama bagi kita untuk mengantisipasi

sejak kini karena, masalah sampah untuk saat ini menjadi permasalahan yang sangat krusial dengan adanya kenyataan bahwa sel aktif yang terakhir ternyata sudah tidak mampu menampung jumlah sampah yang masuk ke TPA. Demikian pula adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini. Karena itu pengelolaan sampah yang dilakukan dimulai dari sumber dengan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) perlu digalakkan. Pola pengelolaan sampah seperti ini akan berdampak positif, bukan hanya perbaikan lingkungan dan reduksi gas metan, namun juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Salah satu cara melakukan reduksi sampah di lingkungan rumah tangga dengan membentuk kelompok masyarakat pengolah sampah. Upaya mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan terbentuknya kelompok masyarakat melakukan pengelolaan sampah.

Prosentase jumlah penduduk terlayani jaringan sampah dicapai dengan cara mengetahui jumlah penduduk yang terlayani jaringan sampah dari jumlah seluruh penduduk se-Kota Magelang sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2015 adalah 95 %

Jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2015 adalah 132.261 jiwa (Daerah Dalam Angka Kota Magelang). Apabila dengan prosentase jumlah penduduk terlayani jaringan sampah 95 %, maka jumlah penduduk yang terlayani jaringan sampah pada tahun 2015 adalah 125.647 jiwa. Sementara penduduk yang tidak terlayani yaitu sebanyak 6.613 jiwa mengelola sampah dengan cara dibakar sendiri atau ditimbun dalam tanah.

Rasio TPS per satuan penduduk di Tahun 2016 sebesar 3.08, hingga tahun 2015 Jumlah TPS di Kota Magelang ada 13 buah, sementara jumlah transfer depo ada 12 buah, sedang jumlah penduduk Kota Magelang tiap tahun bertambah. Dihadapkan dengan Volume produksi sampah Kota Magelang mencapai 160,58 m³/hari dan volume sampah yang ditangani mencapai 136,75 m³/hari jumlah TPS belum memadai.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator ini antara lain, masih adanya area pemukiman penduduk yang jauh dari TPS dan sulit terjangkau kendaraan pengangkut sampah yang disebabkan kontur daerah yang naik turun serta peran serta masyarakat masih kurang karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kota Magelang masih sebatas membayar retribusi dan pengelolaan sampah di permukiman. Pelibatan masyarakat dimulai dengan dicanangkannya kampung organik di tiap RW dan Bank Sampah. Sampai dengan Tahun 2015 di Kota Magelang telah berdiri kelompok bank sampah dan kampung organik sebanyak 118 unit .

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Sementara transfer depo adalah tempat yang digunakan untuk mentransfer sampah dari gerobak sampah ke truk sampah, sehingga seharusnya di transfer depo tidak terdapat sampah. Namun perhitungan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena daya tampung TPS maupun transfer depo yang ada saat ini dipaksakan harus dapat menampung semua timbulan sampah yang masuk ke TPS/transfer depo. Sehingga banyak ditemukan TPS/transfer depo yang sampahnya meluber hingga ke jalan.

Beberapa kendala yang dihadapi yaitu TPS dan transfer depo yang seharusnya hanya digunakan untuk mentransfer sampah dari gerobak sampah ke truk sampah, pada kenyataannya tidak berjalan sesuai fungsinya.

Masih banyak terdapat sampah di lokasi TPS dan transfer depo dikarenakan tingkat disiplin warga/ tenaga pengangkut sampah di wilayah kelurahan yang tidak mentaati batas waktu / jam sehingga masih ada sampah yang menginap di TPS maupun transfer depo.

TPST didefinisikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pemisahan dan penolahan sampah secara terpusat. Fungsi TPST adalah sebagai tempat berlangsungnya pemisahan, pencucian/pembersihan, pengemasan dan pengiriman produk daur ulang sampah.

Realisasi sampai dengan tahun 2015 adalah 2 (dua) buah yaitu di Jurangombo Utara dan di Kelurahan Tidar Utara. Lahan perkotaan yang sempit serta kepadatan penduduk yang tinggi sangat menyulitkan dalam memperoleh lahan untuk TPST 3R sedang TPST yang sudah ada tersebut belum beroperasi secara optimal.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi 3 proses, yaitu: pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan. Pendaftaran penduduk dengan produk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan kependudukan. Pencatatan sipil dengan produk akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, akte nengangkatan anak dan akte pengakuan/ pengesahan anak. Pengelolaan informasi kependudukan dengan produk data/ informasi kependudukan yang berupa olahan proses dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Capaian kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.77
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (Cakupan Penerbitan KTP penduduk usia 17 tahun ke atas/ telah menikah memiliki KTP-el)	100%	100%	88.88%	90.04%	93.56%
2	Rasio bayi berakte kelahiran (Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran (Disdukcapil))	78.92%	92.37%	68.24%	94.18%	92.57%
3	Rasio pasangan berakte nikah	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	733	838	860	870	923
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	ada	ada	ada	Ada	ada
6	Cakupan penerbitan KK	NA	NA	27.15%	29.11%	100%
7.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	NA	NA	50.36%	25.32%	38.46%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2016

Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Magelang terus menunjukkan tren positif. Terkait kepemilikan KTP terlihat bahwa pada tahun 2011 dan 2012 telah mencapai 100%, meskipun kemudian sedikit menurun pada tahun 2013 karena penerapan KTP-el yang proses penerbitannya terus berlangsung hingga sekarang, yang menyebabkan kepemilikan KTP-el belum mencapai 100%. Penerbitan KTP-el pada tahun 2015 dan pun terus meningkat. Tingginya persentase penduduk yang memiliki KTP-el tidak terlepas dari Kota Magelang. Yang meraih prestasi Terbaik I Tingkat Provinsi Jawa Tengah Prosentase Capaian Perekaman e-KTP Tertinggi dengan Wajib KTP di Bawah 500.000 Jiwa / Bidang Kependudukan.

Meskipun secara umum telah menunjukkan performa positif namun beberapa indikator perlu akselerasi kinerja, khususnya terkait rasio bayi berakte kelahiran. Hingga tahun 2015 angka ini belum mampu mencapai 100% karena masih terdapat sebesar 7,43% bayi yang belum memiliki akte, yang biasanya disebabkan keterlambatan pengurusan. Pemerintah Kota Magelang perlu mengadopsi inovasi untuk mewujudkan kependudukan yang valid dan mutakhir (*up to date*), seperti misalnya dalam mengatasi keterlambatan pengurusan akte kelahiran. Hingga kini kerjasama pemerintah dengan pemangku kepentingan lain terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal. Belum ada mekanisme 'jemput bola' untuk mengatasi keterlambatan pencatatan perubahan situasi kependudukan (kelahiran, kematian, mutasi).

Tidak hanya kepemilikan akte lahiran, indikator cakupan penerbitan kutipan akte kematian juga hanya mencapai 38,46%. Artinya bahwa terdapat lebih dari 60% peristiwa kematian yang tidak diikuti disertai dengan penerbitan kutipan akte kematian. Berdasarkan hal ini nampak masih rendahnya kesadaran warga dalam tertib administrasi kependudukan. Indikator cakupan penerbitan KK dan cakupan penerbitan akte kematian muncul sejak ditetapkannya SPM bidang pemerintahan dalam negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2012 sehingga angka capaian kinerja indikator ini baru bisa didapatkan pada tahun 2013.

Untuk cakupan penerbitan KK, pada tahun 2013 dan 2014 menggunakan formula persentase perbandingan antara penerbitan KK pada tahun terkait dengan jumlah seluruh KK. Berdasarkan perhitungan tersebut maka tidak mungkin mencapai angka 100% karena penerbitan KK hanya dilakukan apabila ada peristiwa kependudukan saja. Untuk dapat lebih menggambarkan kinerja administrasi kependudukan maka pada tahun 2015 formula perhitungan untuk indikator tersebut diubah menjadi persentase perbandingan antara penerbitan KK pada tahun terkait dengan jumlah seluruh peristiwa kependudukan yang berakibat diterbitkannya KK (kelahiran, kematian, mutasi). Dengan formula tersebut maka pada tahun 2015 cakupan penerbitan KK menjadi 100% pada tahun 2015.

Penggunaan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sebagai pengganti SIMDUK (Sistem Informasi Kependudukan) diharapkan mampu menjamin kualitas keamanan dalam penerbitan dokumen kependudukan. Selain penyediaan SIAK, pelaksanaan administrasi kependudukan juga perlu didukung oleh aparat dengan SDM yang berkualitas dan prosedur pengurusan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Hal ini mengingat pentingnya dokumen administrasi kependudukan dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini dan masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hal tersebut.

Pada tahun-tahun mendatang pengukuran kinerja urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil tidak hanya didasarkan pada indikator-indikator tersebut di atas melainkan juga terkait kepemilikan kartu identitas anak (KIA), dengan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Saat ini penduduk berusia kurang dari 17 tahun belum memiliki kartu tanda kependudukan yang berlaku secara nasional. Melalui KIA diharapkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat dilakukan secara optimal dengan basis data yang akurat.

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan merupakan konsep baru pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga sebagai pelaku di dalamnya, sehingga pembangunan memiliki tujuan ganda yaitu

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memampukan masyarakat untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Upaya pemberdayaan masyarakat di Indonesia dilakukan melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan di lingkungannya. Kinerja kelompok-kelompok masyarakat tersebut di Kota Magelang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.78
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah LPM	17	17	17	17	17
2.	Persentase LKK sehat	35,29% (6 LKK)	35,29% (6 LKK)	41,18% (7 LKK)	35,29% (6 LKK)	17,6% (3 LKK)
3.	PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Jumlah posyandu	197	197	196	196	197
5.	Posyandu aktif	77,6%	77,6%	81,12%	89,80%	83,25%

Sumber: 1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Magelang, tahun 2011-2015
2. Dinas Kesehatan Kota Magelang, tahun 2011-2015

LPM merupakan ujung tombak pemberdayaan masyarakat, khususnya pada tingkat kelurahan. Sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada maka terdapat 17 LPM di Kota Magelang. Masing-masing LPM melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat lain yang ada di kelurahan, seperti misalnya LKM dan PKK. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 persentase PKK aktif dibandingkan dengan jumlah PKK di Kota Magelang telah memenuhi ekspektasi. Artinya seluruh kelompok PKK aktif menjalankan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat. Jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2011 hingga 2015 sebanyak 3.007 yang terdiri dari 191 Kelompok PKK RW dan 1.012 Kelompok PKK RT dan 1.804 kelompok dasawisma.

Terkait posyandu, dilihat dari strata/tingkatan posyandu hingga tahun 2015 Kota Magelang memiliki 1 Posyandu Pratama, 32 Posyandu Madya, 69 Posyandu Paripurna dan 95 Posyandu Mandiri. Berdasarkan distribusi sebaran lokasi posyandu menurut wilayah kecamatan, maka jumlah posyandu untuk masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut :

- Kecamatan Magelang Utara : 47 posyandu
- Kecamatan Magelang Tengah : 76 posyandu
- Kecamatan Magelang Selatan : 74 posyandu

Dari jumlah tersebut di atas, persentase posyandu aktif terus meningkat dari tahun 2011-2014 dan hanya sedikit menurun pada tahun 2015 karena munculnya posyandu pratama di Kecamatan Magelang Tengah. Termasuk posyandu aktif adalah posyandu tingkat paripurna dan mandiri. Jumlah dan persentase posyandu aktif menggambarkan tingginya peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga, utamanya pada aspek kesehatan.

Kinerja pemberdayaan pada aspek ekonomi masyarakat menunjukkan hal sebaliknya. Telah mencapai 60% pada tahun 2011, Lembaga Keuangan Kelurahan yang dikategorikan sehat hanya mencapai 24% pada akhir tahun 2015 atau sejumlah 4 LKK yaitu LKK Kedungsari, Kemirirejo, Kramat Selatan dan Kramat Utara sedangkan 13 LKK lainnya dalam kondisi tidak sehat. Hal ini disebabkan banyaknya kredit macet di mayoritas LKK dan keterbatasan kemampuan SDM pengelola.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Salah satu keberhasilan pengendalian penduduk di Kota Magelang dibuktikan dengan diperolehnya Penghargaan MDG's Award dari BKKBN, yang dapat dilihat dari jumlah anak per keluarga selama tahun 2014-2015 yang stabil pada angka 2. Hal ini dapat dicapai dengan rasio akseptor KB dan cakupan peserta KB aktif rata-rata selama 5 tahun sebesar 76%-77%. Untuk meningkatkan rasio tersebut dirasa tidak memungkinkan bagi Kota Magelang karena struktur penduduk terbesar pada usia produktif. Capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.79
Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	0,44	0,34	2	2
2	Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I Peserta KB	74%	74,93%	76,32%	78%	80%
3	Cakupan peserta KB Aktif	74%	82%	76,65%	80,94%	77,3%
4	Partisipasi laki-laki dalam ber KB	7%	9%	7,2%	5,4%	8%
5	Cakupan unmet need KB		10.89%	5.67%	5.67%	5%
6	Rasio petugas lapangan/penyuluh KB (PLKB) di seluruh kelurahan	-	1,13	1,13	1,13	1,13
7	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Magelang, 2011-2015

Cakupan peserta KB aktif merupakan perbandingan jumlah peserta program KB aktif dengan jumlah pasangan usia subur. Indikator ini menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para pasangan usia subur (PUS). Terhitung sejak 2011, terus mengalami tren kenaikan. Setelah mengalami sedikit penurunan pada angka 75,96 % pada tahun 2011, angka tersebut terus naik pada tahun 2012 dan 2013 dengan 81,33% namun sedikit melambat menjadi 75% pada tahun 2014. Angka tersebut sedikit melambat pada tahun 2015. Dari sejumlah 17.526 pasangan usia subur hanya sejumlah 13.548 yang terpantau menjadi peserta KB aktif. Dari jumlah peserta KB aktif tersebut, sebanyak 12.456 diantaranya (92%) adalah perempuan sedangkan peserta KB aktif laki-laki hanya 1.092 jiwa (8%). Untuk meningkatkan cakupan peserta KB aktif saat ini dirasa sulit karena kondisi demografi Kota Magelang dimana mayoritas penduduk berada pada usia produktif.

Upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan peserta KB aktif adalah dengan optimalisasi kampanye secara aktif dengan menasar pada PUS yang belum mengikuti program KB secara aktif. Keberadaan gedung KB akan semakin sentral untuk mengupayakan naiknya angka prevalensi peserta KB aktif. Faktor penting lainnya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengendalian penduduk adalah meningkatkan rasio petugas lapangan/ penyuluh Keluarga Berencana (KB).

Sejak tahun 2011 tidak ada perubahan dalam hal jumlah kelurahan maupun jumlah penyuluh KB di Kota

Magelang. Rasio petugas Lapangan KB terhitung sejak tahun 2012 melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/1050/OTDA Tanggal 26 Desember 2012 perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2012, indikator ini mulai diberlakukan. Dengan definisi operasional dan formulasi perbandingan jumlah desa/kelurahan dengan PLKB/PKB di Kota Magelang adalah 17 banding 15 atau 1,13. Kondisi capaian ini masih sama sejak tahun 2012 hingga 2015.

Perlu akselerasi peningkatan peserta KB berjenis kelamin laki-laki pada tahun-tahun mendatang melihat rendahnya partisipasi laki-laki pada tahun 2011-2015. Tercatat hanya 7% peserta KB laki-laki tahun 2011, kemudian sedikit meningkat menjadi 9% pada tahun selanjutnya namun kemudian terus menurun hingga tahun 2014 hanya sebesar 5,4% dan kemudian kembali meningkat menjadi 8% hingga akhir tahun 2015. Tren positif keikutsertaan KB laki-laki tidak terlepas dari upaya pemerintah yang kembali mengkampanyekan program KB secara masif.

Meskipun angka cakupan peserta KB Kota Magelang aktif cenderung stabil pada kisaran 70%-80% namun cakupan unmet need KB terus menurun sejak tahun 2012 hingga 2015. Pada tahun 2012 angka ini mencapai 10,89% namun terus menurun hingga menjadi 5% saja pada tahun 2015. Terjadi penurunan hingga lebih dari 50%. Hal ini menunjukkan kinerja pelayanan keluarga berencana yang terus meningkat.

2.3.2.9 Perhubungan

Urusan Perhubungan meliputi penanganan angkutan, dan lalu lintas. Kinerja pembangunan urusan Perhubungan antara lain ditunjukkan dengan 20 indikator sebagai berikut :

Tabel II.80
Indikator Kinerja Angkutan Kota Magelang tahun 2011-2015

No	Indikator	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	179.976	177.000	175.000	173.000	170.000
2.	Rasio ijin trayek	0.82	0.88	0.25	0.82	0.82
3.	Jumlah uji kir angkutan umum	2218	9937	10.721	2218	2218
4.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	30menit	10 menit	15 menit	15 menit	15 menit
5.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	36.000	36.000	40.300	40.300	40.300
6.	Rasio kepemilikan KIR angkutan umum	10%	10%	5%	5%	5%
7.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	1	1	1	1	1
8.	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta fasilitas Terminal tipe A dg kondisi yg baik di Kota Magelang	50%	75%	75%	80%	80%
9.	Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	50%	50%	70%	75%	75%
10.	Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte/Sub terminal yang ada di Kota Magelang	9	9	9	13	15
11.	Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type c) yang tertata	1	1	1	1	1

No	Indikator	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
12.	Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik	70%	80%	85%	85%	90%
13	Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum	60%	75%	80%	85%	95%

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang, 2011-2015

Jumlah arus penumpang angkutan umum yang dimaksud adalah jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah. Angka yang ditargetkan dalam RPJMD untuk tahun akhir 2015 perlu dikoreksi karena target tidak sesuai dengan realisasi selama 5 tahun berjalan disebabkan pada penyusunan target belum menggunakan pengertian sesuai dengan peraturan. Target yang ditetapkan menggunakan persepsi penumpang angkutan kota sementara yang dimaksudkan dalam SPM merupakan jumlah arus penumpang keluar masuk daerah.

Transportasi darat adalah sarana angkutan penumpang umum yang memegang peranan penting dalam menunjang aktifitas dan mobilitas masyarakat sehingga angkutan penumpang umum harus dipertahankan keberadaannya. Namun jumlah arus penumpang angkutan umum Kota Magelang dari tahun ke tahun mengalami penurunan dikarenakan semakin meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi yang didorong oleh kemudahan pribadi dalam mendapatkan kendaraan baru seperti kemudahan kredit dari perbankan dan lembaga lain. Angkutan umum yang kualitasnya tidak layak masih beroperasi. Kualitas moda angkutan umum yang semakin menurun juga menjadi salah satu faktor jumlah penumpang semakin berkurang.

Namun, Kota Magelang terus berupaya dalam mewujudkan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan angkutan umum. hal-hal yang dilakukan diantaranya melakukan pemeliharaan terminal, pembinaan angkutan umum, pengadaan seragam bagi sopir angkutan kota, memberikan tambahan moda taksi untuk pelayanan umum.. Hal ini tentu mendorong meningkatnya jumlah penumpang dan memberikan kenyamanan bagi penumpang angkutan umum.

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Realisasi indikator rasio ijin trayek sampai pada triwulan tiga tahun 2014 sudah memenuhi target yaitu 0,804% dari target pada tahun terakhir yaitu tahun 2015 sebesar 0,77%. Angka rasio ini diperoleh melalui perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, rasio ijin trayek mengalami penurunan dari 0,88% menjadi 0,76% lalu naik kembali pada tahun 2014 menjadi 0,804%. Hal ini dikarenakan ada pembatasan usia kendaraan dalam pemberian ijin trayek yang mengakibatkan jumlah kendaraan umum menurun. Seluruh angkutan umum yang ada di Kota Magelang memiliki ijin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan, dan pengendalian trayek angkutan umum.

Namun indikator Rasio ijin trayek sudah memenuhi angka yang ditargetkan untuk tahun akhir yaitu tahun 2015 (0,77%). Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai target adalah sudah tersedianya Peraturan Daerah tentang angkutan di Kota Magelang.

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum ang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum. Selain itu juga

untuk keseimbangan ekosistem lingkungan mengurangi polusi udara yang diakibatkan asap kendaraan agar udara Kota Magelang bersih dan sehat.

Melihat jumlah kendaraan yang melakukan uji kir, indikator ini sudah mencapai target karena angka realisasi sudah melebihi dari angka target kendaraan bermotor wajib uji. Lebihnya jumlah kendaraan yang melakukan uji kir di Kota Magelang salah satunya dikarenakan masih terdapat banyak kendaraan yang melakukan numpang uji.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari indikator ini adalah sudah adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Uji Kendaraan dan adanya Peraturan walikota tentang SOP pelaksanaan uji kendaraan juga adanya pembinaan Organda.. Permasalahan dalam melaksanakan indikator Jumlah uji kir angkutan umum diantaranya peralatan yang digunakan untuk uji kir sudah tua, terbatasnya tenaga uji kir, kurangnya penghargaan atau perhatian kepada tenaga kir melihat beban tanggung jawab yang diemban.

Target lama pengujian kelayakan angkutan umum adalah 30 menit. Realisasi pengujian kelayakan angkutan umum lamanya pada tahun 2014 adalah 15 menit. Semakin cepat waktu pengujian kelayakan angkutan umum semakin baik pelayanan.

Terminal merupakan titik dimana penumpang dan barang masuk atau keluar dari sistem jaringan transportasi. Terminal merupakan simpul utama dalam jaringan dimana sekumpulan rute secara keseluruhan bertemu. Terminal mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/ atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan umum. Berdasarkan kondisi fisik Kota Magelang, Kota Magelang tidak mempunyai pelabuhan laut dan udara. Namun Kota Magelang mempunyai 1 terminal bus.

Tabel II.81
Indikator Kinerja Lalu Lintas Kota Magelang tahun 2011-2015

No	Indikator	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tersedianya sarana prasarana lalu lintas jalan raya (APILL)	75%	75%	75%	80%	85%
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta fasilitas Terminal tipe A dg kondisi yg baik di Kota Magelang	50%	75%	75%	80%	80%
3.	Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	50%	50%	70%	75%	75%
4.	Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte/Sub terminal yang ada di Kota Magelang	9	9	9	13	15
5.	Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type c) yang tertata	1	1	1	1	1
6.	Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik	70%	80%	85%	85%	90%
7.	Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum	60%	75%	80%	85%	95%

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang, 2011-2015

Keamanan dan kenyamanan menjadi faktor penting dalam pengaturan lalu lintas dengan menggunakan APILL. Lampu pemberi sinyal diatur sedemikian rupa sehingga menjadi satu sistem yang dapat diandalkan untuk

mengatur laju arus lalu lintas simpang. Teknologi yang digunakan dalam pengaturan laju arus lalu lintas kemudian dilengkapi kembali dengan pemasangan countdown timer untuk lebih memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para pengguna jalan raya. Kelancaran dan keamanan mengemudi saat melintasi simpang sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang tersedia pada simpang tersebut.

Indikator tersedianya sarana prasarana lalu lintas jalan raya (APILL) semakin meningkat dari tahun 2011 sebesar 75 % dari ruas jalan di Kota Magelang , pada tahun 2015 menjadi sebesar 85 %. Penyediaan APPIL tersebut Tahun 2014 mulai ditingkatkan kualitasnya dengan pemanfaatan ATCS pada Simpang Menowo dan Kebonpolo, yang langsung dapat dikontrol di Ruang Kontrol Dishubkominfo Kota Magelang.

Terminal angkutan umum merupakan penyedia jasa angkutan umum yang berfungsi untuk dapat memberikan pelayanan kemudahan, kenyamanan, dan rasa aman kepada pengguna jasa angkutan umum di dalam perjalanan. Terminal merupakan salah satu fasilitas umum yang menunjang pergerakan manusia dan barang lain dari satu tempat ke tempat lain. Sebagai fasilitas umum, terminal harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Kondisi terminal Kota Magelang pada saat ini perlu dilakukan pembenahan baik dari kondisi fisik maupun non fisik seperti banyaknya kerusakan pada infrastruktur dan belum optimalnya pengoperasian pada layanan sirkulasi penumpang dan angkutan umum. Bangunan dari terminal maupun jalan di terminal mempengaruhi kelancaran operasinya terminal yang mengurangi kenyamanan bagi pengguna terminal.

Namun Kota Magelang saat ini sudah mempunyai DED untuk perbaikan terminal. Apabila DED terminal dapat terealisasi baik dengan menggunakan dana pemerintah secara efisien maka Kota Magelang mampu mempunyai terminal sesuai dengan standard. Namun pada saat ini sesuai dengan DED, terminal Kota Magelang masih mencapai 20% dari target RPJMD 80%. Masih banyak yang harus diperbaiki dari terminal Kota Magelang saat ini. Perlu dilakukan upaya peningkatan terminal melalui pengembangan fasilitas terminal sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan, kenyamanan, dan keamanan pengguna jasa angkutan umum.

Dengan pengembangan terminal diharapkan kedepannya Terminal Kota Magelang mampu mengatasi permasalahan pada terminal saat ini dan mampu memberikan fasilitas secara baik untuk penumpang maupun untuk moda transportasi tujuan dalam maupun luar kota. Dengan adanya UU No 23 Tahun 2014, Terminal Type A harus diserahkan ke pemerintah Provinsi, baik asset dan pengelolaannya.

Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan yang digunakan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi. Kota Magelang saat ini sudah tidak mempunyai terminal barang. Terminal barang tidak berfungsi karena sudah digunakan oleh pihak lain dan tidak lagi dimanfaatkan untuk terminal barang. Terminal barang di Kota Magelang digunakan oleh pihak Polisi untuk samsat dan posko patwal.

Terminal tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan. Jumlah sub terminal (terminal tipe C) di Kota Magelang adalah 2 buah, yaitu terminal Kebonpolo dan terminal Ikhlas. Sub terminal Kebonpolo tanahnya merupakan bukan milik pemerintah Kota Magelang dan Terminal Ikhlas saat ini digunakan sebagai parkir wisata Gunung Tidar. Sampai saat ini sudah disusun Studi Kelayakan terminal tipe C di Kota Magelang.

Parkir merupakan tempat untuk menyimpan kendaraan sementara dan fasilitas yang harus dimiliki. Penyediaan parkir seharusnya diupayakan sesuai dengan permintaan. Penyediaan parkir yang tidak memadai

dapat menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan lalu lintas, berkurangnya lebar efektif jalan. Masih terdapat pelanggaran parkir di Jalan Tidar, dan di Aloon-aloon sehingga capaian indikator Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik masih 90%, walaupun tiap tahun ada peningkatan. Pemerintah sudah melakukan beberapa upaya dalam menjaga ketertiban parkir di Kota Magelang. Sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Parkir dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang jasa umum, juga melakukan penataan dan pezonangan kawasan parkir.

Tempat pemberhentian angkutan umum seperti halte dan sub terminal merupakan hal yang penting dalam sebuah sistem transportasi. Halte sebagai tempat pemberhentian angkutan umum harus menjadi nyaman karena juga digunakan bagi penumpang untuk menunggu angkutan umum. Angkutan umum pada dasarnya hanya boleh berhenti di halte yang sudah disediakan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kemacetan. Angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat akan mengganggu kelancaran lalu lintas. Indikator ini telah ditetapkan dalam RPJMD, namun dalam perjalanan waktu indikator jumlah tempat-tempat pemberhentian angkutan umum tidak dilanjutkan. Hal ini dikarenakan penyesuaian indikator urusan perhubungan dengan SPM yang ditetapkan oleh kementerian perhubungan. Merujuk pada target yang ditetapkan pada RPJMD dan kondisi pada tahun 2014, jumlah tempat-tempat pemberhentian angkutan umum di Kota Magelang masih belum memenuhi target. Sarana tempat pemberhentian angkutan umum di Kota Magelang sampai pada tahun 2014 masih dikatakan belum memadai.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika meliputi penanganan Informatika dan Komunikasi. Kinerja pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika antara lain ditunjukkan dengan 10 indikator pada sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika sebagai berikut :

A. Informasi dan Komunikasi Publik

Dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Menurut UU KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pemerintah Kota Magelang dalam penyediaan informasi publik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibawah pengelolaan Dishubkominfo Kota Magelang. Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Kinerja Pelayanan sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.82
Indikator Kinerja Informasi dan Komunikasi Publik Kota Magelang tahun 2011-2015

No	Indikator	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah jaringan komunikasi operator dengan kondisi baik	8	8	8	8	8

No	Indikator	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
2.	Jumlah sarana penyedia informasi melalui media informasi	11	11	12	13	13
3.	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	7	10	13	14	17
4.	Rasio Wartel/warnet terhadap penduduk	0.01%	0.065%	0.045%	0.069%	0.059%
5.	Tersedianya / Jumlah Hot pot pada ruang terbuka publik di Kota Magelang	1	4	8	4	5

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang, 2011-2015

Operator jaringan komunikasi yang secara nasional atau terdapat di Indonesia sudah ada di Kota Magelang dalam kondisi baik. Target jumlah jaringan operator berdasarkan RPJMD adalah 15 buah, namun secara nasional sampai saat ini di Indonesia hanya terdapat 9 jaringan operator yang semuanya ada di Kota Magelang. Sehingga tidak mungkin mencapai 15 buah di Kota Magelang.

Media informasi yang terdapat di Kota Magelang sudah memenuhi target RPJMD sejumlah 13 buah. Tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan indikator tersebut dalam penyediaan informasi melalui media informasi.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Kota Magelang mempunyai target pada tahun 2015 terdapat KIM di setiap kelurahan yaitu sejumlah 17 KIM. SPM menargetkan bahwa KIM adalah sejumlah kecamatan di Kabupaten/Kota. Dari 17 kelurahan yang ditargetkan oleh Kota Magelang, pada triwulan tiga tahun 2014 sudah mencapai 13 buah KIM. Dari target yang ditetapkan masih terdapat 4 kelurahan yang belum mempunyai KIM.

PD sudah sering melaksanakan sosialisasi dan edaran kepada 4 kelurahan yang belum mempunyai KIM. Pengetahuan masyarakat tentang KIM, manfaat KIM masih terbatas sehingga masih belum merasa perlu untuk membentuk KIM. Selain itu, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tidak mempunyai legalitas sehingga tidak bisa menerima biaya dari pemerintah yang bisa digunakan sebagai stimulan. KIM sangat bagus apabila dijalankan dengan baik di masyarakat karena KIM sangat membantu dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang komunikasi dan informasi. Terlalu banyak kelompok masyarakat sehingga KIM masih dipandang tidak perlu oleh masyarakat. Namun ada juga kelurahan yang memiliki KIM lebih dari satu kelompok yaitu Kelurahan Kramat yang mempunyai 7 KIM.

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk di Kota Magelang dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan semakin menjauhi angka target yaitu 0,059%. Pada tahun 2013 realisasi dari rasio wartel/warnet terhadap penduduk di Kota Magelang mencapai 0,045% yang sebelumnya pada tahun 2012 mencapai 0,07%.

Hal ini mungkin sudah tidak dipertanyakan lagi seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi semakin hari semakin cepat. Di era teknologi sekarang ini mempunyai telepon genggam bukan hal yang mewah. Hampir setiap orang sekarang ini memiliki telepon genggam pribadi dari orang tua bahkan sampai anak-anak. Semakin hari teknologi telepon genggam juga semakin canggih.

Faktor di atas yang mempengaruhi rasio wartel/warnet terhadap penduduk di Kota Magelang mengalami penurunan dan tidak mencapai target. Telepon genggam yang ada pada era sekarang sudah memiliki kegunaan

internet. Akses masyarakat Kota Magelang dalam menggunakan telepon dan internet sudah semakin mudah dan sudah di genggaman sehingga tidak banyak memerlukan jasa sewa telepon dan internet.

Saat ini di Kota Magelang sudah terdapat 6 titik hot spot yang terpasang ruang terbuka public di Kota Magelang diantaranya di Aloon-aloon Magelang dan Taman Kuliner Sejuta Bunga. Jumlah hot spot yang terpasang di Kota Magelang sudah melebihi target tahun 2015 yaitu 5 titik hot spot. Namun masih terdapat beberapa ruang publik di Kota Magelang yang juga perlu disediakan hot spot yaitu seperti di taman badaan dan terminal.

B. Aplikasi Informatika

Kota Magelang meraih predikat sebagai Kota Cerdas dalam penghargaan Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015, dan meraih dua kategori penghargaan. Dua penghargaan tersebut yang pertama yakni menjadi peringkat pertama Kota Cerdas kategori kota berpenduduk 200.000 jiwa atau kurang, dan Kota Cerdas Ekonomi. Pengukuran Smart City tidak hanya pada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saja, tetapi ada manusia, dan tata kelola.

Ada 5 (lima) Indikator kinerja yang menggambarkan kinerja sub Informatika pada Urusan Komunikasi dan Informatika sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.83
Indikator Kinerja Aplikasi Informatika Kota Magelang tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Realisasi Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penerapan e-Procurement (LPSE)	30%	75%	100%	90%	100%
2.	Jumlah PD yang menggunakan Sistem Informasi.	18	25	30	46	46
3.	Jumlah PD yang memiliki website.	8	8	21	46	46
4.	WAN (Wide Area Network) setiap PD	13%	25%	50%	60%	75%
5.	Penggunaan software legal/ OSS	20%	40%	100%	19.92%	19.92%

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang, 2011-2015

Kemajuan dan potensi pemanfaatan teknologi kounikasi dan informasi (TIK) member peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat. Pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (e-Government) dan layanan publik akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas.

e-Procurement adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi digunakan untuk melakukan pengolahan data pengadaan hingga ke proses pembuatan laporan. E-procurement merupakan istilah umum diterapkan pada penggunaan sistem yang terintegrasi antara database dengan area yang luas (biasanya berbasis web) jaringan sistem komunikasi disebagian atau seluruh proses pembelian. Proses pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan awal dan spesifikasi oleh pengguna, melalui pencarian, sumber dan tahap negosiasi kontrak, pemesanan dan termasuk mekanisme yang meregistrasi penerimaan, pembayaran dan sebagai pendukung evaluasi pasca pengadaan. Dalam kegiatan publik baik di dalam pemerintahan maupun perusahaan (usaha swasta) selalu diperlukan barang/jasa untuk keperluan

operasional yang bersifat rutin seperti bahan baku, bahan penolong (supplies), suku cadang, barang jadi, dan barang modal (kapital) seperti bangunan, mesin dan peralatan lainnya.

Tiap tahun penerapan e-Procurement di Kota Magelang selalu meningkat dan di Tahun 2015 sudah mampu mencapai 100% dalam indikator ini sesuai dengan target RPJMD, hal ini di artikan bahwa efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan sudah terpenuhi . Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah yang perlu menjadi pertimbangan demi pelaksanaan di tahun-tahun selanjutnya yang lebih baik. Sampai pada saat ini Kota Magelang belum mempunyai lembaga sendiri dalam pelaksanaan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini. Selain itu, LPSE belum mempunyai gedung sendiri. Saat ini LPSE masih mengindung di gedung kantor Bappeda Kota Magelang. Tentu akan lebih efektif apabila LPSE memiliki gedung sendiri. Apalagi saat ini LPSE belum mempunyai data center sesuai standart. Data center LPSE Kota Magelang masih mengindung di Yogyakarta yang mempegaruhi kecepatan upload data. Namun Kota Magelang sudah membentuk tim LPSE adhoc.

Pada saat ini seluruh PD atau sejumlah 46 PD di Pemerintah Kota Magelang sudah mempunyai sistem informasi. Sesuai dengan target RPJMD bahwa setiap PD memiliki sistem informasi. Namun masih banyak keterbatasan dari sistem informasi yang dimiliki PD. Harapannya sistem informasi yang dimiliki seluruh PD dapat terintegrasi dengan baik. Namun hal ini sulit untuk dilakukan karena Kota Magelang belum mempunyai standart data yang digunakan dalam bahasa pemrograman. Standart data yang digunakan setiap PD masih berbeda-beda sehingga sulit untuk menjadikan terintegrasi (*inter operabilitas*). Kota Magelang sudah mempunyai *blue print* untuk sistem informasi, namun belum detail sampai pada aplikasi, masih pada infrastruktur.

Beberapa Sistem Informasi yang tersedia di Pemerintah Kota Magelang:

- SIMDA (Sistem Informasi Daerah) untuk pengelolaan Keuangan di DPPKD
- SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah), SIG Perumahan dan SIG Jalan dan Jembatan di Bappeda;
- E-ASPIRATION untuk mendapatkan masukan dan aspirasi masyarakat
- SIMPUS dan SIMPUSTU, SIMBAT serta SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu) di Dinas Kesehatan
- SIG PENDIDIKAN; dan SIM TERPADU Dinas Pendidikan;
- PERPUSTAKAAN ON-LINE (Kantor Arsip dan Perpustakaan);
- Sistem Informasi Kepegawaian (BKD);
- Sistem Informasi Kependudukan (DISPENDUKCAPIL);
- Sistem Informasi Angkutan (DISHUBKOMINFO);

Dari 46 PD di Pemerintah Kota Magelang, terdapat 22 PD yang sudah memiliki website. Namun website masih sebatas dimiliki oleh PD dan pada perjalannya tidak dikelola dengan baik. Perhatian PD dalam membuat website masih kurang sehingga masih terdapat banyak PD yang belum memiliki website. Hal ini dipengaruhi oleh SDM yang terbatas untuk membuat sampai mengelola website. Diperlukan tenaga tersendiri yang bertugas dalam mengelola website termasuk mengisi web dengan informasi-informasi baru. Sangat dimudahkan bagi PD dalam membuat website karena sudah disediakan sub domain bagi PD.

Wide Area Network adalah sebuah jaringan yang sangat luas yang dimanfaatkan untuk menghubungkan jaringan local yang satu dengan jaringan local yang lain. Jaringan WAN memang sulit dan rumit dan membutuhkan

biaya yang mahal, apalagi dengan dirubahnya jaringan dari Wireless ke teknologi baru Fiber Optic, hal ini diharapkan koneksi akan lebih cepat dan meminimalkan gangguan koneksi.

Kota Magelang pada saat ini masih jauh di bawah target dalam mencapai indikator WAN untuk setiap PD kondisi Tahun 2015 masih 75 % dari 46 PD terhubung WAN Kota. Tahun 2015 baru membangun jaringan Back Bound dengan Fiber Optic .

Dengan sedang disusunnya Grand Design pengembangan telematika diharapkan rencana pemanfaatan teknologi informasi di Kota Magelang kedepan bisa menopang kebutuhan sarana prasarana Kota Magelang sebagai Smart City.

Pada saat ini Pemerintah Kota Magelang masih belum mencapai target untuk penggunaan software legal/OSS di setiap PD sampai 100%. Hal ini dikarenakan dibutuhkannya anggaran yang sangat besar untuk membeli seluruh perangkat untuk perkantoran secara legal. Masih terdapat banyak aplikasi ilegal yang digunakan di PD. Namun himbuan untuk menggunakan aplikasi legal sudah sering dilakukan dengan memberikan surat edaran. Dan hal ini juga dipengaruhi oleh belum familiarnya open source untuk perkantoran di Pemerintah Kota Magelang

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dewasa ini menjadi primadona dalam pertumbuhan ekonomi karena fleksibilitasnya dan karena kekuatannya yang telah teruji dalam goncangan krisis ekonomi pada dasawarsa lalu. Kontribusinya yang sangat signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah pun diakui. Bagi Kota Magelang yang merupakan kota jasa dengan sumber daya alam yang sangat terbatas, UMKM sangat mendukung pembentukan PDRB melalui upaya penambahan nilai (*value added*) pada setiap produknya. Perannya tak hanya sebatas itu, Koperasi dan UMKM terbukti mampu menyerap banyak tenaga kerja yang berujung pula pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Melaksanakan RPJMD 2011 – 2015 Kota Magelang, telah banyak upaya dilakukan dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kota Magelang dengan trend perkembangan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.84
Persentase Koperasi Aktif di Kota Magelang
Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Koperasi aktif	170	177	183	192	202
2	Jumlah Koperasi tidak aktif (unit)	47	28	15	15	15
3	Jumlah koperasi	217	205	198	207	217
4	Persentase koperasiaktif (%)	78,34	86,34	92	92,75	93,09

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2016

Kondisi koperasi di Kota Magelang sempat memprihatinkan. Jumlahnya sempat menurun di tahun 2012 hingga 2014 dan kembali ke jumlah semula di tahun 2015. Meski demikian, tren prosentase koperasi aktif semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan upaya keras dinas terkait dalam mendorong terbentuknya

koperasi dan membantu koperasi agar menjadi kuat baik dari segi kelembagaan, jenis usaha, maupun pengelolaan keuangan.

Tabel II.85
Perkembangan Jumlah Koperasi dan Anggota Koperasi Kota Magelang Tahun 2011-2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Total Koperasi	217	205	198	207	217
Jml perkembangan asset koperasi (dalam ribu)	211.279.272	239.249.597	263.078.598	296.814.190	398.087.333
Jml Anggota Laki-Laki	22.134	22.478	22.019	23.022	24.068
Jml Anggota Perempuan	12.285	14.443	15.476	15.781	16.905

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2016

Kehidupan berkoperasi di Kota Magelang meski secara umum mengalami pasang surut namun beberapa koperasi dapat bertahan dan berkembang. Hal tersebut ditunjukkan dari bertambahnya jumlah anggota koperasi dan meningkatnya asset yang dimiliki secara agregat, walaupun jumlah koperasi sempat mengalami penurunan di tahun 2012 hingga 2014. Koperasi memang semakin mempunyai banyak tantangan di era globalisasi ini.

Tabel II.86
Perkembangan Jumlah UMKM di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah UMKM	NA	NA	NA	NA	5.012
Jumlah Kelompok UMKM	-	7	15	40	43
Jumlah Anggota	-	148	271	602	646

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2016

Pemerintah Kota Magelang hingga saat ini masih melakukan pendataan jumlah UMKM. Kota Magelang sebagai kota jasa, merupakan lahan memungkinkan bagi pengembangan UMKM. Gejalanya sangat nyata dalam tabel di atas, dimana jumlah anggota UMKM yang masuk dalam kelompok UMKM meningkat tajam dari 271 di tahun 2013 menjadi 602 di tahun 2014. Tren ini menunjukkan bahwa kelompok UMKM Kota Magelang mampu memberikan manfaat, sehingga menarik minat untuk bergabung.

Untuk memfasilitasi koperasi dan UMKM dalam kemudahan perolehan permodalan maka pada tahun 2015 Pemerintah Kota Magelang telah menandatangani MOU dengan Bank Jateng. Kerja sama dalam bentuk program KUP untuk membantu akses permodalan bagi Koperasi dan UMKM dengan persyaratan ringan dan bunga pinjaman yang ramah yang diharapkan dapat mengatasi masalah permodalan para pelaku ekonomi kecil. Capaian indikator-indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang lain dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.87
Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kerja sama PES (Payment for Ecological/ environment Services = imbal jasa lingkungan)	0	0	0	0	3
2	Jumlah bidang usaha Sektor riil yang berkembang	1036	1100	3750	3093	1400
3	Jumlah pelaku usaha ekonomi kerakyatan menerima akses permodalan	140	900	898	900	1300
4	Jumlah UMKMK yang sudah memanfaatkan teknologi dan terpenuhi sarana prasarana	86	175	200	250	350
5	Jumlah UMKMK, Jumlah UKM non BPR/LKM UKM, Usaha mikro dan kecil	240	800	900	2886	950
6	Jumlah UMKMK yang memanfaatkan kredit	132	350	508	797	400
7	Persentase UMKMK yang produktif	30%	40%	55	60%	75%
8	Jumlah koperasi	217	205	198	207	217

Sumber : RKPD Kota Magelang, 2012-2016

2.3.2.12 Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu variabel penting dalam menghitung pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kehadiran investor baik internasional maupun domestik sangat diperlukan dalam pembentukan modal daerah. Penyerapan tenaga kerja, peningkatan output, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa, merupakan *multiplier effect* dari kegiatan investasi di suatu daerah. Perkembangan investasi di Kota Magelang 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015) adalah sebagai berikut.

Tabel II.88
Perkembangan Jumlah Investasi di Kota Magelang (2011-2015)

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Investasi PMDN (Juta Rp)	308.151	388.950	419.248	464.317	534.992
2	Jumlah Investasi PMA (Juta Rp)	24.242	20.758	193.821	193.821	193.821
	Total Investasi	332.393	409.708	613.069	658.138	728.813
3	Jumlah Perusahaan PMDN	317	464	615	821	980
4	Jumlah Perusahaan PMA	2	2	3	3	3
	Total Perusahaan	319	466	618	824	983

Sumber : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang, 2011-2015 (diolah)

Meski luas wilayah sangat kecil dan sumber daya alam sangat terbatas, tidak dipungkiri Kota Magelang merupakan destinasi yang sangat menarik para investor. Selain letaknya yang sangat strategis, luasan yang sangat sempit justru memberi kemudahan bagi Kota Magelang dalam mengelola dan mengolah potensi kota. Hal inilah yang membuat investor semakin tertarik berinvestasi di Kota Magelang.

Trend investasi di Kota Magelang menunjukkan angka yang menggembirakan. Nilai investasi yang meningkat tajam hingga lebih dari 100% dalam kurun waktu 5 tahun membawa dampak yang sangat signifikan

terhadap Kota Magelang terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal.

Tabel.89
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA/PMDN	900	1.119	1.825	2.593	3.526
Jumlah seluruh PMA/PMDN	319	466	618	824	983
Rasio daya serap tenaga kerja	2,82	2,40	2,95	3,15	3,59

Sumber : Kantor PM Kota Magelang, 2011-2015

Tabel di atas menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun jumlah investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Penyerapan tenaga kerja juga meningkat seiring dengan peningkatan rasio daya serap tenaga kerja. Bisa disimpulkan investasi yang ada di kota Magelang dari PMA dan PMDN produktif karena setiap penambahan investasi selalu diikuti dengan penambahan penyerapan tenaga kerja.

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda sebagai bagian dari penduduk yang merupakan aset pembangunan, memerlukan langkah-langkah pendukung dalam pengembangannya. Salah satu upaya pengembangan minat dan bakat pemuda adalah dengan menumbuhkembangkan budaya olahraga. Namun demikian, fasilitas yang ada masih belum optimal karena masih menyewa dan memanfaatkan fasilitas sosial. Keterbatasan fasilitas akan sangat berpengaruh pada kualitas pencapaian prestasi atlet. Dengan kondisi ini sangat mungkin atlet akan mencari tempat lain yang lebih mampu mengembangkan bakat sang atlet. Apalagi ditambah dengan kurangnya jaminan hari depan bagi atlet yang berprestasi.

Organisasi pemuda yang berkembang selama periode 2011-2015 relatif stagnan, hanya bertambah 3 buah pada tahun 2012, dari 28 pada tahun 2011 menjadi 31 pada tahun 2012 dan stagnan sampai tahun 2015. Lembaga kepemudaan yang hidup dan berkembang di Kota Magelang antara lain: (a) KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia; (b) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda; (c) Lembaga Sosial Pemuda, Lembaga kepemudaan yang umumnya berbentuk Yayasan; (d) Organisasi Pemuda Partai Politik; (e) Organisasi Kemahasiswaan; (f) Praja Muda Karana (Pramuka); (g) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SLTA; (h) Karang Taruna; (i) Organisasi Pemuda Kedaerahan; (j) Lembaga Pemuda Profesi; (k) Perkumpulan Pemuda di bidang Seni; (l) Klub Ilmuwan Muda; dan (m) Lembaga Pemuda Pencinta Alam.



Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang, 2011-2015

Gambar. 2.38
Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Di bidang olahraga, jumlah organisasi olahraga di Kota Magelang selama 2011-2015 relatif konstan, hanya bertambah 1 buah dari sebanyak 30 buah pada tahun 2011 menjadi 31 buah pada tahun 2015. Walaupun jumlah organisasi olahraga relatif konstan, namun jumlah klub olahraga di Kota Magelang dalam kurun waktu 2011-2015 menunjukkan peningkatan yang cukup baik dari 121 buah pada tahun 2011 menjadi 164 buah pada tahun 2015, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.90
Kondisi Olah Raga Kota Magelang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah organisasi olahraga	30	30	30	31	31
2	Jumlah Klub Olahraga	121	113	113	169	164

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang, 2011-2015

2.3.2.14 Statistik

Data statistik menjadi kian vital perannya dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah. Untuk keperluan analisis dan baseline untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maka eksistensi data ini menjadi mutlak diperlukan. Validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor menjadi entitas lain yang harus dipenuhi mendampingi ketersediaan data (data availability). Sejak tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 antara lain peran statistik nampak pada tersusunnya Daerah Dalam Angka Tahun 2011 -2015; dan Buku PDRB Tahun 2011 – 2015.

Sejak beberapa tahun terakhir penyediaan data statistik Kota Magelang juga dilakukan melalui situs www.data.go.magelangkota.go.id. Cakupan penyediaan data makro melalui dataGO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.91
Cakupan Penyediaan Data Makro dalam DataGO Kota Magelang

Indikator	Data Dukung				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah data makro terupdate tiap tahun pada DataGO	77	78	135	150	160
Jumlah data makro yang seharusnya terupdate tiap tahun pada DataGO	175	175	175	175	175

%	44	44,57	77,14	85,71	91,43
---	----	-------	-------	-------	-------

Sumber: Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang, 2016

2.3.2.15 Persandian

Selama periode 2011-2015 urusan persandian terintegrasi dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Namun terbitnya UU NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini merupakan bentuk evaluasi dalam pelaksanaan otonomi daerah selama ini. Di satu sisi otonomi daerah adalah hal positif bagi daerah yang memberi kewenangan yang lebih besar bagi daerah untuk mengatur sendiri pembangunan wilayahnya namun tidak sedikit pula masalah dan kendala yang muncul sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dirasakan dengan merata. Sehingga ke depan diharapkan dengan berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 ini terwujud harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah yang saling bersinergi dan akan tercapai cita – cita otonomi daerah untuk lebih mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Terkait dengan bidang Persandian, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam pengaturannya secara jelas diamanatkan bahwa instansi pusat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan teknis kepada pemerintah provinsi, selanjutnya pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bawahnya. Selama ini di tingkat pusat, Lembaga Sandi Negara sebagai instansi pemerintah yang bertugas di bidang persandian, selama ini sudah secara aktif melakukan pembinaan persandian di lingkup nasional baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Hasil evaluasi urusan ini pada tahun 2011-2015 menunjukkan capaian sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel II.92
Capaian Kinerja Urusan Persandian Kota Magelang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Tingkat ketersediaan SOP persandian	50%	50%	50%	50%	50%
2	Tingkat Kapasitas SDM Persandian	40%	40%	40%	40%	60%
3	Persentase PD yang mengimplementasikan SOP Persandian	20%	20%	25%	25%	30%

Sumber: Bagian Humas, Persandian dan Telekomunikasi Sekretariat Daerah Kota Magelang, 2011-2015

Tabel di atas mengkonfirmasi bahwa pada tingkat ketersediaan SOP Persandian masih memenuhi kondisi ideal. Saat ini SOP persandian masih berada pada level 50 %, mengacu pada SOP yang diterbitkan oleh Lembaga Sandi Negara. Menilik dinamika lokalitas yang dimiliki Kota Magelang, maka masih diperlukan SOP Persandian yang mengatur kinerja secara maksimal pada urusan ini. Hal ini harus menjadi fokus untuk dapat dipenuhi melalui penyusunan dan implementasi dokumen SOP yang komprehensif pada periode mendatang.

Untuk tingkat Kapasitas SDM persandian, progress sejak tahun 2011 hingga 2015 terdapat progress pada akhir tahun 2015. Secara ideal kapasitas SDM yang dimiliki adalah 5 orang tenaga sandi yang bersertifikat, namun hingga tahun 2015 baru 3 tenaga sandi yang bersertifikat (60%). Mendasarkan pada situasi ini Pemerintah Kota Magelang harus berupaya tetap menjaga dan meningkatkan kapasitas SDM terkait persandian agar dapat melaksanakan urusan persandian yang berdiri sendiri sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.

Sedangkan persentase PD yang menimplementasikan SOP persandian meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Pada tahun 2011 baru 20% PD yang mengimplementasikan SOP persandian. Kondisi ini berangsur meningkat hingga tahun 2015 persentasenya mencapai 30 %. Oleh karena itu dalam lima tahun mendatang perlu upaya agar penerapan SOP dapat mencapai 100%.

2.3.2.16 Kebudayaan

Kebudayaan adalah upaya manusia meningkatkan harkat dan jati diri di dalam kehidupan melalui perwujudan cipta, karsa dan karyanya. Tercermin melalui arsitektur, busana, boga, bahasa, adat istiadat, seni dan sebagainya. Jika ditilik dari sejarah dan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, maka nilai-nilai luhur yang menjadi corak budaya masyarakat Kota Magelang adalah religius-spiritualis dan nasionalisme. Dua nilai ini setidaknya dapat ditarik dari sejarah Borobudur, cerita raja Dyah Belitung, kisah Bukit Tidar dan tokoh sakti baik dalam versi pewayangan maupun versi Islam, serta sejarah Diponegoro hingga perkembangan Kota Magelang yang terkenal sebagai Kota Militer.

Tabel II.93
Aktifitas Seni dan Budaya Kota Magelang 2011-2015

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	18 Kali	18 Kali	21 Kali	22 Kali	15 Kali
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	8 Buah	8 Buah	8 Buah	8 Buah	9 Buah
3	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	36	36	36	35	35

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang 2011-2015, diolah

Dari tabel di atas terlihat penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Magelang dari tahun 2011 – 2015 fluktuatif. Pada tahun 2011 hingga 2012 capaian indikator ini adalah 18 kali, kemudian meningkat menjadi 21 kali pada tahun 2013 dan meningkat lagi menjadi 22 kali pada tahun 2014, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 15. Seni dan budaya yang diselenggarakan meliputi kegiatan tingkat nasional, provinsi maupun pentas rutin untuk tingkat Kota Magelang dengan menampilkan kelompok kesenian tradisional dari masing-masing kelurahan secara bergiliran.

Dalam upaya untuk memfasilitasi kegiatan seni dan budaya, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya cenderung stagnan dan hanya bertambah 1 buah dari tahun 2011 sebanyak 8 menjadi 9 buah pada tahun 2015. Kesembilan tempat yang dapat menjadi sarana bagi penyelenggaraan seni dan budaya yaitu:

- 1) Panggung Pentas di Aloon-aloon Kota Magelang;
- 2) Gedung Wanita;
- 3) Lantai II Gedung Bumi Kyai Sepanjang;
- 4) Samping barat Gedung Bumi Kyai Sepanjang;
- 5) Gedung Wiworo Wiji Pinilih;
- 6) Karesidenan Kedu;
- 7) Komplek Mudalrejo;

- 8) Taman Kyai Langgeng.
- 9) Mantyasih

Ditinjau dari indikator benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan oleh Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2014 berkurang 1 buah karena terjadinya musibah kebakaran pada Klenteng Liong Hok Bio sehingga jumlah keseluruhan dari 36 (tiga puluh enam) pada tahun 2011 menjadi 35 (tiga puluh lima). Sebagian besar Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Magelang merupakan peninggalan kolonial Belanda, sedangkan 1 situs yang merupakan peninggalan Hindu Mataram yaitu Mantyasih saat ini belum ditetapkan sebagai situs/ kawasan Cagar Budaya.

Tabel II.94
Daftar Benda Cagar Budaya Kota Magelang

NO	NAMA	ALAMAT	KET.	MASA
1	Pasturan St. Antonius	Jl. Laksda Yos Sudarso	Gedung	Kolonial
2	Gereja St. Antonius	Jl. Laksda Yos Sudarso	Gereja	Kolonial
3	GPIB	Jl. Aloon-aloon Utara 4	Gereja	Kolonial
4	GKJ Magelang	Jl. Tentara Pelajar 106	Gereja	Kolonial
5	SMK Wiyasa	Jl. Tidar 36	Gedung	Kolonial
6	SM P N 1	Jl. Pahlawan 66	Gedung	Kolonial
7	Kompleks eks karesidenan Kedu	Jl. Diponegoro 1	Gedung	Kolonial
8	Kantor Koordinator Pembangunan Wil II Jateng	Jl. Diponegoro 1	Gedung	Kolonial
9	Kantor Catatan Sipil	Jl. Laksda Yos Sudarso 31 C	Gedung	Kolonial
10	Kantor Pekerjaan Umum	Jl. Laksda Yos Sudarso 31 C	Gedung	Kolonial
11	Kantor Transmigrasi	Jl. Laksda Yos Sudarso 31 C	Gedung	Kolonial
12	Eks Kantor Penerangan Pertanian	Jl. Kartini 2	Gedung	Kolonial
13	Eks Bangunan Asuransi Bumi Putera 1912	Jl. Tentara Pelajar	Gedung	Kolonial
14	Polresta Magelang	Jl. Aloon-aloon selatan	Gedung	Kolonial
15	Sekolah Calon Bintara (Secaba)	Jl. Pahlawan	Gedung	Kolonial
16	Kesatrian Diponegoro	Jl. Ksatrian Lor	Gedung	Kolonial
17	Pondok Sriti	Jl. Ksatrian Wetan	Gedung	Kolonial
18	Kodim Magelang	Jl. RS Tentara	Gedung	Kolonial
19	Polwil Kedu	Jl. A. Yani	Gedung	Kolonial
20	RSJ Prof.Dr. Soerojo	Jl. A. Yani 169	Gedung	Kolonial
21	Kompleks RSUD Tidar	Jl. Tidar	Gedung	Kolonial
22	Bangunan Unit Gawat Darurat	Jl. Tidar	Gedung	Kolonial
23	Rumah Sakit Tentara	Jl. RS Tentara	Gedung	Kolonial
24	Mess tentara	Jl. Teuku Umar	Gedung	Kolonial
25	Gedung Bunder	Jl. Sriwijaya	Gedung	Kolonial
26	Rumah tinggal	Jl. Tentara Pelajar	Gedung	Kolonial
27	Rumah tinggal C 6	Jl. Ade Irma Suryani	Gedung	Kolonial
28	Bangunan rumah tinggal kompleks Kwarasan	Cacaban, Magelang Tengah	Gedung	Kolonial
29	Menara air minum	Jl. Aloon-aloon	Gedung	Kolonial
30	Plengkung	Jl. Ahmad Yani	Gedung	Kolonial
31	Museum Jend. Sudirman	Jl. Ade Irma Suryani C 7	Gedung	Kolonial
32	Wisma Diponegoro	Jl. A. Yani	Gedung	Kolonial

NO	NAMA	ALAMAT	KET.	MASA
33	Laboratorium Klinik Prima	Jl. A. Yani 17	Gedung	Kolonial
34	Gerbang Kerkoff	Jl. Ikhlas	Gedung	Kolonial
35	Ek stasiun Kebonpolo	Jl. Kebonpolo	Gedung	Kolonial

Sumber: Disporabudpar Kota Magelang, 2015

2.3.2.17 Perpustakaan

Perkembangan perpustakaan umum daerah yang memiliki peran strategis sebagai pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di Kota Magelang sangat pesat terutama setelah menempati gedung baru, dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai mampu menarik minat baca masyarakat agar mau berkunjung dan membaca di perpustakaan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pengunjung perpustakaan yang pada tahun 2014/5 telah mencapai 92.021 orang.

Tabel II.95
Hasil Kinerja Urusan Perpustakaan
Pemerintah Kota Magelang Periode 2011-2015

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengunjung perpustakaan	52.154	90.274	80.929	91.959	92.021
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	34.561	37.039	39.875	41.476	44.136

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Magelang, tahun 2011-2015

Perpustakaan umum di Kota Magelang pada tahun 2016 sebanyak 1 (satu) unit. Jumlah perpustakaan kelurahan sebanyak 17 (tujuh belas) unit, dan taman bacaan masyarakat sebanyak 8 (delapan) unit dan perpustakaan masjid sebanyak 14 (empat belas) unit. Jumlah perpustakaan SD/MI sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit, SLTP/MTs sebanyak 22 (dua puluh dua) unit dan SLTA/SMK/MA sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit. Layanan perpustakaan keliling sebanyak 4 (empat) unit yang tersebar di 3 kecamatan di Kota Magelang. Angka ini menunjukkan bahwa layanan perpustakaan di Kota Magelang sudah menjangkau dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat.

Perpustakaan keliling yang telah ada kini sudah mencapai 42 titik, diharapkan akan lebih dapat menjangkau masyarakat yang belum mempunyai kesempatan untuk berkunjung ke Perpustakaan Umum Daerah. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kota Magelang telah mencapai 44.316 buku, melampaui target RPJMD 2011-2015 sejumlah 39.500 buku.

2.3.2.18 Kearsipan

Salah satu unsur penting dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik guna mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah melalui pemngelolaan kearsipan secara baik dan efisien. Hal ini mengingat bahwa arsip sebagai sumber informasi otentik khususnya terkait dengan bukti kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Kinerja kearsipan ini terwakili oleh indikator Penerapan pengelolaan arsip baku dan Peningkatan SDM Pengelolaan Arsip baku sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.96
Penerapan Pengelolaan Arsip Baku Kota Magelang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah PD yang telah menerapkan pengelolaan Arsip baku	46	46	46	46	46
2	Jumlah PD	46	46	46	46	46
3	Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Magelang, 2015

Penerapan pengelolaan arsip pada seluruh PD di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang mulai tahun 2011 sampai dengan saat ini secara umum telah dilaksanakan secara baku sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan SDM di masing-masing PD dalam mengelola arsip. Untuk terus meningkatkan kemampuan SDM ini telah kegiatan pelatihan orientasi arsip dinamis secara rutin setiap tahun.

2.3.3 Fokus Urusan Pelayanan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah (ada 8 urusan pilihan), yaitu bidang urusan: (i) Kelautan dan perikanan, (ii) pariwisata, (iii) Pertanian, (iv) Kehutanan, (v) Energi dan Sumber Daya Mineral, (vi) Perdagangan, (vii) Perindustrian, dan (viii) Ketransmigrasian. Gambaran dari masing-masing penjelasan urusan pilihan tersebut adalah sebagai berikut:

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Kota Magelang merupakan daerah kecil dengan sumber daya alam yang sangat terbatas, namun pembangunan sektor perikanan hingga saat ini masih tetap eksis. Infrastruktur yang telah dimiliki oleh perikanan Kota Magelang, yaitu:

- a. Balai benih ikan di Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara;
- b. Balai benih udang di Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan;
- c. Sentra pemasaran ikan hias dan ikan konsumsi di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan;
- d. Sentra pengolahan ikan di Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan.

Kemudian, jumlah pembudidaya ikan di Kota Magelang adalah sebanyak 179 orang. Kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang telah memenuhi standar kelembagaan sejumlah 22 kelompok. Kelompok pengolah dan pemasar (poklahar) sejumlah 4 kelompok. Selain itu, sejak tanggal 23 september 2012 sudah terbentuk masyarakat perikanan Kota Magelang (MPKM) di Kota Magelang. MPKM merupakan wadah pelaku utama perikanan yang menaungi pokdakan dan poklahar se Kota Magelang.

Tabel II.97
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Magelang Tahun 2011-2015

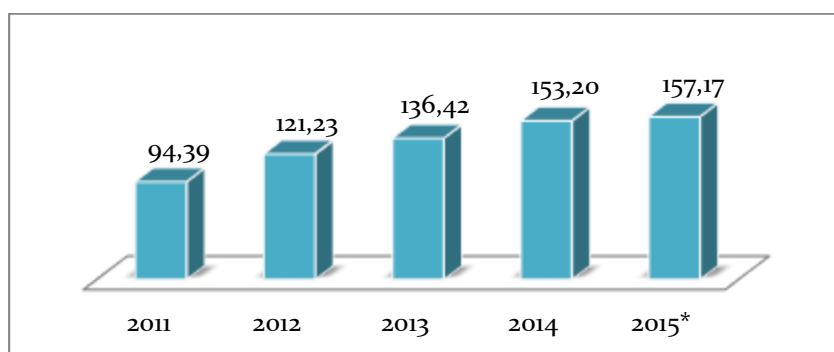
NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio petani terlatih:					
	- Perikanan	90%	70%	80%	90%	90%
2	Penguatan kelembagaan petani:					
	- Perikanan	17 Kelompok	17 Kelompok	17 Kelompok	12 Kelompok	17 Kelompok
3	Jumlah tempat pengolahan pasca panen:					
	- Perikanan	3	3	3	3	3
4	Produksi perikanan kelompok tani (ton/ha)	94,39	121,23	136,42	153,2	157,17*

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Magelang, 2011-2015

Keterangan: * Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel diatas menunjukkan bahwa, dari seluruh indikator RPJMD urusan kelautan dan perikanan, hanya indikator produksi perikanan kelompok tani yang belum mencapai target tahun 2011 hingga 2015. Hal ini disebabkan karena terbatasnya lahan yang akan digunakan untuk budidaya perikanan di Kota Magelang. Namun demikian, angka produksi ikan selama tahun 2011 hingga 2015 terus meningkat, sebagaimana tersaji pada gambar berikut ini:



Sumber: 1. Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Magelang, 2011-2015

Keterangan: * Angka Sementara

Gambar 2.39
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton/ha) Kota Magelang Tahun 2011-2015

Gambar di atas menunjukkan bahwa, dari tahun 2011 hingga 2015 produksi perikanan di Kota Magelang telah meningkat sebesar 66,51 %, dengan kisaran pertumbuhan antara 2,59 % hingga 28,43 %. Angka produksi perikanan yang telah dicapai tersebut tidak terlepas dari program peningkatan kesejahteraan petani, melalui kegiatan pelatihan dan penguatan kelembagaan petani perikanan (Pokdakan maupun Poklahar).

Selanjutnya, berikut ini perkembangan jumlah ikan yang ditebarkan di sawah, dan kolam:

Tabel II.98
Perkembangan Jumlah Ikan yang Ditebarkan di Sawah dan Kolam di Kota Magelang Tahun 2011-2015

No	Jenis Ikan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*
1	Karper /Mas	15.245	112.440	53.048	26.665	25.142
2	Tawes	52.490	64.899	21.289	0	0
3	Nila	104.532	327.213	434.848	392.650	298.868
4	Lele	222.875	277.650	488.888	509.100	332.152
5	Grass Crab	3.781	5.651	0	0	0
6	Udang	20.349	30.810	0	0	0
7	Gurame	2.462	4.362	2.545	0	0
8	Bawal	6.780	58.659	85.040	74.850	50.422
9	Patin	103.457	310.369,5	0	0	0
10	Ikan Lainnya	9.645	16.205	22.450	1.730	14.368

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Magelang, 2011-2015

Keterangan: * Angka Sementara

Tabel diatas menunjukkan bahwa, jumlah ikan yang ditebarkan di sawah, dan kolam berfluktuatif, namun secara keseluruhan menunjukkan tren yang semakin menurun. Hingga tahun 2015, hanya ikan lele, dan ikan nila yang paling banyak ditebarkan dibanding dengan jenis-jenis ikan lainnya. Hal ini disebabkan karena ikan lele, dan ikan nila lebih banyak diminati oleh konsumen dan harganya juga lebih terjangkau.

2.3.3.2 Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang mempunyai daya ungkit tinggi menggerakkan sektor sektor lainnya. Pengembangan pariwisata mendasarkan pada keunikan, kekhasan, serta daya tarik wisata alam dan budaya. Disamping itu juga memperhitungkan kelangsungan kegiatan pariwisata melalui pengelolaan yang mengacu pada pelestarian, keberlanjutan dan keterpaduan antar potensi wisata. Pengembangan pariwisata Kota Magelang dapat dilihat dari aspek produk wisata dan aspek pasar wisata. Dari aspek produk wisata terdiri dari obyek dan daya tarik wisata, fasilitas pelayanan wisata serta aksesibilitas, sedangkan dari aspek pasar wisata adalah wisatawan baik lokal, regional maupun manca negara. Obyek dan daya tarik wisata di Kota Magelang terdiri dari wisata budaya, wisata pendidikan, wisata ziarah/religius, wisata alam dan wisata buatan. Fasilitas wisata terutama didukung dengan keberadaan jasa akomodasi pariwisata baik berupa hotel maupun rumah makan serta fasilitas pelayanan pariwisata lainnya. Sedangkan aksesibilitas terutama terkait dengan ketersediaan sarana prasarana transportasi yang dapat menjangkau obyek-obyek dan fasilitas pariwisata di Kota Magelang.

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kinerja dan berkembangnya sektor pariwisata daerah adalah jumlah kunjungan wisata. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung di Kota Magelang dari tahun ke tahun menunjukkan trend peningkatan setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2010 sebagai dampak terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2011 tercatat sebanyak 806.623 wisatawan, meningkat dibandingkan tahun 2010 sebesar 724.801 wisatawan. Pada tahun 2012 wisatawan yang mengunjungi Kota Magelang mengalami kenaikan 918.237 wisatawan, dan kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi 994.187 wisatawan.

Peningkatan wisatawan yang berkunjung ke Kota Magelang secara signifikan terjadi pada Tahun 2015, dari 994.187 wisatawan pada tahun 2014 bertambah menjadi 1.138.544 wisatawan pada tahun 2015, yang berarti mengalami peningkatan sebanyak 144.357 wisatawan atau meningkat 14,52%. Ditinjau dari asal wisatawan, peningkatan jumlah wisatawan utamanya disebabkan peningkatan wisatawan nusantara. Jumlah wisatawan nusantara meningkat sangat besar sebanyak 114.751 wisatawan atau meningkat 14,64%, dari 988.622 wisatawan pada tahun 2014 menjadi 1.133.373 wisatawan pada tahun 2015. Sebaliknya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 394 wisatawan dari 5.565 wisatawan pada tahun 2014 turun menjadi 5.171 wisatawan pada tahun 2015. Kenaikan jumlah wisatawan khususnya wisatawan nusantara merupakan dampak positif dari digelarnya even akbar Ayo Ke Magelang 2015 dengan berbagai event dan atraksi budaya dan kesenian yang menarik. Sedangkan penurunan jumlah wisatawan mancanegara menunjukkan even Ayo Ke Magelang 2015 kurang dikenal sampai mancanegara. Banyaknya wisatawan mancanegara pada tahun 2014 karena banyak terdapat event-event skala internasional seperti rally mobil kuno, dan Turnamen Golf Internasional di Borobudur International Golf and Country Club.

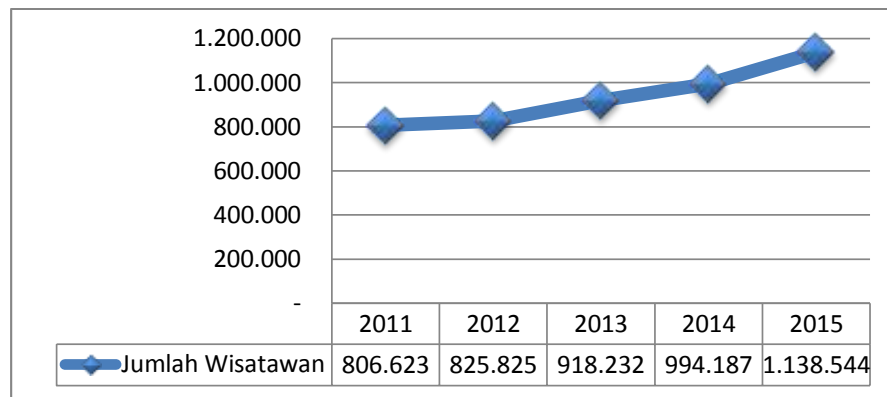
Tabel II.99
Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Magelang Tahun 2010-2015

Jumlah Kunjungan Wisata	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Jumlah wisatawan	806.623	825.828	918.232	994.187	1.138.454
Wisatawan Dalam Negeri	806.221	825.278	913.768	988.622	1.133.373
Wisatawan Luar Negeri	402	547	4.464	5.565	5.171

Sumber : Profil/ SIPD Kota Magelang Tahun 2015

Belum optimalnya kunjungan wisata di Kota Magelang salah satunya disebabkan karena masih lemahnya promosi, informasi dan pemasaran pariwisata, kurangnya kreativitas, kreasi dan berbagai fasilitas pendukung kepariwisataan yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang mengunjungi Kota Magelang. Perlu upaya untuk melakukan inventarisasi dan penggalan berbagai potensi, keunikan dan destinasi pariwisata dan berbagai event dapat dikembangkan menjadi daya tarik bagi wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan asing untuk datang berkunjung di Kota Magelang.

Momentum kenaikan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Magelang perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan, mengingat keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki Kota Magelang. Obyek dan daya tarik wisata di Kota Magelang terdiri dari wisata budaya, wisata pendidikan, wisata ziarah/religius, wisata alam dan wisata buatan. Obyek wisata di Kota Magelang yang banyak dikunjungi para wisatawan adalah Taman Kyai Langgeng. Selain itu Kota Magelang juga memiliki 5 (lima) museum yaitu Museum P. Diponegoro, Museum Taman Abdul Jalil, Museum Asuransi Bumi Putera, Museum BPK RI dan Museum Jenderal Sudirman.



Sumber: Disporabudpar Kota Magelang, 2011-2015

Gambar 2.40
Perkembangan Jumlah Wisatawan Kota Magelang 2011-2015

Dilihat dari kontribusinya, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Magelang tidak dapat dihitung secara langsung, karena sektor pariwisata merupakan gabungan dari beberapa bagian sektor dalam PDRB. Sektor pariwisata tersusun dari sub sektor jasa hiburan (sektor jasa-jasa), sub sektor angkutan (sektor pengangkutan dan komunikasi), sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB walaupun masih relatif kecil, namun menunjukkan trend yang semakin meningkat dalam kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 2011 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Magelang sebesar adalah 7,8%. Kontribusi sektor pariwisata pada tahun 2012 sedikit kenaikan menjadi 7,89%, sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan pada kisaran 7,4%. Pada tahun 2014, kontribusi sektor pariwisata sedikit meningkat menjadi 7,43%, dan pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 7,98%.

Tabel II.100
Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap PAD Kota Magelang Tahun 2011-2014

Sumber Pendapatan Daerah	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
Pajak Hotel	535.125.334,-	730.319.921,-	1.372.069.102,-	2.027.782.556,-
Pajak Restoran	926.838.567,-	872.997.547,-	1.364.657.315,-	1.797.050.823,-
Pajak Hiburan	697.799.900,-	1.019.667.207,-	1.399.359.651,-	1.329.451.348,-
Total PAD Kota Magelang	63.557.701.976,-	90.986.601.697,-	107.739.838.961,-	164.906.266.142,-

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang, 2011-2014

Kota Magelang kaya akan berbagai potensi destinasi pariwisata baik berupa bangunan peninggalan sejarah, wisata buatan, wisata kuliner maupun wisata olahraga, rekreasi dan spiritual di Gunung Tidar. Dengan city branding Magelang Kota Sejuta Bunga, Kota Magelang terus berbenah dan mempercantik diri dengan pembangunan dan perbaikan berbagai fasilitas kota dan taman. Dalam pengembangan pariwisata, sebagai tindak lanjut dari Program Ayo Ke Magelang 2015, selain perlunya pengemasan berbagai kesenian dan budaya dengan sebaik-baiknya, perlu upaya penyebar luasan informasi dan promosi berbagai even seni dan budaya secara optimal, tidak hanya skala lokal saja, tetapi juga melingkupi skala regional, nasional bahkan internasional.

Disamping itu perlu dilaksanakan kerjasama yang baik dengan beberapa stakeholder yang terkait dengan jasa pariwisata, seperti: Agen Travel, Mass Media baik cetak maupun elektronik.

Obyek dan daya tarik wisata di Kota Magelang terdiri dari wisata budaya, wisata pendidikan, wisata ziarah/religius, wisata alam dan wisata buatan. Fasilitas wisata terutama didukung dengan keberadaan jasa akomodasi pariwisata baik berupa hotel maupun rumah makan serta fasilitas pelayanan pariwisata lainnya. Sedangkan aksesibilitas terutama terkait dengan ketersediaan sarana prasarana transportasi yang dapat menjangkau obyek-obyek dan fasilitas pariwisata di Kota Magelang.

Obyek wisata di Kota Magelang yang banyak dikunjungi para wisatawan adalah Taman Kyai Langgeng. Selain itu destinasi wisata yang dikunjungi di Kota Magelang adalah museum, dimana terdapat 5 (lima) museum yaitu Museum P. Diponegoro, Museum Taman Abdul Jalil, Museum Asuransi Bumi Putera, Museum BPK RI dan Museum Jend. Sudirman.

Dalam rangka mendukung daya tarik dan daya saing sektor pariwisata di Kota Magelang, Pemerintah Kota Magelang melakukan beberapa terobosan dengan melakukan penataan kota baik terkait dengan estetika, kenyamanan maupun keindahan kota serta melakukan pembenahan di beberapa lokasi yang akan di jadikan objek wisata unggulan di Kota Magelang serta diharapkan mampu menarik kehadiran wisatawan di Kota Magelang. Dalam dua tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2014 dan 2015 Pemerintah Kota Magelang melalui Badan Perencanaan Kota telah melakukan beberapa kajian terkait dengan hal tersebut di atas diantaranya adalah Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Pariwisata, Dokumen Masterplan Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar, Dokumen Masterplan Kawasan Rejomulyo Gunung Tidar, Materplan Kawasan Budaya Mantysih, Perencanaan Desa Wisata Gunung Tidar serta Dokumen Masterplan Penataan RTNH Plengkung Kalikota

Pada tahun 2015 di Kota Magelang terdapat 22 buah hotel dengan klasifikasi 8 buah hotel berbintang dan 14 buah hotel kelas melati. Fasilitas lain selain hotel yang mendukung jasa pariwisata di Kota Magelang yaitu keberadaan Rumah makan yang tersebar cukup banyak di Kota Magelang yaitu sebanyak 84 buah. Pemerintah Kota Magelang juga mengembangkan Pusat-pusat Kuliner yang memfasilitasi banyak PKL yang ada di sana. Selain bertujuan pada penataan PKL di Kota Magelang juga bermaksud untuk menciptakan suasana Kota yang tertib, bersih dan rapi dalam mendukung peningkatan pendapatan dari sektor Pariwisata. Data Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2015 terdapat 10 Pusat Kuliner yang tersebar di seluruh penjuru Kota Magelang. Pusat – pusat Kuliner tersebut mampu menampung 491 PKL Kuliner di Kota Magelang.

Selain itu jumlah agen perjalanan wisata, dimana sampai dengan tahun 2015 tercatat jumlahnya sebanyak 19 agen perjalanan wisata. Upaya Pemerintah untuk meningkatkan potensi daerah dan memajukan sektor jasa Pariwisata dapat dilihat dengan beberapa kebijakan yang dilaksanakan di antara penataan dan pengembangan kawasan lembah tidar untuk mendukung wisata religi Gunung Tidar, pengembangan kawasan budaya Mantyasih, pengembangan kawasan kuliner di beberapa titik di Kota Magelang.

Fasilitas wisata terutama didukung dengan keberadaan jasa akomodasi pariwisata baik berupa hotel maupun rumah makan serta fasilitas pelayanan pariwisata lainnya. Sedangkan aksesibilitas terutama terkait dengan ketersediaan sarana prasarana transportasi yang dapat menjangkau obyek-obyek dan fasilitas pariwisata di Kota Magelang. Hotel merupakan fasilitas penunjang pariwisata atau Amenitas yang utama selain rumah makan serta fasilitas pelayanan pariwisata lainnya. Semakin meningkatnya potensi dan daya tarik Kota Magelang

diindikasikan dengan semakin bertambahnya jumlah hotel di Kota Magelang. Pada Tahun 2015 fasilitas hotel di Kota Magelang bertambah 2 yaitu Cityhub Hotel dan Hotel Safira. Dengan bertambahnya 2 hotel tersebut, maka pada Tahun 2015 Kota Magelang memiliki fasilitas Hotel sebanyak 22 hotel, terdiri dari 14 hotel kelas melati, 3 hotel bintang 2 yaitu Hotel Trio, Hotel Borobudur Indah dan Hotel Cityhub, 3 hotel kelas Bintang 3 yaitu Hotel Sriti, Hotel Oxalis dan Hotel Safira, 1 buah hotel bintang 4 yaitu Hotel Atria yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, serta 1 buah hotel bintang 5 yaitu Hotel Puri Asri yang terletak di tepi sungai Progo dan bersebelahan dengan Taman Kyai Langgeng.

Tabel II.101
Hotel Bintang di Kota Magelang

Nama & Alamat	Klasifikasi	Jumlah Kamar
ATRIA HOTEL & CONFERENCE Jl. Jend. Sudirman	B - 4	144
PURI ASRI Jl. Cempaka 9	B - 5	178
SRITI Jl. Daha 23 Telp. (0293) 363347, 363348	B - 3	31
TRIO Jl. Jend. Sudirman 68 Telp. (0293) 365095, 365096	B - 2	73
BOROBUDUR INDAH Jl. A. Yani 246 Telp. (0293) 364502, 312500	B - 2	39
OXALIS Jl. Cempaka 17 Telp. (0293) 5503151, 310371	B - 3	53
CITY HUB Jl. Gatot Subroto No. 260, Telp. (0293) 311758	B - 2	34
SAFIRA Jl. Gatot SoebrotoNo. 56A, Telp. (0293) 360033	B - 3	54

Sumber: Profil Pariwisata Kota Magelang, 2015

2.3.3.3 Pertanian

Penyelenggaraan pembangunan sektor pertanian juga mencakup sektor peternakan. Tujuan utama pembangunan sektor pertanian dan peternakan adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui hasil produksi komoditas pangan nabati maupun hewani, disamping itu juga untuk memperluas lapangan kerja, menunjang sektor industri, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani maupun peternak.

Pembangunan sektor pertanian maupun peternakan di daerah perkotaan semakin termarginalkan, seiring dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, karena desakan kebutuhan perumahan, industri dan fasilitas umum lainnya. Diperparah lagi dengan kurangnya minat generasi muda dalam menekuni sektor pertanian-peternakan. Hal ini berdampak pada kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Magelang pada tahun 2010-2015 berturut-turut adalah 2,33%, 2,26%, 2,19%, 2,12%, 2,06%. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Magelang tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 11,59% dari tahun 2010. Oleh karena itu, dibutuhkan kreatifitas dan inovasi agar sektor pertanian-peternakan tetap eksis dalam pembangunan ekonomi Kota Magelang.

Berikut ini adalah capaian kinerja RPJMD Urusan Pertanian tahun 2011 hingga 2015:

Tabel II.102
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2011-2015

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Prosentase konservasi sumberdaya lahan dan sumber daya hayati	3%	5%	7%	9%	10%
2	Prosentase pemanfaatan lahan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	2,26%	2,19%	2,12% *	2,06% **	
4	Jumlah jenis bidang usaha agribisnis	7 Jenis	8 Jenis	11 Jenis	14 Jenis	14 Jenis
5	Jumlah penggunaan benih padi bermutu	5000	5000	5000	5750	13.755
6	Rasio petani terlatih:					
	- Pertanian	70%	70%	76%	90%	80%
	- Peternakan	50%	75%	73%	90%	75%
7	Penguatan kelembagaan petani:					
	- Pertanian	16 Kelompok	16 Kelompok	16 Kelompok	21 Kelompok	17 Kelompok
	- Peternakan	2 Kelompok	4 Kelompok	6 Kelompok	8 Kelompok	10 Kelompok
8	Jumlah tempat pengolahan pasca panen:					
	- Pertanian	0	0	0	1	1
	- Peternakan	1	2	2	2	2
9	Jumlah serangan OPT yang dapat diatasi	100%	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah penggunaan teknologi tepat guna (Panca usaha tani)	5	5	5	5	5
11	Jumlah populasi:					
	- Unggas (ekor)	128.535	303.853	286.371	78.242	253.413*
	- Domba/Kambing (ekor)	470	553	959	770	833*
	- Sapi (ekor)	144	295	280	272	611*
12	Jumlah produksi peternakan:					
	- Daging (kg)	1.316.309	3.690.249	7.767.253	3.053.239	7.259.977*
	- Telor (kg)	44.020	1.130.960	65.427,96	85.727,12	45.655*
	- Susu (lt)	36.432	86,41	90.890,87	66.363	187.136*
13	Jumlah ternak yg diperiksa kesehatannya (ekor)	5.735	6.197	6.659	7.121	7582

Sumber: 1. Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Magelang, 2011-2015

2. Kota Magelang dalam Angka, 2010-2015

Keterangan: * Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator RPJMD tahun 2011-2015 tidak dapat mencapai target, yaitu:

1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB;
2. Jumlah tempat pengolahan pasca panen pertanian; dan
3. Jumlah produksi susu.

Hal ini disebabkan karena untuk merealisasikan indikator-indikator tersebut dibutuhkan lahan yang memadai, sementara ketersediaan lahan untuk usaha pertanian maupun peternakan di Kota Magelang sangat terbatas, akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

Lahan pertanian pertanian di Kota Magelang saat ini hanya seluas 328,09 ha atau sekitar 18,11 % dari seluruh luas lahan Kota Magelang (1.812 ha). Sementara lahan untuk bangunan dan halaman seluas 1328,63 ha atau 73,32% dari seluruh luas lahan di Kota magelang. Kebutuhan industri (51,90 ha) dan fasilitas umum lainnya (103,38 ha) atau sekitar 8,57% dari seluruh luas lahan di Kota magelang.

Dari keseluruhan luas lahan untuk usaha pertanian, penggunaan tanah untuk sawah sebesar 209 ha (63,70%), perkebunan/hutan rakyat seluas 99,56 ha (30,34 %), tegal/kebun/ladang/huma sebesar 13,43 ha (4,09%) dan kolam/tabat/empang sebesar 6,10 ha (1,86%). Penggunaan lahan pertanian didominasi untuk sawah, meskipun demikian keberadaan lahan sawah di Kota Magelang polanya menunjukkan penurunan meskipun ada fluktuasi sebagaimana tersaji pada gambar berikut ini:



Sumber: 1. Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Magelang, 2011-2015

2. Kota Magelang dalam Angka, 2011-2015

Keterangan: * Angka Sementara

Gambar 2.41
Grafik Perkembangan Luas Lahan Sawah di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Gambar diatas menunjukkan bahwa, pada tahun 2011 hingga 2012 terjadi penurunan luas lahan sawah sebesar 1,44%, dari 213,09 ha menjadi 210,03 ha, kemudian pada tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 0,32% (0,67 ha). Namun pada tahun 2014 lahan sawah berkurang lagi sebesar 1,7 ha (0,81%). Sawah-sawah yang terdapat di Kota Magelang pada umumnya dikelilingi oleh perumahan. Seiring dengan meningkatnya harga jual tanah, dan tingginya desakan untuk perumahan, maka lahan pertanian produktif tersebut rawan dialih fungsikan menjadi perumahan. Tingginya angka konversi lahan pertanian menjadi non pertanian setiap tahun tentunya memberi tantangan bagi jaminan ketahanan pangan masyarakat Kota Magelang.

Berkurangnya lahan pertanian di Kota Magelang berimbas pada fluktuasi luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas beberapa komoditas tanaman pangan (tabel 2.7). Sebagai contoh, luas tanam padi pada

tahun 2011 adalah sebesar 550 ha, pada tahun 2012 menurun sebesar 1,64% menjadi 541 ha, namun pada tahun 2013 meningkat 0,55% (544 ha), kemudian pada tahun 2014 terus meningkat hingga 1,47% menjadi 552 ha, dan pada tahun 2015 kembali menurun sebesar 0,18% (551 ha). Begitu pula produktivitas padi, pada tahun 2011 tercatat sebesar 56,98 kw/ha, kemudian pada tahun 2012 meningkat sebesar 4,79% (59,71 kw/ha), namun pada tahun 2013 menurun 2,03% (58,50 kw/ha), dan pada tahun 2014 menurun lagi sebesar 0,55% (58,18 kw/ha), tetapi pada tahun 2015 meningkat 1,58% menjadi 59,1 kw/ha.

Tabel II.103

Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, Produktivitas Padi, Jagung, dan Ketela Pohon di Kota Magelang Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*
1	Luas tanam padi (ha)	550	541	544	552	551
	Luas panen padi (ha)	551	548	548	547	549
	Produksi padi (ton)	3.131,98	3.272	3.206	3.182,31	3.245,69
	Produktivitas padi (kw/ha)	56,98	59,71	58,50	58,18	59,1
2	Luas tanam jagung (ha)	2	0	0	0	2
	Luas panen jagung (ha)	3	0	0	0	2
	Produksi jagung (ton)	19,50	0	0	0	12
	Produktivitas jagung (kw/ha)	16,25	0	0	0	6
3	Luas tanam ketela pohon (ha)	7	4	1	24	2
	Luas panen ketela pohon (ha)	9	3	3	2	2
	Produksi ketela pohon (ton)	126	44,68	22	14	13,5
	Produktivitas ketela pohon (kw/ha)	70	148,96	73,33	7	6,75

Sumber: 1. Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Magelang, 2011-2015
2. Kota Magelang dalam Angka, 2010-2015

Keterangan: * Angka Sementara

Selain itu, kondisi petani Kota Magelang yang sebagian besar merupakan petani penggarap, menyebabkan rendahnya produksi komoditas tanaman pangan. Karena, keputusan penggunaan lahan ditentukan oleh pemilik lahan, sementara petani hanya mengerjakan apa yang telah ditetapkan oleh pemilik lahan. Sehingga berdasarkan tabel tersebut diatas, pada tahun 2012 hingga 2014 komoditas jagung tidak diproduksi oleh petani Kota Magelang.

Maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap produksi komoditas pertanian dan peternakan asal Kota Magelang, tetapi juga menyebabkan menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Secara berturut-turut kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2011 hingga 2014 adalah sebesar: 2,26%; 2,19%; 2,12%; dan 2,06%. Pada tahun 2012 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB hanya berkurang 3,28%, tetapi jika dibandingkan antara tahun 2011 dan 2014 maka kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB telah berkurang sebesar 9,12%.

Namun demikian, sektor pertanian merupakan penyangga ketahanan pangan, oleh karena itu kegiatan budidayanya tetap harus dipertahankan di Kota Magelang. Pengembangan urban farming dengan memanfaatkan

lahan sempit (tidak terpakai) berbasis budidaya organik merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan. *Urban farming* di Kota Magelang dapat melibatkan budidaya pertanian, peternakan, maupun perikanan.

Beberapa tehnik budidaya di lahan sempit (tidak terpakai) yang dapat dikembangkan di Kota Magelang, misalnya: vertikultur, hidroponik, dan aquaponik. Penerapan vertikultur dapat dilakukan pada budidaya sayur-mayur dan buah-buahan yang tumbuh secara merambat, maupun tanaman hias dan bunga. Tentunya dengan mengacu pada sistem budidaya yang ramah lingkungan.

Terkait dengan tanaman hias dan bunga, pada tahun 2012 Pemerintah Kota Magelang telah mencanangkan “Magelang Kota Sejuta Bunga” (MKSB) sebagai *branding* daerah. Penetapan MKSB ini ditindak lanjuti dengan penyusunan *Master Plan* MKSB pada tahun 2013. Bahkan, telah diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Branding* Kota Magelang.

Dalam rangka mempercepat akselerasi terwujudnya MKSB, maka sejak tahun 2014 telah dilakukan pengembangan kultur jaringan, serta pelatihan budidaya tanaman hias dan bunga bagi masyarakat Kota Magelang. Harapannya melalui kegiatan tersebut mampu mendorong terwujudnya agribisnis tanaman hias dan bunga sebagai salah satu penggerak ekonomi Kota Magelang.

Berdasarkan data dari Dinas, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Magelang, saat ini sudah terbentuk 3 (tiga) kelompok pembudidaya hias dan bunga, yang berada di Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Kemirirejo, dan Kelurahan Potrobangsari. Berikut ini adalah data kelompok tani tanaman hias dan bunga yang terdapat di Kota Magelang:

Tabel II.104
Data Kelompok Tani Tanaman Hias dan Bungadi Kota Magelang Tahun 2015

No	Nama Kelompok Tani	Kelurahan	Jumlah Anggota
1	Sekar Sari	Kedungsari	20 orang
2	Anggrek Indah	Kemirirejo	20 orang
3	Azahra	Potrobangsari	20 orang
Jumlah Pembudidaya Tanaman Hias dan Bunga			60 orang

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Magelang

Tabel diatas menunjukkan bahwa, jumlah seluruh kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga yang terdapat di Kota Magelang adalah 60 orang. Selanjutnya, walaupun lahan pertanian semakin menyusut, Kota Magelang mampu memproduksi buah-buahan, seperti: alpukat, belimbing, durian, jambu, mangga, rambutan, nangka, nanas, pepaya, pisang, salak, sawo, sirsak, dan sukun (tabel 2.9). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Magelang merupakan salah satu penghasil buah-buahan di Jawa Tengah. Pada hakekatnya buah-buahan dapat dibudidayakan di tanah marjinal atau yang diklasifikasikan sebagai tanah yang kurang cocok untuk tanaman pangan. Tanaman buah-buahan juga dapat ditanam di pekarangan maupun tegalan yang tidak begitu baik jaringan irigasinya.

Tabel II.105
Produksi Buah-buahan (Ton) Kota Magelang Tahun 2011-2015

No	Jenis Buah-	Buah-	Tahun			
			2011	2012	2013	2014

No	Jenis Buah-	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*
1	Alpoket	1.475	0,74	1,10	0,30	0,75
2	Mangga	18.456	5,04	14,50	45,18	115,30
3	Rambutan	158.553	62	48,20	18,53	98,73
4	Sukun	1,90	1.775	2,20	8,74	18,83
5	Durian	4,03	2	2,60	1,13	32
6	Jambu Biji	12,45	15.249	7,90	42,99	44,65
7	Jambu Air	6,58	2,20	0	1,36	2,36
8	Sawo	0	0	0,30	0,19	1,71
9	Pepaya	26.428	24.008	13,80	15,62	15,92
10	Pisang	104,19	73.483	65,70	52,79	96,91
11	Nanas	0,13	0,132	0	0	0
12	Salak	16,77	9.941	9	7,28	7,95
13	Belimbing	1,07	1,60	0,30	0,53	4,79
14	Nangka	606,90	1,04	5,20	0,67	6,27

Sumber: 1. Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Magelang, 2011-2015
2. Kota Magelang dalam Angka, 2010-2015

Keterangan: * Angka Sementara

Produk-produk pertanian maupun peternakan hingga saat ini belum bersertifikasi. Oleh sebab itu, padan pembangunan jangka menengah selanjutnya (2016-2021) produk pertanian, peternakan, bahkan perikanan sudah harus bersertifikasi. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing produk unggulan daerah, sekaligus untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Sektor peternakan Kota Magelang merupakan sub sektor pertanian yang juga sangat bergantung pada ketersediaan lahan. Namun demikian produksi lokal daging ruminansia, dan daging unggas tahun 2011-2015 telah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk Kota Magelang. Perkembangan produksi daging unggas, telur, dan susu tahun 2009-2014 tersaji pada Tabel II.106

Tabel II.106
Perkembangan Produksi Daging Ayam, Telur, dan Susu
di Kota Magelang Tahun 2010-2015

No	Komoditas	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Daging Ayam Ras (kg)	1.077.181	688.361	2.986.631	6.615.212	1.774.820	5.659.076
2	Daging Ayam Buras (kg)	32.616	23.656	35.496	83.844	146.598	495.895
3	Telur (kg):						
	Ayam Ras	6.804	4.212	49.715	1.728,60	5.145,49	6.154
	Ayam Buras	27.392	15.201	548.644	30.033,55	40.075,62	11.755
	Itik	46.776	22.773	529.876	30.062,58	36.565,99	21.816
	Burung Puyuh	0	1.834	2.725	3.603,23	3.940,02	5.940
4	Susu (lt):						
	Sapi	25.790	36.432	86.410	90.890,87	66.363	187.136

Sumber: 1. Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Magelang, 2011-2015
2. Kota Magelang dalam Angka, 2010-2015

Keterangan: * Angka Sementara

Produksi komoditas daging ruminansia mencakup: sapi, kerbau, kambing, dan domba (Tabel II.91). Daging sapi banyak dikonsumsi oleh masyarakat, terutama pada saat perayaan hari raya Idul Adha. Namun pada saat perayaan hari raya tersebut, ketersediaan daging sapi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk, sehingga memacu terjadinya impor daging sapi. Oleh sebab itu, untuk memenuhi ketersediaan daging sapi lokal, maka populasi dan produktivitas sapi potong perlu terus ditingkatkan.

Tabel II.107
Perkembangan Produksi Daging Sapi, Kerbau, Kambing, dan Domba (kg)
di Kota Magelang Tahun 2010-2015

No	Komoditas	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Sapi	631.845	549.110	607.263	1.004.395	1.063.041	1.029.315
2	Kerbau	0	0	0	245	0	0
3	Kambing	0	10.282	5.297	8.411	12.006	16.405
4	Domba	54.375	44.900	55.562	55.146	56.774	59.286

Sumber: 1. Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Magelang, 2011-2015
2. Kota Magelang dalam Angka, 2010-2015

Keterangan: * Angka Sementara

Kondisi peternakan saat ini menunjukkan bahwa, peternak Kota Magelang lebih menyukai budidaya ternak sapi potong ketimbang ternak sapi perah. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketersediaan air bersih dalam budidaya ternak sapi perah. Disamping itu menurut sebagian besar peternak, beternak sapi perah perawatannya lebih sulit dibanding dengan sapi potong. Tabel dibawah ini memberikan gambaran mengenai kondisi populasi ternak sapi perah, dan sapi potong yang dibudidayakan peternak Kota Magelang sepanjang tahun 2006 hingga 2014, dimana populasi sapi potong lebih banyak daripada sapi perah.



Sumber: 1. Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Magelang, 2011-2015
2. Kota Magelang dalam Angka, 2010-2015

Keterangan: * Angka Sementara

Gambar 2.42
Perkembangan Populasi Ternak Sapi Perah, dan Sapi Potong (ekor)
di Kota Magelang Tahun 2010-2015

Kegiatan usaha di sektor pertanian, dan peternakan, sudah tidak menarik lagi bagi generasi muda. Faktor utamanya adalah sektor pertanian, dan peternakan dianggap tidak memiliki insentif ekonomi ketimbang di sektor

lain. Untuk itu, dibutuhkan upaya revitalisasi baik pada sektor pertanian, maupun peternakan secara terfokus yang didukung kualitas sumberdaya manusia (SDM). Disamping melalui pengembangan SDM berbasis kompetensi, juga diperlukan penguatan kelembagaan pertanian, dan peternakan, misalnya: kelembagaan keuangan, pemasaran, penyuluhan, penelitian dan pengembangan yang saling bersinergis.

Setiap program pengembangan sektor pertanian, dan peternakan, khususnya yang berkait dengan program pengembangan SDM harus merupakan bagian integral dari peningkatan kesejahteraan petani maupun peternak. Pengembangan model pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan berbasis kompetensi dan agribisnis diharapkan mampu meningkatkan mutu SDM pertanian, dan peternakan. Sehingga mampu meningkatkan produktivitas, mutu dan harga hasil produksi pertanian, dan peternakan yang kompetitif. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani maupun peternak yang didukung dengan pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani maupun peternak.

2.3.3.4 Kehutanan

Kota Magelang tidak memiliki hutan, namun demikian terdapat kawasan konservasi seluas 69 ha di Gunung Tidar. Keberadaan kawasan konservasi Gunung Tidar memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Kota Magelang, diantaranya: sebagai paru-paru kota, mengurangi polusi dan pencemaran udara, mengatur iklim mikro, estetika atau keindahan, menjaga keseimbangan ekologis, sebagai pengatur tata air (resapan air) serta menjaga kesuburan tanah. Oleh karena itu, kelestarian sumber daya alam kawasan konservasi Gunung Tidar harus dijaga.

Dalam rangka menjaga kelestarian kawasan konservasi Gunung Tidar, Pemerintah Kota Magelang telah melakukan rehabilitasi serta perlindungan dan pengawasan keamanan kawasan konservasi Gunung Tidar. Rehabilitasi kawasan konservasi Gunung Tidar dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi kawasan konservasi sehingga daya dukung, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Rehabilitasi kawasan konservasi Gunung Tidar diselenggarakan melalui kegiatan penghijauan, reboisasi, pemeliharaan, dan pengayaan tanaman. Penyelenggaraan rehabilitasi kawasan konservasi Gunung Tidar berupa penghijauan, dan pemeliharaan kawasan sekitar Gunung Tidar dilaksanakan secara partisipatif, dengan melibatkan masyarakat. Sementara, perlindungan dan pengawasan keamanan kawasan konservasi Gunung Tidar dilaksanakan dengan menempatkan penjaga /jagawana. Rehabilitasi lahan kritis tidak dilaksanakan karena di Kota Magelang tidak terdapat lahan kritis.

Selanjutnya, kawasan konservasi Gunung Tidar akan dikembangkan menjadi Kebun Raya. Oleh karena itu, program/kegiatan yang dilaksanakan pada pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021, untuk kelestarian sumber daya alam hayati Kebun Raya Gunung Tidar akan masuk ke dalam urusan lingkungan hidup. Berikut ini adalah capaian kinerja urusan kehutanan yang digunakan untuk mewadahi program/kegiatan rehabilitasi serta perlindungan dan pengawasan keamanan kawasan konservasi Gunung Tidar selama tahun 2011-2015:

Tabel II.108
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kota Magelang Tahun 2011-2015

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)	20	20	23	23	25
2	Konservasi Kawasan hutan (ha)	69	69	69	69	69
3	Kerusakan kawasan hutan	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Magelang, 2011-2015

2.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk urusan Energi dan sumber daya mineral untuk daerah kabupaten kota terbatas pada pemanfaatan Energi dan sumber daya mineral. Kota Magelang dengan berbagai keterbatasan wilayah dan sumber daya alamnya hanya dapat berupaya untuk melakukan penghematan dalam pemanfaatan energy dan sumber daya mineral. Dalam pemanfaatan energi listrik yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota adalah pengelolaan Penerangan Jalan Umum, yang berada di setiap Jalan Arteri, Kolektor dan juga jalan lingkungan.

Pemanfaatan meter listrik di beberapa PJU merupakan strategi penghematan energi listrik, disamping itu penghematan juga dilakukan dengan pengembangan Smart PJU yang akan menggantikan PJU konvensional. pemakaian PJU Solar Cell juga sudah menjadi program di Kota Magelang, beberapa titik PJU di ruas jalan Kota Magelang sudah diganti ke Solar Cell, dan beberapa taman-taman kota seperti taman di sepanjang tanggul kali kota juga sudah memanfaatkan PJU tenaga matahari.

Selain penghematan energi listrik dan juga pemanfaatan tenaga sinar matahari untuk PJU, Pemerintah Kota Magelang juga mengembangkan energi terbarukan melalui pemanfaatan limbah cair baik di TPA dan juga di kawasan industri sebagai energi alternatif. Di TPA Banyu Urip dikembangkan pemanfaatan limbah cair (leacate) melalui biodigester untuk menghidupkan PJU di kawasan TPA beserta permukiman disekitarnya, juga direncanakan pemanfaatan gas metan pada cell aktif dan pasif di TPA yang ditangkap dan diubah menjadi gas sebagai pengganti gas elpigi untuk memasak.

Di kawasan industri kecil Tahu di Primkopti RW I Kelurahan Tidar Selatan, juga sudah dilakukan pemanfaatan limbah tahu cair, yang diubah menjadi gas melalui Biodigester, yang dimanfaatkan untuk memasak sebagai pengganti gas elpigi.

2.3.3.6 Perdagangan

Perdagangan membantu semua warga negara dalam menjalankan usaha-usaha pembangunan mereka melalui promosi serta pegutamaan sektor-sektor ekonomi yang mengandung keuntungan komperatif (Todaro, 2000), maka salah satu mesin pertumbuhan (*engine of growth*) ekonomi suatu daerah adalah sektor perdagangan. Sektor ini berperan dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, selain juga mampu menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi. Ilustrasi sektor perdagangan di Kota Magelang akan digambarkan sebagai berikut:

Tabel II.109
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2011-2015

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	16,63	15,79	15,55	14,88	14,47*)
2	Jumlah penerbitan SIUP	258	232	325	362	361
3	Nilai ekspor (juta)	1,949,067.92	2,373,917.72	2,829,289.91	3,561,875.09*)	Data belum rilis
4	Nilai impor (juta)	3,326,607.65	4,074,414.05	4,680,507.64	5,411,866.01*)	Data belum rilis

Sumber: 1. BPS Kota Magelang, 2015

2. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2016

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB menurun secara gradual dari 2011 hingga 2015. Walau secara nominal, kontribusinya meningkat (sesuai tabel II.18) namun sektor ini masih menyimpan beberapa kendala seperti terbatasnya area pemasaran, daya saing produk yang belum optimal (terkait mutu, desain dan merk dagang), serta masih rendahnya kapasitas SDM pedagang. Beberapa hal tersebut mengakibatkan prosentase sektor perdagangan terdesak oleh peningkatan kontribusi sektor industry pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, jasa pendidikan dan jasa lain.

Sebagai upaya peningkatan peredagangan, Pemerintah Kota Magelang selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk dalam kemudahan perijinan. Pada tahun 2015 jumlah ijin yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Magelang naik 77,83% mencapai 361 ijin dengan penerbitan terbanyak pada Triwulan I-2015 sebanyak 105 ijin. Rata-rata lama proses perijinan makin efektif dari 3 hari pada tahun 2014 menjadi 2,5 hari pada tahun 2015. Diharapkan pelayanan perijinan dapat semakin cepat di lima tahun ke depan.

Sementara itu ekspor Kota Magelang selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Dari tahun 2010 sebesar Rp.1.446.656.680.000,- meningkat menjadi Rp. 3.561.875.090.000,- atau naik 146 % di akhir tahun kelima. Di sisi lain, impor Kota Magelang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun juga mengalami kenaikan yang cukup tajam dari tahun 2010 sebesar Rp.2.588.488.870.000,- menjadi Rp. 5.411.866.010.000,- pada tahun 2014 atau naik sebesar 109 %.

Sisi lain dari sektor perdagangan adalah perlindungan terhadap konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang sudah dimiliki Kota Magelang. BPSK Kota Magelang menjadi rujukan bagi Kabupaten sekitar seperti Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang, yang memang hingga saat ini belum memiliki lembaga sejenis di wilayahnya.

Tabel II.110
Sarana Perdagangan Kota Magelang Tahun 2011 – 2015

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pasar Tradisional	5	5	5	5	5
2	Pasar Lokal	6	6	6	6	9
3	Pasar Regional	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
4	Pasar Swalayan/ Supermarket/ Toserba	25	25	26	26	27
5	Hipermarket	-	-	-	-	-
6	Pasar Grosir	10	10	10	10	10
7	Mall/ Plaza	-	-	-	-	-
8	Pertokoan/ warung/ kios	2.783	2.783	2.783	2.783	2.793
9	Shelter	2	6	2	1	1

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Magelang, 2015

Sejalan dengan fungsinya sebagai kota jasa, maka Kota Magelang menyediakan sarana perdagangan yang selalu bertambah dan ditingkatkan kualitasnya dari tahun ke tahun. Sarana perdagangan meliputi sarana perdagangan tradisional dan modern. Dengan konsep Magelang sebagai Kota yang modern, maka kedepan diharapkan akan banyak tumbuh pusat perdagangan yang berkonsep modern di Kota Magelang, sehingga dapat lebih meningkatkan geliat sektor perdagangan dalam meningkatkan perannya.

2.3.3.7 Perindustrian

Sektor industri sangat berperan dalam pembangunan ekonomi daerah. Sebagai kota jasa, maka dalam pembangunan ekonomi Kota Magelang pun sangat bergantung pada sektor yang satu ini. Kemampuan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah (*value added*) pada setiap komoditi menjadikannya salah satu penentu pertumbuhan ekonomi. Industri kecil merupakan salah satu penyangga ekonomi di Kota Magelang. Sempat menurun jumlahnya di tahun 2012, 2013 hingga 2014, namun kemudian melonjak di tahun 2015. Berkurangnya jumlah industri kecil berpengaruh pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja, demikian pula sebaliknya, peningkatan jumlah industri akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sebagaimana terjadi pada tahun 2015. Jenis industri kecil yang ada di Kota Magelang antara lain: industri peralatan rumah tangga, konveksi, mainan anak, tahu-tempe dan makanan olahan. Industri yang disebutkan terakhir yaitu makanan olahan mulai menjadi unggulan dan merupakan potensi Kota Magelang yang layak terus dikembangkan.

Pemerintah Kota Magelang melalui dinas terkait senantiasa mengupayakan peningkatan kualitas produk dan kelembagaan industri kecil sehingga diharapkan kedepan jumlah industri kecil di Kota Magelang semakin meningkat, mandiri dan berdaya saing sehingga penyerapan tenaga kerja tinggi.

Sektor industri sangat berperan dalam pembangunan ekonomi daerah. Sebagai kota jasa, maka dalam pembangunan ekonomi Kota Magelang pun sangat bergantung pada sektor yang satu ini. Kemampuan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah (*added value*) pada setiap komoditas menjadikannya salah satu penentu pertumbuhan ekonomi.

Tabel II.111
Capaian Kinerja Sektor Industri Kota Magelang Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah industri kecil	1.761	1.395	1.381	1.359	2.053
2	Jumlah industri menengah	25	15	12	16	19
	Total	1.786	1.410	1.393	1.375	2.072
3	Jumlah tenaga kerja industri kecil	7.321	7.336	6.466	6.460	7.210
4	Jumlah tenaga kerja industri menengah	2.175	1.554	1.518	1.488	1.520
	Total	9.496	8.890	7.984	7.948	8.730

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2016

Daya serap tenaga kerja pada industri kecil semakin tahun semakin menurun. Rata-rata penyerapan tenaga kerja di tahun 2011 per industri kecil adalah 4 orang, sempat meningkat di tahun 2012 menjadi 5 orang per industri, namun di tahun 2013 dan 2014 kembali menjadi 4 orang per industri, dan akhirnya pada tahun 2015 menjadi 3 orang per industri.

Jenis industri kecil yang ada di Kota Magelang antara lain industri peralatan rumah tangga, konveksi, mainan anak, tahu-tempe dan makanan olahan. Industri yang disebutkan terakhir yaitu makanan olahan mulai menjadi unggulan dan merupakan potensi Kota Magelang yang layak terus dikembangkan.

Penyerapan tenaga kerja yang semakin menurun juga terjadi pada sektor industri menengah. Sempat berjaya di tahun 2011 dengan jumlah industri 25 buah dan rata-rata penyerapan tenaga kerja per industri sebanyak 87 orang. Jumlah industri menurun pada tahun 2012 dan 2013 menjadi 15 dan 12 namun rata-rata penyerapan tenaga kerja meningkat menjadi 103 dan 126 orang per industri. Kondisi ini tidak bertahan di 2014, dimana jumlah industri meningkat namun rata-rata penyerapan tenaga kerja menjadi 93 orang per industri. Di tahun 2015 jumlah industri kembali naik menjadi 19, namun penyerapan rata-rata per industri semakin menurun menjadi 80 orang.

Pemerintah Kota Magelang melalui dinas terkait senantiasa mengupayakan peningkatan kualitas produk dan kelembagaan industri kecil sehingga diharapkan kedepan jumlah industri kecil di Kota Magelang semakin meningkat, mandiri dan berdaya saing sehingga dapat dijadikan salah satu andalan dalam upaya penyerapan tenaga kerja.

2.3.3.8 Transmigrasi

Sebagai daerah pengirim/asal dalam program transmigrasi umum, Kota Magelang mendapatkan kuota jumlah, lokasi penempatan dan pemberangkatan transmigran dari Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi. Adapun hasil kinerja urusan transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.112
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Peserta transmigrasi yang dikirim	10	9	5	4	0
2	Jumlah transmigran swakarsa	0	0	0	0	0
3	Kontribusi sektor transmigrasi terhadap PDRB	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kota Magelang, 2011-2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sektor transmigrasi belum memiliki kontribusi terhadap PDRB Kota Magelang, karena hanya berperan sebagai daerah pengirim/ asal transmigran bukan sebagai lokasi transmigrasi. Selain itu jumlah transmigran yang dikirim selama 5 (lima) tahun terakhir ini tidak signifikan. Pada kurun waktu 2011-2015 tidak ada transmigran swakarsa.

2.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.4.1 Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang selama kurun waktu tahun 2011- 2015 antara lain tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai tahapan dari RPJPD Kota Magelang tahun 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2011-2015. Sementara RPJPD Kota Magelang sendiri telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009. Sementara itu dokumen perencanaan tahunan disusun sebagai dasar penyusunan APBD Kota Magelang.

Dokumen dokumen tersebut disusun dengan memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031. Kota Magelang juga concern dan memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung kebijakan global dan nasional, yang antara lain diwujudkan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan target Millenium Development Goals (RAD-MDGs) Tahun 2011-2015, RAD Penanggulangan Korupsi, Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB), serta dokumen perencanaan yang bersifat sektoral lain yang mendukung kinerja pembangunan Kota Magelang.

Secara sektoral perencanaan pembangunan daerah Kota Magelang diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) bidang perencanaan yaitu perencanaan bidang ekonomi, perencanaan bidang fisik dan prasarana serta perencanaan bidang sosial budaya. Selama periode tahun 2011-2015, distribusi penyusunan dokumen perencanaan sektoral adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.113
Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektoral Kota Magelang Tahun 2011-2015

No	Tahun>Nama Dokumen				
	2011	2012	2013	2014	2015
1	Revitalisasi Koperasi		Perencanaan Pengembangan IKM	Pengembangan Klinik Hewan	Pengembangan Pelatihan Kerja Terpadu
2	Perencanaan Pengembangan IKM		Perencanaan Pengelolaan Lahan Pertanian Produktif	Perencanaan IKM Center	Penyusunan Grand Design Corporate Social Responsibility (CSR)
3	Perencanaan Manajemen dan Operasional Balai Latihan Kerja (BLK)		Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga	Perencanaan Ekonomi Kreatif	Perencanaan pengembangan budidaya jamur
4			Perencanaan Penguatan Kelembagaan Koperasi	Rencana Aksi Daerah (RAD) Asean Economic Community (AEC)	Perencanaan Pengembangan Mina Wisata
5			Perencanaan Pengembangan Kultur Jaringan	Masterplan Kawasan Tanggul Kali Kota	Perencanaan Pencegahan/ Pengurangan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
6			Perencanaan pembangunan pariwisata	Masterplan kawasan Gunung Tidar	Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
7			Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak	RAD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Penyusunan Grand Design Kependudukan

No	Tahun>Nama Dokumen				
	2011	2012	2013	2014	2015
8			Rencana AKsi Daerah Pangan dan Gizi	Perencanaan Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan	Perencanaan Pengembangan Pariwisata
9				Masterplan Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan	
10				Perencanaan Pengembangan PAUD dan Anak Berkebutuhan Khusus	
11				Masterplan kawasan sejarah Mantyasih	

2.3.4.2 Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI.

Pemerintah Kota Magelang telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah berbasis AkruaI dimulai tahun 2015. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip berbasis akuntansi, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar. Pada Tahun 2011 - 2014 Pemerintah Kota Magelang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 23A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2012, Tahun 2012 Nomor 17A/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2013, Tahun 2013 Nomor 12A/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2014, dan Tahun 2014 Nomor 22A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2015.

Untuk mendukung peningkatan PAD dilakukan optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui peningkatan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah, *up dating* data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, peningkatan manajemen aset daerah dengan penerapan Sistem Informasi Barang Milik Daerah. Selain itu perlu dilakukan optimalisasi pendapatan terkait Pajak Bumi dan Bangunan. Rekapitulasi realisasi piutang PBB P-2 tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel II.114
Rekapitulasi Realisasi PBB P-2 Kota Magelang Tahun 2008-2015

	2008-2012	2013	2014	2015	Total
Piutang					
Pokok		562419055	555508532	629882606	
Denda		269961156	166654092	37852436	
Jumlah	1.817.030.140	832,380,211	722,162,624	667,735,042	4,039,308,017
Realisasi					
Pokok		213,957,255	422,634,237	634,355,413	
Denda		35,463,644	87,659,599	156,031,638	
Jumlah		249,420,899	510,293,836	790,387,051	1,550,101,786

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang, 2011-2015

Tabel II.115
Penilaian Objek Pajak Atas Bangunan di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Komponen	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah objek pajak	NA	NA	34.991	35.232	35.818
Penilaian objek pajak atas bangunan	NA	NA	27	266	39
Persentase	NA	NA	0,08	0,75	0,11

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang, 2011-2015

Tabel II.116
Penggunaan Instrumen Analisis Standar Biaya Perencanaan dalam Penyusunan Anggaran di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Komponen	2011	2012	2013	2014	2015
ASB	NA	NA	NA	39	44
Target	NA	NA	NA	60	60
Persentase	NA	NA	NA	65	73,33

2.3.4.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Sumber Daya Aparatur menjadi prioritas utama sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, pembelajaran langsung di tempat bekerja secara informal, guna meningkatkan kompetensi seorang Pegawai Negeri Sipil.

Untuk meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil pastilah perlu pendidikan dan pelatihan baik secara formal maupun informal yang tentunya berkaitan dengan penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian. Sejauh ini perencanaan terhadap peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai sudah dilakukan antara lain pengadaan CPNS, pengiriman tugas belajar, bintek, kursus, tes kompetensi, pembinaan disiplin, dan sebagainya. Realisasi pendidikan dan pelatihan Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel II.117

Tabel II.117
Realisasi Diklat BKD Kota Magelang Tahun 2011-2015

DIKLAT	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
TEKNIS FUNGSIONAL PEGAWAI SIPIL DAERAH	101	74	-	-	-
TEKNIS	134	120	291	324	226
FUNGSIONAL	32	25	24	36	21
KEPEMIMPINAN	26	24	42	36	26
PRAJABATAN	248	78	-	3	56

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang, 2011-2015

Undang undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi pendorong untuk merealisasikan terwujudnya Sumber Daya Manusia dalam hal ini Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, mempunyai Kompetensi di bidangnya, profesional dalam bekerja serta berdaya saing tinggi dalam mengejar kualitas kerja. Sehingga kedepannya pemerintah tidak akan ragu merancang program khususnya sumber daya aparatur yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel II.118
Jumlah PNS Kota Magelang Menurut Pendidikan Selama Tahun 2011-2015

No.	Pendidikan	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	SD	171	162	146	143	141
2	SMP	188	192	210	207	208
3	SMA	903	825	739	715	685
4	D-I/D-II	410	330	273	236	273
5	D-III	539	513	483	459	483
6	D-IV	29	37	38	40	38
7	S-1	2111	2074	2052	2081	2052
8	S-2	202	256	264	275	332
9	S-3	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang, 2011-2015

Jumlah PNS menurut pendidikan dari tahun 2011 s.d. 2015 berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jenjang pendidikan S-1 untuk pendidikan formal PNS dari tahun 2011 s.d. 2015 lebih mendominasi dan untuk jenjang pendidikan SMA ke bawah mengalami penurunan, hal ini karena adanya tuntutan syarat pendidikan minimal untuk jabatan tertentu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel II.119
Tingkat Pelanggaran Etika Aparat Selama Tahun 2011-2015

DIKLAT	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin	0,15%	0,06%	0,14%	0,02%	0,02%
Persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	97,18%	98%	95,02%	93,46%	97%
Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	9 org	10 org	10 org	4 org	6 org

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang, 2011-2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun sudah melampaui target RPJMD. Dalam mencapai tujuan nasional diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang setia dan taat pada Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945, bermental baik, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Salah satu indikasi rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin dan penanganan kasus pelanggaran disiplin masih belum mencapai target RPJMD.

Disiplin tersebut tidak hanya untuk sementara. Jika disiplin telah menjadi nafas para PNS tentunya kinerja pemerintah akan jauh lebih baik. Penerapan peraturan disiplin PNS harus tegas dan konsisten. Selain itu diharapkan PNS wajib menjaga dan mengembangkan etika profesinya.

2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Pada dasarnya penelitian dan pengembangan harus berjalan seiring dan sejalan dengan pembangunan termasuk di tingkat daerah. Hasil-hasil penelitian dan pengembangan, secara valid harus mampu menopang seluruh kerangka pembangunan. Perencanaan partisipatif selalu disuarakan sebagai model terbaik, dari hasil perencanaan bottom-up, program yang diusulkan masyarakat, dengan versus hasil perencanaan top-down, program yang diusulkan pemerintah.

Namun kedua model perencanaan tersebut sama-sama tidak memiliki basis data yang cukup kuat dan lengkap (speculative conjecture) untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas. Sekelumit persoalan yang dialami selama ini, dapat diselesaikan dengan pendekatan berbasis penelitian dan kajian, untuk mencari model-model kebijakan berkualitas terkait pencapaian arah pembangunan yang jelas dan terukur.

Pemerintah Kota Magelang terus berupaya untuk memberikan ruang yang cukup bagi eksistensi penelitian dan pengembangan. Melalui scenario Sistem Inovasi Daerah serta Roadmap Litbang serta didukung berbagai komponen seperti Dewan Riset Daerah (DRD) dan forum forum seperti Jarlitbang serta Forum Koordinasi KaryaSiswa sebagai mitra sekaligus elemen pendukung bagi makin sentralnya peran penelitian dan pengembangan bagi pengambilan kebijakan maupun peningkatan produktivitas di berbagai aspek. Namun hingga kini hasil penelitian yang diterapkan masih minim, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel II.120
Penerapan Hasil Krenova di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah hasil KRENOVA yang diterapkan dan atau diHaKI kan	5	7	5	5	5
Jumlah KRENOVA yang terjaring	29	20	35	17	15
%	17.24	35.00	14.29	29.41	33.33

Sumber: Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang, 2011-2015

2.3.5 Fungsi Lain

A. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Unit Pelayanan Perizinan Terpadu, memiliki tujuan dan sasaran guna mewujudkan adanya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta mampu memenuhi hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Unit Pelayanan Perizinan Terpadu, maka terbentuklah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Magelang, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, BP2T dan Satpol.

Dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, murah, cepat, transparan, pasti, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, Kepala BP2T Kota Magelang telah mengeluarkan Instruksi Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang Nomor: 060/22/370/2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang telah diterbitkan pula Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang Nomor 067/67/370/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perilaku Pegawai Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang. SOP Perilaku pegawai ini memberikan panduan bagaimana pegawai dapat melayani pelanggan dengan baik, sesuai kaidah-kaidah pelayanan prima. Untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, maka pelayanan perizinan dapat dilakukan secara paralel. Hal ini ditegaskan dengan Instruksi Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang Nomor 503/121/370/2009 tentang Pelaksanaan Pelayanan Paralel Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Dalam bidang perizinan, dapat disampaikan bahwa berbagai inovasi dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintah utamanya dalam meningkatkan kinerja pelayanan. Hal ini menuntut adanya peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat, lebih menyederhanakan jumlah dan jenis perizinan serta mempermudah dan mempersingkat prosedur perizinan. Berkaitan dengan peningkatan pelayanan

terhadap masyarakat, Pemerintah Kota Magelang melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu telah menyelenggarakan bentuk pelayanan satu pintu terhadap berbagai macam perizinan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ini yang menangani perijinan terpadu, yaitu BP2T (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) yang menangani 31 Perijinan dan 1 Non Perijinan.

Beberapa inovasi pelayanan telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan perizinan, diantaranya pemutihan IMB dengan persyaratan yang disederhanakan dan dengan biaya/retribusi yang murah, Pelayanan Izin Pangkalan LPG 3 kg berdasarkan Peraturan Walikota Magelang No. 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pendistribusian Tabung Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram di Kota Magelang, dilaksanakan secara gratis serta adanya penyederhanaan pelayanan perizinan, Program standarisasi ISO 9001:2008 sejak tahun 2010. Program ini dilaksanakan dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan perizinan yang sesuai dengan sistem manajemen mutu/kualitas.

Tabel II.120
Indikator Kinerja (Outcome)

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Ketersediaan SOP bidang perizinan dan pelayanan umum	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyelesaian aduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang, 2011-2015

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sudah sesuai dengan target akhir periode RPJMD Kota Magelang (tahun 2015).

B. Kerjasama Daerah

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing secara kolaboratif juga dilakukan melalui kerjasama daerah. Hal ini dilakukan agar terbentuk suatu hubungan yang mutual benefit baik itu antar daerah, dengan pihak ketiga dan berupaya menyelaraskan program program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Provinsi Jawa Tengah melalui Purwomanggung dimana Kota Magelang sebagai PKW. Selaian itu manfaat kerjasama daerah ini adalah terjadinya tranfer pengetahuan, kapasitas fiskal dan teknologi. Hal yang belum dijajagi dan dilakukan antara lain kerjasama dengan Kota Lain dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia. Hal ini perlu dikaji dengan serius agar dalam era hubungan yang semakin global ini Kota Magelang tetapa dapat berjalan sejajar dengan kota kota lain yang selevel dari mancanegara.

C. Pengawasan

Dalam upaya menuju terciptanya *good government*, maka penting adanya efektivitas dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini

dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

Untuk mencapai tujuan dari organisasi secara optimal, maka diperlukannya aspek manajemen suatu organisasi tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu pula pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Informasi tersebut dapat digunakan untuk Sebagaimana pada Ketetapan Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka Pengawasan merupakan aspek penting dalam manajemen kepegawaian, melalui Sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/46/M.PAN/4/2004, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah ditegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur terpenting dalam rangka peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Tabel II.121
Indikator Kinerja (Outcome)

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Hasil opini BPK untuk Laporan Keuangan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

Sumber: Inspektorat Kota Magelang, 2011-2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan 2015 belum sesuai dengan target akhir periode RPJMD Kota Magelang (tahun 2015) yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP). Terkait dengan hasil opini tersebut, pemerintah harus mengupayakan untuk mendapat hasil opini wajar tanpa pengecualian. Pada tahun 2015, jumlah temuan BPK RI sebanyak 23 temuan dan jumlah rekomendasi sebanyak 59 rekomendasi. Penyelesaian tindak lanjut sebanyak 59 rekomendasi dengan rincian 22 tindak lanjut selesai dan 37 tindak lanjut masih dalam proses. Selanjutnya untuk kepatuhan dan sistem pengendalian intern akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK RI.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Pengertian daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menetapkan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan daya saing daerah di dasarkan pada analisis terhadap potensi dan identifikasi faktor pembentuk daya saing daerah. Terkait dengan hal tersebut daerah harus mampu untuk mencari dan mengenali potensi dan identifikasi faktor pembentuk dan penentu daya saing daerah yang akan dikembangkan dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah, Kondisi daya saing daerah akan berpengaruh terhadap daya tarik investasi daerah. Daya saing yang relatif rendah tentunya akan menyebabkan daya tarik investor yang akan melakukan investasi di daerah menjadi relatif kecil begitu pula sebaliknya. Berangkat dari hal tersebut di atas perlu adanya upaya Pemerintah untuk meningkatkan daya saing

daerah dengan mengoptimalkan potensi dan kemampuan daerah melalui kebijakan-kebijakan, program dan kegiatan yang dapat meningkatkan/ mengembangkan daya saing dan keunggulan petensi daerah.

Selain kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah, Pemerintah daerah harus memperhatikan hal-hal yang dapat menghambat peningkatan daya saing diantaranya korupsi, birokrasi pemerintahan yang tidak efisien, infrastruktur yang tidak memadai bagi pengembangan investasi di daerah, ketidakstabilan politik, keamanan dan ketertiban di daerah, tenaga kerja yang tidak terdidik, etika kerja yang buruk, inflasi, peraturan pajak, buruknya pelayanan birokrasi di daerah dan lain sebagainya. Aspek Daya Saing Daerah merupakan salah satu Indikator Kinerja Daerah, dimana aspek ini mempunyai tiga fokus yaitu :

- a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah;
- b. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur;
- c. Iklim Berinvestasi
- d. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Survey daya saing daerah yang di selenggarakan oleh Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Propinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Budi Santoso Foundation (BSF), Kantor Bank Indonesia (BI) Semarang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Jawa Tengah, Lembaga Kerja Sama Teknis GTZ melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah dan Wilayah (Local and Regional Economic Development-LRED) dan Suara Merdeka, menetapkan Kota Magelang di peringkat pertama sebagai Kota berdaya saing tertinggi di antara Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Tengah. Survei ini melibatkan 2.100 responden, mencakup 1.995 responden dari kalangan pengusaha (57 pengusaha per kota/kabupaten) dan 105 responden dari pejabat pemerintah (tiga pejabat pemerintah per kabupaten/kota). Untuk responden pengusaha meliputi pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar.

Survey daya saing daerah ini menilai daya saing Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dengan tujuh katagori yang mempengaruhi daya saing dan daya tarik investasi daerah sebagai berikut :

- Kinerja pemerintahan;
- Lingkungan usaha,;
- Infrastruktur;
- Sumber Daya Manusia ;
- Kesehatan;
- Pendidikan;
- Pasar Keuangan;

Keberhasilan Kota Magelang meraih peringkat pertama tersebut karena didongkrak oleh tiga kategori dari tujuh kategori di atas yakni persepsi iklim usaha, kinerja pemerintah dan infrastruktur. Daya saing suatu daerah bisa mempengaruhi beberapa iklim seperti lingkungan usaha menjadi kuat. Sebagaimana daya saing pada indikator lingkungan usaha, dipengaruhi oleh kemudahan perizinan usaha dan daya tarik investasi yang relatif tinggi. Kinerja pemerintahan memegang peranan penting dalam penentuan daya saing daerah seperti mempermudah proses perizinan dan kejelasan RTRW agar investor dengan mudah menanamkan investasi ke suatu daerah. Kajian daya tarik tersebut didasarkan pada persepsi para pengusaha yang mempunyai usaha di daerah baik pengusaha lokal, nasional maupun multinasional dan menyimpulkan bahwa daya tarik investasi daerah (KPPOD, 2006) dipengaruhi oleh: a).Kelembagaan yang meliputi kepastian hukum, aparatur dan pelayanan, kebijakan daerah dan kepemimpinan lokal; b). Keamanan, politik dan sosial budaya; c).Ekonomi daerah yang

meliputi potensi ekonomi dan struktur ekonomi; d)Tenaga kerja yaitu ketersediaan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. e). Infrastruktur fisik baik ketersediaan/ kualitas infrastruktur

Keberhasilan tersebut memacu Pemerintah Kota Magelang untuk tetap mempertahankan peringkat tersebut dengan terus berupaya memperbaiki dan melakukan pembenahan dari sisi layanan yang kurang

bagus, meningkatkan kemudahan pelayanan dan menyederhanakan perizinan investasi serta mengevaluasi berbagai hambatan bagi masuknya investor di Kota Magelang. Selain hal tersebut di perlukan berbagai terobosan untuk lebih mempublikasikan Kota Magelang pada tataran regional, nasionalbahkan internasional

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator yang dipergunakan untuk mengukur aspek kemampuan ekonomi daerah adalah pendapatan per kapita dan tingkat pemerataan pendapatan karena dua hal ini mencerminkan kemampuan daerah untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya secara merata di mana pendapatan yang tinggi tidak hanya di miliki oleh sebagian kecil masyarakat tapi juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di Kota Magelang. Peningkatan pendapatan perkapita penduduk akan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat apabila di imbangi dengan adanya pemerataan pendapatan.

Pendapatan penduduk selama rentang waktu beberapa tahun ini berdasarkan harga berlaku menunjukkan trend yang meningkat. PDRB per kapita Kota Magelang merupakan angka bruto yang masih mengandung komponen pajak, penyusutan dan transfer (BPS, 2014. PDRB Kota Magelang 2014). Pada Tahun 2014 dengan jumlah penduduk tengah tahun sebesar 120.674 jiwa, PDRB per kapita penduduk sebesar Rp, 4.085.270,- per bulan atas dasar harga berlaku dan sebesar Rp. 3.444.111,- per bulan atas dasar harga Konstan. Angka ini tumbuh 9.59% dari tahun 2013 atau tumbuh secara riil sebesar 4.07%. Prediksi untuk tahun 2015 baik berdasarkan harga konstan maupun berlaku menunjukkan trend yang meningkat. Tabel di bawah ini merupakan table Pendapatan per kapita penduduk Kota Magelang dengan jumlah penduduk tengah tahun berdasarkan perhitungan BPS dengan menggunakan tahun dasar 2010 sebagai berikut:

Tabel II.122
PDRB Per Kapita Kota Magelang Tahun 2010-2015(menggunakan tahun dasar 2010)

Uraian	2011	2012	2013*	2014**	2015***
Jumlah Penduduk pada tengah tahun (jiwa)	118.443	119.210	119.647	120.158	120.615
PDRB Per Kapita atas dasar Harga Berlaku (Rp/kapita/tahun)	37.641.932,95	41.086.815,37	44.732.069,37	49.023.243,20	43.216.359,11
Pertumbuhan adhb (%)	10.95	9.15	8.87	9.59	8.55
PDRB Per Kapita atas dasar Harga Konstan (Rp/kapita/tahun)	35.880.665,48	37.695.912,71	39.712.625,31	41.329.337,22	43.020.847,03
Pertumbuhan adhk (%)	5.76	5.06	5.35	4.07	4.09

Sumber: Analisis PDRB Kota Magelang, 2015

Keterangan: *Angka sementara

**Angka sangat sementara

***Angka prediksi derivative

Tingkat pemerataan pendapatan di Kota Magelang dalam beberapa tahun ini yang direpresentasikan melalui indeks gini menunjukkan tren yang semakin meningkat. Indeks Gini dalam rentang tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 berada di kisaran 0.3. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan masyarakat di Kota Magelang masih menyisakan permasalahan yang berupa distribusi pendapatan yang belum merata. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari prosentase pengeluaran non makanan. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka pola konsumsi masyarakat akan bergeser ke konsumsi non makanan.

Tabel II.123
Tabel Perbandingan Indeks Gini, Konsumsi Non Makanan, LPE dan Pengeluaran Per Kapita Riil Kota Magelang Tahun 2011-2015

Tahun	Gini Rasio	Konsumsi Non Makanan (%)	Konsumsi Makanan (%)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pengeluaran Per Kapita Riil (Rp. 000)
2015	0.34-0.38	54,39	45,61	4.09	880.508
2014	0.36	55,64	44,36	4.07	787.022
2013	0.33	54,87	45,13	5.35	757.919
2012	0.37	57.53	42,47	5.06	822.561
2011	0.34	53.83	46,17	5.76	653.780

Sumber: BPS Kota Magelang, 2016

Dari tabel di atas, maka apabila didasarkan dengan teori kesejahteraan dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat konsumsi non pangannya $\geq 50\%$, menunjukkan kondisi rumah tangga yang baik sedangkan apabila tingkat konsumsi non pangannya menunjukkan nilai 20-49% menunjukkan kondisi sedang dan \geq menunjukkan kondisi yang buruk. Tingkat konsumsi non pangan masyarakat Kota Magelang sejak tahun 2010 menunjukkan tren yang meningkat di atas 50% sehingga apabila di dasarkan dari teori di atas, dapat di golongkan ke dalam kondisi rumahtangga yang baik.

Kemampuan Ekonomi Daerah juga dapat direpresentasikan melalui produktivitas total daerah yang tercermin pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sembilan sektor atau lapangan usaha:

Tabel II.124
PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK dan ADHB Tahun 2010-2012 dan Prediksi Tahun 2013-2015 (2010=100 dalam Juta Rupiah)

PDRB	2010	2011	2012	2013*	2014**	2015***
PDRB adhb	4.010.718,17	4.464.559,10	4.887.646,47	5.356.307,45	5.915.830,84	6.510.371,85
PDRB adhk	4.010.718,17	4.255.662.20	4.484.268,07	4.755.269,18	4.987.376,46	5.241.660,00

Sumber : Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang, 2016

Indikator selanjutnya dari aspek kemampuan keuangan daerah adalah jumlah bank dan lembaga keuangan non bank yang ada di Kota Magelang. Keberadaan lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank tersebut diharapkan akan mampu mencukupi kebutuhan pembiayaan masyarakat dan mendukung perekonomian daerah khususnya dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Magelang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan luas wilayah 18.12 km², pada tahun 2015 Kota Magelang mempunyai 50 lembaga keuangan perbankan (cabang dan unit lembaga perbankan) yang terdiri dari 4 lembaga bank milik pemerintah (14 cabang dan unit), 2 lembaga perbankan milik daerah (6 cabang dan unit) serta 30 bank

swasta yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Magelang. Berdasarkan jenis, bank yang ada di Magelang meliputi 40 Bank Umum (*commercial Bank*), 7 Bank Perkreditan Rakyat (*Rural Bank*) dan 3 Bank Syariah (*Islamic Bank*).

Terkait dengan lembaga keuangan Koperasi yang ada di Kota Magelang pada tahun tahun 2015 terdapat 217 koperasi yang terdiri dari 3 Koperasi Konsumen dan 214 Koperasi simpan pinjam. Apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya maka terdapat peningkatan jumlah Koperasi yang ada, dimana tahun 2013 jumlah koperasi di Kota Magelang sebanyak 201. Di bawah ini disajikan tabel jumlah bank dan jumlah lembaga keuangan non bank yang dalam hal ini adalah lembaga keuangan koperasi yang ada di Kota Magelang sebagai berikut:

Tabel II.125
Banyaknya Koperasi di Kota Magelang Berdasarkan Jenis Usaha dan Jumlah Anggota
Tahun 2012- 2015

No	Jenis Koperasi	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
		Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota		Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota		Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota		Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota	
			*	**		*	**		*	**		*	**
1	Konsumen	2	31	58	2	31	58	2	31	58	3	33	58
2	Produsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Simpan Pinjam	199	50	34.559	196	50	35.767	205	50	38.719	214	50	38.745

Sumber: Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang, 2012-2015

Keterangan: *Koperasi
**Perorangan

Dalam rangka pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha Pemerintah perlu memberikan bantuan atau umpan balik seperti adanya fasilitasi yang akan dikelola bersama untuk meningkatkan kemampuan menciptakan lapangan kerja dan pedapatan, selain itu juga diperlukan implementasi pinjaman dana bergulir bagi koperasi secara efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Guna mencapai target jumlah koperasi aktif tersebut maka selain dilakukan revitalisasi koperasi, bisa juga dilakukan reorganisasi koperasi yang sudah dibubarkan menjadi kelompok – kelompok usaha bersama (KUBE) yang telah terbentuk di masyarakat atau yang sudah berstatus pra koperasi. Pengawasan dan pembinaan koperasi yang sudah aktif dan berkembang juga perlu dilakukan oleh Pemerintah melalui tahap ofisialisasi yaitu mendukung perintisan pembentukan Organisasi Koperasi.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Fokus Kedua dari Aspek daya Saing Daerah adalah Fokus Fasilitas Wilayah atau ketersediaan Insfrastruktur yang memadai di daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kota Magelang mempunyai kedudukan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kota Magelang menjadi PKW untuk Kawasan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung yang diistilahkan sebagai Kawasan PURWOMANGGUNG.

Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a) Pusat pelayanan keuangan/bank yang melayani beberapa kabupaten;
- b) Pusat pengolahan/pengumpul barang yang melayani beberapa kabupaten;
- c) Simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;
- d) Pusat pemerintahan yang melayani beberapa kabupaten;
- e) Pusat pendidikan yang melayani beberapa kabupaten;
- f) Pusat kesehatan yang melayani beberapa kabupaten; dan
- g) Pusat Perdagangan dan Jasa umum lain yang melayani beberapa kabupaten

. Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Kota Magelang meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana sistem perkotaan terdiri dari beberapa sistem, yakni pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan, sedangkan rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kota Magelang meliputi rencana sistem prasarana utama dan rencana sistem prasarana lainnya. Sistem pusat-pusat pelayanan terdapat dalam tiap-tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) yang mana masing-masing mempunyai fungsi tertentu.

Ketersediaan sarana prasarana wilayah yang didukung dengan infrastruktur yang memadai baik kualitas dan kuantitasnya yang memadai serta persebarannya yang merata akan menumbuhkan daya tarik dan daya saing daerah sehingga diharapkan akan memberikan nilai lebih atau keunggulan kompetitif yang bersifat dinamis bagi Kota Magelang disamping keunggulan kompetitif statis yang sudah dimiliki sejak lama terkait dengan kondisi geografis Kota Magelang yang letaknya sangat strategis. Ketersediaan sarana prasarana wilayah dan infrastruktur yang terus dibenahi oleh Pemerintah Kota Magelang meliputi sarana perkotaan yaitu sarana pendidikan, kesehatan, permukiman, perdagangan, sarana perhubungan darat, serta sarana rekreasi dan olah raga. Prasarana perkotaan meliputi prasarana permukiman; prasarana perhubungan; prasarana jaringan, yang terdiri dari jaringan drainase perkotaan, jaringan irigasi, serta jaringan utilitas lainnya; serta prasarana persampahan.

Salah satu sarana prasarana wilayah yang di sediakan pemerintah dan swadaya masyarakat dalam rangka mendukung perwujudan Kota Religius adalah ketersediaan tempat - tempat ibadah. Kecukupan sarana prasarana peribadatan di bandingkan dengan jumlah penduduk ini menjadi modal bagi Pemerintah daerah dalam menjamin dan memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat dalam melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang di akui oleh Pemerintah. Dalam memberikan pelayanan lebih bagi masyarakat Kota Magelang dan dalam rangka mendukung Kota Religius maka di perlukan adanya Religius Centre yang akan menjadi pusat – pusat kajian keagamaan dan pemberdayaan umat bagi masyarakat di Kota Magelang dan terkait dengan hal tersebut dalam perencanaan lima tahun ke depan, Pemerintah Kota Magelang sudah merencanakan keberadaan dari Religius Centre tersebut dengan target minimal 2 religius centre .

Data dari Departemen Agama Kota Magelang yang tersaji di dalam Profil Daerah Kota Magelang 2015 menyajikan data ketersediaan tempat ibadah di Kota Magelang sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel II.126
Sarana Peribadatan di Kota Magelang Tahun 2011 – 2015

Jenis Tempat Ibadah	2011	2012	2013	2014	2015
Masjid	153	153	153	153	153
Langgar / Mushola	269	269	269	269	269
Gereja Kristen	33	33	33	33	33
Gereja Katholik/Kapel	3	3	3	3	3
Pura /Kuil/Sangah	1	1	1	1	1
Vihara/Cetya/Klenteng	1	1	1	1	1

Sumber: Profil Daerah Kota Magelang 2015

2.4.2.1 Sistem Perkotaan Kota Magelang

Rencana sistem perkotaan terdiri dari sistem pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan. Struktur atau sistem pusat pelayanan merupakan kegiatan-kegiatan fungsional yang mendukung pengembangan Kota Magelang. Kegiatan fungsional sebagai elemen pengisi ruang kawasan diarahkan pengembangannya agar mampu mendukung fungsi-fungsi pengembangan kawasan.

Bagian ini akan menjelaskan sistem pusat pelayanan yang ada dalam struktur ruang Kota Magelang. Sistem pusat-pusat pelayanan Kota Magelang memiliki cakupan sebagai berikut:

- a) Pusat Pelayanan Kota Magelang, mempunyai cakupan pelayanan seluruh wilayah Kota Magelang dan Regional yaitu Kawasan PURWOMANGGUNG sebagai *hinterland*. Mempunyai makna sebagai fungsi pelayanan eksternal. Pusat pelayanan Kota ditetapkan di BWK I yang terdapat di sebagian Kelurahan Cacaban, sebagian Kelurahan Panjang, sebagian Kelurahan Kemirirejo, dan sebagian Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, yaitu Kawasan Alun-alun Kota Magelang, deliniasi kawasan ada dalam peta pembagian BWK Kota Magelang.
- b) Subpusat Pelayanan Kota Magelang, direncanakan mempunyai cakupan pelayanan subwilayah kota dan terutama mempunyai skala pelayanan kota atau sebagai pengungkapan fungsi kawasan dalam memberikan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kawasan atau masing-masing bagian wilayah kota (fungsi pelayanan internal) adapun pembagian sub pusat pelayanan Kota Magelang meliputi:
 - 1) Sub Pusat Pelayanan Kota BWK II yaitu Kawasan Kebonpolo terdapat di Kelurahan Wates dan Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara.
 - 2) Sub Pusat Pelayanan Kota BWK III yaitu Kawasan Taman Kyai Langgeng terdapat di Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah dan Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan.
 - 3) Sub Pusat Pelayanan Kota BWK IV yaitu Kawasan Sukarno-Hatta, terdapat di Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan.
 - 4) Sub Pusat pelayanan kota di BWK V terdapat di Kelurahan Kramata Utara, Kecamatan Magelang Utara yaitu Kawasan Sidotopo.
- c) Pusat Lingkungan mempunyai cakupan pelayanan skala lingkungan wilayah di Kota Magelang. Pusat lingkungan merupakan pusat pelayanan skala lingkungan di Bagian Wilayah Kota, meliputi:
 - 1) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK I
 - kesatu yaitu Kawasan Karesidenan yang terdapat Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah dan
 - kedua yaitu Kawasan Rejowinangun terdapat di Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan.
 - 2) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK II:
 - kesatu yaitu Kawasan Tuguran yang terdapat di Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara.

- kedua yaitu Kawasan Urip Sumohardjo terdapat di Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara.
- 3) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK III:
- kesatu yaitu Kawasan Taman Parkir yang terdapat di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan.
 - kedua yaitu Kawasan Karet terdapat di Kelurahan Jurangombo Selatan.
- 4) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK IV:
- kesatu yaitu Kawasan Soka yang terdapat di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan.
 - kedua yaitu Kawasan Canguk terdapat di Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah.
- 5) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK V:
- kesatu yaitu Kawasan Menowo yang terdapat di Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara.
 - kedua yaitu Kawasan Sambung yang terdapat di Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara.

2.4.2.2 Sistem Pergerakan Wilayah Kota Magelang

Untuk mendukung fungsi PKW, Pemerintah Kota Magelang harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat, dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atau investor dengan penyediaan sarana dan prasarana. Fasilitas Wilayah yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan merupakan aspek yang sangat penting dalam mengelola kawasan perkotaan

Ketersediaan sarana prasarana wilayah yang didukung dengan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang memadai serta persebaran yang merata akan menumbuhkan daya tarik dan daya saing daerah. Hal ini diharapkan akan memberikan nilai lebih atau keunggulan kompetitif yang bersifat dinamis bagi Kota Magelang disamping keunggulan kompetitif statis yang sudah dimiliki sejak lama terkait dengan kondisi geografis Kota Magelang yang letaknya sangat strategis.

Transportasi merupakan salah satu elemen perkotaan yang tidak dapat dipisahkan, dan menjadi struktur utama pembentuk kawasan perkotaan. Transportasi menjadi tumpuan aktivitas masyarakat dalam beraktivitas serta pengembangan ekonomi dan sosial wilayah perkotaan sehingga pengembangan transportasi menjadi prioritas penanganannya. Pemerintah Kota Magelang mempunyai komitmen dalam peningkatan kualitas jalan.

Di Kota Magelang terdapat beberapa jaringan jalan primer yaitu Jalan Ahmad Yani, Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Urip Sumoharjo yang menjadi jalan penghubung utama antara 2 (dua) Kota yang berperan sebagai PKN, yaitu Semarang dan Yogyakarta. Jalur ini memiliki tingkat intensitas pergerakan yang cukup tinggi, khususnya untuk angkutan bus dan angkutan barang. Sementara itu, untuk jaringan jalan di dalam kota yang memiliki intensitas tinggi antara lain adalah Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda, Jalan Sudirman, dan Jalan Ikhlas. Penyebab adanya intensitas tinggi di kawasan ini karena adanya pusat pelayanan kegiatan masyarakat yang memiliki daya tarik tinggi seperti sarana perdagangan dan pendidikan serta adanya parkir on street.

Tabel II.127
Kondisi Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi, Fungsi dan Status di Kota Magelang
Tahun 2013 - 2015

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Panjang jalan berdasarkan kelas			
a. Jalan Nasional	13,512	13,512	13,512
b. Jalan Provinsi	3,92	3,92	3,92
c. Jalan Kabupaten/ Kota	77,964	77,964	77,964
Jenis Permukaan Jalan			
a. Aspal	84.306	84.306	116.352

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
b. Kerikil			-
c. tanah			-
d. Tidak di rinci	8.763	9.633	-
Panjang jalan berdasarkan kondisi			
a. Jalan baik	33.812	38.345	59.638
b. Jalan sedang	29.708	29.169	33.367
c. Jalan rusak	26.543	23.454	21.563
d. Jalan rusak berat	3.006	2.971	1.784
Panjang jalan berdasarkan fungsi			
a. Jalan arteri	2,574	2,574	2,574
b. Jalan kolektor	10.938	10.938	10.938
Status Jalan			
a. Kabupaten/Kota	77,964	77,964	77,964
b. Nasional	13,512	13,512	13,512
c. Provinsi	3,920	3,920	3,920
Kelas Jalan			
a. Kelas I	-	-	-
b. Kelas II	-	-	-
c. Kelas III	-	-	-
d. Kelas IIIA	-	-	-
e. Kelas IIIB	-	-	-
f. Kelas IIIC	84.306	84.306	116.352
g. Tidak Dirinci	8.763	9.633	-

Sumber : Kantor DPU Kota Magelang, Profil Daerah Kota Magelang dan Kota Magelang dalam Angka Tahun 2013-2015

Dasar : Keputusan Walikota Magelang nomor 621/120/112/2015 tentang Penetapan Status Ruas – ruas jalan Kota dan Jembatan Kota Magelang

Kota Magelang mempunyai Terminal Tidar yang berfungsi sebagai pusat sistem pergerakan angkutan darat yang didukung dengan beberapa terminal pendukung atau sub terminal, dengan skala pelayanan kota.

Sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Terminal Tipe A yaitu Terminal Tidar mulai Tahun 2016 pengelolaannya diserahkan Provinsi. Sedangkan untuk Kota Magelang hanya mengelola Terminal Tipe C. Keberadaan Terminal Type C sekarang ini belum memenuhi syarat sesuai dengan aturan, kedepan perlu ada pembangunan terminal Type C sesuai standar.

Pengembangan Terminal Tipe C yaitu Terminal Kawasan Kebonpolo, Terminal Kawasan Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo, Terminal Kawasan Canguk, Terminal Kawasan Sambung, Terminal Kawasan Iklas, dan Terminal Kawasan Jalan Kalimas.

Sedangkan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi, yaitu Terminal Angkutan Barang berada di Jalan Sukarno-Hatta Kelurahan Tidar Utara, belum berfungsi sebagai terminal barang. Kedepan perlu ada pengembangan Terminal Barang yang melayani bongkar muat dan pergudangan.

Keberadaan angkutan umum juga sangat mendukung system pergerakan wilayah, Salah satu jenis angkutan umum yang beroperasi di Kota Magelang adalah angkutan perkotaan yang melayani 12 rute yang berkapasitas 12 penumpang, saat ini jumlah angkutan umum yang tercatat masih beroperasi adalah sebanyak 335.

Tabel II.128
Rute Angkutan Kota Berdasarkan Nomor Trayek

No Trayek	Titik Awal	Titik Akhir	Rute
Jalur 1	Terminal Kebonpolo	Terminal Kebonpolo	Terminal Kebonpolo – Jl.A.Yani – Jl.Alun-alun Selatan – Jl.Mayjen Sutoyo – Cacaban – Jl.Diponegoro – Taman Kyai Langgeng – SMA 4 – Jl.P.Senopati – Pakelan – Jl.Gatot Subroto – Akmil – Jl. Tentara Pelajar – Jl.Alun-alun Barat – Jl.Yos Sudarso – Kl.Veteran – Jl.Pahlawan – SMP 1 – Taman Badakan – Tuguran – Menowo – Jl.A.Yani – Sub Terminal Kebonpolo
Jalur 2	Terminal Ikhlas	Terminal Ikhlas	Terminal Ikhlas – Jl.Ikhlas – Shopping – Jl.Tidar – RSU – Universitas Muhammadiyah Magelang – Jl.Gatot Subroto – Akmil – Pakelan – Jl.Sarwo Edi – Jl.Sudirman – Sub Terminal Ikhlas
Jalur 3	Sub Terminal Ikhlas	Sub Terminal Ikhlas	Sub Terminal Ikhlas – Jl.Ikhlas – Shopping – Jl.Tidar – RSU – Universitas Muhammadiyah Magelang – Jl.Tentara Pelajar – Jl.Alun-alun Barat – Jl.Yos Sudarso – Jl.Veteran – Jl.Pahlawan – SMP 1 – Taman Badakan – Tuguran – Jl.Kapten Suparman – Jl.Perintis Kemerdekaan – Perum Korpri (Ngembik) – Jl.Rambutan – Kupatan – Jl.A.Yani – Menowo – Sub Terminal Kebonpolo – Jl.A.Yani – Jl.Majaphit – Jl.Sriwijaya – Jl.Singosari – Jl.Beringin I – Jl.Beringin IV – Sub Terminal Ikhlas
Jalur 4	Terminal Tidar	Terminal Tidar	Terminal Tidar – Jl.Soekarno Hatta – Canguk – Jl.Urip Sumoharjo – RST – Sub Terminal Kebonpolo – Jl.A.Yani – Jl.Alun-alun Selatan – Jl.Pemuda – Shopping – Jl.Jend. Sudirman – Jl. Soekarno Hatta – Terminal Tidar
Jalur 5	Terminal Tidar	Terminal Tidar	Terminal Tidar – Jl.Soekarno Hatta – Jl.Sarwo Edi – Pakelan – Jl.Mayor Human– Jl.Sultan Agung– Jl.P.Senopati – SMA 4 – Taman Kyai Langgeng–Jl.Cempaka– Jl.Diponegoro – Jl.Pahlawan – SMP 1 – Taman Badakan – Tuguran – Jl.Kapten Suparman – Universitas Tidar – SMP 11 – Gor Samapta – Jl.Jeruk Timur – Jl.A.Yani – Menowo – Sub Terminal Kebonpolo – Jl.A.Yani – Jl.Majapahit – Jl.Sriwijaya–Jl.Singosari– Jl.Beringin I–Jl.Beringin IV – Jl.Jend.Sudirman – Jl.Soekarno Hatta – Terminal Tidar
Jalur 6	Terminal Tidar	Terminal Tidar	Terminal Tidar – Jl.Soekarno Hatta – Jl.Jend.Sudirman – Sub Terminal Ikhlas – Jl.Ikhlas – Shopping – Jl.Tidar – Jl.Tentara Pelajar – Jl.Alun-Alun Barat – Jl.Yos Sudarso – Jl.Veteran – Jl.Pahlawan – Smp 1 – Taman Badakan – Tuguran – Menowo – Jl.A.Yani –Sub Terminal Kebonpolo – Jl.A.Yani – Jl.Pemuda – Jl.Sriwijaya – Jl.Singosari – Jl.Jend.Sudirman – Jl.Soekarno Hatta – Terminal Tidar
Jalur 7	Terminal Tidar	Terminal Tidar	Terminal Tidar – Jl.Soekarno Hatta – Jl.Sarwo Edi – Pakelan – Jl.Gatot Subroto – Akmil – Jl.Tentara Pelajar – Jl.Sutopo – Jl.Diponegoro – Cacaban – Jl.Veteran– Jl.Majapahit – Jl.Sriwijaya – Jl.Medang – SMA 3 – Jl.Kalingga – Jl.Taruma Negara– Jl.Sriwijaya – Jl.Telaga Warna–Jl.Gelangan– Komplek Rindam – Jl.Kesatrian Kulon –RST–Jl.A.Yani–Jl.Pemuda–Shopping–Jl.Jend.Sudirman–Jl.Soekarno Hatta– Terminal Tidar
Jalur 8	Terminal Tidar	Terminal Tidar	Terminal Tidar – Jalan Soekarno Hatta – Canguk–Jl.Telaga Warna– Jl.Sriwijaya– Jl.Singosari – Jl.Beringin I – Jl.Beringin IV – Sub Terminal Ikhlas– Jl.Ikhlas – Shopping – Jl.Tidar – Jl.Tentara Pelajar – Jl.Panjaitan–Cacaban–Jl.Diponegoro– Jl.Pahlawan– SMP 1 – Taman Badakan – Tuguran – Menowo – Jl.A.Yani – Pasar Kebon Polo –
Jalur 9	Sub Terminal Kebonpolo	Sub Terminal Kebonpolo	Sub Terminal Kebonpolo–Jl.A.Yani–Jl.Majapahit–Jl.Sriwijaya – Jl.Singosari– Jl.Beringin I– Jl.Beringin IV –Jl.Jend.Sudirman–Jl.Soekarno Hatta–Terminal Tidar– Canguk–Jl.Urip Sumoharjo– RST –Sub Terminal Kebonpolo
Jalur 10	Terminal Tidar	Terminal Tidar	Terminal Tidar – Jl.Soekarno Hatta – Jl.Jend.Sudirman – Sub Terminal Ikhlas – Jl.Ikhlas – Shopping – Jl.Tidar – Jl.Tentara Pelajar – Jl.Alun-alun Barat – Jl.Yos Sudarso – Jl.Veteran – Jl.Pahlawan – SMP 1 – Taman Badakan – Tuguran – Menowo – Jl.A.Yani – Kupatan – RSJ – Sambung – Rsj – Kupatan – Jl.A.Yani – Menowo – Sub Terminal Kebonpolo – Jl.A.Yani – Jl.Majapahit – Jl.Sriwijaya – Jl.Singosari – Jl.Beringin I – Jl.Beringin III – Jl.Soekarno Hatta – Terminal Tidar
Jalur 11	Terminal Tidar	Terminal Tidar	Terminal Tidar – Jl.Soekarno Hatta – Canguk – Jl.Urip Sumoharjo – RST – Sub Terminal Kebonpolo – Jl.Sumba – Jl.Buton – Jl.Kalimas – Menowo – Jl.A.Yani – Kupatan – Perum Armada Estate – Perum Depkes Kramat – Perum Armada Estate – Kupatan – Jl.A.Yani – Menowo – Sub Terminal Kebonpolo – Jl.A.Yani – Jl.Majapahit – Jl.Sriwijaya – Jl.Singosari – Jl.Beringin I – Jl.Beringin VI – Jl.Soekarno Hatta – Terminal Tidar

No Trayek	Titik Awal	Titik Akhir	Rute
Jalur 12	Sub Terminal Ikhlas	Sub Terminal Ikhlas	Sub Terminal Ikhlas – Jl.Ikhlas – Jl.Suprpto – Perum Tidar Indah – Hero Swalayan – Jl.Tidar – Jl.Tentara Pelajar – Jl.Alun-alun Barat – Jl.Alun-alun Utara – Jl.Pemuda – Shopping – Jl.Jend Sudirman – Jl.Soekarno Hatta – Jl.Tidar Campur – Tidar Salakan – Dampit – Tidar Salakan – Jl.Tidar Campur – Jl.Beringin II – Jl.Beringin IV – Sub Terminal Ikhlas

Selain angkutan kota, dikota Magelang juga dilalui angkutan perbatasan sejumlah 173 angkutan perbatasan dengan rincian jumlah armada pada masing-masing trayeknya adalah sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.129
Trayek dan Jumlah Armada Angkutan Perbatasan di Kota Magelang

No	Trayek	Jumlah Armada
1	Magelang-Payaman-Secang	21
2	Magelang-Tanjung-Kalinegoro	12
3	Magelang-Blondo-Borobudur	6
4	Magelang-Blabak-Muntilan	29
5	Magelang-Sorobayan-Tegalrejo	23
6	Magelang-Secang-Grabag	15
7	Magelang-Secang-Pirikan-Grabag	23
8	Magelang-Panca Arga-Salaman	12
9	Magelang-Canguk-Candimulyo-Petung-Krakal-Pogalan	7
10	Magelang-Muntilan-Salam	22
11	Magelang-Tegalrejo-Ngablak	3

2.4.2.3 Sistem Prasarana Jaringan Sumber Daya Air

Sumber daya air di Kota Magelang terdiri dari dua yaitu Sungai dan Sumber Mata Air. Kota Magelang dibatasi juga oleh dua sungai yang cukup besar yaitu Sungai Elo di sebelah Timur dan Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Elo di sebelah timur yang masuk dalam Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak. WS Progo-Opak-Serang memiliki luas total 4.993,85 km² yang terdiri dari DAS Progo, Opak, Serang, Tangsi, Elo, Oyo. Sungai Progo menurut hasil penelitian geologi yang dilakukan PDAM Kota Magelang didapat bahwa aquifer terdapat di kedalaman 10 – 30 m dan 90 – 120 m, dengan total panjang 138 Km dan luas DAS seluas 2.380 Km². Sementara itu didalam kota sendiri dilalui oleh 2 saluran Kali Manggis dan Kali Bening yang membelah Kota Magelang dari utara ke selatan yang merupakan kesatuan wilayah irigasi Saluran Progomanggis-Kali Bening dengan luas 3.663 Ha.

Sumber air bersih yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Magelang berasal dari 7 sumber dan hanya satu yang berlokasi di wilayah Kota Magelang, yaitu sumber air Tuk Pecah. Sumber air lainnya berlokasi di wilayah Kabupaten Magelang, yaitu mata air Kalimas I, mata air Kalimas II, mata air Wulung, mata air Kalegen, mata air Kanoman I, dan mata air Kanoman II. Sumber air di Kota Magelang juga dimanfaatkan untuk sistem irigasi yang berasal dari aliran Kalli Bening dan Kali Manggis yang membelah Kota Magelang dari utara ke selatan Prasarana irigasi di Kota Magelang terdiri dari 5.000 m saluran irigasi Kali Kota, 9.700 m saluran irigasi Kali Manggis, dan 7.850 m saluran irigasi Kali Bening.

Prasarana air bersih di Kota Magelang telah manjangkau ke 17 Kelurahan. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sebagian besar penduduk mendapatkan layanan air bersih dari Perusahaan Air minum Kota Magelang. Sampai dengan saat ini kondisi mata air di Kota Magelang cukup banyak, namun yang harus mulai dipikirkan oleh

Pemerintah adalah tidak seluruhnya mata air dimanfaatkan dengan baik ketika kebutuhan permukiman meningkat, bahkan terdapat mata air yang ditutup untuk bangunan. Kondisi ini cukup memprihatinkan di mana tingkat kebutuhan air bersih cukup tinggi seiring dengan pertumbuhan penduduk. Selain itu perlunya peningkatan kualitas dari saluran-saluran air agar tidak terjadi kebocoran sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tidak terganggu.

Sistem jaringan air bersih di Kota Magelang terbagi menjadi sistem perpipaan dan sumur air dalam. Sistem perpipaan dikelola oleh PDAM dengan jumlah pelanggan pada tahun 2015 sebanyak 24.652. Jumlah ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tingkat penggunaan air bersih 7.434.942 liter/ tahun. Selain penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan, di Kota Magelang juga masih terdapat masyarakat yang menggunakan sistem penyediaan air bersih melalui sumur air tanah sementara prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih/Pelanggan PDAM sebesar 58,03%, sedangkan sisanya mendapatkan air bersih dari beberapa hidran umum air bersih yang disediakan Pemerintah Kota Magelang. Sebagian lainnya dengan memanfaatkan mata air baik yang diambil dari sumur maupun dari sumber-sumber mata air lainnya.

Beberapa upaya pengembangan sistem jaringan air bersih antara lain adalah sebagai berikut: Pengoptimalan sumber mata air yang sudah ada, Revitalisasi jaringan air bersih perpipaan dan penyediaan sumber pengaliran air bersih komunal seperti *hydrant* pada pusat-pusat kegiatan dan permukiman.

Tabel II.130
Jumlah Pelanggan Air Minum, Total Pemakaian Air Minum, Jumlah Rumah Tangga dan Prosentase RT yang menggunakan air bersih di Kota Magelang Tahun 2010 - 2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Pelanggan Air Minum	22.658	23.280	23.396	23.785	24.289	24.652
Total Pemakaian Air (m ³)	7.721.631	7.652.245	7.202.615	7.507.332	7.405.096	7.434.942
Jumlah Rumah tangga	38.490	39.672	40.623	41.246	41.853	42.433
Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (Pelanggan PDAM Kota Magelang)	58.87%	58.61%	57.59%	57.67%	58.03%	58.10%

Sumber: Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang, Kota Magelang Dalam Angka Tahun 2016, Profil Kota Magelang tahun 2014 (jumlah Rumah Tangga Sumber Kantor Dispenduk Capil) data diolah

2.4.2.4 Prasarana Persampahan

Sistem jaringan persampahan di Kota Magelang dikelola oleh Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup (DPLH). Sistem pengangkutan sampah dilakukan melalui 2 tahap yaitu dari rumah tangga dan kegiatan lain ke transfer Depo/ TPS dan dari TPS ke TPA. Pengangkutan sendiri dibagi menjadi dalam beberapa jenis angkutan antara lain adalah Becak Sampah, Dump Truck dan Mini Truck. Tempat Pembuangan Sampah Akhir Kota berada di Kabupaten Magelang tepatnya di wilayah Desa Banyuurip Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang

Selain dilihat dari aktivitas yang menghasilkan sampah, bentuk produksi sampah di Kota Magelang dapat diidentifikasi berdasarkan persentase jenisnya. Jumlah persentase sampah terbesar berupa sampah organik 71,56%. Hal ini menunjukkan kondisi yang cukup baik, karena sampah organik merupakan sampah yang mudah untuk terurai. Sementara untuk bahan non organik yang paling banyak menjadi sampah adalah sampah plastik dengan persentase 9,63%.

Sistem pengangkutan yang dilakukan dikelola oleh beberapa pihak antar lain adalah Dinas Pertamanan dan Tata Kota Magelang, Kelurahan, dan Dinas Pasar. Sistem pengangkutan yang dilakukan diawali dengan

pengelolaan sampah oleh rumah tangga atau kegiatan lain secara swadaya untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan sampah dengan gerobak/ truk sampah. Kawasan merupakan kawasan yang seluruhnya dilalui oleh sistem pengangkutan gerobak sampah, sehingga sistem pembuangan sampah di wilayah ini dapat dikatakan cukup baik. Sampah yang diangkut dengan menggunakan gerobak sampah kemudian diangkut ke TPS atau Transfer Depo, dan dilanjutkan dibawa ke TPA.

Tabel II.131
Prosentase Sampah Terangkut Tahun 2010 – 2015

Tahun	Volume	Terangkut	Prosentase
2015	160.58	136.75	85.16
2014	139.39	118.54	85.04
2013	217.92	186.72	85.68
2012	208.85	172.45	82.57
2011	193.94	164.78	84.96
2010	207.18	170.06	82.08

Sumber: 1. DKPTK Kota Magelang, 2015
2. Kota Magelang dalam Angka Tahun 2015

Jumlah TPS di Kota Magelang ada 13 buah, sementara jumlah transfer depo ada 12 buah. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Sementara transfer depo adalah tempat yang digunakan untuk mentransfer sampah dari gerobak sampah ke truk sampah, sehingga seharusnya di transfer depo tidak terdapat sampah. Jumlah prasarana TPS dan Transfer depo Kota Magelang sebagaimana table berikut:

Tabel II.132
Lokasi TPS dan Transfer depo

No.	TPS	Transfer depo
1	Maluku (Kebonpolo)	Pasar Cacaban
2	Depok	Kyai Langgeng
3	Getuk Marem	Jl. Tarumanegara
4	Jurangombo	Telagawarna
5	Perum Korpri	Pasar Gotong Royong
6	Dalangan	Jl. Sunan Giri
7	Karet	Tidar Baru
8	Cacaban	Lapangan Rindam
9	Sanden	Sekretariat Pemkot
10	Kuncen	Lapangan Parkir MT
11	Magersari	Meteseh
12	Sidotopo	Pajang
13		Shopping/BCA
	12 Lokasi	13 Lokasi

Meningkatnya volume sampah dan keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah industry menyebabkan masalah pengelolaan sampah di Kota Magelang menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Magelang. Hal ini ditambah dengan telah habisnya umur pakai TPSA Banyu urip sehingga saat ini Kota Magelang dalam keadaan darurat sampah dan harus mencari alternatif lain yang akan di jadikan sebagai lokasi TPSA. Terkait permasalahan di bidang pengelolaan

persampahan, Pemerintah Kota Magelang sudah melakukan beberapa terobosan dan inovasi seperti pembentukan Kampung Organik dan membudayakan 3R untuk memaksimalkan usia TPA. Namun upaya dari Pemerintah ini perlu mendapat dukungan dari masyarakat utamanya dalam meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah domestik. Perlunya mengoptimalkan kembali kegiatan kegiatan yang sudah ada seperti kampung organik, 3R, pengomposan skala rumah tangga dan bank sampah serta sosialisasi dan penyuluhan mengenai reduksi volume sampah rumah tangga.

Sampai dengan Tahun 2015 di Kota Magelang telah berdiri kelompok bank sampah dan kampung organik sebanyak 118 unit dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.133
Kampung Organik

No	Lokasi	Nama
1	RW 4 Tidar Utara	Makmur Bumi Lestari
2	RW 2 Tidar Utara	Tidar Asri
3	RW 7 Tidar Utara	
4	RW 13 Tidar Utara	
5	RW 9 Rejowinangun Utara	Manunggal
6	RW 19 Rejowinangun Utara	
7	RW 6 Cacaban	Jambon Asri
8	RW 8 Cacaban	
9	RW 9 Sukorini Cacaban	Sukorini Makmur
10	RW 6 Panjang	Seruni
11	RW 1 Panjang	
12	RW 8 Kemirirejo	Kantil Berseri
13	RW 7 Kemirirejo	Cempaka jauhari
14	RW 3 Kemirirejo	
15	RW 5 Potrobangsari	Mekar
16	RW 1 Potrobangsari	
17	RW 7 Kramat Utara	Wanita Karyo
18	RW 4 Kramat Utara	Husada Sari
19	RW 3 Kramat Utara	
20	RW 4 Kramat Selatan	Wanita Sejahtera
21	RW 3 Kramat Selatan	Anom indah organik
22	RW 6 Kramat Selatan	
23	RW 7 Kedungsari	Arum Sari
24	RW 9 Kedungsari	Barito Organik
25	RW 6 Kedungsari	Melati Putih
26	RW 7 Rejowinangun Selatan	Wijaya Kusuma
27	RW 4 Rejowinangun Selatan	
28	RW 9 Rejowinangun Selatan	
29	RW 4 Rejowinangun Selatan	Karding Asri
30	RW 5 Gelangan	Makarti Mulyo
31	RT 4 RW 5 Gelangan	Anggrek Jaya
32	RT 3 RW 3 Gelangan	Murni asri
33	RW 2 Magelang	Guyub Rukun
34	RW 7 Magelang	Green Kopen
35	RW 6 Magelang	
36	RW 12 Magersari	Tunas Mekar Sari
37	RW 1 Magersari	
38	RW 11 Magersari	SIPP

No	Lokasi	Nama
39	RW 9 Jurangombo Selatan	Mekarsari
40	RW 5 Jurangombo Selatan	
41	RW 1 Jurangombo Selatan	Pengajian Ibu-ibu Al Hikmah
42	RW 7 Jurangombo Utara	Sapta Datu
43	RW 2 Jurangombo Utara	
44	RW 6 Jurangombo Utara	Adem Ayam
45	RW 8 Tidar Selatan	Ketepeng Mulia
46	RW 7 & 9 Tidar Selatan	Ketepeng Mulia
47	RW 10 Tidar Selatan	
48	RW 4 Tidar Selatan	Mardi Rukun
49	RW 8 Wates	Legok Makmur
50	RW 7 Wates	Kartini
51	RW 2 Wates	
52	RW 9 Wates	

Tabel II.134
Bank Sampah Kota Magelang

No	Nama	Lokasi
Kec. Magelang Selatan		
1	Makmur Bumi Lestari	RW 4 Malangan Kel. Tidar Utara
2	Tidar Asri	RW 2 Kiringan Kel. Tidar Utara
3	Harapan Bunda	RW 7 Tidar Krajan Kel. Tidar Utara
4	Limbah Sari	RT 6 RW 2 Kiringan Kel. Tidar Utara
5	Maju Lancar	RT 1 RW 9 Trunan Kel. Tidar Selatan
6	Mardi Rukun	RT 1 RW 4 Tidar Warung Kel. Tidar Selatan
7	Lumbung Sampah Sejahtera	RT 3 RW 5 Tidar Warung Kel. Tidar Selatan
8	Soya Mekar	RW 1 Tidar Selatan
9	Sapto Datu	RW 7 Jagoan Kel. Jurangombo Utara
10	Sejahtera	RW 8 Jurangombo Utara
11	Gebalan Asri	RW 2 Jurangombo Utara
12	Kajeng Makmur	RW 3 Jurangombo Utara
13	Bersehati	RW 5 Jurangombo Selatan
14	Berlian	RW 2 Jurangombo Selatan
15	Ngudi Raharjo	RW 4 Karanggading Kel. Rejowinangun Selatan
16	Satu Pager	RW 9 Paten Gunggung Kel. Rejowinangun Selatan
17	Edelweis	RW 11 Paten Gunggung Kel. Rejowinangun Selatan
18	Srikandi	Paten Tegal RT 3 RW 8, kel. Rejowinangun Sel
19	Sekar Asri	Karanggading RT 01 RW 2, kel. Rejowinangun Sel
20	Wijaya Kusuma	Karangkidul RT 02 RW 7, kel. Rejowinangun Sel
21	Cempaka	RW 10 Rejowinangun Selatan
22	Ismoyo Makmur	RW 9 Rejowinangun Selatan
23	SIPP	RW 11 Tidar Baru Kel. Magersari
24	Maju Makmur	RW 12 Tidar Baru Kel. Magersari
25	Jempol	RW 7 Magersari
Kec. Magelang Tengah		
1	Manunggal	RW 9 Jaranan Kel. Rejowinangun Utara

No	Nama	Lokasi
2	Bina Asri	RW 20 Rejowinangun Utara
3	Kantil Berseri	RW 8 Kel. Kemirirejo
4	Cempaka Jauhari	RW 7 Kel. Kemirirejo
5	Puspa Mekar Serasi	RW 3 Kemirirejo
6	Anggrek Bersinar	RW 4 Kemirirejo
7	Anggrek Jaya	RW 5 Kel. Gelangan
8	Berseri	RT 2 RW 3 Kwayuhan Kel. Gelangan
9	Dawis Perumda 3 Cacaban	Perumda Cacaban RT 1 RW 11 Kel. Cacaban
10	Arum Sari	RW 1 kauman, Kel. Cacaban
11	Mawar Merah	RT 3 / RW 9 Kel. Cacaban
12	Bersama	RW 1 Panjang
13	Seruni	RW 3 Panjang
14	Guyup Rukun	RW 2 Tulung Kel. Magelang
15	Resik Becik	RT 5 Botton Kel. magelang
	Bangkit Mandiri	Tulung

Kec. Magelang Utara

1	Wanita Sejahtera	RW 4 Bodongan Kel. Kramat Selatan
2	Anom Indah Organik	RW 3 Kel. Kramat Selatan
3	Asri	RW 10 Perum Kopri, Kel. Kramat Selatan
4	Sayap Ibu	Sanden RW 8, Kel. Kramat Selatan
5	Husada Sari	Perum Depkes Blok C RW 4 Kel. Kramat Utara
6	Seneng Makmur	RW 1 Kramat Utara
7	Mapan	RT 5, RW 8 Kramat Utara
8	Melati	Perum Depkes Blok D RW 3, Kel. Kramat Utara
9	Kartini	RW 7 Pinggirejo Kel. Wates
10	Legok Makmur	RT 1 RW 8 Kalisari Kel. Wates
11	Kuncup Mekar	RW 2 Kel. Wates
12	Mekar	RW 5 Kel. Potrobangsari
13	Girli Indah	RW 1, Kel Potrobangsari
14	Barito Jaya	RT 3 RW 9 Kel. Kedungsari
15	Sari Makmur	RT 3 RW 1 Menowo Sari, Kedungsari
16	Resik Asri	RT 6 RW 1 Menowo Sari, Kedungsari

BANK SAMPAH DI INSTANSI / SEKOLAHAN

No	Nama Instansi	Instansi / Sekolah
1	DWP KLH	Kantor LH Kota Magelang
2	Bank Sampah 17	SMK 17
3	SMKN 1	SMKN 1
4	Pasar Kebonpolo	Pasar Kebonpolo
5	SMPN 2	SMPN 2
6	SMPN 9	SMPN 9
7	SMPN 13	SMPN 13
8	SMPN 1	SMPN 1
9	SMAN 4	SMAN 4

Sejak dicanangkannya Kampung Organik di Kota Magelang oleh Walikota pada tahun 2013, perkembangan kampung organik cukup baik. Perkembangan Bank Sampah dan kampung organik di Kota Magelang sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.135
Kampung Organik Dan Bank Sampah

NO	TAHUN	KAMPUNG ORGANIK	BANK SAMPAH
1	2011		1
2	2012		3
3	2013	13	18
4	2014	41	38
5	2015	57	64

Konsep pengembangan Kampung Organik di Kota Magelang :

1. Pengelolaan Sampah Mandiri
Pengelolaan sampah rumah tangga dengan kegiatan pemilahan, pengomposan, bank sampah serta kerajinan daur ulang.
2. Ketahanan Pangan Mandiri
Pemenuhan kebutuhan pangan sehat keluarga dengan memanfaatkan hasil pengelolaan sampah untuk sumber pangan organik.
3. Ketahanan Ekonomi
Menambah penghasilan dari hasil pertanian, perikanan, peternakan serta kerajinan daur ulang.

Kampung Organik diklasifikasikan menjadi 3 yaitu :

1. Tahap Pemula , dengan Fase kegiatannya :
 - Kelompok yang tercatat secara administratif, minimal didukung dengan surat keputusan kepala kelurahan.
 - Adanya pengurus sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelompok.
 - Memiliki papan nama kelompok.
 - Melakukan sosialisasi kegiatan pada seluruh anggota.
 - Kelompok melakukan pemilahan sampah keluarga.
 - Kelompok melakukan pengolahan sampah baik organik maupun non organik.
 - Melaksanakan pengadministrasian (Hasil kegiatan dibukukan). Kelompok memiliki buku administrasi yang telah ditentukan misal buku anggota, notulen kegiatan, tamu, kas.
2. Tahap berkembang, Fase kegiatan Kampung organik pada tahap berkembang merupakan pengembangan dari kegiatan kampung organik pemula. Pada fase ini, kampung organik mampu untuk :
 - Melakukan sosialisasi di kelompok maupun masyarakat diluar kelompok .
 - Memanfaatkan hasil pengolahan sampah organik untuk menanam sayuran maupun toga untuk kebutuhan keluarga serta tanaman hias.
 - Memanfaatkan hasil pemilahan sampah non organik sebagai modal awal untuk persiapan kegiatan PKK Smart.
 - Melaksanakan pengelolaan sampah anorganik melalui Bank Sampah, Sodaqoh Sampah ataupun Barter Sampah.

3. Tahap Mandiri, Fase kegiatan kampung organik pada tahap Mandiri merupakan pengembangan dari kegiatan kampung organik Berkembang. Pada fase ini, kampung organik mampu untuk :
 - Mengembangkan pemanfaatan hasil pengolahan sampah organik untuk peternakan dan perikanan organik.
 - Mengembangkan pengolahan hasil kampung organik misalnya nugget ayam organik dan sirup jahe.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Kajian daya tarik tersebut didasarkan pada persepsi para pengusaha yang mempunyai usaha di daerah baik pengusaha lokal, nasional maupun multinasional dan menyimpulkan bahwa daya tarik investasi daerah (KPPOD, 2006) dipengaruhi oleh: a).Kelembagaan yang meliputi kepastian hukum, aparatur dan pelayanan, kebijakan daerah dan kepemimpinan lokal; b). Keamanan, politik dan sosial budaya; c).Ekonomi daerah yang meliputi potensi ekonomi dan struktur ekonomi; d)Tenaga kerja yaitu ketersediaan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. e). Infrastruktur fisik baik ketersediaan/ kualitas infrastruktur

Indikator yang dapat dipergunakan untuk merepresentasikan Fokus Iklim Berinvestasi diantaranya adalah:

Tabel II.136
Jumlah Demo dan Angka Kriminalitas Kota Magelang Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Demo/Unjuk Rasa	9	7	6	5	14
	a. Unjuk rasa bidang politik	2	0	0	0	0
	b. Unjuk rasa bidang ekonomi	7	7	1	3	2
	c. Unjuk rasa bidang lainnya	-	-	5	2	12
2	Angka Kriminalitas	18,67	10,23	6,89	8,20	10,6

Sumber : Polres Magelang Kota, 2016

Terkait dengan angka kriminalitas di Kota Magelang pada dalam 3 tahun terakhir ini terus mengalami penurunan. Pada tahun 2011 jumlah kriminalitas yang dilaporkan sebanyak 196 kasus dan menurun menjadi 192 kasus pada tahun 2012 dan 141 kasus di tahun 2013 dan sebanyak 120 kasus pada tahun 2014.

Jumlah demo atau unjuk rasa di Kota Magelang mengalami penurunan dari rentang tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Penurunan kasus unjuk rasa di Kota Magelang mengindikasikan semakin stabilnya kondisi perpolitikan di Kota Magelang. Pada tahun 2015 jumlah demo meningkat menjadi 15 . Kenaikan jumlah tidak berpengaruh pada stabilitas keamanan di Kota Magelang. Demo atau unjuk rasa yang terjadi di Kota Magelang masih dalam batas wajar sebagai penyampaian aspirasi beberapa elemen masyarakat namun demo atau unjuk rasa dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan prosedur hingga tidak mengganggu ketertiban dan tidak menimbulkan keresahan massa/merusak fasilitas umum.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam perbaikan iklim investasi melalui perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi dan dalam hal pelayanan perijinan dan non perijinan baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki peran strategis terutama dalam memberikan kemudahan dan penyederhanaan pelayanan publik. Pemerintah Kota Magelang melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu telah menyelenggarakan bentuk pelayanan satu pintu terhadap berbagai macam perijinan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ini yang menangani perijinan terpadu, yaitu BP2T (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) yang menangani 31 Perijinan dan 1 Non Perijinan.

Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Untuk itu, dalam rangka pemantapan kekuatan fiskal daerah, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah mempunyai peranan yang sangat strategis, dalam

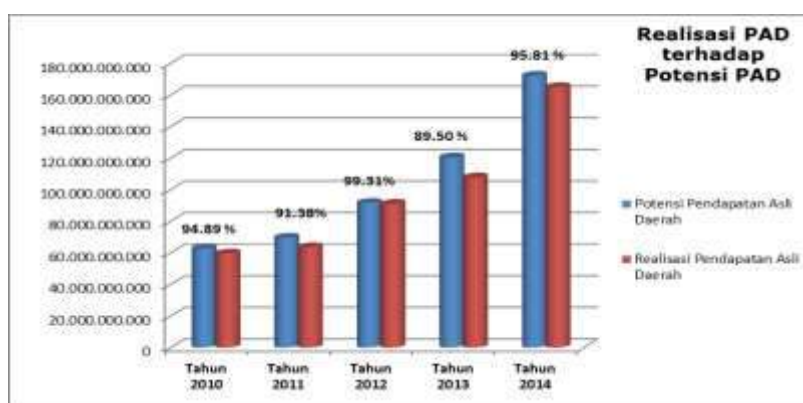
pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif.

Tabel II.137
Realisasi PAD terhadap Potensi PAD Kota Magelang Tahun Anggaran 2010-2014

TAHUN	POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	TARGET PAD (Rp)	REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	Prosentase (%)
2010	62.751.575.900, 00	45.804.070.000,-	59.546.717.600, 00	94.89 %
2011	69.552.144.480, 00	62.100.129.000,-	63.557.701.976, 00	91.38 %
2012	91.619.320.000, 00	82.457.388.000,-	90.986.601.697, 00	99.31 %
2013	120.378.596.250, 00	96.302.877.000,-	107.739.838.961, 00	89.50 %
2014	172.114.484.610, 00	124.432.498.000,-	164.906.266.142, 00	95.81%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang TA. 2010-2014 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, potensi pendapatan daerah menunjukkan tren yang positif dengan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sementara prosentase realisasi PAD terhadap Potensi PAD cukup berfluktuatif. Realisasi pada tahun 2011 sempat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010, dimana serapannya sebesar 91.38%. Prosentase ini meningkat pada tahun 2012 mendekati 100% yaitu sebesar 99.31% kemudian sempat menurun pada tahun 2013 dan meningkat kembali pada tahun 2014. Peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kota Magelang untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah dengan terus menggali potensi – potensi pendapatan yang ada di daerah sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan di daerah. Kenaikan potensi PAD Kota Magelang pada beberapa tahun terakhir dapat di lihat pada tabel berikut ini :



Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Magelang TA. 2010 - 2014 (data diolah)

Gambar 2.42
Realisasi PAD Terhadap Potensi PAD Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2010-2014

Iklim Investasi yang terus dibangun oleh Pemerintah Kota Magelang diharapkan ke depan akan berdampak pada kenaikan PAD Kota Magelang sehingga mengurangi ketergantungan pendanaan dari Pemerintah Pusat. tabel di bawah ini menyajikan kenaikan/ Penurunan PAD Kota Magelang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel II.138
Tabel Kenaikan/ Penurunan PAD Tahun 2010-2014

No	URAIAN	REALISASI PAD (Rp)	% Kenaikan / Penurunan PAD
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2010	59.546.717.600,-	24.8%
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2011	63.557.701.976,-	6.74 %
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2012	90.986.601.697,-	43.16 %
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2013	107.739.838.961,-	17.99 %
5	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2014	164.906.266.142,-	53.06 %

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang TA. 2010- 2014 (data diolah)

Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kota Magelang ada 9 macam yaitu: (i) Pajak Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan; (vi) Pajak Parkir; (vii) Pajak Sarang Burung; (viii) Pajak Air Tanah dan (ix). Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Retribusi daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Magelang meliputi tiga macam yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa usaha dan Retribusi Perizinan.

Tabel II.139
Retribusi Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Magelang

No	Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa usaha	Retribusi Perizinan
1	Retribusi Pelayanan kesehatan	Retribusi jasa usaha kekayaan daerah	Retribusi Izin mendirikan bangunan
2	Retribusi pelayanan persambahan/kebersihan	Retribusi usaha terminal	Retribusi izin gangguan
3	Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte pencatatan sipil	Retribusi tempat khusus parkir	Retribusi izin trayek
4	Retribusi Pelayanan Pemakaman	Retribusi Penyedotan kakus	Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
5	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	Retribusi rumah potong hewan	
6	Retribusi Pelayanan pasar		
7	Retribusi Pelayanan Pengujian kendaraan bermotor		
8	Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran		
9	Retribusi Penyediaan dan / atau penyedotan kakus		
10	Retribusi Pengedalian menara telekomunikasi		

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang, 2016

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia (SDM)

Indikator lain yang dapat dipergunakan untuk merepresentasikan Fokus Sumber Daya manusia adalah Indikator rasio ketergantungan penduduk. Indikator tersebut merupakan indikator yang dipergunakan untuk melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif. Angka beban tanggungan penduduk atau yang sering disebut dengan Dependency Ratio (DR) adalah perbandingan antara penduduk usia kerja dengan penduduk di luar usia kerja. Apabila Dependency Ratio menunjukkan angka yang semakin tinggi maka beban tanggungan penduduk semakin besar karena ini berarti bahwa tingkat beban yang harus ditanggung

setiap penduduk yang produktif semakin besar. Kondisi Rasio Ketergantungan di Kota Magelang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.140
Angka Beban Tanggungan Penduduk Kota Magelang Tahun 2011-2015

Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Angka Beban Tanggungan	Pertumbuhan Penduduk Usia Produktif
	0-14 th	15-64 th	≥ 65 th		
2011	27.387	82.773	8.645	43,53	-6.17
2012	27.509	83.142	8.678	4.33	0.44
2013	27.353	83.870	8.984	4.3	.88
2014	2.878	84.260	8.	43.52	0.47
2015 (prediksi)	28.137	84.389	9.053	44.07	0.15

Sumber: Kota Magelang dalam Angka, 2011-2015 (diolah)

Pada tabel di atas diperlihatkan bahwa Angka Beban Tanggungan penduduk di Kota Magelang relatif stabil walaupun berfluktuatif rendah dan masih pada kisaran angka 43. Pada tahun 2013 jumlah penduduk usia produktif di Kota Magelang tumbuh 0.88%. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi di dalam lima tahun terakhir. Namun yang perlu mendapat perhatian pemerintah selain kenaikan usia produktif adalah adanya pertumbuhan penduduk usia di atas 65 tahun yang tumbuh 3.53% lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk usia produktif sementara pertumbuhan jumlah penduduk usia 0-14 tahun mengalami penurunan 0.57%. Hal ini juga perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah untuk berupaya menyediakan lapangan kerja dan menyiapkan tenaga kerja yang produktif dan profesional sehingga mempunyai daya saing serta berupaya untuk menekan angka pengangguran

Adanya Bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penduduk usia produktif akan menjadi bonus investasi sumber daya manusia apabila Pemerintah Kota Magelang dapat memanage dengan baik sehingga hal ini akan menjadi suatu asset yang menguntungkan. Perlu adanya kebijakan melalui program, kurikulum yang responsif terhadap kearifan lokal yang dimiliki daerah atau melalui kegiatan – kegiatan yang mampu untuk membentuk generasi yang berkualitas sehingga mampu membawa kemajuan bagi Kota Magelang.

Penduduk di Kota Magelang berdasarkan data DispendukCapil pada tahun 2014 pada Daerah Dalam Angka Kota Magelang menyebutkan bahwa pada umumnya minimal sudah mengenyam pendidikan setingkat SLTA yaitu sebanyak 40.886 jiwa (31.04%) dan sudah banyak pula penduduk di Kota Magelang yang menempuh pendidikan di universitas/akademi atau sederajat sebanyak 16.475 jiwa (12.51%). Tingginya penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA menjadi tugas bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja di Kota Magelang sebagai salah satu langkah untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) sehingga tenaga kerja yang ada di Kota Magelang memiliki daya saing dan daya tawar yang tinggi. Data Dispendukcapil di bawah ini memperlihatkan statistik jumlah penduduk Kota Magelang berusia di atas 5 tahun berdasarkan pendidikan tertinggi yang di tamatkan sebagai berikut:

Tabel II.141
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Penduduk Kota Magelang Tahun 2011-2015

Tahun	S1/S2/S3	Jumlah Penduduk	Rasio per 10.000 penduduk
2011	12.315	129.556	930
2012	12.257	130.955	936
2013	12.045	130.836	921

2014	12.053	131.703	915
2015	12.105	132.261	915

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2011-2015 (diolah)

2.4.5 Perkembangan Smart City di Kota Magelang

Smart City sebagai salah satu solusi cerdas menjadi alternatif baru untuk Kota Magelang saat ini. Berbagai kemudahan diciptakan seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Solusi yang cerdas melibatkan minimal 3 (tiga) komponen, yakni teknologi, proses, dan manusia. Teknologi berperan sebagai enabler yang mempercepat terjadinya perubahan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu contoh teknologi yang saat ini terbukti dapat memberikan perubahan gaya hidup manusia di dunia. Solusi membutuhkan perubahan proses dalam beraktivitas sehari-hari. Komponen manusia dibutuhkan karena manusialah penggerak utama perubahan proses dan yang memanfaatkan teknologi tersebut.

Pada Tahun 2015 Kota Magelang meraih predikat sebagai Kota Cerdas dalam penghargaan Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015, dan meraih dua kategori penghargaan, pertama yakni menjadi peringkat pertama Kota Cerdas kategori kota berpenduduk 200.000 jiwa atau kurang, dan penghargaan kedua sebagai Kota Cerdas Ekonomi.

Tingkat kematangan smart city menurut Garuda *Smart City Model* (GSCM) akan ditentukan dari beberapa dimensi yaitu:

1. *Smart Economy*

Kota ditopang oleh perekonomian yang baik dengan memaksimalkan sumber daya/potensi kota. Kota didukung layanan TIK, tata kelola, dan peran SDM (*people*) yang baik.

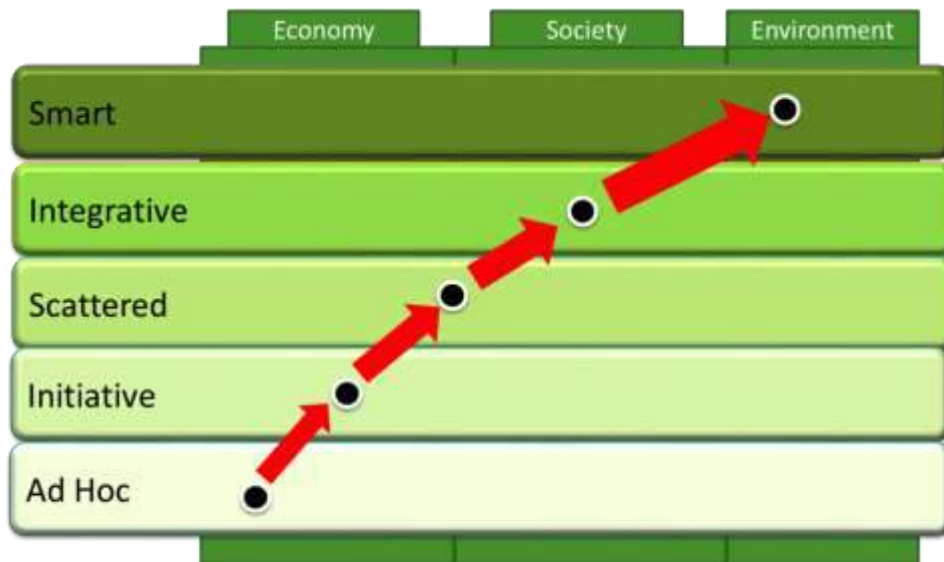
2. *Smart Social*

Masyarakat memiliki keamanan, kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan pemerintah. Interaksi sosial didukung layanan TIK, tata kelola, dan peran SDM (*people*) yang baik.

3. *Smart Environment*

Masyarakat memiliki tempat tinggal yang sehat, hemat dalam penggunaan energi serta pengelolaan energi dengan didukung layanan TIK, tata kelola, dan peran SDM (*people*) yang baik.

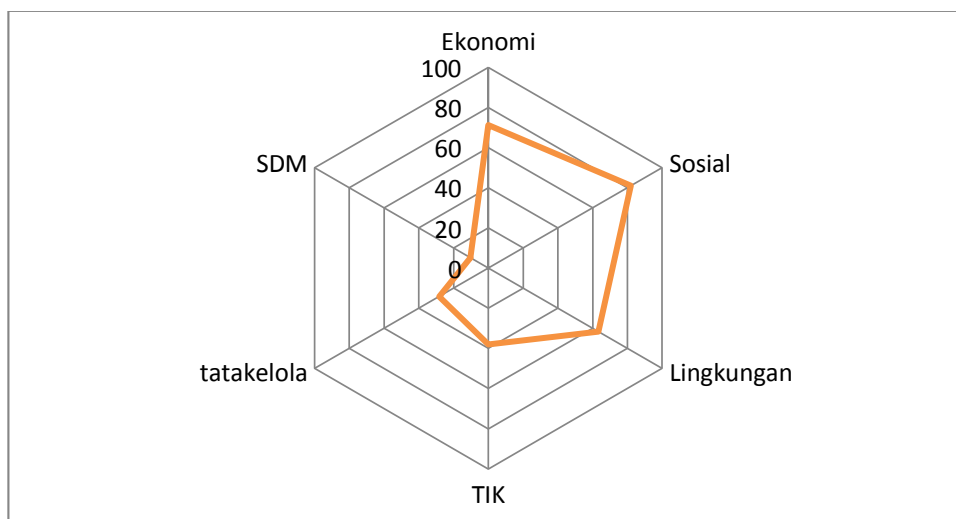
Level kematangan *smart city* ideal bagi kota atau kabupaten tersebut terdiri dari *ad hoc*, *initiative*, *scattered*, *integrative*, dan *smart*.



Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Smart City Kota Magelang, 2016

Gambar 2.43
Level Kematangan Smart City

Berdasarkan penilaian GSCM Magelang berada pada posisi *Scattered* dengan Nilai 48.89. Kondisi sosial kota Magelang memberikan kontribusi paling tinggi dengan nilai 82.04. Tingginya kondisi sosial hal ini bersumber dari baiknya pelayanan publik dan baiknya kondisi transportasi di kota ini yang memiliki nilai diatas 70. Berturut-turut selanjutnya diikuti oleh ekonomi dan lingkungan. sementara enabler yaitu tatakelola, teknologi dan sumberdaya manusia menjadi faktor dengan kontribusi terkecil. Minimnya sumberdaya manusia dan tatakelola yang baik menjadi permasalahan tersendiri di kota Magelang. secara umum gambaran penilaian kota Magelang berdasarkan GSCM terdapat pada gambar dan tabel berikut.



Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Smart City Kota Magelang, 2016

Gambar 2.44
Grafik radar dari Tingkat Kematangan Kota Magelang berdasarkan GSCM

Lebih detail dari gambar penilaian kota Magelang terdapat pada tabel dibawah berikut beberapa detail dari kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan beserta enabler dari kota Magelang.

Tabel II.142
Penilaian kota Magelang berdasar GSCM

Ekonomi	Sosial	Lingkungan	TIK	tatakelola	SDM	Total
71.36	82.04	63.37	37.97	28.3	10.31	48.89

Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Smart City Kota Magelang, 2016

2.4.5.1. Ekonomi

Secara umum dalam konteks GSCM disampaikan bahwa kondisi ekonomi kota Magelang pada posisi menengah. tidak terlalu tinggi namun secara umum cukup baik dan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Dari segi angka Pertumbuhan ekonomi kota Magelang sejak 2010 cenderung menurun, namun atas dasar harga PDRB cenderung meningkat. Tahun 2010 laju ekonomi mencapai 6.11%, tahun berikutnya 5.37% sementara untuk tahun terakhir terukur 4.88%. nilai ini masih dibawah laju ekonomi Jateng yaitu 5.42%. meskipun demikian data ini berdasar harga dasar meningkat 124%.

Perekonomian Magelang ditunjang oleh kegiatan jasa. Sebagai kota transit magelang memiliki berbagai keuntungan karena berbatasan dengan berbagai kota dengan kualitas jalan yang sangat layak untuk dilewati. Secara umum 3 besar perekonomian Magelang didukung oleh jasa konstruksi (17,12%), pengolahan (15,75%) dan perdagangan (14,88%). Sisanya pertanian, makanan dan minuman, transportasi dan lain sebagainya.

Kontribusi konstruksi, pengolahan dan perdagangan memang relative tinggi dalam menunjang PDRB kota magelang, namun di tahun 2014 sektor yang tumbuh dengan cepat dan signifikan memberikan kontribusi adalah sektor transportasi dan pergudangan. lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Transportasi & Pergudangan masih merupakan lapangan usaha yang dominan di Kota Magelang dengan potensi pengembangan ekonomi yang sangat baik. Pada tahun 2014 kedua lapangan usaha ini mampu tumbuh secara riil di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata Kota Magelang masing-masing sebesar 7% dan 8,36%. Dampak sebagai kota transit yang diapit oleh beberapa kota menyebabkan jasa pergudangan tumbuh dengan sangat pesat. Sementara keberadaan pasar sebagai salah satu penggerak roda ekonomi masih sedikit dimana rasio pasar 1: 5000 jauh dari kondisi ideal. Namun hal ini ditutup dengan keberadaan sejumlah minimarket dan pusat grosir.

Bidang pendidikan menjadi target kota magelang dalam meningkatkan kualitas masyarakat dan secara umum meningkatkan ekonomi kota. Dari sektor pendidikan kondisi kota Magelang dalam kontek GSCM sangat baik. Kota terus meningkatkan kualitas pendidikan diberbagai lini dengan berbagai program melalui sekolah percontohan, peningkatan sarana prasana sekolah dan peningkatan kualitas serta kuantitas guru. Kualitas sumberdaya manusia terus dikembangkan melalui dukungan berbagai program termasuk pemberantrasan buta huruf. Persentase ini sangat tinggi mencapai 98% dan rata-rata sekolah 10.42 tahun. Sementara tingkat kelulusan sekolah nyaris sempurna yaitu 100% untuk SD dan SMP, sementara untuk SMA 99,89%. Dampak dari nilai ini maka angka Partisipasi Murni (APM) persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama kota Magelang juga terhitung baik

Saat ini untuk meningkatkan pendidikan di Kota Magelang diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Jumlah sekolah SD sederajat yang ada di Kota Magelang pada tahun 2014 sebanyak 77 unit dengan jumlah guru sebanyak 908 orang. Jumlah sekolah SLTP sederajat sebanyak 23 unit dengan jumlah guru sebanyak 749 orang. Kemudian jumlah sekolah SLTA sederajat sebanyak 11 unit dengan jumlah guru banyak 435 orang.

Untuk melihat efektivitas pengajaran dapat digunakan rasio murid dan guru sebagai indikator. Semakin tinggi rasionya, semakin banyak murid yang harus diajar oleh seorang guru, dan ini akan mengurangi daya tangkap murid dalam menerima pelajaran sehingga tidak efektif. Rasio murid per guru di Kota Magelang tahun 2014 menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin bertambah kecil rasio murid dan guru. Pada jenjang pendidikan SD, rasio murid dan guru sebesar 17. Sementara untuk tingkat SMP dan SMA secara berturut-turut adalah 15 dan 11. Hal ini menunjukkan pada dasarnya rasio murid dan guru di kota magelang mendekati kondisi ideal.

Sektor industri dalam konteks GSCM kota Magelang memiliki kontribusi yang cukup tinggi dan terus memberikan nilai tambah laju ekonomi kota. Setiap tahun Industri kecil terus meningkat disetiap tahunnya sampai tahun 2014. 573 industri kecil tumbuh dengan menyerap sekitar 3362 karyawan. Sementara industri menengah bertambah 4 perusahaan dari tahun sebelumnya menjadi 16 perusahaan dengan daya serap pekerja 1488 orang. Perkembangan ini pun didukung dengan tumbuhnya sentra-sentra industri dengan jumlah 286 sentra ditahun 2014. Hal ini menunjukkan geliat dari industri magelang, merupakan potensi yang sangat besar untuk dimaksimalkan. Beberapa industri pengolahan diantaranya berfokus pada makanan, konveksi, kertas, kimia dan lain sebagainya. Untuk makanan telah tumbuh sentra khusus seperti sentra tahu, konveksi dan mainan anak. Sementara untuk wisata pemasukan untuk meningkatkan laju ekonomi kota masih minim, hal ini dikarenakan minimnya objek wisata yang hanya terdiri dari 7 objek wisata.

Sementara untuk pengelolaan sumber daya alam kota Magelang dapat dikatakan tidak memiliki pemasukan yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. karena memang tidak ada hasil alam khususnya tambang yang dimiliki oleh kota Magelang. Dalam PDRB tercatat 0,0% dari galian dan tambang. Sementara sisanya Sumberdaya alam yang dimiliki sebagai tambahan bersumber dari pertanian dan peternakan dengan kontribusi sekitar 2.03% dari pertanian, hutan dan peternakan. Kondisi sumberdaya yang dikelola lainnya adalah air dan listrik yang secara penuh dikelola oleh pemerintah melalui dinas terkait dan PLN. Kubikasi air terus mengalami peningkatan dengan total lebih dari 7.4 juta kubik air didistribusikan oleh PDAM. Demikian pula dengan jumlah listrik yang terus meningkat dari hari kehari dengan pemakaian lebih dari 9 juta KWh pada tahun 2014.

2.4.5.2 Sosial

Kondisi kehidupan dan interaksi social masyarakat magelang secara umum cukup baik. Hal ini dilihat dari kontribusinya yang besar dalam penilaian GSCM. Tingkat keamanan yang baik dan minim bencana serta berbagai kemudahan dalam berbagai layanan kota menjadi kan kota magelang kota yang cukup aman dan nyaman untuk dihuni

Masalah keamanan baik dari kriminalitas maupun bencana dikota Magelang pada dasarnya relative baik. Terkait keamanan, kejahatan dikota Magelang tergolong kecil dengan rata-rata 5 kejadian perminggu, dengan kata lain ada 1 hari dimana tidak ada kejahatan sama sekali dikota ini. Hal ini juga yang mneyebabkan efektifitas personil keamanan tidak terlalu banyak namun Secara umum personil keamanan dikota magelang berada pada kondisi ideal berasio 1:168. Meskipun bukan semuanya berasal dari kepolisian. Disamping personil, partisipasi masyarakat dalam keamanan dirasakan cukup baik dengan berdirinya pos-pos keamanan lingkungan (siskamling) berjumlah 262 buah. Namun hal ini sedikit berbanding terbalik dengan pelanggaran laluilintas yang sangat banyak

terjadi, pada tahun 2015 tercatat 15 ribu pelanggaran yang 12 ribu lebih didominasi oleh kendaraan roda 2. Dengan total 130 kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya atau sekitar 2 insiden kecelakaan per minggu.

Terkait dengan bencana, Magelang bukan merupakan kota rawan bencana. Bencana yang tercatat terjadi di tahun 2014 adalah kebakaran dengan 12 insiden dengan kerugian mencapai 670 juta rupiah namun tanpa adanya korban jiwa.

Kondisi kesehatan dan layanan kesehatan masyarakat Magelang pada dasarnya sudah mencukupi. Keberadaan 5 buah rumah sakit umum, 1 rumah sakit jiwa dan 2 rumah sakit bersalin serta dukungan 20 puskesmas serta 196 posyandu cukup melayani penduduk kota dalam pelayanan kesehatan mendekati rasio ideal yaitu 1:5400 (1:5000). Sementara jumlah dokter masih kurang memadai yaitu hanya 141 orang dengan rasio 1:934. Hal ini masih jauh di bawah kondisi ideal yaitu 1:500. Namun hal ini tidak terlalu menjadi masalah seiring dengan banyaknya tenaga kesehatan yang membantu pelayanan kesehatan di kota Magelang berjumlah 1247 orang.

Kondisi ini munculkan angka yang cukup baik terhadap indikator lainnya seperti: tingginya harapan hidup yang mencapai 70,74, kelangsungan hidup bayi yang terus meningkat mencapai angka 986,75 / 1000 kelahiran, angka kematian yang turun menjadi 13,25. Demikian pula untuk gizi buruk yang terus menurun jumlahnya hanya 14 orang turun 50% dari tahun berikutnya yang mencapai 28 orang.

Kondisi transportasi di kota Magelang cukup baik. Hal ini didukung dari berbagai layanan terkait pengelolaan jalan dan pengelolaan moda transportasi yang dimiliki. Magelang 93,939 km jalan dengan lebih dari 71% jalan dalam kondisi baik, 18% rusak dan 1% rusak parah atau 2 km jalan rusak parah. Sementara moda transportasi publik berjumlah 335 unit (angkot, bus dan taxi) unit sudah cukup untuk melayani masyarakat kota Magelang. Banyaknya kendaraan tidak lancar menimbulkan permasalahan kemacetan di kota ini. Masalah lain terkait lalu lintas adalah kecelakaan kondisi inipun masih minim terjadi di kota Magelang dengan jumlah yang relative sedikit yaitu 2 pelanggaran per minggu. Namun angka ini tidak didukung oleh tertibnya masyarakat yang melakukan pelanggaran sebanyak 15 ribu sepanjang tahun 2014. Pelanggaran ini lebih dari 2/3 dilakukan oleh kendaraan bermotor.

Terkait dengan layanan lain terutama untuk kepastian waktu keberangkatan dan waktu berangkat belum ada sistem yang mampu prediksi hal ini. Namun karena kota relative kecil kemampuan untuk sampai dari satu titik dan titik lain lebih mudah diprediksi dan dilakukan. Demikian pula dengan penjadwalan, beberapa kendaraan umum telah memiliki informasi khusus meskipun belum terdigitalisasi. Sistem pengawasan kota berbasis CCTV dan monitoring room telah dimiliki diskominfo.

Sama halnya dengan seluruh kota di Indonesia, kondisi layanan publik di kota Magelang diarahkan menuju standar layanan prima yang telah menjadi standar layanan publik di Indonesia. Pada konteks GSCM nilai yang didapat dari layanan publik cukup tinggi. Dimana berbagai layanan seperti perijinan, pembuatan KTP, dan lain sebagainya memiliki kejelasan terhadap waktu pembuatan, biaya, dan kualitas layanan. Berbagai layanan 1 atap dan 1 pintu mulai dikembangkan untuk melayani warga. Permasalahan yang muncul dalam bidang pelayanan publik adalah kondisi SDM yang masih dirasakan kurang dari segi kualitas dalam melayani publik. Khususnya di pengelolaan terhadap sistem layanan berbasis teknologi informasi. Sementara infrastruktur meskipun belum maksimal tapi terus dikembangkan. Jumlah SDM yang saat ini bekerja di instansi pemerintah mencapai 4.156 personil yang tersebar dalam 57 unit PD dan Kelurahan. Dari para pegawai ini 51% adalah lulusan S1, 6% S2 dan sisanya adalah D3 dan SMA. Terkait perijinan pelayanan ini Magelang telah menerbitkan sekitar 372 ijin dari

BP2T. Ijin ini didominasi oleh ijin mendirikan bangunan berjumlah 180, konstruksi 61, industri 54 dan lain sebagainya.

Hal yang masih minim dari pelayanan publik kota Magelang adalah partisipasi masyarakat yang dirasakan masih sangat minim dalam memberikan kontribusi dalam berbagai kebijakan. Hal ini mungkin muncul karena sosialisasi pemerintah yang masih belum dirasakan. Beberapa pelaporan yang dilakukan terkait masalah kota masih dilakukan secara manual, meskipun beberapa PD mulai mengembangkan berbagai aplikasi terkait permasalahan yang dialami kota yang akan direspon secara real time.

Kondisi Sosial dan interaksi masyarakat di kota Magelang cukup baik, meskipun secara digital komunitas-komunitas masih minim. Namun secara fisik karena ruang yang tidak terlalu besar memberikan dampak positif terbangunnya komunitas-komunitas untuk membangun kota. Berbagai perkumpulan muncul diantaranya berbagai organisasi masyarakat, perkumpulan olah raga dan perkumpulan seni yang terus memberikan masukan kepada pemerintah terkait masalah perkotaan. Secara digital pemerintah mendukung keterkoneksinya masyarakat dengan jaringan internet melalui beberapa fasilitas umum.

2.4.5.3 Lingkungan

Kondisi dan pengelolaan lingkungan kota Magelang cukup baik pula. Luas wilayah yang tidak terlalu besar menjadi kelebihan tersendiri dalam melakukan pengelolaan. Namun hal ini secara khusus memberikan sedikit kekurangan terutama dalam menata ruang yang relative sangat minim untuk dikembangkan. Namun dalam konteks GSCM pengelolaan lingkungan masih belum maksimal. Dimana pengelolaan dan inovasi dalam penggunaan energy masih dirasakan minim, demikian pula dengan pengelolaan lingkungan terkait pencemaran udara, air, serta pengelolaan sampah. Sementara untuk pengelolaan ruang kota Magelang memiliki kondisi yang lebih baik dengan penataan yang terus dilakukan oleh pemerintah.

Secara khusus kondisi lingkungan dapat dikendalikan, kecuali masalah sampah yang ditangani relative kecil hanya 1,3% dari seluruh masalah sampah tertangani. Masalah ini muncul karena kota hanya mampu mengangkat 85,04% dari sampah yang dihasilkan kota. Hal ini karena tidak ada TPA di kota ini. Namun demikian kondisi dapat sedikit dikurangi dengan membangun pengolahan sampah terpadu dan TPS dan pembentukan kampung organik. Selain itu peninjauan pembangunan TPA regional dengan kabupaten dan kota sekitar mulai diawasi.

Kondisi air di kota Magelang cukup baik. Namun masih ada beberapa limbah khususnya dari rumah tangga yang masih agak sulit untuk di kontrol, sementara limbah berbahaya masuk terlebih dahulu kedalam sistem pengolahan. Meskipun demikian kondisi air di kota Magelang masih baik dengan pencemaran dibawah 10%. Hal ini diketahui dengan cara manual yaitu pengujian secara rutin setahun 2 kali. Kondisi ini terus dijaga dengan berbagai program seperti pembangunan biopori diberbagai lokasi dan sumur resapan. Kondisi air bersih untuk masyarakat di kota Magelang merupakan air kelas 2 peruntukan utamanya untuk pertanian. Oleh karena itu air bersih untuk keperluan sehari-hari disuplai disediakan pemerintah dan PDAM kota Magelang dengan pemakaian 7.405.096 liter/hari. Kondisi air yang cukup baik ini didukung oleh kondisi atau kualitas udara kota yang sangat baik. Nilainya masih dibawah nilai baku udara. Disamping itu kontrol yang cukup ketat dilakukan untuk menjaga tingkat pencemaran udara kota dengan sampling mencapai 20 kali/tahun

Pengelolaan energi dikota Magelang masih belum maksimal. Sumber energi masih terletak pada bahan bakar non subsidi yaitu minyak bumi dan gas. Jumlah kendaraan dan status kota transit menjadi factor utama pemicu tumbuhnya peningkatan konsumsi BBM. Sementara untuk kebijakan maupun subsidi energi masih minim dilakukan. Beberapa kebijakan dilakukan namun masih belum memberikan kontribusi yang cukup tinggi. Penerangan jalan dengan sell surya mulai digalakan meskipun jumlahnya hanya sedikit, sekitar 10 penerangan berbasis surya dipakai di beberapa titik. Pengembangan kompor biogas yang berjalan cukup dihentikan karena polusi udara. Kebutuhan listrik warga Magelang seluruhnya dipenuhi oleh PLN kota Magelang dengan pelanggan paling banyak dari rumah tangga, usaha dan fasilitas umum yang mendominasi jumlah pemakaian Kwh. Penggunaan rumah tangga terus meningkat dengan jumlah mencapai 30.097 pelanggan dengan pemakaian mencapai lebih dari 3.8 juta Kwh di tahun 2014.

Disampaikan sebelumnya dengan luas yang relatif kecil, tataruang di kota ini mudah untuk dikendalikan. Namun disisi lain memiliki keterbatasan lahan untuk melakukan inovasi atau penambahan ruang untuk kepentingan umum. Saat ini ruang terbuka hijau di kota Magelang cukup memenuhi syarat meskipun tidak dalam kondisi ideal. 329.3 Ha merupakan 18.05% ruang terbuka hijau yang dimiliki kota ini, hampir setengah dari kondisi ideal yaitu 30%. Ruang terbuka hijau ini terdiri dari 39 taman kota, 41 titik jalur hijau dan 1 hutan kota yang pengelolaannya terus dilakukan dengan maksimal.

Secara umum tataruang cukup tertata dengan baik melalui peraturan daerah no 2 kota Magelang terkait RTRW 2011 -2031. Dimana secara umum beberapa bagian kota memiliki fungsi-fungsi umum baik untuk social , pelayanan public, fungsi bisnis dan lain sebagainya. Perubahan signifikan terjadi untuk beberapa lahan yang berubah menjadi perumahan. Menunjukkan mobilisasi penduduk melalui munculnya perumahan-perumahan. Sekitar 30.046 M2 lahan sawah dan tegalan berubah menjadi area perumahan. Namun hal ini masih terkontrol dan sesuai dengan penataan kota.

2.4.5.4 Enabler

Kondisi Enabler kota Magelang tidak terlalu tinggi. Dukungan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi mulai dikembangkan, namun dukungan dari tatakelola dan sumberdaya manusia yang masih minim mengakibatkan benefit dari keberadaan teknologi informasi dan komunikasi belum dapat dirasakan secara maksimal.

Secara umum layanan TIK di kota Magelang terus meningkat secara signifikan. Infrastruktur TIK terus dibangun dan mampu menghubungkan seluruh PD dan kelurahan yang ada di Kota Magelang. Semua satuan kerja yang ada di area pemerintahan kota dapat terhubung dengan yang lainnya, namun untuk beberapa satuan yang ada diluar kompleks beberapa masih terpisah dan belum terkoneksi satu dengan yang lainnya. Untuk mendukung konektivitas jaringan fiber optic sudah mulai merata mencapai seluruh satuan kerja, hanya implementasi integrasi dibutuhkan waktu dan biaya khusus untuk melakukan hal ini.

Untuk perencanaan dalam TIK kota memiliki arahan yang jelas melalui grand design pengembangan telematika kota Magelang. Dengan jumlah computer tercatat lebih dari 900 unit dan 2/3 lebih terkoneksi kota magelang keberadaanya sangat minim jika dibandingkan dengan pegawai yang berjumlah 4156 personil. Dengan kata lain 1 PC berbanding 4 orang. Hal ini diiringi oleh minimnya personil dengan kemampuan khusus TIK, sehingga jika terjadi kerusakan pada computer di satuan kerja harus meminta kedinas kominformasi atau pihak ke 3

untuk memperbaiki. Sama dengan kondisi infrastruktur Demikian pula dengan keberadaan berbagai aplikasi yang muncul sebagai alat bantu untuk pelayanan. Meskipun sudah mulai bermunculan dimasing-masing PD aplikasi ini banyak yang berasal dari pusat dan bukan pengembangan daerah. Dari 60 aplikasi yang dikembangkan beberapa merupakan pengembangan pusat seperti aplikasi keuangan dan surat menyurat. Beberapa belum digunakan atau berhenti digunakan karena berbagai hal seperti aplikasi input data profil, aplikasi pelaporan keuangan dan lain sebagainya. Sementara beberapa lagi hanya web bersifat informasi dan belum mendukung operasional PD.

Tatakelola sebagai enabler dalam konteks GSCM kota Magelang juga tidak terlalu tinggi, hal ini karena kota masih belum memiliki rencana jelas terkait pengembangan smart city. Arahan kota lebih mengikuti kepada RPJMD, RTRW dan Rencana Pengembangan telematika kota magelang. Hal lain yang ini adalah kepemimpinan dan kebijakan yang masih belum jelas terkait pengembangan smart city. Kota secara khusus belum memiliki organisasi dalam pengembangan smart city. Demikian pula keberadaan tenaga ahli atau organisasi khusus di tiap PD dalam pengembangan smart city. Satu-satunya satuan yang cukup kuat adalah Kominfo dengan fasilitas dan tenaga yang hampir memadai.

SDM secara khusus telah disinggung sebelumnya. Tenaga yang ada masih minim dimana kemampuan dalam teknologi khususnya mengelola teknologi informasi masih minim khususnya di level PD. Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi SDM terkait penggunaan teknologi perlu peningkatan. Pemahaman terhadap pengoperasian computer untuk pekerjaan sederhana berbasis windows dimiliki oleh ¼ pekerja. Namun khusus untuk maintenance dan tenaga ahli pengembangan system masih sangat minim. Saat ini hanya ada 25 tenaga maintenance untuk computer, 17 programmer web dan 13 programmer desktop. Bahkan masih ada beberapa PD yang tidak memiliki tenaga untuk maintenance computer. Hal ini dicoba terus ditutupi dengan berbagai pelatihan yang digalakan dilingkungan pemerintah kota magelang. Khususnya terkait penggunaan teknologi informasi.

2.5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Hingga Tahun

Berdasarkan uraian data dan analisis masing-masing urusan tersebut di atas maka dapat diketahui kondisi capaian kinerja tiap urusan hingga akhir periode RPJMD Kota Magelang (tahun 2015) sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel II.143
Rekapitulasi Capaian Kinerja Hingga Akhir Periode RPJMD Kota Magelang

Indikator	Capaian Hingga Akhir Periode RPJMD	Standar/ Target	Interpretasi
Pendidikan			
APK PAUD	63,50%	90%	(RPJMD) Belum mencapai target
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,61%	116,95%	(RPJMD) Belum mencapai target
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	74,62%	100%	(RPJMD) Belum mencapai target
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	108,15%	175,30%	(RPJMD) Belum mencapai target
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	81,92%	100%	(RPJMD) Belum mencapai target
Angka rata-rata lama sekolah SD/MI	6,13	6	(RPJMD) Melampaui target
Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs	3,03	3	(RPJMD) Melampaui target
Angka pendidikan yang ditamatkan	1,9	1,6	(RPJMD) Melampaui target

Indikator	Capaian Hingga Akhir Periode RPJMD	Standar/ Target	Interpretasi
SD/MI			
Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	2,37	2,29	(RPJMD) Melampaui target
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	0,170	0,090	(RPJMD) Melampaui target
Rasio guru/ murid	1:11	-	-
Rasio guru/ murid per kelas rata-rata	1:10:31	-	-
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	0,01	-	-
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs/ Paket B	0,37	-	-
Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A	100	-	-
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B	100	-	-
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	149,34%	135%	(RPJMD) Melampaui target
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMK/SMA/MA	81%	200%	(RPJMD) Belum mencapai target
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket B	90,76%	108,85	(RPJMD) Belum mencapai target
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket B	64,64%	142,4%	(RPJMD) Melampaui target
Angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK/MA	3	3	(RPJMD) Sesuai target
Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA	3,11	3,11	(RPJMD) Sesuai target
Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA	1:16	1:10	(RPJMD) Melampaui target
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata SMA/SMK/MA	1:11:31	1:10:31	(RPJMD) Melampaui target
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/ Paket C	0,22%	-	-
Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/ Paket C	99,97%	-	-
Angka melek huruf	97%	97%	(RPJMD) Sesuai target
Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%	97%	(RPJMD) Melampaui target
Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	98,90%	95%	(RPJMD) Melampaui target
Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	99,35%	90%	(RPJMD) Melampaui target
usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan	60%	60%	(RPJMD) Sesuai target
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	91%	100%	(RPJMD) Belum mencapai target
Rasio guru SD/ MI per 10.000 penduduk	614,30	-	-
Rasio guru SMP/ MTs per 10.00 penduduk	855,76	-	-
Rasio guru SMU/ SMK/ MA per 10.000 penduduk	908,79	-	-
APK PAUD	89,98%	90%	(RPJMD) Belum mencapai target
Kesehatan			
Angka Kematian Ibu Maternal (MMR)/100.000 KH	187,5 (3 kasus kematian ibu)	-	Indikator tambahan
Angka Kematian Balita/ AKABA (CMR)/	16,25	-	Indikator tambahan

Indikator	Capaian Hingga Akhir Periode RPJMD	Standar/ Target		Interpretasi
1.000 KH				
Angka kematian bayi per 1.000 KH	15.63	-		Indikator tambahan
Persentase balita gizi buruk	0.21%	1%	(RPJMD)	Melampaui target
Bayi dengan Asi Eksklusif	53,7 %	-		Indikator tambahan
Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).	6,06 %	-		Indikator tambahan
Angka kesakitan DBD/ 100.000 penduduk	130.93	-		Indikator tambahan
Angka Prevalensi TB/ 100.000 penduduk	128.33	-		Indikator tambahan
Angka Keberhasilan Pengobatan (Treatment Success Rate = TSR) TB	66.41%	-		Indikator tambahan
Angka prevalensi HIV AIDS pada penduduk berusia 15-49 tahun	0.038%	-		Indikator tambahan
Jumlah Kasus Penyakit Diabetes Militus (DM)	15.524	-		Indikator tambahan
Jumlah Kasus Hipertensi Essensial	21.798	-		Indikator tambahan
Rasio posyandu per 100 balita	2,36	20,18	(RPJMD)	Belum mencapai target
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.	141.75%	103% 80%	(RPJMD) (SPM)	Tercapai
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	92,41%	-		Indikator tambahan
rasio dokter per 1000 penduduk	1.37	0.995	(RPJMD)	Melampaui target
rasio tenaga paramedis per 1000 penduduk	12.26	1,936	(RPJMD)	Melampaui target
Cakupan Puskesmas	166.57%	100%	(RPJMD)	Melampaui target
Cakupan Puskesmas Pembantu (PUSTU)	70.59%	80%	(RPJMD)	Belum mencapai target
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk	23%	18%	(RPJMD)	Melampaui target
rasio Rumah sakit per 1000 penduduk	0.0579	0.08	(RPJMD)	Belum mencapai target
Angka usia harapan hidup	76.58	70.93	(RPJMD)	Melampaui target
Jumlah puskesmas santun usila	6	6	(RPJMD)	Sesuai target
Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan Masyarakat Rentan	100%	100%	(RPJMD)	Sesuai target
Cakupan pelayanan puskesmas untuk pasien masyarakat miskin.	100%	100%	(RPJMD)	Sesuai target
Cakupan pelayanan kesehatan dasar untuk pasien masyarakat miskin	148,20%	-		Indikator tambahan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	(RPJMD)	Sesuai target
Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	(RPJMD)	Sesuai target
Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	93%	100%	(RPJMD)	Belum mencapai target
Prosentase jumlah obat dan makanan yang mendapatkan uji keamanan sehingga aman dikonsumsi masyarakat (cakupan pengawasan obat dan	66%	100%	(RPJMD)	Belum mencapai target

Indikator	Capaian Hingga Akhir Periode RPJMD	Standar/ Target	Interpretasi
makanan)			
Persentase rumah tangga sehat	98%	98%	(RPJMD) Sesuai target
Posyandu Aktif	83.25%	100%	(RPJMD) Belum mencapai target
Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%	-	Indikator tambahan
Persentase sarana kesehatan milik pemerintah yang menuju universal design	0	-	Indikator tambahan
Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan	85%	-	Indikator tambahan
Persentase rumah sehat	83,43%	-	Indikator tambahan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100%	-	Indikator tambahan
Cakupan Pelayanan Nifas	99.87%	-	Indikator tambahan
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (perkiraan neonatus dengan komplikasi sebesar 15% dari total neonatus)	46.3%	-	Indikator tambahan
Cakupan kunjungan bayi	95,63%	-	Indikator tambahan
Cakupan pelayanan anak balita	88.20%	-	Indikator tambahan
Jumlah puskesmas ramah anak	0	-	Indikator tambahan
Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	A	-	Indikator tambahan
Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi	0	-	Indikator tambahan
Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan Sesuai target standar di puskesmas dan jaringannya	69.06%	-	Indikator tambahan
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	-	Indikator tambahan
Persentase rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	95.94%	-	Indikator tambahan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	100%	Tersedia	Sesuai target
Rasio jaringan irigasi	96%		
Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	94%	Tersedia	Sesuai target
Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter /orang	82,50%	Tersedia	Sesuai target
Rasio Penanganan Sampah Perkotaan (pengangkutan)	95%		
Prosentase Penanganan Sampah di	100%	100%	(RPJMD) Sesuai target

Indikator	Capaian Hingga Akhir Periode RPJMD	Standar/ Target		Interpretasi
TPSA				
Tersedianya sistem air limbah yang memadai	94%	Tersedia		Sesuai target
Proporsi Panjang Jalan Kota Magelang dengan kondisi baik	90%	90%	(RPJMD)	Sesuai target
Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota	99,67%	Tersedia		Sesuai target
Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	94,27%	Tersedia		Sesuai target
tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan Sesuai target dengan kecepatan rencana	65,59%	Tersedia		Sesuai target
Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	75%	Tersedia		Sesuai target
Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	61,12%	Tersedia		Sesuai target
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	100%	50%	(SPM)	Sesuai target
Tersedianya dokumen RTRW dan Perda RTRW 2010 -2030, RDTRK dan Perda RDTRK 2010 -2020, RTH, dan RTBL Kawasan Strategis Lingkungan Hidup (Gunung Tidar)	50%	70%	(RPJMD)	Sesuai target
Tersedianya sarana informasi Rencana tata Ruang Wilayah Kota Magelang kepada masyarakat	100%	100%	(RPJMD)	Sesuai target
Jumlah Ijin Lokasi yang Sesuai target dengan peruntukan ruang	100%	100%	(RPJMD)	Sesuai target
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	22,5%			
Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota	100%	100%		Sesuai target
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	50%	100%		Belum mencapai target
Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	100%	100%		Sesuai target
Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang Sesuai target dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota	100%	100%		Sesuai target

Indikator	Capaian Hingga Akhir Periode RPJMD	Standar/ Target	Interpretasi
beserta rencana rincinya			
Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	100%	Sesuai target
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	18,57%	20%	Belum mencapai target
Jumlah ijin pemanfaatan ruang yang Sesuai target dengan peruntukan ruang	100%	100%	Sesuai target
Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	100%	100% 75%	(RPJMD) (SPM) Sesuai target target
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
Rasio lingkungan permukiman kumuh	3,91%	44% 10%	(RPJMD SPM) Melampaui target target
Rasio rumah layak huni	92,53%	85% 100%	(RPJMD) (SPM) Melampaui target RPJMD, di bawah target SPM
Persentase rumah tinggal bersanitasi	94%	100%	(SPM) Belum mencapai target SPM
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	89,52%	-	(SPM)
Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
Angka kriminalitas	10.06	-	Indikator tambahan
Rasio Pos Kamling	15.41	14	(RPJMD) Melampaui target
Rasio siskamling aktif	0.68	-	Indikator tambahan
Tingkat partisipasi politik	75.23%	75%	(RPJMD) Melampaui target
Frekuensi koordinasi FKUB	3	3	(RPJMD) Sesuai target
Angka kriminalitas yang tertangani	11.09	14	(RPJMD) Belum mencapai target
Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	4,96	6	(RPJMD) Belum mencapai target
Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	68,79	84.62	(RPJMD) Belum mencapai target
Petugas linmas di Kota	832	1100	(RPJMD) Belum mencapai target
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketentraman, keindahan)	93.92%	50% 70%	(RPJMD) (SPM) Melampaui target
Penyelesaian Penegakan Perda	89%	-	-
Sosial			
jumlah sarana sosial (panti jompo, panti asuhan, panti rehabilitasi)	12	9	(RPJMD) Melampaui target
Prosentase penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	35.02%	12.92%	(RPJMD) Melampaui target
PMKS yang memperoleh bantuan sosial	12.92%	12.92% 80%	(RPJMD) (SPM) Standar SPM belum mencapai target, Target RPJMD Sesuai target
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak	7.7%	-	Indikator tambahan

Indikator	Capaian Hingga Akhir Periode RPJMD	Standar/ Target	Interpretasi
potensial yang menerima bantuan sosial			
Ketenagakerjaan			
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	98.55%	32% 70%	(RPJMD) (SPM) Melampaui target
Jumlah wirausaha baru	25	25	(RPJMD) Sesuai target
Tingkat partisipasi angkatan kerja	64.35%	63.20%	(RPJMD) Melampaui target
Tingkat kesempatan kerja	93,57%	-	Indikator tambahan
Tingkat pengangguran terbuka	6.43%	9%	(RPJMD) Melampaui target
Besaran tenaga kerja terlatih	80.06%	10.50%	(RPJMD) Melampaui target
Prosentase Pencapaian UMK terhadap KHL	97.54%	100%	(RPJMD) Belum mencapai target
Angka perselisihan pengusaha pekerja	9	15	(RPJMD) Melampaui target
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	66.67%	-	Indikator tambahan
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	67.08%	-	Indikator tambahan
Besaran pemeriksaan perusahaan	79,41%	-	Indikator tambahan
Besaran pengujian peralatan di perusahaan	7,41%	-	Indikator tambahan
Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak			
Rasio KDRT	0,07%	0,16%	(RPJMD) Melampaui target
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	77%	(RPJMD) Melampaui target
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	13.15%	70.03%	(RPJMD) Belum mencapai target
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	16.73%	60%	(RPJMD) Belum mencapai target
Persentase keterwakilan politik perempuan di parlemen	24%	30%	(UU) Belum mencapai target
Partisipasi angkatan kerja perempuan	55.88%	77%	(RPJMD) Belum mencapai target
Persentase tenaga kerja di bawah umur	0%	0%	Sesuai target
Pangan			
Adanya regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Sesuai target
Ketersediaan pangan utama	100%	100%	Sesuai target
Tingkat kerawanan pangan dan gizi	0,90%	8,6%	Melampaui target
Ketersediaan dan cadangan pangan			
- Ketersediaan energi (Kkal/kap/th)	2295.26	2090	Melampaui target
- Ketersediaan protein (gram/kap/th)	65.01	57	Melampaui target
Distribusi dan akses pangan			
- Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan daerah	98%	90%	Melampaui target
- Stabilitas harga dan pasokan pangan	100%	90%	Melampaui target
Panganekaragaman dan keamanan pangan			
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95%	93,70	Melampaui target
- Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100%	70%	Melampaui target

Indikator	Capaian Hingga Akhir Periode RPJMD	Standar/ Target	Interpretasi
Penanganan kerawanan pangan	100%	100%	Sesuai target
Pertanahan			
Rasio Ijin Lokasi yang sesuai dengan peruntukan ruang	0	100%	Tidak ada ijin lokasi yang diajukan
Lingkungan Hidup			
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	66,67%	75%	(RPJMD) Belum mencapai target
Rasio ketersediaan IPAL	82%	30%	(RPJMD) Melampaui target
Tersedianya Dokumen SLHD	ada	ada	(RPJMD) Sesuai target
Penegakan hukum lingkungan hidup	Tidak ada	100%	(RPJMD) Sesuai target
Jumlah industri berpotensi mencemari udara	Tidak ada	-	
Pencemaran status mutu air pada kegiatan industri	-	-	
Tersedianya NSPK pengolahan dan pembuangan Air limbah Domestik dan Industri, serta Bahan Berbahaya dan Beracun (non-fisik)	Ada		
Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran air	100%		
Prosentase (%) jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%		
Prosentase (%) prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan status kerusakannya	100%		
Prosentase (%) jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%		
Jumlah penduduk terlayani jaringan sampah	96%		
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	3,08		
Jumlah Pengolahan Sampah terpadu	2		
Kependudukan dan Catatan Sipil			
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	93,56%	100%	(RPJMD) Belum mencapai target
Rasio bayi berakte kelahiran	92.57%	100%	(RPJMD) Belum mencapai target
Rasio pasangan berakte nikah	100%	100%	(RPJMD) Sesuai target
Kepemilikan KTP	93.56%	100%	(RPJMD) Belum mencapai target
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	92.57% (923)	77.91%	(RPJMD) Melampaui target
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	ada	ada	(RPJMD) Sesuai target
Cakupan penerbitan KK	100%		
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	38.46%		

Indikator	Capaian Hingga Akhir Periode RPJMD	Standar/ Target	Interpretasi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
LPM berprestasi	17.64%	100%	(RPJMD) Belum mencapai target
Jumlah LKK dan lembaga keuangan masyarakat yang sehat dan berkualitas	24%	70%	(RPJMD) Belum mencapai target
PKK Aktif	100%	100%	(RPJMD) Sesuai target
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	(RPJMD) Sesuai target
Cakupan peserta KB aktif	77.3%	90% 70%	(RPJMD) (SPM) Melampaui target SPM, di bawah target RPJMD
Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	80%	100%	(RPJMD) Belum mencapai target
Partisipasi laki-laki dalam ber KB	8%		
Cakupan unmet need KB	5%		
Rasio petugas lapangan/penyuluh KB (PLKB) di seluruh kelurahan	1,13		
Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100%		
Perhubungan			
Jumlah sarana prasarana lalu lintas jalan raya (APPIL)	85%	85%	(RPJMD) Sesuai target
Tersedianya Sarana dan Prasarana serta fasilitas Terminal tipe A dg kondisi yg baik di Kota Magelang	80%	80%	(RPJMD) Sesuai target
Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	75%	75%	(RPJMD) Sesuai target
Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type c) yang tertata	1	1	(RPJMD) Sesuai target
Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik	90%	90%	(RPJMD) Sesuai target
Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum	95%	90%	(RPJMD) Melampaui target
Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte/Sub terminal yang ada di Kota Magelang)	15	15	(RPJMD) Sesuai target
Jumlah uji KIR angkutan umum	2.218	2.218	(RPJMD) Melampaui target
Rasio kepemilikan KIR angkutan umum	5%	30%	(RPJMD) Belum mencapai target
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	15 menit	30 menit	(RPJMD) Melampaui target
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	40.300	36.,000	(RPJMD) Belum mencapai target
Rasio ijin trayek	0.82%	0.77%	(RPJMD) Sesuai target
Jumlah arus penumpang angkutan umum	170.000	170.000	(RPJMD) Melampaui target
Komunikasi dan Informatika			
Penerapan e-Procurement (LPSE)	100%	100%	(RPJMD) Sesuai target
Penerapan e-Government yang diukur			

Indikator	Capaian Hingga Akhir Periode RPJMD	Standar/ Target	Interpretasi
dari:			
a. Jumlah PD yang menggunakan Sistem Informasi	46	46 (RPJMD)	Sesuai target
b. PD yang memiliki website	46	46 (RPJMD)	Sesuai target
c. WAN (Wide Area Network) setiap PD	75%	75% (RPJMD)	Sesuai target
d. Penggunaan software legal/ OSS di setiap PD	19,92%	100% (RPJMD)	Belum mencapai target
e. Penerapan e-procurement (LPSE)	100%	100% (RPJMD)	Sesuai target
Jumlah jaringan komunikasi operator dengan kondisi baik	8	8 (RPJMD)	Sesuai target
Jumlah sarana penyedia informasi melalui media informasi	13	13 (RPJMD)	Sesuai target
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	17	17 (RPJMD)	Belum mencapai target
Rasio wartel/wamet terhadap penduduk	0.059%	0.06% (RPJMD)	Belum mencapai target
Tersedianya / Jumlah Hot Spot pada ruang terbuka publik di Kota Magelang	5	5 (RPJMD)	Sesuai target
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
Jumlah kerja sama PES (Payment for Ecological/ environment Services = imbal jasa lingkungan	3	1 (RPJMD)	Melampaui target
Jumlah UMKM	5.012		
Jml Kelompok UMKM	43		
Jumlah bidang usaha Sektor riil yang berkembang	1400	1500 (RPJMD)	Belum mencapai target
Jumlah pelaku usaha ekonomi kerakyatan menerima akses permodalan	1300	1500 (RPJMD)	Belum mencapai target
Jumlah UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi dan terpenuhi sarana prasarana	350	350 (RPJMD)	Sesuai target
Jumlah UMKMK, Jumlah UKM non BPR/LKM UKM, Usaha mikro dan kecil	950	1000 (RPJMD)	Belum mencapai target
Jumlah UMKMK yang memanfaatkan kredit	400	400 (RPJMD)	Sesuai target target
Persentase UMKMK yang produktif	75%	70% (RPJMD)	Melampaui target
Jumlah koperasi	217	220 (RPJMD)	Belum mencapai target
Penanaman Modal			
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	983	199 (RPJMD)	Melampaui target
Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	728.813.000.000	93.584.932.514 (RPJMD)	Melampaui target
Rasio daya serap tenaga kerja	3,59	-	Indikator tambahan
Kepemudaan dan Olah Raga			
Jumlah organisasi kepemudaan	31	30 (RPJMD)	Melampaui
Jumlah kegiatan kepemudaan	20	20 (RPJMD)	Tercapai
Jumlah klub olah raga	164	180 (RPJMD)	Belum Tercapai
Jumlah organisasi olah raga	31	35 (RPJMD)	Belum Tercapai
jumlah even/ kegiatan olah raga yang diselenggarakan	34	30 (RPJMD)	Melampaui

Indikator	Capaian Hingga Akhir Periode RPJMD	Standar/ Target	Interpretasi
Jumlah prestasi olah raga dalam even Nasional	5	50 (RPJMD)	Belum Tercapai
Jumlah gedung olah raga	36	29 (RPJMD)	Melampaui
Gelanggang/balai remaja(selain milik swasta)	0	0 (RPJMD)	Sesuai
Statistik			
Tersedianya dokumen data/ informasi/ statistik daerah:			
- Buku Daerah dalam Angka	ada	Ada (RPJMD)	Sesuai target
- Buku PDRB Kota	ada	Ada (RPJMD)	Sesuai target
Cakupan data makro terupdate di DataGO	91.43%	-	Indikator tambahan
Persandian			
Tingkat ketersediaan SOP persandian	50%	-	Indikator tambahan
Tingkat Kapasitas SDM Persandian	60%	-	Indikator tambahan
Persentase PD yang mengimplementasikan SOP Persandian	30%	-	Indikator tambahan
Kebudayaan			
Jumlah festival seni dan budaya.	15	5 (RPJMD)	Melampaui target
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	35	36 (RPJMD)	Belum mencapai target
Perpustakaan			
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	44.136	39.500 (RPJMD)	Melampaui target
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	92.021	58.834 (RPJMD)	Melampaui target
Kearsipan			
Persentase PD yang melaksanakan arsip baku	100%	70% (RPJMD)	Melampaui target
Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	100%	90% (RPJMD)	Melampaui target
Pertanian			
Prosentase konservasi sumberdaya lahan dan sumber daya hayati	10%	10% (RPJMD)	Sesuai target
Prosentase pemanfaatan lahan	100%	100% (RPJMD)	Sesuai target
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB		2.91% (RPJMD)	Belum mencapai target
Jumlah jenis bidang usaha agribisnis	14	11 (RPJMD)	Melampaui target
Jumlah penggunaan benih padi bermutu	13.755	6000 (RPJMD)	Melampaui target
Rasio petani terlatih			
a. Pertanian	80%	80% (RPJMD)	Sesuai target
b. Peternakan	75%	75% (RPJMD)	Sesuai target
Penguatan kelembagaan petani:			
a. Pertanian	17	16 (RPJMD)	Melampaui target
b. Peternakan	10	10 (RPJMD)	Sesuai target
Jumlah tempat pengolahan pasca panen:			
Pertanian	1	5 (RPJMD)	Belum mencapai target
Peternakan	2	3 (RPJMD)	Belum mencapai target

Indikator	Capaian Hingga Akhir Periode RPJMD	Standar/ Target	Interpretasi
jumlah serangan OPT yang dapat diatasi	100%	100% (RPJMD)	Sesuai target
jumlah penggunaan teknologi tepat guna (Panca usaha tani)	5 paket	5 paket (RPJMD)	Sesuai target
Jumlah populasi hewan ternak:			
Unggas	253.413	76.401 (RPJMD)	Melampaui target
Domba / kambing	833	603 (RPJMD)	Melampaui target
Sapi	611	222 (RPJMD)	Melampaui target
Jumlah produksi peternakan:			
Daging (kg)	7.259.977	4.004.635 (RPJMD)	Melampaui target
Telur (kg)	45.655	379.042 (RPJMD)	Belum mencapai target
Susu (lt)	187.136	445.672 (RPJMD)	Belum mencapai target
Jumlah ternak yg diperiksa kesehatannya	7582	7582 (RPJMD)	Sesuai target
Perikanan dan Kelautan			
Rasio petani perikanan terlatih	90%	80% (RPJMD)	Melampaui target
Penguatan kelembagaan petani perikanan	17	17 (RPJMD)	Sesuai target
Jumlah tempat pengolahan pasca panen perikanan	3	3 (RPJMD)	Sesuai target
Produksi perikanan (ton)	157,17	335 (RPJMD)	Belum mencapai target
Pariwisata			
Jumlah Kunjungan wisata	1.138.454	1.119.365 (RPJMD)	Melampaui target
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	8.05%	8.0% (RPJMD)	Melampaui target
Kehutanan			
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	25 ha	25 ha (RPJMD)	Sesuai target
Konservasi kawasan hutan	69 ha	71 ha (RPJMD)	Belum mencapai target
Kerusakan kawasan hutan	0 ha	0 ha	Sesuai target
Perdagangan			
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	14.47%	-	Indikator tambahan
Jumlah penerbitan SIUP	361	-	Indikator tambahan
Nilai ekspor (juta)	Data belum rilis	-	Indikator tambahan
Nilai impor (juta)	Data belum rilis	-	Indikator tambahan
Perindustrian			
Jumlah industri	2.072	-	Indikator tambahan
Jumlah tenaga kerja sektor industri	8.730	-	Indikator tambahan
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	5.50%	5.50% (RPJMD)	Sesuai target
Transmigrasi			
Peserta transmigran yang dikirim	0	-	Indikator tambahan
Jumlah transmigran swakarsa	0	-	Indikator tambahan
Penunjang Urusan Pemerintahan			
Perencanaan pembangunan			
Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Fisik Prasarana yang berkualitas	8	6 (RPJMD)	Melampaui target

Indikator	Capaian Hingga Akhir Periode RPJMD	Standar/ Target		Interpretasi
(update dan valid)				
Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota	ada	Ada	(RPJMD)	Sesuai target
Ditetapkannya dokumen perencanaan sesuai target peraturan yang berlaku (RPJMD, RKPD)	Sesuai target	Sesuai target	(RPJMD)	Sesuai target
Keuangan				
Hasil opini BPK untuk Laporan Keuangan	WDP	WTP	(RPJMD)	Belum mencapai target
Realisasi PBB P-2	1,550,101,786	-		Indikator tambahan
Persentase Penilaian Objek Pajak Atas Bangunan	0,11%	-		Indikator tambahan
Penggunaan Instrumen Analisis Standar Biaya Perencanaan dalam Penyusunan Anggaran	73,33%	-		Indikator tambahan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				
Tingkat pelanggaran etika aparat yg mencakup:				
1. Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin	0.02%	2.11%	(RPJMD)	Belum mencapai target
2. Persentase Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 Tahun	97%	96%	(RPJMD)	Melampaui target
3. Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	6	15	(RPJMD)	Belum mencapai target
Penelitian dan Pengembangan				
Persentase penerapan hasil krenova	33,33%	-	-	Indikator tambahan
Fungsi Lain				
Ketersediaan Standar Operasional Prosedur bidang perizinan dan pelayanan umum	100%	100%	(RPJMD)	Sesuai target
Penyelesaian aduan masyarakat	100%	100%	(RPJMD)	Sesuai target
Jumlah dan macam pajak	9	7	(RPJMD)	Melampaui target

Sumber: Analisis, 2016

Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan hingga akhir periode RPJMD Kota Magelang tahun 2015 dapat dilihat bahwa terdapat indikator-indikator yang tercapai sesuai target dan melampaui target namun masih ada yang belum memenuhi target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut antara lain:

1. Ketidaktepatan dalam menentukan target (terlalu tinggi), yang diantaranya disebabkan oleh ketidaktepatan dalam menentukan formula perhitungan atau definisi operasional, sehingga secara riil sulit untuk dicapai.

Beberapa indikator tersebut adalah:

- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A dengan target 116,95% dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket B sementara angka maksimal yang dapat dicapai adalah 100% (berdasarkan definisi operasional indikator ini).

- Rasio posyandu per 100 balita dengan target 20,18, yang berarti bahwa 1 posyandu melayani hanya sebanyak 5 balita. Apabila target tersebut terpenuhi akan sangat tidak efisien karena 1 posyandu secara ideal melayani hingga 100 balita.
- Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan lembaga swasta dengan target masing-masing 70,03% dan 60%. Target tersebut tidak mungkin tercapai karena jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta maksimal adalah 100% (dari partisipasi angkatan kerja perempuan), tanpa memperhitungkan pekerja perempuan di sektor informal (yang jumlahnya kemungkinan dapat melebihi pekerja perempuan di sektor formal).

2. Keterbatasan kapasitas pemerintah

Pencapaian beberapa target kinerja juga terhambat oleh kapasitas pemerintah yang kurang memadai, dilihat dari aspek pendanaan, kebijakan maupun keterbatasan kemampuan kontrol terhadap faktor eksternal yang sangat mempengaruhi. Beberapa indikator tersebut adalah:

- Angka kriminalitas yang tertangani. Pencapaian target untuk indikator ini merupakan hasil kinerja lintas sektor, terutama kepolisian dan pengadilan sebagai pemangku kepentingan yang berwenang dalam penanganan dan penyelesaian kasus-kasus kriminalitas.
- Jumlah polisi pamong praja. Perekrutan polisi pamong praja akan membawa konsekuensi tambahan beban keuangan bagi pemerintah daerah. Selain itu kuantitas dan formasi ASN tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat.
- Persentase pencapaian UMK terhadap KHL. Besaran UMK sangat dipengaruhi oleh kondisi perusahaan dan kondisi ekonomi makro. Meskipun pemerintah memiliki peluang untuk turut menentukan UMK, melalui perangkat kebijakan, namun harus bertindak untuk menemukan keseimbangan dalam kepentingan terbaik bagi perusahaan dan pekerja

3. Kondisi fisiografi dan demografi

Selain faktor-faktor tersebut di atas, beberapa indikator kinerja sulit tercapai karena kondisi fisiografi dan demografi Kota Magelang, yaitu:

- Cakupan peserta KB aktif dengan target 90% baru tercapai 77,3%. Angka capaian ini relatif stabil pada beberapa tahun terakhir karena struktur penduduk Kota Magelang yang didominasi usia produktif dan sebagian diantaranya masih menginginkan untuk memiliki anak sehingga tidak ber KB.
- Jumlah produksi peternakan (berupa telur dan susu) dan perikanan, sulit mencapai target karena keterbatasan lahan untuk beternak dan budidaya ikan.

2.6 EVALUASI CAPAIAN KINERJA RPJMD KOTA MAGELANG HINGGA TAHUN 2015

Hasil Evaluasi capaian kinerja permisi diukur melalui seberapa jauh capaian indikator kinerja sasaran di masing masing misi. Detil capaian kinerja per misi dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2011-2015 dapat disampaikan sebagai berikut :

2.6.1 Misi 1 : Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas dan responsifitas aparatur yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan

Capaian kinerja permisi melibatkan beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Terciptanya peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran dengan baik dan tertib dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional menuju pelayanan publik yang prima
2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsive, bertanggungjawab dan akuntabel
3. Terwujudnya pelayanan publik cepat, transparan,dan adil

4. Terwujudnya perilaku aparatur yang mencerminkan nilai-nilai good governance (adil, transparan, penegakkan hukum, menghormati ham) dalam memberikan pelayanan publik
5. Terwujudnya peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
6. Diciptakannya hubungan resiprositas (timbal balik) antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, masyarakat berbasis demokrasi dan transparansi informasi (penghormatan hak asasi, penegakkan hukum, dan pemenuhan kewajiban tanggungjawab pada publik)
7. Terwujudnya peningkatan penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi semua
8. Meningkatnya ketaatan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan

Pencapaian sasaran ini melibatkan beberapa urusan antara lain : Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, Urusan Wajib Statistik Urusan Wajib Kearsipan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan Wajib Perencanaan pembangunan.

Detil capaian dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel II.144
Tabel Capaian Kinerja Indikator Sasaran Misi 1

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2015	REALISASI 2015	KET
1	Terciptanya peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran dengan baik dan tertib dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional menuju pelayanan publik yang prima	1	Rasio pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100%	●
		2	e-Government			
			- e-Procurement (LPSE)	100%	100%	●
			- Jumlah SKPD yang menggunakan Sistem Informasi	46	46	●
			- Jumlah SKPD yang memiliki website	46	46	●
			- WAN (Wide Area Network) setiap SKPD	75%	75%	●
			- Penggunaan software legal/ OSS di setiap SKPD	100%	19,92%	■
		3	Tersedianya dokumen data/ informasi/ statistik daerah:			
			- Buku Daerah dalam Angka	ada	ada	●
			- Buku PDRB Kota	ada	ada	●
		4	Persentase SKPD yang melaksanakan arsip baku	70%	100 %	●
		5	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	60%	100 %	●
		6	Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	90%	100 %	●
		7	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	85%	100 %	●
2	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsive, bertanggungjawab dan akuntabel	1	Hasil opini BPK untuk laporan keuangan	WTP	WDP	■
		2	Tingkat capaian kinerja pemerintah kota	Sangat baik	Cukup baik	■

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2015	REALISASI 2015	KET
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Memuaskan	Baik	■
3	Terwujudnya pelayanan publik cepat, transparan, dan adil	1	Penyederhanaan prosedur pelayanan publik	100%	100%	●
		2	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur bidang perizinan dan pelayanan umum	100%	100%	●
		3	Penyelesaian aduan masyarakat	100%	100%	●
		4	Tingkat kompetensi aparatur	90%	92%	●
		5	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	100%	93,56%	■
		6	Rasio bayi berakte kelahiran	100%	92,57%	■
		7	Rasio pasangan berakte nikah	100%	100%	●
		8	Kepemilikan KTP	100%	93,56 %	■
		9	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	77,91%	92,57%	●
		10	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	ada	ada	●
4	Terwujudnya perilaku aparatur yang mencerminkan nilai-nilai <i>good governance</i> (adil, transparan, penegakkan hukum, menghormati ham) dalam memberikan pelayanan publik	1	Tingkat pelanggaran etika aparat			
			- Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin	2,11%	0,02 %	■
			- Persentase Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 Tahun	96%	97%	●
			- Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	15 orang	6 orang	■
5	Terwujudnya peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	1	Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	ada	ada	●
		2	Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	ada	ada	●
		3	Dokumen RKPd yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota	ada	ada	●
		4	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Fisik Prasarana yang berkualitas (update dan valid)	6	8	●
		5	Tingkat Konsistensi Penjabaran program RPJMD kedalam RKPd	90%	90%	●
6	Diciptakannya hubungan resiprositas (timbal balik) antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, masyarakat berbasis demokrasi dan transparansi informasi (penghormatan hak asasi, penegakkan hukum, dan pemenuhan kewajiban tanggungjawab pada publik)	1	Jumlah & jenis peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik yang dikeluarkan daerah	3	3	●

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2015	REALISASI 2015	KET
7	Terwujudnya peningkatan penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi semua	1	Tingkat penyelesaian permasalahan hukum	100%	100%	●
		2	Jumlah Perda/ Raperda yang mengakomodasi masukan masyarakat	12	12	●
		3	Jumlah dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan Perda	20 kali	6	●
8	Meningkatnya ketaatan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan	1	Ditetapkannya Perda APBD tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	●
		2	Ditetapkannya dokumen perencanaan sesuai peraturan yang berlaku (RPJM, RKPD)	sesuai	sesuai	●
		3	Kesesuaian kelembagaan SKPD dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Sesuai	sesuai	●

Keterangan:

● : Target Tercapai/ melampaui target RPJMD 2011-2015

■ : Target Tidak tercapai

2.6.2 MISI 2: Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan mendorong tumbuhnya iklim investasi untuk pengembangan usaha yang mampu membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang luas bagi masyarakat

Capaian kinerja permisi melibatkan beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterpaduan sumber pendanaan baik dari pusat, provinsi dan daerah. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsive, bertanggungjawab dan akuntabel
2. Terkelolanya asset-asset daerah
3. Terciptanya kemudahan akses pendanaan melalui lembaga-lembaga keuangan serta membangun kemitraan dalam memanfaatkan skema pendanaan al: Kerjasama pemerintah dan swasta (KPS), Public Private Partnership (PPP), Corporate Social Responsibility (CSR) dan Donasi/Zakat
4. Terwujudnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
5. Terciptanya kerjasama antar daerah dalam hal investasi
6. Terciptanya iklim investasi dan realisasi investasi
7. Terwujudnya kemudahan pelayanan dalam mendorong peluang investasi di daerah
8. Terbangunnya kepercayaan/komitmen antara stakeholder dengan dunia usaha
9. Terwujudnya pengembangan infrastruktur kawasan strategis dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian kota
10. Terbangunnya kemitraan dengan memanfaatkan skema pendanaan melalui Kerjasama pemerintah dan swasta PES (Payment for Ecological/ environment Services = imbal jasa lingkungan)
11. Terwujudnya identifikasi investasi swasta
12. Menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang aksesibel dan akurat
13. Terwujudnya pembangunan BLK di tingkat Kota
14. Tercapainya peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja

15. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
16. Terwujudnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
17. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan
18. Terwujudnya peran serta dan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja
19. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pekerja
20. Terciptanya wirausaha baru
21. Terlindunginya hak-hak keselamatan tenaga kerja

Pencapaian sasaran ini melibatkan beberapa urusan antara lain : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Urusan wajib Penanaman modal daerah, Urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan wajib tenaga kerja. Detil capaian dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel II.145
Tabel Capaian Kinerja Indikator Sasaran Misi 2

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2015	REALISASI 2015	KET
1	Meningkatkan keterpaduan sumber pendanaan baik dari pusat, provinsi dan daerah.	1	Rasio dana DAK, TP, Dekonsentrasi dan dana hibah serta dana bantuan lainnya terhadap total APBD	18%	18%	●
2	Terkelolanya asset-asset daerah	1	Asset daerah yang dikelola pihak lain.	25%	25%	●
		2	Rasio nilai asset daerah yang dikelola	80%	80%	●
3	Terciptanya kemudahan akses pendanaan melalui lembaga-lembaga keuangan serta membangun kemitraan dalam memanfaatkan skema pendanaan al: Kerjasama pemerintah dan swasta (KPS), Public Private Partnership (PPP), Corporate Social Responsibility (CSR) dan Donasi/Zakat	1	Jumlah kerjasama dengan lembaga keuangan	3	8	●
		2	Jumlah kerjasama dengan swasta	ada	ada	●
		3	Jumlah dan jenis bank dan cabang	55	38	■
		4	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	11	5	■
4	Terwujudnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	1	Jumlah dan macam pajak	7	9	●
		2	Jumlah dan macam restribusi Daerah	3	3	●
5	Terciptanya kerjasama antar daerah dalam hal	1	Jumlah dan jenis kerjasama antar daerah yang berhasil dijalin	3	3	●

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2015	REALISASI 2015	KET
	investasi					
6	Terciptanya iklim investasi dan realisasi investasi	1	Bertambahnya laju pertumbuhan investasi	358	983	●
		2	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN	24.650.000.000	728.813.000.000	●
		3	Rasio daya serap tenaga kerja	36.533	3526	■
		4	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	199	983	●
		5	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	93.584.932.514	728.813.000.000	●
7	Terwujudnya kemudahan pelayanan dalam mendorong peluang investasi di daerah	1	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	2	3	●
		2	Lama proses perijinan	2 hari	2,56	■
8	Terbangunnya kepercayaan/komitmen antara stakeholder dengan dunia usaha	1	Jumlah investor dan nilai investasi baru yang masuk (nasional & regional)	3	3	●
9	Terwujudnya pengembangan infrastruktur kawasan strategis dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian kota	1	jumlah pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	3	4	●
10	Terbangunnya kemitraan dengan memanfaatkan skema pendanaan melalui Kerjasama pemerintah dan swasta PES (Payment for Ecological/ environment Services = imbal jasa lingkungan)	1	Jumlah kerja sama PES (Payment for Ecological/ environment Services = imbal jasa lingkungan)	1	3	●
11	Terwujudnya identifikasi investasi swasta	1	Jumlah investasi swasta	533	983	●
12	Menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang aksesibel dan akurat	1	Sebaran informasi bursa kerja yang terupdate	17 kelurahan	17 kelurahan	●
13	Terwujudnya pembangunan BLK di tingkat Kota	1	Jumlah BLK	1	1	●
14	Tercapainya peningkatan jumlah	1	Prosentase pencari kerja yang ditempatkan	32%	98,55%	●

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2015	REALISASI 2015	KET
	penempatan tenaga kerja					
15	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	63,20%	64,35%	●
		2	Tingkat pengangguran terbuka	9%	6,43%	●
		3	Calon tenaga kerja yang terdidik (pencari kerja terlatih)	10,50%	80,06%	●
16	Terwujudnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	1	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	15	9	●
17	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan	1	Jumlah LKS Bipartit	33	52	●
18	Terwujudnya peran serta dan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja	1	Jumlah lembaga penyelenggara pelatihan kerja berperan aktif dalam peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja.	13	14	●
19	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pekerja	1	Prosentase Pencapaian UMK terhadap KHL	100%	97,54%	■
		2	Prosentase penurunan kasus-kasus ketenagakerjaan di Kota Magelang, baik kasus perselisihan hubungan industrial maupun kasus TKI	2%	0	●
20	Terciptanya wirausaha baru	1	Jumlah wirausaha baru	25	25	●
21	Terlindunginya hak-hak keselamatan tenaga kerja	1	Prosentase perusahaan yang telah menerapkan norma keselamatan dan perlindungan ketenagakerjaan	3,73%	6,62%	●

Keterangan:

● : Target Tercapai/ melampaui target RPJMD 2011-2015

■ : Target Tidak tercapai

2.6.3 Misi 3 : Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian masyarakat

Capaian kinerja permisi melibatkan beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya penambahan pelaku usaha di sektor riil (berbagai bidang usaha).
2. Terwujudnya peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan
3. Tersedianya kawasan PKL yang tertata sesuai rencana tata ruang
4. Terwujudnya peningkatan kemampuan kelembagaan PKL sebagai potensi ekonomi kerakyatan.
5. Tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, merata, halal dan terjangkau

oleh daya beli masyarakat.

6. Terwujudnya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
7. Meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha
8. Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi
9. Meluasnya pangsa pasar UMKMK
10. Berkembangnya jumlah UMKM dan daya saing usaha
11. Terwujudnya peningkatan volume fasilitas kredit yang bisa diakses UMKMK
12. Terwujudnya SDM pertanian, peternakan dan perikanan yang berkualitas
13. Terwujudnya peningkatan jenis usaha agribisnis
14. Terasilitasinya pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran
15. Termanfaatkannya tanah bengkok untuk pengembangan agribisnis
16. Tersusunnya strategi optimalisasi pemanfaatan lahan sawah untuk agribisnis tanaman pangan
17. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan)
18. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan)
19. Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet
20. Teridentifikasinya kondisi sosial ekonomi petani Kota Magelang
21. Terwujudnya intensifikasi pertanian dengan menggunakan varietas unggul baru
22. Menurunnya serangan OPT
23. Tersedianya benih/bibit berkualitas.
24. Terwujudnya peningkatan penggunaan sarana dan prasarana produksi komoditas pangan
25. Meningkatnya perlindungan hutan

Pencapaian sasaran ini melibatkan beberapa urusan antara lain : Urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan pilihan perdagangan, Urusan pilihan Pertanian, Urusan pilihan kehutanan. Detil capaian dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel II.146
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Misi 3

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI 2015	Status
1	Terwujudnya pertambahan pelaku usaha di sektor riil (berbagai bidang usaha).	1 Jumlah usaha Sektor riil yang berkembang	1500	1400	■
2	Terwujudnya peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan	1 Jumlah pelaku usaha ekonomi kerakyatan menerima akses permodalan	1500	1300	■

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2015	REALISASI 2015	Status
3	Tersedianya kawasan PKL yang tertata sesuai rencana tata ruang	1	Jumlah sektor informal / PKL yang tertata	310	410	●
4	Terwujudnya peningkatan kemampuan kelembagaan PKL sebagai potensi ekonomi kerakyatan.	1	Jumlah kelembagaan PKL yang tertib administrasi	26	26	●
5	Tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, merata, halal dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.	1	Adanya regulasi ketahanan pangan	ada	ada	●
		2	Ketersediaan pangan utama	100%	100%	●
		3	Cakupan beras bersubsidi pada KK miskin	4.598	4598	●
		4	Tingkat kerawanan pangan dan gizi	8,6%	0,90%	■
6	Terwujudnya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1	Tingkat diversifikasi konsumsi Pangan yang beragam bergizi, seimbang dan aman	93,7%	94,6%	●
		2	Tersedianya database produk pangan lokal	Ada	ada	●
7	Meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha	1	Jumlah UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi dan terpenuhi sarana prasarana	350	350	●
		2	Persentase UMKMK yang produktif	70%	75%	●
8	Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi	1	Prosentase Koperasi Aktif	75%	93%	●

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2015	REALISASI 2015	Status
		2	Jumlah koperasi	220	217	■
9	Meluasnya pangsa pasar UMKMK	1	Jumlah promosi UMKMK	16	17	●
		2	Jumlah kontak dagang dan temu usaha.	24	24	●
		3	Jumlah industri rumah tangga	2.150	1372	■
		4	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	5,50%	5,50%	●
10	Berkembangnya jumlah UMKM dan daya saing usaha	1	Jumlah UMKMK, jumlah UKM non BPR/LKM, usaha mikro dan kecil	1000	950	●
11	Terwujudnya peningkatan volume fasilitas kredit yang bisa diakses UMKMK	1	Jumlah UMKMK yang memanfaatkan kredit	400	400	●
		2	Jumlah UMKMK yang produktif	75%	75%	●
12	Terwujudnya SDM pertanian, peternakan dan perikanan yang berkualitas	1	Rasio petani terlatih			
			- Pertanian	80%	80%	●
			- Peternakan	75%	75%	●
			- Perikanan	80%	90%	●
13	Terwujudnya peningkatan jenis usaha agribisnis		Jumlah jenis bidang usaha agribisnis	11	14	●
14	Terfasilitasinya pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran	1	Jumlah tempat pengolahan pasca panen:			
			- Pertanian	5	1	■
			- Peternakan	3	2	■
			- Perikanan	3	3	●
15	Termanfaatkannya tanah bengkok untuk pengembangan agribisnis	1	Prosentase konservasi sumberdaya lahan dan sumber daya hayati	10%	10%	●
16	Tersusunnya strategi	1	Prosentase pemanfaatan lahan	100%	100%	●

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI 2015	Status
	optimalisasi pemanfaatan lahan sawah untuk agribisnis tanaman pangan				
17	Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan)	1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	2,91%	1,9% ■
18	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan)	1	Jumlah produksi peternakan		
			- daging (kg)	4.004.635	7.259.977 ●
			- telur (kg)	379.042	45.655 ■
			- susu (lt)	445.672	187.136 ■
		2	Jumlah produksi perikanan (ton)	335 ton	157,17 ton ■
19	Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet	1	Jumlah ternak yg diperiksa kesehatannya	7582	7582 ●
20	Teridentifikasinya kondisi sosial ekonomi petani Kota Magelang	1	Penguatan kelembagaan petani		
			- Pertanian	16	17 ●
			- Peternakan	10	10 ●
			- Perikanan	17	17 ●
21	Terwujudnya intensifikasi pertanian dengan menggunakan varietas unggul baru	1	Jumlah penggunaan benih padi bermutu	6.000	13.755 ●
22	Menurunnya serangan OPT	1	Tingkat serangan OPT yang dapat diatasi	100%	100% ●
23	Tersedianya	1	Jumlah populasi ternak		

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI 2015	Status
	benih/bibit berkualitas.				
		- unggas	76.401	253.413	●
		- Domba/ Kambing	603	833	●
		- Sapi	222	611	●
24	Terwujudnya peningkatan penggunaan sarana dan prasarana produksi komoditas pangan	1 Jumlah penggunaan teknologi tepat guna (panca usaha tani)	5 paket	5 paket	●
25	Meningkatnya perlindungan hutan	1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	25 Ha	25 ha	●
		2 Konservasi kawasan hutan	71 Ha	69 ha	■
		3 Kerusakan kawasan hutan	0 Ha	0 ha	●

Keterangan:

● : Target Tercapai/ melampaui target RPJMD 2011-2015

■ : Target Tidak tercapai

2.6.4 Misi 4 :Meningkatkan Pembangunan pelayanan perkotaan dengan pengembangan budaya daerah disertai dengan peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan aspek kemandirian

Capaian kinerja permisi melibatkan beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Tersedianya kelengkapan Rencana Tata Ruang dari RTRW, RDTRK, RTH dan RTBL
2. Peningkatan kualitas Prasarana/ infrastruktur Perkotaan
3. Pengembangan Infrastruktur perumahan
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
5. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis
6. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Transportasi Angkutan Darat
7. Terwujudnya prasarana komunikasi dan informasi masyarakat yang berkelanjutan
8. Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan
9. Terdatanya lembaga/ kelompok seni dan budaya.
10. Meningkatnya pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya.
11. Terpeliharanya Museum dan peninggalan purbakala, serta cagar budaya.
12. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
13. Meningkatnya pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi terapan masyarakat
14. Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat
15. Terlaksananya review pokjandal orientasi kader dan pemilihan posyandu berprestasi
16. Meningkatnya koordinasi dan kinerja TKPK secara sinergis

17. Meningkatnya kualitas program PNPM

18. Terlaksananya PMTAS

19. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Pencapaian sasaran ini melibatkan beberapa urusan antara lain : Urusan wajib Penataan Ruang, Urusan wajib Pekerjaan Umum, Urusan wajib perumahan, Urusan wajib Lingkungan Hidup Wajib Perhubungan. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, Urusan pilihan pariwisata, Urusan wajib kebudayaan, Urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan wajib perencanaan pembangunan, Urusan wajib Kesehatan, urusan Wajib pemberdayaan perempuan. Detil capaian dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel II.147
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Misi 4

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI 2015	2015
1	Tersedianya kelengkapan Rencana Tata Ruang dari RTRW, RDTRK, RTH dan RTBL	1 Tersedianya dokumen RTRW dan Perda RTRW 2010 -2030, RDTRK dan Perda RDTRK 2010 -2020, RTH, dan RTBL Kawasan Strategis Lingkungan Hidup (Gunung Tidar)	70%	50%	■
		2 Tersedianya sarana informasi Rencana tata Ruang Wilayah Kota Magelang kepada masyarakat	100%	100%	●
		3 Jumlah Ijin Lokasi yang sesuai dengan peruntukan ruang	100%	100%	●
2	Peningkatan kualitas Prasarana/ infrastruktur Perkotaan	1 Proporsi Panjang Jalan Kota Magelang dengan kondisi baik	90%	90%	●
		2 Rasio Pasar Tradisional dalam kondisi baik	90%	90%	●
		3 Prosentase penanganan sampah di TPSA (pengolahan sanitary landfill)	100%	100%	●
		4 Rasio ketersediaan IPAL	30%	82%	●
3	Pengembangan Infrastruktur perumahan	1 Rasio jumlah rumah layak huni	85%	92,53%	●
		2 Rasio luas lingkungan permukiman kumuh	44%	3,91%	■
		3 Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Permukiman (non-fisik)	ada	ada	●
4	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	20%	18,57%	■
		2 Pengembangan RTH Publik Pusat Kota (Kaw alon- alon)	100%	100%	●
		3 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	15%	15%	●
		4 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	75%	66,67%	■
		5 Tersedianya Dokumen SLHD	Ada	ada	●
		6 Penegakan hukum lingkungan hidup	100%	Tidak ada	●

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2015	REALISASI 2015	2015
5	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis	1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh sebanyak sebanyak 4 Kawasan yaitu GOR Samapta, Sidotopo, Sentra Ekonomi Lembah Tidar, dan Alun-alun	75%	75%	●
6	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Transportasi Angkutan Darat	1	Ketersediaan sarana prasarana lalu lintas jalan raya (APPIL)	85%	85%	●
		2	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta fasilitas Terminal tipe A dg kondisi yg baik di Kota Magelang	80 %	80%	●
		3	Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	75%	75%	●
		4	Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type c) yang tertata	1 buah	1 buah	●
		5	Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik	90%	90%	●
		6	Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum	90%	95%	●
		7	Jumlah uji KIR angkutan umum dan angkutan barang di Kota Magelang	2218	2218	●
		8	Rasio kepemilikan KIR angkutan umum	30%	5%	■
		9	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	30 menit	15 menit	■
		10	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	36.000	40.300	●
		11	Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte/Sub terminal yang ada di Kota Magelang)	15	15	●
		12	Rasio ijin trayek	0,77%	0.82%	●
		13	Jumlah arus penumpang angkutan umum	170.000	170.000	●
		14	Jumlah orang/barang yang melalui terminal per tahun	177.000	>177.000	●
7	Terwujudnya prasarana komunikasi dan informasi masyarakat yang berkelanjutan	1	Jumlah jaringan komunikasi operator dengan kondisi baik	8	8	●
		2	Jumlah sarana penyedia informasi melalui media informasi	13	13	●

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2015	REALISASI 2015	2015
		3	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	17	17	●
		4	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,06%	0,045%	■
		5	Tersedianya / Jumlah Hot Spot pada ruang terbuka publik di Kota Magelang	5	5	●
8	Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan	1	Jumlah Kunjungan wisata	1.119.365	1.130.989	●
			- jumlah kunjungan wisatawan nusantara		1.125.863	
			- jumlah kunjungan wisatawan mancanegara		5126	
		2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	8,0%	8,05%	●
9	Terdatanya lembaga/ kelompok seni dan budaya.	1	Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	165	165	●
10	Meningkatnya pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya.	1	Jumlah festival seni dan budaya.	5	15	●
		2	Jumlah gedung kesenian	2	1	■
11	Terpeliharanya Museum dan peninggalan purbakala, serta cagar budaya.	1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	36	35	■
12	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	70%	100%	●
		2	LPM berprestasi	100%	17,64%	●
		3	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	●
		4	pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	●
		5	Jumlah LKM yang dapat melaksanakan program dengan baik	17	17	●
13	Meningkatnya pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi terapan masyarakat	1	Kelurahan yang menerapkan TTG (Teknologi Tepat Guna)	30%	100%	●
		2	Jumlah Krenova yang terdata	15	36	●

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2015	REALISASI 2015	2015
14	Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat	1	Jumlah LKK dan lembaga keuangan masyarakat yang sehat dan berkualitas	70%	24%	■
15	Terlaksananya review pokjanel orientasi kader dan pemilihan posyandu berprestasi	1	Posyandu aktif	100%	83.25%	■
		2	Jumlah posyandu yang berprestasi	2,58%	3%	●
16	Meningkatnya koordinasi dan kinerja TKPK secara sinergis	1	Jumlah rakor dan monev TKPK	6 kali	8 kali	●
17	Meningkatnya kualitas program PNPM	1	Jumlah LKM yang dapat dapat melaksanakan program dengan baik	17	17	●
18	Terlaksananya PMTAS	1	Jumlah anak sekolah yang mendapatkan PMTAS	450	937	●
19	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1	Rasio KDRT	0,16%	0.07%	●
		2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	70.03%	13.15%	■
		3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	60%	16.73%	■
		4	rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	47,06%	1.119klpk	■
		5	Persentase tenaga kerja di bawah umur	0%	0%	●
		6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	77%	55.88%	●
		7	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	77%	100%	●
		8	PKK Aktif	100%	100%	●

Keterangan:

● : Target Tercapai/ melampaui target RPJMD 2011-2015

■ : Target Tidak tercapai

2.6.4 Misi 5 :Mendorong Peningkatan derajat kesehatan, pengembangan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif dan memiliki etos kerja yang tinggi

Capaian kinerja Misi 5 melibatkan beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya gizi masyarakat
5. Berkurangnya kasus penyakit menular
6. Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
7. Meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan bagi kesehatan masyarakat
8. Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan

9. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan
10. Terciptanya lingkungan hidup yang sehat
11. Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera
12. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
13. Meningkatnya pembinaan eks penyandang penyakit sosial
14. Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD).
15. Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan Dasar
16. Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing jenjang pendidikan menengah
17. Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Non formal dan Informal
18. Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Khusus
19. Meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
20. Meningkatnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada penyelenggaraan pendidikan
21. Meningkatnya minat baca masyarakat
22. Meningkatnya wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan
23. Meningkatnya kualitas dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah
24. Terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara kontinyu

Pencapaian sasaran ini melibatkan beberapa urusan antara lain : Urusan wajib kesehatan, Urusan Wajib keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Urusan Wajib sosial, Urusan Wajib Pendidikan, Urusan wajib Pemuda dan Olah Raga . Detil capaian dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel II.148
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Misi 5

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI 2015	Status
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan	1 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	103%	141.75%	●
		2 Rasio dokter per satuan penduduk	0,995	1.37	●
		3 Rasio tenaga medis persatuan penduduk	1,936	12.26	●
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan	1 Cakupan rawat jalan terhadap jumlah penduduk	15%	18%	●
		2 Cakupan rawat inap terhadap jumlah penduduk	1,5%	14,03%	●
		3 Cakupan Puskesmas	100%	166,57%	●
		4 Cakupan Puskesmas Pembantu(PUSTU)	80%	70,59%	●
		5 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	18%	23%	●
		6 Rasio Rumah sakit persatuan penduduk	8%	5,79%	■

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI 2015	Status
		7 Terwujudnya RSUD Tidar terakreditasi 16 pelayanan yang menjadi rujukan bagi daerah sekitar	100%	100%	●
3	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1 Angka kelangsungan hidup bayi	995,19	984.4	■
		2 Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	●
		3 Angka usia harapan hidup	70,93	76,58	●
		4 Jumlah puskesmas santun usila	6	6	●
4	Meningkatnya gizi masyarakat	1 Persentase balita gizi buruk	1%	0,21%	●
5	Berkurangnya kasus penyakit menular	1 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA.	100%	121.50%	●
		2 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	●
6	Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	1 Prosentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100%	93%	■
7	Meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan bagi kesehatan masyarakat	1 Prosentase jumlah obat dan makanan yang mendapatkan uji keamanan sehingga aman dikonsumsi masyarakat.	100%	66%	■
		2 Prosentase penurunan angka korban keracunan obat dan makanan.	0%	0%	●
8	Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	1 Cakupan Jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan Masyarakat Rentan	100%	100%	●
		2 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	100%	100%	●
9	Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan	1 Cakupan Rumah tangga sehat	98%	98%	●
		2 Cakupan Kelurahan Siaga Aktif mandiri	100%	41,18%	■
10	Terciptanya lingkungan hidup yang sehat	1 Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar	97,5%	94.40%	■
		2 Pengawasan lingkungan Industri Rumah Tangga	55%	61.20%	●
		3 Rasio Pengembangan wilayah sehat (Permukiman, Obyek Wisata, Industri Rumah Tangga)	80,35%	80.35%	●
11	Terkendalnya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya	1 Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	●

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI 2015	Status
	keluarga yang berkualitas dan sejahtera				
		2 Rasio akseptor KB	100%	80%	■
		3 Cakupan peserta KB aktif	90%	77.3%	■
		4 Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	100%	80%	●
12	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1 Jumlah sarana sosial (panti jompo, panti asuhan, panti rehabilitasi)	9	12	●
13	Meningkatnya pembinaan eks penyandang penyakit sosial	1 Prosentase penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	12,92%	35.02%	●
		2 PMKS yang memperoleh bantuan sosial	12,92%	12.92%	●
14	Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD).	1 APK PAUD	90%	63,50%	■
		0-2 tahun (0-4) tahun			
		3-6 tahun (4-6) tahun			
		0-6 tahun			
15	Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan Dasar	1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	116,95%	96,61%	■
		2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100%	74,62%	■
		3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	175,30%	108,15%	■
		4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	100%	81,92%	■
		5 Angka rata-rata lama sekolah SD/MI	6	6.13	●
		6 Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs	3	3.03	●
		7 Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI	1,60	1.90	●
		8 Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	2,29	2.37	●
		9 Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	0,090	0,170	●
		10 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	135%	149,34%	●

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI 2015	Status
16	Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing jenjang pendidikan menengah	1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket B	108,85%	90,76%	■
		2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket B	142,4%	64,64%	■
		3 Angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK/MA	3	3	●
		4 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	9%	17%	●
		5 Rasio guru terhadap murid	1:10	1:16	■
		6 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	1:10:31	1:11:31	■
		7 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	87164	92180	●
		8 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMK/SMA/MA	200%	81%	■
		9 Angka pendidikan yang ditamatkan	3,11	3,11	●
		10 Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA	94%	99,42%	●
17	Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Non formal dan Informal	1 Angka melek huruf	97%	97%	●
		2 Pendidikan Kesetaraan:			
		ii. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	97%	100%	●
		iii. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	95%	98,90%	●
		iv. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	90%	99,35%	●
		v. usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan	60%	60%	●
		3 Kursus :			
		i. persentase pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup	9%	9%	●
		ii. persentase lembaga PNF terakreditasi c.	3%	21,43%	●
		4 Jumlah model layanan PNF Unggulan	50%	0,86%	■
18	Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing	1 Pendidikan khusus terakreditasi	80%	75%	■

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI 2015	Status
	pendidikan Khusus				
19	Meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	1 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100%	91%	■
		2 Rasio guru / murid	-	1:11	●
		3 Rasio guru / murid per kelas rata-rata	-	1:10:31	●
		4 Pendidik yang berkualifikasi dan Prasarana pada pendidikan khusus terpenuhi	100%	95%	■
20	Meningkatnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada penyelenggaraan pendidikan	1 Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO	10	14	●
21	Meningkatnya minat baca masyarakat	1 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	39.500	44.136	●
		2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	58.834	92.021	●
22	Meningkatnya wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan	1 Prosentase sekolah melaksanakan kurikulum Bahasa Jawa	100%	97.16%	■
23	Meningkatnya kualitas dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah	1 Jumlah kegiatan kepemudaan	20	20	●
		2 Jumlah organisasi pemuda	30	31	●
24	Terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara kontinyu	1 Jumlah klub olah raga	180	164	■
		2 Jumlah organisasi olah raga	35	31	■
		3 jumlah even/ kegiatan olah raga yang diselenggarakan	30	34	●
		4 Jumlah gedung olah raga	29	36	●
		5 Lapangan olah raga	250	251	●
		6 Jumlah prestasi olah raga dalam even Nasional	50	5	■
		7 Gelanggang/balai remaja(selain milik swasta)	0	0	●

Keterangan:

● : Target Tercapai/ melampaui target RPJMD 2011-2015

■ : Target Tidak tercapai

2.6.6 Misi 6 : Mengembangkan paham kebangsaan dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan guna mewujudkan rasa aman dan ketentraman masyarakat

Capaian kinerja Misi 6 melibatkan beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat
2. Mendukung lancarnya pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah Meningkatnya pembinaan politik daerah
3. Meningkatnya pembinaan politik daerah
4. Meningkatnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
5. Masyarakat yang hidup dengan dasar norma-norma agama.
6. Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat
7. Meningkatnya profesionalitas aparat kamtibmas, satlinmas, SAR, satpol PP
8. Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparaturnya dan masyarakat menangani resiko korban bencana

Pencapaian sasaran ini melibatkan beberapa urusan antara lain : Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Wajib sosial, Urusan wajib perumahan. Detil capaian dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel II.149
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Misi 6

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI 2015	KET
1	Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat	1 Frekuensi kegiatan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)	2	2	●
2	Mendukung lancarnya pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah	Frekwensi dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	2	3	●
3	Meningkatnya pembinaan politik daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pilpres, Pilkada (pembinaan politik daerah)	75	75.15	●
4	Meningkatnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Jumlah ormas yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan di tingkat Provinsi dan Nasional	15	17	●
5	Masyarakat yang hidup dengan dasar norma-norma agama.	Frekuensi koordinasi FKUB dan dialog antar umat agama	3	3	●
6	Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat	1 Angka kriminalitas yang tertangani	14%	14%	●
		2 Persentase penurunan penyakit masyarakat	30%	30%	●
		3 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	7	5	●

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI 2015	KET
		4 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	84,62	62.91	■
		5 Petugas Linmas di Kota	1100	832	■
		6 Jumlah Pos Kamling aktif per jumlah Kelurahan	13	13	●
		7 Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat	50	50%	●
		8 Penegakan Perda dan Peraturan KDH yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	10	5	■
7	Meningkatnya profesionalitas aparat kamtibmas, satlinmas, SAR, satpol PP	1 jumlah aparat yg mendapatkan diklat linmas/ kamtibmas/SAR/Satpol PP	150	215	●
8	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat menangani resiko korban bencana	1 Tersedianya Satlinmas inti penanggulangan bencana	90	90	●
		2 Kelengkapan sarana/ prasarana penanggulangan bencana di setiap SKPD/ perusahaan/ perkampungan	75%	75%	●
		3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota	1 mobil:26000	1 mobil:26000	●
		4 Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	100%	100%	●

Keterangan:

- : Target Tercapai/ melampaui target RPJMD 2011-2015
- : Target Tidak tercapai

Setelah menguraikan deskripsi sub-bab ini dicantumkan tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2015 dan realisasi RPJMD sebagai berikut:

Tabel II.150
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah
Kota Magelang sampai dengan Tahun 2015

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	MISI KE 1																
	Program dan kegiatan pada setiap SKPD																
1	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Rasio pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	80%	15.618.779.000	100%				95%	1.013.858.497	100%	100%		100%	15.387.988.000	Semua SKPD
1.2	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika																
1	Pengembangan komunikasi, informasi, dan media masa	1. Penerapan e-Procurement (LPSE)	100%	0%	123.935.000	75%	121.028.650	0%		100%		100%	100%	1.637.393.472	100%	140.518.000	Dishubkomi nfo
		2. Penerapan e-Government yang diukur dari:															

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		a. Jumlah SKPD yang menggunakan Sistem Informasi	46 SKPD	18SKPD		18 SKPD		18 SKPD		46		46 SKPD	46 SKPD		46 SKPD		Dishubkomi nfo
		b. SKPD yang memiliki website	46 SKPD	6SKPD		16SKPD		6 SKPD		22		46 SKPD	46 SKPD		46 SKPD		didukung semua SKPD
		c. WAN (Wide Area Network) setiap SKPD	75%	10%		10%		10%		37%		75%	46%		75%		Dishubkomi nfo
2	Fasilitasi peningkatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi	1. Penggunaan software legal/ OSS di setiap SKPD	100%	40%	59.915.000	40%		40%			23.346.150	100%	25%		100%	64.853.000	Dishubkomi nfo
1.23	Urusan Wajib Statistik																
1	Pengembangan data/informasi	Tersedianya dokumen data/informasi/ statistik daerah:			138.657.000						241.171.350			162.010.250			

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		- Buku Daerah dalam Angka	ada	ada		Ada	74.507.200	ada		ada		Ada	ada		Ada		Kantor Litbang & Statistik
		- Buku PDRB Kota	ada	ada		Ada	77.552.000	ada		ada		Ada	ada		Ada		Kantor Litbang & Statistik
1.24	Urusan Wajib Kearsipan																
1	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase SKPD yang melaksanakan arsip baku	100%	35%	80.000.000	55%	24.240.500	60%	121.083.650	65%	69.884.050	70%	100%	124.338.750	70%	253.000.000	Kantor Perpus Daerah, Arsip & Dokumentasi Didukung semua SKPD
		Peningkatan SDM pengelola kearsipan	60%	25%		35%		35%		45%		50%	100%		50%		Kantor Perpus Daerah, Arsip & Dokumentasi Didukung semua SKPD

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	100%	35%	174.197.000	60%	49.999.800	60%	34.969.400	80%	82.200.150	90%	100%	104.763.250	90%	224.537.000	Kantor Perpus Daerah, Arsip & Dokumentasi Didukung semua SKPD
3	Pemeliharaan rutin berkala sarana & prasarana kearsipan	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	85%	20%	50.000.000	50%	34.987.500	50%		70%		80%	100%	39.998.250	80%	80.000.000	Kantor Perpus Daerah, Arsip & Dokumentasi Didukung semua SKPD
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian																

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Peningkatan pengawasaan sistem internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Hasil opini BPK untuk Laporan Keuangan	WTP	WDP	668.029.000	WDP	710.322.060	WDP	699.330.370	WDP	661.748.160	WTP	WDP	1.054.912.157	WTP	1.048.304.000	Inspektorat Didukung semua SKPD
2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat capaian kinerja pemerintah kota	Sgt baik	Sgt baik	1.698.367.00	Sgt baik	298.012.150	Sangat baik	360.258.850	Sangat baik		Sangat baik	Sangat baik	324.166.024	Sangat baik	2.514.852.000	Setda Di dikung semua SKPD
3	Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	Memuaskan	baik	653.838.000	Baik	78.453.600	memuaskan	114.203.800	memuaskan		memuaskan	baik	79.720.600	memuaskan	808.372.000	Setda

Kode	Bidang urusan/ Program	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp		
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Ketersediaan Standar Operasional Prosedur bidang perizinan dan pelayanan umum	100%	100%		100%		100%					100%	100%		100%		Setda
		Penyelesaian aduan masyarakat	100%	100%		100%		100%		100			100%	100%		100%		Setda
4	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tingkat kompetensi aparatur	92%	83.61%	1.977.734.000	90%	157.008.200	91%	95.363.000	91%	61.655.000	92%	92%		92%	1.683.837.000		
5	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Penyederhanaan prosedur pelayanan publik	100%	100%		100%	152.733.650	100%	87.987.650			100%		191.871.800	100%	22.539.000		Setda Didukung smeua SKPD
1.10	Urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil																	
1	Penataan administrasi kependudukan	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	100%	100%	998.967.000	100%	875.786.600	88.88%	909.792.400	90.1	1.052.675.825	100%	93	1.160.056.825	100%			Dispendukk apil
		Rasio bayi berakte kelahiran	100%	100%		100%		100%		91		100%	92,57%		100%			Dispendukk apil

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp		
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Rasio pasangan berakte nikah	100%	100%		100%		100%					100%	100%		100%		Dipendukung
		Kepemilikan KTP	100%	100%		100%		88.88 %					100%	93,56%		100%		Dipendukung
		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	691	733		790		860					847	92,57%		847		Dipendukung
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	ada	ada		ada		ada					ada	ada		ada		Dipendukung
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian																	
1	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat pelanggaran etika aparat yg mencakup:																BKD
		1. Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin	2%	0.15%		0.06%		0.14					2.11%	0,19%		2.11%		BKD
		2. Persentase Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 Tahun	96%	97.18%		98%		95.02 %					96%	97%		96%		BKD

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp		
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		3. Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	15 org	9 org		10org		10 orang					15 org	8 orang		15 org		BKD
1.06	Urusan Wajib Perencanaan pembangunan																	
1	Perencanaan Bidang Ekonomi	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Fisik Prasarana yang berkualitas (update dan valid)	30 dokumen	5 dokumen	70.000.000	11 dokumen	265.155.500	6 dokumen	710.984.200		541.460.525	7 dokumen	ada	412.496.092	7 dokumen	75.770.000	Bappeda Didukung semua SKPD	
2	Perencanaan Bidang Sosbud				25.000.000			480.568.500		842.111.894				697.904.100		27.060.000		
3	Perencanaan Tata Ruang				251.300.000			246.431.500		584.094.735	aaa			646.141.324		272.015.000		
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	ada	ada	1.045.128.00	Ada	258.071.750	ada	617.337.550	ada	1.158.228.300	ada		948.030.950	ada	1.140.883.000	Bappeda Didukung semua SKPD	
		Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	ada	ada		Ada		ada		ada		Ada			Ada		Bappeda Didukung semua SKPD	

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp		
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota	ada	ada		Ada		ada		ada			Ada	ada		Ada		Bappeda Didukung semua SKPD
		Tingkat Konsistensi Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	90%	90%		90%							90%	8		90%		Bappeda Didukung semua SKPD
		Ditetapkannya dokumen perencanaan sesuai peraturan yang berlaku (RPJM, RKPD)	sesuai	sesuai		sesuai							sesuai	90%		sesuai		Bappeda Didukung semua SKPD
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian																	
1	Penataan peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik yang dikeluarkan daerah			50.000.000		942.004.210		1.030.572.455	3	834.406.525			3	680.896.175			Setda

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp		
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Jumlah dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan Perda	20 kali							5			4 kali	100%		4 kali		Setda Didukung Setwan
		Jumlah Perda/ Raperda yang mengakomodasi masukan masyarakat	60 raperda	27 buah		7 raperda				5			12 raperda	12		12 raperda		Setda Didukung Setwan
		Ditetapkannya Perda APBD tepat waktu	Tepat waktu	75%		Tepat waktu				tepat			Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		DPPKD Didukung semua SKPD
		Kesesuaian kelembagaan SKPD dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	sesuai	sesuai		Sesuai				sesuai			sesuai	sesuai		sesuai		Setda Didukung semua SKPD
	MISI 2																	
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian																	

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rasio dana DAK, TP, Dekonsentrasi dan dana hibah serta dana bantuan lainnya terhadap total APBD	18%		92.450.000		287.708.780		370.590.780	16	61.763.000	18%	18%	662.067.970	18%	100.000.000	Setda
2	Penataan Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rasio nilai asset daerah yang dikelola	80%		245.280.000	19%	140.227.200		274.739.200	69	317.456.950	80%	25%		80%	265.498.000	Setda didukung seluruh SKPD
3	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Asset daerah yang dikelola pihak lain.	25%		3.466.863.000	19%	454.957.270		963.658.895	19		25%	80%	487.398.925	25%	3.490.000.000	setda
		Jumlah kerjasama dengan lembaga keuangan	3							4			8				Setda
		Jumlah kerjasama dengan swasta	ada							Ada			Ada				

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Jumlah dan jenis bank dan cabang perusahaan asuransi	55 bank/BPR 11 asuransi							5				38			
4	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dan macam pajak	7	9	115.422.000	9	3.520.201.680			10		7	5	5.855.275.776	7	207.000.000	DPPKD
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Bertambahnya laju pertumbuhan investasi	358	259	118.134.500	100	237.821.200			125		358	983	658.031.237	358	172.960.722	KPM
		Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	3	2						4			3				KPM
		Nilai investasi swasta	41.000,000,000	192.725.456.698						45.063.096.864		41.000.000.000			41.000.000.000		KPM

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah dan jenis kerjasama antar daerah yang berhasil dijalin	3							1		3		30.676.420	3		KPM
1.16	Urusan wajib Penanaman modal daerah																
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN	24.660.000.000	192.725.456.698	53.368.000	105.256.500				45.063.096.864		24.650.000.000	729.813.000	83.332.250	24.660.000.000	30.804.664	KPM Didukung seluruh SKPD
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	199	PMDN:3 OPMA:1		33				76		180	230		199		KPM Didukung seluruh SKPD
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	93.584.932.514	192.725.456.698		5872.546.376						93.584.932.415	357.314.783.722		93.584.932.514		KPM Didukung seluruh SKPD

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp		
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Lama proses perijinan	2 hari	Bid ekonomi (2 s/d % hari) Kesra (2 s/d 14 hari)pe mb (2s/d 14 hari)		5 hari					3 hari		2 hari	2.56		2 hari		BP2T
2	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Bertambahnya jumlah pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	3	3	7.506.000	1	23.880.000						2	4	164.135.000	3	10.989.535	KPM Bappeda PU
1.15	Urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																	
1	Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah kerja sama PES (Payment for Ecological/ environment Services = imbal jasa lingkungan	1	0		0	18.867.50	0		0	834.650		1	3	111.336.600	1		Diskoperindag

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.1 4	Urusan wajib tenaga kerja																
1	Peningkatan kesempatan kerja	Prosentase pencari kerja yang ditempatkan	32%	66.05 %	357.078 .000	30%	704.428 .350		1.500.9 44.388		1.467.69 2.780	32%	98,55%	2.056.8 83.917	32%	586.000 .000	Disnakertra nsos
		Rasio daya serap tenaga kerja	195301	1.567		13500						17500	3526		195301		KPM Didukung seluruh SKPD
		Sebaran informasi bursa kerja yang terupdate	17 kel	17 kel		17 kel						17 kel	17 kelurahan		17 kel		Disnakertra nsos
		Jumlah wirausaha baru	25 orang	20 org		20 org						25 org	25		25 org		Disnakertra nsos
2	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	63,2%	BPS	16.975. 000	62,9%	340.403 .300		370.608 .900		68,49%	390.286. 600	63,2%	64,35%	4.719.2 14.000	63,2%	Disnakertra nsos
		Tingkat pengangguran terbuka	9%	BPS		13,0%					7,38%		9%	6,43%		9%	Disnakertra nsos
		Calon tenaga kerja yang terdidik (pencari kerja terlatih)	10,5%	BPS		9,3%					68,8%		10,5%	78,77%		10,5%	Disnakertra nsos

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp		
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Prosentase Pencapaian UMK terhadap KHL	100%	90.12 %		94.07 %				98.1%			100%	100%		100%		Disnakertransos
		Jumlah BLK	1	0		0%		0		0			1	1		1		Disnakertransos
3	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Angka perselisihan pengusaha pekerja per tahun	15%	7%	98.450.000	18%	325.689.975		322.108.650	9	333.958.950	15%	9	209.802.300	15%	106.565.000		Disnakertransos
		Jumlah LKS Bipartit	33	33		33				52				52				Disnakertransos
		jumlah lembaga penyelenggara pelatihan kerja berperan aktif dalam peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja.	15	15		13				11				14				Disnakertransos

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Prosentase penurunan kasus-kasus ketenagakerjaan di Kota Magelang, baik kasus perselisihan hubungan industrial maupun kasus TKI	2%	3%		2%				200				0			Disnakertransos
		Prosentase perusahaan yang telah menerapkan norma keselamatan dan perlindungan ketenagakerjaan	3,73%	0,75%						6.2				6,62%			Disnakertransos
	MISI KE 3																
1.1 5	Urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Jumlah bidang usaha Sektor riil yang berkembang	1500	1036	43.420.000	1100	473.892.325	3750.	574.656.975	3093	436.253.400	1400	1400	371.293.200	1500	268.602.00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan SKPD Pendukung: Setda Bappeda, D PP, PM, BP2T,
2	Program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM	Jumlah pelaku usaha ekonomi kerakyatan menerima akses permodalan	1500	140	33.466.000	900	18.867.500	898	7.718.250	900	13.834.650	1300	1300	111.336.600	1500	71.300.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan SKPD Pendukung: Setda Bappeda, D PP, PM, BP2T,

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Jumlah UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi dan terpenuhi sarana prasarana	350	86	136.291.000	175	164.532.200	200	55.416.375	250	37.879.050	300	350	51.557.775	350	347.693.000	Dinkopperindag Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
		Jumlah UMKMK, Jumlah UKM non BPR/LKM UKM, Usaha mikro dan kecil	1000	240		800		900		2886		950	950		1000		Dinkopperindag Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
		Jumlah UMKMK yang memanfaatkan kredit	400	132		350		508		60%		400	75%		400		Dinkoperindag Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp		
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Persentase UMKMK yang produktif	100%	30%		40%		55		60%			70%	75%		100%		Dinkopperindag Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
4	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi	220	217	40.269.000	216	99.943.050	208	60.625.250	207	59.232.900	220	217	69.848.425	220	83.502.000		Dinkopperindag Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
		Prosentase Koperasi Aktif	75%	68.7%		72%				95%			75%	93%		75%		Dinkopperindag Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
2.06	Urusan pilihan perdagangan																	

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah sektor informal / PKL yang tertata	310	100	545.066.000	150	439.794.600	100	12.962.250	143	1.013.352.950	310	410	14.116.750	310	589.996.000	DPP didukung oleh Diskoperindag, Setda, DPU, Bappeda
		Jumlah kelembagaan PKL yang tertib administrasi	26	4		10				20		26	26		26		DPP didukung oleh Diskoperindag, Setda, DPU, Bappeda
2	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah promosi UMKMK	16	4	168.219.000	7	313.073.450	8	191.264.720	7	224.158.800	13	17	655.144.608	16	1.699.331.000	Dinkopperindag Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
		Jumlah kontak dagang dan temu usaha.	24	5		11		8		14		24	24		24		Dinkopperindag Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp		
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Jumlah industri rumah tangga(jumlah IKM yang dibina,diganti oleh diskoperindah)	2150	205	1800	700	824.799.700	590					2150	1372		2150		Dinkopperindag Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	5.5%		4%								5%	5,5%		5.5%		Dinkopperindag Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
2.01	Urusan pilihan Pertanian																	
1	Program peningkatan produksi pertanian/p erkebunan	Prosentase konservasi sumberdaya lahan dan sumber daya hayati	10%	3%	5%	19.385.000		9%	2.768.869			10%	10%	2.283.508.100	10%	40.000.000		Dinas Pertanian
		Prosentase pemanfaatan lahan	100%	100%	100%			100%					100%					Dinas Pertanian
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	2,91%		2,91%								1,9%					Dinas pertanian

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Jumlah jenis bidang usaha agribisnis	11	7 jenis		8 Jenis								14			Dinas Pertanian
		Jumlah penggunaan benih padi bermutu	6000	5000 kg		5000 kg				5750 kg			6000	13.755		6000	Dinas Pertanian
2	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian /perkebunan	Tersedianya database produk pangan lokal	ada	Tidak ada	250.250.000	ada	150.782.030	ada	126.508.650		335.017.950	ada	ada	18.239.500	ada	598.606.000	BPMPKB Didukung Dinas Pertanian, Diskoperindag
		Adanya regulasi ketahanan pangan	ada	ada						Ada				ada			BPMPKB Didukung Dinas Pertanian, SETDA
		Ketersediaan pangan utama	100%	100%							100%			100%			BPMPKB Didukung oleh Dinas Pertanian, SETDA

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp		
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Cakupan beras bersubsidi pada KK miskin	4.598 RTS-PM	6.961 RTS		6000 RTS				5.000			4.598 RTS	4598		4.598 RTS		BPMPKB Didukung oleh Dinas Pertanian, SETDA
		Tingkat kerawanan pangan dan gizi	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada				8.77%			Tidak ada	8,77%		Tidak ada		BPMPKB Didukung oleh Dinas Pertanian, SETDA
		Tingkat diversifikasi konsumsi Pangan yang beragam bergizi, seimbang dan aman	93,7%	89.9%		90 %				93.7	224.190.150		93.7%	94,6%		93.7%		BPMPKB Didukung oleh Dinas Pertanian, Diskoperindag
3	Peningkatan kesejahteraan Petani	1. Rasio petani terlatih	80%	70 %	21.000.000	70 %	95.472.000			90			80 %	4	294.542.550	80%	30.000.000	Dinas Pertanian
		a. Pertanian																
		b. Peternakan	75%	40 %						90				2				
		c. Perikanan	80%	45 %						90				3				

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp		
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		2. Penguatan kelembagaan petani: a. Pertanian	16 klp			16 klp					4		16 klp	17		16 klp		Dinas Pertanian
		b. Peternakan	10 klp			4 klp					2		10 klp	10		10 klp		
		c. Perikanan	17 klp			17 klp					3		17 klp	17		17 klp		
4	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Jumlah tempat pengolahan pasca panen: Pertanian	5	3	37.000.000	3	39.929.750					213.797.100	4	4	196.199.400	5	85.000.000	Dinas pertanian
5	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah tempat pengolahan pasca panen: Peternakan	3	1	6.000.000	1						70.075.925	2	2	120.693.300	3	52.000.000	Dinas pertanian

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah tempat pengolahan pasca panen: Perikanan	3	3	709.993.000	3	8.000.000				529.110.900	3	3	112.967.500	3	12.000.000	Dinas pertanian
7	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian perkebunan	jumlah serangan OPT yang dapat diatasi	100%		20.900.000	100%				100	114.524.550	100%	100%	142.435.900	100%	95.000.000	Dinas Pertanian
		jumlah penggunaan teknologi tepat guna(Panca usaha tani)	5 paket										5				Dinas Pertanian
8	Peningkatan produksi peternakan	Jumlah populasi unggas	76401	59.879	17.500.000	66851	43.210.500			13245	206.628.400	76401	150.645	20.596.256	76401	19.500.000	Dinas Pertanian
		Domba / kambing	603	477		527				1570		603	833		603		
		sapi	222	273		194				371		222	287		222		
		Jumlah produksi peternakan: Daging (kg)	4004635	2.412.247		3775409						4004635	8.200.186		4004635		Dinas pertanian

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Telur (kg)	379042	252.073		357388				169.683		379042	894.655		379042		
		Susu (lt)	445672	299.896		420232				33.038		445672	187.136		445672		
		Produksi perikanan kelompok petani	335 ton/tahun	63.607		161				153.2		335	157,17 ton		335		
		Jumlah ternak yg diperiksa kesehatannya	7.582 Ekor			6197 ekor						7582 ekor	7582		7582 ekor		Dinas Pertanian
2.0 2	Urusan pilihan kehutanan																
1	Program Pemanfaatan Potensi Sumber daya hutan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	25 ha.	20 ha		20 ha				28 ha		25 ha	25 ha	9.156.100	25 ha	40.000.000	Dinas Pertanian
		Konservasi kawasan hutan	71 ha	71 ha		71 ha				69		71 ha	70 ha		71 ha		Dinas Pertanian
		Kerusakan kawasan hutan											0 ha				
	MISI 4																
1.0 5	Urusan wajib Penataan Ruang																

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp		
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya dokumen RTRW dan Perda RTRW 2010 -2030, RDTRK dan Perda RDTRK 2010 -2020, RTH, dan RTBL Kawasan Strategis Lingkungan Hidup (Gunung Tidar)	70%	0%		25%					50%	584.094.735	70%	70 %	646.141.320	70%	160.000.000	Bappeda
		tersedianya sarana informasi Rencana tata Ruang Wilayah Kota Magelang kepada masyarakat	100%	35%		50%					80%		100%	100 %		100%		Bappeda
		Jumlah Ijin Lokasi yang sesuai dengan peruntukan ruang	100%	100%		100%					100%		100%	100 %		100%		DKPT
1.03	Urusan wajib Pekerjaan Umum																	
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jalan Kota Magelang dengan kondisi baik	90%	75%	10.372.022.000	75%	10.257.145.500	85 %	25.168.592.600	85	1.497.503.800	90%	90 %	5.102.647.000	90%	5.075.000.000	DPU	

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Rasio Pasar Tradisional dalam kondisi baik	90%	90%						90		90%	90 %		90%		DPP
2	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh sebanyak 4 Kawasan yaitu GOR Samapta, Sidotopo, Sentra Ekonomi Lembah Tidar, dan Alun-alun	75%	25%	8.330.223.000	55%	10.446.494.000			65	7.824.991.000	75%	75 %	6.347.320.500	75%	9.000.000.000	DPU
1.04	Urusan wajib perumahan																
1	Program Pengembangan Perumahan	Rasio luas lingkungan permukiman kumuh	44%	49%	3.070.463.000	9.3%	192.165.000	84 %	620.288.000	75%	606.109.000	44%	44 %	400.671.288	44%	2.491.464.000	DPU
		Rasio jumlah rumah layak huni								84			85 %				DPU

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Permukiman (non-fisik)	ada	Belum ada		Belum ada		Belum ada		Belum ada		Belum ada	ada		ada		DPU
1.08	Urusan wajib Lingkungan Hidup																
1	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Prosentase penanganan sampah di TPSA (pengolahan sanitary landfill)	100%	70%	1.319.211.000	25%	2.391.000.000	100%	1.257.181.766	100%	7.008.487.600	100%	100%	23.960.450	100%	2.502.555.426	DKPT
2	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	20%	13%	807.413.000		3.177.025.950		2.126.155.250	17%	3.815.709.484	20%	18,57%	3.418.537.826	20%	1.297.500.000	DKPT
		Pengembangan RTH Publik Pusat Kota (Kawalon)	100%	50%				80%		100%		100%	100%		100%		DKPT

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	75%	100%	468.289.000		269.299.287	80 %	224.877.000	100%	225.658.500	75%	100 %	473.992.350	75%		KLH
		Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	15%	20%				20 %		20		15%	15 %		15%		DKPT
4	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Rasio ketersediaan IPAL	30%	23%	481.750.000		287.105.000	77 %	150.000.000	77		30%	82 %		30%	984.596.204	KLH
5	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen SLHD	ada	ada	46.100.000		109.205.475	Ada	35.360.000	ada		ada	ada	114.455.900	ada	34.406.350	KLH
		Penegakan hukum lingkungan hidup	100%	100%				100%	Tidak ada		100	100%	100%		100%		
1.07	Wajib Perhubungan																

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah sarana prasarana lalu lintas jalan raya (APPIL)	85%	77%	941.600.000	75%	1.064.081.000	75%	2.043.530.750	85%	1.518.935.250	85%	85%	2.331.846.450	85%	941.600.000	Dishubkominfo
2	Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta fasilitas Terminal tipe A dg kondisi yg baik di Kota Magelang	80%	50%	288.902.000	75%	170.252.475	75%	252.106.300	80%		80%	80%	238.866.275	80%	288.902.000	Dishubkominfo
		Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	75%	0%		70%		70%		70%		75%	20%		75%		Dishubkominfo
		Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type c) yang tertata	70%	50%		50%		1 buah		2%		70%	1 buah		70%		Dishubkominfo
		Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik	90%	70%		80%		85%		85%		90%	85%		90%		Dishubkominfo
		Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum	90%	60%		75%		80%		80%		15 buah	90%		15 buah		Dishubkominfo

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte/Sub terminal yang ada di Kota Magelang)	15	19		9 buah		9 buah		9 buah		2218 KBWU	15		2218 KBWU		Dishubkomi nfo
3	Peningkatan kelaikan pengoperasional kendaraan bermotor	Jumlah uji KIR angkutan umum dan angkutan barang di Kota Magelang	2218KBWU	9486 KBWU	89.398.000	9937 KBWU	94.40.150	10721 KBWU		10721	284.231.050	5%	>2218	324.373.100	5%	89.398.000	Dishubkomi nfo
		Rasio kepemilikan KIR angkutan umum	5%					5 %		5		30 Menit	<10 %		30 Menit		Dishubkomi nfo
		Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	30 mnt					15 menit		15		36000	27 menit		36000		Dishubkomi nfo
		Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	36000					Sesuai perda		40300		0.82%	40.300		0.82%	229.590.000	Dishubkomi nfo
5	Peningkatan pelayanan angkutan	Rasio ijin trayek	0,82%					0.256 %		0.799	356.028.080	170.000	0,77 %	681.109.440	170.000		Dishubkomi nfo

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Jumlah arus penumpang angkutan umum	170000					2.987.572		2.972.853		170.000	>177.000		170.000		Dishubkominfo
		Jumlah orang/barang yang melalui terminal per tahun	170000	179.986		3052278		2.987.572		2.972.853		170000	>177.000		170000		Dishubkominfo
1.25	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika																
1	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Jumlah jaringan komunikasi operator dengan kondisi baik	8	16	181.819.000	8	315.488.200	8	455.716.100	8	1.013.858.497	8	8	1.637.393.472	8	181.819.00	Dishubkominfo
		Jumlah sarana penyedia informasi melalui media informasi	13	11		11		12		13		13	13		13		Dishubkominfo
		Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	17	7		10		13		13		17	13		17		Dishubkominfo
		Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,59%	0.098%		0.65%		0.65%		0.045		0.059%	0,045%		0.059%		Dishubkominfo

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp		
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Tersedianya / Jumlah Hot Spot pada ruang terbuka publik di Kota Magelang	5 titik	2 titik		4 titik		4 titik		20			5 titik	5		5 titik		Dishubkominfo
2.04	Urusan pilihan pariwisata																	
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan wisata	1,119,365	170.091	237.300.000	208.175	270.439.925		508.229.255				1.119.365	1.130.989	344.788.000	1.119.365	501.000.000	Disbudparpora
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	8,0	7.8										8,05%				Disporabudpar
1.17	Urusan wajib kebudayaan																	
1	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	165	160	210.286.000		151.151.000	162	316.380.000	164	506.137.260	165	165	1.962.599.500	165	672.842.600	Disporabudpar	
		Jumlah gedung kesenian	2	1				1		1								Disporabudpar
2	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah festival seni dan budaya.	5	1	130.000.000			4	117.420.000	5	218.923.000	5	15	338.117.000	5	477.000.000	Disporabudpar	

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	36	36				36		34				35			Disporabudpar
1.2 2	Urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
1	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	70%	100%	550.711.000	41%	339.121.900	55 %	237.591.000		307.200.050	70%	100 %	334.088.000	70%	804.128.000	BPMPKB
		LPM berprestasi	17,65	17.6%						31%		17.65	17		17.65		BPMPKB
		Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	95%	55%						60		100%	100 %		100%		BPMPKB
		pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	100%	100%						100%		100%	100 %		100%		BPMPKB
		Jumlah LKM yang dapat melaksanakan program dengan baik	100%	100%						17%		100%	17		100%		BPMPKB

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;	Kelurahan yang menerapkan TTG	100%	25%	19.500.000	40%	339.121.900	70 %	48.102.450	20%	63.185.950	100%	100 %	61.427.000	100%	129.500.000	BPMPKB
3	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah LKK dan lembaga keuangan masyarakat yang sehat dan berkualitas	70%	60%	17.000.000	41%	76.549.900	55 %			82.125.500	70%	24 %	73.094.000	70%	65.000.000	BPMPKB didukung oleh: SETDA, DISKOPERINDAG, KECAMATAN, KELURAHAN
1.06	Urusan wajib perencanaan pembangunan																
1	Perencanaan Sosial budaya	Jumlah Krenova yang terdata	15	27	63.480.000	28	65.000.000			35	45.951.500	15	36	60.778.020	15	110.000.000	KANTOR LITBANG DAN STATISTIK
2	Perencanaan Sosial Budaya	Jumlah rakor dan monev TKPK	6 kali	4 kali		8 kali	59.745.000			8 kali		6 kali	8 kali	697.904.100	6 kali		Bappeda
1.12	Urusan wajib Kesehatan																

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Perbaikan gizi masyarakat	Jumlah anak sekolah yang mendapatkan PMTAS	450	550	100.000.000	450	223.960.000				231.099.00	450	937	268.125.950	450	450.000.000	BPMPKB DINAS Didukung oleh: PENDIDIKAN
		Posyandu aktif	100%	100%		100%				100		100%	100 %		100%		BPMPKB Didukung: KECAMATAN & KELURAHAN
		Jumlah posyandu yang berprestasi	2,58%	0.6%		1.04%						2.58%	3 %		2.58%		BPMKB Didukung: KECAMATAN & KELURAHAN
1.1.1	Wajib pemberdayaan perempuan																
1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0,16%	0.7%	55.200.000	0.9%	14.359.500			0.80	163.017.800	0.16%	30 orang	60.485.000	0.16%	109.500.000	BPMPKB Didukung: SETDA, KECAMATAN, KELURAHAN

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp		
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	77%	100%						94			77%	100 %		77%	77%	BPMPKB Didukung: SETDA, KECAMATAN, KELURAHAN
2	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	70,2%		157.734.000	42,27 %	55.560.000				54.79		70.03%	70 %	70.406.100	70.03%	294.0287.000	BPMPKB Didukung: SETDA, KECAMATAN, KELURAHAN
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	60%	30%		30%					55		60%	60 %		60%		BPMPKB Didukung: SETDA, KECAMATAN, KELURAHAN
		rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	47,06	20%		20%					44.11		47.06%	1.119 kelompok		47.06%		BPMPKB Didukung: SETDA, KECAMATAN, KELURAHAN

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp		
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	77	0%		72.27 %					76		77	77 %		77		BPMPKB Didukung: SETDA, KECAMATA N, KELURAHAN
		PKK Aktif	100%	100%		100%					100 %		100%	100 %		100%		BPMPKB
		Persentase tenaga kerja di bawah umur		0		0%								0 %				BPMKB
	MISI 5																	
1.0 2	Urusan wajib kesehatan																	
1	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.	100%	Lap.belum masuk		100%	24.173.800	100 %	47.798.750	100.51	66.882.053	100%	141.70 %	156.060.984	103.000.000			DKK
		Angka kelangsungan hidup bayi	995,19/1000 KH	999,98/1000 KH		995,19/1000 KH				996,6		995,1/1000 KH	984,4					DKK

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp		
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
2	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Angka kelangsungan hidup bayi	995,19/1000 KH	999,9/1000 KH	13.000.000	995,19/1000 KH					996,6	475.691.150	995,1/1000 KH	984,4	562.033.020	13.000.000		DKK
		Angka kematian bayi																
3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	rasio dokter persatuan penduduk	0,995	0.0019	12.250.000	0.995	55.455.850	0.0019	9.019.500	1.170	63.447.500	0.995	0,969	33.932.000	0.995	17.500.000		DKK
		rasio tenaga medis persatuan penduduk	1936	0.00136		1.936				1.610			2103					DKK
4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan rawat jalan terhadap jumlah penduduk	15%		5.921.879.000		3.412.986.455		8.855.475.415	18%	13.876.976.880	15%	18%	12.084.874.647	15%	4.584.210.650		DKK
		Cakupan rawat inap terhadap jumlah penduduk	1,50%							14,03		1,5%	14,03%		1,5%			DKK

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Cakupan Puskesmas	100%	0.000039						166.		100%	166,57 %		100%		DKK
		Cakupan Pembantu Puskesmas (PUSTU)	80%	0.000093						70.58		80%	70,59%		80%		DKK
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	18%	0.00016		1.26%				17		18%	23%		18%		DKK
		rasio Rumah sakit persatuan penduduk	8%	0.000069		8%				7		8%	5,79%		8%		DKK
		Terwujudnya RSUD Tidar terakreditasi 16 pelayanan yang menjadi rujukan bagi daerah sekitar	100%							100		100%	100%		100%		DKK
5	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Angka usia harapan hidup	70,93	BPS					50.022.070	70.74	9.468.600	70.93	76,57%	21.010.000	70.93	201.320.0000	DKK
		Jumlah puskesmas santun usila	6							5		6	6		6		DKK

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6	Perbaikan gizi masyarakat	Angka usia harapan hidup	70.93						74.1753 .100	70.74	80.247. 420	70.93	76,57	25.514. 000	70.93	140.000 .000	DKK
7	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase balita gizi buruk	1%	1.59%					78.152. 700	0.19	14.197. 050	1%	0,14%	2.370.0 00	1%	252.907 .000	DKK
8	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan Masyarakat Rentan	100%	100%	3.708.0 00.000	8.144.6 06.898			629.745 .550	100	8.080.0 00	100%	100%	8.080.0 00	100%	1.008.0 00.000	DKK
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	100%	100%						5.15			100%				DKK
9	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA.	>85%			91.11 %	356.559 .100		565.670 .290	100	528.659 .900	85%	100%	662.594 .150	85%	741.400 .000	DKK

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp		
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%		100%				100			100%	100%		100%		DKK
		Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%		84%				95.8			100%	100%		100%		DKK
10	Obat dan pembekalan kesehatan	Prosentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100%	83%		1.489.208.380			1.458.355.615	57			100%	93%	1.852.794.000	100%	2.764.000.000	DKK
11	Pengawasan obat dan makanan	Prosentase jumlah obat dan makanan yang mendapatkan uji keamanan sehingga aman dikonsumsi masyarakat	100%	0	59.900.000				42.566.400	50	47.456.100		100%	66%	64.533.450	100%	119.000.000	RSU
12	Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Prosentase penurunan angka korban keracunan obat dan makanan.	0	100%	25.500.000				64.877.700	0	41.265.800		0	0%	43.435.300	0	55.000.000	RSU

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
13	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan Rumah tangga sehat	98%	88.24 %	8.604.000		862.262.750		1.065.534.000	97.47	475.691.150	98%	98%	562.033.020	98%	734.000.000	DKK
		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif, Strata 3	100%	88.24 %						100		100%	41,18%		100%		DKK
14	Pengembangan Lingkungan Sehat	Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar	97.5%		92.934.000		170.707.700		164.583.350	93	55.238.900	97.5%	94,04%	101.353.300	97.5%	187.900.000	DKK
		Pengawasan lingkungan: Industri Rumah Tangga - Industri Rumah Tangga	55%							91.8			61,2%				DKK
		Rasio Pengembangan wilayah sehat (Permukiman, Obyek Wisata, Industri Rumah Tangga)	80,35%										80,35%				DKK
1.12	Urusan Wajib Berencana dan Sejahtera	Wajib keluarga dan Keluarga															

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,20	3 75.96%	846.380 .000		232.157 .050		627.178 .400	0.23	733.834 .500	0.2	2	352.636 .000	0.2	60.000. 000	BPMPKB
		Rasio akseptor KB	100%	76%		76%		80 %		75		100%	80%		100%		BPMPKB
		Cakupan peserta KB aktif	90%	74%		81.83 %		85 %		79		90%	76%		90%		BPMPKB
		Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	100%			74.93 %		80 %		66		100%	80%		100%		BPMPKB
1.1 3	Wajib sosial																
1	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	jumlah sarana sosial (panti jompo, panti asuhan, panti rehabilitasi)	9	11	18.500. 000	11	6.499.9 00	8	46.035. 000	13	11.463. 500	9	12%	141.883 .375	9	18.500. 000	Disnakertran sos
2	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Prosentase penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	12,92	2.8%		6.15%		8.45 %	190.901 .000	8.4	139.412 .500	12.92%	100%	159.906 .000	12.92	281.195 .700	Disnakertran sos
		PMKS yang memperoleh bantuan sosial		1.5%						4.9			12,92%				Disnakertran sos

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.01	Wajib Pendidikan																
1	Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	90%	61.05%	307.242.000		224.160.00	86 %	173.040.000	96.89	251.995.000	90%	89,98%	496.560.000	90%	1.071.440.000	DINAS PENDIDIKAN
2	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100%	93.14%	16.599.473.000	115.76 %	10.567.261.600		3.917.294.976	114.87	16.805.851			13.606.356.529		11.180.000.000	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100%	84.2%		121.65 %				117.77		100%	115,04 %		100%		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	170,30 %	123.7%		130.65 %				129.53		175.3%	128,57 %		175.3%		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	100%	151.4%		154.68 %				159.53		100%	163,99 %		100%		DINAS PENDIDIKAN
		Angka rata-rata lama sekolah SD/MI	6	6		6				6		6	6,13		6		DINAS PENDIDIKAN
		Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs	3	3		3				3		3	3,03		3		DINAS PENDIDIKAN

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp		
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI	1,60			1.9					1.9		1.6	1,90		1.6		DINAS PENDIDIKAN
		Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	2,29			2.37					2.37		2.29	2,37		2.29		DINAS PENDIDIKAN
		Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	1 :70	1:184		0.098					1:61		1:70	1:185		1:70		DINAS PENDIDIKAN
		Rasio guru/ murid												1:11				
		Rasio guru/ murid per kelas rata-rata												1:10:31				
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	175	154.65 %		134.3 %					135		175	81%		175		DINAS PENDIDIKAN
3	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket B	172.7%	182.25 %					1.262.571.000	186	3.337.530.000		172.7%	206,55 %	4.936.274.500	172.7%	278.000.000	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket B	140	125.07 %		133.57 %				89			140	152,76 %		140		DINAS PENDIDIKAN

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK/MA	3	3		3				3		3	3		3		DINAS PENDIDIKAN
		Angka pendidikan yang ditamatkan	3,11			3.62				3.62		3.11	3,11		3.11		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA	94%			86%				88.5		94%	99,42%		94%		DINAS PENDIDIKAN
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	100%	1:238		100%				100		100%	100%		100%		DINAS PENDIDIKAN
		Rasio guru terhadap murid	1:10	1:10		1:10				1:11		1:10	1:11		1:10		DINAS PENDIDIKAN
		Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	1;10:31	1:10:29		1:30				1:11:31		1:10:31	1:11:31		1:10:31		DINAS PENDIDIKAN
		Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	87164			87764				88.364		87164	92180		87164		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMK/SMA/MA	200	50,95%		70%				120		200%	81%		200%		DINAS PENDIDIKAN

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	Pendidikan non formal	Angka melek huruf	97%	94.14 %	354.432 .000	95%	245.628 .256			98.89	391.940 .000	97%	97%	456.422 .692	97%	318.000 .000	DINAS PENDIDIKAN
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	97%			94%				68.75		97%	100%		97%		DINAS PENDIDIKAN
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	97%	73.91%		92%				85.47		95%	98,90%		95%		DINAS PENDIDIKAN
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	90%	69.01%		84%				89.95		90%	99,35%		90%		DINAS PENDIDIKAN
		usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan	60%	82.44 %		54%				31		60%	60%		60%		DINAS PENDIDIKAN
		persentase pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup	9%							8%		9%	9%		9%		DINAS PENDIDIKAN

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		persentase lembaga PNF terakreditasi c.	3%							28.51		3%	21,43%		3%		DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah model layanan PNF Unggulan	50%	2%						6.66		50%	0,86%		50%		DINAS PENDIDIKAN
5	Pendidikan luar biasa	pendidikan khusus terakreditasi	50%	60%						75		80%	75%		80%		DINAS PENDIDIKAN
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik yang berkualifikasi dan Prasarana pada pendidikan khusus	100%		940.853.000		1.351.162.350			95	969.730.000	100%	95%	1.731.257.000	100%	890.000.000	DINAS PENDIDIKAN
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100%							95		100%	85%		100%		DINAS PENDIDIKAN
		Pendidik yang berkualifikasi dan Prasarana pada pendidikan khusus terpenuhi	100%	76.02%			75%			95		5	95%		5		DINAS PENDIDIKAN
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO	5	1			7			13		5	14		5	5	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	39500	34.561	459.194.000	36870	336.088.200			414.76	74.298.000	39.500	44.136	231.600.000	39.500	1.414.184.000	KANTOR PERPUSTAKAAN
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	58834	58.834		49.934				41476		58.834	92.021		58.834		KANTOR PERPUSTAKAAN
8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Prosentase sekolah melaksanakan kurikulum Bahasa Jawa	100%	100%	8.728.917.000		11.090.200.100			100	5.270.080.500	100%	97.16%	3.436.031.000	100%	13.010.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.18	Urusan wajib Pemuda dan Olah Raga																
1	Program pengembangan dan Keserasian kebijakan Pemuda	Jumlah kegiatan kepemudaan	20	7	0	10				16	27.010.000	20	20	75.429.000	20	40.000.000	DISPORAB UDPAR
2	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	30	28	235.928.000		250.861.175			31	399.384.000	30	31	601.160.000	30	569.500.000	DISPORAB UDPAR

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	Pembinaan dan pemsyarakatan olahraga	i. Jumlah klub olah raga	180	156	545.100.000	31				169	973.379.350	180	164	2.910.626.973	180	1.317.500.000	DISPORAB UDPAR
		Jumlah organisasi olah raga	35	30		183				32		35	31		35		DISPORAB UDPAR
		jumlah even/ kegiatan olah raga yang diselenggarakan	30			43				30		30	34		30		DISPORAB UDPAR
		Jumlah prestasi olah raga dalam even Nasional	50			4				3		50	5		50		DISPORAB UDPAR
4	Peningkatan Sarana Dan Prasarana olahraga	Jumlah gedung olah raga	29	27	124.550.00	27				28	55.657.500		36	10.225.000			DISPORAB UDPAR
		Gelanggang/balai remaja(selain milik swasta)	1							0			0				DISPORAB UDPAR
		Lapangan olah raga	250	231		180				240		250	251		250		DISPORAB UDPAR
	MISI 6																
1.19	Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Frekuensi kegiatan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)	2	1	229.923.000	2	30.123.000			2	45.584.00	2	2	60.467.000	2	303.759.131	Badan Kesbangpolimas
2	Program pendidikan politik masyarakat	Frekwensi dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	4	2	43.712.000	3	43.986.800			1	116.083.000	4	3	46.249.000	4	212.500.000	Badan Kesbangpolimas
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembinaan politik daerah	75%	100%						79,21		75%	75,15		75%		Badan Kesbangpolimas
3	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah ormas yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan di tingkat Provinsi dan Nasional	15	2	139.058.000	14	43.400.000			25	63.025.000	15	17	60.467.000	15	358.757.000	Badan Kesbangpolimas
		Frekuensi koordinasi FKUB	3	1		3				2		3	3		3		Badan Kesbangpolimas

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Angka kriminalitas yang tertangani	6,50%		806.950.000	72.79 %	178.121.000			6.89	193.570.250	6.5	14%	238.270.000	6.5	806.950.000	Badan Kesbangpolimas
		Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	7,00	4.9						5		6	5		6		Badan Kesbangpolimas
		Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	84.62	0.007660		56.61 %				59.77		84.62	62,91%		84.62		Badan Kesbangpolimas
		Petugas Linmas di Kota	1,100	766		740				782		1.100	832		1.100		Badan Kesbangpolimas
		Jumlah Pos Kamling per jumlah Kelurahan	14	13		15				15		14	13		14		Badan Kesbangpolimas
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketentraman, keindahan)	50%							35		50%	50%		50%		Badan Kesbangpolimas
		jumlah aparat yg mendapatkan diklat linmas/	45	9		127				295		45	215		45		Badan Kesbangpolimas

Ko de	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		kamtibmas/SAR/Satpol PP	90	3		61				55		90			90		Satpol PP
			15			9						15			15		DPU
5	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Tersedianya Satlinmas inti penanggulangan bencana	90	60		80	50.152.850			62	24.799.000	90	90	70.149.000	90	65.000.000	Badan Kesbangpol inmas
		Kelengkapan sarana/prasarana penanggulangan bencana di setiap SKPD/perusahaan/perkampungan	65%							65		65%	75%		65%		Badan Kesbangpol inmas
1.13	Wajib sosial																
	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Persentase penurunan penyakit masyarakat	30											19.200.000			Disnakertransos
1.04	Urusan wajib perumahan																

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja								Target dan Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			Target	Rp	
				capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota	1 mobil: 20000	1 mobil : 26000		2 mobil : 26000	89.219. 000			2:26.000	105.270 .000	1 mobil :20000	1 mobil : 26000	170.478 .350	1 mobil :20000		DPU
		Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	100%	100%		100%				100		100%	100 %		100%		DPU

2.7 Permasalahan Pembangunan Daerah

Prioritas permasalahan yang akan disolusikan ditentukan oleh aspek urgensi dan konektivitas dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari mandat kebijakan nasional/provinsi yang bersifat harus dilakukan sebagai bagian tak terpisahkan.

Mekanisme identifikasi permasalahan pembangunan daerah tersebut dilakukan agar permasalahan paling prioritas atau isu strategis daerah, sudah mengakomodasi informasi dari permasalahan yang (mungkin) muncul dari hasil identifikasi kebijakan nasional/provinsi, dinamika lingkungan eksternal dan isu-isu regional, nasional maupun global.

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan berbagai urusan pemerintahan hingga tahun 2015 masih menyisakan permasalahan yang harus segera mendapatkan solusi antara lain sebagai berikut:

2.7.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.7.1.1 Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, yaitu:

- Belum optimalnya pelayanan PAUD disebabkan belum terpenuhinya sarana prasarana, akses, pemerataan dan kualifikasi serta kompetensi tenaga pendidikan dan belum adanya penilik sekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini serta kurangnya kesadaran orang tua akan arti pentingnya pendidikan anak pada usia sedini mungkin.
- Belum meratanya kualifikasi, kompetensi dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, sebagian pendidik belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4, dan sebagian pendidik belum bersertifikat pendidik.
- Belum optimalnya implementasi kurikulum 2013 dalam aspek pemahaman, pembelajaran, penilaian dan pemanfaatan media serta belum terpenuhinya sarana prasarana pendukungnya.
- Belum memadainya sarana prasarana pendidikan dasar seperti sarana CBT, mebelair, rumah dinas penjaga dan sanitasi.
- Kurangnya sumber daya, kompetensi dan kualifikasi pustakawan dan laboran.
- Kurang memadainya sarana prasarana dan tenaga pendidikan pada pendidikan non formal.
- Belum efektifnya pendidikan karakter di sekolah diindikasikan dengan masih adanya vandalisme, kurangnya ketertiban dan kedisiplinan siswa.

2.7.1.2 Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kesehatan yaitu:

- Rendahnya capaian kesehatan ibu dan balita.
- Tingginya penemuan penyakit menular dan PTM.
- Perilaku hidup bersih dan sehat belum menjadi budaya masyarakat.
- Belum optimalnya peran dan fungsi Posyandu.

- Belum optimalnya upaya pengawasan obat dan makanan

2.7.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang:

- Adanya kemacetan jalan arteri primer yang merupakan kewenangan Nasional di Jalan Urip Sumoharjo sepanjang 3,9 Km dikarenakan kondisi pendampang jalan tidak memadai dan terjadi bottle neck di simpang Canguk.
- Masih perlunya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan, irigasi, dan saluran drainase yang sudah ada.
- Secara fisik ruas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, oleh karena itu untuk menjaga kondisi tersebut perlu pemeliharaan dan peningkatan baik secara rutin dan berkala, khususnya yang di bawah pengelolaan pemerintah Kota Magelang.
- Masih perlunya penambahan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan baru, terutama pada wilayah perbatasan di sisi Barat dan Timur wilayah Kota Magelang.
- Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku.
- Adanya konversi lahan persawahan ke permukiman/perumahan baru pada setiap tahunnya, akan mempengaruhi penyediaan saluran irigasi.
- Jaringan irigasi teknis masih menjadi tumpuan pembuangan air hujan dan air limbah dari permukiman dan perumahan.
- Belum optimalnya fungsi dan peran prasarana dan sarana drainase untuk pengendalian banjir dan genangan pada musim penghujan.
- Perlunya optimalisasi pengelolaan sampah mengingat TPSA Banyuurip sudah over load disebabkan; pengurangan sampah dari sumbernya masih sangat kecil yaitu sebesar 1.5 % dari jumlah timbulan sampah, Prasarana pengelolaan sampah yang ada seperti TPST dan SPA 3R belum optimal. Optimalisasi penataan ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan, sampai pada pengendalian dengan meningkatkan peran pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lain.
- Masih lemahnya pengendalian dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang karena belum ada rencana rinci Tata Ruang Kota Magelang sampai saat ini belum ditetapkan menjadi produk hukum. Proses menuju legalisasi raperda RDTR sangat panjang.
- Kesadaran masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan ruang sesuai arahan tata ruang masih rendah.
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang masih kurang
- Pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan kegiatan masih kurang.
- Sarana dan prasarana untuk pengawasan dan pengendalian tata ruang masih kurang.
- Belum optimalnya pengembangan sistem informasi kepada masyarakat dibidang penataan ruang;
- Konflik pemanfaatan ruang daerah perbatasan;

- Ketersediaan RTH publik di Kota Magelang belum memenuhi amanah Undang-undang RI No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

2.7.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan permukiman yaitu:

- Masih adanya rumah tinggal yang belum terlayani air minum dan belum bersanitasi layak serta kawasan kumuh masih luas sekitar 121,7 Ha, yang menjadi tuntutan untuk mencapai akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, akses sanitasi layak 100%, di akhir RPJMN 2015-2019.
- Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya.
- Masih adanya lingkungan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di Kota Magelang.
- Belum optimalnya upaya pemeliharaan terhadap sarana permukiman yang ada guna memperpanjang usia pakai sarana tersebut.
- Masih perlunya peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman perkotaan, yang meliputi prasarana jalan lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air bersih lingkungan, serta prasarana sanitasi lingkungan.
- Belum tersusunnya NSPK Permukiman/perumahan, di Kota Magelang.

2.7.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu:

- Meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan
- Partisipasi politik masyarakat relatif rendah
- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bencana dan penanggulangannya serta mitigasi bencana

2.7.1.6 Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan urusan sosial yaitu:

- Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS masih rendah.
- Masih rendahnya jaminan perlindungan dan bantuan sosial serta belum optimalnya akses pelayanan sosial bagi masyarakat
- Masih tingginya jumlah PMKS
- Kurangnya sarana sosial untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial secara komprehensif.

2.7.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.7.2.1 Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan adalah:

- Masih rendahnya minat pencari kerja untuk bekerja di luar daerah/negeri
- Belum terakreditasinya lembaga pelatihan kerja (negeri dan swasta) yang berakibat pada rendahnya daya saing lulusan pelatihan kerja di pasar kerja.
- Masih rendahnya kesadaran para pencari kerja akan pentingnya sertifikasi kompetensi di pasar kerja
- Masih cukup tingginya jumlah perselisihan antara pengusaha dengan pekerja
- Masih rendahnya kesadaran para pengusaha akan pelaksanaan norma ketenagakerjaan termasuk pelanggaran pelaksanaan UMK di beberapa perusahaan.
- Belum adanya pendampingan berkelanjutan kepada wirausaha baru (lulusan pelatihan kewirausahaan)
- Belum adanya penguatan kompetensi tenaga kerja untuk mengisi pasar kerja di luar negeri

2.7.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

- Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia perempuan.
- Belum optimalnya implementasi RAD KLA
- Kecenderungan terjadinya kenaikan jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

2.7.2.3 Pangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pangan yaitu:

- Rendahnya produksi komoditas pangan (tanaman, ternak, dan ikan) asal Kota Magelang, sebagai akibat dari konversi lahan pertanian menjadi non pertanian.
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan maupun lahan yang tidak terpakai di rumah tangga untuk budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan;
- Adanya potensi kerawanan pangan dan gizi, akibat masih tingginya jumlah penduduk miskin;
- Tingginya fluktuasi harga beberapa komoditas pangan, seperti: daging sapi, daging unggas, telur, cabe, dan bawang merah;
- Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Magelang mengenai konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.
- Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal sebagai pangan utama, sehingga skor PPH Kota Magelang masih berada di angka 95%. Sementara, target PPH Nasional pada tahun 2020 adalah sebesar 100%.

- Masih beredarnya pangan yang mengandung zat aditif (penyedap, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat, dan anti gumpal) dan berbahaya di pasaran, termasuk lingkungan sekolah .
- Adanya pencemaran bahan kimia (pestisida) pada beberapa komoditas pangan segar seperti: sayur, dan buah-buahan.

2.7.2.4 Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan yaitu:

- Terbatasnya lahan di Kota Magelang, sehingga pengembangan kawasan perumahan dengan luasan relative kecil, sehingga tidak perlu ijin Lokasi.
- Selain terbatasnya lahan perumahan di Kota Magelang, nilai lahan yang tinggi di Kota Magelang juga berpengaruh untuk pengembangan kawasan skala besar.
- Untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat Kota Magelang, pengembangan kawasan perumahan skala besar atau luasan diatas 1 hektar berada di wilayah kabupaten Magelang terutama wilayah yang berbatasan dengan Kota Magelang seperti di Kecamatan Mertoyudan.
- Sulitnya pengendalian penggunaan lahan. Antara lain disebabkan karena persepsi bahwa dengan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat sendiri masyarakat berhak mengelola/menggunakannya sesuai dengan keinginan sendiri.

2.7.2.5 Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup yaitu:

- Semakin meningkatnya pencemaran lingkungan yang banyak dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, industry, rumah sakit, perhotelan, transportasi, dan pertokoan sehingga perlu adanya upaya pengendalian pencemaran baik air, tanah, maupun udara yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha.
- Belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan
- Banyak industri kecil (seperti industri tahu, batik, dan makanan) yang sangat berpotensi mencemari lingkungan tapi tidak bisa memenuhi persyaratan teknis dan pembiayaan pembuatan IPAL
- Belum adanya pejabat fungsional PPLHD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- ,Minimnya peosentase oengurangan sampah dari sumbernya disebabkan peran serta masyarakat masih kurang karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan sampah domestik
- Masih belum terciptanya perubahan paradigma masyarakat dari hanya membuang sampah ke penelolan sampah..

- Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, diindikasikan dengan belum terpenuhinya RTH publik sehingga perlu optimalisasi lahan terbuka yang sudah ada seperti makam dan sempadan sungai,
- Ketersediaan RTH publik di Kota Magelang belum memenuhi amanah Undang-undang RI No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.
- Kurangnya lahan terbuka hijau (RTH) dan menurunnya kualitas RTH kota seperti taman-taman kota
- Belum meratanya penyediaan prasarana di TPU, dimana lokasi yang lebih jauh kedalam belum dilengkapi dengan akses jalan paving / beraspal.

2.7.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu:

- Masih terjadinya pelanggaran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang ditunjukkan dengan adanya warga yang belum memiliki KTP elektronik dan akte kelahiran.
- Masih lemahnya kerja sama bidang administrasi kependudukan antara pemangku kepentingan terkait.

2.7.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahanyang yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat yaitu:

- Belum optimalnya peran lembaga dan organisasi kemasyarakatan untuk turut serta dalam meningkatkan kemandirian masyarakat.
- Mayoritas LKK dalam kondisi keuangan tidak sehat, sehingga belum memberikan kontribusi optimal dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

2.7.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yaitu:

- Rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber KB.
- Terbatasnya tenaga penyuluh KB sebagai ujung tombak di lini lapangan
- Struktur penduduk dominan pada usia produktif sehingga sulit untuk meningkatkan cakupan peserta KB.

2.7.2.9 Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perhubungan yaitu:

- Sarana prasarana transportasi kelengkapan jalan (ACTS, PJJ, dan lain-lain) belum memadai
- belum tersedianya terminal type C di Kota Magelang.

- Tingginya volume pergerakan/mobilitas terutama pada jam-jam sibuk yang tidak didukung oleh sarana prasarana jaringan jalan sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk terjadinya kemacetan dan potensi peningkatan kecelakaan lalu lintas.
- Untuk jalan yang dikelola pemerintah provinsi Jawa Tengah, masih ada yang lebarnya tidak sama, dan kondisi jalannya rusak.
- Pergeseran penggunaan moda angkutan umum ke angkutan pribadi.
- Sarana dan prasarana terminal Sukarno Hatta belum memenuhi syarat.
- Tidak tersedianya terminal barang di Kota Magelang.
- Berkurangnya kualitas sarana prasarana yang diberikan bagi pengguna kendaraan umum yang mendukung Kota Magelang sebagai Kota Jasa
- Kurangnya disiplin pengguna jalan terhadap rambu-rambu dan aturan-aturan yang berlaku.
- Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas.
- Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal terutama pada badan jalan yang mengakibatkan kemacetan dan tundaan perjalanan karena parkir.
- Kurangnya keterpaduan sistem jaringan jalan.
- Masih perlunya pengujian kelayakan kendaraan bermotor

2.7.2.10 Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika yaitu:

- 1) Permasalahan aplikasi informatika
 - Implementasi e-Government kurang optimal karena kurangnya kesiapan dari pemerintah baik dari SDM maupun sarana prasarana,
 - Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai. Sistem WAN belum terimplementasi secara optimal.
 - Perlunya pengembangan Platform Smart City untuk Integrasi Data dan Layanan
 - Belum dikembangkan Operation Room Smart City serta belum diintegrasikan Data Eksisting SKPD Kota Magelang
 - Belum dibentuknya Tata Kelola Smart City.
 - Sistem informasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal,
 - Kualitas sumberdaya manusia belum memadai.
 - Masih banyak digunakan software tidak berlisensi legal.
 - Belum optimalnya kerjasama antar SKPD dalam pengelolaan, penyediaan data

- Belum terkelolanya informasi publik baik.
 - Kurangnya kesadaran SKPD dalam mengelola website dan sistem informasi.
- 2) Permasalahan komunikasi dan informasi publik
- Penyediaan sarana komunikasi dan informatika untuk masyarakat dengan meningkatkan perhatian kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan mengelola informasi publik dengan baik.
 - Penyediaan sarana komunikasi dan informatika untuk masyarakat perlu ditingkatkan.
 - Masih kurangnya perhatian terhadap Kelompok Informasi Masyarakat.
 - Belum terkelolanya informasi publik dengan baik.

2.7.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu :

- modal yang terbatas yang menyebabkan volume usaha terbatas dan kurang bisa memelihara asetnya,
- SDM pengelola yang kurang terampil sehingga banyak kepentingan administrasi yang terabaikan dan solidaritas antar anggota yang kurang terjalin,

Sedangkan permasalahan yang dihadapi UKM antara lain:

- Rendahnya daya saing,
- terbatasnya modal dan masih terbatasnya akses perbankan bagi UKM,
- kurangnya wilayah pemasaran, sarana promosi produk, kemampuan akses usaha, kemampuan manajerial sumberdaya manusia pengelolanya,
- kemampuan inovasi dan kreativitas, dan kemampuan penguasaan teknologi yang masih terbatas

2.7.2.12 Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal yaitu:

- kurangnya informasi dan promosi terhadap potensi investasi yang ada di Kota Magelang;
- kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena kekurangsiapan sumberdaya dan sarana prasarana dalam menarik investor,
- ketentuan hukum yang kurang konsisten (masih terdapat overlap antara peraturan perundangan yang satu dengan yang lain),
- pelayanan pengurusan perijinan yang masih membutuhkan waktu lebih dari satu hari, serta terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang menangani pelayanan pengurusan perijinan dan investasi di Kota Magelang.

- masih rendahnya rasio penyerapan tenaga kerja

2.7.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga yaitu:

- Kurangnya sarana prasarana bagi pemuda seperti gedung pemuda, pusat eksplorasi potensi, sekretariat pemuda, jejaring informasi dan komunikasi.
- Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan, daya tangkal, kepedulian terhadap masalah-masalah pembangunan, keterbatasan akses dan kemitraan, serta lemahnya lembaga pemuda.
- Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan pemuda.
- Masih lemahnya fasilitas untuk pengolahan data, pembenahan sistem informasi dan database pembangunan kepemudaan dan olahraga
- Penurunan prestasi olahraga karena kurangnya kompetisi olahraga yang berjenjang dan agenda kompetisi tidak menentu, lemahnya pembibitan, pembinaan, pemanduan dan pemasyarakatan olahraga, belum adanya klub olahraga di sekolah-sekolah serta
- Terjadinya mutasi olahragawan berprestasi dari Kota Magelang ke daerah lain kurangnya penghargaan dan perlindungan terhadap atlet berprestasi.
- Fasilitas olahraga yang belum memenuhi standar nasional dan internasional, kuantitas lapangan olah raga yang belum memadai, rendahnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan olah raga.

2.7.2.14 Statistik

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan statistik yaitu:

- Kurangnya ketersediaan data dasar dan data makro yang akurat dan up to date.
- Kurangnya konsistensi dan validitas data dari Perangkat Daerah
- Belum optimalnya kerjasama antar Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan penyediaan data;
- Kurangnya tenaga profesional yang khusus menangani masalah pendataan di tiap unit kerja.
- Data dan referensi yang digunakan tidak konsisten

2.7.2.15 Persandian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan persandian yaitu:

- Keterbatasan SDM persandian
- Infrastruktur jaringan belum memadai

- Fungsi persandian belum dipahami secara menyeluruh oleh birokrasi sebagai suatu fungsi teknis pemerintahan yang memberikan proteksi terhadap nilai kerahasiaan informasi pemerintahan

2.7.2.16 Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan yaitu:

- Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian Benda, Situs dan Cagar Budaya.
- Belum memadainya sarana prasarana dan kualitas sumber daya manusia seni dan budaya.
- Masih lemahnya fasilitas untuk pengolahan data, pembenahan sistem informasi dan database pembangunan kebudayaan dan pariwisata
- Kurangnya pembinaan dan pengembangan seni dan budaya daerah.
- Kurangnya fasilitasi penyelenggaraan berbagai even seni dan budaya serta pengemasan secara atraktif dan menarik serta berskala tidak hanya lokal, namun juga regional, nasional bahkan internasional.
- Budaya daerah belum banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat.
- Belum optimalnya pembinaan/ pendidikan moral, etika dan budi pekerti bagi para remaja dan siswa sekolah.
- Kurangnya perlindungan dan pelestarian terhadap kekayaan budaya nasional/daerah, sehingga sangat rentan untuk diambil alih/diakui oleh pihak-pihak lain.
- Kurangnya promosi budaya daerah, efektivitas system inventarisasi dan penyajian informasi mengenai jenis dan ragam budaya daerah Kota Magelang.

2.7.2.17 Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan yaitu:

- Perlunya optimalisasi untuk lebih meningkatkan minat baca di dalam masyarakat yang disebabkan oleh masih kurangnya budaya membaca masyarakat;
- Perlunya peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan (perpustakaan daerah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus/instansi, perpustakaan kelurahan, perpustakaan rumah ibadah, dan perpustakaan sekolah).
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.
- Perpustakaan digital belum menjadi fokus program

2.7.2.18 Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kearsipan yaitu:

- Belum optimalnya sistem kearsipan yang disebabkan oleh kurangnya SDM dan sarana dan prasarana kearsipan serta rendahnya perhatian dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kearsipan;
- Belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan daerah yang disebabkan oleh belum tersedianya sistem informasi kearsipan yang memadai.
- Digitalisasi arsip belum menjadi fokus kebijakan

2.7.2.19 Urusan Pilihan

2.7.2.20 Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan yaitu:

- Rendahnya produksi perikanan Kota Magelang, sebagai akibat dari alih fungsi lahan perikanan menjadi perumahan, industri, dan fasilitas umum lainnya.
- Belum adanya kelompok masyarakat perikanan yang bersertifikasi CBIB, CPIB dan Kelayakan Pengolahan.
- Belum berkembangnya perikanan yang ramah lingkungan di Kota Magelang, sehingga merusak kelestarian dan mengganggu keamanan ekosistem air tawar.
- Belum berkembangnya budidaya perikanan di lahan sempit (tidak terpakai) di Kota Magelang.
- Belum optimalnya peningkatan fungsi dan peran kelembagaan pelaku utama perikanan (pembudidaya, pemasar dan pengolah)

2.7.2.21 Pariwisata

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pariwisata yaitu:

- Sumbangan sektor pariwisata terhadap PAD belum optimal, disebabkan belum optimalnya promosi, informasi dan pemasaran pariwisata promosi yang dilakukan, baik di dalam maupun luar negeri, sehingga jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran belanja wisatawan masih relatif kecil.
- Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata masih lemah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas produk dan jasa pariwisata, kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan obyek dan daya tarik wisata, masih rendahnya kualitas SDM pengelola obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata maupun para pelaku pariwisata lainnya.
- Kurang memadainya sarana dan prasarana kepariwisataan dan sumber daya manusia pengelola pariwisata.
- Kurangnya kreativitas, kreasi, atraksi dan berbagai fasilitas pendukung destinasi pariwisata
- Belum optimalnya penyelenggaraan even pariwisata yang dilaksanakan secara periodik yang dikemas dalam atraksi yang menarik dan atraktif serta berskala luas yang mampu menarik wisatawan berkunjung.

- Masih lemahnya kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat masih belum terjalin dengan baik. Hal ini disebabkan oleh lemahnya jejaring, kerjasama, koordinasi dan keterpaduan dalam pengembangan pariwisata serta rendahnya partisipasi masyarakat.

2.7.2.22 Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanian adalah:

- Berkurangnya lahan pertanian produktif sebagai akibat dari alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.
- Budidaya pertanian maupun peternakan masih dilakukan secara konvensional menggunakan bahan kimia sintetis, menyebabkan penurunan kualitas air, tanah, udara, dan lingkungan.
- Belum termanfaatkannya lahan sempit (tidak terpakai) untuk budidaya pertanian (hortikultura, florikultura maupun peternakan (urban farming) berbasis ramah lingkungan/organik.
- Belum berkembangnya agribisnis tanaman hias dan bunga sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat Kota Magelang.
- Jumlah kelompok budidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang masih relatif sedikit. Hal ini disebabkan karena belum berkembangnya florikultura di masyarakat Kota Magelang.
- Produk-produk yang dihasilkan oleh sektor pertanian dan peternakan belum bersertifikasi. Petani Kota Magelang belum melaksanakan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP). Selain itu, unit usaha peternakan belum bersertifikasi halal maupun higiene-sanitasi (NKV)

2.7.2.23 Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral yaitu:

- Belum optimalnya upaya penghematan energi
- Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam terbarukan

2.7.2.24 Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perdagangan yaitu:

- Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta belum berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
- Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah

2.7.2.25 Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perindustrian yaitu:

- Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi;
- Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk;
- Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM;
- Terbatasnya produk berorientasi ekspor.
- Semakin menurunnya daya serap tenaga kerja pada sektor industri menengah.

2.7.2.26 Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan transmigrasi adalah:

- Penentuan jumlah transmigran yang dikirim dan lokasi penempatan masih menjadi kewenangan pusat yang tidak dapat ditawar oleh pemerintah daerah baik propinsi maupun kab/kota
- Rendahnya minat penduduk Kota Magelang untuk bertransmigrasi
- Belum adanya terobosan dari Kota Magelang untuk mengikuti program transmigrasi swakarsa, dimana pemerintah daerah pengirim bertanggung jawab dalam pemberian bantuan kebutuhan dasar hidup kepada calon transmigrans.
- Pelatihan bagi calon transmigrans masih dilakukan secara klasikal belum mengarah pada minat dan bakat serta skill/kemampuan. Perlu adanya koordinasi dengan bidang pelatihan dan produktivitas untuk pelatihan teknis dan dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan dalam pemberian wawasan berwirausaha

2.7.3 Fungsi Penunjang Pemerintahan

2.7.3.1 Perencanaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan adalah:

- Belum sinergisnya proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik
- Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi
- Adanya ego atau kepentingan antarsektor yang mengakibatkan adanya kesulitan dan miskordinasi. Disamping itu persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya

- Perlunya pemahaman yang sama di Perangkat Daerah terkait urgensi dan signifikansi perencanaan pembangunan daerah beserta indikator-indikator keberhasilan di masing-masing urusan yang diemban pada setiap level struktural. Hal ini akan meningkatkan fokus pencapaian indikator sebagai garda depan perencanaan dan penganggaran, bukan perencanaan penganggaran yang incremental
- Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah.
- Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya.

2.7.3.2 Fungsi Penunjang Keuangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan adalah:

- Belum optimalnya sistem pajak online
- Law enforcement belum sepenuhnya dijalankan, yaitu denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya
- Belum optimalnya penilaian kembali atas tanah dan bangunan
- Belum adanya peta zona nilai tanah tahun terbaru sebagai perhitungan nilai pasar
- Belum optimalnya penggunaan instrumen Analisis Standar Biaya (ASB) perencanaan penganggaran dalam penyusunan penganggaran
- Belum optimalnya pemahaman pengelola keuangan Perangkat Daerah atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis accrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
- Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Perangkat Daerah yang menangani pendapatan.

2.7.3.3 Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Diklat

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan diklat sebagai berikut:

- Kinerja pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum semuanya memuaskan
- Pengisian jabatan ASN belum seluruhnya berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja
- Layanan kepegawaian belum sepenuhnya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi
- Belum optimalnya evaluasi layanan kepegawaian
- Belum terpenuhinya sarana prasarana penunjang layanan kepegawaian

- Penegakan disiplin pegawai belum didukung dengan penerapan sistem reward dan punishment yang terintegrasi
- Adanya perubahan manajemen ASN menuntut pembaharuan peraturan kepegawaian di daerah
- Pemahaman ASN yang kurang terhadap aturan penyusunan sasaran kerja pegawai

2.7.3.4 Fungsi Penunjang Pengawasan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang pengawasan yaitu:

- Manajemen pengawasan lemah disebabkan pemeriksaan belum berbasis resiko, pengendalian internal dan quality assurance
- Kompetensi APIP rendah disebabkan terbatasnya DIKLAT teknis pengawasan
- SPIP tidak efektif disebabkan belum optimalnya pembinaan dan peran Satgas SPIP
- Pencegahan KKN lemah disebabkan rendahnya komitmen aparat pemerintah daerah

2.7.3.5 Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yaitu:

- Masih minimnya jumlah MoU antara Pemerintah Kota Magelang dengan Kementrian/LNDP/pembina terkait penelitian & pengembangan
- Belum optimalnya pembinaan dan hilirisasi produk hasil kreativitas dan inovasi masyarakat
- Rendahnya proporsi SDM pengelola Kelitbang
- Kurang kuatnya dalam menjalani fungsi koordinasi
- Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi di Kota Magelang
- Belum terimplementasikannya online jurnal system di Kota Magelang
- Belum adanya payung hukum yang mengatur Penguatan Sistem Inovasi Daerah
- Belum optimalnya fungsi Forum Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK (Jarlitbangrap IPTEK)

2.8 Dinamika Lingkungan Strategis

2.8.1 Kajian Kebijakan Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Internasional

A. Isu Global/ Internasional

1. *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Agenda Pembangunan Pasca 2015

Memberikan arahan tentang pentingnya tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang harus bersinergi dalam pembangunan global ke depan. SDGs dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama MDGs yang belum tercapai, yang antara lain permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan status nutrisi. Selain itu, SDGs juga terbuka bagi beberapa isu pembangunan yang muncul sejak MDGs lahir di tahun 2000, seperti ketersediaan anggaran, perubahan iklim, ketersediaan energi, dan lainnya. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan SDGs meliputi:

- 1) Penghapusan Kemiskinan
- 2) Penghapusan Kelaparan
- 3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan
- 4) Pendidikan Berkualitas
- 5) Kesetaraan Gender
- 6) Air Bersih dan Sanitasi
- 7) Energi Bersih dan Terjangkau
- 8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak
- 9) Infrastruktur tangguh, Industri inklusif, dan Inovatif
- 10) Penurunan Kesenjangan
- 11) Kota Inklusif Dan Berkelanjutan
- 12) Konsumsi Dan Produksi Berkelanjutan
- 13) Perubahan Iklim Dan Pengurangan Resiko Bencana
- 14) Pelestarian Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Bawah Laut
- 15) Pelestarian Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat
- 16) Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Kokoh
- 17) Kemitraan Untuk Semua Tujuan Pembangunan.

Terkait dengan SDGs, Pemerintah Kota Magelang berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi,

penurunan kesenjangan, serta peningkatan kemitraan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kota Magelang mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu: *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment*”.

2. Masyarakat Ekonomi Asean (*Asean Economic Community/AEC*)

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi *Association Of Southeast Asian Nations*, isu-isu yang dikembangkan adalah:

- 1) Pengembangan Industri Nasional;
- 2) Pengembangan Pertanian;
- 3) Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
- 4) Pengembangan Energi;
- 5) Pengembangan Infrastruktur;
- 6) Pengembangan Sistem Logistik Nasional;
- 7) Pengembangan Perbankan;
- 8) Pengembangan Investasi;
- 9) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 10) Pengembangan Tenaga Kerja;
- 11) Pengembangan Kesehatan;
- 12) Pengembangan Perdagangan;
- 13) Pengembangan Kepariwisata;
- 14) Pengembangan Kewirausahaan.

Berlakunya MEA memberikan tantangan bagi Pemerintah Kota Magelang untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan sarana prasarana kota, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan daya saing hasil produk Kota Magelang agar mampu bersaing secara global.

B. Isu Nasional

1. RPJPN 2005-2025 (untuk RPJMN III)

Secara umum kebijakan pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Dari kebijakan RPJPN 2005-2025 tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Kota Magelang untuk: meningkatkan daya saing daerah melalui keunggulan kompetitif perekonomian, SDM dan kemampuan Iptek yang tinggi.

2. RPJMN 2015-2019

Kebijakan pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019 diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. **Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, yang dilakukan melalui **7 misi pembangunan** yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “**Nawa Cita**”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk **melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman** kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun **tata kelola pemerintahan** yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. **Membangun Indonesia dari pinggiran** dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam **melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum** yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan **kualitas hidup manusia dan masyarakat** Indonesia;
6. Meningkatkan **produktivitas rakyat dan daya saing** di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan **sektor-sektor strategis** ekonomi domestik;
8. Melakukan **revolusi karakter bangsa**;
9. Memperteguh **kebhinekaan** dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Tantangan RPJMN 2015-2019 bagi pemerintah Kota Magelang adalah: (i) menjalankan reformasi birokrasi publik; (ii) membuka partisipasi publik; (iii) membangun politik legislasi yang kuat: pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup. RPJMN 2015-2019 secara umum menantang pemerintah Kota Magelang membuat perencanaan pembangunan 2016-2021 dengan memprioritaskan penataan kebijakan dan kelembagaan perangkat daerah yang bersih, demokratis, partisipatif dan akuntabel untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Tantangan yang dihadapi dari kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagi pembangunan daerah Kota Magelang adalah: (i) mengelola penataan organisasi pemerintah daerah yang efisien dan efektif; (ii) mengelola aparatur supaya profesional, kompetitif, akuntabel; (iii) pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar secara efisien dan akuntabel; (iv) tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dengan multi pemangku kepentingan dan akuntabel. Efisiensi belanja rutin dan prioritas alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan wajib dasar menjadi tantangan perencanaan pagu anggaran tahun 2015-2019.

Kebijakan moratorium PNS memberikan tantangan pemerintah Kota Magelang untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan pencari kerja selama 5 tahun di luar sektor PNS. Kreativitas pemerintah Kota mendidik wirausaha muda menjadi tantangan berat. Diperlukan program terobosan pemerintah untuk memfasilitasi angkatan pencari kerja dengan pihak swasta pemilik usaha.

2.8.2 Kebijakan Pembangunan Lainnya

A. RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Isu – isu strategis dan permasalahan mendesak yang menjadi prioritas pada tingkat Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan
2. Pengurangan Pengangguran
3. Pembangunan Infrastruktur

4. Kedaulatan Pangan
5. Kedaulatan Energi
6. Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah

Dari RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 serta berbagai dokumen perencanaan skala global, nasional maupun regional diatas secara umum memberikan tantangan bagi pemerintah Kota Magelang untuk membuat perencanaan pembangunan 2016-2021 dengan memprioritaskan penataan kebijakan dan kelembagaan perangkat daerah yang bersih, demokratis, partisipatif dan akuntabel untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2.8.3 Kebijakan Pembangunan Daerah RPJPD Kota Magelang 2005-2025

Tantangan yang dihadapi Kota Magelang sesuai RPJP Kota Magelang 2005-2025 adalah terwujudnya 5 sasaran dengan indikator sebagai berikut:

Tabel II.151
Sasaran dan Indikator RPJPD Kota Magelang 2005-2025

No	Sasaran RPJP	Indikator
1.	<i>Terwujudnya Kota Magelang sebagai pusat pelayanan jasa yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang memadai</i>	<p>Terwujudnya Kota Magelang sebagai pusat pelayanan jasa untuk wilayah Jawa Tengah Bagian Tengah.</p> <p>Terpenuhinya kualitas sumber daya manusia untuk kebutuhan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan di kota Magelang</p> <p>Terlengkapinya sarana dan prasarana fisik sebagai pendukung penyelenggaraan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan sebagai fasilitas pendukung kota jasa</p>
2.	<i>Terwujudnya masyarakat Kota Magelang yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab,</i>	<p>a. Terwujudnya karakter masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral yang berdasarkan falsafah Pancasila. Dicitrakan dengan watak, perilaku masyarakat yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi iptek dan sumber daya manusia yang berkualitas.</p> <p>b. Perilaku masyarakat yang berbudaya, ditandai dengan meningkatnya peradaban, harkat, martabat, menguatnya jati diri, kepribadian, menguatnya ketahanan dan modal sosial masyarakat</p>
3.	<i>Terwujudnya daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan Kota Magelang yang efisien, efektif, profesional, berwawasan lingkungan, mengembangkan potensi daerah</i>	<p>a. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, didukung oleh peran sektor jasa dengan kualitas pelayanan yang lebih bermutu dan berdaya saing.</p> <p>b. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukungnya bagi</p>

No	Sasaran RPJP	Indikator
	<i>secara kreatif, inovatif didukung oleh penguasaan iptek dan sumber daya manusia yang berkualitas</i>	<p>seluruh masyarakat, didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan efektif untuk mewujudkan hunian kota tanpa permukiman kumuh.</p> <p>c. Tingkat pembangunan yang semakin merata keseluruhan wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>d. Terwujudnya lingkungan perkotaan yang sesuai dengan kehidupan layak dan berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam mendukung kualitas kehidupan sosial, ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.</p> <p>e. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang memadai dan terintegrasi dengan wilayah sekitar, serta terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi.</p>
4.	<i>Terwujudnya perekonomian Kota Magelang yang bertumpu pada penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas</i>	<p>a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai 5 (lima) besar tingkat kesejahteraan di wilayah Jawa Tengah.</p> <p>b. Tercapainya keberdayaan masyarakat dengan terfasilitasinya kebutuhan dasar, menguatnya etos kerja dan produktivitas, serta adanya jaminan perlindungan sosial.</p> <p>c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan kemajuan peran perempuan diukur dengan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Angka GDI (<i>Gender-related Development Index</i>) yang mengukur kualitas hidup perempuan dengan meramu komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi, serta peningkatan Angka GEM (<i>Gender Empowerment Measurement</i>) yang menitikberatkan pada partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.</p>
5.	<i>Terwujudnya good governance dan clean government dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat madani (civil society), dan media massa sehingga kehidupan masyarakat Kota Magelang agamis, damai, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran</i>	<p>a. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan Kota Magelang.</p> <p>b. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak azasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 tanpa memandang kedudukan, pangkat dan jabatan seseorang.</p> <p>Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan</p>

No	Sasaran RPJP	Indikator
		ketentuan hukum yang berlaku, birokrat yang profesional dan netral, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri.
		d. Terwujudnya peningkatan peran dunia usaha dalam ikut serta menggerakkan roda pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan (<i>corporate social responsibility</i>).
		e. Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat madani (<i>civil society</i>) dan media massa yang berperan sebagai partner, rekanan, serta pengontrol dan penyeimbang (<i>check and balance</i>) jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

2.9 Analisa Faktor Internal dan Eksternal

1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Letak Kota Magelang yang strategis di tengah Pulau Jawa dan Provinsi Jawa Tengah yang didukung jaringan transportasi dari berbagai arah.
- b. Sebagai pusat pertumbuhan di Purwomanggung (Purworejo, Magelang, dan Temanggung)
- c. Sebagai Kota Pendidikan, memiliki lembaga pendidikan dan pelatihan yang cukup banyak, baik formal maupun informal.
- d. Sebagai kota rujukan kesehatan bagi daerah sekitar, khususnya di eks Karesidenan Kedu.
- e. Sebagai Kota Militer, yang menunjang terciptanya stabilitas keamanan dan ketentraman.
- f. Sebagai Kota Jasa, perdagangan, keuangan/perbankan, dan sebagainya dengan infrastruktur dan sarana prasarana yang sangat memadai.
- g. Citra positif yang dimiliki, ditunjukkan dengan posisi IPM, IPG, IDG, Indeks Daya Saing (tertinggi di Jawa Tengah, hasil survey Bank Indoensia 2016), Investasi, dan berbagai prestasi yang diraih seperti predikat Kota Cerdas Ekonomi, Adipura Kencana, Wahana Tata Nugraha, Anugerah Pangripta Nusantara, hasil Ujian Nasional terbaik dan memiliki indeks integritas tertinggi, dan lain sebagainya.
- h. Hubungan kemasyarakatan yang harmonis antar berbagai golongan.
- i. Ketersediaan berbagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan dimensi-dimensi otonomi daerah.
- j. Sistem pengelolaan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain) yang berjalan dengan baik.
- k. Jumlah dan kapasitas sumber daya aparatur dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Keterbatasan lahan dan sumber daya alam yang dimiliki.
- b. Lemahnya kemampuan keuangan daerah (Pendapatan Asli Daerah yang sangat kecil).
- c. Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, dibawah rata-rata Jawa Tengah.
- d. Rendahnya realisasi investasi dibanding dengan kebutuhan investasi.
- e. Kurangnya kerjasama ekonomi dengan daerah lain.
- f. Kurangnya jaringan usaha dan kemitraan usaha.
- g. Angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi.
- h. Belum optimalnya prestasi di bidang pemuda, olahraga, seni dan budaya.
- i. Lemahnya koordinasi antar institusi pemerintah maupun non pemerintah.
- j. Lemahnya manajemen data, statistik dan analisa untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- k. Interkoneksi jaringan TIK belum optimal

3. Peluang (*Opportunity*)

- a. Penyerahan berbagai urusan pemerintahan dari Pusat kepada Daerah, harus diikuti dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah.
- b. Pencitraan terhadap kualitas pelayanan publik.
- c. Masih terbukanya potensi usaha yang belum digarap.
- d. Masih terbukanya potensi pendapatan daerah dari pengembangan pelayanan jasa dan pemanfaatan sumber daya alam sarana dan prasarana seperti retribusi parkir, pengambilan air bawah tanah, penyebaran jalur angkutan umum, sub terminal dan lain-lain.
- e. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana publik.
- f. Penciptaan pusat-pusat kegiatan baru (area GOR Samapta, Taman Kyai Langgeng, Sidotopo, Sukarno-Hatta dan lain-lain).
- g. Berkembangnya partisipasi swasta/masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan jasa.
- h. Adanya potensi pengembangan kemitraan usaha antara koperasidan UMKM dengan pengusaha besar/BUMN/BUMD.
- i. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai hal.
- j. Meningkatnya budaya kreatif dan inovatif masyarakat.
- k. Perwujudan smart city
- l. Mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean sejak 2016 membuka kesempatan untuk berperan di tingkat internasional.
- m. Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) 2016-2030 sebagai kelanjutan dari MDGs 2015 memberi peluang untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan Negara secara global.

4. Ancaman (*Threat*)

- a. Krisis atau kelesuan ekonomi global yang berpengaruh terhadap krisis nasional, meningkatnya jumlah penduduk sangat miskin dan menurunkan daya beli masyarakat.

- b. Inmigrasi tenaga kerja yang menggeser peluang kesempatan kerja tenaga kerja setempat.
- c. Menurunnya indikator derajat kesehatan masyarakat, transisi pola penyakit dan KLB (endemi).
- d. Degradasi kualitas lingkungan hidup dan peningkatan resiko bencana.
- e. Berkurangnya/kelangkaan sumber daya energi.
- f. Alih fungsi lahan, berkurangnya ruang terbuka hijau, pertanian, dan pembangunan yang tidak terkendali.
- g. Penyerapan teknologi pertanian
- h. Besarnya pengaruh negatif dari luar yang mengganggu tatanan norma, nilai dan budaya serta perilaku hidup masyarakat.
- i. Hilangnya kebanggaan atas seni budaya dan kecintaan terhadap hasil karya bangsa sendiri.
- j. Ketidakpuasan masyarakat melahirkan protes, anarkisme dan apatisisme.
- k. Dinamika politik yang lebih mengutamakan kelompok tertentu.
- l. Terorisme, kriminalitas serta penistaan perempuan dan anak.
- m. Munculnya peraturan-peraturan yang tidak sinkron satu sama lain, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum di daerah dan kebingungan dalam implementasi.

2.10 Isu Strategis

Dari hasil kajian terhadap kondisi Kota Magelang dari berbagai aspek pembangunan dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di tingkat global, nasional, provinsi maupun global, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kota Magelang. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan isu strategis yang tepat akan menghindarkan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang salah didefinisikan. Input dari tahap ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran pada Bab selanjutnya.

Dari proses analisis lingkungan strategis dengan menyandingkan:

- 1) Sasaran pokok pembangunan daerah dalam UU no 23 tahun 2014 pasal 258, yaitu: peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; daya saing Daerah;
- 2) RPJPD Kota Magelang 2005-2025, yaitu terwujudnya Kota Magelang: (i) sebagai pusat pelayanan jasa yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang memadai; (ii) masyarakat Kota Magelang yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; (iii) daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan Kota Magelang yang efisien, efektif, profesional, berwawasan lingkungan, mengembangkan potensi daerah secara kreatif, inovatif didukung oleh penguasaan iptek dan sumber daya manusia yang berkualitas; (iv) perekonomian Kota Magelang yang bertumpu pada penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; (v) good governance dan clean government dengan

- melibatkan dunia usaha, masyarakat madani (*civil society*), dan media massa sehingga kehidupan masyarakat Kota Magelang agamis, damai, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran;
- 3) RTRW Kota Magelang 2011-2031: arah kebijakan pengembangan struktur dan pola ruang kota;
 - 4) Dimensi pokok pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 yaitu (i) Keamanan dan Ketertiban; (ii) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi; (iii) Pemerataan pembangunan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah; (iv) Kepastian dan penegakan hukum, (v) Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Perumahan; (vi) Pembangunan sektor unggulan: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan kelistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri; (vii) Revolusi Mental; (viii) Politik dan Demokrasi;
 - 5) RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, dengan isu: Pengurangan Kemiskinan, Pengurangan Pengangguran, Pembangunan Infrastruktur, Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi, Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah;
 - 6) Hasil evaluasi RPJMD Kota Magelang 2010-2015, ditemukan hal-hal yang masih harus dikejar dari penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - 7) Visi misi Kepala Daerah Terpilih Kota Magelang Tahun 2016-2021, yang mengusung isu: peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah, peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial, pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah, pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan penciptaan lapangan kerja, dan perlunya peningkatan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama.

Kriteria yang digunakan untuk penentuan isu strategis yaitu: (i) memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan tugas dan tanggungjawan Pemerintah Daerah; (iii) dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat; (iv) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; (v) Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani; dan (vi) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Setelah melakukan analisis isu, dilakukan proses pembobotan isu, dan konsultasi publik, maka ditarik kesimpulan bahwa terdapat isu strategis sebagai berikut:

1. Penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan penciptaan lapangan kerja
2. Peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial
3. Penguatan reformasi birokrasi
4. Peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat serta kondusivitas daerah
5. Pengelolaan persampahan
6. Peningkatan koperasi, usaha mikro dan perdagangan
7. Penguatan daya saing dan kemandirian daerah
8. Peningkatan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama
9. Penerapan prinsip prinsip kota cerdas
10. Penguatan kemitraan dalam pembangunan daerah
11. Peningkatan daya saing dan daya jual pariwisata
12. Penguatan implementasi Branding Magelang Kota Sejuta Bunga
13. Pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah

14. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
15. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan
16. Peningkatan ketahanan pangan
17. Keadilan gender dan perlindungan anak
18. Peningkatan kreativitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
19. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga

Dari isu-isu strategis tersebut, dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) kelompok payung besar isu strategis Kota Magelang yaitu:

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi);
- c. Penguatan reformasi birokrasi;
- d. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri;
- e. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal;
- g. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan;
- h. Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah.

Elaborasi atas berbagai kelompok isu strategis diatas dapat dilihat dari aspek potensi, tantangan, arah kebijakan, dan rencana tindak (*action planning*) yang perlu ditempuh dan dikembangkan sebagai antisipatif demi keberhasilan pencapaiancita-cita pembangunan, penjabarannya sebagai berikut:

A. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar

Upaya-upaya yang ditempuh dan harus diperkuat mencakup penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan penciptaan lapangan kerja. Disamping itu peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial.

✓ Penurunan Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan laten baik di level nasional maupun daerah. Melalui berbagai program dan kegiatan dan melibatkan stakeholders terkait, kemiskinan di Kota Magelang dari tahun ke tahun terus dapat ditekan persentasenya. Selama kurun waktu 2011-2015 angka kemiskinan yang semakin menurun tersebut nampak sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.152
Persentase penduduk miskin Kota Magelang
Tahun 2011-2014

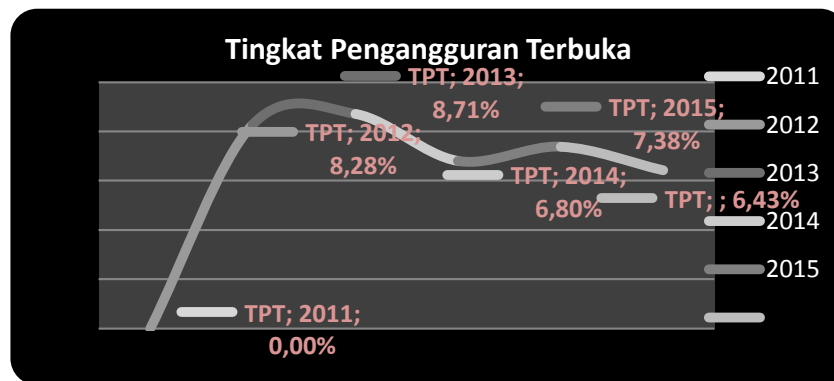
No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah penduduk Kota	Persentase Penduduk Miskin
1	2011	13.100	118.805	11.06
2	2012	12.300	119.329	10.31
3	2013	11.800	120.207	9.8
4	2014	11.053	120.930	9.14
5	2015	NA	NA	NA

Berbagai penyebab dan tantangan kemiskinan di Kota Magelang antara lain sebagai berikut:

- Belum optimalnya pendekatan integratif untuk penanggulangan kemiskinan daerah sehingga program – program dan penanganan kemiskinan yang diupayakan belum dapat dapat mendorong akselerasi dan efektifitas penurunan jumlah penduduk miskin, antara lain melalui **pendekatan pembangunan kewilayahan** dan fokus pada pemberdayaan masyarakat.
- Belum adanya keterpaduan antar SKPD dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan dengan indikator capaian yang terukur.
- Belum optimalnya fasilitasi bagi penyandang masalah kemiskinan berupa bantuan dan pendampingan yang secara berkelanjutan. Pemberian bantuan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi awal per penduduk miskin, untuk itu perlu adanya pedoman pelaksanaan teknis pentahapannya berdasarkan kondisi lapangan.
- Belum adanya inisiasi kebijakan rehabilitasi sosial luar panti dalam bentuk home/day care services bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak potensial. Sesuai dengan UU no. 23 tahun 2014, kewenangan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di kab/kota dilaksanakan di luar panti. Untuk itu perlu adanya inisiasi tersebut diatas sebagai upaya pemberian pelayanan dasar kepada warga miskin tidak potensial.
- Perlunya pemantapan kualitas dan akses layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin termarginalkan untuk mengembangkan kehidupan mereka secara layak.

✓ **Pengurangan Pengangguran dan Penciptaan Lapangan Kerja**

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2011 – 2015) tingkat pengangguran terbuka di wilayah Kota Magelang menunjukkan tren menurun dan pada Tahun 2015 mencapai tingkat yang terendah sebesar 6,43 persen. Pergerakan tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2015, diolah Pusdatinaker

Gambar II.45
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Magelang Tahun 2011-2015

Pada Tahun 2015 ini terlihat bahwa komposisi penganggur terbuka didominasi oleh lulusan SLTA dengan umur antara 15 – 24 tahun serta lulusan universitas dengan umur antara 25 – 34. Lulusan baru dan angkatan kerja muda menjadi penyumbang terbesar dalam komposisi penganggur di Kota Magelang. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Magelang dalam mengambil kebijakan ketenagakerjaan khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Tabel II.153
Penganggur Terbuka Menurut Pendidikan Dan Golongan Umur

Pendidikan	Golongan Umur (Orang)					Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55+	
<SD	163	136	96	-	59	454
SMTP	-	348	115	-	57	520
SMTA	1.225	251	122	227	-	1.825
Diploma I/II/III/Akademi	-	-	-	-	-	-
Universitas	116	849	163	-	-	1.128
JUMLAH	1.504	1.584	496	227	116	3.927

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2015, diolah Pusdatinaker

Apabila dilihat lebih mendalam lagi, penganggur usia muda tersebut sebanyak 127 orang dari 1.825 orang penganggur lulusan SLTA merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sementara 1.698 orang masih mencari pekerjaan. Untuk lulusan universitas dimana menduduki jumlah terbanyak kedua, sebanyak 984 orang masih mencari pekerjaan, sementara 144 orang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan. Dari 3.927 orang penganggur di Kota Magelang, 3.452 orang belum pernah mengikuti pelatihan yang terdiri dari 454 orang lulusan SD, 520 orang lulusan SLTP, 1.658 orang lulusan SLTA dan 820 orang lulusan universitas, sebagian besar (2.711 orang) dari mereka berumur antara 15 – 34 tahun serta sebanyak 2.950 orang sedang mencari pekerjaan.

Data diatas menunjukkan adanya permasalahan yang muncul dalam pembangunan lima tahun sebelumnya yaitu:

- Pengangguran di Kota Magelang didominasi oleh angkatan kerja muda yang berumur antara 15 – 34 tahun, lulusan SLTA/Universitas, belum pernah mengikuti pelatihan, serta masuk dalam kategori sedang mencari pekerjaan.
- Terbatasnya kesempatan kerja di Kota Magelang, termasuk dalam bidang informal. Hal ini dikarenakan rendahnya investasi yang bersifat padat karya dan belum berkembangnya perekonomian di Kota Magelang sehingga belum bisa menyerap tenaga kerja secara optimal. Hal lain adalah belum adanya perencanaan tenaga kerja daerah untuk mengalokasikan ketersediaan tenaga kerja (*labor supply*).
- Masih rendahnya minat pencari kerja untuk bekerja di luar daerah/negeri
- Belum terakreditasinya lembaga pelatihan kerja (negeri dan swasta) yang berakibat pada belum optimalnya kualitas lulusan pelatihan kerja, rendahnya produktivitas, etos kerja dan daya saing lulusan pelatihan kerja di pasar kerja. Ditambah dengan masih rendahnya kesadaran para pencari kerja akan pentingnya sertifikasi kompetensi di pasar kerja
- Masih tingginya jumlah perselisihan antara pengusaha dengan pekerja, berimbas pada peningkatan prosentase penurunan kasus-kasus ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran para pengusaha akan pelaksanaan norma ketenagakerjaan termasuk pelanggaran pelaksanaan UMK di beberapa perusahaan.
- Belum berkembangnya inkubator wirausaha baru
- Belum berkembangnya investasi berbasis padat karya
- Belum adanya penguatan kompetensi tenaga kerja untuk mengisi di negara-negara yang mengalami penuaan penduduk (*ageing population*)
- Masih rendahnya daya saing UMKM dan koperasi sehingga rentan terhadap penutupan usaha yang berimbas pada peningkatan pengangguran. Untuk itu perlu penguatan kelembagaan UMKM terutama di sektor industri mikro/rumah tangga, perdagangan dan pertanian perkotaan.

Upaya-upaya yang diperlukan untuk pengurangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing tenaga kerja dengan mendorong sertifikasi kompetensi bagi pencari kerja dan pekerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan etos kerja pencari kerja
2. Pengurangan kasus/perselisihan pengusaha-pekerja dengan mendorong pembentukan LKS bipartit, pembinaan norma ketenagakerjaan kepada perusahaan
3. Peningkatan kesempatan kerja di Kota Magelang melalui sektor informal dengan mencetak sebanyak-banyaknya wirausahawan baru, perluasan akses wirausaha baru ke lembaga keuangan (*financial institution*), pemberian diklat lanjutan baik *hard-skill* maupun *soft-skill*
4. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi

5. Pengembangan investasi padat pekerja berbasis labor supply, dengan perencanaan tenaga kerja daerah, pemberian insentif kepada investor yang berbasis padat pekerja terutama angkatan kerja berpendidikan relatif rendah.

✓ **Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan**

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Secara umum, kinerja indikator standar pelayanan bidang pendidikan Kota Magelang telah memenuhi target sampai masa akhir RPJMD Kota Magelang 2011-2015, namun demikian ada beberapa indikator yang belum mencapai target, sebagian besar termasuk dalam indikator sasaran Meningkatnya Pemerataan, Akses dan Mutu Pendidikan Dasar. Tidak tercapainya target-target partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar pada jenjang pendidikan dasar disamping karena adanya siswa yang mengulang, semakin berkurangnya jumlah penduduk usia sekolah dasar di Kota Magelang, dan karena semakin berkurangnya siswa yang berasal dari luar Kota Magelang. Semakin berkurangnya jumlah siswa dari luar Kota Magelang disebabkan semakin berkembangnya fasilitas pendidikan dasar di sekitar Kota Magelang. Disamping itu di sisi lain, pemerintah daerah sekitar juga mengeluarkan berbagai regulasi untuk meningkatkan daya tarik dan minat siswa untuk sekolah di daerahnya sendiri.

Dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan daya tarik dan kualitas pendidikan di Kota Magelang, pada sisi sarana prasarana, diperlukan upaya pemenuhan sarana prasarana pendidikan dasar, seperti sarana ujian CBT, mebelair, alat peraga olahraga/IPS/IPA, rumah dinas penjaga dan sanitasi. Dari kualitas kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan juga perlu terus ditingkatkan. Saat ini masih menghadapi permasalahan kurangnya kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan yang disebabkan belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga kependidikan, sebagian pendidik belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4, dan sebagian besar pendidik belum bersertifikat pendidik. Keterbatasan aktivitas dan media pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, honorarium pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS belum setara dengan kebutuhan hidup minimal, dan penghargaan dan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan belum sebanding dengan beban tugas profesi yang disandang. Kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar juga menjadi tantangan karena banyaknya PNS yang pensiun pada tahun 2013 yang didominasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di tingkat SD.

Di bidang pendidikan non formal diperlukan upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan melalui jalur pendidikan Non Formal. Kondisi pendidikan non formal di Kota Magelang saat ini belum memenuhi mutu dan standar yang ditetapkan disebabkan diantaranya: rendahnya apresiasi masyarakat terhadap Pendidikan Non Formal; kurangnya biaya untuk mengikuti Pendidikan Non Formal; belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Non Formal; belum tersedianya standar pengelolaan/

manajemen Pendidikan Non Formal; kurangnya tenaga pendidik pendidikan Non Formal, serta tidak adanya tenaga penilik pendidikan non formal di Kota Magelang

Dari sisi regulasi, berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga berimplikasi pada perubahan kewenangan pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Perubahan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi yang mulai diberlakukan tahun 2017 memerlukan antisipasi terkait perubahan pengelolaan aset, personalia, dan pembiayaan. Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga berdampak pada perubahan mekanisme penyaluran hibah bansos. Satuan pendidikan khususnya swasta yang belum berbadan hukum tidak dapat menerima hibah dari pemerintah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 298 ayat (5) yang mensyaratkan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Mensikapi kondisi demikian diperlukan upaya pengurusan badan hukum bagi sekolah-sekolah swasta untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Pada sisi kurikulum, dengan pemberlakuan Implementasi Kurikulum 2013 juga memerlukan kesiapan dari sisi sarana prasarana dan tenaga pendidik. Kurikulum 2013 secara bertahap dan harus diterapkan pada semua sekolah pada tahun 2019. Implementasi kurikulum 2013 perlu dilaksanakan secara optimal dalam aspek pemahaman, pembelajaran, penilaian dan pemanfaatan media.

Menghadapi tantangan pembangunan pendidikan di masa depan, peran keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pembangunan pendidikan perlu ditingkatkan. Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan dengan berbagai cara diantaranya melalui mekanisme CSR. Tantangan lain adalah upaya penanganan berbagai permasalahan secara konkrit dan komprehensif seperti kenakalan remaja, kemiskinan dan anak putus sekolah agar terentaskan dan terselesaikan sampai ke akar permasalahannya. Permasalahan lainnya adalah sarana buku sebagai penunjang kurikulum masih belum terpenuhi, sumber daya pendidik juga masih perlu peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan, belum efektifnya pendidikan karakter di sekolah diindikasikan dengan masih adanya vandalisme, kurangnya ketertiban dan kedisiplinan siswa.

Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan upaya pemenuhan sarana prasarana, akses, pemerataan dan kualifikasi serta kompetensi tenaga pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.

✓ **Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu unfinished business Millenium Development Goals sehingga menjadi titik berat dalam perencanaan pembangunan, baik dalam skala internasional/ global, nasional dan regional, saat ini. Dari 31 indikator terkait sektor kesehatan, tujuh diantaranya belum tercapai dan memerlukan kerja keras untuk mencapainya (Laporan MDGs Bappenas, 2014) sehingga perlu dilanjutkan pada agenda paska 2015. Hal ini juga dipandang krusial untuk menghadapi bonus demografi di Indonesia sehingga peningkatan jaminan kesehatan menjadi salah satu kebijakan dalam perencanaan pembangunan nasional sekaligus diharapkan akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang positif dalam upaya menurunkan kemiskinan.

Secara nasional, beberapa permasalahan yang menjadi tantangan sektor kesehatan adalah:

1. Peningkatan status kesehatan dan gizi ibu dan anak
2. Peningkatan pengendalian penyakit;
3. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin;
4. Peningkatan responsivitas sistem kesehatan.

Peningkatan status kesehatan ibu dan anak menjadi tantangan besar di Provinsi Jawa Tengah, tidak terkecuali Kota Magelang. Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari 104,97/100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2010) menjadi 126,55/100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2014. Kecenderungan yang sama juga terjadi di Kota Magelang dalam tiga tahun terakhir, meskipun apabila dilihat dari jumlahnya, kematian ibu di Kota Magelang relatif kecil.

Melihat penyebab kematian ibu di Kota Magelang karena pre eklamsia dan sepsis maka dapat dinyatakan bahwa deteksi dini masyarakat terhadap faktor-faktor resiko dalam kehamilan masih rendah. Selain itu juga dimungkinkan kurangnya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan pada kehamilan risiko tinggi. Diperlukan perbaikan sistem rujukan melalui optimalisasi fasilitas Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas), karena mayoritas kematian ibu melahirkan terjadi di rumah sakit.

Upaya untuk menurunkan AKI menghadapi tantangan yang berat dikarenakan tidak hanya terkait penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan oleh pemerintah namun juga kesadaran ibu hamil beserta keluarga dan kepedulian lingkungan.

Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) juga menjadi isu strategis pembangunan kesehatan di Kota Magelang karena kecenderungan peningkatan kasus pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2011-2015 angka kematian bayi di Kota Magelang berada di atas 10, bahkan mencapai 15,63 pada tahun 2015, atau lebih tinggi dari angka kematian bayi Jawa Tengah yang mencapai 10,08/1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2014. Penyebab kejadian mayoritas adalah faktor langsung berupa kasus kelahiran prematur dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

Permasalahan kesehatan ibu dan anak tersebut menjadi kontradiktif bila dibandingkan dengan kuantitas fasilitas dan tenaga kesehatan di Kota Magelang yang telah mencukupi atau memenuhi kebutuhan. Maka upaya untuk penurunan AKI dan AKB seharusnya diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan. Selain optimalisasi SPGDT dan tenaga kesehatan, perlu dikaji untuk inisiasi Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan Rumah Sakit PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif). Meskipun Kota Magelang bukan daerah terpencil sehingga pelayanan rumah sakit mudah dijangkau, namun keberadaan Puskesmas PONED tentu akan menjadi faktor positif dalam upaya deteksi dini resiko kehamilan sehingga dapat meminimalisir kejadian kematian ibu dan bayi.

Selain kesehatan ibu dan anak, peningkatan kasus HIV/AIDS juga patut dicermati mengingat resiko penularan semakin meningkat sejalan dengan maraknya perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang serta belum optimalnya upaya pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS.

B. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi).

Diimplementasikan melalui peningkatan prestasi pemuda dan olahraga; penguatan kemitraan dalam pembangunan daerah; penerapan dan perwujudan keadilan gender dan perlindungan anak; serta pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dalam konteks ini harus diupayakan secara berkesinambungan adanya pemerataan dan keadilan sosial yang ditandai dengan meratanya sumber daya dan faktor produksi yang lain, lebih meratanya akses peran dan kesempatan kepada setiap warga masyarakat, serta lebih adilnya distribusi kesejahteraan melalui pemerataan ekonomi.

✓ Pemuda dan Olah Raga

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Dalam pembangunan pemuda diperlukan berbagai upaya diantaranya; Pemenuhan sarana prasarana bagi pemuda seperti gedung pemuda sebagai pusat eksplorasi potensi, sekretariat pemuda, jejaring informasi dan komunikasi, Peningkatan pendidikan dan ketrampilan, daya tangkal, kepedulian pemuda terhadap masalah-masalah pembangunan, peningkatan akses dan kemitraan, serta penguatan lembaga pemuda untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan pemuda. Sedangkan dalam upaya peningkatan prestasi olahraga diperlukan upaya-upaya: penyelenggaraan kompetisi olahraga yang berjenjang dan agenda kompetisi yang teratur, pembibitan, pembinaan, pemanduan dan pemasyarakatan olahraga, serta pembentukan klub olahraga di sekolah-sekolah, Peningkatan fasilitas olahraga agar memenuhi standar nasional dan internasional, dan Pembenahan sistem informasi dan database pembangunan pemuda dan olahraga.

✓ Kemitraan

Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing. Dengan demikian untuk membangun kemitraan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan saling menghormati, saling menyadari pentingnya kemitraan, ada kesepakatan misi, visi, tujuan dan nilai yang sama, dan berpijak padalantaran yang sama.

Kemitraan juga selaras dengan Tahapan RPJP Daerah Ke-3 (2016-2020), dimana disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan dan memantapkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan. Dengan demikian, untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan kemitraan antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, dan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dalam segala aspek pembangunan.

✓ **Penerapan dan perwujudan keadilan gender dan perlindungan anak**

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Ukuran tentang kesetaraan dan keadilan gender telah digunakan banyak pihak, meski ukuran tersebut masih bersifat tunggal (single variable). Namun didalam perkembangannya, ukuran yang bersifat komprehensif dan representatif mutlak dibutuhkan.

Persamaan status dan kedudukan merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki yang tidak hanya dijamin oleh perundang-undangan, tetapi juga dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ukuran komposit yang dimaksud adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan, yakni dengan mengurangi angka 100 dengan IPG. Ukuran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat menggambarkan perbedaan peranan antara perempuan dan laki-laki dari pencapaian kapabilitas berdasarkan status dan kedudukan perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

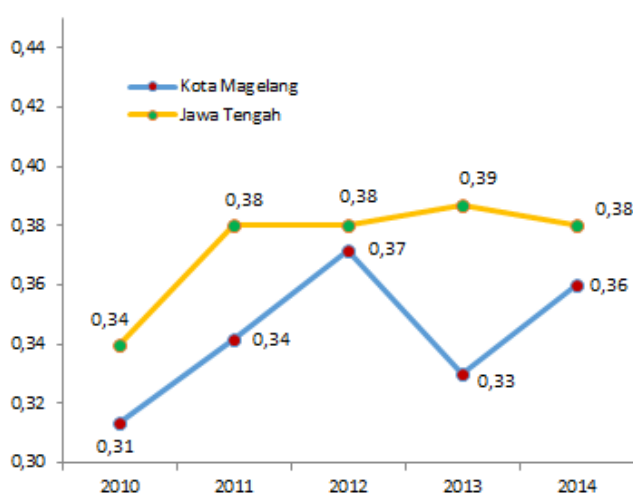
Tabel IV.4
Capaian IPM, IPG, dan IDG Kota Magelang

INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,99	74,47	75,00	75,29	75,79
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,16	94,83	95,14	95,36	95,45
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,29	66,29	67,29	68,03	78,82

Terlihat pada tabel di atas bahwa angka ketimpangan gender di Kota Magelang adalah 4,55 (diperoleh dengan mengurangi angka 100 dengan capaian IPG, 95,45). Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio yang paling sempurna. Capaian IPG Kota Magelang menduduki ranking tiga di Jawa Tengah setelah Kota Surakarta dan Kota Salatiga. Sementara untuk IDG-nya menduduki ranking ke dua setelah Kota Surakarta. Angka-angka capaian tersebut menunjukkan kinerja yang baik dalam kerangka pengarusutamaan gender di Kota Magelang. Walaupun demikian masih terdapat beberapa permasalahan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kota Magelang. Masalah-masalah itu seperti angka kematian ibu, kekerasan dalam rumah tangga, kepala keluarga perempuan miskin, belum proporsionalnya para pejabat pengambil kebijakan antara laki-laki dan perempuan baik di lembaga pemerintahan maupun dunia swasta, termasuk pula peran perempuan di bidang politik masih perlu ditingkatkan, juga kontribusi pendapatan perempuan terhadap PDRB Kota Magelang, dan sebagainya.

✓ **Pemerataan Pembangunan**

Konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah munculnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk. Koefisien gini merupakan salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan pada suatu wilayah pada periode tertentu. Namun demikian pola distribusi pendapatan berdasarkan koefisien gini hanya menggambarkan tingkat pemerataan secara umum dan belum menjelaskan besarnya porsi yang diterima oleh kelompok berpendapatan rendah/miskin dari keseluruhan pendapatan pada suatu wilayah. Indikator pendukung lain yang dapat digunakan yaitu *relative inequality* (kriteria Bank Dunia). Kriteria Bank Dunia diartikan sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar II.46
Perbandingan Koefisien Gini Kota Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2010-2014

Menurut data resmi BPS koefisien gini di Kota Magelang di tahun 2014 mencapai 0,36 masuk dalam klasifikasi tingkat ketimpangan rendah. Angka tersebut bila dibandingkan pada skala provinsi Jawa Tengah, kondisi ketimpangan pendapatan di Kota Magelang masih lebih baik.

Tabel II.154
Distribusi Pendapatan di Kota Magelang menurut Koefisien Gini dan Kriteria Bank Dunia Tahun 2011-2014

3

Tahun	Gini Ratio	Kriteria Bank Dunia		
		40% I	40% II	20% III
2011	0,3418	19,40	38,24	42,36
2012	0,3715	16,10	35,74	48,17
2013	0,3300	19,24	39,24	41,52
2014	0,3600	17,15	38,75	44,10

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan indikator Kriteria Bank Dunia, pada tahun 2014 tingkat kesenjangan distribusi pendapatan di Kota Magelang berada dalam kondisi yang lebih baik dan berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah (pendapatan yang diterima kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih dari 17%) setelah di tahun 2012 masuk kategori tingkat ketimpangan sedang. Porsi pendapatan yang dinikmati 40% penduduk berpenghasilan rendah sejak tahun 2011 mengalami fluktuasi dan di tahun 2014 mencapai 17,15%.

C. Penguatan reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut: (1) aspek Organisasi (Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*)); (2) Tatalaksana (Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*); (3) Peraturan Perundang-undangan (Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan); (4) Sumber daya manusia aparatur (SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera); (5) Pengawasan (Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN); (6) Akuntabilitas (Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi); (7) Pelayanan Publik (Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha); dan (8) Pola pikir (*mindset*) dan Budaya Kerja (*culture set*) (Aparatur Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi atau memiliki spirit dan etos kerja yang tinggi).

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kota Magelang hampir semua aspek tersebut di atas masih perlu mendapatkan perhatian dan menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Karenanya penyelenggaraan pemerintahan di Kota Magelang harus mengakomodir dan focus terhadap aspek-aspek tersebut di atas secara lebih komprehensif dan integratif. Setidaknya terdapat beberapa isu penting dalam agenda reformasi birokrasi yang terjadi di Pemerintah Kota Magelang yaitu:

1. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional.
2. Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur pemerintah belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat.
4. Dalam proporsi tertentu praktik KKN belum sepenuhnya teratasi.
5. Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.
6. Terbaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja.

Reformasi birokrasi Pemerintah Kota Magelang dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada outcomes. Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja yang makin baik. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen dan menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur pemerintah Kota Magelang.

✓ **Tata Kelola Pemerintahan**

Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban). Dalam sistem perencanaan, kebijakan harus sinergis sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan, terukur, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal kelembagaan, organisasi pemerintah daerah dibentuk secara ramping namun mampu mencakup keseluruhan urusan/ kepentingan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, jelas, tidak tumpang tindih dan memungkinkan kemudahan akses pelayanan terhadap publik.

Penanganan berbagai permasalahan pemerintahan dan pembangunan yang sangat kompleks membutuhkan penempatan aparatur yang sesuai baik secara kualitas kompetensi maupun kuantitasnya. Pembinaan terhadap aparatur mesti terus dilakukan agar mampu menyikapi dinamika yang terjadi, responsif dengan dedikasi dan integritas yang tinggi untuk semata-mata kepentingan umum. Selain itu, pembangunan juga membutuhkan aparatur dengan daya inisiasi dan inovasi yang baik untuk dapat mengejar ketertinggalan dan mengatasi keterpurukan atas kemiskinan dan instabilitas yang terjadi.

Kelemahan SKPD dalam pelaporan dan pertanggungjawaban biasanya terletak dalam kemampuan penyediaan data, analisa dan model laporan yang tidak simpel. Kesadaran akan pentingnya data yang lengkap dan akurat hingga kearsipan sebagai dokumen pembuktian harus ditingkatkan. Sistem manual harus segera dirubah dengan sistem komputer, sehingga lebih efisien, cepat dan mudah dalam operasionalnya.

✓ **Aset Daerah**

Aset Daerah sampai saat ini masih menjadi permasalahan utama dalam upaya Pemerintah Kota Magelang meraih Opini WTP pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini disebabkan antara lain :

1. Aset Tetap yang berupa tanah, bangunan, jalan, irigasi dan jembatan belum tersajikan dan terdata secara lengkap sehingga informasi yang diperoleh belum bisa diyakini.
2. Hasil penelusuran aset tetap berupa tanah, masih terdapat kepemilikan tanah yang belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Magelang.
3. Sensus Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang belum bisa memberikan informasi yang handal.
4. Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (Pengurus dan Penyimpan barang) untuk mengelola barang milik daerah masih perlu ditingkatkan

5. Belum adanya sistem yang terintegrasi antara pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan keuangan daerah sehingga data yang tersajikan dapat menjadi informasi yang sama dan bisa diyakini kebenarannya.
6. Rekonsiliasi antara pengelola barang dan pengelola keuangan harus dilakukan secara rutin atau berkala untuk memperoleh keakuratan data sehingga dapat tersaji dalam laporan keuangan.
7. Perlunya komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk mengelola aset daerah.
8. Penyimpan dan pengurus barang di sekolah sekolah SD masih dirangkap oleh guru, bahkan terkadang hanya dikerjakan guru honorer.
9. Masih terbatasnya sumber daya manusia pengurus dan penyimpan barang baik kuantitas maupun kualitasnya di Perangkat Daerah yang memiliki aset besar yang berakibat dalam penyajian Laporan Pengelolaan Aset dan Barang menjadi tidak bisa diyakini

✓ **Peningkatan Kualitas Layanan Publik**

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Dalam upaya mewujudkan Kota Jasa, maka sudah merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk dapat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam segala layanan. Berbagai regulasi yang ada harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut. Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

Peningkatan Kualitas Pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Sedangkan targetnya adalah: (a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, terjangkau dan memiliki kepastian); (b) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional; dan (c) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemda dan instansi pemerintah (SKPD).

✓ **Penataan Organisasi**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Target yang ingin dicapai melalui adalah menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar-instansi pemerintah (SKPD); dan meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah (SKPD).

✓ **Penataan Tatalaksana**

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses dan mekanisme kerja atau prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan. Target yang ingin dicapai adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan; dan meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan.

✓ **Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur**

Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi, serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendorong mobilitas antaraparatur daerah, antaraparatur pusat, dan antara aparatur pusat dan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target yang ingin dicapai adalah (a) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur; (b) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur; (c) Meningkatnya disiplin SDM Aparatur; (d) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur; dan (e) Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur.

✓ **Penguatan Pengawasan**

Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai adalah (a) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara; (b) Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara; (c) Meningkatnya status opini BPK; dan (d) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

✓ **Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Target yang mau dicapai adalah meningkatnya kinerja Pemda dan instansi pemerintah (SKPD); dan meningkatnya akuntabilitas Pemda dan instansi pemerintah (SKPD).

D. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri

Dalam rangka ketahanan ekonomi di daerah, pemerintah harus menjaga dan memberikan ruang yang leluasa untuk pertumbuhannya, baik secara kelembagaan maupun legalitasnya. Perekonomian rakyat yang tangguh, berdaya, produktif dan mandiri, merupakan salah satu pilar utama ketahanan nasional, termasuk dalam memantapkan demokrasi. Upaya ini dilakukan dengan berbasiskan semangat kerakyatan dan kekeluargaan (Peningkatan koperasi, usaha mikro, perdagangan dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat). Untuk itu secara terkendali membuka akses bagi tumbuh kembangnya ekonomi modern tanpa menutup kesempatan atau "mematikan" sektor tradisional. Selain itu juga

harus dipertahankan adanya keterpenuhan dan kesediaan bahan pangan melalui upaya peningkatan ketahanan pangan.

✓ **Industri Perdagangan**

Dunia perindustrian dan perdagangan merupakan salah satu primadona penggerak pertumbuhan ekonomi suatu daerah, terutama di Kota Magelang yang mulai mengandalkan sektor jasa. Dua hal yang sangat strategis dibahas dalam setiap perencanaan baik perencanaan jangka pendek, menengah, maupun panjang. Beberapa aspek yang terkait yang mempengaruhi dunia perindustrian dan perdagangan Kota Magelang terutama di era MEA antara lain: infrastruktur, investasi, sumber daya baik alam maupun SDM, daya saing produk, daya saing tenaga kerja, penggunaan teknologi, keterbukaan informasi, peran pemerintah dan perlindungan konsumen.

Luas Kota Magelang yang hanya sekitar 18,12 km² memudahkan pemerintah daerah untuk menata dan mengelola penyediaan infrastruktur, termasuk kemudahan aksesibilitas bagi pertumbuhan industri dan perdagangan. Oleh karenanya infrastruktur yang sudah baik dan tertata perlu dipelihara dan ditingkatkan pemanfaatannya dari waktu ke waktu. Di era MEA, infrastruktur yang layak dan memadai serta kemudahan aksesibilitas usaha sangat mendukung dan merupakan salah satu daya tarik bagi investasi. Investasi sangat diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah, terutama investasi yang produktif, yaitu investasi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Agar investasi yang masuk ke Kota Magelang mampu menyerap tenaga kerja lokal maka harus ada link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Keterbatasan luasan juga berarti sangat terbatasnya sumber daya alam yang dimiliki Kota Magelang. Sumber daya alam yang terbatas ini perlu dikelola dengan benar sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal. Keadaan ini membuat masyarakat Kota Magelang menjadi kreatif dan tidak pantang menyerah. Sektor jasa merupakan salah satu sektor yang dikembangkan secara maksimal dan semakin memberikan nilai tambah bagi setiap produk yang dihasilkan Koperasi dan UMKM Kota Magelang. Koperasi dan UMKM Kota Magelang didampingi instansi terkait dan para stake holder, berupaya semakin meningkatkan kualitas dan jenis produk untuk meningkatkan daya saing. Hingga saat ini masih banyak produk Koperasi dan UMKM yang belum memenuhi persyaratan agar mampu menembus pasaran dunia. Era MEA menuntut produk daerah yang memenuhi standar mutu produk, sehingga upaya sertifikasi dan HKI bagi produk Koperasi dan UMKM menjadi sangat penting. Daya saing yang dimaksud selain memenuhi standar mutu produk, juga harus mampu menjaga kualitas produk dan menjaga konsistensi pasokan produk. Dalam hal itu maka tak lepas dari kemampuan Koperasi dan UMKM dalam memanfaatkan teknologi dan informatika. Koperasi dan UMKM yang 'melek' teknologi dan 'melek' teknologi informasi akan mampu bersaing di era globalisasi. Teknologi sangat membantu dalam proses produksi karena dengan teknologi maka pekerjaan menjadi lebih mudah dan jumlah produksi meningkat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Selain melek teknologi, Koperasi dan UMKM juga perlu berpikir kreatif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mengembangkan dan memajukan usahanya. Teknologi informasi mengandung dua fungsi: informasi dan komunikasi, yang bila mampu

mengolah dapat digunakan sebagai sarana promosi dan sebagai sarana Koperasi dan UMKM berhubungan dengan dunia luar. Hal demikian akan semakin memperluas jangkauan perdagangan.

Perkembangan Industri dan perdagangan dewasa ini berdampak luar biasa pada beredarnya berbagai macam produk di pasaran. Hal tersebut berdampak pada perlunya perlindungan terhadap konsumen sebagai pengguna produk. Pengusaha semestinya menghargai konsumen dengan memberikan produk yang sesuai standar mutu, di sisi lain pemerintah pun wajib melindungi konsumen melalui peraturan perundang-undangan.

Secara umum peran pemerintah untuk mendorong industri dan perdagangan di Kota Magelang terlebih dalam era MEA sangatlah penting. Bagaimana peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang memadai, membuat regulasi yang mampu membuka kran investasi lebar-lebar sehingga Kota Magelang mampu menarik investasi besar yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, mengelola sumber daya yang sangat terbatas yang mampu dimanfaatkan untuk menumbuhkan laju perekonomian semaksimal mungkin, meningkatkan daya saing produk melalui berbagai upaya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, hingga yang terakhir pemerintah juga harus melindungi konsumen dari produk-produk yang merugikan dan dari perlakuan tidak adil produsen. Pemerintah pun harus mampu menciptakan strategi yang melindungi produk lokal dari perdagangan bebas dan melindungi tenaga kerja dari persaingan internasional, sehingga mampu bersaing dan dapat menembus pasaran internasional.

✓ **Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan**

Dari capaian kegiatan investasi di Kota Magelang 5 tahun terakhir, masih banyak potensi investasi yang dapat dihimpun yang masih terkendala. Beberapa masalah yang masih dihadapi dalam kegiatan penanaman modal antara lain: kurangnya informasi dan promosi terhadap potensi investasi yang ada di Kota Magelang; kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena kekurangsiapan sumberdaya dan sarana prasarana dalam menarik investor, ketentuan hukum yang kurang konsisten (masih terdapat overlap antara peraturan perundangan yang satu dengan yang lain), pelayanan pengurusan perijinan yang masih membutuhkan waktu lebih dari satu hari, serta terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang menangani pelayanan pengurusan perijinan dan investasi di Kota Magelang.

Investasi melalui PMA dan PMDN yang masuk ke Kota Magelang walaupun semakin produktif dalam penyerapan tenaga kerja, namun masih berpotensi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Di tahun 2015 rasio penyerapan tenaga kerja baru mencapai angka 3,59%.

Jumlah koperasi di Kota Magelang bertambah, dan jumlah koperasi aktif semakin meningkat pula. Namun demikian di era globalisasi dan MEA, koperasi semakin menghadapi banyak tantangan dan masih menyimpan beberapa permasalahan. Permasalahan yang masih dihadapi antara lain: modal yang terbatas yang menyebabkan volume usaha terbatas dan kurang bisa memelihara asetnya, SDM pengelola yang kurang terampil sehingga banyak kepentingan administrasi yang terabaikan dan solidaritas antar anggota yang kurang terjalin, sedangkan tantangan yang dihadapi seperti semakin maraknya bidang usaha lain yang semakin menambah berat persaingan koperasi.

UMKM di Kota Magelang di tahun 2015 berkembang pesat berkat pendampingan dari dinas terkait, termasuk upaya promosi produk UMKM melalui berbagai kesempatan. Meski banyak upaya telah dilaksanakan, namun masih terdapat berbagai kendala dalam pengembangan UMKM di Kota Magelang yang merupakan masalah klasik antara lain masalah daya saing, terbatasnya modal, kurangnya wilayah pemasaran, sarana promosi produk, kemampuan akses usaha, kemampuan manajerial sumberdaya manusia pengelolanya, kemampuan inovasi dan kreativitas, dan kemampuan penguasaan teknologi yang masih terbatas.

✓ **Ketahanan Pangan**

Isu strategis terkait dengan penyelenggaraan urusan ketahanan pangan hingga saat ini adalah ketersediaan energi dan protein. Hal ini disebabkan karena rendahnya produksi pangan asal Kota Magelang, sebagai akibat dari maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Sehingga untuk memenuhi ketersediaan energi dan protein penduduk, maka komoditas pangan dipasok dari luar Kota Magelang.

Dengan demikian, ketahanan pangan di Kota Magelang belum dapat terwujud, masih bergantung pada produksi komoditas pangan luar Kota Magelang. Oleh sebab itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membangun ketahanan pangan adalah dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, diantaranya melalui pengembangan urban farming dengan memanfaatkan lahan sempit (tidak terpakai) berbasis budidaya organik. Urban farming di Kota Magelang dapat melibatkan budidaya pertanian, peternakan, maupun perikanan.

Selain itu, yang juga masih menjadi permasalahan saat ini maupun pada pembangunan jangka menengah selanjutnya adalah keseimbangan gizi dan keanekaragaman pangan yang dikonsumsi oleh penduduk (skor PPH) Kota Magelang. Pola konsumsi pangan penduduk belum sesuai dengan anjuran untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Pangan yang dikonsumsi penduduk belum mengacu pada kaidah B2SA (beragam, bergizi seimbang, dan aman). Pola konsumsi pangan penduduk masih didominasi oleh padi-padian dan umbi-umbian, sedangkan pangan hewani, dan kacang-kacangan masih harus ditingkatkan lagi konsumsinya.

Belum adanya kesadaran penduduk mengenai konsumsi pangan B2SA serta keterbatasan ekonomi rumah tangga menyebabkan pola konsumsi pangan penduduk belum sesuai dengan Pola Pangan Harapan. Sehingga masih perlu upaya untuk peningkatan kualitas maupun kuantitas konsumsi pangan penduduk Kota Magelang, dengan memperhatikan keseimbangan konsumsi pangan (beragam, bergizi seimbang dan aman).

E. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan:

Pembangunan infrastruktur perkotaan menjadi faktor utama untuk mendukung keberlangsungan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Langkah yang ditempuh adalah melalui pemanfaatan potensi daerah secara inovatif dan kreatif dalam mengaktifkan dan mengoptimalkan sumberdaya air dan energi,

mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin adanya kesehatan lingkungan, mampu mensinergikan lingkungan alami dan buatan, dan pelibatan aktif masyarakat sebagai “komunitas hijau”, dengan mendasarkan kepada perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (lingkungan, sosial, dan ekonomi) atau “membangu tanpa merusak”.

Salah satu masalah yang sangat urgent dalam kaitannya dengan lingkungan hidup adalah berkenaan dengan pengelolaan persampahan di Kota Magelang. Ini mengingat kondisi kedaruratan yang tengah dihadapi saat ini, di mana TPA sampah sudah mengalami overload sementara produksi sampah dari masyarakat belum bisa ditekan hingga titik yang terendah.

Meningkatnya volume sampah dan keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah industri menyebabkan masalah pengelolaan sampah di Kota Magelang menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Magelang. Hal ini ditambah dengan telah habisnya umur pakai TPSA Banyu urip sehingga saat ini Kota Magelang dalam keadaan darurat sampah dan harus mencari alternatif lain yang akan di jadikan sebagai lokasi TPSA. Terkait permasalahan di bidang pengelolaan persampahan, Pemerintah Kota Magelang sudah melakukan beberapa terobosan dan inovasi seperti pembentukan Kampung Organik dan membudayakan 3R untuk memaksimalkan usia TPA. Namun upaya dari Pemerintah ini perlu mendapat dukungan dari masyarakat utamanya dalam meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah domestik. Perlunya mengoptimalkan kembali kegiatan kegiatan yang sudah ada seperti kampong organik, 3R, pengomposan skala rumah tangga dan bank sampah serta sosialisasi dan penyuluhan mengenai reduksi volume sampah rumah tangga.

Peran serta dan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan sampah domestik. Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Selain itu keterbatasan lahan TPA dan usia TPA yang tidak dapat menampung lagi menuntut peran serta dan kesadaran masyarakat untuk ikut membantu dalam mengelola sampah domestik. Selama ini peran serta masyarakat hanya diwujudkan sebatas membayar retribusi sampah. Peran serta tersebut diharapkan dapat ditingkatkan lagi dengan mengurangi sampah dari sumbernya (masing-masing rumah tangga) dan melakukan pemilahan sampah. Disamping itu keberadaan prasarana pendukung pengelolaan sampah (seperti TPS, transfer depo, TPST dan SPA) kurang berfungsi optimal.

Ditinjau dari sisi SDM Pengelola Sampah dalam menangani sampah di Kota Magelang masih belum memenuhi. Kualitas SDM harus memiliki kemampuan manajemen dan teknik, dimana perbandingan jumlah personil 1 : 1000 jiwa yang dilayani (Standar Nasional Indonesia Bidang Persampahan Departemen Pekerjaan Umum). Selama ini jumlah SDM Pengelola Persampahan di Kota Magelang dalam menangani sampah masih dirasa cukup kurang untuk melayani seluruh jumlah penduduk di Kota Magelang.

F. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal;

Untuk mewujudkan hal itu, upaya-upaya yang dilakukan meliputi: penguatan daya saing dan kemandirian daerah; penerapan prinsip-prinsip kota cerdas; peningkatan kreativitas dan penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi; peningkatan daya saing dan daya jual pariwisata; penciptaan iklim yang kondusif untuk investasi, dan penguatan implementasi Branding Magelang Kota Sejuta Bunga.

✓ **Penguatan daya saing dan kemandirian daerah**

Setiap daerah ditantang untuk berbenah diri menghadapi era persaingan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi juga bersifat global. Persaingan ini menuntut setiap daerah untuk berbenah diri dengan memberi lingkungan paling kondusif bagi pelaku bisnis dalam berusaha. Hal ini memerlukan strategi yang dirumuskan oleh segenap komponen pembangunan daerah (pemerintah, swasta, dan masyarakat) untuk dapat unggul baik di tingkat regional maupun internasional guna menunjukkan usaha yang paling kompetitif.

Menurut Survey Bank Indonesia, Perwakilan Jawa Tengah, 2016, Kota Magelang berpotensi untuk terus dikembangkan di masa datang karena memiliki daya saing tertinggi dibandingkan kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan indeks 64,72, pada tujuh indikator yakni: kinerja pemerintahan, lingkungan usaha, infrastruktur, SDM, kesehatan, pendidikan, dan pasar keuangan.

Karena itu, disamping tetap mempertahankan kondisi yang sudah baik juga secara terus menerus melakukan langkah-langkah reformasi struktural dalam rangka meningkatkan daya saing daerah mengingat kinerja pemerintah memegang peranan penting dalam penentuan daya saing daerah seperti mempermudah proses perizinan dan kejelasan RTRW agar investor dengan mudah dapat berinvestasi. Lebih dari itu, daya saing tidaklah hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja, tetapi lebih jauh lagi yaitu daya saing tersebut diartikan sebagai kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup rakyat yang nyata dan berkelanjutan serta secara politis, sosial dan budaya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Ke depan, dalam rangka membangun daya saing daerah, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa hal, antara lain: (a) Memetakan potensi daerah berikut supply dan demand, (b) Memperkuat seluruh infrastruktur ekonomi untuk mendorong potensi daerah, termasuk SDM-nya, (c) Menguasai rantai pasokan (hulu-hilir) untuk menekan inefisiensi (sinergi provinsi dan kabupaten /kota), (d) Menciptakan inovasi produk, serta (e) Mendorong ekonomi rakyat dengan terus meningkatkan penggunaan produksi lokal. Akhirnya, kesiapan kapabilitas pemerintah daerah perlu didukung oleh peningkatan kemampuan dalam mengelola keuangan daerahnya. Kualitas sumber daya manusia perlu dipersiapkan, sehingga dana yang dimiliki dapat dikelola dengan efektif dan secara bertahap dapat membangun daya saing Kota Magelang.

✓ **Penciptaan iklim yang kondusif untuk investasi**

Investasi yang masuk dalam suatu daerah diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, dengan begitu maka dapat mengatasi pengangguran penduduk. Artinya, dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah diharapkan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat membuka peluang secara positif bagi upaya perbaikan atas kelemahan/kekurangan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah merupakan upaya dan proses perbaikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara implementasi otonomi daerah saat ini dihadapkan pada tantangan era globalisasi yang semakin berat.

Daerah harus mencari dan mengenal potensi yang akan dikembangkan dan dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat. Apalagi dengan semakin terbukanya pasar bebas yang memungkinkan produk impor masuk ke daerah-daerah, tentunya usaha-usaha yang dilakukan daerah harus lebih nyata dan terukur. Ukuran keberhasilannya adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Setiap daerah dituntut untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat menciptakan ide-ide baru, perbaikan-perbaikan yang dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru, industri baru, lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Penciptaan iklim investasi yang kondusif tidak hanya berdasarkan faktor ekonomi saja seperti suku bunga, inflasi, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), upah minimum, dan nilai tukar. Namun faktor-faktor non-ekonomi lainnya juga sangat berpengaruh, seperti masalah perizinan usaha, kestabilan politik, penegakkan hukum, masalah pertanahan untuk lahan usaha, tingkat kriminalitas dalam masyarakat, demonstrasi buruh, komitmen pemerintahan, komitmen perbankan, perpajakan, dan infrastruktur.

Menurut Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tentang indikator-indikator iklim investasi berdasarkan persepsi pelaku usaha disimpulkan bahwa ada sembilan indikator iklim investasi yang mempengaruhi investasi, yaitu: (1) akses lahan usaha dan kepastian usaha, (2) perizinan usaha, interaksi antara pemda dan pelaku usaha, (3) program pengembangan usaha swasta, (4) kapasitas dan integritas Kepala Daerah, (5) pajak daerah, (6) retribusi daerah dan biaya transaksi lain, (7) kebijakan infrastruktur daerah, (8) keamanan dan penyelesaian konflik, dan (9) kualitas peraturan daerah.

✓ **Smart City**

Konsep Smart city terkait dengan bagaimana membangun suatu system yang secara cerdas dapat memecahkan solusi secara cepat dan tepat. Dalam smart city, diperlukan sistem informasi yang terintegrasi sehingga transparat, efektivitas, efisiensi, dan kecepatan dalam menganalisis dan pengambilan keputusan.

Salah satu dukungan dalam penyelenggaraan smart city adalah implementas e-Government, dimana saat ini masih kurang optimal karena kurangnya kesiapan dari pemerintah baik dari SDM maupun sarana prasarana. Pelaksanaan e-Government di Kota Magelang saat ini masih belum optimal dan sangat perlu untuk ditingkatkan. Keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi di Kota Magelang menjadi salah satu faktor belum optimalnya implementasi e-Government. Seperti pemasangan WAN yang belum berjalan optimal. Selain itu keterbatasan SDM dalam bidang teknologi informasi.

Berdasarkan penilaian GSCM Magelang berada pada posisi **Scattered dengan Nilai 48.89**. Kondisi sosial kota Magelang memberikan kontribusi paling tinggi dengan nilai 82.04 Tingginya kondisi sosial hal ini bersumber dari baiknya pelayanan publik dan baiknya kondisi ansportasi di kota ini yang memiliki nilai diatas 70. Berturut-turut selanjutnya diikuti oleh ekonomi dan lingkungan . sementara enabler yaitu tatakelola, teknologi dan sumberdaya manusia menjadi faktor dengan kontribusi terkecil. Minimnya sumberdaya manusia dan tatakelola yang baik menjadi permasalahan tersendiri di kota Magelang.

Kemajuan dan potensi pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) memberi peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat. Pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (e-Government) dan layanan publik akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pemenuhan sarana prasarana untuk optimalnya e-Government bukanlah hal yang mudah ataupun murah, namun hal ini dapat memberikan manfaat dan dampak yang sangat baik untuk Kota Magelang dan Pemerintah Kota Magelang pada khususnya dalam menjalankan tugas-tugasnya.

✓ **Peningkatan kreativitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi**

Pembangunan iptek merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia (SDM), yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu iptek menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumberdaya baru yang lebih bernilai. Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan manusia, serta kemandirian dan daya saing suatu daerah dengan daerah lainnya.

Walaupun di Kota Magelang secara umum telah terjadi perkembangan dan kemajuan di ranah iptek, namun demikian dalam realitanya hal itu belum menjadi faktor pendorong utama dalam menggerakkan sektor riil pembangunan. Lemahnya daya saing dan kemampuan iptek ditunjukkan oleh sejumlah indikator, antara lain:

1. Jumlah paten penemuan baru di Kota Magelang masih rendah,
2. Rendahnya kontribusi iptek daerah di sektor produksi.
3. Belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna.
4. Lemahnya sinergi kebijakan iptek, sehingga kegiatan iptek belum sanggup memberikan hasil yang signifikan.
5. Masih terbatasnya sumber daya iptek, yang tercermin dari rendahnya kualitas SDM dan kesenjangan pendidikan di bidang iptek.
6. Belum berkembangnya budaya iptek di kalangan masyarakat. Budaya masyarakat secara umum masih belum mencerminkan nilai-nilai iptek yang mempunyai penalaran obyektif, rasional, maju, unggul dan mandiri.
7. Belum optimalnya peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup.

Upaya yang harus ditempuh guna pengembangan kreativitas berbasis iptek di Kota Magelang harus diorientasikan kepada: (a) Tumbuhnya penemuan iptek baru sebagai hasil litbang daerah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan nilai tambah dalam sistem produksi dan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara lestari dan bertanggung jawab; (b) Meningkatnya ketersediaan, hasil guna, dan daya guna sumberdaya (SDM, sarana, prasarana dan kelembagaan) iptek; (c) Tertatannya mekanisme intermediasi untuk meningkatkan pemanfaatan hasil litbang oleh dunia usaha dan industri, meningkatnya kandungan teknologi dalam industry daerah, serta tumbuhnya jaringan kemitraan dalam kerangka sistem inovasi daerah;

dan (d) Terwujudnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreativitas, sistem pembinaan dan pengelolaan hak atas kekayaan intelektual, pengetahuan lokal, serta sistem standarisasi nasional.

✓ **Branding Kota Magelang**

City branding diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pencapaian Visi Kota Magelang. City branding merupakan salah satu strategi untuk mempromosikan image sebuah kota atau daerah beserta isinya (budaya, obyek wisata, produk barang, layanan jasa, dan sebagainya) di dalam benak target pasar (investor, tourist, talent, event) kota dengan menggunakan kalimat positioning, slogan, icon, eksibisi dan berbagai media lainnya, agar kota tersebut dikenal secara luas baik regional, nasional bahkan internasional.

“Magelang Kota Sejuta Bunga” sebagai city branding Kota Magelang dicanangkan pada tahun 2012. Gagasan Kota Sejuta Bunga ini dilatarbelakangi oleh sejarah Kota Magelang yang lebih dikenal sebagai Tuin Van Java (Kota Kebun/ Tamannya Pulau Jawa) pada zaman Kolonial. Dimana pada saat itu Kota Magelang memiliki panorama yang indah dan udara yang sejuk serta memberi kenyamanan bagi pengunjungnya. Sementara bila ditinjau dari sisi filosofis, “Bunga” merupakan lambang kecantikan dan keindahan, mempunyai nilai ekonomis serta menggambarkan sinergitas kehidupan. Sehingga ibaratkan bunga, Kota Magelang sebagai kota jasa yang memiliki daya tarik serta memberikan manfaat secara ekonomis dan media terwujudnya sinergitas kehidupan masyarakat yang dikemas dalam tampilan yang menarik.

Sebagai Kota jasa yang memiliki daya tarik, Kota Magelang membutuhkan dukungan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan tertata rapi melalui pengelolaan lingkungan hidup kawasan perkotaan dengan meningkatkan kualitas ruang-ruang terbuka hijau dan taman-taman kota, menjaga kualitas air, udara dan sumber daya alam lainnya. Serta penataan taman, signage, furniture jalan yang menampilkan image sejuta bunga dan kekhasan tematik district. Pertumbuhan ekonomi melalui: penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung pengembangan sektor industri kecil, perdagangan dan jasa-jasa lainnya; meningkatkan kualitas pelayanan beserta fasilitas yang memadai dan sumber daya manusianya di berbagai aspek sehingga mempunyai daya saing tinggi; mengembangkan dan mempromosikan potensi kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kota Magelang. Pembangunan Magelang Kota Sejuta Bunga meliputi pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial budaya, melalui serangkaian program yang saling berkait dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

G. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan;

Upaya yang ditempuh tidak saja pelestarian budaya dan kesenian tradisional daerah semata, akan tetapi lebih dari itu pun mencakup penggalan dan pengembangan budaya kreatif dan kesenian kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman sebagai salah satu potensi kekayaan dan keanekaragaman pariwisata di Kota Magelang. Termasuk dalam kaitan ini adalah industri kreatif dan inovatif yang tengah marak berkembang di Kota Magelang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang bisa dikatakan telah merasuk ke hampir seluruh relung sendi-sendi kehidupan masyarakat.

✓ **Kebudayaan**

Kebudayaan terkait dengan persoalan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan. Berbagai bidang pembangunan membutuhkan peranan kebudayaan untuk mendukung suksesnya program-program yang akan dijalankan.

Kebudayaan dari sisi peningkatan kesejahteraan lahir bisa dikembangkan dalam rangka mendukung pariwisata yang berujung pada dampak ekonomi kepada masyarakat. Selain itu pula dengan munculnya industri kreatif yang berbasis budaya lokal juga mendorong Usaha Kecil Masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Dari segi peningkatan kesejahteraan batin, pembangunan kebudayaan mampu menumbuhkan nilai-nilai kesetiakawan sosial, nasionalisme, cinta terhadap budaya sendiri, toleransi, ramah, sopan santun, dan toleransi tinggi.

Kota Magelang kaya akan berbagai peninggalan benda, situs dan cagar budaya yang merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan. Sebagian besar Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Magelang merupakan peninggalan kolonial Belanda, sedangkan 1 situs yang merupakan peninggalan Hindu Mataram yaitu Mantyasih saat ini belum ditetapkan sebagai situs/ kawasan Cagar Budaya. Berbagai peninggalan Benda, Situs dan Cagar Budaya perlu ditingkatkan perlindungan, pelestarian serta pengelolaannya.

Pada saat ini tercatat terdapat 35 buah Benda Cagar Budaya yang perlu dilestarikan dan dilindungi, berkurang 1 akibat musibah kebakaran Klenteng Liong Hok Bio pada tahun 2014. Kota Magelang telah memiliki instrumen Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya di Kota Magelang sebagai dasar hukum bagi upaya Perlindungan dan Pelestarian Benda Cagar Budaya. Namun demikian perlu dilaksanakan berbagai upaya sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut diantaranya perlunya inventarisasi, penggalian dan pengelolaan berbagai benda, situs dan cagar budaya yang dimiliki Kota Magelang. Selain itu diperlukan mekanisme pelestarian berbagai benda, situs dan kawasan cagar budaya baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat. Mekanisme pelestarian itu dapat berupa fasilitasi pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk stimulan ataupun reward bagi masyarakat agar mereka secara sadar berpartisipasi menjaga dan melestarikan berbagai benda, situs, dan kawasan cagar budaya.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membuka peluang terjadinya interaksi budaya antarbangsa yang dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan dan perubahan orientasi nilai dan perilaku bangsa Indonesia. Namun, di sisi lain, hal tersebut dapat juga menimbulkan pengaruh negatif, seperti menurunnya penghargaan pada nilai budaya, bahasa, dan nilai solidaritas sosial.

✓ **Pariwisata**

Dalam upaya untuk mewujudkan peningkatan daya saing dan daya jual pariwisata guna meningkatkan jumlah kunjungan serta pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan, menghadapi tantangan yang harus diselesaikan sebagai berikut: Optimalisasi promosi, informasi dan pemasaran pariwisata, Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan serta sumber daya manusia pengelola pariwisata, Peningkatan kreativitas, kreasi, atraksi dan inovasi destinasi pariwisata serta fasilitas pendukung destinasi

pariwisata, Penyelenggaraan even pariwisata yang dilaksanakan secara periodik yang dikemas dalam atraksi yang menarik, atraktif dan spektakuler serta berskala luas sehingga mampu menarik wisatawan berkunjung.

H. Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah

Terpeliharanya stabilitas daerah dalam suasana yang kondusif menjadi prasyarat bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan publik di daerah. Potensi gangguan keamanan dan ketertiban muncul apabila terjadi konflik antara buruh dan majikan dalam pengelolaan manajemen perusahaan; perilaku tidak tertib kalangan sektor informal kaki lima, gelandangan dan pengemis (gepeng); unjuk rasa; perkelahian antar kelompok dan tawuran; serta berbagai bentuk pelanggaran dan ketidakdisiplinan lainnya. Adanya kerawanan dan masalah sosial akan berdampak negatif dan berpotensi melahirkan berbagai penyakit masyarakat seperti, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perjudian, pelacuran, dan premanisme. Selain itu, tidak boleh dilupakan juga terhadap ancaman bahaya terorisme, konflik yang bersifat SARA, dan gerakan radikalisme yang acapkali bersifat laten serta memiliki spektrum jaringan dan daya destruktif yang lebih luas.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat serta kondusivitas daerah, serta peningkatan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama. Dalam konteks ini, warga masyarakat perlu dikembangkan untuk menjadi warga yang cerdas, demokratis, dan religius (memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, memudar dan lunturnya nilai-nilai wawasan kebangsaan serta rendahnya kesadaran politik warga pada gilirannya dapat memunculkan sikap dan tindakan yang hanya bersemangatkan solidaritas sempit, ikatan primordial, dan sektarian dari satu kelompok masyarakat tertentu yang bisa mengakibatkan retaknya keharmonisan, keserasian, dan integrasi antar warga dalam jalinan interaksi sosial. Di sisi lain, maraknya perilaku KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang menggerogoti kekayaan negara mencerminkan pula terjadinya erosi dan menipisnya rasa cinta air dari para pelakunya. Degradasi dan krisis terhadap nilai-nilai nasionalisme dan spirit kebangsaan harus dieliminasi atau setidaknya direduksi melalui perkuatan persatuan dan kesatuan bangsa serta penanaman nilai-nilai luhur bangsa yang bersendikan ideologi Pancasila dan UUD 1945 secara substantif dalam praksis sehari-hari, yang disertai dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Secara komprehensif, keterkaitan isu strategis antara isu internasional, nasional, regional dalam RKP Kota Magelang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel II.155

Keterkaitan Isu Strategis RKPD Kota Magelang 2017 dengan Isu Internasional, Nasional, Regional, dan Daerah

NO	RKPD Kota Magelang Tahun 2017	INTERNASIONAL		NASIONAL	REGIONAL
		SDG's	MEA/ AEC	RKP 2017	RKPD Provinsi Jawa Tengah
1	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar	1) Penghapusan Kemiskinan	11) Pengembangan Kesehatan	5) Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Perumahan	1) Pengurangan Kemiskinan
		2) Penghapusan Kelaparan			
		3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan			
		4) Pendidikan Berkualitas			
2	Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi)	5) Kesetaraan Gender	14) Pengembangan Kewirausahaan	3) Pemerataan pembangunan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah	
		10) Penurunan Kesenjangan			
		11) Kota Inklusif dan Berkelanjutan			
		13) Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana			
3	Penguatan reformasi birokrasi	16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Kokoh		2) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	6) Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah
		17) Kemitraan Untuk Semua Tujuan Pembangunan		4) Kepastian dan penegakan hukum	
				7) Revolusi Mental	
4	Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri	8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak	1) Pengembangan Industri Nasional	6) Pembangunan sektor unggulan: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan kelistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri	4) Kedaulatan Pangan
			2) Pengembangan Pertanian		
			3) Pengembangan Kelautan dan Perikanan		
			4) Pengembangan Energi		
			9) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah		
			10) Pengembangan Tenaga Kerja		
			12) Pengembangan		

NO	RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017				
	RKPD Kota Magelang Tahun 2017	INTERNASIONAL		NASIONAL	REGIONAL
		SDG's	MEA/ AEC	RKP 2017	RKPD Provinsi Jawa Tengah
		12) Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Perdagangan		
5	Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	6) Air Bersih dan Sanitasi	5) Pengembangan Infrastruktur		3) Pembangunan Infrastruktur
		7) Energi Bersih dan Terjangkau			
		15) Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat	6) Pengembangan Sistem Logistik Nasional		5) Kedaulatan Energi
6	Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal	9) Infrastruktur tangguh, Industri inklusif, dan Inovatif	7) Pengembangan Perbankan	2) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	6) Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah
			8) Pengembangan Investasi		
7	Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan		13) Pengembangan Kepariwisata	7) Revolusi Mental	
8	Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah			1) Keamanan dan Ketertiban	6) Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah
				7) Revolusi Mental	
				8) Politik dan Demokrasi	

BAB. III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2017



Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015

- dan Perkiraan Tahun 2016



Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah



Arah Kebijakan Keuangan Daerah



BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2017

Perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2017 menjadi dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2017. Kerangka ekonomi makro ini sekaligus memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Magelang baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Di sisi lain kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2016. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Dengan demikian rancangan kerangka ekonomi tahun 2017 akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Magelang.

3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016

Penyesuaian perhitungan PDRB dan IPM pada skala nasional sampai level daerah menimbulkan beberapa dampak dalam statistik perekonomian Kota Magelang. Beberapa perubahan akibat penyesuaian tersebut tampak pada munculnya transformasi struktur perekonomian Kota Magelang dan perubahan penetapan target kinerja pembangunan. Berdasarkan potret tatanan perekonomian global, prediksi ekonomi Kota Magelang dan dengan asumsi *ceteris paribus*, maka asumsi dasar ekonomi Kota Magelang tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel III.1
Asumsi Makro Dasar Kota Magelang Tahun 2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (%)**	6,04	4,88	5,07	5,18*	5,05*	* Data Prediksi (deviasi +/- 0,25%)
Jumlah Pengangguran (ribu jiwa)	4,241	4,754	3,927	3,396*	3,005*	*Data Prediksi (deviasi +/- 0,819 ribu jiwa)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,80	7,38	6,43%	6,43%-6%	6-5%	*Data Prediksi Derivatif
Jumlah Penduduk (jiwa)	120.158	120.615	120.952*	121.512*	121.940*	*Data Prediksi Derivatif
IPM***	75,29	75,79	76,39	76.61*	76,9*	*Data Prediksi (deviasi +/- 0,04)
Inflasi (%)	7,78	7,92	2,7	3,57%-5,15%*	3,36%-4,94%	*Data Prediksi
Persentase Penduduk Miskin (Maret-%)	9,82	9,09*	9,05	8,36%-8,89%*	7,41%-8,09%*	*Data Prediksi Derivatif

Sumber: BPS Kota Magelang, Prediksi oleh Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang

** Tahun Dasar 2010 (tahun 2013 angka sementara, tahun 2014 angka sangat sementara)

*** Metode Baru

na : data belum terpublikasi

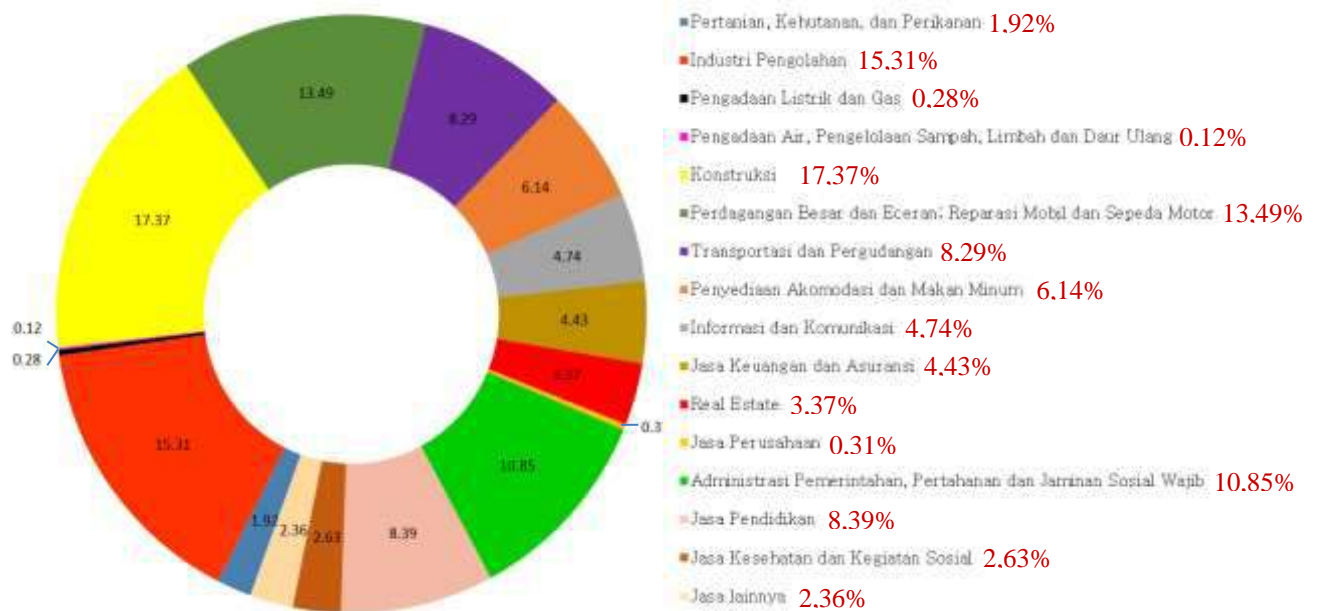
Pada tahun 2017 seluruh lapangan usaha di Kota Magelang diprediksi mengalami pertumbuhan positif, seiring dengan prospek ekonomi global yang lebih baik, pembangunan infrastruktur lokal dan kondusifnya iklim investasi. Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang tahun 2017 terutama didorong oleh stabilnya produksi barang dan jasa dari lapangan usaha Konstruksi (17,37%), Industri Pengolahan (15,31%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,49%) dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (10,85%). Transformasi struktur ekonomi di Kota Magelang tidak begitu nyata sampai dengan tahun 2017. Dominasi lapangan usaha ini cenderung stabil sejak tahun 2014 dengan peningkatan pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Rincian pertumbuhan ekonomi dan distribusi masing-masing lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel III.2
Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Lapangan Usaha
Pembentuk PDRB Kota Magelang Tahun 2017

LAPANGAN USAHA	NTB (Juta Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Distribusi (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	106.104,87	1,10	1,92
Industri Pengolahan	890.011,45	5,51	15,31
Pengadaan Listrik dan Gas	22.722,52	7,80	0,28
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.889,23	1,30	0,12
Konstruksi	910.359,74	2,81	17,37
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	883.532,44	3,62	13,49
Transportasi dan Pergudangan	512.783,84	11,77	8,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	329.436,21	6,00	6,14
Informasi dan Komunikasi	435.318,19	14,10	4,74
Jasa Keuangan dan Asuransi	245.879,28	2,31	4,43
Real Estate	207.556,65	5,97	3,37
Jasa Perusahaan	19.445,28	5,96	0,31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	582.554,44	1,34	10,85
Jasa Pendidikan	381.506,43	5,15	8,39
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	141.235,55	4,34	2,63
Jasa lainnya	137.519,34	10,51	2,36
PDRB	5.813.855,46	5,05	100,00

Sumber: Prediksi Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang, 2016

Dengan prediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05% dan rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun sebesar 5,51% maka perekonomian Kota Magelang tahun 2017 diprediksi memiliki struktur sebagai berikut:



Sumber: Prediksi Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang

Gambar III.1
Grafik Prediksi Struktur Ekonomi Kota Magelang Tahun 2017

Perolehan PDRB atas dasar berlaku pada tahun 2017 diprediksi mencapai 7,8 triliun rupiah dengan pertumbuhan 10,07% dan perkembangan 238% dari tahun dasar 2010. Total nilai tambah bruto (NTB) ini diprediksi akan terus tumbuh mencapai 11,58 Triliun rupiah pada tahun 2021. Selama periode tersebut diprediksi Industri Pengolahan dan Informasi Komunikasi menjadi lapangan usaha strategis dengan NTB yang tumbuh dengan peningkatan distribusi yang signifikan sehingga memiliki posisi dalam struktur perekonomian yang mampu menggeser beberapa peranan lapangan usaha yang lain. Prediksi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan populasi dan integrasi industri pengolahan di wilayah Kota Magelang, meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi lokal, menyediakan infrastruktur dan memelihara iklim investasi yang baik.



Keterangan:

- Pertumbuhan Ekonomi (%)
- PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)

Sumber: BPS Kota Magelang (2013 angka sementara, 2014 angka sangat sementara, diolah)

Data 2015-2021 prediksi oleh Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang

Gambar III. 2
Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Perolehan PDRB atas Dasar
Harga Berlaku Kota Magelang Tahun 2011-2014 dan Prediksi
Tahun 2015-2021

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

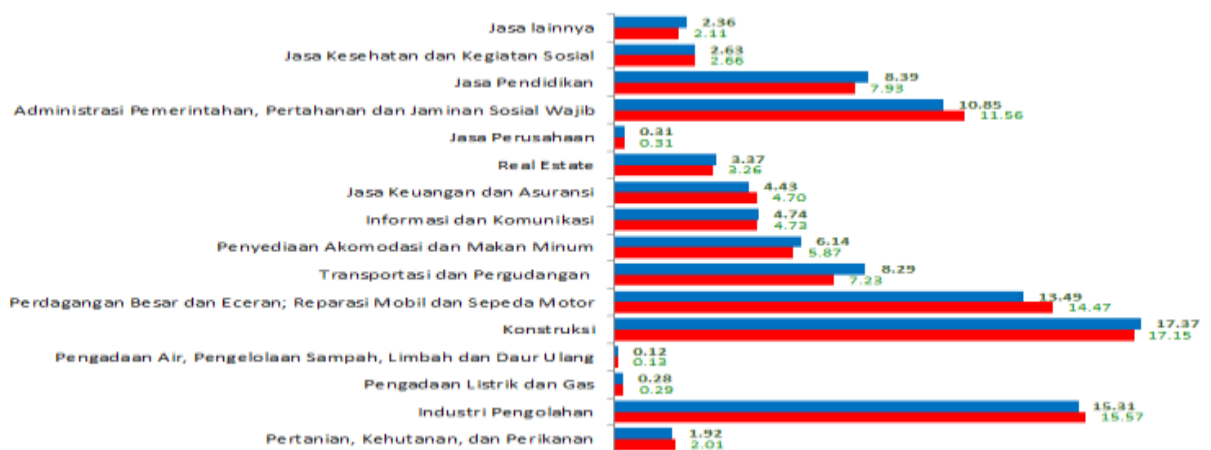
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan. PDRB nominal (harga berlaku) dan PDRB riil (harga konstan), masing-masing mempunyai peran masing-masing.

Seperti halnya dalam PDB (Produk Domestik Bruto), PDRB mempunyai tiga pendekatan dalam menghitungnya yaitu pendekatan produksi atau lebih dikenal dengan PDRB Sektoral atau PDRB menurut Lapangan Usaha, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Gambaran selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikut:

3.1.1.2 PDRB Harga Berlaku

Pada tahun 2017 produksi barang dan jasa di Kota Magelang diprediksi mencapai 7,8 triliun rupiah dengan pertumbuhan 10,07%. Pada tahun ini diprediksi kontribusi lapangan usaha Jasa Lainnya akan mampu menggeser peran lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan prediksi NTB sebesar 186,2 miliar rupiah (2,36%) dan pertumbuhan 16,7%.

Lapangan Usaha Jasa Lainnya memiliki cakupan kegiatan yang cukup luas meliputi: Kesenian, Hiburan dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer, Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga serta Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan. Lapangan usaha ini sangat potensial dengan rata-rata pertumbuhan 11,37% tiap tahun.



Keterangan:

■ 2017
 ■ 2015

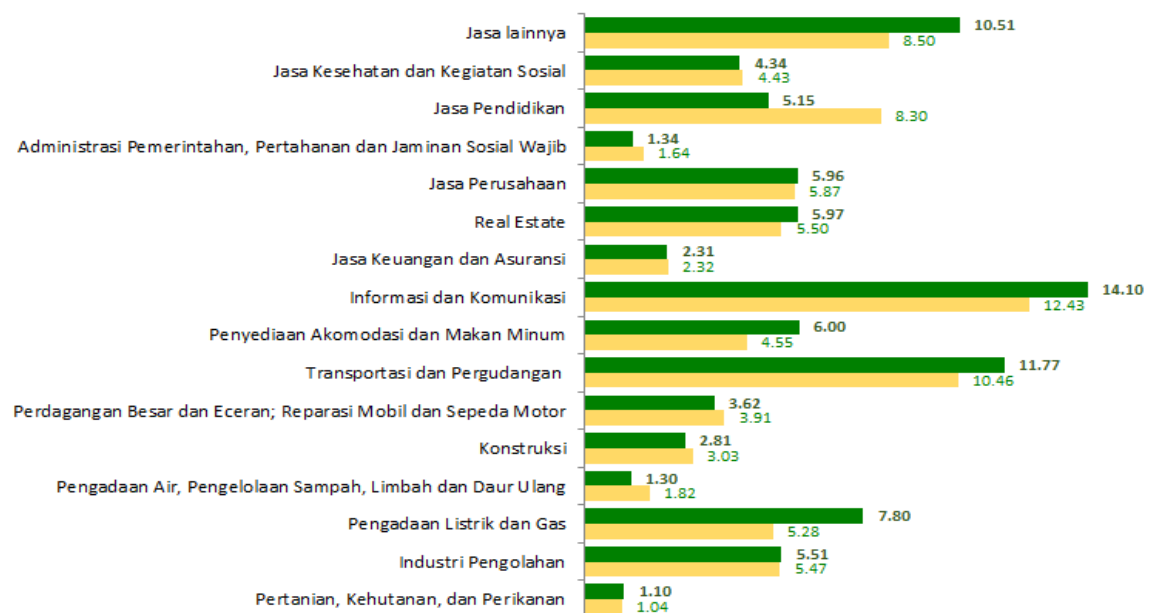
Sumber: Prediksi Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang

Gambar III.3
Grafik Prediksi Kontribusi NTB Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2015 dan 2017 (persen)

3.1.1.3 PDRB Harga Konstan

Pada tahun 2017 diprediksi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang akan mencapai 5,35% dengan PDRB riil sebesar 5,8 triliun rupiah. Dari sisi sektoral, peningkatan pertumbuhan PDRB riil didukung oleh peningkatan kinerja dari lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, Transportasi dan Pergudangan serta Jasa Lainnya. Pertumbuhan ekonomi terendah diprediksi masih akan berada pada hasil produksi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Pada tahun 2017 atas dasar harga konstan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi diprediksi akan mampu menggeser peran Jasa Pendidikan dengan kontribusi NTB terbesar ke-6 terhadap total PDRB riil Kota Magelang. Salah satu pendorong bersinarnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi adalah karena meningkatnya kegiatan layanan data berbasis elektronik baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat dan suburnya pertumbuhan pengguna layanan seluler dan internet di Kota Magelang.



Sumber : Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang Tahun 2016

Gambar III.4
Grafik Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Lapangan Usaha (dalam persen) Tahun 2015 dan 2017

3.1.1.4 PDRB per Kapita

Pada tahun 2017 dengan asumsi pertumbuhan penduduk tengah tahun 1,32% dan seiring dengan asumsi kenaikan PDRB, perolehan PDRB per kapita Kota Magelang diprediksi berada pada kisaran 5,2 juta rupiah per bulan atas dasar harga berlaku dan 3,9 juta rupiah per bulan atas dasar harga konstan. Angka tersebut diperoleh berdasarkan derivatif prediksi jumlah penduduk tengah tahun Kota Magelang pada tahun 2017 sebesar 121.940 jiwa. Besaran diprediksi akan terus naik dengan harapan berkembang 180% dari kondisi tahun 2014.

Tabel III.3
Prediksi PDRB per Kapita Kota Magelang Tahun 2015 dan Tahun 2017

Uraian	2015	2017
PDRB atas dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	6,510,371.85	7.887.579,10
PDRB atas dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	5,241,660.00	5.813.855,46
Penduduk Tengah tahun (jiwa)	120.952.00	121.940,00
PDRB per Kapita atas dasar Harga Berlaku (Rp/kapita/tahun)	43,216,359.11	63.394.588,17
Pertumbuhan adhb (%)	8.55	8,63
PDRB per Kapita atas dasar Harga Konstan (Rp/kapita/tahun)	43,020,847.03	46.557.773,90
Pertumbuhan adhk (%)	4.09	3,97

Sumber: Prediksi oleh Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang

3.1.2 Perkembangan Harga (Inflasi)

Perubahan harga barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga merupakan hal yang dapat dielakkan dalam sebuah perekonomian. Perubahan harga tersebut dapat berupa kenaikan, penurunan. Rata-rata tertimbang perubahan harga tersebut pada kurun waktu tertentu dalam suatu wilayah itulah yang kita kenal dengan inflasi.

Tahun 2015 merupakan periode dimana harga-harga komoditas di Kota Magelang relatif stabil. Fluktuasi harga tidak begitu drastis dan perolehan inflasi di akhir tahun di bawah 5% mencapai 2,7%, di bawah angka inflasi provinsi dan nasional. Pada tahun 2017 diperkirakan inflasi di Kota Magelang mencapai 4,04% (deviasi +/- 1,65%). Terjaganya laju inflasi di Kota Magelang merupakan faktor positif yang diharapkan dapat mendorong penguatan permintaan lokal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi makro.

Tabel III.4
Perkembangan Inflasi Indonesia, Jawa Tengah dan Kota Magelang
Tahun 2012-2015 dan Prediksi Inflasi Kota Magelang
Tahun 2016-2021(dalam persen)

Tahun	Kota Magelang	Jawa Tengah	Nasional
2012	6.05	4,24	4,30
2013	7.78	7,99	8,38
2014	7.92	8,22	8,36
2015	2.70	2,73	3,35
2016*	4,33		
2017*	4.04		
2018*	3.77		
2019*	3.52		
2020*	3.28		

Tahun	Kota Magelang	Jawa Tengah	Nasional
2021*	3.00		
Deviasi	+/- 1,65%		

Sumber: BPS, * Prediksi Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang

3.1.3 Investasi

Investasi merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian wilayah. Dalam konteks PDRB penggunaan, investasi dikenal sebagai PMTB. PMTB menggambarkan perubahan barang modal pada periode tertentu yang didalamnya masih terkandung unsur penyusutan. Pada tahun 2017 diprediksi investasi di Kota Magelang akan berkembang mencapai 3,7 triliun rupiah dengan distribusi terhadap PDRB sebesar 47,10%. Penguatan pertumbuhan investasi ini terutama didukung oleh terpeliharanya iklim investasi dan usaha, peningkatan belanja infrastruktur pemerintah, dan kebijakan insentif perpajakan.

Tabel III.5
Prediksi Investasi Kota Magelang Tahun 2015-2017

Uraian	2015	2016	2017
Investasi/PMTB adhb (Juta Rupiah)	3.107.292,58	3.397.563,50	3.714.950,37
Investasi/PMTB adhk (Juta Rupiah)	2.920.862,16	3.025.052,28	3.129.242,41
PDRB adhb (Juta Rp)	6.510.371,85	7.165.966,30	7.887.579,10
PDRB adhk (Juta Rp)	5.241.660,00	5.518.673,73	5.813.855,46
Perubahan PDRB adhb (Juta Rp)	594.541,01	655.594,45	721.612,81
Perubahan PDRB adhk (Juta Rp)	254.283,57	277.013,73	295.181,73
ICOR adhb rata-rata 2011-2017			0,45
ICOR adhk rata-rata 2011-2017			0,65

Sumber: Prediksi oleh Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang

Incremental *Capital Output Ratio* ICOR menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi relatif akibat adanya perubahan investasi. Dengan ICOR dapat dilihat efisiensi penggunaan modal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Pada kenyataannya pertambahan output di suatu wilayah bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor lain. Dengan demikian untuk melihat peranan investasi terhadap output berdasarkan konsep ICOR, maka peranan faktor lain tersebut diasumsikan konstan (*ceteris paribus*).

Dengan memperhitungkan perubahan investasi dan PDRB dari tahun 2010-2017 diperoleh ICOR Kota Magelang atas dasar harga konstan sebesar 0,65 yang berarti bahwa untuk penambahan tiap 1 juta rupiah unit produksi di Kota Magelang hanya membutuhkan tambahan investasi sekitar 650 ribu rupiah. Kecilnya nilai ICOR menunjukkan bahwa semakin efisien pembentukan atau produktivitas modal yang terjadi di Kota Magelang.

3.1.4 Perdagangan Internasional (Ekspor)

Item berikutnya dalam penggunaan PDRB adalah pengeluaran untuk perdagangan internasional. Istilah perdagangan internasional untuk PDRB Kabupaten/Kota bukanlah hanya perdagangan yang dilakukan dengan luar

negeri, namun perdagangan antar kabupaten/kota pun termasuk dalam perhitungan ini. Perdagangan ini terdiri dari ekspor dan impor, kalkulasinya (ekspor dikurangi impor) dikenal dengan perdagangan netto.

Sampai dengan tahun 2017 ekspor produk dan jasa Kota Magelang diprediksi memiliki nominal yang naik mencapai 4,9 triliun rupiah. Distribusi Ekspor Netto yang cenderung menurun menunjukkan bahwa produktivitas Kota Magelang cukup menggali mengimbangi pengeluaran impor pada periode yang bersangkutan.

Tabel III.6
Prediksi Ekspor atas Dasar Harga Berlaku Kota Magelang Tahun 2015-2017

Uraian	2015	2016	2017
Ekspor (Juta Rupiah)	3.965.359,11	4.476.424,99	4.987.490,87
Distribusi Ekspor Netto (%)	(31,73%)	(30,11%)	(28,06%)

Sumber: Prediksi oleh Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang

3.1.5 Indeks Gini (Gini Ratio / Gini Index)

Series kondisi Gini rasio Kota Magelang tercermin pada tabel berikut :

Tabel III.7
Index Gini Kota Magelang, Jawa Tengah dan Nasional

No	Kota Magelang	Jawa Tengah	Nasional
2010	0.3138	0.2908	0.3800
2011	0.3418	0.3462	0.4100
2012	0.3700	0.3800	0.4100
2013	0.3300	0.3870	0.4130
2014	0.3600	NA	NA

Sumber: Indikator ekonomi sosial, politik dan kemandirian Propinsi Jawa Tengah 2014, Perkembangan beberapa indikator ekonomi sosial Indonesia, Agustus 2015 dan RKPd Kota Magelang 2016

Gini rasio merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui pemerataan pendapatan dalam suatu wilayah, yang besarnya antara 0 – 1, angka 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, sedangkan angka 1 menunjukkan ketidakmerataan yang sempurna. Menurut Todaro (Todaro P. Michael, 1994), apabila indeks Gini berkisar antara 0,20 - 0,35 berarti tingkat pemerataan pendapatan di wilayah tersebut dinyatakan tidak timpang (pemerataan pendapatannya relatif sama), sementara menurut Suyatno (2009 : 30) bahwa indeks gini 0,50-0,70 merupakan kondisi adanya kesenjangan pendapatan yang tinggi; $0,35 < \text{Gini} < 0,50$ mencerminkan kondisi adanya kesenjangan yang sedang dan bila Gini rasio $0,2 - 0,35$ menggambarkan kesenjangan pendapatan yang rendah.

Pada gambar di atas, secara umum ketimpangan di Kota Magelang sejak 2010-2014 dalam kondisi sedang, dalam beberapa titik setara dengan Provinsi Jawa Tengah. tetapi kecenderungannya meningkat. Demikian juga yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menjadi sinyal bahaya bahwa pertumbuhan ekonomi

yang selama ini terjadi tidak terdistribusi secara merata, kesenjangan ekonomi dan ketimpangan sosial terjadi semakin nyata. Pada tahun 2017 harus diupayakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tumbuh dan terdistribusi merata.

3.1.6 Indeks Williamson (Williamson Index)

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa salah satu alat ukur untuk mengetahui posisi Kabupaten/Kota Magelang terhadap kabupaten-kota di Jawa Tengah atas ketimpangan wilayah, salah satunya dapat diukur dengan indeks williamson, dimana semakin mendekati nol maka semakin tidak ada ketimpangan dan semakin mendekati angka 1 maka ketimpangan sangatlah sempurna. Ketimpangan Kota Magelang sebagaimana tercermin pada tabel berikut :

Tabel III.8
Indeks Williamson Kota Magelang
Tahun 2011-2013 dan Prediksi 2014-2016

Tahun	IW Kota Magelang	IW Jawa Tengah
2011	0,0888	0,6373
2012	0,0909	0,6616
2013	0,1364	0,6579
2014*	0,1349	NA
2015*	0,1338	NA
2016*	0,1339	NA

Sumber : PDRB Jateng 2007-2014, diolah

Sejak tahun 2011 Indeks Williamson Kota Magelang beringsut naik, hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antar wilayah semakin menanjak. Kondisi agak berbeda terjadi di level provinsi Jawa Tengah dimana nilai indeks Williamson mengalami fluktuasi pada tiap tahunnya.

3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Melihat perkembangan perekonomian Kota Magelang Tahun pada tahun 2011-2014 dan prediksi pada tahun 2015-2016, maka Kota Magelang akan menghadapi tantangan dan prospek perekonomian pada tahun 2017 hingga tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.9
Proyeksi Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,04%±0,25%	5,05%±0,25%	5,11%±0,25%	5,21%±0,25%	5,33%±0,25%	Data Proyeksi (deviasi +/- 0,14%)
Jumlah Pengangguran (ribu jiwa)	3,005	2,660	2,354	2,083	1,844	Data Proyeksi (deviasi +/- 0,819 ribu jiwa)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6%-5%	5,8%-5%	5,5%-5%	5,2%-5%	5%-4,5%	Data Proyeksi Derivatif
Jumlah Penduduk (jiwa)	121.940	122.383	122.843	123.292	123.743	Data Proyeksi

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Keterangan
						Derivatif
IPM	76,79	77,07	77,33	77,61	77,88	Data Proyeksi (deviasi +/- 0,04)
Inflasi (%)	4,04	3,77	3,52	3,28	3,00	Data Proyeksi (deviasi +/- 1,65%)
Persentase Penduduk Miskin (Maret-%)	7,71	7,25	6,79	6,21	5,63	Data Proyeksi Derivatif

Sumber: Prediksi Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang

Beberapa asumsi tersebut diharapkan dapat tercapai selama proses pembangunan. Target dan asumsi akan disesuaikan kembali jika asumsi *ceteris paribus* tidak terpenuhi, terjadi perubahan ekstrim pada faktor/variabel eksternal dan atau internal baik di skala global maupun lokal dan terdapat perubahan metode atau formulasi perhitungan indikator baku pada periode yang bersangkutan.

3.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2016

Perekonomian Kota Magelang pada tahun 2015-2016 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong potensi lapangan usaha dominan.
- b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah Kota Magelang dengan perbaikan peraturan perundang-undangan daerah, perbaikan kualitas pelayanan, efektifitas pajak dan penyederhanaan birokrasi.
- c. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan.
- d. Meningkatkan daya saing dan produksi ekspor daerah. Pertumbuhan ekspor akan mempengaruhi keberlangsungan usaha dan perekonomian daerah sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja.
- e. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan variasi infrastruktur yang berkualitas.
- f. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (*seed capital*) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (*a group lending approach*) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kota Magelang.
- g. Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kota Magelang sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama.
- h. Membangun promosi bersama (*joint marketing*) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.

- i. Mengelola inflasi pada tingkat yang rendah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro sehingga mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.
- j. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan penjarangan riset novatif sehingga dapat meningkatkan daya saing Kota Magelang dalam menarik atensi investor untuk memperbesar peluang percepatan pertumbuhan ekonomi.

3.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017

Berdasar kondisi eksisting perekonomian Kota Magelang tahun 2014 dan prediksi tahun 2015-2017, maka pada tahun 2017 perekonomian Kota Magelang memiliki prospek antara lain:

- a. Dengan menyesuaikan data historis PDRB penyesuaian tahun dasar 2010, pertumbuhan ekonomi Kota Magelang diprediksi tumbuh sekitar $5,04 \pm 0,25\%$ dengan kecenderungan naik.
- b. Inflasi diperkirakan pada kisaran angka $3,36\% - 4,94\%$ dengan kecenderungan menurun.
- c. Laju pertumbuhan penduduk diprediksi mencapai $0,244\%$.
- d. PDRB atas dasar harga berlaku diperkirakan mencapai Rp 7.887.579,1 juta tumbuh $10,07\%$.
- e. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku diperkirakan sebesar Rp. 63.164.302,43 per tahun.
- f. PDRB perkapita atas dasar harga konstan diperkirakan sebesar Rp. 63.394.588,17 per tahun.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, era inilah yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Berlakunya undang-undang ini menyebabkan daerah memiliki kesempatan yang besar untuk melaksanakan tujuan pembangunannya berdasarkan lokalitas yang lebih tinggi dan harapan baru mengenai otonomi yang lebih luas, khususnya daerah tingkat kabupaten/kota. Disisi lain, otonomi menimbulkan suatu kebutuhan dana yang besar dan daerah tidak bisa lagi menggantungkan diri sepenuhnya kepada pemerintah pusat, oleh karena itu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai pelimpahan keuangan. Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan sosial budaya masyarakat.
- d. Untuk demokratisasi.

Seiring dengan otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Salah

satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah system pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memephatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Dimana Kebijakan Fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah. Kebijaksanaan fiskal pada umumnya bertujuan untuk mencapai kestabilan dalam perekonomian. Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari besaran-besaran belanja dalam APBD.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan fiskal dari pusat ke daerah, maka pemerintah pusat melakukan Kebijakan Desentralisasi Fiskal ke Daerah dengan maksud untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakatserta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Pelaksanaan Kebijakan Fiskal juga merupakan salah satu upaya Pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan dana-dana untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah untuk kemudian dibelanjakan / diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas
- b. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja
- c. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD)
- d. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ada dua hal penting yang perlu terus dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal seyogyanya menjadikan salah satu pemacu pemerintah Kota Magelang dalam mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam tahun 2017 di Kota Magelang diarahkan untuk:

- a. Melakukan sinkronisasi program kegiatan Pemerintah Kota Magelang dengan Kebijakan Pusat dan Kebijakan Provinsi Jawa Tengah,
- b. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah, berdasarkan urusan dan kewenangannya (diutamakan urusan wajib dan urusan pilihan),
- c. Melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah.
- d. Mengoptimalkan pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah,
- e. Menyenggarakan urusan pemerintahan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan,

- f. Berupaya untuk terus meningkatkan jumlah besaran belanja modal dalam rangka meningkatkan produktifitas perekonomian, dimana diharapkan dengan besarnya belanja modal maka akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta peningkatan kesempatan kerja.
- g. Peningkatan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan dasar (terutama untuk kelompok rentan termajinalkan) yang bersumber dari APBD maupun kemitraan. Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan Pendapatan per Kapita. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai prioritas ini antara lain:
- Meningkatkan SDM Kota Magelang dengan pendidikan yang terjangkau oleh semua penduduk.
 - Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - Meningkatkan keamanan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk.
- h. Tetap melaksanakan dan melanjutkan prioritas kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan secara maksimal guna mendukung program Penanggulangan Kemiskinan, Kota Layak Anak, Penguatan Implementasi Manajemen Persampahan, Penguatan Implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga, Penguatan Implementasi Rad Masyarakat Ekonomi Asean, Pengembangan E-Government secara Komprehensif dan Integral: Menuju Smart City, dan Sustainable Development Goals.

Strategi-strategi diatas perlu ditindaklanjuti dalam politik anggaran, mulai dari perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal. Hal ini kemudian diikat dalam tanggung jawab sosial antara pemerintah dan DPRD yang perlu dibahas dalam pembahasan dokumen yang lebih detail, termasuk hal yang sangat penting adalah soal realisasi penyerapan anggaran serta akuntabilitas anggaran melalui laporan-laporan pelaksanaan APBD.

3.3.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan kedalam sebagai berikut:

Tabel III.10
Realisasi dan Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2013 - 2018
(dalam Satuan Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2014	PERUBAHAN APBD TAHUN 2015	TAHUN ANGGARAN 2016	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2017	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2018
1.1	Pendapatan Asli Daerah	164,927,631,230	152,805,995,000	178,121,571,000	205,967,541,000	205,967,541,000
1.1.1	Hasil Pajak daerah	22,107,435,949	20,423,275,000	23,587,802,000	29,821,800,000	29,821,800,000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,058,580,948	5,368,507,000	5,553,669,000	5,371,110,000	5,371,110,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6,242,609,307	6,766,592,000	6,294,110,000	6,629,078,000	6,629,078,000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	130,519,005,026	120,247,621,000	142,685,990,000	164,145,553,000	164,145,553,000
1.2	Dana Perimbangan	459,785,205,171	474,934,095,000	613,654,914,000	396,267,656,000	396,267,656,000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	20,207,973,171	24,457,723,000	24,676,825,000	27,356,269,000	27,356,269,000
1.2.2	DAU	417,211,449,000	418,257,922,000	447,909,575,000	368,911,387,000	368,911,387,000
1.2.3	DAK	22,365,783,000	32,218,450,000	141,068,514,000	0	0

1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	110,403,278,006	140,956,815,000	26,421,159,000	42,679,650,000	42,679,650,000
1.3.1	Hibah	0	0	0	0	0
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	26,421,159,000	45,256,243,000	26,421,159,000	42,679,650,000	42,679,650,000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	74,874,179,000	79,988,204,000	0	0	0
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	9,007,940,006	15,712,368,000	0	0	0
PENDAPATAN DAERAH		735,116,114,407	768,696,905,000	818,197,644,000	644,914,847,000	644,914,847,000

Keterangan: Untuk DAK dan Bantuan Keuangan dari Propinsi belum diprediksi karena sesuai Pedoman Penyusunan APBD DAK dan Banprop dapat dianggarkan sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan dianggarkan dalam APBD Pemberi Bantuan.

Adapun beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan Prediksi kemampuan keuangan daerah pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Pajak Daerah diperkirakan naik, dengan optimalisasi system pajak *on line*, Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah *out of date* menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
- Pajak Restoran diperkirakan akan naik dengan memperluas *tax basis* dan melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi berupa pengawasan dan monitoring hasil pajak restoran yang memiliki *cash register*.
- Pajak Hiburan diperkirakan akan naik dengan bertambahnya jumlah tempat-tempat hiburan baru yang mulai menjalar di Kota Magelang seperti tempat Karaoke, dan tempat Olah Raga.
- Pajak Reklame diperkirakan akan naik dengan bertambahnya produsen dan pengusaha yang memanfaatkan media promosi yang terus ditambah di Kota Magelang khususnya di tempat-tempat strategis dan mempunyai nilai komersial,
- Kenaikan Pajak Air Tanah diperkirakan akan terjadi dengan adanya ketentuan baru yang ada dalam Peraturan Walikota Nomor 30 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 46 tahun 2010 tentang Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air untuk menghitung pajak air tanah.
- BPHTP diperkirakan akan naik dengan diterapkannya Peta Zona Nilai Tanah di Kota Magelang.
- Pajak Bumi dan Bangunan diperkirakan akan naik dengan adanya 1. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan. 2. Verifikasi piutang PBB yang dapat ditagih.
- Untuk Dana Alokasi Khusus dan Dana Bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Tengah belum diprediksi karena sesuai Pedoman Penyusunan APBD, untuk penganggaran DAK dan Bantuan Keuangan hanya dapat dianggarkan sepanjang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional atau diterbitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (untuk DAK), dan dianggarkan dalam APBD Provinsi (untuk Bantuan Keuangan Provinsi).

3.3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah, Pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan yang terkait langsung dengan hal tersebut

adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (revenue), maupun dari sisi pengeluaran (expenditure) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masing-masing.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus kreatif agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah. Hingga saat ini, pajak dan retribusi masih menjadi andalan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Di banyak daerah, kontribusi pajak dan retribusi daerah bisa mencapai lebih dari 50 persen dari PAD. Tidak mengherankan mengapa kemudian pemerintah daerah sangat tertarik pada dua komponen tersebut. sebagai salah satu dampak dari ketertarikan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan. Upaya peningkatan PAD hingga saat ini masih jauh dari optimal dan proporsinya masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan struktur pengeluaran.

Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini pemerintah daerah masih mengandalkan dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 60 persen dari total pendapatan APBD, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (KUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Magelang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, trend kenaikan peran atau kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan tahun 2014 meningkat dan diharapkan tahun-tahun berikutnya akan terus meningkat, akan tetapi posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber

pendapatan dari Dana Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Magelang selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada. Selama kurun waktu 2011-2015 kemampuan pendapatan daerah sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Magelang adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.11
Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang
Selama Tahun 2011-2015 (dalam rupiah)

No	Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)
01.	2011	63,557,701,976.00	340,256,009,361.00	101,625,263,348.00	505,438,974,685.00
02.	2012	91,314,601,697.00	397,902,089,711.00	90,500,755,421.00	579,717,446,829.00
03.	2013	107,739,838,961.00	431,113,288,290.00	95,906,857,889.00	634,759,985,140.00
04.	2014	164,927,631,230.00	459,785,205,171.00	110,403,278,006.00	735,116,114,407.00
05.	2015	152,805,995,000.00	474,934,095,000.00	140,956,815,000.00	768,696,905,000.00

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2011 – 2014 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2015

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Magelang selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kota Magelang.

Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3.3.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1, angka 18 dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 6, ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor nomor 58 tahun 2005, Pasal 22, ayat (1), Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- (i) Pajak Daerah;
- (ii) Retribusi Daerah;
- (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Masuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dalam Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (i) Pajak Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan; (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii) Pajak Parkir; (viii) Pajak Air Tanah; (ix) Pajak Sarang Burung Walet; (x) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peranan pajak dan retribusi daerah sangat penting dalam membiayai pembangunan di Kota Magelang, oleh karena itu pemerintah Kota Magelang harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Pengggalian potensi Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip-prinsip : **realistis dan elastis** (artinya dapat / mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat) serta **adil dan merata secara vertikal dan horisontal** (vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak).
- b. Memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayaran pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- c. Melakukan Penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang arti *pentingnya pajak bagi pembangunan* daerah sehingga secara politis dapat diterima oleh masyarakat, yang kemudian akan menimbulkan motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- d. Menerapkan konsep *ear marking* untuk pendapatan dimana pajak dan retribusi daerah dikembalikan lagi kepada wajib pajak melalui pembangunan infrastruktur pendukung pajak dan retribusi daerah.
- e. Memperkuat proses pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
- f. Melaksanakan tertib administrasi pungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan administrasi harus fleksibel artinya sederhana dan mudah dihitung.
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah (meningkatkan kualitas kinerja layanan lembaga/satuan kerja pemungut dan pengelola pajak dan retribusi daerah) sehingga akan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi si wajib pajak serta meningkatkan komunikasi dengan wajib pajak.

- h. Menyederhanakan prosedur pengelolaan Pajak dan Retribusi menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik / wajib pajak.
- i. *Meningkatkan pengawasan.* Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan pendampingan pengisian SPTPD, melakukan pemeriksaan secara insidental / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.
- j. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan pajak. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- k. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Magelang.

Pemerintah Kota Magelang dalam melakukan penggalan potensi dan penetapan obyek-obyek pajak baru harus selalu memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kurang menguntungkan saat ini, disarankan agar pengadaan pajak dan retribusi baru perlu dipertimbangkan secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan gejolak dimasyarakat yang pada gilirannya akan mendistorsi kegiatan perekonomian di Kota Magelang. Penciptaan suatu jenis pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum juga perlu mempertimbangkan ketepatan suatu jenis pajak sebagai pajak daerah, karena pajak daerah yang baik akan mendorong peningkatan pelayanan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Magelang.

Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif. Walaupun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2011-2015 di Kota Megelang, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.12
Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2011-2015 (dalam Rupiah dan %)

No.	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi PAD thd Pendapatan APBD (%)
01.	2011	63,557,701,976.00	505,438,974,685.00	12.57
02.	2012	91,314,601,697.00	579,717,446,829.00	15.75
03.	2013	107,739,838,961.00	634,759,985,140.00	16.97
04.	2014	164,927,631,230.00	735,116,114,407.00	22,44
05.	2015	152,805,995,000.00	768,696,905,000.00	19,88

- Sumber:** 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2011 - 2014 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang perubahan APBD Kota Magelang TA. 2015

Gambaran secara rinci obyek PAD berdasarkan kontribusi obyek pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.13
Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Pajak (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi Pajak thd PAD (%)
01.	2011	9,463,834,368.00	63,557,701,976.00	14,89
02.	2012	12,546,890,184.00	91,314,601,697.00	13,74
03.	2013	18,829,673,340.00	107,739,838,961.00	17,48
04.	2014	22,107,435,949.00	164,927,631,230.00	13,40
05.	2015	20,423,275,000.00	152,805,995,000.00	13,37

- Sumber:** 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2011-2014 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2015

Tabel III.14
Kontribusi Retribusi Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Retribusi (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi Retribusi thd PAD (%)
01.	2011	5,281,990,063.00	63,557,701,976.00	8,31
02.	2012	6,969,707,010.00	91,314,601,697.00	7,63
03.	2013	7,357,207,773.00	107,739,838,961.00	6,83
04.	2014	6,058,580,948.00	164,927,631,230.00	3,67
05.	2015	5,368,507,000.00	152,805,995,000.00	3,51

- Sumber:** 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2011-2014 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2015

Tabel III.15
Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan thd PAD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	2011	3,112,554,238.00	63,557,701,976.00	4,90
02.	2012	5,017,783,848.00	91,314,601,697.00	5,50
03.	2013	5,872,500,274.00	107,739,838,961.00	5,45
04.	2014	6,242,609,307.00	164,927,631,230.00	3,79
05.	2015	6,766,592,000.00	152,805,995,000.00	4,43

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2011-2014 merupakan realisasi anggaran.
 2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2015

Tabel III.16
Kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah thd PAD (%)
01.	2011	45,699,323,307.00	63,557,701,976.00	71,90
02.	2012	66,780,220,655.00	91,314,601,697.00	73,13
03.	2013	75,680,457,574.00	107,739,838,961.00	70,24
04.	2014	130,519,005,026.00	164,927,631,230.00	79,14
05.	2015	120,247,621,000.00	152,805,995,000.00	78,69

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2011-2014 merupakan realisasi anggaran.
 2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2015

Pajak Daerah menduduki posisi yang paling penting peranannya dalam membiayai pembangunan di Kota Magelang, meskipun yang memberikan kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, namun sebagian besar merupakan pendapatan BLUD yang penggunaannya adalah untuk operasional BLUD itu sendiri. Oleh karena itu Peran Pajak Daerah di Kota Magelang terhadap PAD idealnya semakin tahun semakin membaik, karena Kota Magelang sebagai daerah perkotaan mengandalkan jasa sebagai salah satu sumber penghasil PAD. Jika dilihat dari realisasi pendapatan Pajak Daerah di Kota Magelang selama lima tahun terakhir cenderung mengalami perkembangan yang cukup baik. Selama tahun 2011-2015 tingkat kontribusinya mengalami fluktuasi (naik dan turun), pada tahun 2013 kontribusinya mengalami kenaikan,

akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan, diharapkan tahun-tahun berikutnya akan naik kembali, baik besarnya maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3.3.2.2 Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD selama kurun waktu lima tahun terakhir (2011-2014) rata-rata berkisar 60 - 70 persen dari total Pendapatan Daerah. Data selengkapnya adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.17
Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2011-2015 (dalam rupiah dan persen)

No.	Tahun	Dana Perimbangan (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Dana Perimbangan thd Pendapatan APBD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2011	340,256,009,361.00	505,438,974,685.00	67,32
02.	2012	397,902,089,711.00	579,717,446,829.00	68,64
03.	2013	431,113,288,290.00	634,759,985,140.00	67,92
04.	2014	459,785,205,171.00	735,116,114,407.00	62,55
05.	2015	474,934,095,000.00	768,696,905,000.00	61,78

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2011-2014 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA 2015

Gambaran Dana Perimbangan berdasarkan Kontribusi Obyek Pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel III.18
Kontribusi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Dana Perimbangan Tahun 2011-2015 (dalam rupiah dan persen)

No.	Tahun	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Thd Dana Perimbangan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2011	23,333,614,361.00	340,256,009,361.00	6,86
02.	2012	28,736,086,711.00	397,902,089,711.00	7,22
03.	2013	24,609,560,290.00	431,113,288,290.00	5,71

No.	Tahun	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Thd Dana Perimbangan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
04.	2014	20,207,973,171.00	459,785,205,171.00	4,40
05.	2015	24,457,723,000.00	474,934,095,000.00	5,15

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2011-2014 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA 2015

Tabel III.19
Kontribusi Dana Alokasi Umum
terhadap Dana Perimbangan Tahun 2011-2015
(dalam rupiah dan persen)

No.	Tahun	Dana Alokasi Umum (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi Da Alokasi umum Thd Dana Perimbangan (%)
01.	2011	292,580,295,000.00	340,256,009,361.00	85,99
02.	2012	348,498,193,000.00	397,902,089,711.00	87,58
03.	2013	385,859,241,000.00	431,113,288,290.00	89,50
04.	2014	417,211,449,000.00	459,785,205,171.00	90,74
05.	2015	418,257,922,000.00	474,934,095,000.00	88,07

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2011-2014 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA 2015

Tabel III.20
Kontribusi Dana Alokasi Khusus
terhadap Dana Perimbangan Tahun 2011-2015
(dalam rupiah dan persen)

No.	Tahun	Dana Alokasi Khusus (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi Dana Alokasi Khusus Thd Dana Perimbangan (%)
01.	2011	24,342,100,000.00	340,256,009,361.00	7,15
02.	2012	20,667,810,000.00	397,902,089,711.00	5,19
03.	2013	20,644,487,000.00	431,113,288,290.00	4,79
04.	2014	22,365,783,000.00	459,785,205,171.00	4,86
05.	2015	32,218,450,000.00	474,934,095,000.00	6,78

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2011-2014 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA 2015

3.3.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Magelang bersumber dari:

- (i) Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah),
- (ii) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagian dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak Air Permukaan (AP), Terakhir Bagian dari Retribusi Dispensasi kelebihan muatan dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- (iii) Dana Penyesuaian; dan
- (iv) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Kota Magelang masih relatif kecil, akan tetapi keberadaannya sangat menunjang / mendukung kemampuan pendanaan bagi Kota Magelang. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyalarsan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi.

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap pendapatan APBD di Kota Magelang selama kurun waktu tahun 2011 – 2014 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan APBD yang mengalami kenaikan. gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.21
Jumlah Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD
Pemerintah Kota Magelang Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah terhadap Pendapatan APBD (%)
01.	2011	101,625,263,348.00	505,438,974,685.00	20.11
02.	2012	90,500,755,421.00	579,717,446,829.00	15.61
03.	2013	95,906,857,889.00	634,759,985,140.00	15.11
04.	2014	110,403,278,006.00	735,116,114,407.00	15.02
05.	2015	140,956,815,000.00	768,696,905,000.00	18,34

- Sumber:** 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2011-2014 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2015

Gambaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berdasarkan Kontribusi Obyek Pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel III.22
Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya Terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2011	15,895,218,628.00	101,625,263,348.00	15,64
02.	2012	21,818,681,421.00	90,500,755,421.00	24,11
03.	2013	19,546,928,516.00	95,906,857,889.00	20,38
04.	2014	26,421,159,000.00	110,403,278,006.00	23,93
05.	2015	45,256,243,000.00	140,956,815,000.00	32,11

Sumber:1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2011-2014 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2015

Tabel III.23
Kontribusi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan yang Daerah Sah (Rupiah)	Proporsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2011	50,379,975,720.00	101,625,263,348.00	49,57
02.	2012	46,539,535,000.00	90,500,755,421.00	51,42
03.	2013	63,049,373,000.00	95,906,857,889.00	65,74
04.	2014	74,974,179,000.00	110,403,278,006.00	67,91
05.	2015	79,988,204,000.00	140,956,815,000.00	56,75

Sumber:1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2011-2014 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2015

Tabel III.24
Kontribusi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Bantuan Keuangan	Lain-lain Pendapatan	Proporsi Bantuan
-----	-------	------------------	----------------------	------------------

		dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya (Rupiah)	Daerah yang Sah (Rupiah)	Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2011	35,350,069,000.00	101,625,263,348.00	34,78
02.	2012	22,142,539,000.00	90,500,755,421.00	24,47
03.	2013	13,310,556,373.00	95,906,857,889.00	13,88
04.	2014	9,007,940,006.00	110,403,278,006.00	8,16
05.	2015	15,712,368,000.00	140,956,815,000.00	11,15

- Sumber:**1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2011-2014 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2015

Dari berbagai pertimbangan di atas, prediksi Pendapatan Daerah di Kota Magelang selama kurun waktu 2014-2018, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.25
Realisasi dan Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2014 - 2018 (dalam Satuan Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2014	PERUBAHAN APBD TAHUN 2015	TAHUN ANGGARAN 2016	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2017	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	164,927,631,230	152,805,995,000	178,121,571,000	205,967,541,000	205,967,541,000
1.1.1	Hasil Pajak daerah	22,107,435,949	20,423,275,000	23,587,802,000	29,821,800,000	29,821,800,000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,058,580,948	5,368,507,000	5,553,669,000	5,371,110,000	5,371,110,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6,242,609,307	6,766,592,000	6,294,110,000	6,629,078,000	6,629,078,000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	130,519,005,026	120,247,621,000	142,685,990,000	164,145,553,000	164,145,553,000
1.2	Dana Perimbangan	459,785,205,171	474,934,095,000	613,654,914,000	396,267,656,000	396,267,656,000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	20,207,973,171	24,457,723,000	24,676,825,000	27,356,269,000	27,356,269,000
1.2.2	DAU	417,211,449,000	418,257,922,000	447,909,575,000	368,911,387,000	368,911,387,000
1.2.3	DAK	22,365,783,000	32,218,450,000	141,068,514,000	0	0
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	110,403,278,006	140,956,815,000	26,421,159,000	42,679,650,000	42,679,650,000
1.3.1	Hibah	0	0	0	0	0
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan	26,421,159,000	45,256,243,000	26,421,159,000	42,679,650,000	42,679,650,000

	Pemerintah Daerah lainnya					
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	74,874,179,000	79,988,204,000	0	0	0
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	9,007,940,006	15,712,368,000	0	0	0
PENDAPATAN DAERAH		735,116,114,407	768,696,905,000	818,197,644,000	644,914,847,000	644,914,847,000

Keterangan : untuk DAK dan Bantuan Keuangan dari propinsi belum diprediksi karena sesuai pedoman Penyusunan APBD "DAK dan Bantuan keuangan provinsi dapat dianggarkan sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (DAK) atau dalam APBD Pemberi Bantuan.

Mendasarkan capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2011-2015, maka pendapatan sampai dengan tahun 2021 diharapkan dapat meningkat lebih tinggi. Kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Intensifikasi PAD melalui:

- a. Optimalisasi system pajak on line dengan menambahkan peralatan berupa tapping box (alat perekam transaksi) untuk meminimalisir penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.
- b. Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan SKPD kurang bayar kepada wajib pajak.
- c. Penegakkan law enforcement berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
- d. Optimalisasi SDM pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
- e. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
- f. Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
- g. Peningkatan koordinasi dengan SKPD penghasil lain dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah.
- h. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan.
- i. Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.

2. Ekstensifikasi melalui:

- a. Perubahan tarif pajak daerah dan tariff retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah.
- b. Perluasan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah (perluasan tax based) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
- c. Penyesuaian NJOP PBB di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap.
- d. Penggunaan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli.

3. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kota Magelang, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terkecil di lingkungan kelurahan dan kecamatan.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya optimalisasi sistem organisasi dan kelembagaan pendapatan daerah.

3.3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip *kemandirian* yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip *prioritas* yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip *efisiensi dan efektivitas* anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Pengelolaan Belanja Daerah memiliki ciri; hemat, tepat guna dan tepat sasaran, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: **Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung**.

3.3.3.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja **Tidak Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. **Belanja Pegawai** berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. **Belanja bunga** digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kota Magelang tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
- c. **Belanja Subsidi** hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran. Dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, maka pemerintah Kota Magelang tidak menganggarkan belanja subsidi.
- d. Belanja Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- e. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- f. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- g. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan/ pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di

kelurahan/desa. Pemerintah Kota Magelang tidak menempuh pemberian belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, mengingat mulai tahun 2008 Kelurahan sudah menjadi SKPD. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

- h. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

3.3.3.2 Belanja Langsung

Belanja **Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. **Belanja pegawai**; merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- b. **Belanja barang dan jasa**; merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja ini merupakan pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Yang termasuk dalam kategori belanja barang/jasa adalah Belanja Pengadaan barang/jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.
- c. **Belanja modal**; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :
 - 1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan asset tetap atau asset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
 - 2. pengeluaran tersebut melebihi minimum kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
 - 3. perolehan asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
 - 4. pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan asset tetap atau asset lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume asset yang dimiliki bertambah serta pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi asset tetap/asset lainnya.

Gambaran perkembangan Belanja Daerah di Kota Magelang Tahun 2011-2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.26
Struktur Belanja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Belanja APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) + (4))
01.	2011	265,348,345,776.00	204,063,266,079.00	469,411,611,855.00
02.	2012	296,610,099,484.00	239,738,589,918.00	536,348,689,402.00
03.	2013	313,072,355,985.00	317,778,361,372.00	630,850,717,357.00
04.	2014	340,526,165,129.00	341,697,705,278.00	682,223,870,407.00
05.	2015	465,266,353,000.00	459,835,806,000.00	925,102,159,000.00
06.	2015	465,266,353,000.00	459,835,806,000.00	925,102,159,000.00

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2011-2014 merupakan realisasi anggaran.
ii. Perda tentang perubahan APBD Kota Magelang TA. 2015

Proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap total belanja, hal ini disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas tidak dapat mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja dalam tabel berikut:

Tabel III.27
Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Belanja Pegawai (Rupiah)	Total Belanja (Rupiah)	Persentase Belanja Pegawai thd Total Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
02.	2011	251,474,250,776.00	469,411,611,855.00	53.57
03.	2012	287,833,633,184.00	536,348,689,402.00	53.67
04.	2013	304,116,683,985.00	630,850,717,357.00	48.21
05.	2014	333,318,007,729.00	682,223,870,407.00	48.86
06.	2015	407,840,264,000.00	925,102,159,000.00	44,09

Sumber : 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2011-2014 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang perubahan APBD Kota Magelang TA. 2015

Penganggaran Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu: Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sedangkan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (*core competence*), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Gambaran Prediksi Belanja di Kota Magelang selama kurun waktu 2014-2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.28
Realisasi dan Prediksi Belanja Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2014 - 2018
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2014	PERUBAHAN APBD TAHUN 2015	TAHUN ANGGARAN 2016	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2017	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	340,526,165,129	465,266,353,000	427,380,021,000	249,948,482,000	249,948,482,000
	Belanja Pegawai	333,318,007,729	407,840,264,000	382,867,283,000	233,266,622,000	233,266,622,000
	Belanja Bunga	0				
	Belanja Subsidi	0				
	Belanja Hibah	3,716,500,000	11,779,107,000	1,373,140,000	5,874,109,000	5,874,109,000
	Belanja Bantuan Sosial	2,885,585,000	3,075,925,000	2,001,634,000	572,100,000	572,100,000
	Belanja Bantuan Keuangan	500,050,400	560,703,000	560,703,000	560,703,000	560,703,000
	Belanja Tak Terduga	106,022,000	42,010,354,000	40,577,261,000	9,674,948,000	9,674,948,000
2.2	BELANJA LANGSUNG	341,697,705,278	459,835,806,000	381,699,726,000	419,763,708,000	419,763,708,000
	BELANJA DAERAH	682,223,870,407	925,102,159,000	881,415,644,000	669,712,190,000	669,712,190,000
	Surplus/Defisit	52,892,244,000	-156,405,254,000	-63,218,000,000	-24,797,708,000	-24,797,708,000

Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (*input*) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang tahun 2017 masih tetap diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.** Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan

meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. **Prioritas**. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung per-tumbuhan ekonomi Kota Magelang dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
3. **Tolok Ukur dan Target Kinerja**. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD.
4. **Optimalisasi Belanja Langsung**. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
5. **Transparan dan Akuntabel**. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang secara umum seperti yang disebutkan di atas, pada tahun 2017 juga akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan program dan kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.
2. Memenuhi pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah sesuai amanat PP 48 tahun 2008 dan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 10%.
3. Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan perhitungan gaji untuk tiap tahunnya ditambah akses yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan). Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan rekonsiliasi jumlah pegawai.
4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. serta setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Wajib dan urusan pilihan terlebih dahulu.
5. Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat diutamakan untuk memenuhi/mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya bidang pendidikan, kesehatan, pangan, dan fasilitas umum pemukiman.
6. Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun.
7. Melaksanakan kegiatan yang menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
8. Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kota Magelang dan berdampak luas terhadap kepentingan

masyarakat. yaitu program kegiatan yang terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan, Kota Layak Anak, Penguatan Implementasi Manajemen Persampahan, Penguatan Implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga, Penguatan Implementasi Rad Masyarakat Ekonomi Asean, Pengembangan *E-Government* secara Komprehensif dan Integral: Menuju *Smart City*, dan *Sustainable Development Goals*.

3.3.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
6. Penerimaan Piutang Daerah;
7. Penerimaan Dana Bergulir; dan
8. Penerimaan Hasil Penarikan

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
3. Pembayaran pokok utang; dan
4. Pemberian pinjaman daerah;
5. Pemberian Dana Bergulir.

Gambaran realisasi dan prediksi Pembiayaan Daerah di Kota Magelang selama kurun waktu 2014 -2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.29
Realisasi dan Prediksi Pembiayaan Daerah Dalam APBD Kota Magelang
Tahun 2014-2018 (dalam Satuan Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2014	PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015	APBD TAHUN ANGGARAN 2016	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2017	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	110,442,146,108	162,939,254,000	70,305,000,000	42,800,000,000	42,800,000,000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sblmnya	109,584,351,208	155,719,254,000	70,155,000,000	40,000,000,000	40,000,000,000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		7,000,000,000			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah					
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah					
3.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	857,794,900	220,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000
3.1.8	Penerimaan Hasil Penarikan				2.650.000.000	2.650.000.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7,615,136,000	6,534,000,000	7,087,000,000	18,002,657,000	18,002,657,000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	2,000,000,000			3,000,000,000	3,000,000,000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,615,136,000	6,534,000,000	7,087,000,000	15,002,657,000	15,002,657,000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang					
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah					
3.2.5	Pemberian Dana Bergulir					
	Pembiayaan netto	102,827,010,108	156,405,254,000	63,218,000,000	24,797,343,000	24,797,343,000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	155,719,254,108	0	0	0	0

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Magelang untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang untuk tahun 2017 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:






- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.
 - b. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Magelang selama tahun 2017 diarahkan untuk Meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

BAB. IV

PRIORITAS DAN

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

-  **Visi Misi Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan**
 - Pembangunan Daerah Jangka Menengah.**
-  **Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2017.**
-  **Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian**
 - Target SDGs Kota Magelang.**
-  **Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**
-  **Inovasi Pembangunan**



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2017 disusun guna memberi acuan dalam penyusunan APBD Kota Magelang Tahun 2017, yang didalamnya memuat keseluruhan anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan. Semua perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang telah diarahkan agar dalam merencanakan kegiatan agar senantiasa memperhatikan target-target yang harus dicapai sesuai indikator program dalam RPJMD Kota Magelang 2016-2021. Berdasarkan pada pendekatan tersebut, maka dalam Bab IV RKPD Kota Magelang 2017 diuraikan secara rinci visi, misi Kota Magelang, sebagai landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran. Bab IV juga menguraikan arah kebijakan tahun 2017, sebagai salah satu tahapan dalam mewujudkan target dan indikator yang harus dicapai dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

Pasal 67 (f) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah melaksanakan program strategis nasional. Hal itu juga dimaknai, bahwa pemerintah kabupaten/kota juga harus mendukung pelaksanaan sasaran-sasaran strategis nasional dan provinsi. Oleh karena itu, dalam Bab IV ini juga ditampilkan program dan sasaran strategis nasional dan provinsi yang harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah.

RKPD Kota Magelang 2017 juga tetap memperhatikan pokok-pokok arahan Gubernur Jawa Tengah pada saat pelantikan 17 Kepala Daerah pada tanggal 17 Pebruari 2016 di Lapangan Simpang Lima Semarang. Pada hakekatnya Gubernur Jawa Tengah meminta agar para kepala daerah memperhatikan 17 isu strategis yang masih dijumpai di Jawa Tengah untuk diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

4.1 Visi Misi Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Menengah

4.1.1 Visi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

RKPD Kota Magelang Tahun 2017 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kota Magelang Tahun Pertama, yaitu tahun perencanaan 2016 untuk dilaksanakan pada tahun 2017. Visi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah :

“MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS”.

Makna yang termuat dalam Visi tersebut adalah :

Visi Pembangunan Kota Magelang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel V.1
Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
Kota Jasa yang Modern dan Cerdas	<p>Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.</p> <p>Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada. Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karakteristik:(a) Masyarakat sejahtera dalam financial;(b) Kota terdepan dalam pelayanan (kota modern menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum);(c) Visual kota mengundang pesona (kota modern dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya).</p> <p>Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah. Unsur-unsur Kota Cerdas: (1) <i>Smart Governance</i> yaitu: pengembangan <i>e-governance</i>, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; (2) <i>Smart infrastructure</i> yaitu: pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT; (3) <i>Smart Economy</i>, yaitu: pengembangan <i>city branding</i>, pengembangan kewirausahaan, pengembangan <i>e-commerce</i>, dan ekonomi kreatif; (4) <i>Smart environment</i> yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, pemanfaatan sumber energi terbarukan; (5) <i>Smart people</i> yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta (6) <i>Smart Living</i> yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.</p>
Sejahtera	<p>Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui: (1) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (2) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (3) Tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.</p>
Religius	<p>Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota asyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.</p>

Sumber : RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

4.1.2 Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

Misi ini mengarahkan pada upaya peningkatan kualitas, profesionalitas, integritas, produktivitas, responsifitas, dan etos kerja aparatur di jajaran Pemerintah Kota Magelang dengan cara melaksanakan reformasi birokrasi secara berkesinambungan yang mencakup: (a) Organisasi (Organisasi yang tepat fungsi

dan tepat ukuran (*right sizing*); (b) Tatalaksana (Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*); (c) Peraturan Perundang-undangan (Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan); (d) Sumber daya manusia aparatur (SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera); (e) Pengawasan (Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN); (f) Akuntabilitas (Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi); (g) Pelayanan Publik (Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha); dan (h) Pola pikir (*mindset*) dan Budaya Kerja (*culture set*), Aparatur Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi sesuai dengan bahasa budaya kerja).

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi (penggunaan internet) di lingkungan pemerintah dan masyarakat, maka upaya reformasi birokrasi juga harus disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana teknologi sebagai alat untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah di Kota Magelang. Pengembangan dan aplikasi E-Government melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah (seperti *Wide Area Network, Internet, Mobile Computing*, dan sebagainya) sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan guna mendukung jalannya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Dengan pemanfaatan TI akan memungkinkan pemerintah untuk: (a) mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan dalam suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, tepat, bersifat transparan, akuntabel, dan bebas *korupsi (Good Corporate Governance)*; (b) memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan; dan (c) mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

Pada aspek organisasi perlu dilakukan langkah-langkah penguatan yang meliputi: struktur organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan dan jaringan organisasi. Selain itu, perlu pula dilakukan pembenahan terhadap sistem, yang terdiri dari: kerangka kerja yang berhubungan dengan peraturan, kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu. Juga diperlukan komitmen bersama (*collective commitments*) yang mencakup seluruh komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Pengaruh komitmen bersama sangat besar, karena faktor ini menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan dan tujuan yang akan dicapai bersama; dan kepemimpinan yang kondusif (*condusif leadership*), kepemimpinan yang kondusif merupakan kepemimpinan yang dinamis yang membuka kesempatan luas bagi setiap elemen organisasi yang dapat menyelenggarakan suatu pengembangan kapasitas dan reformasi keputusan.

Dengan dukungan partisipasi masyarakat, pada giliran berikutnya, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik yang mampu untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya, serta memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Dalam perspektif ini, *good corporate*

governance juga akan mengarahkan kepada pengembangan inovasi daerah dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setidaknya terdapat 4 (empat) kategori inovasi, yakni: (1) tata kelola pemerintahan; (2) pelayanan publik; (3) pemberdayaan masyarakat; dan (4) peningkatan daya saing daerah.

2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana perkotaan dan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lainnya secara lebih modern akan dilakukan disertai dengan langkah-langkah inovasi dan kreatifitas dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menjamin adanya kesehatan lingkungan, mampu mensinergikan lingkungan alami dan buatan, dan pelibatan aktif masyarakat sebagai “komunitas hijau”, dengan mendasarkan kepada perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (lingkungan, sosial, dan ekonomi). Misi ini mengamanatkan adanya pengelolaan isu lingkungan hidup, sosial-budaya, dan ekonomi dapat ditangani dengan seimbang, sehingga pertumbuhan kota dapat terkendali dan tertata dengan baik dengan pelibatan partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholder. Kesadaran masyarakat akan pentingnya peran ruang tata hijau dan penerapan gaya hidup ramah lingkungan demi keberlangsungan sebuah kota perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi oleh pemerintah dan komunitas. Masyarakat dan pemerintah harus dapat berjalan beriringan dan memiliki visi yang sama dalam pelestarian lingkungan.

3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur perkotaan menjadi faktor utama untuk mendukung keberlangsungan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pada misi ini, pemenuhan ketersediaan infrastruktur perkotaan di seluruh wilayah Kota Magelang, baik yang berlokasi di jantung kota, pinggir kota maupun terutama di lokasi-lokasi sekitar perbatasan dengan Kabupaten Magelang merupakan hal sangat urgen demi terpenuhinya aspek pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari pembangunan adalah kemakmuran bersama, maka dari itu pemerataan pendapatan (*redistribusi pendapatan/distribution of income*) menjadi hal yang krusial untuk dilakukan pemerintah agar pendapatan masyarakat terbagi merata mungkin diantara warga masyarakat. Pengertian merata di sini tidak berarti bahwa semua warga masyarakat pendapatannya dibuat sama, tetapi kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk memperoleh pendapatan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan dan kecemburuan sosial yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas daerah.

Selain penyediaan infrastruktur, upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilakukan antara lain dengan cara: (a) Pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah; (b) kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas; (c) padat karya dan pengembangan usaha atau industri kecil; (d) bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program corporate social responsibility (CSR), sehingga golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif

secara keseluruhan, bukan segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus (*corner of previlage*); dan sebagainya.

Lebih dari itu, pembangunan ekonomi daerah harus diarahkan untuk: (a) mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial; (b) memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri; (c) berbasis kerakyatan dan kekeluargaan; (d) koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwei perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat; (e) menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan dalam bidang ekonomi adalah satu keadaan atau situasi di mana setiap orang (tanpa diskriminasi) memperoleh apa yang menjadi haknya. Ini lantas berarti bahwa keadilan dalam bidang ekonomi adalah perlakuan yang adil bagi setiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal, sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Kota Magelang. Semua itu dilakukan secara berkesinambungan (*sustainable*) dan diupayakan mereduksi dan mengeliminasi adanya dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.

Misi ini mengarahkan pada upaya pelestarian budaya dan kesenian tradisional daerah secara berkelanjutan, sekaligus juga mencakup langkah-langkah penggalian dan pengembangan budaya kreatif dan kesenian kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman sebagai salah satu potensi kekayaan dan keanekaragaman pariwisata di Kota Magelang. Termasuk dalam kaitan ini adalah industri kreatif dan inovatif yang tengah marak berkembang di Kota Magelang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang telah merasuk ke hampir seluruh relung sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Pengembangan dalam rangka pelestarian budaya dan kesenian merupakan gerakan sosial dan moral yang dilakukan oleh segenap pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk menumbuhkembangkan kembali budaya daerah dalam rangka mewujudkan identitas dan jatidiri yang bermartabat. Berkembangnya kebudayaan daerah dapat menumbuhkan kearifan lokal dan memperkaya peradaban umat manusia. Terpeliharanya khazanah sejarah dan budaya akan berkontribusi kepada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perjuangan dan tanggung jawab masa depannya. Dalam konteks pembangkitan spiritualitas masyarakat, perlu dibangun cara pandang bahwa pariwisata merupakan jendela mensyukuri nikmat Tuhan, pusat-pusat keagamaan dapat menjadi obyek kunjung yang memiliki daya tarik, dan upacara-upacara keagamaan sebagai atraktif yang dapat mengundang pesona.

Upaya pemberdayaan budaya dan kesenian dapat disarikan antara lain: (a) Meningkatkan pengelolaan kebudayaan daerah meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya untuk peningkatan kualitas hidup; (b) Meningkatkan industri dan karya budaya yang mengacu pada nilai-nilai luhur budaya bangsa; (c) Meningkatkan daya internalisasi dan penerapan nilai luhur budaya bangsa dalam perilaku masyarakat; (d) Mengikuti event-event regional, nasional, dan internasional dalam rangka memupuk persahabatan dan promosi kebudayaan; (e) Meningkatkan penelitian dan pengembangan serta

pengembangan sistem informasi kebudayaan; dan (f) Mengembangkan SDM bidang kebudayaan dan kepariwisataan serta sumber daya budaya itu sendiri. Sementara itu, pengembangan industri kreatifitas masyarakat dalam berbagai segi kehidupan diarahkan kepada upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan sanggar-sanggar seni budaya, bermunculannya pusat-pusat kerajinan tangan, berkembangnya dapur-dapur kreatif yang membuat aneka jenis makanan daerah dan tradisional, terciptanya suasana yang kondusif bagi kreatifitas kaum muda yang kreatif, dan terbinanya berbagai keahlian yang menopang langsung terhadap perkembangan pariwisata

Dalam perspektif ini, maka pariwisata (seni budaya daerah) dan industri kreatif bisa dijadikan sebagai unsur utama perekonomian daerah, apalagi bila kita ingin mengembangkan industri pariwisata sebagai alat dukung untuk meningkatkan harkat dan martabat daerah di tengah pergaulan di tingkat regional, nasional, dan dunia internasional yang memiliki daya saing.

5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Secara umum toleransi umat beragama di Kota Magelang telah berjalan dengan baik. Sikap tenggang rasa yang berarti rukun dan tidak menyimpang dari aturan dimana seseorang harus saling menghargai dan saling menghormati antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya sudah menjadi salah satu karakter masyarakat Kota Magelang. Toleransi beragama sangat diperlukan pada kehidupan sehari-hari untuk menjalin hubungan yang harmonis, rukun dan sejahtera. Modal sosial kerukunan antara umat beragama itu harus dijaga dan dipelihara, serta ditingkatkan intensitasnya sehingga bisa memberi sumbangan yang lebih nyata bagi kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan daerah di Kota Magelang.

Misi ini mengarahkan pada langkah-langkah guna memupuk dan memperkuat jiwa toleransi beragama dan membudidayakan hidup rukun antar umat beragama melalui sikap dan tindakan seperti: (1) Menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama; tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan agama; (2) Melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda; (3) Meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlakul karimah; (4) Dalam pergaulan sosial, menghindari jauh-jauh sikap egoisme dan fanatisme dalam beragama sehingga menyalahkan pemeluk agama atau penganut kepercayaan yang lain; (5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan; dan (6) Peningkatan sarana-prasarana peribadatan. Selibuhnya, guna meredam radikalisme yang mengatasnamakan agama (termasuk terorisme), dalam toleransi beragama perlu diadakannya dialog dengan cendekiawan dan para tokoh agama dan merangkul mereka untuk melakukan reinterpretasi atas doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang sementara ini dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif sehingga konsep multikulturalisme dapat diterima dengan baik di tengah masyarakat.

Sikap toleransi dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat dalam suasana kehidupan yang harmonis, rukun dan sejahtera merupakan pijakan untuk mewujudkan masyarakat madani akan mengarahkan kepada sikap dan perilaku yang saling menjaga keseimbangan untuk menegakkan hukum yang sehat dan demokrasi guna mewujudkan stabilitas dan kondusifitas daerah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Magelang selama kurun waktu 2016-2021. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:

1. Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur professional dan berintegritas;
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi;
3. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara partisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan;
4. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran :

- 1) Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif;
- 3) Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsive;
- 4) Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik;
- 5) Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel;
- 6) Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 7) Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan;
- 8) Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 9) Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional.

2. Misi 2: Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Tujuan :

- a. Meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia;
- b. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju *smart environment*;

Sasaran :

- 1) Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing;
- 2) Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat;
- 3) Meningkatnya kontribusi sektor industri usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah;
- 4) Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung kota magelang modern;
- 5) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- 6) Meningkatnya ruang terbuka hijau;
- 7) Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana;
- 8) Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang.

3. Misi 3: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan :

- a. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan;
- c. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan;
- d. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat;
- e. Meningkatkan kesetaraan gender.

Sasaran :

- 1) Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat;
- 2) Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan;
- 3) Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan;
- 4) Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- 5) Meningkatnya produktivitas daerah dan ekonomi kreatif;
- 6) Meningkatnya ketahanan pangan;
- 7) Meningkatnya lapangan kerja;
- 8) Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS;
- 9) Terkendalinya Laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan;

10) Menurunnya kesenjangan gender.

4. Misi 4: Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.

Tujuan :

- a. Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah;
- b. Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata.

Sasaran :

- 1) Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan;
- 2) Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial.

5. Misi 5: Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Tujuan :

- a. Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religious;
- b. Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman.

Sasaran :

- 1) Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan;
- 2) Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat;
- 3) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan.

Dalam pencapaian Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, pencapaian tujuan hingga indikator sasaran saling terhubung secara hirarkis sebagaimana ditunjukkan Tabel IV.1. Sedangkan keterkaitan Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD ditunjukkan pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, Realisasi dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Magelang 2016-2021
pada Perencanaan Tahun Pertama (RKPD Kota Magelang tahun 2017)**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1													
Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat													
1	1	Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur profesional dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	1 Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1 Persentase pegawai berkinerja baik	96%	98%	97%	97%	97,5%	97,9%	98%	98%
				2 Capaian SPM Kota Magelang	89,09%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%	100%
				3 Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	43%	45%	48%	52%	65%	68%	72%	72%	72%
			2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	1 Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				2 Indeks EKPPD	2,92	2,95	3	3,1	3,12	3,13	3,14	3,14	3,14
				3 Hasil implementasi SAKIP	CC	CC (53,00)	CC (54,00)	CC (56,00)	CC (58,00)	CC (59,00)	B (60,00)	B (60,00)	B (60,00)
				4 Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan	NA	30%	45%	55%	65%	75%	85%	85%	85%
				5 Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif	1 Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	24,24%	36,36%	48,48%	60,60%	72,72%	84,84%	1000%	1000%
				2 Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	1 Persentase PD menerapkan e-Gov	NA	60%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
				2 Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	NA	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%
			3 Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	1 Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	85%	88%	90%	93%	95%	98%	100%	100%	100%
				2 Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM											
						2016	2017	2018	2019	2020	2021												
3	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara partisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	1 Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan asset daerah	1 Derajat Otonomi Fiskal	23,89%	21,40%	25,86%	29,82%	31,96%	33,88%	35,62%	35,62%											
				2 Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	83,60 %	80,27%	73,66%	69,67%	67,45%	65,79%	63,65%	63,65%											
4	Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	1 Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	1 Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	52%	55%	60%	62%	65%	68%	70%	70%											
				2 Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44,83	51,72	58,62	65,52	75,86	82,76	89,66	89,66											
				3 Persentase perkembangan kerjasama daerah	1,05%	2,08%	3,06%	3,96%	4,76%	5,45%	6,03%	6,03%											
		Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	1 Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1 Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	45%	45%	46%	47%	48%	49%	50%	50%											
				2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional	1 Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional	5	6	6	7	7	8	8	8										
					a. Regional	4	4	4	5	5	6	6	6										
					b. Nasional	1	2	2	2	2	2	2	2										
c. International	0	0	0	0	0	0	0	0															
2 Jumlah prestasi Olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional	2 Jumlah prestasi Olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	14	17	17	17	17	17	17	20	20												
		a. Regional	8	10	10	10	10	10	10	11	11												
		b. Nasional	4	5	5	5	5	5	5	6	6												

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
			2 Meningkatkan kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat	4 Persentase kunjungan perpustakaan	69,37%	70,95%	72,52%	74,25%	75,47%	77,07%	78,63%	78,63%	
				5 Jumlah kunjungan perpustakaan	92.021	94.110	96.200	98.500	100.113	102.230	104.305	104.305	
				1 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	3 bh (23%)	5 bh (15%)	7 bh (54%)	10 bh (77%)	13 bh (100%)	13 bh (100%)	13 bh (100%)	13 bh (100%)	
				2 Angka Harapan Hidup	76,58	76,67	76,71	76,76	76,8	76,85	76,9	76,94	
				3 AKI/ 1.000 KH	187,5	135	126	120	110	95	70	70	
				4 AKB/ 1.000 KH	15,63	15	14,5	14	13,5	13	12,5	12,5	
				5 AKABA	0,63	0,16	0,155	0,15	0,145	0,14	0,135	0,135	
				6 Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	
				7 Angka Kesakitan DBD	130,93	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	
				8 Angka Prevalensi Kasus TB	128,33	<106	<105	<104	<103	<102	<101	<101	
				9 Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,04%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	
				10 Rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	98%	98%	98%	98%	98%	98%	100%	100%	
							3 Meningkatkan kontribusi sektor industri usha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	1 Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	15,70%	15,88%	16,15%	16,43%	16,65%
4 Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern	1 Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan menuju standar inklusivitas (<i>universal design</i>)	NA	10%					20%	30%	40%	50%	60%	60%
	2 Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan menuju standar inklusivitas (<i>universal design</i>)	NA	0%					10%	20%	30%	40%	50%	50%
	3 Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar inklusivitas (<i>universal design</i>)	NA	20%					20%	20%	40%	60%	60%	60%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM		
						2016	2017	2018	2019	2020	2021			
2	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju smart environment	IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indeks Pencemaran Air	68,9	75,6	75,65	75,7	75,8	76,79	76,84	76,84		
				2 Indeks Pencemaran Udara	45,3	50,11	61,8	70,5	77,7	77,9	79,1	79,1		
				3 Indeks Tutupan Vegetasi	48,16	48,29	48,55	48,8	49,05	49,31	49,56	49,56		
				4 Volume sampah yang dibuang ke TPSA	160,58	160,58	158,7	155,7	153,7	151,7	136,7	136,7		
			2 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	3 Persentase Ruang Terbuka Hijau										
				a. Privat	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			b. Publik		18,37	18,37	18,37	18,42	18,44	18,46	18,50	18,50	18,50	18,50
			3 Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana	1 Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	1,29%	3,98%	6,68%	9,38%	12,08%	15,08%	17,48%	17,48%	17,48%	
				2 Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	NA	0	5,80%	11,76%	17,64%	23,53%	35,29%	35,29%	35,29%	
4 Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang	1 Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	22%	23%	24%	25%	26%	27%	33%	33%	33%				
3	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat													
3	1 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas	1. Indeks Gini 2. Indeks Williamson	1 Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat	1 Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12,80%	12,50%	12%	11,5%	11%	10,5%	10%	10%		
				2 Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	1 Tercapainya 100 - 0 -100									
			a. Persentase jumlah KK yang terlayani air minum		82,30%	87,30%	92,30%	97,30%	100%	100%	100%	100%		
			b. Rasio Luas kawasan kumuh		121.27 Ha	69,50 Ha	39,65 Ha	12,12 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha		
			c. Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	6%	6%	3%	2%	0%	0%	0%	0%			
2 Prosentase RTLH	4,40%	3,70%	2,90%	2,30%	1,70%	1,0%	0%	0%						
3 Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan	1 Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	7,83	8	8,25	8,5	8,75	9	9,25	9,25					
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Laju Inflasi	1 Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	1 Pertumbuhan investasi										
				a. Pertumbuhan nilai investasi PMA	0%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	15%		
				b. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%		

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	antar kelompok pendapatan		2 Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	1 Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	70%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%
				2 Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	26%	27%	28%	29%	30%	31%	32%	32%
			3 Meningkatnya ketahanan pangan	1 Ketersediaan pangan utama beras (ton)	12.729	12.780	12.831	12.882	12.933	12.985	13.037	13.037
	3 Menurunkan pengangguran dan kemiskinan	1. TPT 2. Angka Kemiskinan	1 Meningkatnya lapangan kerja	1 Persentase penyerapan tenaga kerja	60%	60%	65%	65%	65%	70%	70%	70%
			2 Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS	1 Persentase Penurunan PMKS	14%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	19%
4 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat	Angka Pertumbuhan Penduduk	1 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	1 Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2	2	2	2	2	2	2	2	
5 Meningkatkan kesetaraan gender	1. IPG 2. IDG	1 menurunnya kesenjangan gender	1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	13,15%	15%	17%	20%	23%	26%	30%	30%	
			2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	15,73%	17%	20%	23%	26%	30%	35%	35%	
			2 Rasio KDRT	0,07%	0,065%	0,060%	0,055%	0,050%	0,04%	0,04%	0,04%	
4	Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang											
4	1 Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah	Capaian pelestarian budaya dan kesenian daerah	1 Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan	1 Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	13%	13,5%	14%	14,5%	15%	15,5%	16%	16%
				2 Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	0	0	5	10	15	20	25	25
	2 Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata	Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	1 Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial	1 Jumlah Wisatawan a. Nusantara b. Mancanegara	1.133.373 5.171	1.134.846 5.178	1.136.435 5.185	1.138.140 5.193	1.139.961 5.201	1.141.899 5.210	1.143.954 5.219	1.143.954 5.219
5	Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani											
5	1 Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	1 Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan	1 Prosentase penurunan penyakit masyarakat	-2,13%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
			2 Terwujudnya lingkungan kondusif	1 Angka kriminalitas	14,14	13,64	13,14	12,64	12,14	11,64	11,14	11,14

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	religius		yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	2 Prosentase penurunan kasus narkoba	-13,04%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
				3 Angka kriminalitas yang tertangani	11,08	11,5	11,5	12	12	12,5	12,5	12,5	
				4 Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				2 Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan	1 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,56	3	3	3	3	3
				2 Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre)	NA	0	0	1	0	0	1	2	

Tabel IV.3
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian
Misi RPJMD Kota Magelang 2016-2021 pada Perencanaan Tahun Pertama (RKPD Kota Magelang Tahun 2017)

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1 :Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat								
1 Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesiona dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1 Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja pemerintahan yang profesional dan akuntabel sesuai norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1 Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya	v	v	v	v		
2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi		2 Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	v	v	v			
		3 Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran			v	v	v	v

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		daerah						
		4 Pencegahan pelanggaran hukum berbasis partisipasi masyarakat			v	v	v	v
		5 Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat	v	v	v	v	v	v
3 Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	2 Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat memenuhi SPM (Standar pelayanan Minimal) melalui aplikasi teknologi informasi	6 Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi	v	v	v	v	v	
		7 Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi teknologi informasi	v	v	v	v	v	
4 Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah	3 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	8 Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	v	v	v	v	v	v
	4 Peningkatan kinerja pengelolaan BMD yang didukung oleh aparatur profesional	9 Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola aset	v	v	v	v	v	v
5 Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi informasi	10 Meningkatkan akses informasi, komunikasi, partisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota	v	v	v	v	v	v
6 Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan								
7 Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional								
Misi 2 :Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan								
1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	6 Peningkatan akses sumber ilmu pengetahuan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan PAUD, Dasar, dan Non Formal	11 Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah		v	v	v	v	v
2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	7 Peningkatan kualitas layanan kesehatan berkeadilan dan pemasyarakatan budaya perilaku hidup sehat	12 Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat	v	v	v	v	v	v

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		13 Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan	v	v	v	v	v	v
3 Meningkatnya kontribusi sektor industri usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	8 Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri usaha mikro dan perdagangan dan sektor jasa kota lainnya	14 Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan		v	v	v	v	
4 Terwujudnya sarana prasarana perdagangan yang maju mendukung kota magelang modern	9 Pengembangan infrastruktur perdagangan, kesehatan, pendidikan yang maju , inklusif dan berwawasan lingkungan							
5 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	10 Pengendalian pemanfaatan ruang dan aktivitas pembangunan untuk pelestarian kualitas lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan dan antisipasi resiko bencana	15 Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan		v	v	v		
6 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau								
7 Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana								
8 Pemanfaatan lahan sesuai regulasi tata ruang								
Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat								
1 menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	11 Pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang secara merata dan berkeadilan	16 Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan	v	v	v	v	v	v
2 Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang sesuai rasio kebutuhan masyarakat								
3 Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik dan ramah lingkungan								
4 Terjaganya kondusifitas kesejahteraan ekonomi masyarakat	12 Peningkatan investasi, daya saing produk/jasa, dan kontribusi sektor-sektor ekonomi bagi perekonomian daerah	17 Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.	v	v	v	v		
5 Meningkatnya ketahanan pangan	13 Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan penurunan kemiskinan secara berkeadilan	18 Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: ketahanan pangan, peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk	v	v	v	v	v	v

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		dan pengarusutamaan gender						
6 Meningkatkan kesejahteraan sosial								
7 Meningkatkan lapangan kerja								
8 Menurunnya angka kemiskinan								
9 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan								
10 Menurunnya kesenjangan gender								
Misi 4 : Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang								
1 Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan	14 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kreativitas seni budaya daerah, kearifan lokal, dan inovasi destinasi pariwisata	19 Pengembangan sistem Komunikasi, informasi dan edukasi pada semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran pelestarian nilai seni budaya dan daya saing pariwisata			v	v	v	v
2 Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata baik alam maupun sejarah yang potensial								
Misi 5 : Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani								
1 Terbentuknya karakter religius masyarakat landasan moral dan etika pembangunan	15 Internalisasi kesadaran religius pada Aparatur dan masyarakat untuk bermitra menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama menuju lingkungan masyarakat kota Magelang yang kondusif, tertib, aman, nyaman, dan antisipatif terhadap konflik sosial	20 Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipasi resiko bencana konflik SARA, sosial, ekonomi, dan politik		v	v	v	v	v
2 Mewujudkan lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat								
3 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam kebebasan beribadah dan pemilihan tempat peribadatan sesuai standar								

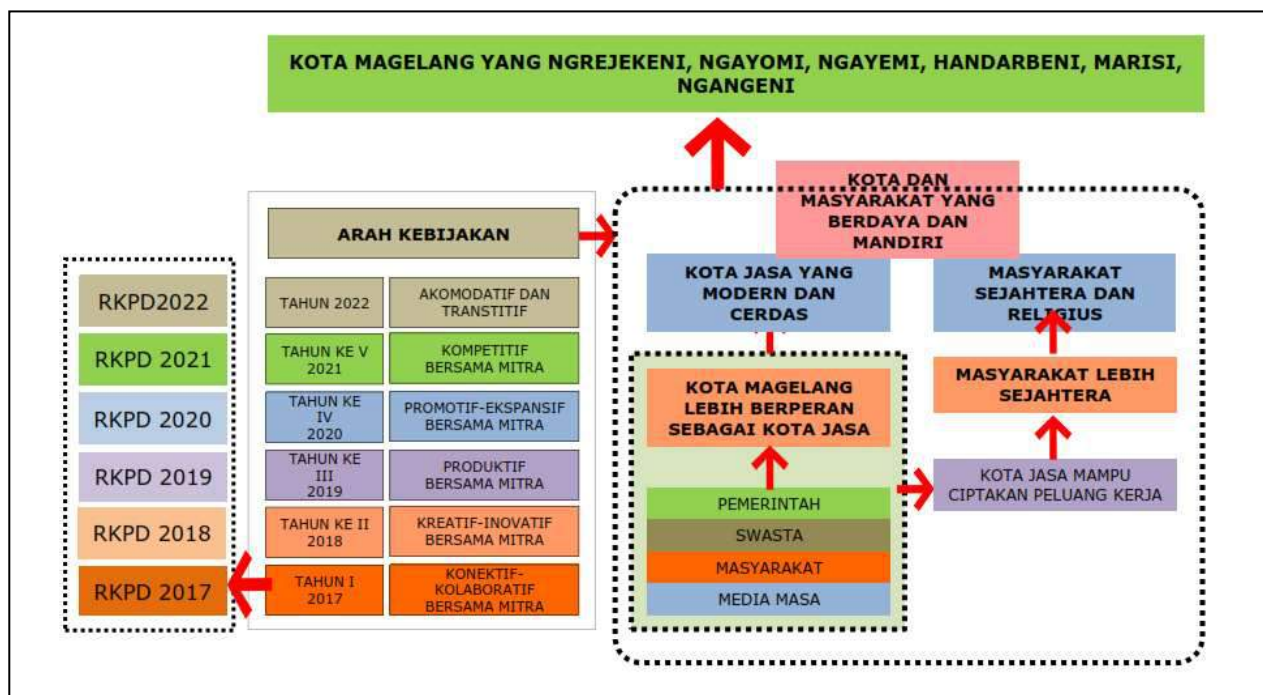
4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2017

4.2.1 Tema Pembangunan Tahun 2017

Dalam RKP Tahun 2017, tema pembangunan yang diusung adalah Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah. Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana tema tersebut maka pendekatan pembangunan yang dilakukan adalah pendekatan holistic, tematik, integratif dan spasial.

Sedangkan dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah, tema pembangunan pada tahun 2017 adalah Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Energi Berkelanjutan Serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemandirian Wilayah

Dengan pendekatan yang sama tema pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2017 adalah Membangun Kolaborasi dan Konektivitas: antar pelaku pembangunan, antarsektor; dan antar wilayah. Melalui tema ini, pembangunan Kota Magelang diarahkan mampu mencapai target dan sasaran dalam rangka pencapaian visi mis RPJMD Kota Magelang terutama untuk tahun 2017. Deskripsi komprehensif atas Tema RKPD Kota Magelang Tahun 2017 nampak pada gambar berikut :



Gambar IV.1

Gambar Tema dan Arah kebijakan Tahun 2017

Selain itu Kota Magelang berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dan mendorong serta selaras dengan pencapaian tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah maupun nasional . Gambaran keselarasan antar tema pembangunan nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.4

**Keterkaitan antar tema Pembangunan dalam RKP, RKPД Provinsi Jawa Tengah dan RKPД Kota
Magelang Tahun 2017**

Tema RKP Tahun 2017	Tema RKPД Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017	Tema RKPД Kota Magelang Tahun 2017	Benang Merah keterkaitan
Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah	Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Energi Berkelanjutan Serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemandirian Wilayah	Membangun Kolaborasi dan Konektivitas: antar pelaku pembangunan, antarsektor; dan antar wilayah	Tema membangun kolaborasi dan konektivitas antar pelaku pembangunan, antarsektor; dan antar wilayah adalah dalam rangka mengatasi berbagai isu strategis pembangunan daerah dan dalam mewujudkan visi misi pada periode tahun 2017 dengan memberi daya dorong pada perwujudan tema pembangunan provinsi Jawa Tengah maupun pada RKP Tahun 2017

4.2.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2017

4.2.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2014-2019

Memperhatikan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 bahwa di dalam Buku I RPJM Nasional disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi misi nasional tersebut dan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. **Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA**, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusi dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi kharakter bangsa.
9. Mempertegus kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kesembilan agenda prioritas tersebut diimplementaiskan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu :

a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharap-kan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif.

Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:

- 1) Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
- 2) Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
- 3) Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

- 4) Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pemerataan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa dan kawasan timur

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0%;
2. Laju inflasi sebesar 3,5%;
3. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217 ribu;
4. Indeks Gini sebesar 0,36;
5. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 - 8,0%;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,3;
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 – 5,0%.

4.2.1.2 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2017

Secara lebih spesifik **dalam RKP Tahun 2017, tema** yang diusung adalah **Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah**. Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana tema tersebut maka pendekatan pembangunan yang dilakukan adalah pendekatan holistic, tematik, integratif dan spasial.

Prioritas pembangunan nasional ditetapkan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan manusia dan masyarakat yang diprioritaskan pada Revolusi Mental, pembangunan kesehatan, Pendidikan, Perumahan dan Permukiman
- 2) Pembangunan Sektor unggulan diprioritaskan pada pembangunan kedaulatan pangan, pembangunan kemaritiman dan kelautan, pembangunan kedaulatan energy, pembangunan pariwisata, percepatan pertumbuhan industry dan kawasan ekonomi (KEK)
- 3) Pemerataan dan kewilayahan meliputi pemerataan antar kelompok pendapatan, reformasi agrarian, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, pembangunan konktivitas nasional
- 4) Pembangunan politik hukum pertahanan dan keamanan diprioritaskan pada : reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum, Stabilitas keamanan dan ketertiban, Konsolidasi demokrasi dan Efektifitas Demokrasi, Reformasi Birokrasi

- 5) Pembangunan Ekonomi diprioritaskan pada Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, peningkatan ekspor non migas, Reformasi Fiskal

Selain itu dalam RKP Tahun 2017 juga diprioritaskan **pembangunan bidang** yang meliputi :

1. Pengarusutamaan dan pembangunan Lintas Bidang meliputi : Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan Tata Kelola pemerintahan yang baik, Pengarusutamaan Gender, Pengarusutamaan ANtiNarkoba, Pembangunan Lintas Bidang Perubahan Iklim.
2. Bidang Pembangunan Sosisl Budaya dan Kehidupan Beragama meliputi : Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pembangunan kesehatan, Pendidikan, Perpustakaan, Pemuda dan Olahraga, Agama, Kebudayaan, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak,
3. Bidang pembangunan Ekonomi : meliputi Stabilitas Harga, Usaha Mlko Kecil menengah dan Koperasi, Perdagangan Dalam negeri, Kerjasama Ekonomi Nasional, Jasa Keuangan, Badan Usaha Milik Negara, Data dan informasi statistic, Ketenagakerjaan.
4. Bidang Iptek meliputi : Peningkatan Ikapasitas Iptek, NSPK Pembangunan Iptek, Kerangka Regulasi,
5. Bidang Pembangunan Bidang Politik
6. Bidang aparatur : Aparatur Negara,
7. Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang
8. Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana
9. Bidang Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup

4.2.1.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Tahun 2017 yang merupakan tahun keempat RPJMD, menjadi tahun yang strategis untuk melihat ketercapaian pembangunan daerah jangka menengah Jawa Tengah. Memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dengan berbagai permasalahan dan isu strategis, maka upaya pencapaian target pembangunan daerah tahun 2017 dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk **“Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Energi Berkelanjutan Serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemandirian Wilayah”**. Dengan tema ini, maka fokus sasaran pembangunan di tahun 2017 adalah pada 4 (empat) hal yaitu pangan, energi, kemiskinan, dan pengangguran.

Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2017 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2017, meliputi:

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energy secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin;

3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster untuk pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 diarahkan terutama untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan dan energi serta percepatan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Prioritas pembangunan daerah tahun 2017 lebih ditujukan pada upaya-upaya antara lain:

- a. peningkatan produktivitas kedelai dan garam;
- b. program pembangunan 1000 embung melalui peningkatan kuantitas dan kualitas embung/tampung air;
- c. peningkatan jaringan irigasi;
- d. pengembangan energi baru terbarukan;
- e. pemberian bantuan siswa miskin untuk pendidikan menengah dan khusus;
- f. pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN;
- g. peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat miskin (perbaikan rumah tidak layak huni, pemasangan listrik, dan jamban keluarga);
- h. penanganan infrastruktur pendukung pariwisata dan pengurangan kemiskinan;
- i. penanganan lahan kritis.
- j. pemberian jaminan perlindungan sosial bagi kepala rumah tangga non produktif (penyandang disabilitas dan penderita penyakit kronis).

Prioritas pembangunan ini dapat digambarkan sebagaimana Gambar berikut ini



Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2016

Gambar IV.2

Piramida Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam **fokus pembangunan**, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, difokuskan pada:
 - a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui pengembangan bibit unggul bersertifikat tahan perubahan iklim dan OPT, pengembangan induk dan benih ikan unggul, pengembangan pakan ikan mandiri/pakan lokal, rekayasa dan pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan; pendataan petani dan pengendalian distribusi pupuk bersubsidi; menjamin ketersediaan BBM bersubsidi untuk nelayan; pengendalian hama terpadu; pengendalian alih fungsi lahan persawahan/pertanian; peningkatan populasi ternak dengan penyediaan bibit unggul dan pencegahan pemotongan betina produktif; pemanfaatan lahan hutan dibawah tegakan; pembangunan dan peningkatan sarpras pelabuhan perikanan; pengembangan alat tangkap ikan ramah lingkungan;
 - b. Peningkatan dan produktivitas kedelai antara lain melalui fasilitasi sarana produksi, optimalisasi pemanfaatan lahan dan peningkatan kapasitas petani dengan pelatihan;
 - c. Peningkatan kualitas mutu dan SDM IKM garam; dan perbaikan sistem penyimpanan dan pendistribusian garam rakyat;
 - d. Peningkatan daya saing produk pangan lokal melalui pengembangan sertifikasi pangan organik, Prima 3 serta penyediaan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
 - e. Revitalisasi Balai Perbenihan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
 - f. Peningkatan diversifikasi, distribusi dan aksesibilitas pangan melalui pengembangan pemanfaatan pekarangan; pengembangan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal; penguatan

- Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan masyarakat, pengembangan lumbung pangan masyarakat, peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat serta pengembangan cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah;
- g. Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, akses teknologi, sumber-sumber pembiayaan, informasi harga dan akses pasar;
 - h. Peningkatan ketersediaan air baku utamanya dengan memperbanyak pembangunan embung/tambungan air sebagai bagian dari “program pembangunan 1.000 embung” serta mendorong dukungan Nasional, Kabupaten/kota dan masyarakat/ swasta terhadap program tersebut;
 - i. Peningkatan kondisi jaringan irigasi yang tersinkronisasi dengan Kabupaten/kawasan utama penghasil padi dan sawah LP2B serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat;
 - j. Peningkatan pelayanan jaringan listrik melalui pembangunan jaringan listrik perdesaan, EBT, sambungan listrik murah, fasilitasi perijinan dan jaringan pelayanan dan akses listrik kepada PLN, fasilitasi dukungan pembangunan PLTU Batang dan Cilacap serta mendorong upaya-upaya untuk hemat energi; serta optimalisasi pemanfaatan potensi pertambangan melalui penerapan good mining practice;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, petani, dan nelayan, difokuskan pada:
- a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, antara lain dengan:
 - 1) Pemberian jaminan perlindungan sosial bagi kepala rumah tangga non produktif (penyandang disabilitas dan penderita penyakit kronis), fokus pada kepala rumah tangga yang belum mendapatkan program nasional;
 - 2) Pola **sharing** program dan pendanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:
 - a) Akses layanan pendidikan melalui pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan pola **sharing** yaitu Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan Menengah dan Khusus, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pendidikan Dasar;
 - b) Akses kesehatan melalui Jamkesda/pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN;
 - c) Stimulan peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat miskin meliputi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - 3) Peningkatan pemenuhan kecukupan pangan, akses pelayanan dan infrastruktur dasar, diutamakan pada Kabupaten/Kecamatan/Desa dengan tingkat kemiskinan tinggi;
 - 4) Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang serta fasilitasi penyelenggaraan pasar murah menjelang lebaran;
 - 5) Fasilitasi pemenuhan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan;
 - 6) Pemenuhan layanan kebutuhan dasar PMKS yang tidak produktif dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Dasa Wisma (Dawis) serta Dunia Usaha dan Industri (DUDI) didukung dengan data pemetaan dan penyebaran PMKS;
 - 7) Peningkatan pelayanan adminduk bagi kelompok miskin melalui unit layanan penduduk miskin sebagai upaya mempermudah dalam mendapatkan layanan dasar;

- 8) Peningkatan kesejahteraan pekerja dengan fasilitasi pembangunan perumahan layak huni dan murah bagi pekerja serta penyediaan jaminan sosial;
- b. Peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat miskin antara lain:
 - 1) Peningkatan kemampuan berusaha dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal; pembangunan karakter dan jiwa berusaha bagi pemuda; jaminan dan kepastian usaha serta kepastian harga jual/produk; pengembangan Usaha Kecil Menengah; peningkatan kewirausahaan perempuan melalui optimalisasi kelompok Dawis; dan pelibatan DUDI untuk menumbuhkan kesempatan berusaha;
 - 2) Membangun sinergitas dengan dunia usaha, masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penanganan kemiskinan;
 - 3) Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dengan pengembangan kewirausahaan; peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dengan peningkatan prasarana, sarana, kurikulum dan profesionalisme tenaga pelatih dan instruktur BLK;
 - 4) Fasilitasi pelaksanaan transmigrasi untuk pemerataan penduduk;
 - c. Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, petani, dan nelayan, antara lain dengan:
 - 1) Pengembangan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah;
 - 2) Fasilitasi perluasan akses permodalan, pasar dan jaminan harga;
 - 3) Fasilitasi kepengurusan sertifikat hak atas tanah kerjasama dengan BPN sehingga bisa digunakan sebagai agunan pengajuan kredit usaha;
 - 4) Peningkatan keterampilan petani dan nelayan;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan, difokuskan pada:
 - a. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan melalui optimalisasi pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus; peningkatan sarpras pendidikan guna memenuhi SPM dan SNP utamanya peningkatan ketersediaan SMA/SMK di wilayah kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah; pengembangan kurikulum muatan lokal dengan penambahan substansi kewirausahaan bagi siswa SMK serta penguasaan Bahasa Inggris bagi siswa SMA dan SMK; peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan studi lanjut ke S1/D4 dan pelatihan kompetensi teknis guru dan tenaga kependidikan; pengembangan potensi siswa dan peningkatan mutu lulusan dengan fasilitasi lomba-lomba dan karya ilmiah; optimalisasi peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan dengan program CSR;
 - b. Peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan; optimalisasi pelaksanaan Bintek, Diklat dan Workshop bagi Tenaga Medis dan Non Medis; optimalisasi peran Dokter dan Bidan PTT; stimulan pemberian bantuan jamban keluarga di kab/kota; Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di 35 kab/kota; serta Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar serta penanganan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking;

- d. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan dan perluasan cakupan layanan KB;
 - e. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kelompok rentan dan PMKS dengan peningkatan jumlah PSKS, dan pembinaan kelompok binaan PMKS non panti;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran, difokuskan pada:
- a. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal melalui Pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan Koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis, magang serta PKL; serta perluasan pangsa pasar bagi produk koperasi dan UMKM dengan pameran dan promosi;
 - b. Pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja;
 - c. Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal;
 - d. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi di Jawa Tengah dengan pemberian kemudahan perizinan melalui PTSP, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi Jawa Tengah;
 - e. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; perbaikan iklim serta penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan; serta penegakkan norma dan perlindungan ketenagakerjaan;
 - f. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan fokus pada:
- a. Peningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan menuju Jawa Tengah bebas lubang dengan ruas tuntas utamanya pada ruas jalan provinsi eks alih status dari jalan kewenangan kabupaten/kota;
 - b. Penanganan infrastruktur mendukung pengembangan wilayah (kabupaten yang tingkat ekonominya di bawah rata-rata provinsi) serta penghubung pusat kegiatan wilayah melalui peningkatan jalan penghubung Pantura-Pansela, jalur alternatif pantura, serta kawasan perbatasan antar provinsi;
 - c. Penanganan infrastruktur pendukung pariwisata utamanya melalui peningkatan jalan dan perlengkapannya (Kawasan Dieng, Solo-Selo Borobudur, Sangiran, Curugsewu, Candi Gedongsongo, Agro Wisata Bandungan, Bledug Kuwu, Baturaden), serta peningkatan pelayanan transportasi (penyelesaian pengembangan Bandara A. Yani, Bandara Dewandaru, Bandara Tunggul Wulung, Bandara Wirasaba, Pelabuhan Kendal, Pelabuhan Karimunjawa);
 - d. Penanganan infrastruktur pendukung pengurangan kemiskinan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi melalui peningkatan aksesibilitas, serta peningkatan cakupan akses aman air minum dan sanitasi;

- e. Memfasilitasi percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pembangunan infrastruktur strategis di Jawa Tengah diantaranya Jalan Tol (Bawen-Solo, Pejagan-Semarang); JJLS; Bandara Internasional A. Yani Semarang; Pelabuhan Tanjung Emas; Waduk (Logung, Pidekso, Gondang, Kuningan); DI Slinga Purbalingga; Reaktivasi KA; Jalan Nasional (antara lain Pelebaran Klampok - Banjarnegara, Wangon-Temanggung, Tegal - Purwokerto);
 - f. Peningkatan penanganan banjir pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali-Comal utamanya di S. Bodri, Kendal, Blukar, Damar, Bulanan, Meduri, Bremi, Pemali, Comal serta mendorong pada Wilayah Sungai kewenangan Pusat utamanya di Sungai Bengawan Solo, BKT, Serang, Juwana, Lusi, Wulan, Kabuyutan, Cisanggarung, Gelis, Piji, Logung, Mangkang, progo, Wawar, Tipar, Serayu, Citanduy, Cibereum, Cikonde, Luk Ulo dan sabuk pantai di wilayah Pantura;
 - g. Rehabilitasi untuk menurunkan luas lahan kritis serta konservasi DAS dengan penanaman vegetatif dan sipil teknis;
 - h. Menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah melalui Program Penilaian Kinerja Perusahaan dan Program Kali Bersih, Pembangunan IPAL di sentra-sentra IKM dan Peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM;
 - i. Peningkatan mitigasi dan penanganan pasca bencana melalui Peningkatan dan pemeliharaan saluran air; Penangan darurat pasca banjir/longsor;
 - j. Percepatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPARegional);
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus pada:
- a. Perbaikan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu:
 - 1) **Organisasi**, meliputi penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, fasilitasi usulan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dan UPT, dan penataan Lembaga Non Struktural;
 - 2) Tatalaksana, meliputi penyusunan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance melalui penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi; penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan publik;
 - 3) Peraturan perundang-undangan, meliputi regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah yang disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat diikuti dengan penindakan pelanggaran peraturan daerah;
 - 4) Sumber daya manusia aparatur, meliputi penciptaan aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Kondisi tersebut ditempuh melalui penghitungan kebutuhan pegawai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja, penyusunan peta jabatan, penetapan nomenklatur jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu/khusus, pengadaan pegawai pada formasi tertentu dengan seleksi/tes Computer Assisted Test (CAT) dan sistem pembinaan karier yang terbuka;

- 5) Pengawasan, meliputi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui Implementasi aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah; penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pembangunan Zona Integritas, transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah, serta penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media;
 - 6) Akuntabilitas, melalui peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7) Pelayanan publik, meliputi pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan pasti; penanganan pengaduan masyarakat; penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sertifikasi ISO 9001:2008;
 - 8) Pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultural set), meliputi birokrasi yang memiliki integritas dan kinerja tinggi melalui peningkatan perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik dan pengembangan budaya kerja;
- b. Pemantapan kondusivitas wilayah terhadap potensi gangguan keamanan dan antisipasi pasca pelaksanaan Pilkada;
 - c. Penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan aset daerah;
 - d. Pelestarian nilai-nilai luhur Pancasila melalui pengembangan seni, budaya daerah dan olahraga serta menghidupkan kembali budaya gotong royong dan handarbeni;
 - e. Penataan administrasi kependudukan guna peningkatan kualitas penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat;
 - f. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana dan pengembangan layanan perpustakaan daerah, serta pengembangan jaringan kemitraan.

Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 merupakan upaya guna mencapai target **sasaran pembangunan daerah** tahun 2017 yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 – 5,9%;
- b. Laju inflasi sebesar $4,5 \pm 1\%$;
- c. PDRB per kapita sebesar Rp. 26,06 juta;
- d. Indeks Gini sebesar 0,341 dan Indeks Williamson sebesar 0,6993;
- e. Persentase penduduk miskin sebesar 11,30 – 10,83%;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,87, dengan komponen:
 - 1) Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 74,75 tahun;
 - 2) Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,05 tahun;
 - 3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,09 tahun;
 - 4) Pengeluaran per Kapita Yang Disesuaikan sebesar 10.156,50 ribu per tahun;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 69,40 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 71,49;
- h. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,49 – 4,27%; dan
- i. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,86

4.2.1.4. Tujuh Belas Permasalahan di Jawa Tengah

Pada saat pelantikan 17 kepala daerah, Gubernur Jawa Tengah berpesan kepada ke-17 bupati/walikota agar memperhatikan '17 Pekerjaan-Rumah' atau PR yang menjadi perhatian di tingkat Jawa Tengah. Ke tujuh belas PR tersebut adalah: kemiskinan, bencana alam, demam berdarah dan virus zika, gafatar, AKI dan AKB, perlindungan perempuan dan anak, persoalan ROB, keterbukaan komunikasi dengan masyarakat, pelayanan publik, manajemen keuangan daerah berbasis akrual, pengelolaan asset, dana desa, daya saing UMKM, galian C, kemudahan investasi, pangan dan energi serta peningkatan peran PKK. Dari ke 17 hal tersebut, untuk Kota Magelang tidak ada masalah genangan RPB, Galian-C serta dana desa. Sedangkan 14 aspek lainnya tetap menjadi perhatian dan menjadi prioritas untuk diselesaikan secara bertahap dan dituangkan dalam program prioritas tahunan.

4.2.1.5. Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2017

Sebagaimana Perencanaan tahun pertama dalam RPJMD Kota Magelang 2016-2021 yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 mengambil tema: "**Membangun Kolaborasi dan Konektivitas: antar pelaku pembangunan, antarsektor; dan antar wilayah**". Pada tahap ini diprioritaskan pada upaya penyiapan kerangka landasan untuk pencapaian visi misi RPJMD tahun 2016-2021:

1. Membangun kerangka kerja kelembagaan (SOTK)

Prioritas ini termasuk upaya menata organisasi perangkat daerah sesuai regulasi dan penempatan aparatur sesuai kompetensinya. Penyusunan tata kerja yang tepat tidak tumpang tindih dan memperhatikan alur sinergitas pada penanganan isu lintas bidang urusan pemerintahan.

2. Kerangka regulasi

Prioritas ini memuat upaya penyusunan roadmap kebutuhan regulasi selama 5 tahun ke depan sesuai dengan kebijakan yang harus disusun dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah mewujudkan visi dan misi kepala daerah;

3. Kerangka kajian kemitraan

Program ini untuk menyediakan roadmap rencana kerjasama kemitraan dengan pihak dunia usaha, media, dan masyarakat menuju kota Magelang maju, modern dan cerdas. Misi walikota terpilih hendak mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga pada tahap ini menjadi masa persiapan mendidik masyarakat punya kepedulian membentuk forum warga sebagai mitra pembangunan pemerintah. Kerangka kerja kemitraan dioptimalkan dengan peluang pemanfaatan teknologi informasi.

4. Kerangka kajian kebutuhan infrastruktur menyiapkan Magelang kota cerdas (smart city) dan modern.

Prioritas ini untuk menyiapkan perangkat dasar pengembangan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Infrastruktur yang mendukung perwujudan Magelang kota jasa modern dan maju juga mulai disiapkan kajian kebutuhannya.

5. Penyiapan basis data terpadu untuk sistem pengukuran kinerja

Prioritas ini untuk menyiapkan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah supaya pemanfaatan sumber daya daerah dapat dipertanggungjawabkan

dengan benar kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan

6. Penyelenggaraan layanan wajib dasar sesuai standar pelayanan minimal

4.2.1.3.1 Fokus Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2017

Arah kebijakan pembangunan tahap ini untuk menjawab **pencapaian prioritas pembangunan fokus** pada:

1. Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya
2. Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur
3. Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat
4. Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi
5. Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi teknologi informasi
6. Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
7. Meningkatkan akses informasi, komunikasi, partisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota
8. Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat
9. Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan
10. Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan
11. Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.
12. Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS

4.2.1.3.2 Prioritas Urusan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2017

Prioritas urusan yang mendukung arah kebijakan perencanaan pada RKPd Kota Magelang Tahun 2017 adalah:

- 1) Fungsi penunjang urusan pemerintahan;
- 2) Urusan pendidikan;
- 3) Urusan kesehatan;
- 4) Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 5) Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- 6) Urusan sosial;
- 7) Urusan komunikasi dan informatika;
- 8) Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;

4.2.1.3.3 Prioritas Urusan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2017

Program unggulan sebagai prioritas pada perencanaan pada RKPD Kota Magelang Tahun 2017 adalah:

- 1) Program peningkatan kualitas sumber daya pemerintah;
- 2) Program peningkatan daya saing daerah;
- 3) Program kota cerdas;
- 4) Program pemerintahan responsif dan partisipatif;
- 5) Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan;
- 6) Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan.

Selain berpedomanan pada tema pembangunan Tahun 2017 yang merupakan tema pentahapan pencapaian Visi Walikota Magelang, Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional.

Koneksitas antara prioritas nasional, provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Tema Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV. 5
Koneksitas antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Jawa Tengah, Prioritas Tema Pembangunan Kota Magelang Tahun 2017, dan isu strategis

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2017	Prioritas Daerah Tahun 2017
<p>I. Pembangunan manusia dan masyarakat yang diprioritaskan pada Revolusi Mental, pembangunan kesehatan, Pendidikan, Perumahan dan Permukiman</p>	<p>3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan, difokuskan pada:</p> <p>a. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan melalui optimalisasi pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus; peningkatan sarpras pendidikan guna memenuhi SPM dan SNP utamanya peningkatan ketersediaan SMA/SMK di wilayah kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah; pengembangan kurikulum muatan lokal dengan penambahan substansi kewirausahaan bagi siswa SMK serta penguasaan Bahasa Inggris bagi siswa SMA dan SMK; peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan studi lanjut ke S1/D4 dan pelatihan kompetensi teknis guru dan tenaga kependidikan; pengembangan potensi siswa dan peningkatan mutu lulusan dengan fasilitasi lomba-lomba dan karya ilmiah; optimalisasi peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan dengan program CSR;</p> <p>b. Peningkatan akses serta mutu pelayanan</p>	<p>A. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar dengan fokus pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan Angka kemiskinan 2. Pengurangan pengangguran dan penciptaan lagan kerja 3. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan 4. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan <p>B. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemuda dan Olah Raga 2. Membangun Kemitraan 3. Penerapan dan perwujudan keadilan gender dan perlindungan anak 4. Pemerataan Pembangunan <p>C. Pengembangan dan pemanfaatan potensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan layanan wajib dasar sesuai standar pelayanan minimal dengan kebijakan pada Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan 2. Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat 6. Meluaskan jangkauan

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2017	Prioritas Daerah Tahun 2017
	<p>kesehatan dasar dan rujukan melalui peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan; optimalisasi pelaksanaan Bintek, Diklat dan Workshop bagi Tenaga Medis dan Non Medis; optimalisasi peran Dokter dan Bidan PTT; stimulan pemberian bantuan jamban keluarga di kab/kota; Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di 35 kab/kota; serta Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;</p> <p>c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar serta penanganan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking;</p> <p>d. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan dan perluasan cakupan layanan KB;</p> <p>e. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kelompok rentan dan PMKS dengan peningkatan jumlah PSKS, dan pembinaan kelompok binaan PMKS non panti;</p>	<p>daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan:</p> <p>1. Pengelolaan sampah</p> <p>D. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal;</p> <p>1. Penguatan daya saing dan kemandirian daerah</p> <p>2. Penciptaan iklim yang kondusif untuk investasi</p> <p>3. Smart City</p> <p>4. Peningkatan kreativitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>5. Branding Kota Magelang</p>	<p>akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi teknologi informasi</p> <p>7. Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah</p> <p>8. Meningkatkan akses informasi, komunikasi, partisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota</p> <p>9. Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat</p> <p>10. Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan</p> <p>11. Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan</p>

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2017	Prioritas Daerah Tahun 2017
			<p>Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan</p>
<p>II. Pembangunan Sektor unggulan diprioritaskan pada pembangunan kedaulatan pangan, pembangunan kemaritiman dan kelautan, pembangunan kedaulatan energy, pembangunan pariwisata, percepatan pertumbuhan industry dan kawasan ekonomi (KEK)</p>	<p>1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, difokuskan pada:</p> <p>a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui pengembangan bibit unggul bersertifikat tahan perubahan iklim dan OPT, pengembangan induk dan benih ikan unggul, pengembangan pakan ikan mandiri/pakan lokal, rekayasa dan pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan; pendataan petani dan pengendalian distribusi pupuk bersubsidi; menjamin ketersediaan BBM bersubsidi untuk nelayan; pengendalian hama terpadu; pengendalian alih fungsi lahan persawahan/pertanian; peningkatan populasi ternak dengan penyediaan bibit unggul dan pencegahan pemotongan betina produktif; pemanfaatan lahan hutan dibawah tegakan;</p>	<p>E. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri</p> <p>3. Ketahanan Pangan</p>	<p>12. Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.</p>

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2017	Prioritas Daerah Tahun 2017
	<p>pembangunan dan peningkatan sarpras pelabuhan perikanan; pengembangan alat tangkap ikan ramah lingkungan;</p> <p>b. Peningkatan dan produktivitas kedelai antara lain melalui fasilitasi sarana produksi, optimalisasi pemanfaatan lahan dan peningkatan kapasitas petani dengan pelatihan;</p> <p>c. Peningkatan kualitas mutu dan SDM IKM garam; dan perbaikan sistem penyimpanan dan pendistribusian garam rakyat;</p> <p>d. Peningkatan daya saing produk pangan lokal melalui pengembangan sertifikasi pangan organik, Prima 3 serta penyediaan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;</p> <p>e. Revitalisasi Balai Perbenihan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;</p> <p>f. Peningkatan diversifikasi, distribusi dan aksesibilitas pangan melalui pengembangan pemanfaatan pekarangan; pengembangan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal; penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan masyarakat, pengembangan lumbung pangan masyarakat, peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat serta pengembangan cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>g. Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, akses teknologi, sumber-sumber pembiayaan, informasi harga dan akses pasar;</p> <p>h. Peningkatan ketersediaan air baku utamanya</p>		

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2017	Prioritas Daerah Tahun 2017
	<p>dengan memperbanyak pembangunan embung/tambungan air sebagai bagian dari “program pembangunan 1.000 embung” serta mendorong dukungan Nasional, Kabupaten/kota dan masyarakat/ swasta terhadap program tersebut;</p> <p>i. Peningkatan kondisi jaringan irigasi yang tersinkronisasi dengan Kabupaten/kawasan utama penghasil padi dan sawah LP2B serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat;</p> <p>j. Peningkatan pelayanan jaringan listrik melalui pembangunan jaringan listrik perdesaan, EBT, sambungan listrik murah, fasilitasi perijinan dan jaringan pelayanan dan akses listrik kepada PLN, fasilitasi dukungan pembangunan PLTU Batang dan Cilacap serta mendorong upaya-upaya untuk hemat energi; serta optimalisasi pemanfaatan potensi pertambangan melalui penerapan good mining practice;</p>		
	<p>4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran, difokuskan pada:</p> <p>a. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal melalui Pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan Koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas</p>	<p>F. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri</p> <p>1. Industri Perdagangan</p> <p>2. Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan</p> <p>G. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan;</p>	<p>13. Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS</p>

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2017	Prioritas Daerah Tahun 2017
	<p>sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis, magang serta PKL; serta perluasan pangsa pasar bagi produk koperasi dan UMKM dengan pameran dan promosi;</p> <p>b. Pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja;</p> <p>c. Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal;</p> <p>d. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi di Jawa Tengah dengan pemberian kemudahan perizinan melalui PTSP, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi Jawa Tengah;</p> <p>e. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; perbaikan iklim serta penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan; serta penegakkan norma dan perlindungan ketenagakerjaan;</p> <p>f. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas</p>	<p>1. Kebudayaan</p> <p>2. Pariwisata</p>	<p>14. Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.</p>

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2017	Prioritas Daerah Tahun 2017
	SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata;		
<p>III. Pemerataan dan kewilayahan meliputi pemerataan antar kelompok pendapatan, reformasi agraria, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, pembangunan konktivitas nasional</p>	<p>5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan fokus pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan menuju Jawa Tengah bebas lubang dengan ruas tuntas utamanya pada ruas jalan provinsi eks alih status dari jalan kewenangan kabupaten/kota; b. Penanganan infrastruktur mendukung pengembangan wilayah (kabupaten yang tingkat ekonominya di bawah rata-rata provinsi) serta penghubung pusat kegiatan wilayah melalui peningkatan jalan penghubung Pantura-Pansela, jalur alternatif pantura, serta kawasan perbatasan antar provinsi; c. Penanganan infrastruktur pendukung pariwisata utamanya melalui peningkatan jalan dan perlengkapannya (Kawasan Dieng, Solo-Selo Borobudur, Sangiran, Curugsewu, Candi Gedongsongo, Agro Wisata Bandungan, Bledug Kuwu, Baturaden), serta peningkatan pelayanan transportasi (penyelesaian pengembangan Bandara A. Yani, Bandara Dewandaru, Bandara Tunggul Wulung, Bandara Wirasaba, Pelabuhan Kendal, Pelabuhan Karimunjawa); d. Penanganan infrastruktur pendukung pengurangan kemiskinan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi melalui peningkatan 	<p>H. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi).</p> <p>4.Pemerataan Pembangunan</p> <p>I. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan sampah 	<p>Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan</p>

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2017	Prioritas Daerah Tahun 2017
	<p>aksesibilitas, serta peningkatan cakupan akses aman air minum dan sanitasi;</p> <p>e. Memfasilitasi percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pembangunan infrastruktur strategis di Jawa Tengah diantaranya Jalan Tol (Bawen-Solo, Pejagan-Semarang); JJLS; Bandara Internasional A. Yani Semarang; Pelabuhan Tanjung Emas; Waduk (Logung, Pidekso, Gondang, Kuningan); DI Slinga Purbalingga; Reaktivasi KA; Jalan Nasional (antara lain Pelebaran Klampok - Banjarnegara, Wangon-Temanggung, Tegal - Purwokerto);</p> <p>f. Peningkatan penanganan banjir pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali-Comal utamanya di S. Bodri, Kendal, Blukar, Damar, Bulanan, Meduri, Bremsi, Pemali, Comal serta mendorong pada Wilayah Sungai kewenangan Pusat utamanya di Sungai Bengawan Solo, BKT, Serang, Juwana, Lusi, Wulan, Kabuyutan, Cisanggarung, Gelis, Piji, Logung, Mangkang, progo, Wawar, Tipar, Serayu, Citanduy, Cibereum, Cikonde, Luk Ulo dan sabuk pantai di wilayah Pantura;</p> <p>g. Rehabilitasi untuk menurunkan luas lahan kritis serta konservasi DAS dengan penanaman vegetatif dan sipil teknis;</p> <p>h. Menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah melalui Program Penilaian Kinerja Perusahaan dan Program Kali Bersih, Pembangunan IPAL di sentra-sentra IKM dan Peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM;</p> <p>i. Peningkatan mitigasi dan penanganan pasca</p>		

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2017	Prioritas Daerah Tahun 2017
	<p>bencana melalui Peningkatan dan pemeliharaan saluran air; Penangan darurat pasca banjir/longsor;</p> <p>j. Percepatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPARegional);</p>		
	<p>2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, petani, dan nelayan, difokuskan pada:</p> <p>a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, antara lain dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian jaminan perlindungan sosial bagi kepala rumah tangga non produktif (penyandang disabilitas dan penderita penyakit kronis), fokus pada kepala rumah tangga yang belum mendapatkan program nasional; 2) Pola sharing program dan pendanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) Akses layanan pendidikan melalui pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan pola sharing yaitu Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan Menengah dan Khusus, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pendidikan Dasar; b) Akses kesehatan melalui Jamkesda/pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN; 	<p>J. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar dengan fokus pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Penurunan Angka kemiskinan 6. Pengurangan pengangguran dan penciptaan lagan kerja 7. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan 8. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan <p>K. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Perdagangan 2. Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan 3. Ketahanan Pangan 	<p>15. Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS</p>

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2017	Prioritas Daerah Tahun 2017
	<p>c) Stimulan peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat miskin meliputi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);</p> <p>3) Peningkatan pemenuhan kecukupan pangan, akses pelayanan dan infrastruktur dasar, diutamakan pada Kabupaten/Kecamatan/Desa dengan tingkat kemiskinan tinggi;</p> <p>4) Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang serta fasilitasi penyelenggaraan pasar murah menjelang lebaran;</p> <p>5) Fasilitasi pemenuhan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan;</p> <p>6) Pemenuhan layanan kebutuhan dasar PMKS yang tidak produktif dengan pelibatan Pemerintah Daerah, Dasa Wisma (Dawis) serta Dunia Usaha dan Industri (DUDI) didukung dengan data pemetaan dan penyebaran PMKS;</p> <p>7) Peningkatan pelayanan adminduk bagi kelompok miskin melalui unit layanan penduduk miskin sebagai upaya mempermudah dalam mendapatkan layanan dasar;</p> <p>8) Peningkatan kesejahteraan pekerja dengan fasilitasi pembangunan perumahan layak huni dan murah bagi pekerja serta penyediaan jaminan sosial;</p> <p>b. Peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat miskin antara lain:</p>		

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2017	Prioritas Daerah Tahun 2017
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kemampuan berusaha dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal; pembangunan karakter dan jiwa berusaha bagi pemuda; jaminan dan kepastian usaha serta kepastian harga jual/produk; pengembangan Usaha Kecil Menengah; peningkatan kewirausahaan perempuan melalui optimalisasi kelompok Dawis; dan pelibatan DUDI untuk menumbuhkan kesempatan berusaha; 2) Membangun sinergitas dengan dunia usaha, masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penanganan kemiskinan; 3) Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dengan pengembangan kewirausahaan; peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dengan peningkatan prasarana, sarana, kurikulum dan profesionalisme tenaga pelatih dan instruktur BLK; 4) Fasilitasi pelaksanaan transmigrasi untuk pemerataan penduduk; <ol style="list-style-type: none"> c. Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, petani, dan nelayan, antara lain dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah; 2) Fasilitasi perluasan akses permodalan, pasar dan jaminan harga; 3) Fasilitasi kepengurusan sertifikat hak atas tanah kerjasama dengan BPN sehingga bisa digunakan sebagai agunan pengajuan kredit 		

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2017	Prioritas Daerah Tahun 2017
	usaha; 4) Peningkatan keterampilan petani dan nelayan;		
IV Pembangunan politik hukum pertahanan dan keamanan diprioritaskan pada : reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum, Stabilitas keamanan dan ketertiban, Konsolidasi demokrasi dan Efektifitas Demokrasi, Reformasi Birokrasi	6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus pada: a. Perbaikan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu: 1) Organisasi , meliputi penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, fasilitasi usulan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dan UPT, dan penataan Lembaga Non Struktural; 2) Tatalaksana, meliputi penyusunan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance melalui penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi; penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan publik; 3) Peraturan perundang-undangan, meliputi regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, melalui harmonisasi peraturan perundangan daerah yang disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat diikuti dengan penindakan pelanggaran peraturan daerah; 4) Sumber daya manusia aparatur, meliputi	C. Penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 2. Pengelolaan Aset Daerah 3. Peningkatan Kualitas Layanan Publik 4. Penataan Organisasi 5. Penataan Tatalaksana 6. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 7. Penguatan Pengawasan 8. Penguatan Akuntabilitas Kinerja L. Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah	. Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya 3. Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur 4. Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat 5. Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2017	Prioritas Daerah Tahun 2017
	<p>penciptaan aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Kondisi tersebut ditempuh melalui penghitungan kebutuhan pegawai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja, penyusunan peta jabatan, penetapan nomenklatur jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu/khusus, pengadaan pegawai pada formasi tertentu dengan seleksi/tes Computer Assisted Test (CAT) dan sistem pembinaan karier yang terbuka;</p> <p>5) Pengawasan, meliputi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui Implementasi aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah; penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pembangunan Zona Integritas, transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah, serta penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media;</p> <p>6) Akuntabilitas, melalui peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>7) Pelayanan publik, meliputi pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat</p>		

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2017	Prioritas Daerah Tahun 2017
	<p>melalui peningkatan kualitas pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan pasti; penanganan pengaduan masyarakat; penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sertifikasi ISO 9001:2008;</p> <p>8) Pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultural set), meliputi birokrasi yang memiliki integritas dan kinerja tinggi melalui peningkatan perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik dan pengembangan budaya kerja;</p> <p>b. Pemantapan kondusivitas wilayah terhadap potensi gangguan keamanan dan antisipasi pasca pelaksanaan Pilkada;</p> <p>c. Penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan aset daerah;</p> <p>d. Pelestarian nilai-nilai luhur Pancasila melalui pengembangan seni, budaya daerah dan olahraga serta menghidupkan kembali budaya gotong royong dan handarbeni;</p> <p>e. Penataan administrasi kependudukan guna peningkatan kualitas penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat;</p> <p>f. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana dan pengembangan layanan perpustakaan daerah, serta pengembangan jaringan kemitraan.</p>		
V. Pembangunan Ekonomi diprioritaskan pada Perbaikan iklim investasi	4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan	M. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya	4. Pengembangan manajemen sistem data dan informasi

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2017	Prioritas Daerah Tahun 2017
<p>dan iklim usaha, peningkatan ekspor non migas, Reformasi Fiskal</p>	<p>pengangguran, difokuskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal melalui Pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan Koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis, magang serta PKL; serta perluasan pangsa pasar bagi produk koperasi dan UMKM dengan pameran dan promosi; b. Pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja; c. Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal; d. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi di Jawa Tengah dengan pemberian kemudahan perizinan melalui PTSP, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi Jawa Tengah; e. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; perbaikan iklim serta penguatan 	<p>lokal;</p> <ol style="list-style-type: none"> 16. Penguatan daya saing dan kemandirian daerah 17. Penciptaan iklim yang kondusif untuk investasi 18. Smart City 19. Peningkatan kreativitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 20. Branding Kota Magelang 	<p>secara terpadu dan akurat</p> <ol style="list-style-type: none"> 21. Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi teknologi informasi 1. Meningkatkan akses informasi, komunikasi, partisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota 22. Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2017	Prioritas Daerah Tahun 2017
	<p>hubungan industrial ketenagakerjaan; serta penegakkan norma dan perlindungan ketenagakerjaan;</p> <p>f. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata;</p>		

4.2.1.3.5 Koneksitas Sasaran, Program Prioritas Pembangunan Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Jika dilihat dari Sasaran dan Program Prioritas Kota Magelang terhadap dukungan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2017 dan Prioritas Provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.6

KONEKSITAS PRIORITAS SASARAN, PROGRAM KOTA MAGELANG TERHADAP PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG		
1.1	Terwujudnya aparatur sipil negara yang 51ndemic51ial51 dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	Persentase pegawai berkinerja baik	97%	1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Persentase kehadiran ASN	97%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
						2	Persentase pelanggaran disiplin ASN	0,21%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian		
				2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	5%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
						2	Persentase ASN yang dijatuhi hukuman	0,10%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian		
				1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase unit kerja yang menerapkan finger print	60%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang dan Kepegawaian	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan:				Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
							- Pendidikan S1	46%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian		
							- Pendidikan S2	46%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian		
						2	Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKD	46%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG		
					Program Pendidikan Kedinasan	1	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	94%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
						2	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	80%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian		
				3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah	1	Persentase ASN yang mengikuti diklat pra jabatan	80%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
						2	Persentase ASN yang mengikuti diklat fungsional	80%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian		
				1	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas	1	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi	80%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	100%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah	1	Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan karakter	96%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
		Capaian SPM Kota Magelang	60%	1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	persentase SPM yang mencapai target nasional	65%	Penunjang	PD Penunjang Setda Bagian Tata Organisasi/ Tapem	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG		
		Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	48%	1	Optimalisasi sistem persandian daerah	1	Ketersediaan SOP persandian	50%	Persandian	PD Urusan Persandian	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur		
						2	Tingkat kapasitas SDM persandian	100%	Persandian	PD Urusan Persandian				
						3	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SOP Persandian	60%	Persandian	PD Urusan Persandian				
						1	Program peningkatan kualitas pelayanan arsip	1	Cakupan pelayanan akses arsip	67%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
								2	Tingkat Kompetensi SDM Pengelola Kearsipan	39%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan		
						1	Program Penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	1	persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
						1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarpras Kearsipan	1	Persentase sarpras arsip yang terpelihara	0,4	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
						1	Penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	1	Persentase Penyelamatan Arsip	0,4	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
						1	Peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan	1	Cakupan ijin penggunaan arsip	90%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	1	Publikasi informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Persentase penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	95%	Penunjang pemerintahan	PD Penunjang Pemerintahan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
		Indeks EKPPD	3	2	Penilaian kinerja penyelenggaraan urusan	2	Persentase penyelenggaraan urusan berkinerja sangat tinggi	90%	Penunjang pemerintahan	PD Penunjang Pemerintahan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
		Hasil implementasi SAKIP	CC (54,00)	1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	Nilai hasil evaluasi LKJip SKPD	CC	Penunjang Pemerintahan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
		Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan	45%	1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Penurunan temuan kasus LKPD	2	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
		Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Prosentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	81%	Penunjang Keuangan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	2	Tingkat kapasitas pemahaman tentang SAKIP	85%	Penunjang Pemerintahan	PD Penunjang Setda Bagian Tata Organisasi	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian	1	Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	80%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG	
				pelaksanaan kebijakan KDH							
			2	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1	Prosentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	75%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
			3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	rasio laporan APBD, DAK, Bankeu tepat waktu	85%		PD Penunjang Setda Bagian Pembangunan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
			1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase LKJIP SKPD dengan nilai baik	CC	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
			1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	Prosentase jumlah SKPD yang di review LkJP	35%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
					2	Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	30%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan		
			1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	60%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1 Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	90%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
					2 Temuan ketidakpatuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	60%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan		
					3 Penyelesaian TLHP BPK meningkat	90%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan		
					4 Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	90%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan		
				1 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1 Level APIP Kota Magelang menjadi level 3	Level 2	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
					2 Persentase APIP yang bersertifikat Kompetensi meningkat	60%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan		
					3 Persentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat	65%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan		
				1 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	1 Cakupan pemeriksaan	80%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG		
				1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	Persentase implementasi SPIP	72%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
						2	Persentase Temuan Administrasi (SPI) hasil Pemeriksaan APIP menurun	80%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan		
						3	Persentase Temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksanaan APIP menurun	60%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan		
				1	Program Penataan dan Penyempumaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	1	Persentase Aparat SPIP aktif	60%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
						2	Persentase Zona Integritas yang dibentuk	10%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan		
1.3	Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan 57ndemi yang responsif	Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	48,48%	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Nilai survey kepuasan pengguna layanan PD	90	Penunjang	PD Penunjang Setda Bagian Organisasi	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				3		2	Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	56%	Penunjang/ Fungsi Lain	Fungsi lain :PTSP	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1 Tingkat ketersediaan pokok-pokok pikiran Dewan	50%	Penunjang	PD Penunjang Setwan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				2 Program Pengembangan Data/ Informasi	1 Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	70%	Penunjang	PD Penunjang Setwan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				3 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	1 Persentase Penyebaran Informasi	70%	Penunjang	PD Penunjang Setwan	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1 Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1 Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	Penunjang	PD Penunjang Setda Bagian Umum	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1 Program Penataan Administrasi Kependudukan	1 Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%	Adminduk dan Capil	PD Urusan Adminduk dan Capil	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					Cakupan penduduk memiliki KIA	85%				
					2 Persentase implementasi SOP dalam pelayanan administrasi kependudukan	15%	Adminduk dan Capil	PD Urusan Adminduk dan Capil		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
1.4	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik			1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 penduduk	930	Admindak dan Capil	PD Urusan Admindak dan Capil	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				2	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Persentase kepemilikan KK	100%	Admindak dan Capil	PD Urusan Admindak dan Capil	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				3	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Persentase kepemilikan Akta Kematian	45%	Admindak dan Capil	PD Urusan Admindak dan Capil	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
		Persentase PD menerapkan e-Gov	80%	1	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Bidang Teknologi Informatika	1	Interoperabilitas antar system informasi	0	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
		Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	60%									
				1	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Bidang Teknologi Informatika	1	Cakupan WAN (Wide Area Network) kota	30%	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				1	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Bidang Teknologi Informatika	1	Cakupan data yang terpusat dan terkendali	60%	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
						2	Persentase PD yang menerapkan e-government	100%	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo		
		2	Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	1	Peningkatan SDM bidang kominfo	80%	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG	
						2	Sumber daya manusia pada PD yang memiliki kecakapan di bidang teknologi informasi	80%	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo		
				1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	0,41	Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1	Perbaikan sistem administrasi kearsipan	1	Persentase implementasi e-arsip	34%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
1.5	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	90%	1	Program perencanaan Pembangunan Daerah	1	Tingkat Konsistensi Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	100	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
						2	Persentase Pokok Pikiran DPRD yang diakomodir	70	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan		
		Persentase Publikasi data dan 60ndemic60 i sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan	60%			3	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	76%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		n pembangunan								
				2 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1 cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				3 Perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				4 Perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG		
1.6	Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan 62ndem daerah			5	Perencanaan bidanag fisik prasarana	1	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang Fisik prasarana	100%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				6.	Program Penguatan Inovasi Daerah	1	Cakupan Penguatan SIDA	40%	Penelitian dan Pengembangan	PD Urusan Penelitian dan Pengembangan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1	Program pengembangan data/informasi/62ndemic62i daerah	1	Persentase pemenuhan data	90%	Statistik	PD Urusan Statistik	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1	cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
		Derajat Otonomi Fiskal	25,86%	1	Peningkatan PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah	1	Rasio pajak daerah terhadap PAD	13,48%	Penunjang	PD Penunjang Keuangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
						2	Rasio retribusi daerah terhadap PAD	4,20%	Penunjang	PD Penunjang Keuangan		
		Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	73,66%	1	Program Peningkatan kinerja dan pengembangan pengelolaan perusda	1	Rasio bagi hasil laba BUMD terhadap PAD	2,50%	Penunjang	PD Penunjang Setda Bagian Perekonomian	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1	Persentase pertumbuhan PAD	18,44%	Penunjang	PD penunjang Keuangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah kota Magelang	60%		PD Penunjang Setda Bagian Perlengkapan	Pembangunan Ekonomi	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
						2	Barang milik daerah yang didayagunakan	100%		PD Penunjang Setda Bagian Perlengkapan		
						3	Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu	50%		PD Penunjang Setda Bagian Perlengkapan		
						4	Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu	100%		PD Penunjang Setda Bagian Perlengkapan		
1.7	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	60%	1	Program perencanaan Pembangunan Daerah	1	Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	72	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
		Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	58,62			2	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	35	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Persentase perkembangan kerjasama daerah	3,06%	1 Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	1 Persentase krenova masyarakat yang berkualitas	11%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					Presentase krenova OPD yang berkualitas	4%				
				2 Program Penelitian dan Pengkajian	1 Persentase hasil riset/kajian yang ditidakanjuti	30%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				3 Program Pengembangan dan Penerapan IPTEK	1 Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK	10%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan		
				4 Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	1 Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	40%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				5 Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan	1 Cakupan Monev dan/atau Pengendalian Riset dan/atau Kebijakan	10%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				6 Program Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	1 Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	0%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan		
				7 Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi	1 Persentase Produk Teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI	7%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG	
1.8	Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan			8	Program Pendokumentasian dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	1	Cakupan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	50%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan			
				1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Jumlah KIM per kelurahan	1	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Informasi dan Komunikasi	Pemerataan dan Kewilayahan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM	
				1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Pertumbuhan jumlah ruang media yang digunakan untuk interaksi	6	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Informasi dan Komunikasi			
											Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	
				1	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	1	Cakupan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri	65%	Penunjang Pemerintahan umum	PD Penunjang Pemerintah umum	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi	
				2	Program Kerjasama Pembangunan	1	Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	2	Penunjang Perencanaan Pembangunan	PD Penunjang Perencanaan Pembangunan	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur	
			Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan	3,06%	1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1	Cakupan LPM berprestasi	41%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
							2	Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	24%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG		
		bersama pemerintah		2	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1	Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	87,50%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				4	Program Infrastruktur Pedesaan	1	Pendampingan fisik dan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				5	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	1	PKK aktif	100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	1	Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	29%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				2	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan keuangan desa	1	Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
1.9	Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional	Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional	6	1	Peningkatan peran serta kepemudaan	1	Prosentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	94,00%	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		a. Regional	4		2 Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
		b. Nasional	2		3 Prosentase pengangguran pemuda	6,65%	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
		c. International	0	1 Program pengembangan keserasian dan kebijakan pemuda	1 Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	79%	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
		Jumlah prestasi Olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	17	2 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup bagi pemuda	1 Persentase kelompok wirausaha pemuda	50	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
		a. Regional	10	1 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	1 Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	4	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
		b. Nasional	5		2 Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	65%	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
		c. International	2	2 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	1 Peningkatan cabang olahraga unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					3 Jumlah klub olahraga	183	Kepemudaan dan Olah	PD Urusan Kepemudaan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
							Raga	dan Olah Raga		
					4 Jumlah organisasi olah raga	35	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
Misi 2 : Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan										
2.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	Rata-rata lama sekolah	2	1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1 APM SD/SDLB/MI/Paket A	98,61%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 APK SD/SDLB/MI/Paket A	112%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					3 APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	76,00%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					4 APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	76,00%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					5 Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12	0,1361111	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					6 Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15	0,2430556	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					7 Rasio guru SD terhadap murid SD	1:16	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					8 Rasio guru SMP terhadap murid SMP	1:14	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
					2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,18	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
					3	Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikdas 9 Tahun	0,002	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
					4	Angka Melanjutkan SD ke SMP	150%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
		Persentase sekolah berstandar nasional			5	Angka Melanjutkan SMP ke SMA	155%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
	a. SD		2		6	Persentase sekolah yang menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai 69ndemic69i dan pendidikan karakter bagi siswa	60%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
	b. SMP		70%		7	Penurunan angka kenakalan pelajar	46 pelajar	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
	Angka Melek Huruf		70%		8	Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa	1	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Persentase kunjungan perpustakaan	72,52%		9 Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan	80%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
		Jumlah kunjungan perpustakaan	96.200		10 Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	85%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					11 Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design		Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
				1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	1 APK PAUD	65%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	51%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
				1 Program Pendidikan Non Formal	1 Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96,67%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					3 Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG	
					4	Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					5	Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	10,00%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
			1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	35,75%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
					1	Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	14,23%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					1	Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	86%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					1	Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	54,15%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					1	Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,20%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					1	Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	67,97%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
			1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	88%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
					2	Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	96%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
					3	Prosentase sekolah melaksanakan CBT SD/MI	30%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					4 Prosentase sekolah melaksanakan CBT SMP/MTs	30%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
				1 Program Pendidikan Berkelanjutan	1 Persentase 72ndemic pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar	66,34%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
				1 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1 Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	40%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1 Persentase peningkatan judul buku	2,57	Perpustakaan	PD Urusan Perpustakaan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Persentase peningkatan jumlah buku	2,64	Perpustakaan	PD Urusan Perpustakaan		
					3 Prosentase SDM pengelola perpustakaan yang berkompeten	47,39	Perpustakaan	PD Urusan Perpustakaan		
					4 Presentase perpustakaan aktif	18,96	Perpustakaan	PD Urusan Perpustakaan		
					5 Cakupan pelayanan melalui e-Library	1%	Perpustakaan	PD Urusan Perpustakaan		
					6 Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	8,33%	Perpustakaan	PD Urusan Perpustakaan		
					7 Jumlah kunjungan ke Desa Buku	2.000	Perpustakaan	PD Urusan Perpustakaan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						8 Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar	80%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
2.2	Meningkatnya kualitas sarana, layanan dan derajat kesehatan masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	7 bh (54%)	1	Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD	1 Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan	A	Kesehatan	RSU Tidar	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				2	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1 Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Terakreditasi	40%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
						2 Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	75%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
		Angka Harapan Hidup	76,71	4	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1 Cakupan Puskesmas Ramah Anak	12%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
		AKI/ 1.000 KH	126	5	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	1 Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	12%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
		AKB/ 1.000 KH	14,5	6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
		AKABA	0,155	1	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4	95%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31			2 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Angka Kesakitan DBD	0,31		3 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	92%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
		Angka Prevalensi Kasus TB	<105		4 Cakupan Pelayanan Nifas	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
		Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0,05%	2 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1 Cakupan 74ndemic74 dengan komplikasi yang ditangani	85%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
		Rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	98%		2 Cakupan Kunjungan Bayi	96%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
					3 Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
				3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	100	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 cakupan balita gizi buruk mendapar perawatan	100	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
					3 Prevalensi Gizi Buruk	<0.31	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				4 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular	1 Penemuan dan penanganan Penderita DBD	100	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Angka Kesakitan DBD	<50	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
				5 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular	1 Angka Prevalensi (Case Notification Rate = CDR) TB	90	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Angka Keberhasilan Pengobatan (Treatment Success Rate = TSR) TB	90%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
					3 Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
					4 Prevalensi Hiv dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
				6 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1 Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
					3 Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarkes strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	15%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				7 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1 Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				8 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	1 Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan	86%			Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				9 Program Pengawasan Obat dan Makanan	1 Cakupan pengawasan obat dan makanan	68%			Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				10 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	1 Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	80%			Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				11 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1 Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	97%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				12 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular	1 Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				13 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG	
2.3	Meningkatnya kontribusi sektor usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	16,15%	1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	1	prosentase peningkatan kualitas pelaku UKM	Wajib Koperasi UKM	PD Urusan Koperasi dan UKM	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan	
				1	program peningkatan kemampuan teknologi industri	1	Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi teknologi tepat guna	Pilihan – perindustrian	PD Urusan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan	
				1	program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1	Prosentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	3%	Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				1	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	1	Prosentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	10%	Wajib – Koperasi UKM	PD Urusan Koperasi UKM	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				1	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	1	Prosentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan	10%	Wajib – Koperasi UKM	PD Urusan Koperasi UKM	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				1	Program pengelolaan pasar	1	persentase pasar tradisional yang dikelola	75%	Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
						2	Persentase penurunan kejadian di lingkungan pasar		Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						3 Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional	10%	Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan		
						4 Cakupan Pedagang Pasar yang dibina	8%	Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan		
				1	Program pembinaan PKL dan asongan	1 Cakupan PKL yang dibina	8%	Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
						2 Jumlah shelter PKL yang dikelola		Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan		
2.4	Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung kota magelang modern	Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan menuju standar inklusivitas (<i>universal design</i>)	16,15%	1	Program wajar didas 9 tahun	1 Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	20%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan menuju standar inklusivitas (<i>universal design</i>)	10%	1 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1 Persentase Sarana Prasarana Kesehatan memenuhi universal design	10%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
		Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar inklusivitas (<i>universal design</i>)	20%	1 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Persentase Sarana Prasarana Perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang yang memenuhi universal design	20%	Perdagangan	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
2.5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Air	75,65	1 Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1 Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	20%	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				1 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1 Persentase Sumber Daya Alam yang terkonservasi	90%	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
		Indeks Pencemaran Udara	61,8	1 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup	1 Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	6 buah	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Indeks Tutupan Vegetasi	48,55	1	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	1 Jumlah Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin	100%	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
		Volume sampah yang dibuang ke TPSA	158,7								
				1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1 Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya	3,3	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1 Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	88%	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				1	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1 Persentase rumah sehat	84%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1 Luas lahan pertanian organik	0,94	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
				2		Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	45%	Pertanian	PD Urusan Pertanian		
				1	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	1 Jumlah pelaku usaha peternakan 80ndemic:				Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
				a. Peternak ayam buras/ ayam broiler		1	Pertanian	PD Urusan Pertanian			
				b. Peternak kelinci		1	Pertanian	PD Urusan Pertanian			

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					c. Peternak kambing/domba	1	Pertanian	PD Urusan Pertanian		
					d. Rasio peternak terlatih	85%	Pertanian	PD Urusan Pertanian		
				2 Program pengembangan system penyuluhan perikanan	1 Luas lahan perikanan organik	0,2	Kelautan dan Perikanan	PD Urusan Kelautan dan Perikanan	Pemerataan dan Kewilayahan	Ketahanan Pangan dan Energi
2.6	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau		1 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1 Luas RTH Kota	18%	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
		a. Privat	10							
		b. Publik	18,37							
2.7	Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana	Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	18,37	1 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1 Cakupan masyarakat paham mitigasi bencana	25%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas dan PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
		Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	5,80%		2 Prosentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	37.5%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas dan PD Penunjang Setda Bagian Kesra		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						3 cakupan peningkatan penanggulangan bencana	25%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas		
						4 Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	30%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas		
						1 Cakupan penanganan korban bencana	95%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas		
				1	Program penataan peraturan perundangan	1 Ketersediaan kebijakan terkait penanggulangan bencana	100%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				2	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1 Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran	100%	Perumahan dan Pemukiman (bencana alam)	PD Urusan Perumahan dan Permukiman	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
						2 Persentase tingkat waktu tanggap response	100%	Perumahan dan Pemukiman (bencana alam)	PD Urusan Perumahan dan Permukiman		
2.8	Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	24%	1	Program Perencanaan Tata Ruang	1 Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL)	0,08	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PD Urusan PU dan Tata Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
						2 Prosentase perijinan yang sesuai Tata Ruang	1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
								Ruang		
					3 Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	0,15	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
					4 Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	0,24	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
					5 Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri	0,03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
					6 Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB	30%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			2	Program Pemanfaatan Ruang	1 Persentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas untuk semua	40%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				3	Program pengembangan wilayah perbatasan	1	Persentase sarana prasarana wilayah perbatasan dalam kondisi baik	90%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat												
3.1	Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat	Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12%	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	942 m	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				1	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1	Prosentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	86%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
						2	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	86%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Prosentase panjang trotoar dalam kondisi baik	64,39%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				1	Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	1	Rasio ketercukupan PJU	62%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sektor Unggulan	Ketahanan Pangan dan Energi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG		
				1	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1	prosentase panjang drainase dalam kondisi baik	85%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
						2	jumlah shipon yang dibangun	6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				1	Program pembangunan jalan dan jembatan	1	Prosentase panjang trotoar dalam kondisi baik	64,39%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				2	Program rehabilitasi/peningkatan saluran drainase/gorong-gorong		prosentase panjang drainase dalam kondisi baik	85%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				1	Program pembinaan dan pengembangan bangunan gedung	1	Prosentase perencanaan pembangunan gedung yang layak fungsi	100%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				2	Program pengaturan jasa konstruksi	2	Prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas	40%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				3 Program pengawasan jasa konstruksi	1 Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	72%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
					1 Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi (meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu dan efisien)	25%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.2	Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	Tercapainya 100 – 0 - 100		1 Program Pengembangan Perumahan	1 Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
		a. Persentase jumlah KK yang terlayani air minum	92,30%							
		b. Rasio Luas kawasan kumuh	39,65 Ha	1 Program Pengelolaan Area Pemakaman	1 Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk	29,20%	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG		
		c. Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	3%	1	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1	Prosentase penduduk berakses air minum	92	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
		Prosentase RTLH	2,90%									
				1	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	1	Rasio Luas kawasan kumuh		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				1	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	88	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
						2	Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan	8	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
3.3	Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan	Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	8,25	1	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1	Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan umum	7,78	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
					2	Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi (ITS)	45%	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan			

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1 Program peningkatan pelayanan angkutan	1 jumlah arus penumpang angkutan umum	2.900.000	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan	Pemerataan dan Kewilayahan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk	5%	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
				2 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	1 Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	40%	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
					2 Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type c) yang tertata	1	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
					3 Rasio prasarana 88ndemi dengan kondisi baik	55%	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
					4 Tingkat pelayanan 88ndemi di tepi jalan umum	86	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
					5 Rasio prasarana 88ndemi dengan kondisi baik	55%	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
					6 Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)	17	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG		
				3	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasara dan fasilitas LLAJ	1	Jumlah prasaran dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	7	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
				4	Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan	7.936	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan	Pemerataan dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
						2	Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian	4	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
3.4	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Pertumbuhan investasi		1	Program penataan peraturan perundang-undangan	1	Jumlah review PERDA/ PERWAL	1	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
		a. Pertumbuhan nilai investasi PMA	5%			2	Jumlah RAPERDA/ RAPERWAL baru tentang investasi	0	Penunjang	PD Penunjang Setda Bagian Hukum		
		b. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	1	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	1	Jumlah kerjasama pemerintah dan investor	2	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal		
				2	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	1	Pertumbuhan nilai investasi PMA	5%	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal		
						2	Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15,00%	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal		
						3	Jumlah investor baru	164	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1 Implementasi pemanfaatan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik)	70%	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Implementasi SIPID (Sistim Informasi Potensi Investasi Daerah)	0	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal		
				2 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	1 Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	1 Jumlah wirausaha baru	75 UMKM	Koperasi dan UKM	PD Urusan Koperasi dan UKM	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
					2 Prosentase peningkatan kualitas pelaku usaha KUM	3%	Koperasi dan UKM	PD Urusan Koperasi dan UKM		
				1 Program pengembangan 90ndemic90 kecil dan menengah	1 Peningkatan daya saing IKM Formal	3,1%	Perindustria n	PD Urusan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				2 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1 Persentase koperasi aktif	93,25%	Perdagangan	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
					2 Persentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP	25%	Koperasi dan UKM	PD Urusan Koperasi dan UKM		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				3 program pengembangan sentra-sentra 91ndemic91 potensial	1 Jumlah sentra industri	11	Perindustrian	PD Urusan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				1 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	1 Jumlah IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP, HACCP, Produksi Bersih, ISO, GKM, SNI dll)	4,10%	Perindustrian	PD Urusan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				1 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1 Jumlah ekspor produk LN	US\$950,000	Perdagangan	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				1 program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1 Jumlah alat UTTP yang ditera	2.700	Perdagangan	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
				1 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1 Prosentase Petani yang melaksanakan GAP	5,88%	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
				3 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	1 Prosentase Petani yang melaksanakan GHP	1%	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
				4 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1 Rasio petani terlatih	85%	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
				1 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	1 Persentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi halal	1,82	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1 Program pelayanan kesehatan masyarakat veteriner	1 Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV	1,82%	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
				1 Program pengembangan budidaya perikanan	1 Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB	0	Kelautan dan Perikanan	PD Kelautan dan Perikanan	Pemerataan dan Kewilayahan	Ketahanan Pangan dan Energi
					2 Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB	30%	Kelautan dan Perikanan	PD Kelautan dan Perikanan		
				2 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1 Persentase unit pengolahan ikan yang telah bersertifikasi SKP	0	Kelautan dan Perikanan	PD Kelautan dan Perikanan	Pemerataan dan Kewilayahan	Ketahanan Pangan dan Energi
					2 Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	2	Kelautan dan Perikanan	PD Urusan Kelautan dan Perikanan		
				1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1 Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	4	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
3.5	Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang	75%	1 Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	1 Persentase krenova masyarakat yang berkualitas	11%	Penunjang	PD Penunjang Kelitbangan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Presentase krenova OPD yang berkualitas	4%	Penunjang	PD Penunjang Kelitbangan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG		
		dalam kondisi baik			3	Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti	30%	Penunjang	PD Penunjang Kelitbangan			
		Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	28%	2	Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
				3	Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah			Penunjang Sekretariat	PD Penunjang Setda Bagian Tapem	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan		
				4	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1	Persentase kawasan strategis yang terbangun	2 kawasan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	
				7	Program pembinaan PKL dan asongan		Cakupan PKL yang dibina	8%			Pembangunan Ekonomi	
						Jumlah shelter PKL yang dikelola	13				Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan	
3.6	Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	12.831	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	1	Jumlah regulasi ketahanan pangan	1	Pangan	PD Urusan Pangan	Pembangunan Sektor Unggulan	Ketahanan Pangan dan Energi
					2	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%)	92%	Pangan	PD Urusan Pangan			
						Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85	Pangan	PD Urusan Pangan			

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG			
					3	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	80%	Pangan	PD Urusan Pangan				
					2	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	1	Produksi tanaman pangan:				Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
								a. Padi	3201	Pertanian	PD Urusan Pertanian		
								b. Jagung	11				
								c. Ubi kayu	13,5				
					3	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1	Produksi hasil peternakan:		Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
								a. Daging Ruminansia	1.177.418				
								b. Daging Unggas	5.122.583				
								c. Telur	420.000				
								d. Susu	193.800				
					3	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1	Persentase hewan sehat	83	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
					4	Program pengembangan budidaya perikanan	1	Produksi hasil perikanan:		Kelautan dan Perikanan	PD Urusan Kelautan dan Perikanan	Pemerataan dan Kewilayahan	Ketahanan Pangan dan Energi
								a. Ikan	160,65	Kelautan dan Perikanan	PD Urusan Kelautan dan Perikanan		
3.7	Meningkatnya lapangan kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	65%	1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1	Persentase pencari Kerja ditempatkan	70%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja	Pemerataan dan Kewilayahan	Penguatan Potensi ekonomi	

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG	
										kerakyatan	
					2	Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan	60%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja		
					3	Pertumbuhan wirausaha baru	75 UMKM	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja		
					4	Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kompetensi	75%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja		
					5	Persentase Tenaga Kerja tersertifikasi BNSP	60%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja		
			2	Program Perlindungan pengembangan ketenagakerjaan	1	Cakupan tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial	20,00%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja	Pemerataan dan Kewilayahan	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
					2	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang bisa terselesaikan melalui perjanjian bersama	50%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja		
			1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1	Persentase (%) calon transmigrasi yang ditempatkan	100%	Transmigrasi	PD Urusan Transmigrasi	Pemerataan dan Kewilayahan	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
			2	Program Transmigrasi Regional	1	Persentase (%) masyarakat tersosialisasi program transmigrasi	100%	Transmigrasi	PD Urusan Transmigrasi	Pemerataan dan Kewilayahan	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG		
3.8	Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS	Persentase Penurunan PMKS	15%	1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	10,00%	Sosial	PD Urusan Sosial	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
				2	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	1	Persentase penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial	15%	Sosial	PD Urusan Sosial	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				3	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2	Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	20,00%	Sosial	PD Urusan Sosial	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
				4	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial	1	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA	70%	Sosial	PD Urusan Sosial	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
						2	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan	20%	Sosial	PD Urusan Sosial		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG	
					kesejahteraan sosial						
			4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100%	Sosial	PD Urusan Sosial	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
			1	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	1	Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	50%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
			2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1	Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	100%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Pembangunan Ekonomi	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
			3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial	3	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
			4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
3.9	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2	1 Program Keluarga Berencana	1 Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
				2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja	1 Persentase perempuan di bawah 19 tahun yang menjadi ibu dan atau melahirkan anak pertama	2%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
				3 Program pelayanan kontrasepsi	1 Cakupan peserta KB aktif	77,50%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
				4 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	1 Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	64%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
				5 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	1 Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	3%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
				6 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	1 Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)	77%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					2 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi (unmet need) 5%	5%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					3 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%)	77%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					4 Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)	88%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					5 Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					6 Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					7 Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30%	30%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					setiap tahun					
					8 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					9 Partisipasi laki-laki dalam ber-KB	10%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					10 Prosentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri	57%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					11 Prosentase peserta KB yang putus pakai (drop out)	13%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					12 Prosentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun	3%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG	
					13	Prosentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	88%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					14	Prosentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR)	95%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					15	Prosentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					16	Prosentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					17	Prosentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					18	Prosentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun	3%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG		
					19	Prosentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dai 35 tahun	2%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD yang menangani Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
					20	Prosentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD yang menangani Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
					21	Prosentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD yang menangani Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
					22	Prosentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD yang menangani Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
3.10	Menurunnya kesenjangan gender	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	17%	1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	1	Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				2	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	17%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG		
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	20%		2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	20%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak			
		Rasio KDRT	20%		3	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak			
				2	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	1	Rasio KDRT	0,055%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
						2	Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		
						3	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					Anak					
					4 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		
					5 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		
					6 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG	
						7	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		
						8	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		
Misi 4 : Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang												
4.1	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkandan situs cagar budaya yang dilestarikan	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	20%	1	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	1	Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	223	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
		Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	5	2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1	Prosentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	14,86%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
						2	Jumlah festival seni dan budaya.	11	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG		
				3	Program Pengembangan Nilai Budaya	1	Jumlah gedung kesenian	1	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
						2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	11	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						3	Cakupan kajian seni 50%	75%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						4	Cakupan fasilitas seni 30%	35%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						5	Cakupan gelar seni 75%	100%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						6	Misi kesenian 100%	38%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						7	Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	100%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						8	Cakupan tempat 100%	100%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						9	Cakupan organisasi 34%	100%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
				1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
						2	Jumlah pengunjung museum	5150	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						3	Jumlah koleksi museum	11	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
				4.2	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial	Jumlah Wisatawan		1	Program pengembangan destinasi pariwisata	1	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	1136435

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		a. Nusantara	1.136.435			2 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	5185	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata		
		b. Mancanegara	5.185			3 Jumlah Destinasi Wisata Unggulan	3	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata		
				1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Lama Kunjungan Wisatawan	2-3 hari	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata	Pembangunan Sektor Unggulan	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
						2 Persentase TIC yang representatif	0	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata		
				2	Program pengembangan kemitraan	1 Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	9	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata	Pembangunan Sektor Unggulan	Penguatan Potensi ekonomi kerakyatan
Misi 5 : Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani											
5.1	Terbentuknya karakter 107ndemic107i masyarakat landasan moral dan etika pembangunan	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	3%	1	Program penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Antar Umat Beragama	1 Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial	1	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas dan PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
				2	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	1 jumlah kegiatan hari besar keagamaan tingkat kota	53,33	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
				3	Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa	Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah		Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					a. Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan				
					b. Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
			1	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	1 Jumlah Kebijakan / peraturan tentang pembiasaan pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat	0	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
			1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 108ndemic108 Tahun	1 Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan	0	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Adanya kurikulum muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter bagi siswa	1	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
			1	Program Peningkatan Mutu pendidikan dasar Sembilan tahun	1 Prosestase guru yang mengkikuti pelatihan spiritual teaching	40%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
										SDM
			1	Program Peningkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Prosentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi	60%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
			1	Program pendidikan Non Formal	1 Persentase Sekolah yang menerapkan kegiatan Bina Suasana yang menumbuhkan nilai religious dan pendidikan karakter bagi siswa	60%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
			1	Program pendidikan Non Formal	1 Penurunan jumlah pelaku kenakalan dan tindak kriminalitas pelajar	25%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
			1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1 Jumlah Pelajar berprestasi	1	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
			2	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	2 Peningkatan jumlah pemuda berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional	1	Pemuda dan Olahraga	PD Urusan Pemuda dan Olahraga	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
			1	Program Penyiapan pendamping kelompok bina keluarga	1 Prosentase peningkatan jumlah keluarga sejahtera	87%	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	PD Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
			1	Program Penyiapan pendamping kelompok bina keluarga	1 Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	23	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	PD Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				2 Program Penyiapan pendamping kelompok bina keluarga	1 Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	20%	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	PD Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1 Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak	1 Cakupan kelompok Sadar Ketahan Keluarga	44,74%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD UrusanPemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1 Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Tolenrasi Umat Beragama	1 Rasio Perangkat Daerah yang menerapkan bina suasana dan kegiatan – kegiatan kerohanian sesuai dengan agama masing – masing di tiap SKPD	25%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
				1 Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Tolenrasi Umat Beragama	1 Prosentase peningkatan jumlah ZIS dari aparat	5%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
5.2	Terwujudnya lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat	Angka kriminalitas	13,14							

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Prosentase penurunan kasus narkoba	3%							
		Angka kriminalitas yang tertangani	3%							
		Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	100%							
				1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1 Keberadaan kebijakan yang mengatur control informasi media massa	1	Kominfo	PD Urusan Kominfo dan PD Urusan Trantibum Linmas (Kesbangpolinmas dan Satpol PP)	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				2 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1 Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham – paham yang tidak sesuai dengan nilai 111ndemic111i dan nilai –nilai luhur Pancasila	0	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
				1 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	1 Perda yang mengatur Kontrol Tempat Hiburan	-	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas dan PD Urusan Pariwisata	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					Perda yang mengatur Pelarangan peredaran miras dan	-				

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					tindak prostitusi					
			1	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1 Keberadaan Perda yang mengatur pelarangan peredaran narkoba	-	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas dan PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
			1	Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa	1 Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3	Komunikasi dan Informasi	PD Urusan Komunikasi dan Informasi	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
			1	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	69,60%	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
			1	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1 Jumlah Kampung Bebas Narkoba	2	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
			1	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1 Persentase kriminalitas yang tertangani	80%	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					1 Rasio jumlah siskamling aktif	0,78	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas		
			1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda	90%	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas (Satpol)	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					2 Cakupan 113ndemi petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran keamanan, ketertaman dan ketertiban umum (K3)	90%	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas (Satpol)		
					3 Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertaman dan ketertiban umum (K3)	94,50%	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas (Satpol)		
					4 Jumlah Satpol PP	NA	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas (Satpol)		
		1		Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1 Prosentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1,13%	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
		1		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	1 Prosentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	3%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolinmas)		
		1		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1 Meningkatnya ormas yang memiliki SKT	27,79%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolinmas)	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
		1		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	1 Prosentase penanganan penyakit masyarakat	90%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas(Kesbangpolinmas, Satpol PP)	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas(Satpol PP)	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
					2 Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	70,47	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)		
					2 Cakupan 114ndemi pengamanan wilayah oleh linmas	9	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)		
					3 Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	11,27%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)		
					4 Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	NA	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Satpol PP)		
				1 Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1 Cakupan anggota FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) yang terlatih dalam deteksi dini	18,75%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1 Program Pendidikan Politik Masyarakat	1 Frekwensi dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	1	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas dan bagian Kesra)	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					2 Tingkat partisipasi politik	0	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)		
			1	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1 Tingkat kerukunan antar umat beragama	100%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
					2 Frekuensi Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	8	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas dan Bagian Kesra)		
			1	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1 Frekuensi dialog yang dipublikasikan	5	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
			1	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1 Persentase ormas yang difasilitasi	7,87%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
5.3	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	3	1 Usulan Program baru (Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama)	1 Persentase tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag	5%	Sosial	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Bagian Kesra)		
				1 Usulan Program baru (Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama)	1 Ketersediaan kebijakan daerah tentang standar tempat ibadah sesuai peraturan Kemenag	1	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2017	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre)	0	1 Usulan Program baru (Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama)	1 Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan	0	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
				1 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Cakupan ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap PD	20%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi
				1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 116ndemic116 Tahun	1 Prosentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	85%	Sosial	PD Urusan Pendidikan dan PD Urusan Penunjang Setda Bagian Kesra	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM

4.3 Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target SDGs Kota Magelang

4.3.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Millenium Development Goals (MDGs) telah berakhir Tahun 2015. Setelah tahun 2016 yang merupakan transisi post MDGs menuju Sustainable Development Goals (SDGs), maka Proposal SDGs 2015-2030 melibatkan 17 Goals dan 169 indikator. Ketujuh belas tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan dan ketahanan pangan dan peningkatan nutrisi serta mengembangkan pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kehidupan yang layak di segala umur.
4. Memastikan kualitas pendidikan yang setara dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender memberdayakan perempuan dan remaja perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Memastikan akses atas energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, angkatan kerja yang produktif dan lapangan kerja layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan serta mendukung berkembangnya inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.
11. Membangun kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, berdaya tahan dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola-pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil langkah-langkah yang urgen untuk memerangi perubahan iklim dan akibat-akibatnya.
14. Melestarikan dan penggunaan yang berkelanjutan sumber daya kelautan untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan penggunaan yang berkelanjutan atas ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi dan menghentikan, mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan musnahnya keanekaragaman hayati.
16. Meningkatkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat upaya implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkesinambungan.

Sebagai milestones baru menuju SDGs, persiapan implementasi SDGs di Kota Magelang harus dilakukan dengan baik dan melalui pendekatan perencanaan yang tepat dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pencapaian target MDGs di Kota Magelang sampai dengan tahun 2015. Beberapa pendekatan kebijakan dan strategi SDGs dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan 1:** Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun

Program penanggulangan kemiskinan didekati antara lain melalui : a) Peningkatan kemampuan dan keterampilan penduduk miskin guna meningkatkan akses kesempatan kerja dan usaha, b) peningkatan kemandirian UMKM, IKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah serta koperasi guna peningkatan daya saing produk unggulan daerah dengan pemanfaatan SDM dan bahan baku lokal, c) pemberian akses permodalan, d) perluasan akses pasar/promosi, e) peningkatan akses pada pelayanan 118ndem seperti papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan

2. **Tujuan 2:** Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan dan ketahanan pangan dan peningkatan nutrisi serta mengembangkan pertanian berkelanjutan.

Dilaksanakan melalui program : a) Peningkatan ketahanan pangan, b) Program peningkatan produksi pertanian melalui pola urban farming, serta c) peningkatan penerapan teknologi pangan, peternakan dan perikanan.

3. **Tujuan 3:** Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kehidupan yang layak di segala umur.

Dilaksanakan melalui program : a) Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat, b) Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta gizi balita, c) peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan, d) Pelayanan kesehatan masyarakat; e) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan; f) penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah.

4. **Tujuan 4:** Memastikan kualitas pendidikan yang setara dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua

Program yang dilakukan antara lain : a) Peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), b) pendidikan Dasar, pendidikan menengah, Non formal dan Informal, dan pendidikan Khusus terutama untuk kelompok masyarakat yang miskin dan rentan, c) peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, d) perbaikan manajemen pendidikan, serta e) Peningkatan minat baca masyarakat

5. **Tujuan 5:** Mencapai kesetaraan gender memberdayakan perempuan dan remaja perempuan

Pendekatan program yang dilakukan melalui pendekatan: a) Peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan Dasar, pendidikan menengah, Non formal dan Informal, dan pendidikan Khusus terutama untuk kelompok masyarakat yang miskin dan rentan, b) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

6. **Tujuan 6:** Memastikan ketersediaan dan manajemen berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.

Hal ini dapat dilakukan melalui : a) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, b) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), c) Program Peningkatan Pengendalian Polusi; Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, d) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dan d) Program Lingkungan Sehat Perumahan.

7. **Tujuan 7:** Memastikan akses atas 118ndemi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua.

Upaya upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui: a) perkuatan sistem inovasi daerah, b) fasilitasi riset unggulan daerah terkait 118ndemi 118ndemic118ial dan terbarukan.

8. **Tujuan 8:** Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, angkatan kerja yang produktif dan lapangan kerja yang layak untuk semua.

Pendekatan program dengan Program peningkatan kesempatan kerja; b) Perlindungan Pengembangan Lembaga Kesempatan Kerja, c) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Peningkatan Promosi dan Investasi, d)

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, e) Pengembangan Destinasi Wisata, f) Pengembangan Pemasaran Wisata, g) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM, h) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

9. **Tujuan 9:** Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan serta mendukung berkembangnya inovasi.

Untuk mencapai tujuan ini dilakukan dengan cara : a) Program pembangunan jalan dan jembatan, b) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh, c) program pembangunan infrastruktur pedesaan, d) Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.

10. **Tujuan 10:** Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.

Di level daerah kombinasi pendekatan di tujuan ke delapan 119ndemi 119ndemic119 akan cukup memberikan akselerasi dalam mengurangi ketimpangan. Perkuatan SDM dan perhatian kepada kesamaan pendidikan juga akan mampu mengurangi kesenjangan. Index Gini dan Index Williamson yang berkualitas untuk pertumbuhan dan pemerataan.

11. **Tujuan 11:** Membangun kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, berdaya tahan dan berkelanjutan.

Pendekatan pembangunan menuju smart city menjadi bagian penting pada perencanaan tahun 2016. Perlu dirancang sebuah masterplan membangun kota yang cerdas ditinjau dari berbagai aspek. Program konvensional yang sudah ada sebelumnya perlu dilakukan intensifikasi misalnya: a) Program Pengembangan Perumahan, b) Program Lingkungan sehat perumahan, c) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum perumahan

12. **Tujuan 12:** Memastikan pola-pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Pendekatan secara makro dan strategis terhadap keseimbangan antara produksi dan konsumsi hingga mencapai kondisi yang surplus untuk pertumbuhan ekonomi perlu terus diupayakan.

13. **Tujuan 13:** Mengambil langkah-langkah yang urgen untuk memerangi perubahan iklim dan akibat-akibatnya

Pendekatan secara makro dan strategis terhadap memerangi perubahan iklim dan akibat-akibatnya terus diupayakan.

14. **Tujuan 14:** Melestarikan dan penggunaan yang berkelanjutan sumber daya kelautan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk sumber daya kelautan Kota Magelang tidak memiliki keunggulan komparatif. Namun demikian pengembangan perikanan darat masih terus diupayakan melalui : a) program Pengembangan budidaya perikanan, b) Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

15. **Tujuan 15:** Melindungi, merestorasi dan meningkatkan penggunaan yang berkelanjutan atas ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi dan menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan musnahnya keanekaragaman hayati.

Dapat dilaksanakan melalui: a) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, b) Program rehabilitasi hutan dan lahan, Program konservasi sumber daya alam.

16. **Tujuan 16:** Meningkatkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan.

Pendekatan reformasi birokrasi secara komprehensif, pengembangan e-governance yang menjamin transparansi, serta penciptaan keamanan.

17. **Tujuan 17:** Memperkuat upaya implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkesinambungan.

Dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama antar daerah antar negara, pemanfaatan kerjasama secara *sister city* serta peningkatan menjalin *networking* dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN yang melibatkan ke empat pilar pembangunan terutama pemerintah, swasta, perguruan tinggi.

4.4 Arah Pengembangan Wilayah Terpadu Kota Magelang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang tidak terlepas dari sudut pandang Pengembangan Wilayah. Berdasar dokumen Pengembangan Wilayah Terpadu Kota Magelang Tahun 2015-2020, pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan keterpaduan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keruangan Kota Magelang.

4.3.1. Arah Pengembangan Eksternal Wilayah

Mengacu pada UU Penataan Ruang No. 26/ 2007, secara umum telah ditetapkan istilah baku untuk pusat-pusat perkotaan mulai dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kota-kota, baik yang mempunyai status otonomi maupun tidak, merupakan pusat kegiatan bagi wilayah di sekelilingnya, yang sering disebut dengan beberapa istilah seperti wilayah pengaruh, wilayah pelayanan, hinterland, dan lain-lain.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kota Magelang mempunyai kedudukan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Adapun Gambaran mengenai Sistem Perwilayahan Eksternal Kota Magelang dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :



Gambar IV.3

Konstelasi Kota Magelang Terhadap Kawasan Sekitarnya

Beberapa daerah yang berada di PKW Kota Magelang antara lain Kawasan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung yang diistilahkan sebagai Kawasan PURWOMANGGUNG. Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Pusat pelayanan keuangan/bank yang melayani beberapa kabupaten;
- b. Pusat pengolahan/pengumpul barang yang melayani beberapa kabupaten;
- c. Simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;
- d. Pusat pemerintahan yang melayani beberapa kabupaten;
- e. Pusat pendidikan yang melayani beberapa kabupaten;
- f. Pusat kesehatan yang melayani beberapa kabupaten; dan
- g. Pusat Perdagangan dan Jasa umum lain yang melayani beberapa kabupaten;

Arah pengembangan Kota Magelang untuk meningkatkan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), diantaranya:

- a. pengembangan secara vertikal kawasan komersial 10 lantai;
- b. alokasi ruang pada kawasan strategis Daerah (jalur utama pergerakan transportasi Semarang-Yogyakarta), yaitu untuk perdagangan-jasa skala kota dan regional (Purwomanggung), meliputi blok peruntukan ruang di

Jalan Pemuda, Jalan A.Yani, Jalan Sudirman, sebagian Jalan Urip Sumohardjo, dan sebagian Jalan Sukarno Hatta, Jalan Tentara Pelajar, dan Jalan Pahlawan.

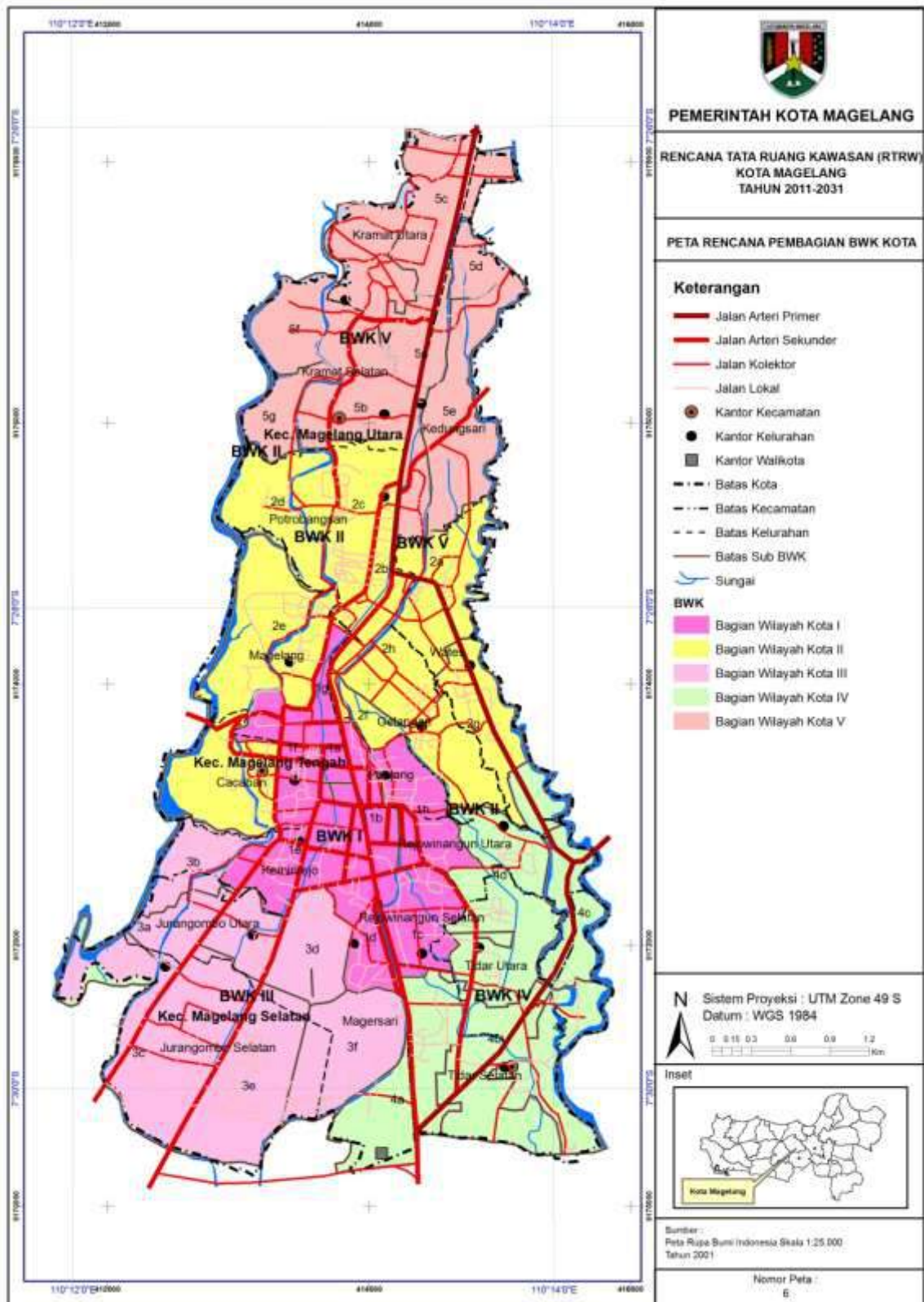
- c. pengembangan sarana perekonomian daerah, berupa hipermarket, supermarket, perkantoran, perbankan, perhotelan, pasar tradisional, jasa hiburan, rumah makan, dan kawasan *mix use* (campuran) berupa rumah-toko (ruko) dan rumah kantor.
- d. Pengembangan kawasan perdagangan-jasa yang layak dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan estetika lingkungan khususnya penyediaan ruang terbuka publik berupa ruang hijau dan non hijau.
- e. pengembangan pariwisata dipusatkan pada BWK III, dan pengembangan potensi wisata pada kawasan lain sebagai pendukung wisata kota.
- f. Pengembangan pendidikan menengah dan tinggi, dengan peningkatan kualitas dan keberagaman jurusan/keahlian, dengan tetap mendukung keberadaan Akademi Militer.
- g. Pengembangan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan.

4.3.2. Arah Pengembangan Internal Wilayah

Secara internal, arah pengembangan wilayah Kota Magelang didasarkan pada arahan sesuai Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang tahun 2011-2031, sesuai Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012, yang kemudian membagi wilayah pengembangan menjadi 5 (lima) Bagian Wilayah Kota (BWK). Secara bertahap kelima BWK tersebut sedang dalam proses untuk dituangkan kedalam peraturan daerah.

Dalam rangka optimalisasi pengembangan, kemudahan pengelolaan, peningkatan fungsi pelayanan, pengurangan kesenjangan, serta penentuan kawasan-kawasan yang akan dilakukan pengembangan, maka di Kota Magelang dilakukan pembagian wilayah kota dalam unit-unit lingkungan atau kedalam kawasan fungsional yang lebih kecil. Unit lingkungan perkotaan yang lebih kecil tersebut dikenal sebagai Bagian Wilayah Kota (BWK). Pertimbangan dalam Penetapan BWK di Kota Magelang berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Adanya kesamaan fungsi (*homogenitas*) dan dominasi kegiatan tertentu, dimana pengelompokan kegiatan-kegiatan tersebut dalam satu satuan wilayah akan lebih menguntungkan baik dalam segi pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, interaksi antar kegiatan sejenis maupun pengawasan segala kegiatan yang terjadi.
- b. Batasan kemampuan jangkauan pelayanan (radius pelayanan) fasilitas sosial ekonomi skala BWK.
- c. Adanya batas fisik yang jelas seperti jalan, sungai dan lain-lain.
- d. Kekompakan wilayah terhadap daerah-daerah yang akan dikembangkan, sehingga tercapai efisiensi .
- e. Kemudahan hubungan antar bagian wilayah, tercapainya keserasian, dan integrasi antara kota lama dengan kawasan pengembangan (efisiensi sistem pergerakan).
- f. Memantapkan peran BWK dengan meningkatkan sarana-prasarana yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya (efisiensi pelayanan sarana umum).
- g. Kemudahan dalam pengawasan dan pengelolaan masing-masing wilayah fungsional.



Gambar IV.4

Peta Rencana Pembagian BWK

Pada setiap BWK dialokasikan pusat-pusat kegiatan dengan pengarahannya. Adapun pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) dan unit lingkungan yang ada di Kota Magelang adalah sebagai berikut:

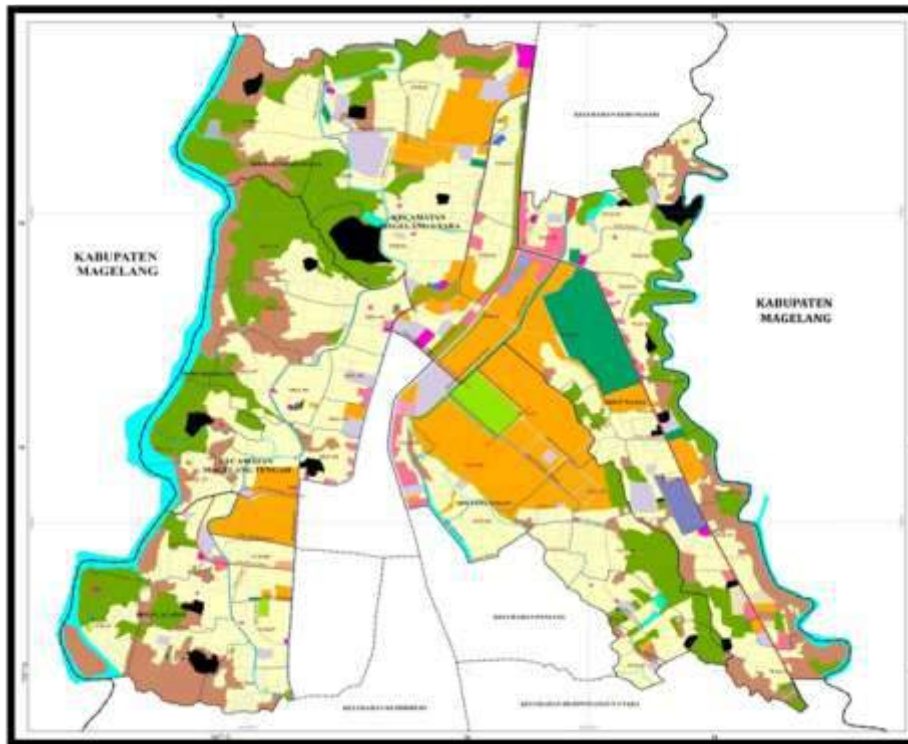
4.3.2.1 Bagian Wilayah Kota I (BWK I)

Di BWK I ada beberapa Kawasan Startegis yang diprioritaskan untuk dikembangkan di Tahun 2016 hingga 2021 sebagai generator pertumbuhan ekonomi dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan perekonomian yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota / regional, yaitu:

1. Kawasan Alun Alun dan sekitarnya. Sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan perkantoran, Kawasan Alun-Alun juga sebagai kawasan pusat kota yang mewadahi kegiatan rekreasi masyarakat dengan skala pelayanan daerah dan regional. Dengan rencana penanganan yang dilakukan berupa:
 - a. penataan RTH Taman Kota;
 - b. penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima;
 - c. penataan jaringan pergerakan di seluruh kawasan dan sekitarnya;
 - d. penataan lalu lintas;
 - e. penataan papan reklame pada zona perdagangan.
2. Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dengan skala pelayanan daerah dan regional. Rencana penanganan yang dilakukan berupa:
 - a. pembangunan selter Pedagang Kaki Lima;
 - b. pembangunan terminal tipe c;
 - c. pengelolaan pasar Sidomukti;
 - d. Penataan RTH kawasan.

4.3.2.2 Bagian Wilayah Kota II (BWK II)

Dengan luas kurang lebih 370 Ha, BWK II berfungsi konsentrasi kegiatan permukiman, pendidikan tinggi, dan militer. Pada beberapa simpul lokasi di BWK II, terutama kawasan-kawasan yang bersinggungan langsung dengan kawasan pusat kota harus diantisipasi perkembangan fasilitas perdagangan dengan skala pelayanan lokal dan regional. Wilayah BWK I meliputi seluruh wilayah Kelurahan Potrobangsari; sebagian wilayah Kelurahan Wates, Gelangan, Cacaban dan Magelang.



Gambar IV.6
Pola Ruang BWK II

Arahan Pengembangan BWK II :

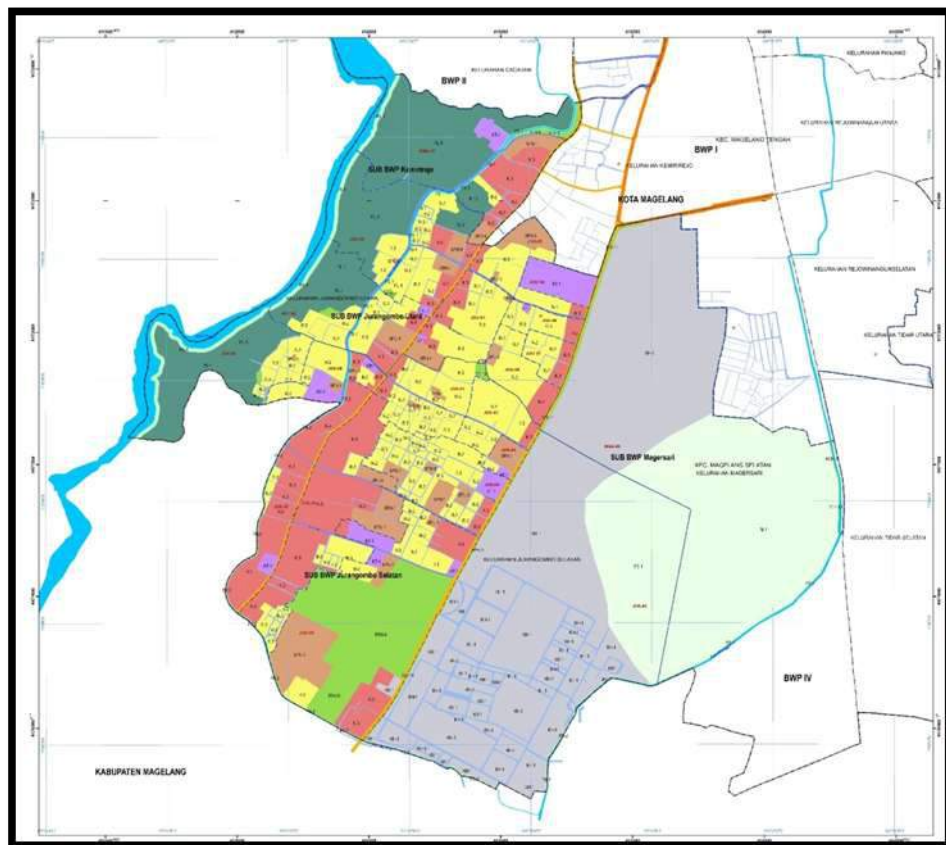
- a. mewujudkan pusat pelayanan permukiman kepadatan tinggi dan sedang, perguruan tinggi, dan pendidikan angkatan darat;
- b. mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa;
- c. mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
- d. mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan jasa;
- e. mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
- f. mewujudkan RTH Taman Kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan
- g. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas perdagangan dan jasa, permukiman, pariwisata, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau.

Di BWK II ada Kawasan Startegis yang diprioritaskan untuk dikembangkan di Tahun 2016 hingga 2021 sebagai pusat pelayanan pariwisata dan kebudayaan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota / regional, yaitu: Kawasan Mantiyasih. Yang berfungsi sebagai kawasan sejarah cikal bakal Magelang yang dikembangkan sebagai pusat pelayanan pariwisata dan kebudayaan dengan skala pelayanan daerah dan regional. Dengan rencana penanganan yang dilakukan berupa:

- a. Penataan kawasan Mantiyasih;
- b. Peningkatan aksesibilitas kawasan;
- c. Pengembangan destinasi pariwisata.

4.3.2.3 Bagian Wilayah Kota III (BWK III)

BWK III dengan luas kurang lebih 383 Ha, dengan arahan fungsi dengan fungsi pusat pelayanan rekreasi kota/wisata alam skala regional, pelestarian alam, pendidikan angkutan darat, dan permukiman dengan kepadatan rendah, dan terdiri dari seluruh Kelurahan Jurangombo Utara dan Jurangombo Selatan, sebagian Kelurahan Magersari dan Kelurahan Kemirirejo, Kawasan perkotaan pada BWK III harus dipertahankan rasio antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau. Prediksi pemanfaatan lahan dimasa depan tidak begitu banyak bergeser dari alokasi lahan saat ini. Sedangkan pengembangan bidang kepariwisataan sangat potensial untuk diarahkan di kawasan BWK III tersebut. Gunung Tidar yang merupakan hutan lindung kota berlokasi di BWK III. Kekuatan pasar akan mendesak penggunaan lahan Gunung Tidar atau sebagian lahan gunung tersebut untuk kegiatan ekonomi dan wisata



Gambar IV.7

Peta Pola Ruang BWK III

Arahan Pengembangan BWK III :

- mewujudkan pusat pelayanan permukiman kepadatan rendah dan sedang, rekreasi kota/wisata alam, dan pendidikan angkutan darat
- mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa;
- mewujudkan kawasan Gunung Tidar sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hutan kota;

- d. mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
- e. mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan jasa;
- f. mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
- g. mewujudkan RTH Taman Kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan
- h. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas perdagangan dan jasa, permukiman, pariwisata, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau.

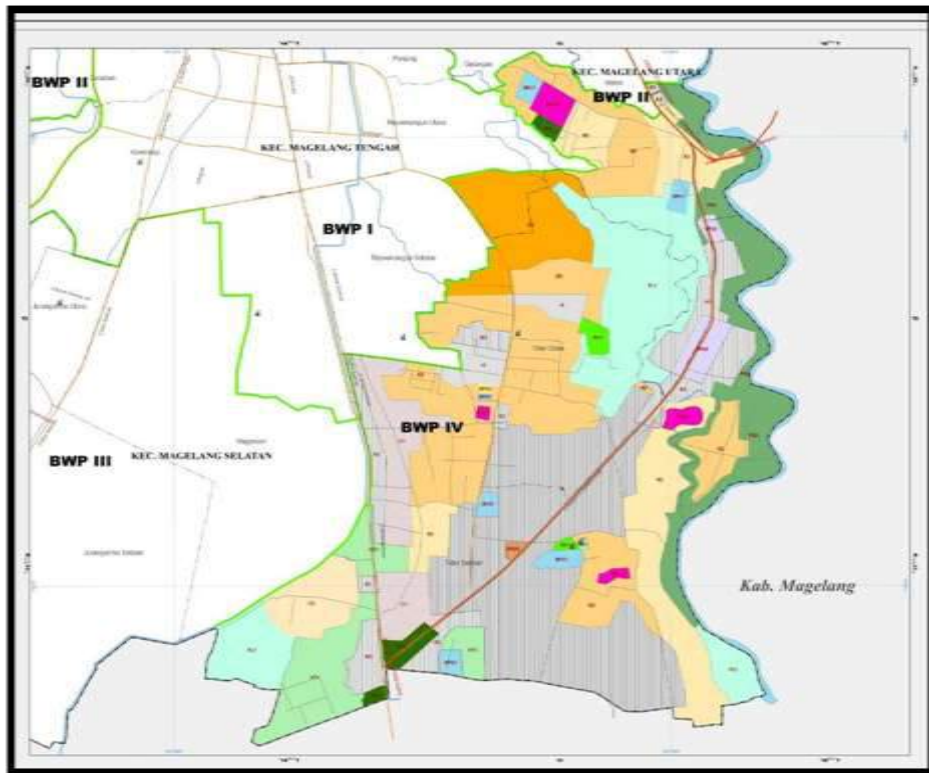
Di BWK III ada Kawasan Strategis yang diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Kota Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yaitu: Kawasan Gunung Tidar, Fungsi kawasan adalah sebagai kawasan plasma nutfah Daerah dan pengembangan destinasi pariwisata untuk wisata religi dan objek studi ilmu pengetahuan alam.

Rencana penanganan kawasan prioritas kawasan Gunung Tidar dilakukan dengan:

- a. penegasan batas kawasan lindung Gunung Tidar dengan kawasan budidaya yang ada di seputar kawasan;
- b. revitalisasi kawasan Gunung Tidar sebagai kawasan plasma nutfah Daerah;
- c. reboisasi pohon di Kawasan Gunung Tidar secara bertahap dan berkala;
- d. pengembangan kawasan sebagai kawasan pariwisata untuk wisata religi dan objek studi ilmu pengetahuan alam masih dimungkinkan selama tidak mengganggu dan mengurangi fungsi kawasan sebagai kawasan lindung; dan
- e. pengembangan secara terbatas sarana dan prasarana pendukung seperti jaringan air bersih, jaringan listrik, dan jalan setapak dan harus mempunyai kejelasan fungsi dari pembangunan sarana dan prasarana tersebut.

4.3.2.4 Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV)

BWK IV dengan luas kurang lebih 437 Ha, dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan kota, industri kecil dan menengah, simpul pergerakan barang, jasa dan orang, dan permukiman kepadatan tinggi, dan terdiri dari *sebagian* Kelurahan Rejowinangun Utara, *sebagian* Kelurahan Magersari, dan *sebagian* Kelurahan Wates, dan *seluruh* Kelurahan Tidar Utara dan *seluruh* Kelurahan Tidar Selatan. Keberadaan Terminal Tidar ikut menjadi faktor pengungkit/pendorong perkembangan di kawasan tersebut. Peningkatan kegiatan perdagangan di BWK IV dimasa yang akan datang akan menjadi dominan, terutama dengan berkembangnya Kawasan Soekarno-Hatta; Kawasan Canguk, serta berkembangnya Kawasan Mertoyudan (kawasan perbatasan) yang berada di wilayah Kabupaten Magelang sebagai kawasan perkotaan dengan dominasi kegiatan perdagangan dan perkantoran. Pada BWK IV ini terdapat simpul-simpul kawasan yang merupakan gerbang pintu masuk kota dari arah selatan dan timur. Sehingga penataan ruang pada kawasan tersebut memerlukan prioritas yang harus dilaksanakan dalam rangka menjaga kualitas ruang kota.



Gambar IV.8
Peta Pola Ruang BWP IV

Arahan Pengembangan BWP IV :

- a. Mewujudkan jaringan prasarana dan sarana yang memadai untuk mewujudkan fungsi BWP IV Kota Magelang sebagai subpusat pelayanan kota;
- b. Mewujudkan jaringan prasarana dan sarana bagi pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan baik antara pusat kota dengan hinterlandnya, sehingga dapat melayani dan mencakup aktifitas perdagangan masyarakat Kota Magelang.
- c. Mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
- d. Mewujudkan kegiatan industri rumah tangga yang berbasis kerakyatan untuk mendukung perdagangan jasa dan permukiman;
- e. Mewujudkan tersedianya fungsi-fungsi ekologis yang cukup untuk pengendalian banjir dan kekeringan serta tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mewujudkan tersedianya peraturan zonasi yang operasional dan sesuai dengan karakteristik BWP IV Kota Magelang untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Mewujudkan jaringan prasarana dan sarana yang memadai untuk mewujudkan fungsi BWP IV Kota Magelang sebagai sub pusat pelayanan kota;
- g. Mewujudkan jaringan prasarana dan sarana bagi pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan baik antara pusat kota dengan hinterlandnya, sehingga dapat melayani dan mencakup aktifitas perdagangan masyarakat Kota Magelang.
- h. Mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
- i. Mewujudkan kegiatan industri rumah tangga yang berbasis kerakyatan untuk mendukung perdagangan jasa dan

permukiman;

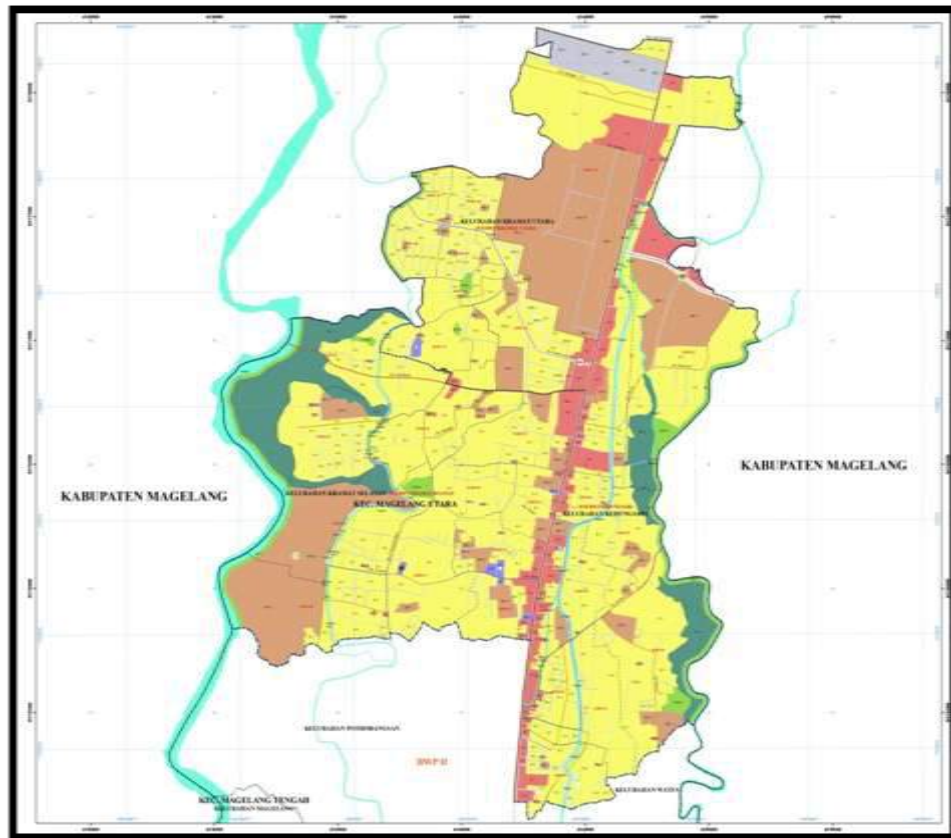
- j. Mewujudkan tersedianya fungsi-fungsi ekologis yang cukup untuk pengendalian banjir dan kekeringan serta tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mewujudkan tersedianya peraturan zonasi yang operasional dan sesuai dengan karakteristik BWK IV Kota Magelang untuk mengendalikan alih fungsi lahan.

Di BWK IV ada Kawasan Strategis yang diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa dan pergudangan dengan skala pelayanan daerah dan regional yaitu: Kawasan Sukarno Hatta . Dengan rencana penanganan yang dilakukan berupa:

- a. Rintisan Pembangunan Pasar Induk dan Pengembangan Terminal Bongkar Muat;
- b. Pembangunan fasilitas pergudangan;
- c. Penataan RTH kawasan;

4.3.2.5 Bagian Wilayah Kota V (BWK V).

BWK V dengan luas kurang lebih 365 Ha, dengan arahan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan perguruan tinggi, perbelanjaan toko modern, kawasan pengembangan sosial-budaya, olahraga, dan rekreasi. BWK V terdiri dari *seluruh* Kelurahan Kramat Utara, *seluruh* Kelurahan Kramat Selatan, dan *seluruh* Kelurahan Kedungsari. BWK V mempunyai 2 (dua) kawasan strategis yaitu Kawasan Sidotopo yang diarahkan sebagai salah satu kawasan yang mengampu kegiatan ekonomi skala kota dan regional dan Kawasan GOR Samapta yang mempunyai arahan pengembangan sebagai pusat kegiatan olah raga dan rekreasi kota, regional, dan nasional.



Gambar IV.9

Peta Pola Ruang BWK V

Arahan Pengembangan BWK V:

- a. mewujudkan pusat perdagangan modern dan tradisional dengan skala pelayanan daerah dan/atau regional;
- b. mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata, olahraga, pendidikan, dan perdagangan dan jasa;
- c. mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
- d. mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung kegiatan pariwisata, olahraga, pendidikan, dan perdagangan dan jasa;
- e. mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
- f. mewujudkan RTH Taman Kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan
- g. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas pariwisata, olahraga, pendidikan, dan perdagangan dan jasa, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau.

Dari 2 (dua) kawasan strategis di BWK V, Kawasan startegis Gor Samapta yang akan dilakukan pengembangan di Tahun 2016- 2021, dengan rencana pengembangan sebagai berikut:

- a. penyelesaian pembangunan Stadion Moch. Subroto;
- b. revitalisasi GOR Samapta dan sekitarnya;
- c. rintisan pengembangan Kawasan Olah Raga yang didahului dengan pengadaan tanah kearah selatan kawasan Olah Raga Samapta;
- d. penataan RTH Kawasan.

4.5 Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2017 juga memasukkan Pokok –pokok Pikiran DPRD Kota Magelang sebagai bagian tidak terpisahkan dari pendekatan politis Penyusunan RKPD. Pokok pokok pikiran DPRD ini setelah melalui penelaahan baik oleh Bappeda Kota Magelang maupun perangkat Daerah terkait, kemudian dimasukkan dalam skenario Rencana Kerja SKPD.

Pokok-pokok pikirtan DPRD Kota Magelang untuk RKPD Kota Magelang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

4.5.1 Urusan Pendidikan

- a. Pendidikan Anak Usia Dini hendaklah ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui program beasiswa maupun kemudaha pengurusan legalitas PAUD. Hal ini karena jenjang PAUD merupakan masa yang paling tepat untuk pembentukan karakter dan budi pekerti.
- b. Program Peningkatan sarana prasarana sekolah terutama keberadaan laboratorium di setiap sekolah , akses jalan maupun bangunan yang memadai sesuai dengan standar pelayanan public.
- c. Peningkatan tenaga pendidik yang di sertai peningkatan kesejahteraan guru baik swasta maupun negeri.
- d. Pendidikan gratis dan program pengaktifan organisasi kepemudaan dalam kegiatan organisasi dan kegiatan olahraga yang ada di Kota Magelang.
- e. Pemberian kemudahan kepada masyarakat Kota Magelang maupun masyarakat di luar Kota Magelang yang ingin bersekolah di Kota Magelang.
- f. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus tepat sasaran.
- g. Peningkatan mutu dana akses terhadap program kejar paket A_C dan universitas terbuka
- h. Perlunya peningkatan perhatian pada kaum difabel melalui peningkatan pendidikan luar biasa (SLB), dan
- i. Perlunya digiatkan kembali pendidikan keagamaan

4.5.2 Urusan Kesehatan

- a. Penyediaan alat kesehatan posyandu, balita dan lansia
- b. Mendorong program pelayanan kesehatan masyarakat dengan mendorong pelayanan puskesmas menjadi rumah sakit rujukan rawat inap dengan peningkatan secara secara menyeluruh baik bangunan, fasilitas dan tenaga medisnya.
- c.. Penyusunan SOP pelayanan BPJS serta pelayanan lainnya secara umum
- d. peningkatan kualitas RSUD Tidar, baik menyangkut penambahan sarana parker, rawat inap, penambahan alat alat kesehatan yang lebih canggih, penyediaan ruang khusus bayi, balita dan dewasa, penambahan dokter, dan tenaga kesehatan supaya masyarakat Kota Magelang mendapatkan pelayanan yang maksimal.
- e. Pelayanan pasien dengan Jamkesda maupun BPJS harus tetap maksimal, professional berdasarkan standar pelayanan yang ada.
- f. Perlunya kajian untuk pembuatan Rusamh Sakit Tipe C dan D di Kota Magelang guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Magelang dan sekitarnya
- g. Optimalisasi pelayanan puskesmas lebih ditingkatkan karena pelayanan awal dan preventif, tenaga puskesmas perlu ditambah, pengawasan terkait gizi buruk yang ada di masing masing jangkauan puskesmas sekitar,

pembuatan ruang khusus dan aksesibilitas untuk balita dan lansia, penambahan tenaga psikolog di setiap puskesmas,, dan penambahan waktu jam buka puskesmas.

- h. Peningkatan kegiatan sosialisasi bidang kesehatan sebagai upaya preventif seperti sosialisasi HIV AIDS, demam berdarah, dan
- i. Kalau perlu diberikan aturan yang jelas supaya masyarakat lebih cepat mengurus dan mempersiapkan persyaratan-persyaratan.
- j. Peralatan Posyandu Balita dan Lansia RW 4 Kramat Utara.
- k. Mendorong program pelayanan kesehatan masyarakat yaitu puskesmas untuk dijadikan rumah sakit rujukan rawat inap dengan peningkatan secara menyeluruh baik bangunan, fasilitas, dan tenaga medisnya.

4.5.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Kajian yang mendalam tentang perluasan wilayah Kota Magelang karena jika tidak maka hal ini sangat berpengaruh dan akan mengganggu pelayanan-pelayanan di sektor sektor penting dalam masyarakat.
- b. Pemeliharaan drainase dan gorong-gorong
- c. Peningkatan pelayanan jasa dan konstruksi meliputi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung maupun monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan pembanguna yang sudah ada dan mangkrak
- d. Pemerataan pembangunan antara wilayah utara, tengah dan selatan.
- e. Perbaikan jalan dan penyempurnaan sarana dan prasarana pasar.
- f. Penambahan penerangan untuk wilayah Sidotopo untuk menghindari tindak criminal
- g. Program pengembangan PLN di daerah terpencil.
- h. Perlunya perhatian terhadap banyaknya keterlambatan pekerjaan fisik dan non fisik sehingga perlu dibuat jadwal yang lebih spesifik/detil, agar bisa berjalan sesuai yang diharapkan.
- i. Untuk proyek proyek berskala besar agar seyogyanya bisa dilaksanakan awal Triwulan ke dua sampai akhir triwulan ketiga.
- j. Penataan pasar Gotong Royong untuk segera dilaksanakan rehabilitasi dan renovasi, mengingat pasar tersebut merupakan pasar khusus/pasar malam yang dibutuhkan tidak hanya masyarakat Kota Magelang tetapi berbagai kota terdekat.

4.5.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Bedah rumah dan rehabilitasi permukiman kumuh dan tidak layak huni di Kota Magelang

4.5.5 Urusan Pangan

- a. Pemerintah diharapkan secara aktif melakukan kegiatan pemantauan harga dan operasi pasar sebagai upaya menjamin ketahanan pangan di masyarakat melalui ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok di pasar.

4.5.6 Urusan Lingkungan Hidup

- a. Fasilitasi program 3 R dalam bidang persampahan antara lain dengan pengadaan mesin penghancur sampah, alat pembersih bitil daur ulang.

- b. Perintisan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah untuk membangun TPA Regional, sementara TPA yang sudah ada perlu ditingkatkan lagi sarana dan prasarannya.

4.5.7 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Optimalisasi pelayanan publik di tataran tingkat RT, RW, kelurahan hingga SKPD di atasnya.
- b. Perlunya kajian yang mendalam tentang rencana perluasan wilayah Kota Magelang menjadi 4 kecamatan sebagai syarat administratif sebuah kota.

4.5.8 Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa

- a. Perlunya kegiatan pelatihan bagi masyarakat yang disesuaikan dengan minat peserta
- b. Peninjauan ulang terhadap Peraturan Daerah tentang Tugas Pokok dan Fungsi LPM sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.
- c. Penyaluran bantuan sosial diprioritaskan pada program-program pro rakyat terutama untuk pemberdayaan masyarakat dan penanganan ekonomi lemah.
- d. Pemberdayaan melalui bantuan pengadaan mesin pembuat tahu dan bantuan modal bagi pengrajin tahu
- e. Skema bantuan modal bagi usaha simpan pinjam skala RW.

4.5.9 Urusan Perhubungan

- a. Perlunya kegiatan pelatihan bagi masyarakat yang disesuaikan dengan minat peserta.
- b. Mengenai eks jalur transportasi kereta api yang melintasi Kota Magelang agar ditukar guling atau dibeli sehingga warga yang bertempat tinggal dan bertempat usaha di atasnya merasa nyaman
- c. Hal yang sangat penting saat ini adalah Peran Pemerintah Daerah dalam upayanya untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan yang menangani perkereta apian di Indonesia. Mengingat bahwa Pembangunan sarana transportasi Kereta Api di wilayah Kota Magelang sudah masuk dalam Prolegnas 2016-2019. Selain dari pada itu Pemerintah Daerah juga harus mengadakan pembicaraan serta komunikasi secara intens dengan masyarakat yang menduduki/menempati jalur-jalur PJKA disepanjang wilayah Kota Magelang.
- d. Sebagai publik transport yang murah serta bersifat massal memang kereta api akan menjadi andalan bagi masyarakat. Perlu juga dikaji apabila memungkinkan tentang pemindahan jalur dari rel kereta yang sekarang sudah terkubur sekian puluh tahun tersebut, setidaknya tidak melewati pusat kota tetapi dicari tempat yang tidak membahayakan masyarakat
- e. Peningkatan fasilitas penunjang di jalan raya seperti pemasangan lampu penerangan jalan, pemasangan kaca cembung pada setiap jalan.
- f. Implementasi pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah

4.5.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Memperbanyak fasilitas hotspot area baik di taman-taman, balai kelurahan maupun tempat publik lainnya

4.5.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

4.5.1 Antisipasi MEA perlu penguatan koperasi dan pengembangan UMKM

- b. Pembinaan, pendampingan pemberdayaan dan kemudahan akses permodalan serta proteksi kepada UMKM guna meningkatkan daya saing UMKM.
- c. Pemberdayaan usaha UMKM di setiap wilayah RT RW hingga kelurahan untuk peningkatan produktivitas

4.5.12 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Program pengaktifan organisasi kepemudaan dalam kegiatan organisasi dan olahraga
- b. Mengembalikan Stadion Muh Subroto sebagai pembinaan dan pengembangan atlet dan optimalisasi kolam renang Muh Subroto
- c. Penyediaan tempat berkegiatan untuk pemuda Kota Magelang

4.5.13 Urusan Kebudayaan

- a. Pementasan seni dan budaya di Kota Magelang
- b. Pembudayaan bahasa Jawa dengan menjadikan bahasa Jawa sebagai bahasa daerah di sekolah
- c. Pengadaan gamelan untuk paguyuban Kethoprak di Kelurahan Tidar Selatan dan Rejo Utara
- d. Pengadaan peralatan dan kostum Jathulan Cipto Manunggal

4.5.14 Urusan Pariwisata

- a. Penambahan sarana dan prasarana bagi pengembangan wisata Gunung Tidar
- b. Pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan Museum dengan baik sebagai ciri khas Kota dan dijadikan sebagai promosi wisata
- c. Taman Kyai Langgeng hendaknya dikembalikan ke konsep awal pendiriannya dengan ditambahkan fasilitas yang lengkap dan wahana permainan (modern dan tradisional)
- d. Taman Badaan sebagai taman kota harus dirawat dan dikembangkan baik dengan baik sehingga bisa menjadi embrio bagi pengembangan dan pembangunan wisata edukasi di Kota Magelang.

4.5.15 Urusan Pertanian

- a. Pencegahan alih fungsi lahan pertanian yang semakin terbatas
- b. Peningkatan klinik hewan kepada masyarakat
- c. Peningkatan rumah potong hewan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan RPH dan hanya membeli daging yang disembelih di RPH

4.5.16 Urusan Perdagangan

- a. Perbaikan sistem pemasaran terhadap pasar tradisional agar dapat bersaing di era global dan memberikan keamanan dan kenyamanan para pedagang dan konsumen.
- b. Optimalisasi cash register terhadap RM, restaurant dan perhotelan untuk peningkatan PAD.

4.5.17 Urusan Pemerintahan Umum

- a. Penataan kelembagaan Pemerintah Kota Magelang disertai dengan penguatan struktur organisasi dan pemberdayaan staf pemerintah daerah.
- b. Penempatan pegawai disesuaikan dengan eselon dan kepangkatan , sementara itu pengisian jabatan bisa dilakukan melalui lelang jabatan untuk mengetahui visi dan misinya dengan melibatkan beberapa ahli untuk melakukan fit and proper test , sehingga profesionalitas dapat terbangun.
- c. Peningkatan kualitas SDM melalui pengiriman pegawai ke studi pada jenjang yang lebih tinggi maupun melalui kegiatan pelatihan/training.
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan disertai dengan keterbukaan informasi publik, untuk memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan kepercayaan pada pemerintahan, taat kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas daerah.
- e. Optimalisasi peran pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan peran serta masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan.
- f. Terkait dengan Bansos untuk dapat diprioritaskan di tahun 2016 dan khusus untuk yang batal menerima bansos di tahun 2015 diharapkan tidak ada lagi survey.
- g. Perlu adanya pelatihan pelatihan bagi aparatur yang lebih bersifat berkesinambungan melibatkan pihak pihak yang mempunyai kompetensi pada bidangnya.
- h. Adanya perlakuan yang adil bagi tempat tempat ibadah yang jelas jelas telah berijin.
- i. Dalam laporan keuangan pemerintah Kota Magelang terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, pengendalian internal terdapat kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan daerah; kekurangan volume atas pekerjaan di beberapa SKPD serta pemberian penghasilan bagi Dewan Pembina Perusahaan Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- j. Perlunya penambahan biaya operasional di tiap tiap RT maupun RW mengingat peran RT dan RW sangat penting guna membantu pelayanan pemerintah daerah sampai lapisan terbawah.
- k. Penambahan personil untuk ahli E KTP, yang nantinya akan ditempatkan di masing masing kecamatan atau kelurahan
- l. Perda- perda yang sudah disahkan untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh SKPD terkait dan ketegasan sanksi terhadap pelanggaran perda
- m. Peninjauan kembali aturan tentang jabatan dan lain-lain mengingat banyaknya PNS yang dirugikan. Perlu berpedoman pada peraturan yang berlaku terutama daftar urutan kepangkatan dan jabatan.
- n. Pelayanan di kelurahan dan kecamatan perlu ditingkatkan perlu pendelegasian yang jelas untuk peningkatan kecepatan layanan
- o. Peningkatan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan teknologi

4.6 Inovasi Pembangunan

Pembangunan daerah yang dimanifestasikan melalui tahapan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan harus mampu mempercepat tujuan kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial dan dalam cakupan yang lebih universal. Dalam era modern dewasa ini, dimana permasalahan dan





tuntutan masyarakat semakin kompleks, maka harus diupayakan pendekatan *out of the box* dan bersifat terobosan tanpa meninggalkan regulasi yang ada. Sebagai organisasi pembelajar (*learning organization*) dan organisasi yang bertumpu pada pengembangan (*improvement driven organization*) Pemerintah Kota Magelang melakukan **inovasi baik secara proses perencanaan maupun pada tataran program/kebijakan.**

4.6.1 Inovasi Proses Perencanaan Pembangunan

Beberapa inovasi pada proses perencanaan pembangunan Tahun 2017 antara lain nampak sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV.7

Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Inovasi	Later belakang Inovasi	Nilai Tambah/Dampak positif yang diharapkan	Ilustrasi Inovasi
1	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Carut Marut penyusunan Renja dan Renstra	Mampu meningkatkan kinerja penyusun dokumen perencanaan dari aspek waktu, ketertelusuran dan kehandalan prosesnya	
2	E-Musrenbang	Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi data usulan Musrenbang	Meningkatkan transparansi dan alur ketertelusuran (track back) sehingga tetap mampu menjaga makna Musrenbang di mata masyarakat	
3	Optimalisasi E_Aspiration pada website Bappeda	Perlunya meningkatkan akses usulan bagi masyarakat secara online via website	Mampu meningkatkan rentang cakup usulan secara dunia maya,	
4	Sistem Informasi Geografis (Tata Ruang, Perumahan, Jalan dan Jembatan)	Perlunya aksesibilitas terhadap kondisi geospasial dan infrastruktur di Kota Magelang	Memberikan aspek kontrol dan evaluasi atas kondisi secara geospasial	

5	Pemanfaatan Media Sosial (WhatsApps) dalam Koordinasi Penyusunan RKPD		Akselerasi proses penyusunan dan keterbukaan diskusi atas penyusunan RKPD	
6	Peningkatan kapasitas Kasubbag program di OPD terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui workshop dan sosialisasi	Perlunya pemahaman yang lebih baik terhadap aspek perencanaan pembangunan pada level Kasubbag Program di seluruh OPD	Peningkatan skill pada core business perencanaan di setiap OPD	
7	Implementasi Analisis Standar Belanja (ASB) dalam Penyusunan Rancangan Renja OPD	Harus ada upaya agar terdapat standar belanja pada anggaran berbasis kinerja secara lebih ilmiah	Peningkatan kualitas pada substansi matriks rancangan Renja OPD	
8	Sarasehan perencanaan pembangunan di setiap kecamatan pada bulan Desember Tahun n-1 perencanaan tentang Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017	Secara lebih dini masyarakat diberikan pemahaman atas arah kebijakan pembangunan Tahun Rencana	Peningkatan kesadaran masyarakat peran masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dengan indikator peningkatan partisipasi masyarakat dan akomodasi usulan musrenbang	
9	Formulir Batasan dan Kriteria Usulan Musrenbang	Tidak terkendalinya usulan Musrenbang yang diluar jalur tema pembangunan tahun rencana, sehingga menghasilkan <i>planning scrap</i> pada saat Musrenbang	Filter atas usulan yang semakin berkualitas mengarah pada tema tahun rencana dan makin meningkatnya akomodasi atas usulan Musrenbang	
10	Integrasi Sistem Perencanaan dengan Penganggaran (SIPPD-SIMDA)	Inefisiensi atas implementasi sistem dalam hal waktu input atas fungsi perencanaan dan penganggaran	Tidak terjadi duplikasi atas input yang sama dalam penyusunan Renja OPD pada sistem SIPPD (Program, kegiatan, indikator) dan SIMDA	

11	Integrasi dan pemanfaatan Dokumen Pemetaan Potensi, Permasalahan dan Isu Strategis Kelurahan dalam Pengusulan Musrenbang (secara lebih lanjut dikembangkan sebagai dokumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman/RPLP)	Masih tumpang tindihnya pengusulan Musrenbang sehingga tidak tepat sasaran	Peningkatan ketepatan sasaran usulan dengan mendasarkan pada dokumen yang disusun secara ilmiah dan melibatkan partisipasi Masyarakat.	
12	Focus Group Discussion	Perlunya penajaman atas isu strategis dan tema pembangunan	Makin efektifnya program kegiatan yang memiliki daya ungkit /leverage atas solusi isu strategis dan permasalahan pembangunan	
13	Segmentasi Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD (Umum, Anak sekolah dan Lansia, difabel)	Upaya meningkatkan masukan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjangkau hingga segmen spesifik	Makin berkualitasnya perencanaan pembangunan dengan akomodasi usulan dan suara masyarakat yang lebih luas	

4.6.2 Inovasi Program/Kebijakan Pembangunan

Beberapa inovasi program/kebijakan pembangunan Kota Magelang Tahun 2017 antara lain nampak sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV.8

Inovas Program/Kebijakan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2017

No	Inovasi	Latar Belakang/Dampak positif Inovasi	Nilai Tambah Inovasi
1	Blueprint Universal Design	Masih belum maksimalnya kehadiran pemerintah bagi kaum difabel terutama untuk aksesibilitas pada infrastruktur dan fasilitas publik	Peningkatan aksesibilitas terdapat fasilitas Kota termasuk bagi para kaum difabel
2	Implementasi Masterplan Smartcity	Kota Magelang masih dalam posisi scattered untuk kategori capaian indeks smart city dalam Garuda Smart City Model	Akselerasi pencapaian target indeks smart city Kota Magelang
3	Penguatan Implementasi Masterplan Masyarakat Ekonomi ASEAN	Masih perlunya penguatan dalam kiprah kota Magelang dalam kancah MEA	Makin kuatnya kontribusi Kota Magelang dalam strategi ofensif dan defensif menghadapi MEA
4	Penguatan Implementasi Magelang sebagai Kota Layak Anak	Perlunya kesinambungan dalam <i>positioning</i> kota sebagai Kota Layak Anak	Optimalnya capaian indikator Kota Layak Anak
5	Integrasi Jamkesda ke BPJS	Kejelasan status Jamkesda di kaitkan dengan Undang Undang tentang BPJS	Makin ada keberpihakan pemerintah kepada masyarakat
6	Manajemen Persampahan : Kampung Organik dan Bank Sampah	Umur hidup TPA Banyuurip yang sudah habis; Kapasitas tempat sampah yang semakin kurang tidak sebanding dengan meningkatnya sampah	Pengurangan sampah dari sumbernya serta peningkatan pendapatan masyarakat dari pengolahan sampah
7	Penguatan dan Penataan PKL	Perlunya mempertahankan kondusivitas, ketertiban dan keindahan dengan tetap mengakomodir para PKL	Ketertiban, keindahan sekaligus kesejahteraan masyarakat meningkat

8	Penguatan Implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga	Perlunya akselerasi pencapaian indikator MKSB	Percepatan pencapaian indikator MKSB
9	Pendidikan Gratis	Masih perlunya kepedulian pemerintah terhadap pendidikan yang murah dan tetap berkualitas	<i>No one left behind</i> dalam menikmati pendidikan dasar di Kota Magelang

BAB. V

RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH



Kategorisasi Rencana Program Prioritas



BAB V

RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 memuat program-program prioritas sebagaimana tema yang diusung. Program prioritas merupakan program utama yang diselenggarakan oleh SKPD. Program ini secara langsung dalam bentuk outcome mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

5.1 Kategorisasi Rencana Program Prioritas

Dalam implementasinya, mengingat urgensi dan kapasitas keuangan daerah maka program program yang telah dijabarkan dibagi menjadi tiga porsi utama , yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Definisi masing masing prioritas dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel V.1
Kategorisasi Program Prioritas

No	Prioritas	Terminologi
1	Prioritas I	merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2017 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau program unggulan kepala daerah, Kesepakatan Hasil Musrenbang, Hasil Telaahan Pokok Pikiran Dewan serta Program Intervensi yang bersifat Nasional/Provinsi, dan hasil hasil Focuss Group Discussion (FGD)
2	Prioritas II	Merupakan program daerah dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2017 dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021
3	Prioritas III	merupakan prioritas program ditingkat OPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap OPD

5.1.1 Program Prioritas I

5.1.1.1 Program Prioritas Tema Perencanaan Tahun 2017

Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2017 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021. Tema dasar perencanaan tahun pertama adalah **Membangun Kolaborasi dan Konektivitas**: melalui penumbuhan kolaborasi dan konektivitas antar pelaku pembangunan, membangun konektivitas antara wilayah, memantapkan fungsi kota jasa, membangun landasan untuk mengembangkan kota cerdas, kota inklusif dan kota hijau serta pemerataan pelayanan dan penyelesaian permasalahan yang masih ada.

Program yang sesuai dengan Tema ini adalah sebagai berikut :

Tabel V.2
Program Prioritas Tema Perencanaan Tahun 2017

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
1	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	0,21 %	112.573.000	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	100%	3.141.523.000	
			Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	85%		
			Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan: - S1 - S2	46% 8,5%		
		Program Pendidikan kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti diklat fungsional dan teknis	94%	827.070.000	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
			Persentase ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan	80%		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah	Persentase ASN yang mengikuti diklat prajabatan	100%	246.788.000	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
2	Peningkatan daya saing daerah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	942 m	5.932.100.000	DPU PR
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase kawasan strategis yang terbangun	2 kawasan	2.213.464.000	DPU PR
		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	45%	2.424.900.000	Dinas Perhubungan
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	56%	402.232.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	84.104.000	Setda
		Program peningkatan dan Pengembangan	Persentase pertumbuhan PAD	18,44%	6.918.234.000	BPKAD

		pengelolaan keuangan daerah				
		Program peningkatan pelayanan kesehatan	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan	A	5.765.107.000	Dinas Kesehatan
			Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Terakreditasi	40%		
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Prosentase sekolah melaksanakan CBT	30%	17.840.446.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan jumlah pemuda berprestasi tingkat regional, nasional, dan internasional	1	1.017.895.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Peningkatan cabang olahraga tingkat regional, nasional, dan internasional	6	2.085.021.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	223	179.907.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	267.032.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Kota cerdas	Program sarana dan prasarana bidang tehnologi informatika	Cakupan data yang terpusat dan terkendali	60%	2.146.010.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
			Persentase PD yang menerapkan e-government	100%		
			Interoperabilitas antar system informasi	0		
			Cakupan WAN (Wide Area Network) Kota	30%		
		Program Pemanfaatan Ruang	Persentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas untuk semua	40%	71.136.000	DPU-PR
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan jenis usaha ekonomi kreatif	75 UMKM	67.448.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Pemerintahan responsif dan partisipatif	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah KIM per kelurahan	17	1.136.156.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
			Pertumbuhan jumlah ruang media yang digunakan interaksi	6		
		Program perencanaan	Persentase aspirasi masyarakat yang	76%	1.555.712.000	Bappeda

		Pembangunan Daerah	terakomodir			
5	Pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/SDLB/MI/Paket A	112%	17.840.446.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			APM SD/SDLB/MI/Paket A	98,61%		
			APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	85,00%		
			APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	76,00%		
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	65%	363.521.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%	681.939.000	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	10,00%	78.860.000	Dinas Sosial
			Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	100%		
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Cacat tidak potensial yang menerima bantuan sosial	15%	50.665.000	Dinas Sosial
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	20,00%	364.589.000	Dinas Sosial
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	37.5%	56.217.000	Satpol PP
			cakupan peningkatan penanggulangan bencana	25%		
			Cakupan penanganan korban bencana	100%		
Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana						
6	Pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	20%	742.784.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi	47,7	328.124.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program pengembangan	Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya	3,3%	6.278.481.000	Dinas Lingkungan Hidup

	Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	88%		Dinas Lingkungan Hidup
	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah akses informasi lingkungan hidup dan data sda dan lingkungan hidup yang tersedia	6 buah	918.396.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program peningkatan pengendalian polusi	Jumlah pemantauan gerakan di lima sektor	100%	69.566.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program peningkatan pengelolaan RTH	Luas RTH kota	18%	9.071.476.000	Dinas Lingkungan Hidup

5.1.1.2 Akomodasi Hasil Musrenbang

Salah satu prioritas yang harus diakomodir adalah Prioritas Hasil Musrenbang. Makna Musrenbang Kota Magelang dari waktu ke waktu semakin dipersepsikan baik oleh masyarakat dibuktikan dengan tingkat partisipasi yang semakin menggembirakan sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel berikut :

Tabel V.3

Tingkat partisipasi Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kelurahan dan kecamatan

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	JML UNDANGAN	JML HADIR	PROSENTASE
KEC. MAGELANG SELATAN		100	95	95,00
1	Jurangombo Selatan	135	122	90,37
2	Jurangombo Utara	100	100	100,00
3	Magersari	120	120	100,00
4	Tidar Utara	105	104	99,05
5	Tidar Selatan	100	100	100,00
6	Rejowinangun Selatan	135	134	99,26
KEC. MAGELANG TENGAH		120	108	90,00
7	Magelang	120	118	98,33
8	Kemirirejo	100	100	97,58
9	Cacaban	100	95	95,00
10	Rejowinangun Utara	125	125	100,00
11	Panjang	90	87	96,67
12	Gelangan	110	100	90,91
KEC. MAGELANG UTARA		155	155	100,00
13	Wates	90	80	88,89
14	Potrobangsari	100	85	85,00
15	Kedungsari	50	48	96,00
16	Kramat Utara	100	95	95,00
17	Kramat Selatan	80	78	97,50

Hasil Musrenbang memperlihatkan bahwa beberapa kegiatan dan program yang diakomodir baik Kelurahan maupun Kecamatan serta Organisasi Perangkat Daerah melibatkan beberapa program sebagaimana mana tabel berikut :

Tabel V.4

Program Prioritas Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2017

No	Program	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Frekuensi Patroli Satpol PP 2. Tingkat Penyelesaian pelanggaran perda 3. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 4. Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat 5. Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertaman dan ketertiban umum (K3) 6. Cakupan Linmas per 10.000 penduduk 7. Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas 8. cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	3 kali/hari 90% 6,52 10,00 94,5% 70,47 11,27% 9	2.633.094.000	Satpol PP
2	Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenaga listrikian	Rasio ketercukupan PJU	62%	7.153.723.000	Dinas Iingkungan Hidup
3	Program Infrastruktur pedesaan	Pendampingan fisik dan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	100%		DPU PR
4	Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1. Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum 2. Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	7,78 45%	2.424.900.000	Dinas Perhubungan
5	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1. Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya 2. Persentase sampah perkotaan yang ditangani	3,3% 88%	6.278.481.000	Dinas Lingkungan Hidup
6	Perlindungan dan konservasi SDA	1. Indeks Kualitas Air, 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Hutan 4. Jumlah SDA yang terkonservasi Jenis flora	76% 78% 48% 47,7 8 Jenis	328.124.000	Dinas Lingkungan Hidup

		Jenis fauna	2 Jenis		
9	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase Rekomendasi Jumlah hasil pengawasan yang ditaati	20%	742.784.000	Dinas Lingkungan Hidup
10	Peningkatan Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) 	1 92% 85,00 80%	475.329.000	Dinas Pertanian dan Pangan
11	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV	1,82%	333.003.000	Dinas Pertanian dan Pangan
12	Peningkatan kesejahteraan petani/ peternak	Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	4	100.391.000	Dinas Pertanian dan Pangan
13	Pengembangan budidaya perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi hasil perikanan: Produksi Ikan 2. Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB 3. Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB 	160,65 0 30%	229.385.000	Dinas Pertanian dan Pangan
14	Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Padi 2. Jagung 3. Ubi kayu 	3201 11 13,5	376.829.000	Dinas Pertanian dan Pangan
15	Pengembangan budi daya perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi hasil perikanan: Produksi Ikan 2. Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB 3. Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB 	160,65 0 30%	229.385.000	Dinas Pertanian dan Pangan
16	Pengelolaan keragaman budaya	1. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina	14,86	320.776.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		dan dikembangkan 2. Jumlah festival seni dan budaya. 3. Cakupan gelar seni 75%	11 100%		
17	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	1. Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional 2. Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional - Peringkat di POPDA SD - Peringkat di POPDA SMP - Peringkat di POPDA SMA - Peringkat di Dulongmas - Peringkat di PORPROV 3. Jumlah klub olahraga 4. Jumlah organisasi olahraga	6 7 17 22 NA NA 183 35	2.085.021.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
18	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	1. Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM 2. Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	3% 10%	90.128.000	Sekretariat Daerah
19	Program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM	Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan	3%	163.976.000	Dinas Perindustrian dan perdagangan
20	Program pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru	75 UMKM	67.448.000	Dinas Perindustrian dan perdagangan
21	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1. Prosentase koperasi aktif 2. Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP	93,25% 25%	130.818.000	Dinas Perindustrian dan perdagangan
22	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	3%	924.021.000	Dinas Perindustrian dan perdagangan
23	Program pengembangan	Peningkatan daya saing IKM	3,1%	475.020.000	Dinas Perindustrian dan

	industri kecil dan menengah	Formal			perdagangan
24	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra industri	11	36.256.000	Dinas Perindustrian dan perdagangan
25	Program peningkatan kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP,haccp, PRODUKSI BERSIH, iso,gkm,sni, DLL)	4,10%	23.655.000	Dinas Perindustrian dan perdagangan
26	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Persentase peserta pelatihan tersertifikasi 2. Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kompetensi 3. Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP	2% 65%	981.102.000	Dinas Tenaga Kerja
27	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Persentase wirausaha baru 2. Persentase pencari kerja yang ditempatkan 3. Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan	5% 70%	3.735.307.000	Dinas Tenaga Kerja
28	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100% 20,00%	364.589.000	Dinas Sosial
29	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik 2. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	86% 86%	893.983.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30	Program pembangunan infrastruktur pedesaan/kelurahan	Pendampingan fisik dan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	100%	569.926.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
31	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1. Persentase panjang drainase dalam kondisi baik 2. Jumlah shipon yang dibangun	85% 6	474.608.000	DPU-PR
32	Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	1. Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik 2. Persentase	86% 86%	893.983.000	DPU-PR

		panjang jalan dalam kondisi baik			
33	Program lingkungan sehat perumahan	Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat		1.604.075.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
34	Program pembangunan turap/talud/bronjong				DPU-PR
35	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tingkat mandiri	52,94%	50.015.000	Dinas Kesehatan
36	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%	681.939.000	Dinas Kesehatan
37	Program upaya kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase alat laboratorium terkalibrasi 2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun 	<p>100%</p> <p><20%</p> <p><45%</p> <p><15,4%</p>	9.856.186.000	Dinas Kesehatan
38	Program perbaikan gizi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 3. Prevalensi Balita Gizi Buruk 	<p>100</p> <p>100</p> <p><0.31</p>	179.398.000	Dinas Kesehatan
39	Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	A	5.765.107.000	Dinas Kesehatan
40	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 	<p>95%</p> <p>100%</p> <p>92%</p>	316.477.000	Dinas Kesehatan

		4. Cakupan Pelayanan Nifas	100%		
41	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak				Dinas Kesehatan
42	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya 2. Cakupan Puskesmas Ramah Lansia 	<p>75%</p> <p>12%</p>	40.001.000	Dinas Kesehatan
43	Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi 2. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%) 3. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%) 4. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan 5. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan 6. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk 	<p>5%</p> <p>77%</p> <p>88%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>30%</p>	54.696.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun			
		7. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100%		
		8. Partisipasi laki-laki dalam ber-KB	10%		
		9. Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri	57%		
		10. Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out)	13%		
		11. Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun	3%		
		12. Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	88%		
		13. Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR)	95%		
		14. Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif	100%		
		15. Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif	100%		
		16. Prosentase kehamilan pada ibu yang jarak	3%		

		<p>Tingkat provinsi</p> <p>Tingkat nasional</p> <p>3. Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang</p> <p>4. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK</p>	<p>peringkat 1</p> <p>peringkat 1</p> <p>24%</p>		
47	Program Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	54%	78.945.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
48	Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	<p>1. Jumlah regulasi ketahanan pangan</p> <p>2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%)</p> <p>3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</p> <p>4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)</p>	<p>1</p> <p>92%</p> <p>85,00</p> <p>80%</p>	475.329.000	Dinas Pertanian dan Pangan
49	Program Pembinaan peran serta masyarakat pelayanan KB Mandiri	Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	64%	124.585.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
50	Program peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	<p>1. Frekuensi Patroli Satpol PP</p> <p>2. Tingkat Penyelesaian pelanggaran perda</p> <p>3. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk</p> <p>4. Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat</p> <p>5. Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan,</p>	<p>3 kali/hari</p> <p>90%</p> <p>6,52</p> <p>10,00</p> <p>94,5%</p>	2.633.094.000	Satpol PP

		ketertaman dan ketertiban umum (K3)			
		6. Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	70,47		
		7. Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	11,27%		
		8. cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	9		
51	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	1. Persentase penanganan penyakit masyarakat 2. Perda yang mengatur kontrol tempat hiburan 3. Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras dan tindak prostitusi 4. Jumlah kampung bebas narkoba 5. Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	90% - - NA NA	182.348.000	Satpol PP

5.1.1.3 Prioritas Program Hasil FGD

Dalam penyusunan Program, salah satu upaya pendalaman berbagai isu strategis adalah melalui *Focus Group Discussion* (FGD). FGD dilaksanakan dengan melibatkan OPD terkait bersama *stakeholders*, LSM dan delegasi masyarakat dari kelurahan dan kecamatan.

Dalam Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2017 beberapa FGD sebagaimana tabel berikut :

Tabel V.5

Tema FGD dalam Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2017

No	FGD	Isu yang dibahas
1	Penanggulangan Kemiskinan	Membahasn langkah langkah yang bersifat perencanaan dan evaluasi upaya penanggulangan kemiskinan di

		bawah angka saat ini 9,05 %
2	Magelang sebagai Kota Layak Anak	Memperkuat Kota Magelang sebagai Kota yang nyaman dan layak bagi anak
3	Penguatan Implementasi Manajemen Persampahan	Meningkatkan implementasi manajemen persampahan untuk mengatasi permasalahan persampahan kota
4	Penguatan implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga	Memperkuat implementasi atas Masterplan MKSB dari hasil evaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan
5	Implementasi RAD Masyarakat Ekonomi ASEAN	Menggagas positioning Kota dalam memberikan langkah antisipatif dan kontributif dalam skema kebebasan arus barang, arus jasa, arus modal, arus SDM dari dan ke Kota Magelang dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN
6	Menuju Smart City	Upaya meningkatkan eksekusi atas Smart city Model yang dikembangkan di Kota Magelang agar meningkat dari Scattered ke level berikutnya
7	Sustainable Development Goals.	Mencari format terbaik bagi upaya mendukung pencapaian target indikator SDGs

Program program yang diprioritaskan berdasarkan hasil FGD yang akan dilaksanakan pada RKPD Kota Magelang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

5.1.1.3.1 Penanggulangan Kemiskinan

Tabel berikut menunjukkan rencana program penanggulangan kemiskinan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2017 :

Tabel V. 6
Program Penanggulangan Kemiskinan

No	Program	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1. Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian 2. Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	100% 10,00%	78.860.000	Dinas Sosial
2	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan 2. Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes)	100% 100%	8.079.999	Dinas Kesehatan

		strata 1) untuk pasien masyarakat miskin 3. Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	15%		
3	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA	70%	156.273.000	Dinas Sosial
4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 3. Prevalensi Balita Gizi Buruk	100 100 <0.31	179.398.000	Dinas Kesehatan
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. APM SD/SDLB/MI/Paket A 2. APK SD/SDLB/MI/Paket A 3. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 4. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 5. Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12 6. Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15 7. Rasio guru SD terhadap murid SD 8. Rasio guru SMP terhadap murid SMP 9. Angka Putus Sekolah SD/MI 10. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 11. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun 12. Angka Melanjutkan SD ke SMP 13. Angka Melanjutkan SMP ke SMA 14. Persentase sekolah yang telah	98,61% 112% 76,00% 85,00% 1:136 1:290 1:16 1:14 0,01 0,18 0,002 150% 155%	17.840.446.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		<p>menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa</p> <p>15. Penurunan jumlah kenakalan pelajar</p> <p>16. Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa</p> <p>17. Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan</p> <p>18. Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah</p> <p>19. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design</p>	<p>60%</p> <p>46 pelajar</p> <p>1</p> <p>80%</p> <p>85%</p> <p>20%</p>		
6	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pengawasan obat dan makanan	68%	93.961.000	Dinas Kesehatan
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%	681.939.000	Dinas Kesehatan
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100%	873.098.000	Dinas Kesehatan
9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	<p>1. Persentase alat laboratorium terkalibrasi</p> <p>2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan</p> <p>3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun</p>	<p>100%</p> <p><20%</p> <p><45%</p> <p><15,4%</p>	9.856.186.000	Dinas Kesehatan

10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) 2. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 3. Angka Kesakitan DBD 4. Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB 5. Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB 6. Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun 7. Penemuan kasus HIV 8. Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS 9. Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS 	<p>100</p> <p>100</p> <p><50</p> <p><105</p> <p>90</p> <p><0.5%</p> <p>100%</p>	926.375.000	Dinas Kesehatan
11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar 2. Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi 3. Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin 4. Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan 5. Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 6. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 	<p>75%</p> <p>40%</p> <p>75</p> <p>100</p> <p>60%</p> <p>65</p>	987.076.000	Dinas Kesehatan
12	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri	52,94%	50.015.000	Dinas Kesehatan
13	Program peningkatan	1. Persentase	75%	40.001.000	Dinas Kesehatan

	pelayanan kesehatan lansia	penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya 2. Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	12%		
14	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 4. Cakupan Pelayanan Nifas	95% 100% 92% 100%	316.477.000	Dinas Kesehatan
15	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	2	1.277.806.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
16	Program Lingkungan Sehat Perumahan Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat Persentase kawasan strategis yang terbangun	2 kawasan	1.604.075.000 2.213.464.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
17	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100% 20,00%	364.589.000	Dinas Sosial
18	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	50%	11.888.000	Dinas Sosial
19	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1. Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif 2. Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial 3. Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100% 3 20%	50.074.000	Dinas Sosial
20	Program Peningkatan	1. Persentase	5%	3.735.307.000	Dinas Tenaga Kerja

	Kesempatan Kerja	<p>wirausaha baru</p> <p>2. Persentase pencari kerja yang ditempatkan</p> <p>3. Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan</p>	70%		
21	Program Pendidikan Non Formal	<p>1. Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun</p> <p>2. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A</p> <p>3. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B</p> <p>4. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C</p> <p>5. Persentase lembaga PNF yang terakreditasi</p> <p>6. Jumlah Juara FASI</p> <p>7. Jumlah Juara MTQ</p>	<p>96,67%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>10,00%</p> <p>-</p> <p>1</p>	584.980.000	Dinas Pendidikan
22	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	20%	742.784.000	Dinas Lingkungan Hidup
23	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase (%) calon transmigrasi yang ditempatkan	100%	198.527.000	Dinas Tenaga Kerja
24	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	<p>1. Jumlah regulasi ketahanan pangan</p> <p>2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%)</p> <p>3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</p> <p>4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)</p>	<p>1</p> <p>92%</p> <p>85,00</p> <p>80%</p>	475.329.000	Dinas Pertanian dan Pangan
25	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	<p>1. Luas lahan pertanian organic</p> <p>2. Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian</p>	<p>0,94</p> <p>45%</p>	60.603.000	Dinas Pertanian dan Pangan
26	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	<p>1. Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM</p> <p>2. Persentase peningkatan jumlah KUM yang</p>	<p>3%</p> <p>10%</p>	90.128.000	SEKDA

		terfasilitasi HKI dan SNI			
27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penduduk berakses air minum 2. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai 3. Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan 	92 88 8		Dinas Lingkungan Hidup
28	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan 2. Jumlah festival seni dan budaya. 3. Cakupan gelar seni 75% 	14,86 11 100%	320.776.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah review PERDA/PERWAL 2. Jumlah RAPERDA/RAPER WAL baru tentang investasi 3. Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS 	1 0 0	1.467.755.000	Sekretariat Daerah
30	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	44,74%	59.213.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
31	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 	100% 20,00%	364.589.000	Dinas Sosial
32	Program peningkatan peran serta kepemudaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi 2. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi 3. Persentase pengangguran pemuda 	94,00% 1 6,65%	1.017.895.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
33	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	46.772.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

34	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat 2. LPM berprestasi <p>Tingkat kota Tingkat provinsi</p> <p>Tingkat nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang 4. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 	10	188.797.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			41% peringkat 1		
			1 peringkat 1		
			24%		
35	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat 2. Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG) 	29%	28.662.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			4		
36	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	PKK Aktif	100%	464.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
37	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM 2. Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI 	3%	90.128.000	Sekretariat Daerah
			10%		
38	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	87,50%	228.105.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
40	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	A	5.765.107.000	Dinas Kesehatan
41	Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100%	657.647.000	Bappeda

5.1.1.3.2 Program Kota Layak Anak

Kepala Daerah berkomitmen untuk menjadikan Kota Magelang sebagai **Kota Layak Anak**, tujuan kota layak anak ini adalah agar dapat membangun anak-anak yang berkualitas dengan berusaha untuk memenuhi hak sesuai dengan kebutuhan serta perlindungan anak.

Kebutuhan anak yang harus dipenuhi tak hanya dari sisi pendidikan, tetapi juga fisik mau pun non fisik. Dari sedikitnya 31 hak anak, ada empat hal utama yang harus menjadi perhatian ekstra, yakni hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi, dan keterlibatan unsur anak harus dimulai sejak proses perencanaan, untuk itu program prioritas Magelang menuju Kota Layak Anak yang akan dilaksanakan di Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel V.7
Program Kota Layak Anak

No	Program	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. APM SD/SDLB/MI/Paket A	98,61%	17.840.446.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. APK SD/SDLB/MI/Paket A	112%		
		3. APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	76,00%		
		4. APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	85,00%		
		5. Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12	1:136		
		6. Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15	1:290		
		7. Rasio guru SD terhadap murid SD	1:16		
		8. Rasio guru SMP terhadap murid SMP	1:14		
		9. Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01		
		10. Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,18		
		11. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun	0,002		
		12. Angka Melanjutkan SD ke SMP	150%		
		13. Angka Melanjutkan SMP ke SMA	155%		
		14. Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai	60%		

No	Program	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		religius dan pendidikan karakter bagi siswa			
		15. Penurunan jumlah kenakalan pelajar	46 pelajar		
		16. Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa	1		
		17. Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan	80%		
		18. Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	85%		
		19. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	20%		
2	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. APK PAUD 2. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	65% 51%	363.521.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program Pendidikan Non Formal	1. Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun 2. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 3. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 4. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 5. Persentase lembaga PNF yang terakreditasi 6. Jumlah Juara FASI 7. Jumlah Juara MTQ	96,67% 100% 100% 100% 10,00% - 1	584.980.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1. Persentase peningkatan judul buku 2. Persentase peningkatan jumlah buku 3. Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten 4. Presentase perustakaan aktif 5. Cakupan pelayanan melalui e-Library 6. Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	2,57 2,64 47,39 18,96 1% 8,33%	922.011.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional a. Propinsi b. Nasional 2. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 3. Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B 4. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs 5. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi	44 30 pelajar 14 pelajar 88% 96% 30% 20%	1.472.610.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 2. Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik 3. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 4. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik 5. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 6. Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik 7. Persentase guru	35,75% 14,23% 86% 54,15% 95,20% 67,97% 60%	1.520.585.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi 8. Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	60%		
8	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	40%	1.602.523.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%	681.939.000	Dinas Kesehatan
11	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase kesiadaan obat dan vaksin di Puskesmas	100%	873.098.000	Dinas Kesehatan
12	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase alat laboratorium terkalibrasi 2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	100% <20% <45% <15,4%	9.856.186.000	Dinas Kesehatan
13	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 3. Prevalensi Balita Gizi Buruk	100 100 <0.31	179.398.000	Dinas Kesehatan
14	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1. Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar 2. Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi 3. Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin	75% 40% 75	987.076.000	Dinas Kesehatan

No	Program	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		4. Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan	100		
		5. Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	60%		
		6. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	65		
15	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri	52,94%	50.015.000	Dinas Kesehatan
16	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 2. Cakupan Kunjungan Bayi 3. Cakupan Pelayanan Anak Balita 4. Cakupan Puskesmas Ramah Anak	85% 96% 90% 12%	117.683.000	Dinas Kesehatan
17	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 4. Cakupan Pelayanan Nifas	95% 100% 92% 100%	316.477.000	Dinas Kesehatan
18	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100% 20,00%	364.589.000	Dinas Sosial
19	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Cacat tidak potensial yang menerima bantuan sosial	15%	50.665.000	Dinas Sosial
20	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rumah sehat	84%	85.045.000	Dinas Kesehatan
21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) 2. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100 100	926.375.000	Dinas Kesehatan

No	Program	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		3. Angka Kesakitan DBD	<50		
		4. Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<105		
		5. Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		
		6. Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		
		7. Penemuan kasus HIV			
		8. Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		
		9. Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS			
22	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	100%	8.079.999	Dinas Kesehatan
		2. Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin	100%		
		3. Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	15%		
23	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	20%	742.784.000	Dinas Lingkungan Hidup
24	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1. Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum	7,78	2.424.900.000	Dinas Perhubungan
		2. Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	45%		
25	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	1. Persentase penanganan penyakit	90%	182.348.000	Satuan Polisi Pamong praja

No	Program	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		masyarakat 2. Perda yang mengatur kontrol tempat hiburan 3. Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras dan tindak prostitusi 4. Jumlah kampung bebas narkoba 5. Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	- -		
26	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1. Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana 2. Cakupan tim relawan siaga bencana 3. Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana 4. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana 5. Cakupan penanganan korban bencana	37.5% 2,94 25% 25% 100%	56.217.000	Satuan Polisi Pamong praja
27	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2. Jumlah pengunjung museum 3. Jumlah koleksi museum	100 5.150 11	267.032.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1. Persentase organisasi pemuda yang dibina/difasilitasi 2. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi 3. Persentase pengangguran pemuda	94,00% 1 6,65%		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

No	Program	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
30	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1. Persentase kriminalitas yang tertangani 2. Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai-nilai luhur Pancasila 3. Perda pelarangan peredaran narkoba 4. Jumlah Kampung Bebas Narkoba 5. Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN 6. Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS 7. Rasio jumlah siskamling aktif 8. Frekuensi Patroli Satpol PP 9. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	80% 0 - 2 1,13% 3% 0,78 NA NA	649.778.000	Badan Kesbangpolinmas
31	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1. Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional 2. Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional - Peringkat di POPDA SD - Peringkat di POPDA SMP - Peringkat di POPDA SMA - Peringkat di Dulongmas - Peringkat di PORPROV 3. Jumlah klub olahraga 4. Jumlah organisasi olahraga	6 7 17 22 NA NA 183 3	2.085.021.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
32	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah review PERDA/PERWAL 2. Jumlah RAPERDA/RAPER WAL baru tentang investasi 3. Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1 0 0	1.467.755.000	Sekretariat Daerah
33	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1. Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	4	698.564.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		2. Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	65%		
34	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	44,74%	59.213.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
35	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Rasio KDRT	0,055%	92.291.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2. Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	23		
		3. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%		
		4. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%		
		5. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100%		
		6. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%		
		7. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%		
		8. Cakupan Penegakan Hukum	100%		

No	Program	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		dari Tingkat Pendidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak			
		9. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%		
		10. Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	3%		
36	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	44,74%	59.213.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
37	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	5%	54.696.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%)	77%		
		3. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha	88%		
		Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)			
		4. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	100%		
		5. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100%		
		6. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30%		
		7. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di	100%		

No	Program	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		setiap desa/kelurahan			
		100% setiap tahun			
8.		Partisipasi laki-laki dalam ber-KB	10%		
9.		Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri	57%		
10.		Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out)	13%		
11.		Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun	3%		
12.		Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	88%		
13.		Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR)	95%		
14.		Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif	100%		
15.		Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif	100%		
16.		Prosentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun	3%		
17.		Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun	2%		
18.		Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro	100%		
19.		Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga	100%		
20.		Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan	100%		
21.		Persentase Peningkatan jumlah keluarga sejahtera	87%		
22.		Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan	20%		

No	Program	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah			
38	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	87,50%	228.105.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
39	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
40	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	2%	11.018.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
41	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	3%	13.800.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
42	Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100%	657.647.000	Bappeda

5.1.1.3.3 Manajemen Persampahan

Sampah menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat perkotaan khususnya Kota Magelang. Keterbatasan lahan dan prediksi masa hidup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyuwir yang secara teknis berakhir mendorong pemerintah dan seluruh elemen mencari inovasi dari permasalahan tersebut. Dapat dikatakan pada tahun 2017 ini Kota Magelang sudah darurat sampah. FGD **Manajemen Persampahan** dilaksanakan sebagai salah satu upaya menghimpun usulan dan inovasi dari berbagai pihak. Selain strategi 3 R (*Reduce, reuse dan recycle*) yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif masyarakat, terobosan yang tak kalah penting adalah dengan pengembangan kampung-kampung organik. Kampung organik ini dimaksudkan sebagai upaya lebih lanjut atas bagaimana manajemen persampahan berbasis masyarakat dapat menjangkau aspek ekonomi sosial serta lingkungan hidup. Pada Tahun 2017 seluruh Kelurahan di Kota Magelang ditargetkan telah semakin intensif mengembangkan secara baik kampung-kampung organik dimaksud. Program-program prioritas mendukung Manajemen Persampahan berbasis masyarakat antara lain sebagai berikut:

Tabel V.8

Program Manajemen Persampahan

No	Program	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya 2. Prosentase sampah perkotaan yang ditangani 3. Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya 	<p>3,3</p> <p>88%</p> <p>3,3%</p>	6.278.481.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	20%	742.784.000	Dinas Lingkungan Hidup
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kualitas Air, 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Hutan 4. Jumlah SDA yang terkonservasi 	<p>76%</p> <p>78%</p> <p>48%</p> <p>47,7</p>	328.124.000	Dinas Lingkungan Hidup
4	Program Pengelolaan Pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar 2. Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional 3. Cakupan pedagang pasar yang dibina 4. Persentase pasar tradisional yang dikelola 	<p>7%</p> <p>10%</p> <p>8%</p> <p>75%</p>	3.990.277.000	Dinas Perindag

5.1.1.3.4 Penguatan Implementasi Magelang Kota Sejuta Bunga

Penetapan branding Kota Magelang dengan “Kota Sejuta Bunga” sejak tahun 2011 berdampak pada perwujudan branding tersebut sampai saat ini. Makna **Kota Sejuta Bunga** sebagai identitas atau *branding* Kota Magelang dalam mengemas Kota Magelang sebagai Kota Jasa. Adapun bentuk nyata dari Kota Sejuta Bunga ini adalah terwujudnya Kota Magelang sebagai kota yang bersih, indah, tertib, dan nyaman dengan bunga sebagai ikon utama.

Dengan kota yang lebih menarik maka akan semakin terbuka peluang usaha dan investasi, yang pada akhirnya akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota. Dan seiring dengan peningkatan peran dan fungsi sebagai kota jasa, maka akan memberi peningkatan kepada kesejahteraan masyarakat.

Di Tahun 2017, penguatan implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga , dengan program-program prioritas yang mendukung adalah:

Tabel V.9
Program Penguatan Implementasi MKSB

No	Program	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 2. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir 3. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir 4. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik 5. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	100 70 72 35 76%	1.555.712.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	7	166.300.000	Dinas Perhubungan
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya 2. Prosentase sampah perkotaan yang ditangani 3. Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya	3,3 88% 3,3%	6.278.481.000	Dinas Lingkungan Hidup
4	Program Pengendalian	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil	20%	742.784.000	Dinas Lingkungan Hidup

	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	pengawasan yang ditaati			
5	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH Kota	18%	9.071.476.000	Dinas Lingkungan Hidup
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) 	<p>1</p> <p>92%</p> <p>85,00</p> <p>80%</p>	475.329.000	Dinas Pertanian dan Pangan
7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Petani yang melaksanakan GHP 2. Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian 	<p>1%</p> <p>10</p>	194.080.000	Dinas Pertanian dan Pangan
8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kualitas Air, 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Hutan 4. Jumlah SDA yang terkonservasi Jenis flora Jenis fauna 	<p>76%</p> <p>78%</p> <p>48%</p> <p>47,7</p> <p>8 Jenis</p> <p>2 Jenis</p>	328.124.000	Dinas Lingkungan Hidup
9	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah pemantauan gerakan di lima sektor	100%	69.566.000	Dinas Lingkungan Hidup
10	Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum 2. Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi 	<p>7,78</p> <p>45%</p>	2.424.900.000	Dinas Perhubungan
11	Program Peningkatan sarana dan prasarana			410.369.000	Dinas Pertanian dan Pangan

	aparatur				
12	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frekuensi Patroli Satpol PP 2. Tingkat Penyelesaian pelanggaran perda 3. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 4. Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat 5. Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertaman dan ketertiban umum (K3) 6. Cakupan Linmas per 10.000 penduduk 7. Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas 8. cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas 	<p>3 kali/hari</p> <p>90%</p> <p>6,52</p> <p>10,00</p> <p>94,5%</p> <p>70,47</p> <p>11,27%</p> <p>9</p>	2.633.094.000	Satuan Polisi Pamong Praja
13	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2. Jumlah pengunjung museum 3. Jumlah koleksi museum 	<p>100</p> <p>5.150</p> <p>11</p>	267.032.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan 2. Jumlah festival seni dan budaya. 3. Cakupan gelar seni 75% 	<p>14,86</p> <p>11</p> <p>100%</p>	320.776.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Petani yang melaksanakan GAP 2. Rasio petani terlatih 	<p>5,88%</p> <p>85%</p>	15.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
16	Program Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lama Kunjungan Wisatawan 	<p>2-3</p>	1.559.103.000	Dinas Kepemudaan, Olah

	Pemasaran Pariwisata	2. Persentase TIC yang representative 3. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 4. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	0 1.136.435 5.185		Raga dan Pariwisata
17	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Destinasi Wisata Unggulan 2. Persentase destiasi wisata yang memenuhi sapta pesona	3 44,44%	114.868.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
18	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	9	70.835.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
20	Program Pengembangan Nilai Budaya	1. Jumlah gedung kesenian 2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3. Cakupan kajian seni 50% 4. Cakupan fasilitas seni 30% 5. Cakupan sumber daya manusia kesenian 25% 6. Cakupan tempat 100% 7. Cakupan organisasi 34%	1 11 75 35 77 100 100	638.544.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

5.1.1.3.5 Penguatan Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dalam rangka menghadapi yang berlangsung mulai akhir tahun 2015, Kota Magelang telah secara antisipatif menyiapkan RAD menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana terdapat kebebasan arus barang, jasa, investasi dan tenaga kerja, diperlukan kesiapan dalam menghadapinya agar pasar bebas

tersebut dapat kita manfaatkan untuk kemajuan daerah. Untuk penguatan implementasinya beberapa program prioritas yang mendukung antara lain:

Tabel V.11

Penguatan Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN

No	Program	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
1	Program perencanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 2. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir 3. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir 4. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik 5. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir 	<p>100</p> <p>70</p> <p>72</p> <p>35</p> <p>76%</p>	1.555.712.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase peserta pelatihan tersertifikasi 2. Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kompetensi 3. Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP 	<p>2%</p> <p>65%</p>	981.102.000	Dinas Tenaga Kerja
3	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase peningkatan kualits pelaku UKM 2. Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI 	<p>3%</p> <p>10%</p>	90.128.000	Sekretariat Daerah
4	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan 2. Jumlah festival seni dan budaya. 3. Cakupan gelar seni 75% 	<p>14,86</p> <p>11</p> <p>100%</p>	320.776.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Program Peningkatan Kerjasama	Cakupan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri	100%	300.046.000	Sekretariat Daerah

	Antar Pemerintah Daerah				
6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah review PERDA/PERWAL 2. Jumlah RAPERDA/RAPE RWAL baru tentang investasi 3. Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS 	<p>1</p> <p>0</p> <p>0</p>	1.467.755.000	Sekretariat Daerah
7	Program Perencanaan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	642.691.000	Bappeda

5.1.1.3.6 Penguatan Implementasi Menuju Smart City

Dalam rangka penguatan implementasi atas Masterplan Smart City Kota Magelang , hasil FGD menunjukkan beberapa pendekatan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel V.12
Penguatan Implementasi Smart City

No	Program	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%	681.939.000	Dinas Kesehatan
2	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				Dinas Tenaga Kerja
3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional <ol style="list-style-type: none"> a. Propinsi 30 pelajar b. Nasional 14 pelajar 2. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 88% 3. Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B 96% 4. Persentase sekolah melaksanakan 	<p>44</p> <p>30 pelajar</p> <p>14 pelajar</p> <p>88%</p> <p>96%</p> <p>30%</p>	1.472.610.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		5. CBT SMP/ MTs Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi	20%		
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 2. Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik 3. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 4. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik 5. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 6. Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik 7. Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi 8. Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	35,75% 14,23% 86% 54,15% 95,20% 67,97% 60% 60%	1.520.585.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
5	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1. Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan 2. Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian	7.936 4	178.055.000	Dinas Perhubungan
6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah review PERDA/PERWAL 2. Jumlah RAPERDA/RAPE RWAL baru tentang investasi 3. Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1 0 0	1.467.755.000	Sekretariat Daerah
7	Program Kerjasama Informasi	Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	70%	162.780.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitika

	Dengan Mass Media				
8	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase LKJIP SKPD dengan nilai baik 2. Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah 3. Perjanjian Kinerja yang memenuhi kriteria standar 4. Persentase LKJIP SKPD dengan nilai baik 5. Penurunan kasus temuan LKPD 6. Rasio laporan APBD, DAK dan Bantuan Keuangan tepat waktu 7. Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah 8. Nilai survey kepuasan penggunaan layanan PD 9. Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP 	<p>CC</p> <p>60%</p> <p>60%</p> <p>40%</p> <p>2</p> <p>85%</p> <p>60%</p> <p>90</p>		Semua Perangkat Daerah
9	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2. Jumlah pengunjung museum 3. Jumlah koleksi museum 	<p>100</p> <p>5.150</p> <p>11</p>	267.032.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: <ol style="list-style-type: none"> a. Radio b. Media cetak 	<p>60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan</p> <p>12 kali/ 5 agama dan</p>	1.136.156.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitika

		<p>2. Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin</p> <p>3. Jumlah KIM</p> <p>4. Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>5. Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa</p> <p>6. Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi</p>	<p>kepercayaan 3</p> <p>17</p> <p>6</p> <p>-</p>		
11	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	<p>1. Lama Kunjungan Wisatawan</p> <p>2. Persentase TIC yang representative</p> <p>3. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara</p> <p>4. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara</p>	<p>2-3</p> <p>0</p> <p>1.136.435</p> <p>5.185</p>	1.559.103.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
12	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	9	70.835.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
13	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	<p>1. Implementasi SIPID (Sistim Invormasi Potensi Investasi Daerah)</p> <p>2. Implementasi pemanfaatan SPIPISE</p>	<p>0</p> <p>70%</p>	296.583.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitika
14	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	<p>1. Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik</p> <p>2. Jumlah Sub terminal (TERMINAL Tipe C) yang tertata</p> <p>3. Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik</p> <p>4. Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan</p>	<p>40%</p> <p>1</p> <p>55%</p> <p>86</p>	524.276.000	Dinas Perhubungan

		5. Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)	17		
15	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	A	5.765.107.000	Dinas Kesehatan
16	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: <ol style="list-style-type: none"> a. Radio 60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan b. Media cetak 12 kali/ 5 agama dan kepercayaan 2. Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin 3 3. Jumlah KIM 17 4. Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. 6 5. Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa - 6. Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi 		1.136.156.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitika
17	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku 34% 2. Persentase arsip dan risalah 82% 3. Persentase Penyelamatan Arsip 47% 		358.064.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPDP 100 2. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir 70 3. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir 72 		1.555.712.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

		4. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	35		
		5. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	76%		

5.1.1.3.6 Sustainable Development Goals (SDGs)

Agenda paska MDGS yang diratifikasi oleh Indonesia adalah Sustainable Development Goals. Kota Magelang dalam rangka mendukung pencapaian gloab SDGS telah menetapkan titik berat program yang akan ditempuh sebagai berikut

Tabel V.13
Program Prioritas SDGs

No	Program	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%	681.939.000	Dinas Kesehatan
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. APM SD/SDLB/MI/Paket A 2. APK SD/SDLB/MI/Paket A 3. APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B 4. APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B 5. Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12 6. Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15 7. Rasio guru SD terhadap murid SD 8. Rasio guru SMP terhadap murid SMP 9. Angka Putus Sekolah SD/MI 10. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 11. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun	98,61% 112% 76,00% 85,00% 1:136 1:290 1:16 1:14 0,01 0,18 0,002	17.840.446.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		<p>12. Angka Melanjutkan SD ke SMP 150%</p> <p>13. Angka Melanjutkan SMP ke SMA 155%</p> <p>14. Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa 60%</p> <p>15. Penurunan jumlah kenakalan pelajar 46 pelajar</p> <p>16. Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa 1</p> <p>17. Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan 80%</p> <p>18. Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah 85%</p> <p>19. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design 20%</p>			
3	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100%	873.098.000	Dinas Kesehatan
4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<p>1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 100%</p> <p>2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 20,00%</p>		364.589.000	Dinas Sosial
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	<p>1. Persentase alat laboratorium terkalibrasi 100%</p> <p>2. Proporsi Kasus <20%</p>		9.856.186.000	Dinas Kesehatan

		Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<45% <15,4%		
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. APK PAUD 2. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	65% 51%	363.521.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) 2. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 3. Angka Kesakitan DBD 4. Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB 5. Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB 6. Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun 7. Penemuan kasus HIV 8. Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS 9. Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS	100 100 <50 <105 90 <0.5% 100%	926.375.000	Dinas Kesehatan
8	Program Pendidikan Non Formal	1. Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun 2. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 3. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 4. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 5. Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	96,67% 100% 100% 100% 10,00%	584.980.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		6. Jumlah Juara FASI 7. Jumlah Juara MTQ	- 1		
10	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tingkat mandiri	52,94%	50.015.000	Dinas Kesehatan
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional a. Propinsi b. Nasional 2. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 3. Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B 4. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs 5. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi	44 30 pelajar 14 pelajar 88% 96% 30% 20%	1.472.610.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 2. Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik 3. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 4. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik 5. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 6. Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik 7. Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi 8. Persentase PAUD yang telah menerapkan bina	35,75% 14,23% 86% 54,15% 95,20% 67,97% 60% 60%	1.520.585.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa			
13	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	4	100.391.000	Dinas Pertanian dan Pangan
14	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1. Luas lahan pertanian organic 2. Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	0,94 45%	60.603.000	Dinas Pertanian dan Pangan
15	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	1. Jumlah pelaku usaha peternakan organik: Peternak ayam buras/ ayam broiler Peternak kelinci Peternak kambing/domba 2. Rasio peternak terlatih	1 1 1 85%	58.875.000	Dinas Pertanian dan Pangan
16	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	17% 20% 78,00%	182.669.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 3. Prevalensi Balita Gizi Buruk	100 100 <0.31	179.398.000	Dinas Kesehatan
18	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	95% 100% 92%	316.477.000	Dinas Kesehatan

		4. Cakupan Pelayanan Nifas	100%		
19	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			5.600.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio KDRT 2. Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 4. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu 5. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS 6. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu 7. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 	<p>0,055%</p> <p>23</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	92.291.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		8. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 9. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 10. Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	100% 100% 3%		
21	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	46.772.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan peserta KB aktif	77,5%	63.077.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	1 92% 85,00 80%	475.329.000	Dinas Pertanian dan Pangan
24	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	A	5.765.107.000	Dinas Kesehatan
25	Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan	100%	657.647.000	Bappeda

		bidang sosial budaya			
--	--	----------------------	--	--	--

5.1.1.4 Prioritas Program Akomodasi Pokok Pokok Pikiran DPRD

Pokok pokok Pikiran DPRD Kota Magelang disampaikan bersamaan dengan Penyusunan Rancangan RKPD Kota Magelang. Melalui hasil telaahan baik oleh Bappeda Maupun oleh perangkat Daerah terkait maka dapat ditampilkan program yang merupakan akomodasi Pokok Pikiran Dewan

Tabel V.14

Akomodasi Pokok Pokok Pikiran DPRD

No	Urusan	Pokok Pikiran	Pendekatan Solusi / Program	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	Pendidikan ANak Usia Dini hendaklah ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui program beasiswa maupun kemudaha pengurusan legalitas PAUD. Hal ini karena jenjang PAUD merupakan masa yang paling tepat untuk pembentukan karakter dan budi pekerti	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. APK PAUD 2. Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	65% 51%	363.521.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2		Program Peningkatan sarana prasarana sekolah terutama keberadaan laboratorium di setiap sekolah , akses jalan maupun bangunan yang memadai sesuai dengan standar pelayanan public	Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun	1. APM SD/SDLB/MI/Paket A 2. APK SD/SDLB/MI/Paket A 3. APM SMP/SMPLB/MTs/P aket B 4. APK SMP/SMPLB/MTs/P aket B 5. Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12 6. Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15 7. Rasio guru SD terhadap murid SD	98,61% 112% 76,00% 85,00% 1:136 1:290 1:16	17.840.446.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

				8. Rasio guru SMP terhadap murid SMP	1:14		
				9. Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01		
				10. Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,18		
				11. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun	0,002		
				12. Angka Melanjutkan SD ke SMP	150%		
				13. Angka Melanjutkan SMP ke SMA	155%		
				14. Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	60%		
				15. Penurunan jumlah kenakalan pelajar	46 pelajar		
				16. Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa	1		
				17. Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan	80%		

				berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan 18. Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah 19. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	85% 20%		
3		Peningkatan tenaga pendidik yang di sertai peningkatan kesejahteraan guru baik swasta maupun negeri	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 2. Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik 3. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 4. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik 5. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 6. Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik 7. Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan	35,75% 14,23% 86% 54,15% 95,20% 67,97% 60%	1.520.585.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

				<p>peningkatan kompetensi</p> <p>8. Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa</p>	60%		
4		Pendidikan gratis dan program pengaktifan organisasi kepemudaan dalam kegiatan organisasi dan kegiatan olahraga yang ada di Kota Magelang	Program peningkatan peran serta kepemudaan	<p>1. Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi</p> <p>2. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi</p> <p>3. Persentase pengangguran pemuda</p>	<p>94,00%</p> <p>1</p> <p>6,65%</p>	1.017.895.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5		Pemberian kemudahan kepada masyarakat Kota Magelang maupun masyarakat di luar Kota Magelang yang ingin bersekolah di Kota Magelang	Pendekatan Pendidikan Untuk Semua				
6		Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus tepat sasaran.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	<p>1. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional</p> <p>a. Propinsi</p> <p>b. Nasional</p> <p>2. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B</p> <p>3. Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B</p>	<p>44</p> <p>30 pelajar</p> <p>14 pelajar</p> <p>88%</p> <p>96%</p>	1.472.610.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

				4. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs	30%		
				5. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi	20%		
		Peningkatan mutu dana akses terhadap program kejar paket A_C dan universitas terbuka	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. APM SD/SDLB/MI/Paket A	98,61%	17.840.446.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2. APK SD/SDLB/MI/Paket A	112%		
				3. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	76,00%		
				4. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	85,00%		
				5. Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12	1:136		
				6. Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15	1:290		
				7. Rasio guru SD terhadap murid SD	1:16		
				8. Rasio guru SMP terhadap murid SMP	1:14		
				9. Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01		
				10. Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,18		
				11. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan	0,002		

				<p>wajar Dikmen 9 Tahun</p> <p>12. Angka Melanjutkan SD ke SMP 150%</p> <p>13. Angka Melanjutkan SMP ke SMA 155%</p> <p>14. Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa 60%</p> <p>15. Penurunan jumlah kenakalan pelajar 46 pelajar</p> <p>16. Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa 1</p> <p>17. Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan 80%</p> <p>18. Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap 85%</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				Sekolah 19. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	20%		
		Perlunya peningkatan perhatian pada kaum difabel melalui peningkatan pendidikan luar biasa (SLB)	Kewenangan Provinsi Jawa Tengah				
		Perlunya diaktifkan kembali pendidikan keagamaan	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	40%	1.602.523.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kesehatan	Penyediaan alat kesehatan posyandu, balita dan lansia	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%	681.939.000	Dinas Kesehatan
		Mendorong program pelayanan kesehatan masyarakat dengan mendorong pelayanan puskesmas menjadi rumah sakit rujukan rawat inap dengan peningkatan secara menyeluruh baik bangunan, fasilitas dan tenaga medisnya	Program Pembinaan Pelayanan BLUD Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	A	5.765.107.000	Dinas Kesehatan
		Penyusunan SOP pelayanan BPJS serta pelayanan lainnya secara umum	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase alat laboratorium terkalibrasi 2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Proporsi obesitas	100% <20% <45%	9.856.186.000	Dinas Kesehatan

				pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		
		Peningkatan kualitas RSU Tidar, baik menyangkut penambahan sarana parker, rawat inap, penambahan alat kesehatan yang lebih canggih, penyediaan ruang khusus bayi, balita dan dewasa, penambahan dokter, dan tenaga kesehatan supaya masyarakat Kota Magelang mendapatkan pelayanan yang maksimal.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	A	5.765.107.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan pasien dengan Jamkesda maupun BPJS harus tetap maksimal, professional berdasarkan standar pelayanan yang ada.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase alat laboratorium terkalibrasi 2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun 	100% <20% <45% <15,4%	9.856.186.000	Dinas Kesehatan
		Perlunya kajian untuk pembuatan RUsamh Sakit Tipe C dan D di Kota Magelang guna memenuhi kebutuhan	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat	A	5.765.107.000	Dinas Kesehatan

		elayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Magelang dan sekitarnya	BLUD	kesehatan rujukan			
		Optimalisasi pelayanan puskesmas lebih ditingkatkan karena pelayanan awal dan preventif, tenaga puskesmas perlu ditambah, pengawasan terkait gizi buruk yang ada di masing masing jangkauan puskesmas sekitar, pembuatan ruang khusus dan aksesibilitas untuk balita dan lansia, penambahan tenaga psikolog di setiap puskesmas,, dan penambahan waktu jam buka puskesmas	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	A	5.765.107.000	Dinas Kesehatan
		Peningkatan kegiatan sosialisasi bidang kesehatan sebagai upaya preventif seperti sosialisasi HIV AIDS, demam berdarah	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) 2. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 3. Angka Kesakitan DBD 4. Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB 5. Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB 6. Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun 7. Penemuan kasus 	<p>100</p> <p>100</p> <p><50</p> <p><105</p> <p>90</p> <p><0.5%</p>	926.375.000	Dinas Kesehatan

				<p>HIV</p> <p>8. Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS</p> <p>9. Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS</p>	100%		
		Kalau perlu diberikan aturan yang jelas supaya masyarakat lebih cepat mengurus dan mempersiapkan persyaratan-persyaratan	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	A	5.765.107.000	Dinas Kesehatan
		Peralatan Posyandu Balita dan Lansia RW 4 Kramat Utara	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	<p>1. Persentase alat laboratorium terkalibrasi</p> <p>2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan</p> <p>3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun</p>	<p>100%</p> <p><20%</p> <p><45%</p> <p><15,4%</p>	9.856.186.000	Dinas Kesehatan
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%	681.939.000	
		Mendorong program pelayanan kesehatan masyarakat yaitu puskesmas untuk dijadikan rumah sakit rujukan rawat inap	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	A	5.765.107.000	Dinas Kesehatan

		dengan peningkatan secara menyeluruh baik bangunan, fasilitas, dan tenaga medisnya					
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Kajian yang mendalam tentang perluasan wilayah Kota Magelang karena jika tidak maka hal ini sangat berpengaruh dan akan mengganggu pelayanan-pelayanan di sektor sektor penting dalam masyarakat	Dalam proses di Kemendagri, koordinasi terus dilakukan				
		Pemeliharaan drainase dan gorong-gorong	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1. Persentase panjang drainase dalam kondisi baik 2. Jumlah shipon yang dibangun	85% 6	474.608.000	DPU-PR
		Peningkatan pelayanan jasa dan konstruksi meliputi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung maupun monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan pembanguna yang sudah ada dan mangkrak	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	72%	148.758.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pemerataan pembangunan antara wilayah utara, tengah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Panjang jalan penghubung baru	942 m	5.932.100.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		dan selatan		yang dibangun 2. Persentase panjang trotoar dalam kondisi baik	64,39%		
			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pendampingan fisik dan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	100%		
		Perbaikan jalan dan penyempurnaan sarana dan prasarana pasar	Program Pengelolaan Pasar	1. Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar 2. Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional 3. Cakupan pedagang pasar yang dibina 4. Persentase pasar tradisional yang dikelola	7% 10% 8% 75%	3.990.277.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penambahan penerangan untuk wilayah Sldotopo untuk menghindari tindak criminal	Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bidang	Rasio ketercukupan PJU	62%	7.153.723.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program pengembangan PLN di daerah terpencil	Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bidang	Rasio ketercukupan PJU	62%	7.153.723.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Perlunya perhatian terhadap banyaknya keterlambatan pekerjaan fisik dan non fisik sehingga perlu dibuat jadwal yang lebih spesifik/detil, agar bisa berjalan sesuai yang diharapkan	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	72%	148.758.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		Untuk proyek proyek berskala besar agar seyogyanya bisa dilaksanakan awal Triwulan ke dua sampai akhir triwulan ketiga	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	72%	148.758.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penataan pasar Gotong Royong untuk segera dilaksanakan rehabilitasi dan renovasi, mengingat pasar tersebut merupakan pasar khusus/pasar malam yang dibutuhkan tidak hanya masyarakat Kota Magelang tetapi berbagai kota terdekat	Program Pengelolaan Pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar 2. Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional 3. Cakupan pedagang pasar yang dibina 4. Persentase pasar tradisional yang dikelola 	<p>7%</p> <p>10%</p> <p>8%</p> <p>75%</p>	3.990.277.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
		Bedah rumah dan rehabilitasi permukiman kumuh dan tidak layak huni di Kota Magelang	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat		1.604.075.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Pendampingan fisik dan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	100%	569.926.000	
	Urusan Pangan						
		Pemerintah diharapkan secara aktif melakukan kegiatan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Jumlah regulasi ketahanan pangan	1	475.329.000	Dinas Pertanian dan Pangan

		pemantauan harga dan operasi pasar sebagai upaya menjamin ketahanan pangan di masyarakat melalui ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok di pasar	pertanian/perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 92% 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 85,00 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) 80% 			
	Urusan Lingkungan Hidup						
		Fasilitasi program 3 R dalam bidang persampahan antara lain dengan pengadaan mesin penghancur sampah, alat pembersih bitil daur ulang	Program Kinerja Pengembangan Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya 3,3 2. Prosentase sampah perkotaan yang ditangani 88% 3. Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya 3,3% 	6.278.481.000	Dinas Lingkungan Hidup	
		Perintisan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah untuk membangun TPA Regional, sementara TPA yang sudah ada perlu ditingkatkan lagi sarana dan prasarannya	Program Kinerja Pengembangan Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya 3,3 2. Prosentase sampah perkotaan yang ditangani 88% 3. Berkurangnya 3,3% 	6.278.481.000	Dinas Lingkungan Hidup	

				Volume Sampah dari sumbernya			
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil						
		Optimalisasi pelayanan publik di tataran tingkat RT, RW, kelurahan hingga SKPD di atasnya	Program Penataan Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan penduduk memiliki KTP-el 100% 2. Cakupan penduduk memiliki KIA 100% 3. Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan 100% 4. Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk 935 5. Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang 100% 6. Persentase kepemilikan akte kematian 50% 7. Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi 40% 	100%	1.337.968.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Perlunya kajian yang mendalam tentang rencana perluasan wilayah Kota Magelang menjadi 4 kecamatan sebagai syarat administratif sebuah kota.	Pratinjau regulasi				
	Urusan						

	Pemberdayaan masyarakat dan Desa							
		Perlunya kegiatan pelatihan bagi masyarakat yang disesuaikan dengan minat peserta	Program Keberdayaan Pedesaan	Peningkatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat 2. LPM berprestasi <p>Tingkat kota Tingkat provinsi</p> <p>Tingkat nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang 4. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 	10	188.797.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Peninjauan ulang terhadap Peraturan Daerah tentang Tugas Pokok dan Fungsi LPM sebagai sarana pemberdayaan masyarakat	Program Keberdayaan Pedesaan	Peningkatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat 2. LPM berprestasi <p>Tingkat kota Tingkat provinsi</p> <p>Tingkat nasional</p>	10	188.797.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				3. Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang 4. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	24%		
		Penyaluran bantuan sosial diprioritaskan pada program program pro rakyat terutama untuk pemberdayaan masyarakat dan penanganan ekonomi lemah	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Persentase LKJIP SKPD dengan nilai baik 2. Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah 3. Perjanjian Kinerja yang memenuhi kriteria standar 4. Persentase LKJIP SKPD dengan nilai baik 5. Penurunan kasus temuan LKPD 6. Rasio laporan APBD, DAK dan Bantuan Keuangan tepat waktu 7. Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja	CC 60% 60% 40% 2 85% 60%	66.051.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				<p>8. Nilai survey kepuasan penggunaan layanan PD</p> <p>9. Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP</p>	90		
		Pemberdayaan melalui bantuan pengadaan mesin pembuat tahu dan bantuan modal bagi pengrajin tahu	Kajian regulasi belum memungkinkan				
		Skema bantuan modal bagi usaha simpan pinjam skala RW	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan	3%	163.976.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Urusan Perhubungan						
		Mengenai eks jalur transportasi kereta api yang melintasi Kota Magelang agar ditukar guling atau dibeli sehingga warga yang bertempat tinggal dan bertempat usaha di atasnya merasa nyaman	Koordinasi ke Kementerian Perhubungan bersama dengan Komisi DPRD Kota Magelang				
		Hal yang sangat penting saat ini adalah Peran Pemerintah Daerah dalam upaya untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan yang menangani perkereta apian di Indonesia. Mengingat bahwa Pembangunan sarana transportasi Kereta Api di	Sesuai dengan roadmap terbaru Kementerian Perhubungan, jalur yang akan dilalui berada di luar kota				

		wilayah Kota Magelang sudah masuk dalam Prolegnas 2016-2019. Selain dari pada itu Pemerintah Daerah juga harus mengadakan pembicaraan serta komunikasi secara intens dengan masyarakat yang menduduki/menempati jalur-jalur PJKA disepanjang wilayah Kota Magelang					
		Sebagai publik transport yang murah serta bersifat masal memang kereta api akan menjadi andalan bagi masyarakat. Perlu juga dikaji apabila memungkinkan tentang pemindahan jalur dari rel kereta yang sekarang sudah terkubur sekian puluh tahun tersebut, setidaknya tidak melewati pusat kota tetapi dicari tempat yang tidak membahayakan masyarakat					
		Peningkatan fasilitas penunjang di jalan raya seperti pemasangan lampu penerangan jalan, pemasangan kaca cembung pada setiap jalan	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum 2. Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi 	7,78 45%	2.424.900.000	Dinas Perhubungan
		Implementasi pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan 2. Rasio KBWU yang 	7.936 4	178.055.000	Dinas Perhubungan

				tidak melakukan pengujian			
	Urusan Komunikasi dan Informatika						
		Memperbanyak fasilitas hotspot area baik di taman taman, balai kelurahan maupun tempat publik lainnya	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Bidang Teknologi Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interoperabilitas antar system informasi 2. Cakupan WAN (Wide Area Network) kota (Dishubkominfo) 3. Cakupan data yang terpusat dan terkendali 4. Persentase PD yang menerapkan e-government 	0 30% 60% 100%	2.146.010.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitika
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: <ol style="list-style-type: none"> a. Radio b. Media cetak 2. Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin 3. Jumlah KIM 4. Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. 	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan 12 kali/ 5 agama dan kepercayaan 3 17 6	1.136.156.000	

				5. Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa 6. Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi	-		
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
		Antisipasi MEA perlu penguatan koperasi dan pengembangan UMKM	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1. Prosentase koperasi aktif 2. Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan Jumlah wirausaha baru Jumlah ekspor produk ke LN	93,25% 25% 3% 75 UMKM US\$950,000	130.818.000 163.976.000 67.448.000 7.533.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pembinaan, pendampingan pemberdayaan dan kemudahan akses permodalan serta proteksi kepada UMKM guna meningkatkan daya saing UMKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan Jumlah wirausaha baru	3% 75 UMKM	163.976.000 67.448.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pemberdayaan usaha UMKM di	Program Pengembangan Sistem	Persentase peningkatan KUM	3%	163.976.000	Dinas Perindustrian dan

		setiap wilayah RT RW hingga kelurahan untuk peningkatan produktivitas	Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	yang menerima akses permodalan			Perdagangan
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga						
		Program pengaktifan organisasi kepemudaan dalam kegiatan organisasi dan olahraga	Program peningkatan peran serta kepemudaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase organisasi pemuda yang dibina/difasilitasi 2. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi 3. Persentase pengangguran pemuda 	<p>94,00%</p> <p>1</p> <p>6,65%</p>	<p>1.017.895.000</p>	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional 2. Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional <ul style="list-style-type: none"> - Peringkat di POPDA SD - Peringkat di POPDA SMP - Peringkat di POPDA SMA - Peringkat di Dulongmas - Peringkat di PORPROV 3. Jumlah klub olah raga 4. Jumlah organisasi 	<p>6</p> <p>7</p> <p>17</p> <p>22</p> <p>NA</p> <p>NA</p> <p>183</p> <p>35</p>	<p>2.085.021.000</p>	

				olah raga			
		Mengembalikan Stadion Muh Subroto sebagai pembinaan dan penggemblengan atlet dan optimalisasi kolam renang Muh Subroto	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase kawasan strategis yang terbangun	2 kawasan	2.213.464.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyediaan tempat berkeaktivitas untuk pemuda Kota Magelang	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1. Persentase organisasi pemuda yang dibina/difasilitasi 2. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi 3. Persentase pengangguran pemuda	94,00% 1 6,65%	1.017.895.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH Kota	18%	9.071.476.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	1. Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional 2. Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional - Peringkat di POPDA SD - Peringkat di POPDA SMP - Peringkat di POPDA SMA - Peringkat di Dulongmas - Peringkat di	6 7 17 22 NA NA	2.085.021.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

				PORPROV			
				3. Jumlah klub olah raga	183		
				4. Jumlah organisasi olah raga	35		
	Urusan Kebudayaan						
		Pementasan seni dan budaya di Kota Magelang	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Lama Kunjungan Wisatawan	2-3	1.559.103.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
				2. Persentase TIC yang representative	0		
				3. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	1.136.435		
				4. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	5.185		
			Program Pengembangan Nilai Budaya	1. Jumlah gedung kesenian	1	638.544.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	11		
				3. Cakupan kajian seni 50%	75		
				4. Cakupan fasilitas seni 30%	35		
				5. Cakupan sumber	77		

				<p>daya manusia kesenian 25%</p> <p>6. Cakupan tempat 100%</p> <p>5. Cakupan organisasi 34%</p>	100		
		Pembudayaan bahasa Jawa dengan menjadikan bahasa Jawa sebagai bahasa daerah di sekolah	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	40%	1.602.523.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan gamelan untuk paguyuban Kethoprak di Kelurahan Tidar Selatan dan Rejo Utara	Secara regulasi belum bisa dilakukan				
		Pengadaan peralatan dan kostum Jathulan Cipto Manunggal	Secara regulasi belum bisa dilakukan				
	Urusan Pariwisata						
		Penambahan sarana dan prasarana bagi pengembangan wisata Gunung Tidar	Program rehabilitasi hutan dan lahan			216.712.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan Museum dengan baik sebagai ciri khas Kota dan dijadikan sebagai promosi wisata	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	<p>1. Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan</p> <p>2. Jumlah pengunjung museum</p> <p>3. Jumlah koleksi museum</p>	<p>100</p> <p>5.150</p> <p>11</p>	267.032.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Taman Kyai Langgeng hendaknya dikembalikan ke konsep awal pendirian dengan ditambahkan fasilitas yang	Koordinasi dengan BUMD Taman Kyai Langgeng				

		lengkap dan wahana permainan (modern dan tradisional)					
		Taman Badaan sebagai taman kota harus dirawat dan dikembangkan baik dengan baik sehingga bisa menjadi embrio bagi pengembangan dan pembangunan wisata edukasi di Kota Magelang.	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH Kota	18%	9.071.476.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Urusan Pertanian						
		Pencegahan alih fungsi lahan pertanian yang semakin terbatas	Program Perencanaan Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL) 2. Prosentase perijinan yang sesuai Tata Ruang 3. Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital 4. Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL) 5. Prosentase perijinan yang sesuai Tata Ruang 6. Rasio ketersediaan informasi mengenai 	<p>0,08</p> <p>1</p> <p>0,15</p> <p>50%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	451.126.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

				Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital			
		Peningkatan klinik hewan kepada masyarakat	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase hewan sehat	83	287.315.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Peningkatan rumah potong hewan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan RPH dan hanya membeli daging yang disembelih di RPH	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	3. Jumlah pelaku usaha peternakan organik: Peternak ayam buras/ ayam broiler Peternak kelinci Peternak kambing/domba 4. Rasio peternak terlatih	1 1 1 85%	58.875.000	Dinas Pertanian dan Pangan
	Urusan Perdagangan						
		Perbaikan sistem pemasaran terhadap pasar tradisional agar dapat bersaing di era global dan memberikan keamanan dan kenyamanan para pedagang dan konsumen.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Program Pengelolaan Pasar	Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah 1. Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar 2. Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional 3. Cakupan pedagang pasar yang dibina 4. Persentase pasar	3% 7% 10% 8% 75%	924.021.000 3.990.277.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

				tradisional yang dikelola			
		Optimalisasi cash register terhadap RM, restaurant dan perhotelan untuk peningkatan PAD.	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase pertumbuhan PAD 2. Prosentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	18,44% 81%	6.918.234.000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
	Pemerintahan Umum	Penataan kelembagaan Pemerintah Kota Magelang disertai dengan penguatan struktur organisasi dan pemberdayaan staf pemerintah daerah	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah review PERDA/PERWAL 2. Jumlah RAPERDA/RAPER WAL baru tentang investasi 3. Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1 0 0	1.467.755.000	Sekretariat Daerah
		Penempatan pegawai disesuaikan dengan eselon dan kepangkatan , sementara itu pengisian jabatan bisa dilakukan melalui lelang jabatan untuk mengetahui visi dan misinya dengan melibatkan beberapa ahli untuk melakukan fit and proper test , sehingga profesionalitas dapat terbangun	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			97.407.000	Sekretariat Daerah
		Peningkatan kualitas SDM melalui pengiriman pegawai ke studi pada jenjang yang lebih tinggi maupun melalui kegiatan pelatihan/training	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1. Persentase ASN yang memiliki kualifikasi: Pendidikan S1 Pendidikan S2 2. Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKD 3. Persentase sistem	46% 8,5% 100 0,41	3.141.523.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

				pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK 4. Persentase seleksi terbuka untuk jabatan structural 100% 5. Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN 5% 6. Persentase ASN yang dijatuhi hukuman 0,10% 7. Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK 41%			
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan disertai dengan keterbukaan informasi publik, untuk memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan kepercayaan pada pemerintahan, taat kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas daerah.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 100 2. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir 70 3. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir 72 4. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik 35 5. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir 76%	1.555.712.000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Pengembangan	1. Jumlah publikasi	1.136.156.000		Dinas Komunikasi,

			Komunikasi, Informasi dan Media Massa	<p>materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Radio b. Media cetak <ol style="list-style-type: none"> 2. Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin 3. Jumlah KIM 4. Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. 5. Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa 6. Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi 	<p>60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan</p> <p>12 kali/ 5 agama dan kepercayaan</p> <p>3</p> <p>17</p> <p>6</p> <p>-</p>		Informatika dan Statitika
		Optimalisasi peran pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan peran serta masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 2. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir 3. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir 4. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik 	<p>100</p> <p>70</p> <p>72</p> <p>35</p>	1.555.712.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	<p>5. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir 76%</p> <p>1. Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah:</p> <p>a. Radio 60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan</p> <p>b. Media cetak 12 kali/ 5 agama dan kepercayaan</p> <p>2. Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin 3</p> <p>3. Jumlah KIM</p> <p>4. Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. 17 6</p> <p>5. Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa -</p> <p>6. Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi</p>		1.136.156.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitika
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			172.563.000	Sekretariat Daerah
		Terkait dengan Bansos untuk dapat diprioritaskan di tahun 2016 dan khusus untuk yang batal menerima bansos di tahun 2015 diharapkan tidak ada lagi survey	Dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada				
		Perlu adanya pelatihan pelatihan bagi aparatur yang	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1. Persentase ASN yang memiliki		3.141.523.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

		lebih bersifat berkesinambungan melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi pada bidangnya		kualifikasi: Pendidikan S1 46% Pendidikan S2 8,5% 2. Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKD 100 3. Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK 0,41 4. Persentase seleksi terbuka untuk jabatan structural 100% 5. Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN 5% 6. Persentase ASN yang dijatuhi hukuman 0,10% 7. Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK 41%			Pelatihan
		Adanya perlakuan yang adil bagi tempat-tempat ibadah yang jelas-jelas telah berijin.	Dilakukan sesuai dengan kewenangan yang ada				
		Dalam laporan keuangan pemerintah Kota Magelang terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, pengendalian internal terdapat kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan daerah;	Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah			279.092.000	Sekretariat Daerah

		kekurangan volume atas pekerjaan di beberapa SKPD serta pemberian penghasilan bagi Dewan Pembina Perusahaan Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan					
		Perlu penambahan biaya operasional di tiap RT maupun RW mengingat peran RT dan RW sangat penting guna membantu pelayanan pemerintah daerah sampai lapisan terbawah.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat 2. LPM berprestasi <p>Tingkat kota 41% Tingkat provinsi peringkat 1</p> <p>Tingkat nasional peringkat 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang 24% 4. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 	10	188.797.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penambahan personil untuk ahli E KTP, yang nantinya akan ditempatkan di masing masing kecamatan atau kelurahan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan penduduk memiliki KTP-el 100% 2. Cakupan penduduk memiliki KIA 100% 3. Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan 100% 4. Kepemilikan akte 935 	100%	1.337.968.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

				kelahiran per 1000 penduduk 5. Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang 6. Persentase kepemilikan akte kematian 7. Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	100% 50% 40%		
		Perda- perda yang sudah disahkan untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh SKPD terkait dan ketegasan sanksi terhadap pelanggaran perda	Secara bertahap akan dilaksanakan di tahun tahun mendatang sesuai dengan kapasitas yang ada Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	1. Persentase penanganan penyakit masyarakat 2. Perda yang mengatur kontrol tempat hiburan 3. Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras dan tindak prostitusi 4. Jumlah kampung bebas narkoba 5. Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	90% - - NA NA	182.348.000	Satuan Polisi Pamong praja
		Peninjauan kembali aturan	Sesuai regulasi yang ada				

		tentang jabatan dan lain-lain mengingat banyaknya PNS yang dirugikan. Perlu berpedoman pada peraturan yang berlaku terutama daftar urut kepangkatan dan jabatan.					
		Pelayanan di kelurahan dan kecamatan perlu ditingkatkan perlu pendelegasian yang jelas untuk peningkatan kecepatan layanan Peningkatan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan teknologi	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			172.563.000	Sekretariat Daerah

5.1.2 Program Prioritas II

Merupakan program daerah dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD serta pencapaian indikator daerah.

5.1.3 Program Prioritas II

Merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/ fungsi tiap SKPD.

Secara lebih lengkap program dimaksud memuat kegiatan dalam rangka mencapai indikator yang ditargetkan baik pada level makro, outcome maupun level output yang di dokumentasikan dalam bentuk Matriks Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel V.15
Rekapitulasi Pagu Indikatif Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017

NO	KODE	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	2	2	3
1	10101	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	28.082.123.000
2	10201	Dinas Kesehatan	22.491.233.000
3	10202	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	150.000.000.000
4	10301	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	25.514.404.000
5	10401	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	12.443.097.000
6	10501	Satuan Polisi Pamong Praja	4.725.315.000
7	10502	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	1.836.711.000
8	10601	Dinas Sosial	1.521.735.000
9	20101	Dinas Tenaga Kerja	5.852.096.000
10	20501	Dinas Lingkungan Hidup	28.015.663.000
11	20601	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.561.013.000
12	20701	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3.369.890.000
13	20901	Dinas Perhubungan	6.150.522.000
14	21001	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	6.237.920.000
15	21201	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.620.457.000

16	21301	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	5.877.250.000
17	21701	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	10.066.623.000
18	30301	Dinas Pertanian Dan Pangan	4.346.046.000
19	30701	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	10.355.727.000
20	40103	Sekretariat Daerah	24.631.382.000
21	40104	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	19.199.564.000
22	40105	Kecamatan Magelang Selatan	5.561.923.000
23	40106	Kecamatan Magelang Tengah	5.782.727.000
24	40107	Kecamatan Magelang Utara	4.989.587.000
25	40201	Inspektorat	2.174.808.000
26	40301	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.714.661.000
27	40401	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	14.011.255.000
28	40501	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	5.052.917.000
29	40701	Badan Penelitian Dan Pengembangan	1.577.059.000
JUMLAH			419.763.708.000

Matriks
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : Pendidikan
OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5				
101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.153.140.000		2.260.797.000		
						-		
						-		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat	600 Surat	504.000	600 Surat	529.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	191.980.000	12 Bulan	201.579.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	48 Unit	26.200.000	48 Unit	27.510.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	137 Orang	842.581.000	137 Orang	884.710.050	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa dan alat kebersihan	90%	156.576.000	90%	164.404.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	47 Item	80.000.000	47 Item	84.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terpenuhinya hasil cetakan dan penggandaan	15 Item	71.030.000	15 Item	74.581.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	18 Item	9.622.000	18 Item	10.103.100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga terbeli	4 Item	5.970.000	4 Item	6.268.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	458 Eksemplar	17.768.000	458 Eksemplar	18.656.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi Ulang Tabung Gas	1 tahun	2.400.000	1 tahun	2.520.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman karyawan, tamu dan rapat insidental	1 Tahun	129.480.000	1 Tahun	135.954.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	1140 Kegiatan	387.545.000	1140 Kegiatan	406.922.250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honoror/tidak tetap	1279 Orang	212.196.000	1279 Orang	222.805.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya Pendataan Manajemen pegawai	1 Kegiatan	19.288.000	1 Kegiatan	20.252.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5				
101.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			756.857.000		794.699.850		
						-		
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya taman tanaman dan halaman	1 Kegiatan	55.600.000	1 Kegiatan	58.380.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeihanya kendaraan dinas/operasional	48 Unit	584.112.000	48 Unit	613.317.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	31 Item	68.000.000	31 Item	71.400.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	108 Unit	49.145.000	108 Unit	51.602.250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
101.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			110.934.000		116.480.700		
						-		
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	24 Buku	12.310.000	24 Buku	12.925.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	4 Buku	5.515.000	4 Buku	5.790.750	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	4 Buku	18.149.000	4 Buku	19.056.450	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	2 Kegiatan	10.000.000	2 Kegiatan	10.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan	2 Kegiatan	50.260.000	2 Kegiatan	52.773.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	Penyusunan LKj IP SKPD	15 Buku	14.700.000	15 Buku	15.435.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAU
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			363.521.000		381.697.050		
		APK PAUD		0,65		0,66		
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi		0,51		0,53		
57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatnya kualitas pendidik PAUD	235 Pendidik PAUD	91.227.000	235 Pendidik PAUD	95.788.350	Kota Magelang	DAU
58	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Pengembangan PAUD melalui pendampingan Akreditasi lembaga	2 kegiatan	35.250.000	2 kegiatan	37.012.500	Kota Magelang	DAU
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terselenggaranya kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di TK Negeri Pembina	1 Lembaga	20.240.000	1 Lembaga	21.252.000	Kota Magelang	DAU
62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Tersosialisasinya kurikulum dan bahan ajar PAUD	100 Lembaga	10.780.000	100 Lembaga	11.319.000	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5				
63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	kerja sama terjalin dengan baik	1 Lembaga	103.940.000	1 Lembaga	109.137.000	Kota Magelang	DAU
65	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Tersosialisasinya pentingnya PAUD di Kota Magelang	17 Kelurahan	15.150.000	17 Kelurahan	15.907.500	Kota Magelang	DAU
70	Lomba Semarak Anak	Kemandirian, motivasi dan keberanian anak usia dini meningkat	12 Kegiatan	70.000.000	12 Kegiatan	73.500.000	Kota Magelang	DAU
73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Meningkatnya manajemen pengelolaan PAUD	70 tenaga administrasi PAUD	16.934.000	70 tenaga administrasi PAUD	17.780.700	Kota Magelang	DAU
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			638.544.000		670.471.200		
		Jumlah gedung kesenian	1		1	-		
		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	11		12	-		
		Cakupan kajian seni 50%	75		76	-		
		Cakupan fasilitas seni 30%	35		37	-		
		Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	77		78	-		
		Cakupan tempat 100%	100		100	-		
		Cakupan organisasi 34%	100		100	-		
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya kegiatan nyadran	10 Lokasi	270.200.000	10 Lokasi	283.710.000	Kota Magelang	DAU
5	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Terlaksananya Pagelaran Wayang Kulit dalam rangka Hari Jadi	1 Kegiatan	368.344.000	1 Kegiatan	386.761.200	Kota Magelang	DAU
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			93.616.000		98.296.800		
		Jumlah kunjungan ke Desa Buku	2000		2000	-		
		Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar	0,8		0,85	-		
9	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Terpenuhinya kebutuhan membaca masyarakat	213 buku	15.450.000	213 buku	16.222.500	Kota Magelang	DAU
14	Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)	terpenuhinya kebutuhan buku	200 buah	14.800.000	200 buah	15.540.000	Kota Magelang	DAU
24	Pengolahan bahan pustaka desa buku	Terpeliharanya Buku Bacaan	4200 eks	6.000.000	4200 eks	6.300.000	Kota Magelang	DAU
25	Grand event desa buku	Memupuk minat baca masyarakat	1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	31.500.000	Kota Magelang	DAU
26	Peningkatan pelayanan desa buku	meningkatkan pelayanan	1 kegiatan	27.366.000	1 kegiatan	28.734.300	Kota Magelang	DAU
404.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			102.356.000		107.473.800	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5				
		Persentase pertumbuhan PAD	0,1844		0,1918	-		
		Prosentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	0,81		0,84	-		
16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Terciptanya laporan keuangan yang akuntabel	100 Sekolah	60.856.000	100 Sekolah	63.898.800	Kota Magelang	DAU
73	Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah	Terciptanya laporan keuangan yang akuntabel	1 Aplikasi	41.500.000	1 Aplikasi	43.575.000	Kota Magelang	DAU
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			17.840.446.000		18.732.468.300		
		APM SD/SDLB/MI/Paket A	98,61%		99,61%	-		
		APK SD/SDLB/MI/Paket A	112%		114%	-		
		APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	76,00%		78,00%	-		
		APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	85,00%		88,00%	-		
		Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-13	0,136111111		0,136111111	-		
		Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-16	0,243055556		0,243055556	-		
		Rasio guru SD terhadap murid SD	1:16		1:16	-		
		Rasio guru SMP terhadap murid SMP	1:14		1:14	-		
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01		0,01	-		
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,18		0,13	-		
		Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun	0,002		0,002	-		
		Angka Melanjutkan SD ke SMP	150%		150%	-		
		Angka Melanjutkan SMP ke SMA	155%		157%	-		
		suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	60%		65%	-		
		Penurunan jumlah kenakalan pelajar berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa	46 pelajar		42 pelajar	-		
		pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang	1			-		
		Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	80%		85%	-		
		Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	85%		87%	-		
			20%		30%	-		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5				
59	Tes pengendali mutu SMP	terpilihnya siswa berkualitas	3320 Siswa	189.000.000	3320 Siswa	198.450.000	Kota Magelang	DAU
59	Pelatihan penyusunan kurikulum	Terlaksananya Pelaksanaan Kurikulum Baru	220 orang	46.640.000	220 orang	48.972.000	Kota Magelang	DAU
67	Penyelenggaraan paket A setara SD	Warga belajar Paket A setara SD yang terampil	4 Kelompok	67.328.000	4 Kelompok	70.694.400	Kota Magelang	DAU
68	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Warga belajar paket B naik kelas dan memiliki pengetahuan	5 Kelompok	204.650.000	5 Kelompok	214.882.500	Kota Magelang	DAU
73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Terinformasinya pendidikan kepada sekolah dan masyarakat	100 Orang	51.345.000	100 Orang	53.912.250	Kota Magelang	DAU
88	Tes pengendali mutu SD	terpilihnya siswa berkualitas	2500 Siswa	147.619.000	2500 Siswa	154.999.950	Kota Magelang	DAU
97	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Kedungsari 1	12 bulan	131.008.000	12 bulan	137.558.400	Kota Magelang	DAU
98	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Kedungsari 2	12 bulan	85.510.000	12 bulan	89.785.500	Kota Magelang	DAU
99	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SDN Kedungsari 3	12 bulan	132.652.000	12 bulan	139.284.600	Kota Magelang	DAU
100	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Kedungsari 4	12 bulan	151.744.000	12 bulan	159.331.200	Kota Magelang	DAU
101	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Kedungsari 5	12 bulan	275.712.000	12 bulan	289.497.600	Kota Magelang	DAU
102	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Kramat 1	12 bulan	107.176.000	12 bulan	112.534.800	Kota Magelang	DAU
103	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Kramat 2	12 bulan	77.148.000	12 bulan	81.005.400	Kota Magelang	DAU
104	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Kramat 3	12 bulan	84.704.000	12 bulan	88.939.200	Kota Magelang	DAU
105	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Kramat 4	12 bulan	111.904.000	12 bulan	117.499.200	Kota Magelang	DAU
106	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Kramat 5	12 bulan	106.186.000	12 bulan	111.495.300	Kota Magelang	DAU
107	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 1	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Potrobangsari 1	12 bulan	68.814.000	12 bulan	72.254.700	Kota Magelang	DAU
108	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 2	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Potrobangsari 2	12 bulan	153.214.000	12 bulan	160.874.700	Kota Magelang	DAU
109	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 3	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Potrobangsari 3	12 bulan	148.666.000	12 bulan	156.099.300	Kota Magelang	DAU
110	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 4	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Potrobangsari 4	12 bulan	91.246.000	12 bulan	95.808.300	Kota Magelang	DAU
111	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Wates 1	12 bulan	135.748.000	12 bulan	142.535.400	Kota Magelang	DAU
112	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Wates 2	12 bulan	144.230.000	12 bulan	151.441.500	Kota Magelang	DAU
113	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Wates 3	12 bulan	95.138.000	12 bulan	99.894.900	Kota Magelang	DAU
114	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Wates 4	12 bulan	146.004.000	12 bulan	153.304.200	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5				
115	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Wates 5	12 bulan	78.548.000	12 bulan	82.475.400	Kota Magelang	DAU
119	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Cacaban 1	12 bulan	160.280.000	12 bulan	168.294.000	Kota Magelang	DAU
120	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SDN Cacaban 3	12 bulan	137.812.000	12 bulan	144.702.600	Kota Magelang	DAU
121	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD N Cacaban 4	12 bulan	137.130.000	12 bulan	143.986.500	Kota Magelang	DAU
122	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Cacaban 5	12 bulan	131.916.000	12 bulan	138.511.800	Kota Magelang	DAU
123	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Cacaban 6	12 bulan	146.952.000	12 bulan	154.299.600	Kota Magelang	DAU
124	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Gelangan 1	12 bulan	101.768.000	12 bulan	106.856.400	Kota Magelang	DAU
125	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Gelangan 24	12 bulan	79.046.000	12 bulan	82.998.300	Kota Magelang	DAU
126	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Gelangan 3	12 bulan	121.306.000	12 bulan	127.371.300	Kota Magelang	DAU
127	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Gelangan 5	12 bulan	170.932.000	12 bulan	179.478.600	Kota Magelang	DAU
128	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Gelangan 6	12 bulan	106.240.000	12 bulan	111.552.000	Kota Magelang	DAU
129	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Gelangan 7	12 bulan	78.346.000	12 bulan	82.263.300	Kota Magelang	DAU
130	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Kemirirejo 1	12 bulan	276.412.000	12 bulan	290.232.600	Kota Magelang	DAU
131	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Kemirirejo 3	12 bulan	298.364.000	12 bulan	313.282.200	Kota Magelang	DAU
132	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SDN Magelang 2/7	12 bulan	273.026.000	12 bulan	286.677.300	Kota Magelang	DAU
133	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Magelang 3	12 bulan	140.908.000	12 bulan	147.953.400	Kota Magelang	DAU
134	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Magelang 4	12 bulan	133.702.000	12 bulan	140.387.100	Kota Magelang	DAU
135	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Magelang 5	12 bulan	103.788.000	12 bulan	108.977.400	Kota Magelang	DAU
136	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Magelang 6	12 bulan	276.578.000	12 bulan	290.406.900	Kota Magelang	DAU
137	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Rejowinangun Utara 1	12 bulan	113.464.000	12 bulan	119.137.200	Kota Magelang	DAU
138	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Rejowinangun Utara 2	12 bulan	75.706.000	12 bulan	79.491.300	Kota Magelang	DAU
139	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Rejowinangun Utara 3	12 bulan	66.898.000	12 bulan	70.242.900	Kota Magelang	DAU
140	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Rejowinangun Utara 4	12 bulan	123.222.000	12 bulan	129.383.100	Kota Magelang	DAU
141	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Rejowinangun Utara 5	12 bulan	135.398.000	12 bulan	142.167.900	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5				
142	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Rejowinangun Utara 6	12 bulan	143.032.000	12 bulan	150.183.600	Kota Magelang	DAU
151	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Jurangombo 1	12 bulan	140.830.000	12 bulan	147.871.500	Kota Magelang	DAU
152	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Jurangombo 2	12 bulan	142.552.000	12 bulan	149.679.600	Kota Magelang	DAU
153	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Jurangombo 4	12 bulan	171.964.000	12 bulan	180.562.200	Kota Magelang	DAU
154	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Jurangombo 5	12 bulan	159.834.000	12 bulan	167.825.700	Kota Magelang	DAU
155	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Magersari 1	12 bulan	87.076.000	12 bulan	91.429.800	Kota Magelang	DAU
156	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Magersari 2	12 bulan	140.374.000	12 bulan	147.392.700	Kota Magelang	DAU
157	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Magersari 3	12 bulan	78.138.000	12 bulan	82.044.900	Kota Magelang	DAU
158	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	12 bulan	147.100.000	12 bulan	154.455.000	Kota Magelang	DAU
159	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	12 bulan	164.224.000	12 bulan	172.435.200	Kota Magelang	DAU
160	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	12 bulan	105.582.000	12 bulan	110.861.100	Kota Magelang	DAU
161	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	12 bulan	134.016.000	12 bulan	140.716.800	Kota Magelang	DAU
162	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	12 bulan	152.706.000	12 bulan	160.341.300	Kota Magelang	DAU
163	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Tidar 1	12 bulan	130.510.000	12 bulan	137.035.500	Kota Magelang	DAU
164	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Tidar 3	12 bulan	145.552.000	12 bulan	152.829.600	Kota Magelang	DAU
165	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Tidar 4	12 bulan	131.192.000	12 bulan	137.751.600	Kota Magelang	DAU
166	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Tidar 5	12 bulan	166.638.000	12 bulan	174.969.900	Kota Magelang	DAU
167	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Tidar 6	12 bulan	128.934.000	12 bulan	135.380.700	Kota Magelang	DAU
168	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SD Negeri Tidar 7	12 bulan	113.322.000	12 bulan	118.988.100	Kota Magelang	DAU
172	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 1 Magelang	12 bulan	764.715.000	12 bulan	802.950.750	Kota Magelang	DAU
173	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 2 Magelang	12 bulan	821.844.000	12 bulan	862.936.200	Kota Magelang	DAU
174	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 3 Magelang	12 bulan	772.689.000	12 bulan	811.323.450	Kota Magelang	DAU
175	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 4 Magelang	12 bulan	551.872.000	12 bulan	579.465.600	Kota Magelang	DAU
176	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 5 Magelang	12 bulan	729.790.000	12 bulan	766.279.500	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5				
177	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 6 Kota Magelang	12 bulan	564.410.000	12 bulan	592.630.500	Kota Magelang	DAU
178	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 7 Magelang	12 bulan	612.155.000	12 bulan	642.762.750	Kota Magelang	DAU
179	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 8 Magelang	12 bulan	725.875.000	12 bulan	762.168.750	Kota Magelang	DAU
180	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 9 Magelang	12 bulan	668.556.000	12 bulan	701.983.800	Kota Magelang	DAU
181	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 10 Magelang	12 bulan	689.153.000	12 bulan	723.610.650	Kota Magelang	DAU
182	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 11 Magelang	12 bulan	602.299.000	12 bulan	632.413.950	Kota Magelang	DAU
183	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 12 Magelang	12 bulan	563.538.000	12 bulan	591.714.900	Kota Magelang	DAU
184	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 13 Magelang	12 bulan	768.846.000	12 bulan	807.288.300	Kota Magelang	DAU
216.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			267.032.000		280.383.600		DAU
5	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Terpelestarinya kondisi museum, foto dan dokumen sejarah, dan partisipasi dalam pameran museum	1 Tahun	43.132.000	1 Tahun	45.288.600	Kota Magelang	DAU
6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	pengiriman duta seni kota magelang ke tingkat provinsi	1 Kegiatan	57.386.000	1 Kegiatan	60.255.300	Kota Magelang	DAU
7	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	terwujudnya masyarakat yang apresiasi serta terlibat dalam usaha pelestarian budaya daerah, peninggalan purbakala dan benda cagar budaya	1	12.260.000	1	12.873.000	Kota Magelang	DAU
8	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	Film Dokumenter	1	98.367.000	1	103.285.350	Kota Magelang	DAU
11	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Terlaksananya tukar menukar informasi pengelolaan museum dengan lebih baik	1 Kegiatan	21.404.000	1 Kegiatan	22.474.200	Kota Magelang	DAU
12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Lukisan Sejarah Kota Magelang	40	34.483.000	40	36.207.150	Kota Magelang	DAU
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			320.776.000		336.814.800		
		Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	14,86		15,32	-		
		Jumlah festival seni dan budaya.	11		12	-		
		Cakupan gelar seni 75%	1		1	-		
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Tumbuhnya keragaman budaya lokal	1 Kegiatan	111.040.000	1 Kegiatan	116.592.000	Kota Magelang	DAU
3	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	terwujudnya masyarakat yang apresiasi serta terlibat dalam usaha pelestarian budaya daerah, peninggalan purbakala dan benda cagar budaya	1 Kegiatan	22.333.000	1 Kegiatan	23.449.650	Kota Magelang	DAU
4	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Terfasilitasinya perkembangan keragaman budaya	1 Kegiatan	68.220.000	1 Kegiatan	71.631.000	Kota Magelang	DAU
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman duta seni ke tingkat nasional	1 Kegiatan	119.183.000	1 Kegiatan	125.142.150	Kota Magelang	DAU
101.18	Program Pendidikan Non Formal			584.980.000		614.229.000		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5				
		Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	0,9667		0,9699	-		
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	1		1	-		
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	1		1	-		
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	1		1	-		
		Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	0,1		0,15	-		
		Jumlah Juara FASI	-		4	-		
		Jumlah Juara MTQ	1		1	-		
3	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Terlaksananya Kegiatan Kursus di PKBM dengan baik	2 Lembaga	46.000.000	2 Lembaga	48.300.000	Kota Magelang	DAU
4	Pengembangan pendidikan keaksaraan	warga bebas buta aksara dan mempunyai ketrampilan	2 Kegiatan	90.916.000	2 Kegiatan	95.461.800	Kota Magelang	DAU
5	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Meningkatkan SDM Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan dan warga masyarakat	2 Orang	72.053.000	2 Orang	75.655.650	Kota Magelang	DAU
20	Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM	Meningkatnya mutu pelayanan PKBM	4 Lembaga	25.000.000	4 Lembaga	26.250.000	Kota Magelang	DAU
21	Pelaksanaan Pra UN Paket C	Terlaksananya Pra UN Pendidikan Kesetaraan Paket C setara SMA	170 Orang	14.906.000	170 Orang	15.651.300	Kota Magelang	DAU
22	Pelaksanaan UN Paket B dan C	Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C berjalan dengan baik	2 Kegiatan	31.348.000	2 Kegiatan	32.915.400	Kota Magelang	DAU
29	Pelatihan Program PARENTING EDUCATION bagi pendidik PAUD	Meningkatnya Pendidikan Orang tua Anak Didik	190 Peserta	23.100.000	190 Peserta	24.255.000	Kota Magelang	DAU
31	Pelaksanaan Pra UNPK	Pelaksanaan Pra UN Pendidikan Kesetaraan Paket B setara SMP berjalan dengan baik	120 Lembaga	13.979.000	120 Lembaga	14.677.950	Kota Magelang	DAU
32	Replikasi Kelurahan Vokasi	Terselenggaranya pelatihan pendidikan kecakapan hidup	2 Keluarga	60.301.000	2 Keluarga	63.316.050	Kota Magelang	DAU
33	Pelatihan Kursus	peningkatan SDM pengelola dan pembimbing kursus	90 Orang	38.577.000	90 Orang	40.505.850	Kota Magelang	DAU
41	Penyelenggaraan Paket C	Terselenggaranya pendidikan kesetaraan paket c	5 kelompok belajar	168.800.000	5 kelompok belajar	177.240.000	Kota Magelang	DAU
216.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya			179.907.000		188.902.350		
		Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	223		225	-		
		Misi kesenian 100%	0,38		0,39	-		
3	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Penyelenggaraan Kursus Komputer di PKBM	2 kegiatan	179.907.000	2 kegiatan	188.902.350	Kota Magelang	DAU
401.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			74.296.000		78.010.800		
		Jumlah review PERDA/PERWAL	1		1	-		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5				
		Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	0		0	-		
		Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	0		1	-		
						-		
7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	peraturan pendidikan berjalan dengan baik	1 Perda	30.000.000	1 Perda	31.500.000	Kota Magelang	DAU
59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	tersusunnya rancangan peraturan pelaksanaan Perda perubahan atas Perda No 2 Tahun 2010	1 raperwal	44.296.000	1 raperwal	46.510.800	Kota Magelang	DAU
101.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			1.520.585.000		1.596.614.250		
		Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	0,3575		0,355	-		
		Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	0,1423		0,1405	-		
		Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	0,86		0,85	-		
		Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	0,5415		0,5315	-		
		Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	0,952		0,951	-		
		Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	0,6797		0,6767	-		
		Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi	0,6		0,65	-		
		suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	0,6		0,65	-		
1	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	guru mendapat sertifikasi	100 Orang	45.500.000	100 Orang	47.775.000	Kota Magelang	DAU
4	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	meningkatnya kompetensi guru SD	100 %	360.000.000	100 %	378.000.000	Kota Magelang	DAU
14	Pembinaan MGMP SMP	Terlaksananya MGMP SMP	100 %	265.000.000	100 %	278.250.000	Kota Magelang	DAU
17	Pembinaan KKPS	meningkatnya kompetensi pengawas sekolah	100 %	20.000.000	100 %	21.000.000	Kota Magelang	DAU
36	Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah	Meningkatnya mutu pendidik	100 Kegiatan	60.000.000	100 Kegiatan	63.000.000	Kota Magelang	DAU
52	Workshop manajemen perencanaan terpadu	meningkatnya wawasan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	250 Orang	53.685.000	250 Orang	56.369.250	Kota Magelang	DAU
57	Jambore pendidik dan tenaga kependidikan non formal	terpilihnya tenaga pendidik non formal yang kompeten untuk mewakili di tingkat provinsi	10 %	60.000.000	10 %	63.000.000	Kota Magelang	DAU
58	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Meningkatkan mutu pendidik	1 Kegiatan	192.000.000	1 Kegiatan	201.600.000	Kota Magelang	DAU
59	Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal	terpilihnya tenaga pendidik formal yang kompeten untuk mewakili di tingkat provinsi	19 Orang	108.000.000	19 Orang	113.400.000	Kota Magelang	DAU
61	Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional	Pencapaian data yang valid untuk Peserta Ujian	140 Kegiatan	44.000.000	140 Kegiatan	46.200.000	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5				
70	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK	Meningkatkan mutu pendidik TK	1 Kegiatan	137.400.000	1 Kegiatan	144.270.000	Kota Magelang	DAU
71	Lomba Olimpiade SAINS Nasional Guru	peningkatan kemampuan dan pengetahuan	100 %	66.000.000	100 %	69.300.000	Kota Magelang	DAU
73	Guru Pembelajar	Terlaksananya Pembelajaran Guru	100 %	109.000.000	100 %	114.450.000	Kota Magelang	DAU
101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			1.472.610.000		1.546.240.500		
		Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional	44		44	-		
		a. Propinsi	30 pelajar		30 pelajar	-		
		b. Nasional	14 pelajar		14 pelajar	-		
		Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	0,88		0,88	-		
		Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	0,96		0,96	-		
		Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/MTs	0,3		0,3	-		
		Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi	0,2		0,2	-		
7	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Tersedianya informasi data pendidikan	20 %	14.592.000	20 %	15.321.600	Kota Magelang	DAU
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring Bantuan Sekolah	145 Sekolah	11.000.000	145 Sekolah	11.550.000	Kota Magelang	DAU
11	Penerimaan siswa baru	PPDB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	21 Sekolah	163.500.000	21 Sekolah	171.675.000	Kota Magelang	DAU
13	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	meningkatkan prestasi siswa	125 Siswa	206.380.000	125 Siswa	216.699.000	Kota Magelang	DAU
22	Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan	Pelaksanaan DAK sesuai dengan aturan yang ada	120 Sekolah	98.600.000	120 Sekolah	103.530.000	Kota Magelang	DAU
23	Sidak pelajar	meningkatnya disiplin belajar	18 kali	46.100.000	18 kali	48.405.000	Kota Magelang	DAU
24	Pelaksanaan asistensi APBS	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik	84 sekolah	78.763.000	84 sekolah	82.701.150	Kota Magelang	DAU
25	Manajemen dan administrasi keuangan sekolah	Penataan dan pengelolaan keuangan sekolah	84 sekolah	30.642.000	84 sekolah	32.174.100	Kota Magelang	DAU
26	Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK	terpenuhi data RK/TK/SD	10 Sekolah	30.600.000	10 Sekolah	32.130.000	Kota Magelang	DAU
29	Manajemen pengelolaan ICT center	Peningkatan pelayanan pendidikan	12 Kegiatan	37.500.000	12 Kegiatan	39.375.000	Kota Magelang	DAU
30	Penyusunan buku selayang pandang	Tersedianya informasi selayang pandang	25000 Eksemplar	24.900.000	25000 Eksemplar	26.145.000	Kota Magelang	DAU
33	Penilaian kinerja kepala sekolah	meningkatkan kinerja kepala sekolah	100 %	49.000.000	100 %	51.450.000	Kota Magelang	DAU
35	Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan	Guru dan pengawas memperoleh SK PAK	100 %	90.000.000	100 %	94.500.000	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5				
41	Penyusunan kalender pendidikan	Tersusunnya kalender pendidikan	252 Buku	16.000.000	252 Buku	16.800.000	Kota Magelang	DAU
42	Manajemen pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah	Terkelolanya BOS	135 Sekolah	32.500.000	135 Sekolah	34.125.000	Kota Magelang	DAU
47	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	Tersedianya Data Pokok Pendidikan	345 Lembaga/sekolah	55.038.000	345 Lembaga/sekolah	57.789.900	Kota Magelang	DAU
49	Akreditasi Sekolah	Akreditasi Sekolah	44 Sekolah	36.385.000	44 Sekolah	38.204.250	Kota Magelang	DAU
52	Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS	Pengelolaan data BOS sesuai ketentuan	1 Kegiatan	14.936.000	1 Kegiatan	15.682.800	Kota Magelang	DAU
77	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan	Rapat Koordinasi dan Laporan	12 laporan	436.174.000	12 laporan	457.982.700	Kota Magelang	DAU
101.23	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			1.602.523.000		1.682.649.150		
		APM SD/SDLB/MI/Paket A	98,61%		99,61%	-		
		APK SD/SDLB/MI/Paket A	112%		114%	-		
		APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	76,00%		78,00%	-		
		APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	85,00%		88,00%	-		
		Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-13	0,136111111		0,136111111	-		
		Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-16	0,243055556		0,243055556	-		
		Rasio guru SD terhadap murid SD	1:16		1:16	-		
		Rasio guru SMP terhadap murid SMP	1:14		1:14	-		
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01		0,01	-		
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,18		0,13	-		
		Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun	0,002		0,002	-		
		Angka Melanjutkan SD ke SMP	150%		150%	-		
		Angka Melanjutkan SMP ke SMA	155%		157%	-		
		suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	60%		65%	-		
		Penurunan jumlah kenakalan pelajar berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa	46 pelajar		42 pelajar	-		
		pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang	1			-		
			80%		85%	-		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5				
		Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	85%		87%	-		
		Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	20%		30%	-		
1	Lomba cerdas cermat SD	Peningkatan prestasi siswa	3 Orang	30.315.000	3 Orang	31.830.750	Kota Magelang	DAU
5	Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP	meningkatkan prestasi siswa	3 Anak	87.775.000	3 Anak	92.163.750	Kota Magelang	DAU
9	Lomba Cerdas Cermat dokter kecil	Peningkatan prestasi siswa	3 Anak	40.932.000	3 Anak	42.978.600	Kota Magelang	DAU
11	Lomba sekolah sehat SD/SMP	sekolah menjadi bersih dan sehat	15 Sekolah	43.525.000	15 Sekolah	45.701.250	Kota Magelang	DAU
17	Pelaksanaan Pra US SD	terlaksananya pra US SD	2500 Siswa	74.220.000	2500 Siswa	77.931.000	Kota Magelang	DAU
18	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD	terlaksananya ujian sekolah	2500 Siswa	158.404.000	2500 Siswa	166.324.200	Kota Magelang	DAU
19	Pelaksanaan Pra UN SMP	Pelaksanaan Pra UN SMP	3200 Siswa	94.072.000	3200 Siswa	98.775.600	Kota Magelang	DAU
20	Pelaksanaan US dan UN SMP	Bantuan tepat sasaran	3200 Siswa	132.074.000	3200 Siswa	138.677.700	Kota Magelang	DAU
21	Lomba Cerdas Cermat SMP	Meningkatnya mutu pendidikan dasar	3 Anak	23.766.000	3 Anak	24.954.300	Kota Magelang	DAU
27	Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB	Meningkatnya prestasi siswa	3 Anak	403.756.000	3 Anak	423.943.800	Kota Magelang	DAU
28	Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP	revolusi mental siswa	24 Sekolah	181.311.000	24 Sekolah	190.376.550	Kota Magelang	DAU
31	Lomba Kader Kesehatan Remaja	Terpilihnya Juara I, II dan III	3 juara	33.621.000	3 juara	35.302.050	Kota Magelang	DAU
33	Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar	meningkatkan prestasi siswa bidang agama islam untuk siswa SD & SMP	3 Anak	298.752.000	3 Anak	313.689.600	Kota Magelang	DAU
		JUMLAH		28.082.123.000		29.486.229.150		

Matriks
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : Kesehatan
OPD : Dinas Kesehatan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.861.687.000		1.954.771.350		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	5 Item	3.180.000	5 Item	3.339.000	Dinas Kesehatan	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhi kebutuhan sumber daya air dan listrik	12 Bulan	249.600.000	12 Bulan	262.080.000	Dinas Kesehatan	DAU
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan	106 Unit	40.250.000	106 Unit	42.262.500	Dinas Kesehatan	DAU
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan dinas kesehatan	38 Orang	366.344.000	38 Orang	384.661.200	Dinas Kesehatan	DAU
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor	24 Item	212.945.000	24 Item	223.592.250	Dinas Kesehatan	DAU
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksana perbaikan peralatan kerja	6 Item	13.290.000	6 Item	13.954.500	Dinas Kesehatan	DAU
7	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	55 Item	37.033.000	55 Item	38.884.650	Dinas Kesehatan	DAU
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	17 Item	13.595.000	17 Item	14.274.750	Dinas Kesehatan	DAU
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhi komponen listrik dan penerangan	9 Item	8.633.000	9 Item	9.064.650	Dinas Kesehatan	DAU
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhi bahan bacaan	12 Bulan	14.488.000	12 Bulan	15.212.400	Dinas Kesehatan	DAU
11	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhi bahan logistik	100 kali	13.464.000	100 kali	14.137.200	Dinas Kesehatan	DAU
12	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan minuman pasien dan karyawan	16 Kegiatan	62.873.000	16 Kegiatan	66.016.650	Dinas Kesehatan	DAU
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	144 kali	230.127.000	144 kali	241.633.350	Dinas Kesehatan	DAU
14	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Terpenuhi kesejahteraan pegawai honoror	26 Orang	564.454.000	26 Orang	592.676.700	Dinas Kesehatan	DAU
15	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terpenuhinya administrasi kepegawaian	12 Bulan	31.411.000	12 Bulan	32.981.550	Dinas Kesehatan	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			480.418.000		504.438.900		
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia untuk kegiatan SPGDT (televisi)	1 Unit	2.274.000	1 Unit	2.387.700	Dinas Kesehatan	DAU
2	Pengadaan mebeleur	Jumlah Sofa untuk kegiatan SPGDT yang tersedia	1 set	4.785.000	1 set	5.024.250	Dinas Kesehatan	DAU
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung DKK dan UPTD	4 Jenis	41.988.000	4 Jenis	44.087.400	Dinas Kesehatan	DAU
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	45 Unit	331.425.000	45 Unit	347.996.250	Dinas Kesehatan	DAU
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung	43 Unit	27.965.000	43 Unit	29.363.250	Dinas Kesehatan	DAU
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terseleenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor	111 Item	68.720.000	111 Item	72.156.000	Dinas Kesehatan	DAU
7	Pengadaan Papan Informasi	Jumlah papan informasi untuk kegiatan SPGDT	1 Buah	3.261.000	1 Buah	3.424.050	Dinas Kesehatan	DAU
102.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			39.625.000		41.606.250		
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terseleenggaranya bintek cara pembuatan DUPAK	50 Orang	7.125.000	50 Orang	7.481.250	Kota Magelang	DAU
2	Penilaian angka kredit aparatur	Terbitnya penilaian angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan yang dinilai	450 Orang	24.750.000	450 Orang	25.987.500	Kota Magelang	DAU
3	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Terbitnya surat ijin praktek dan ijin kerja bagi tenaga kesehatan	150 Orang	7.750.000	150 Orang	8.137.500	Kota Magelang	DAU
102.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			72.717.000		76.352.850		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja : LKPJ, Profil Kesehatan, SPM, dan IKU	4 Buku	22.468.000	4 Buku	23.591.400	Kota Magelang	DAU
2	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Renja dan Renja Perubahan SKPD	2 Dokumen	9.020.000	2 Dokumen	9.471.000	Kota Magelang	DAU
3	Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang dicetak	2 Buku	25.711.000	2 Buku	26.996.550	Kota Magelang	DAU
4	Penyusunan Renstra SKPD	Laporan Perubahan RenstraSKPD	1 dokumen	9.566.000	1 dokumen	10.044.300	Kota Magelang	DAU
5	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	Tersusunnya LAKIP SKPD	1 Buku	5.952.000	1 Buku	6.249.600	Kota Magelang	DAU
102.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			873.098.000		916.752.900		
		Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas		100%		100%		0
								0

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	Terjaminnya kualitas dan keamanan mutu obat	340 Item	23.540.000	340 Item	24.717.000	Kota Magelang	DAU
2	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Terlaksananya penyuluhan untuk tenaga farmasi di RS dan Apotik	50 Orang	8.000.000	50 Orang	8.400.000	Kota Magelang	DAU
3	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Meningkatnya pengetahuan bagi petugas pengelola obat di puskesmas, pustu, RB dan BP	100 Orang	16.388.000	100 Orang	17.207.400	Kota Magelang	DAU
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Termonitornya manajemen farmasi & pelaporan	1 Kegiatan	1.600.000	1 Kegiatan	1.680.000	Kota Magelang	DAU
5	Pengadaan bahan kimia	Peningkatan pemeriksaan rutin dan berkala	1 Paket	123.570.000	1 Paket	129.748.500	Kota Magelang	DAU
6	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Peningkatan jangkauan pengobatan & pembekalan kesehatan	5 Paket	700.000.000	5 Paket	735.000.000	Kota Magelang	DAU
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			11.253.999		11.816.699		
		Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah:						
		a. Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			
		b. Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			
		Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			
		Jumlah KIM	17		17			
		Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6		7			
		Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-		1			
		Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi						
1	Pengelolaan Website	Pengelolaan Website berjalan baik	12 bulan	11.253.999	12 bulan	11.816.699	Kota Magelang	
102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			9.856.186.000		10.348.995.300		
		Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%		100%			
		Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%			
		Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%			
1	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Terlaksananya pertemuan askep rawat jalan pusk dan pertemuan kontrasepsi pasca keguguran	2 Orang	12.637.000	2 Orang	13.268.850	Kota Magelang	DAU
2	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Terlaksananya penyemprotan lalat di TPA dan meningkatnya derajat kesehatan Petugas Sampah, terbinaanya komunikasi linsek tk kelurahan	52 kali	18.500.000	52 kali	19.425.000	Kota Magelang	DAU
3	Peningkatan kesehatan masyarakat	Terselenggaranya UKS, Sosialisasi program UKS dan Pembinaan Pelatihan dokter kecil	380 Orang	54.927.000	380 Orang	57.673.350	Kota Magelang	DAU
4	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Kesiapan petugas dalam penanggulangan bencana sebanyak 30 orang	30 Orang	11.775.000	30 Orang	12.363.750	Kota Magelang	DAU
5	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersedianya sarana dan prasarana bagi petugas P3K dan terselenggaranya refresh nakes tentang kesehatan remaja, pembinaan kader kesehatan remaja	180 kali	60.093.000	180 kali	63.097.650	Kota Magelang	DAU
6	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Terselenggaranya pengambilan sample lingkungan dan terpenuhinya reagensi untuk pemeriksaan air bersih, air minum dan air kolam renang, alat medis dan udara	2000 Lokasi	269.500.000	2000 Lokasi	282.975.000	Kota Magelang	DAU
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev lab, monev kesehatan remaja dan terlaksananya pertemuan keterpaduan program KIA	3 Kegiatan	18.748.000	3 Kegiatan	19.685.400	Kota Magelang	DAU
8	Pengadaan alat laboratorium	Tersedianya alat laboratorium	100 Paket	245.000.000	100 Paket	257.250.000	Kota Magelang	DAU
9	Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru	Terselenggaranya posko kesehatan pada hari raya dan tahu baru	1 Pos	27.463.000	1 Pos	28.836.150	Kota Magelang	DAU
10	Pembinaan kelompok kerja informal dan formal	Jumlah pengusaha yang dibina	100 orang	11.874.000	100 orang	12.467.700	Kota Magelang	DAU
11	Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada	Peningkatan pengetahuan kader	285 Orang	35.000.000	285 Orang	36.750.000	Kota Magelang	DAU
12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta	Monev dan pelaporan ke sarana kesehatan swasta	1 Kegiatan	1.950.000	1 Kegiatan	2.047.500	Kota Magelang	DAU
13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ke Puskesmas	1 Kegiatan	2.420.000	1 Kegiatan	2.541.000	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Pengendalian kualitas air bersih dan air minum	Terlaksananya pengambilan sampel, saluran PDAM dan Sumur	100 Sampel	14.500.000	100 Sampel	15.225.000	Kota Magelang	DAU
15	Kalibrasi alat kesehatan	Terakreditasi alat laboratorium	1 Item	45.000.000	1 Item	47.250.000	Kota Magelang	DAU
16	Penyelenggaraan pelayanan laboratorium klinis	Terbelinya reagensia pemeriksaan laboratorium klinis dan jumlah sampel yang diperiksa	400 Paket	69.855.000	400 Paket	73.347.750	Kota Magelang	DAU
17	Pelayanan kesehatan masyarakat	Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda	30000 Orang	8.314.883.000	30000 Orang	8.730.627.150	Kota Magelang	DAU
18	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Terpeliharanya kesehatan masyarakat kota magelang	1 Kegiatan	279.097.000	1 Kegiatan	293.051.850	Kota Magelang	DAU
19	Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan Daerah	Terlaksananya kegiatan Rakerkesda	1 Kegiatan	13.785.000	1 Kegiatan	14.474.250	Kota Magelang	DAU
20	Pendataan Perencanaan Integrasi Penduduk Miskin Peserta Jamkesda ke Dalam Program JKN	Data peserta Jamkesda yang masuk BPJS	4000 prang	173.480.000	4000 prang	182.154.000	Kota Magelang	DAU
21	Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di RB Paten	12 bulan	152.260.000	12 bulan	159.873.000	Kota Magelang	DAU
22	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bidang Kesehatan	Sosialisasi PTM, Peningkatan Kapasitas SDM, Peningkatan Kapasitas Kader Posbindu, Terlaksana kegiatan Pemeriksaan pengemudi	190 orang	23.439.000	190 orang	24.610.950	Kota Magelang	DAU
102.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan			93.961.000		98.659.050		
		Cakupan pengawasan obat dan makanan		68%		70%		
1	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Terlaksananya uji sample makanan jajanan anak sekolah, makanan dan minuman menjelang hari raya idul fitri, natal dan tahun baru	500 Sampel	25.550.000	500 Sampel	26.827.500	Kota Magelang	DAU
2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Terselenggaranya pemeriksaan sampel dan terbelinya reagensia pemeriksaan makanan dan minuman	350 Sampel	50.000.000	350 Sampel	52.500.000	Kota Magelang	DAU
3	Pembinaan Apotek dan Produsen Industri Rumah Tangga	Pembinaan Apotek dan Industri Rumah Tangga Pangan	70 apotek	18.411.000	70 apotek	19.331.550	Kota Magelang	DAU
102.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			681.939.000		716.035.950		
		Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat		97%		97%		
1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Tersedianya sarana media Promosi Kesehatan	100 %	81.120.000	100 %	85.176.000	Kota Magelang	DAU
2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Banyaknya kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan	57 Kegiatan	127.930.000	57 Kegiatan	134.326.500	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)	Terlaksananya kegiatan Simpus	12 Bulan	54.980.000	12 Bulan	57.729.000	Kota Magelang	DAU
4	Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat	Terlaksananya pendataan PBHS	34000 Orang	98.430.000	34000 Orang	103.351.500	Kota Magelang	DAU
5	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	Tercapainya strata posyandu purnama mandiri dan strata desa siaga purnama mandirimeleui pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	150 Orang	106.761.000	150 Orang	112.099.050	Kota Magelang	DAU
6	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Meningkatnya kemampuan tenaga penyuluh kesehatan	40 Orang	149.999.000	40 Orang	157.498.950	Kota Magelang	DAU
7	Penyebarluasan informasi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	Masyarakat Mengetahui adanya program Jaminan Kesehatan	510 orang	62.719.000	510 orang	65.854.950	Kota Magelang	DAU
102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			179.398.000		188.367.900		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin		100		100		
		cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		100		100		
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31		<0.31			
1	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Terlaksananya orientasi gizi buruk bagi kader, orientasi anemia bagi kader, orientasi antropometri bagi petugas kesehatan, monitoring pelacakan dan penanganan kasus balita gizi buruk, meningkatnya pengetahuan kader dalam garam beryodium	10 Kegiatan	142.702.000	10 Kegiatan	149.837.100	Kota Magelang	DAU
2	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Terlaksananya pengetahuan kader tentang PSG kadarzi	2 Orang	15.028.000	2 Orang	15.779.400	Kota Magelang	DAU
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya Laporan program gizi	5 Orang	21.668.000	5 Orang	22.751.400	Kota Magelang	DAU
102.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			85.045.000		89.297.250		
		Persentase rumah sehat		84%		84,3%		
1	Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum	Tercapainya penyehatan TTU, Rumah sehat dan pembinaan Kader kesehatan	166 Lokasi	15.427.000	166 Lokasi	16.198.350	Kota Magelang	DAU
2	Pembinaan penyehatan perumahan, sanitasi industri dan tempat kerja	Terlaksananya pembinaan pada sampling perumahan, industri dan tempat kerja	17 Perusahaan	69.618.000	17 Perusahaan	73.098.900	Kota Magelang	DAU
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			926.375.000		972.693.750		
		Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)		100		100		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100			
		Angka Kesakitan DBD	<50		<50			
		Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<105		<104			
		Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90			
		Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%			
		Penemuan kasus HIV						
		Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%			
		Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS						
1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Terlaksananya kegiatan fogging focus	120 Lokasi	195.882.000	120 Lokasi	205.676.100	Kota Magelang	DAU
2	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Terlaksananya kegiatan pemantauan jentik berkala di 17 kelurahan, pertemuan penyakit endemik dan epidemik, dan pencetakan leaflet	4 Kegiatan	86.007.000	4 Kegiatan	90.307.350	Kota Magelang	DAU
3	Peningkatan Imunisasi	Peningkatan kekebalan tubuh pada bayi-balita, ibu hamil dan peningkatan Kapasitas petugas	1880 Anak	118.196.000	1880 Anak	124.105.800	Kota Magelang	DAU
4	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Terselenggaranya penyelidikan epidemiologi	200 Kasus	10.686.000	200 Kasus	11.220.300	Kota Magelang	DAU
5	Pengamanan kesehatan Haji	Terlaksananya rapat koordinasi tim pemeriksa kesehatan calon haji dan tes kebugaran calon haji	2 Kegiatan	14.121.000	2 Kegiatan	14.827.050	Kota Magelang	DAU
6	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Anak sekolah kelas 1 - 3 SD/MI/ Sederajat mendapatkan imunisasi DT dan Td	10500 Anak	69.602.000	10500 Anak	73.082.100	Kota Magelang	DAU
7	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Tercapainya program pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV, AIDS dan IMS	12 Orang	348.875.000	12 Orang	366.318.750	Kota Magelang	DAU
8	Pengendalian penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi	Data Penyakit menular /penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), Tersosialisasi Kegiatan Surveilans PD3I	50 org	83.006.000	50 org	87.156.300	Kota Magelang	DAU
102.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			987.076.000		1.036.429.800		
		Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	75&		82,50%			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi	0,4		60%			
		Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin	75		80			
		Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan	100		100			
		Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	0,6		80%			
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	65		75			
1	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya pemetaan SDM Kesh di 60 sarana pelayanan Kes	60 ok	7.850.000	60 ok	8.242.500	Kota Magelang	DAU
2	Pembinaan Sarana Kesehatan	Sarana kesehatan yang terbina	4 laporan	35.500.000	4 laporan	37.275.000	Kota Magelang	DAU
3	Pemilihan tenaga kesehatan teladan tingkat Kota Magelang	terlaksananya pemilihan tenaga kesehatan teladan Kota Magelang	15 tenaga kesehatan	27.500.000	15 tenaga kesehatan	28.875.000	Kota Magelang	DAU
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi	Laporan penggunaan dana kapitasi di Puskesmas	5 Puskesmas	64.328.000	5 Puskesmas	67.544.400	Kota Magelang	DAU
5	Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	Akreditasi Laboratorium Kesehatan Kota Magelang dan Puskesmas Magelang Tengah	2 UPTD	202.252.000	2 UPTD	212.364.600	Kota Magelang	DAU
6	Pembinaan Pelayanan BLUD	Terlaksanya pembinaan pelayanan BLUD di 5 (lima) Puskesmas	5 Puskesmas	185.545.000	5 Puskesmas	194.822.250	Kota Magelang	DAU
7	Pendampingan Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya Standar Pelayanan Kesehatan	1 dokumen	21.000.000	1 dokumen	22.050.000	Kota Magelang	DAU
8	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan	Rapat koordinasi dan laporan	12 bulan	443.101.000	12 bulan	465.256.050	Kota Magelang	DAU
102.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin			8.079.999		8.483.999		
		Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	100%		100%			
		Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin	100%		100%			
		Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	15%		15%			
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monitoring & evaluasi	1 Kegiatan	8.079.999	1 Kegiatan	8.483.999	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan			50.015.000		52.515.750		
		Persentase kelurahan siaga aktif tingkat mandiri	52,94%		58,82%			
1	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Terlaksananya pertemuan validasi data penyakit menular tingkat kota dan pertemuan tingkat kelurahan	760 Kegiatan	45.560.000	760 Kegiatan	47.838.000	Kota Magelang	DAU
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	terselenggaranya pertemuan movev	1 Kegiatan	4.455.000	1 Kegiatan	4.677.750	Kota Magelang	DAU
102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			117.683.000		123.567.150		
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%			
		Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%			
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%			
		Cakupan Puskesmas Ramah Anak	12%		18%			
1	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Tenaga kesehatan dilatih MTBS metode balita sakit dan SDIDTK	2 Orang	19.340.000	2 Orang	20.307.000	Kota Magelang	DAU
2	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan anak balita	Tersedianya sarana prasarana ruang laktasi	3 Paket	98.343.000	3 Paket	103.260.150	Kota Magelang	DAU
102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			40.001.000		42.001.050		
		Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		75%			
		Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	12%		18%			
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya pembinaan kader posyandu lansia	25 Orang	10.518.000	25 Orang	11.043.900	Kota Magelang	DAU
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya movev kesehatan lansia	5 kali	2.518.000	5 kali	2.643.900	Kota Magelang	DAU
3	Penyuluhan Kesehatan Lansia	Peningkatan kualitas kesehatan lansia	125 Orang	26.965.000	125 Orang	28.313.250	Kota Magelang	DAU
102.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan			45.091.000		47.345.550	Kota Magelang	DAU
		Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan	86%		87%			
1	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Terselenggaranya pemeriksaan sampel air industri rumah tangga pangan	70 Sampel	14.486.000	70 Sampel	15.210.300	Kota Magelang	DAU
2	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	Tercapainya jumlah reustaran yang diperiksa	30 Lokasi	6.355.000	30 Lokasi	6.672.750	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga	Sertifikasi kualitas makanan hasil produksi rumah tangga	70 Perusahaan	24.250.000	70 Perusahaan	25.462.500	Kota Magelang	DAU
102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			316.477.000		332.300.850		
		Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%			
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%			
		Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%			
		Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%			
1	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya pelatihan terhadap kader tentang resiko tinggi, bantuan untuk ibu hamil/menyusui	1530 Orang	98.837.000	1530 Orang	103.778.850	Kota Magelang	DAU
2	Pembinaan dukun bayi	Terselenggaranya pembinaan dukun bayi	4 Orang	6.056.000	4 Orang	6.358.800	Kota Magelang	DAU
3	Audit Maternal Perinatal	Terlaksananya kegiatan audit maternal perinatal	15 kali	43.353.000	15 kali	45.520.650	Kota Magelang	DAU
4	Penyuluhan kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan anak	Kader, Tokoh Masyarakat, Linsek terkait di tingkat kelurahan mengetahui perawatan kesehatan Ibu dan Bayidalam rangka penurunan AKI dan AKB	85	168.231.000	85	176.642.550	Kota Magelang	DAU
102.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD			5.765.107.000		6.053.362.350		
		Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	A		AA			
1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas	12 Bulan	470.512.000	12 Bulan	494.037.600	Kota Magelang	DAU
2	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan	Meningkatnya manajemen operasional puskesmas	12 Bulan	1.405.000.000	12 Bulan	1.475.250.000	Kota Magelang	DAU
3	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas	12 Bulan	1.125.700.000	12 Bulan	1.181.985.000	Kota Magelang	DAU
4	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton)	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas	12 Bulan	1.202.111.000	12 Bulan	1.262.216.550	Kota Magelang	DAU
5	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas	12 Bulan	1.561.784.000	12 Bulan	1.639.873.200	Kota Magelang	DAU
		JUMLAH		22.491.232.998		23.615.794.648		

Matriks
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pengelolaan administrasi perkantoran dengan baik dan tertib dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang professional menuju pelayanan publik yang prima	100%	884.554.000	100%	928.781.700		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tertib administrasi dan keuangan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima terpenuhi	12 bulan	120.000	12 bulan	126.000	DPU PR	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditandai dengan meningkatkannya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan	12 bulan	94.098.000	12 bulan	98.802.900	DPU PR	DAU
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kualitas aparatur yang profesional dan berkinerja tinggi dalam pelayanan masyarakat terpenuhi	12 bulan	22.500.000	12 bulan	23.625.000	DPU PR	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditandai dengan meningkatkannya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan	12 bulan	44.300.000	12 bulan	46.515.000	DPU PR	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kualitas aparatur yang profesional dan berkinerja tinggi dalam pelayanan masyarakat terpenuhi	12 bulan	169.625.000	12 bulan	178.106.250	DPU PR	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditandai dengan meningkatkannya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan	12 bulan	98.460.000	12 bulan	103.383.000	DPU PR	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tertib administrasi dan keuangan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima terpenuhi	12 bulan	36.000.000	12 bulan	37.800.000	DPU PR	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan	12 bulan	25.081.000	12 bulan	26.335.050	DPU PR	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan	12 bulan	8.421.000	12 bulan	8.842.050	DPU PR	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kualitas aparatur yang profesional dan berkinerja tinggi dalam pelayanan masyarakat terpenuhi	12 bulan	2.520.000	12 bulan	2.646.000	DPU PR	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kualitas aparatur yang profesional dan berkinerja tinggi dalam pelayanan masyarakat terpenuhi	12 bulan	1.600.000	12 bulan	1.680.000	DPU PR	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kualitas aparatur yang profesional dan berkinerja tinggi dalam pelayanan masyarakat terpenuhi	12 bulan	30.731.000	12 bulan	32.267.550	DPU PR	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan	12 bulan	149.600.000	12 bulan	157.080.000	DPU PR	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan	2 orang	187.634.000	2 orang	197.015.700	DPU PR	DAU
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tertib administrasi dan keuangan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima terpenuhi	12 bulan	13.864.000	12 bulan	14.557.200	DPU PR	DAU
103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya pengelolaan administrasi perkantoran dengan baik dan tertib dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang professional menuju pelayanan publik yang prima	100%	7.662.217.000	100%	8.045.327.850		DAU
2	Pembangunan rumah dinas	Bangunan Rumah Dinas	1 paket	7.000.000.000	1 paket	7.350.000.000	DPU PR	DAU
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang representatif	12 bulan	190.775.000	12 bulan	200.313.750	DPU PR	DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan	12 bulan	337.136.000	12 bulan	353.992.800	DPU PR	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan	12 bulan	5.444.000	12 bulan	5.716.200	DPU PR	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan pelayanan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan	12 bulan	7.620.000	12 bulan	8.001.000	DPU PR	DAU
30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan	12 bulan	121.242.000	12 bulan	127.304.100	DPU PR	DAU
103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggungjawab dan akuntabel	100%	105.192.000	100%	110.451.600		DAU
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Adanya laporan capaian kinerja triwulan SKPD	4 dok	19.056.000	4 dok	20.008.800	DPU PR	DAU
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tertib administrasi dan keuangan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima terpenuhi	1 dok	3.191.000	1 dok	3.350.550	DPU PR	DAU
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tertib administrasi dan keuangan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima terpenuhi	1 dok	3.900.000	1 dok	4.095.000	DPU PR	DAU
6	Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD	2 dok	22.600.000	2 dok	23.730.000	DPU PR	DAU
8	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya rencana kerja SKPD	2 dok	13.280.000	2 dok	13.944.000	DPU PR	DAU
19	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan bulanan	12 laporan	39.525.000	12 laporan	41.501.250	DPU PR	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	Tersedianya Laporan capaian kinerja Instansi Pemerintah SKPD	1 dok	3.640.000	1 dok	3.822.000	DPU PR	DAU
103.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terwujudnya prasarana jalan yang berkualitas	100%	5.932.100.000	100%	6.228.705.000		DAU
		Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	942 m		1342 m	0		DAU
		Persentase panjang trotoar dalam kondisi baik	64,39%		66,34%	0		DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Pembangunan Jalan Penghubung Jl. Tentara Genie Pelajar Kota Magelang	Panjang jalan kondisi baru yang terbangun	300 m	1.816.325.000	300 m	1.907.141.250	Kota Magelang	DAU
11	Pembangunan Trotoar Jalan Kalimas	panjang trotoar dan pelebaran jalan dalam kondisi baik	500 m	2.615.775.000	500 m	2.746.563.750	Kota Magelang	DAU
12	Pembangunan Jalan Penghubung Jl. Sarwo Edhie Wibowo dengan Jl. Jendral Sudirman	Jalan penghubung	1 paket	1.500.000.000	1 paket	1.575.000.000	Kota Magelang	DAU
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terwujudnya prasarana komunikasi dan informasi masyarakat yang berkelanjutan	100%	7.544.000	100%	7.921.200		DAU
		Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah:						DAU
		a. Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			DAU
		b. Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			DAU
		Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			DAU
		Jumlah KIM	17		17			DAU
		Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6		7			DAU
		Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-		1			DAU
		Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi				0		DAU
19	Pengelolaan website	Tersampainya informasi mengenai infrastruktur Kota Magelang ke masyarakat	1 Kegiatan	7.544.000	1 Kegiatan	7.921.200	Kota Magelang	DAU
218.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Meningkatnya tertib administrasi registrasi bangunan di Kota Magelang dan tata laksana kearsipan bangunan	100 %	5.000.000	100 %	5.250.000		DAU
		Presentase implementasi e-arsip	34%		52%			DAU
		Persentase ketersediaan sarpras arsip	20%		30%	0		DAU
3	Pengklasifikasikan data	terlaksananya penataan arsip IMB digital	1 Paket	5.000.000		5.250.000	Kota Magelang	DAU
403.15	Program Pengembangan data/informasi	Terwujudnya peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	100%	25.870.000	100%	27.163.500		DAU
		Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			DAU
		Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	70%		80%	0		DAU
31	Penyusunan database bidang kebinamargaan	Adanya pemutakhiran data bina marga	1 Paket	10.930.000	1 Paket	11.476.500		DAU
32	Penyusunan database bidang pengairan, drainase dan ESDM	Adanya pemutakhiran data bidang pengairan dan drainase	1 Paket	14.940.000	1 Paket	15.687.000	Kota Magelang	DAU
404.15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terkelolanya aset-aset daerah	100%	16.070.000	100%	16.873.500	Kota Magelang	DAU
		Persentase pertumbuhan PAD	18,44%		19,18%			DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Prosentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	81%		84%	0		DAU
88	Penaksiran barang milik daerah	Meningkatnya kompetensi aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah	1 kegiatan	16.070.000	1 kegiatan	16.873.500	Kota Magelang	DAU
103.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terwujudnya prasarana drainase yang berkualitas	100%	474.608.000	100%	498.338.400		DAU
		Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	85%		86%			DAU
		Jumlah shipon yang dibangun	6		7	0		DAU
13	Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota	Sarana dan prasarana drainase yang memadai untuk mencegah banjir/genangan	3 Paket	474.608.000	3 Paket	498.338.400	Kota Magelang	DAU
205.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terwujudnya pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air	100%	16.194.000	100%	17.003.700		DAU
		Indeks Kualitas Air,	76%		76%			DAU
		Indeks Kualitas Udara	78%		78%			DAU
		Indeks Tutupan Hutan	48%		49%			DAU
		Jumlah SDA yang terkonservasi	47,7		57,7			DAU
		Jenis flora	8 Jenis		10 Jenis			DAU
		Jenis fauna	2 Jenis		3 Jenis	0		DAU
8	Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA	Terciptanya tertib data dokumentasi pemanfaatan SDA sebagai acuan pengendalian dan pengawasan SDA	1 kegiatan	16.194.000	1 kegiatan	17.003.700	Kota Magelang	DAU
218.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Terwujudnya pengelolaan administrasi perkantoran dengan baik dan tertib dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang professional menuju pelayanan publik yang prima	100%	4.140.000	100%	4.347.000		DAU
		Persentase sarpras arsip yang terpelihara	0,4		0,5			DAU
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Tertib administrasi dan keuangan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima terpenuhi	12 bulan	4.140.000	12 bulan	4.347.000	Kota Magelang	DAU
103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terwujudnya prasarana jalan yang berkualitas	100%	893.983.000	100%	938.682.150		DAU
		Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	86%		91%			DAU
		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	86%		88,5%			DAU
3	Pemeliharaan Jalan	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	100 %	893.983.000	100 %	938.682.150	Kota Magelang	DAU
401.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peraturan Daerah yang memadai yang mendukung Tupoksi Dinas	100 %	75.000.000	100 %	78.750.000		DAU
		Jumlah review PERDA/PERWAL	1		1			DAU
		Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	0		0			DAU
		Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	0		1			DAU
7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Reklame	1 Paket	50.000.000	1 Paket	52.500.000	Kota Magelang	DAU
59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Tersusunnya Perkada tentang Penerangan Jalan Umum, Reklame	3 Paket	25.000.000	3 Paket	26.250.000	Kota Magelang	DAU
103.20	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan			114.974.000		120.722.700		DAU
								DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Inventarisasi Aset Kawasan Jembatan Gantung Progo-Karangwuni	Daftar aset di kawasan jembatan gantung Sungai Progo	1 paket	57.487.000	1 paket	60.361.350	Kota Magelang	DAU
6	Inventarisasi Aset Kawasan Canguk	Aset tanah di kawasan Canguk	1 paket	57.487.000	1 paket	60.361.350	Kota Magelang	DAU
213.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya prasarana olahraga yang baik, layak dan memadai	100%	698.564.000	100%	733.492.200		DAU
		Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	4		4			DAU
		Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	65%		71%			DAU
7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang lebih memadai	1 Kegiatan	698.564.000	1 Kegiatan	733.492.200	Kota Magelang	DAU
103.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Terwujudnya prasarana irigasi yang memadai	100%	81.507.000	100%	85.582.350		DAU
10	Pemeliharaan jaringan irigasi	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi	1 Paket	81.507.000	1 Paket	85.582.350	Kota Magelang	DAU
103.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya			85.557.000		89.834.850		DAU
8	Inventarisasi Pemanfaatan ESDM dan Air Bawah Tanah Kota Magelang	Dokumen Inventarisasi Pemanfaatan air bawah tanah Kota Magelang	1 Dokumen	85.557.000	1 Dokumen	89.834.850	Kota Magelang	DAU
103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terwujudnya pengembangan kawasan strategis sebagai simpul perekonomian, sosial, budaya dan pariwisata	100%	2.213.464.000	100%	2.324.137.200		DAU
		Persentase kawasan strategis yang terbangun	2 kawasan		4 kawasan			DAU
	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Olah Raga (GOR) Tahap II	Tersedianya prasarana olahraga yang representatif	1 Paket	2.213.464.000	1 Paket	2.324.137.200	Kota Magelang	DAU
103.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi			148.758.000		156.195.900		DAU
		Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	72%		74%			DAU
4	Pembinaan jasa konstruksi	110 Perusahaan Jasa Konstruksi (1 Pembinaan Pengguna Jasa, 2 Pembinaan Penyedia Jasa), masyarakat jasa konstruksi		75.957.000		79.754.850	Kota Magelang	DAU
5	Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi	Analisa harga standar konstruksi	50 buku	23.220.000	50 buku	24.381.000	Kota Magelang	DAU
6	Penyusunan Buku Profil Penyedia Jasa Konstruksi	Data Asosiasi dan Penyedia Jasa, survey penyedia jasa	100 Buku	49.581.000	100 Buku	52.060.050	Kota Magelang	DAU
103.33	Program pengawasan jasa konstruksi			434.194.000		455.903.700		DAU
		Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien)	25%		25%			DAU
6	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum	Fasilitasi bantuan Hukum	12 bulan	434.194.000	12 bulan	455.903.700	Kota Magelang	DAU
103.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong			4.996.152.000		5.245.959.600		DAU
								DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Pembuatan afur dan bak kontrol saluran drainase kota Magelang	Terciptanya sistem drainase yang baik untuk mencegah banjir dan genangan air	50 buah	230.650.000	50 buah	242.182.500	Kota Magelang	DAU
44	Rehabilitasi / Peningkatan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Tidar Salakan	Terciptanya saluran drainase yang baik dan mampu mencegah banjir dan genangan air	44 m	120.527.000	44 m	126.553.350	Kota Magelang	DAU
43	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl Sunan Ampel	Terciptanya saluran drainase yang baik dan mampu mencegah banjir dan genangan air	150 m	522.750.000	150 m	548.887.500	Kota Magelang	DAU
41	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Singosari	Terciptanya saluran drainase yang baik dan mampu mencegah banjir dan genangan air	500 m	1.861.500.000	500 m	1.954.575.000	Kota Magelang	DAU
10	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Tidar Selatan	Terciptanya saluran drainase yang baik dan mampu mencegah banjir dan genangan air	175 m	685.225.000	175 m	719.486.250	Kota Magelang	DAU
17	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Cacaban	Terciptanya saluran drainase yang baik dan mampu mencegah banjir dan genangan air	500 m	1.575.500.000	500 m	1.654.275.000	Kota Magelang	DAU
103.15	Program Perencanaan Tata Ruang			451.126.000		473.682.300		DAU
		Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL)		0,08		0,5		DAU
		Prosentase perijinan yang sesuai Tata Ruang	1		1			DAU
		Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital		0,15		1		DAU
		Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL)	50%		100%			DAU
		Persentase perijinan yang sesuai Tata Ruang	100%		100%			DAU
		Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%		100%			DAU
18	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	Jumlah dokumen Raperda RDTRK BWP 4	45 Dokumen	215.327.000	45 Dokumen	226.093.350	Kota Magelang	DAU
25	Koordinasi penataan ruang daerah	Terselenggaranya koordinasi Tim BKPRD	12 Bulan	176.739.000	12 Bulan	185.575.950	Kota Magelang	DAU
55	Penyusunan dokumen KLHS RTRW	Jumlah dokumen	45 Dokumen	59.060.000	45 Dokumen	62.013.000	Kota Magelang	DAU
103.16	Program Pemanfaatan Ruang	Terciptanya tata laksana perijinan bangunan yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang	100 %	71.136.000	100 %	74.692.800		DAU
		Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan		0,24		0,25		DAU
		Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri		0,03		0,06		DAU
		Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan		24%		25%		DAU
		Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri		3%		6%		DAU
1	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	tersedianya kajian IMB	250 kajian	53.000.000	250 kajian	55.650.000	Kota Magelang	DAU
5	Survey dan pemetaan	terlaksananya update data bangunan ber IMB dan yang belum ber IMB	10 buku	18.136.000	10 buku	19.042.800	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
103.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya penataan bangunan dan reklame yang konsisten dengan perencanaan kota	100 %	116.500.000	100 %	122.325.000		DAU
		Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber-IMB	0,3		0,325			DAU
		Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber-IMB	30%		33%			DAU
5	Pengawasan pemanfaatan ruang	terwujudnya pengawasan kegiatan pembangunan di Kota Magelang	12 Laporan	82.800.000	12 Laporan	86.940.000	Kota Magelang	DAU
9	Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung	tersedianya kajian teknis atas bangunan gedung yang berdampak penting bagi lingkungan	20 buku	33.700.000	20 buku	35.385.000	Kota Magelang	DAU
		JUMLAH		25.514.404.000		26.790.124.200		

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
OPD : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pengelolaan administrasi perkantoran dengan baik dan tertib dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang professional menuju pelayanan publik yang prima	100%	611.847.000	100%	642.439.350		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tertib administrasi dan keuangan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima terpenuhi	12 bulan	80.000	12 bulan	84.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditandai dengan meningkatkannya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan	12 bulan	62.732.000	12 bulan	65.868.600	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kualitas aparatur yang profesional dan berkinerja tinggi dalam pelayanan masyarakat terpenuhi	12 bulan	6.177.000	12 bulan	6.485.850	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditandai dengan meningkatkannya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan	12 bulan	9.650.000	12 bulan	10.132.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kualitas aparatur yang profesional dan berkinerja tinggi dalam pelayanan masyarakat terpenuhi	12 bulan	143.525.000	12 bulan	150.701.250	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditandai dengan meningkatkannya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan	12 bulan	60.276.000	12 bulan	63.289.800	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tertib administrasi dan keuangan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima terpenuhi	12 bulan	24.000.000	12 bulan	25.200.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan	12 bulan	16.720.000	12 bulan	17.556.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan	12 bulan	5.579.000	12 bulan	5.857.950	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kualitas aparatur yang profesional dan berkinerja tinggi dalam pelayanan masyarakat terpenuhi	12 bulan	1.440.000	12 bulan	1.512.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kualitas aparatur yang profesional dan berkinerja tinggi dalam pelayanan masyarakat terpenuhi	12 bulan	1.800.000	12 bulan	1.890.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kualitas aparatur yang profesional dan berkinerja tinggi dalam pelayanan masyarakat terpenuhi	12 bulan	20.219.000	12 bulan	21.229.950	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan	12 bulan	149.410.000	12 bulan	156.880.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan	2 orang	96.552.000	2 orang	101.379.600	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tertib administrasi dan keuangan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima terpenuhi	12 bulan	13.687.000	12 bulan	14.371.350	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
104.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya pengelolaan administrasi perkantoran dengan baik dan tertib dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang profesional menuju pelayanan publik yang prima	100%	322.190.000	100%	338.299.500		
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang representatif	12 bulan	123.559.000	12 bulan	129.736.950	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan	12 bulan	187.192.000	12 bulan	196.551.600	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan	12 bulan	3.629.000	12 bulan	3.810.450	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan pelayanan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan	12 bulan	7.810.000	12 bulan	8.200.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
104.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggungjawab dan akuntabel	100%	108.150.000	100%	113.557.500		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Adanya laporan capaian kinerja triwulan SKPD	4 dok	22.017.000	4 dok	23.117.850	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tertib administrasi dan keuangan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima terpenuhi	1 dok	3.190.000	1 dok	3.349.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tertib administrasi dan keuangan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima terpenuhi	1 dok	3.900.000	1 dok	4.095.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
6	Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD	2 dok	22.600.000	2 dok	23.730.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
8	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya rencana kerja SKPD	2 dok	13.279.000	2 dok	13.942.950	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
19	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan bulanan	12 Laporan	39.525.000	12 Laporan	41.501.250	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	Tersedianya Laporan capaian kinerja Instansi Pemerintah SKPD	1 dok	3.639.000	1 dok	3.820.950	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAU
104.15	Program Pengembangan Perumahan	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur perumahan	100%	1.277.806.000	100%	1.341.696.300		
		Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	2		3			
14	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)	Terkelola dan terpeliharanya bangunan Rusunawa	1 Kegiatan	989.311.000	1 Kegiatan	1.038.776.550	Kota Magelang	DAU
17	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	Fasilitasi bantuan Hukum	12 bulan	288.495.000	12 bulan	302.919.750	Kota Magelang	DAU
103.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terwujudnya prasarana jalan yang berkualitas	100%	55.558.000		58.335.900		DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	942 m		1342 m			DAU
		Persentase panjang trotoar dalam kondisi baik	64,39%		66,34%			DAU
10	Perencanaan / DED Pembangunan jalan penghubung Jl Jendral Sarwo Edhie Wibowo dengan Jalan Jend Sudirman	Adanya review DED pembangunan jalan menuju Rusunawa	1 paket	55.558.000	1 paket	58.335.900	Kota Magelang	DAU
403.15	Program Pengembangan data/informasi	Terwujudnya peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	100%	24.572.000	100%	25.800.600		
		Meningkatnya ormas yang memiliki SKT	27,79%		35,19%			
		Persentase pemenuhan data statistik	90%		95%			
33	Penyusunan database bidang keciptakaryaan dan perumahan	Adanya pemutakhiran data bidang cipta karya dan perumahan	1 Paket	24.572.000	1 Paket	25.800.600	Kota Magelang	DAU
104.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terwujudnya Peningkatan kualitas Prasarana/ infrastruktur Perkotaan	100%	1.604.075.000	100%	1.684.278.750		
		Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat						
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan sanitasi	100%	26.850.000	100%	28.192.500	Kota Magelang	DAU
8	Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Tersedianya prasarana sanitasi permukiman	3 Paket	247.087.000	3 Paket	259.441.350	Kota Magelang	DAU
14	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK	Terfasilitasi kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat	1 Kegiatan	519.800.000	1 Kegiatan	545.790.000	Kota Magelang	DAU
16	Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Terfasilitasi kegiatan bantuan operasional untuk sanitasi masyarakat	1 Kegiatan	39.938.000	1 Kegiatan	41.934.900	Kota Magelang	DAU
17	Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana MCK Kelurahan Magelang	Tersedianya prasarana sanitasi yang sehat dan layak	1 Paket	235.500.000	1 Paket	247.275.000	Kota Magelang	DAU
18	Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana MCK Kelurahan Rejowinangun Selatan	Tersedianya prasarana sanitasi permukiman yang sehat dan layak	1 Paket	235.300.000	1 Paket	247.065.000	Kota Magelang	DAU
19	Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana MCK Kelurahan Cacaban	tersedianya prasarana sanitasi permukiman yang sehat dan layak	1 Paket	235.650.000	1 Paket	247.432.500	Kota Magelang	DAU
20	Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana MCK Kelurahan Panjang	Tersedianya prasarana sanitasi permukiman yang sehat dan layak	1 Paket	63.950.000	1 Paket	67.147.500	Kota Magelang	DAU
204.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terkelolanya aset-aset daerah	100%	75.903.000	100%	79.698.150		
		Tersedianya informasi pertanahan yang akurat	30%		45%			
11	Penilaian Harga Tanah	Besaran Harga Tanah di Lokasi Rusunawa	1000 m2	60.053.000		63.055.650	Kota Magelang	DAU
12	Sosialisasi Pengadaan Tanah	Terlaksananya sosialisasi bagi warga di ruas jalan Kyai Mojo terkait perencanaan pembangunan di Kelurahan Cacaban	100 orang	15.850.000	100 orang	16.642.500	Kota Magelang	DAU
104.17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	40.625.000	100%	42.656.250		
8	Sosialisasi Keciptakaryaan	terlaksananya sosialisasi	1 kegiatan	40.625.000	1 kegiatan	42.656.250	Kota Magelang	DAU
218.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Terwujudnya pengelolaan administrasi perkantoran dengan baik dan tertib dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang professional menuju pelayanan publik yang prima	100%	2.760.000	100%	2.898.000		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase sarpras arsip yang terpelihara	0,4		0,5			
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Tertib administrasi dan keuangan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima terpenuhi	12 bulan	2.760.000	12 bulan	2.898.000	Kota Magelang	DAU
103.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Terwujudnya peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan	100%	569.926.000	100%	598.422.300		
		Pendampingan fisik dan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	100%		100%			
5	Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	1 Paket	260.980.000	1 Paket	274.029.000	Kota Magelang	DAU
6	Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	Terpeliharanya prasarana sanitasi permukiman	1 Paket	308.946.000	1 Paket	324.393.300	Kota Magelang	DAU
103.35	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari			177.200.000		186.060.000		
		Rasio luas kawasan kumuh	2,5 ha		1 ha			
74	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Tersedianya prasarana lingkungan yang memadai	1 Paket	177.200.000	1 Paket	186.060.000	Kota Magelang	DAU
103.36	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Utara			191.600.000		201.180.000		
		Rasio luas kawasan kumuh	1,5 ha		0%			
42	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Tersedianya prasarana lingkungan yang memadai	260 m	109.300.000	260 m	114.765.000	Kota Magelang	DAU
43	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Tersedianya prasarana lingkungan yang memadai	135 m	82.300.000	135 m	86.415.000	Kota Magelang	DAU
103.37	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan			535.360.000		562.128.000		
		Rasio luas kawasan kumuh	1 ha		0			
56	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Terpeliharanya prasarana sanitasi permukiman	2400 m	535.360.000	2400 m	562.128.000	Kota Magelang	DAU
103.38	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara			351.110.000		368.665.500		
		Rasio luas kawasan kumuh	3 ha		1,5 ha			
78	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Tersedianya prasarana lingkungan yang memadai	1 Paket	351.110.000	1 Paket	368.665.500	Kota Magelang	DAU
103.39	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan			351.110.000		368.665.500		
		Rasio luas kawasan kumuh	4 ha		2 ha			
74	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Tersedianya prasarana lingkungan yang memadai	600 m2	351.110.000	600 m2	368.665.500		
103.40	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates			805.750.000		846.037.500		
		Rasio luas kawasan kumuh	2 ha		1 ha			
63	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	panjang saluran drainase dalam kondisi baik	1 Paket	160.100.000	1 Paket	168.105.000	Kota Magelang	DAU
17	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	panjang saluran drainase dalam kondisi baik	1 Paket	160.100.000	1 Paket	168.105.000	Kota Magelang	DAU
23	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	Tersedianya prasarana lingkungan yang memadai	1 Paket	234.350.000	1 Paket	246.067.500	Kota Magelang	DAU
19	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	panjang saluran drainase dalam kondisi baik	1 Paket	108.100.000	1 Paket	113.505.000	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Tersedianya prasarana lingkungan yang memadai	1 Paket	143.100.000	1 Paket	150.255.000	Kota Magelang	DAU
103.41	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsari			395.550.000		415.327.500		
		Rasio luas kawasan kumuh	5 ha		2,5 ha			
37	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Tersedianya prasarana lingkungan yang memadai	1 Paket	222.850.000	1 Paket	233.992.500	Kota Magelang	DAU
39	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Tersedianya prasarana lingkungan yang memadai	1 Paket	172.700.000	1 Paket	181.335.000	Kota Magelang	DAU
103.42	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari			1.464.330.000		1.537.546.500		
		Rasio luas kawasan kumuh	2 ha		1 ha			
48	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	Jembatan	8 m'	570.570.000	8 m'	599.098.500	Kota Magelang	DAU
62	Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Leuneng (pagar pengaman)	500 m'	893.760.000	500 m'	938.448.000	Kota Magelang	DAU
103.43	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara			472.555.000		496.182.750		
		Rasio luas kawasan kumuh	2 ha		0			
6	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI	Tersedianya prasarana lingkungan permukiman	1 Paket	237.205.000	1 Paket	249.065.250	Kota Magelang	DAU
50	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Saluran drainase lingkungan	1168 m'	235.350.000	1168 m'	247.117.500	Kota Magelang	DAU
103.44	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan			1.035.270.000		1.087.033.500		
		Rasio luas kawasan kumuh						
68	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Panjang saluran drainase dalam kondisi baik	2800 m2	1.035.270.000	2800 m2	1.087.033.500	Kota Magelang	DAU
103.45	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo			405.570.000		425.848.500		
		Rasio luas kawasan kumuh	3,5 ha		1,5 ha			
56	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	panjang jalan kondisi baik	1500 m2	405.570.000	1500 m2	425.848.500	Kota Magelang	DAU
103.46	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban			405.570.000		425.848.500		
		Rasio luas kawasan kumuh	2 ha		1 ha			
74	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Memudahkan pengguna jalan yang melalui jalan dengan aman selamat	1 Paket	405.570.000	1 Paket	425.848.500	Kota Magelang	DAU
103.47	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara			582.780.000		611.919.000		
		Rasio luas kawasan kumuh	5 ha		2,5 ha			
87	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	Tersedianya prasarana lingkungan yang memadai	1 Paket	136.990.000	1 Paket	143.839.500	Kota Magelang	DAU
127	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	1 Paket	445.790.000	1 Paket	468.079.500	Kota Magelang	DAU
103.48	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang			348.180.000		365.589.000		
		Rasio luas kawasan kumuh	1,5 ha		0			
55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	Peningkatan jalan lingkungan dalam kondisi baik	1 Paket	348.180.000	1 Paket	365.589.000	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
103.49	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang			119.400.000		125.370.000		
		Rasio luas kawasan kumuh	3,88 ha		1 ha			
42	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Tersedianya prasarana lingkungan yang memadai	1 Paket	119.400.000	1 Paket	125.370.000	Kota Magelang	DAU
103.50	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan			108.350.000		113.767.500		
		Rasio luas kawasan kumuh	1 ha		0			
53	Rehab/peningkatan saluran drainase/gorong-gorong RW II Kelurahan Gelangan	Tersedianya prasarana lingkungan yang memadai	1 Paket	108.350.000	1 Paket	113.767.500	Kota Magelang	DAU
		JUMLAH		12.443.097.000		13.065.251.850		

Matriks
 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Bidang : Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta
 Perlindungan Masyarakat
 OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertibnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	565.408.000	100%	593.678.400		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Rekening Air, Telepon, Listrik dan Internet	4 jenis	39.360.000	4 jenis	41.328.000	Satpol PP	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengurusan pajak kendaraan operasional dan jasa KIR	12 unit	17.460.000	12 unit	18.333.000	Satpol PP	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya laporan keuangan	12 laporan	67.540.000	12 laporan	70.917.000	Satpol PP	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	20 jenis	36.679.000	20 jenis	38.512.950	Satpol PP	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	34 jenis	13.746.000	34 jenis	14.433.300	Satpol PP	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik, penerangan bangunan gedung kantor	25 jenis	5.036.000	25 jenis	5.287.800	Satpol PP	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	624 eksemplar	2.160.000	624 eksemplar	2.268.000	Satpol PP	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya gas LPG	84 buah	3.480.000	84 buah	3.654.000	Satpol PP	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan minuman	12 bulan	25.218.000	12 bulan	26.478.900	Satpol PP	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas	12 Bulan	174.940.000	12 Bulan	183.687.000	Satpol PP	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Terbayar honor pegawai tidak tetap	12 bulan	179.789.000	12 bulan	188.778.450	Satpol PP	DAU
105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	281.550.000	100%	295.627.500		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang dipelihara	1 unit	59.359.000	1 unit	62.326.950	Satpol PP	DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Unit	208.391.000	12 Unit	218.810.550	Satpol PP	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100%	4.025.000	100%	4.226.250	Satpol PP	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	100%	9.775.000	100%	10.263.750	Satpol PP	DAU
105.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	100%	83.009.000	100%	87.159.450		
		Persentase kehadiran ASN	97%		97%			
		Persentase pelanggaran disiplin ASN	0,21%		0,21%			
	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian dinas	137 stel	83.009.000	137 stel	87.159.450	Satpol PP	DAU
105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)		22.455.000		23.577.750		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	6.320.000	1 laporan	6.636.000	Satpol PP	DAU
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	1 laporan	1.626.000	1 laporan	1.707.300	Satpol PP	DAU
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusun laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1.312.000	1 Laporan	1.377.600	Satpol PP	DAU
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Rencana kerja SKPD	1 laporan	4.098.000	1 laporan	4.302.900	Satpol PP	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	Tersusunnya RKA SKPD	1 laporan	6.907.000	1 laporan	7.252.350	Satpol PP	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	Tersusunnya LKjIP SKPD	1 laporan	2.192.000	1 laporan	2.301.600	Satpol PP	DAU
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam masyarakat kota Magelang	100 %	2.633.094.000	100 %	2.764.748.700		
		Frekuensi Patroli Satpol PP	3 kali/hari		3 kali/hari			
		Tingkat Penyelesaian pelanggaran perda	90%		92%			
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,52		6,46			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	10,00		11,67			
		Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertaman dan ketertiban umum (K3)	94,5%		95%			
		Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	70,47		74,25			
		Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	11,27%		14,26%			
		cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	9		12			
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kegiatan piket kantor (outsorcing) dan Pengamanan Patwal	12 bulan	1.001.134.000	12 bulan	1.051.190.700	Kota Magelang	DAU
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelaporan Kader Siaga Trantib (KST)	10 kegiatan	28.347.000	10 kegiatan	29.764.350	Kota Magelang	DAU
4	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan operasi penertiban PKL	12 bulan	58.030.000	12 bulan	60.931.500	Kota Magelang	DAU
5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan Pam Pasar, Pam Hari Jadi Kota Magelang, Pam HUT RI, Pam Lebaran, Pam Natal dan Tahun Baru,serta Pam Penunjang Wilayah	12 bulan	1.331.558.000	12 bulan	1.398.135.900	Kota Magelang	DAU
11	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan	36 Kegiatan	112.180.000	36 Kegiatan	117.789.000	Kota Magelang	DAU
14	Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal	Tersedianya data / informasi cukai palsu / ilegal	5 Laporan Data / informasi cukai palsu / ilegal Data	101.845.000	5 Laporan Data / informasi cukai palsu / ilegal Data	106.937.250	Kota Magelang	DAU
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya media komunikasi, informasi dan media massa	100%	11.333.000		11.899.650		
		Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah:						
		a. Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			
		b. Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			
		Jumlah KIM	17		17			
		Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6		7			
		Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-		1			
		Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi						
19	Pengelolaan Website	Terlaksananya pengelolaan website	100 %	11.333.000	100 %	11.899.650	Kota Magelang	DAU
105.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur	100%	86.928.000	100%	91.274.400		
		Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	18,75%		37,50%			
		Persentase ormas yang difasilitasi	7,87%		8,27%			
1	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Nama Kegiatan (Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Personil) Terlaksananya kegiatan kesamaptaan	24 kegiatan	86.928.000	24 kegiatan	91.274.400	Kota Magelang	DAU
104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Terwujudnya Kawasan yang tanggap terhadap ancaman dan penanggulangan bahaya kebakaran	100%	802.973.000	100%	843.121.650		
		Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran	100%		100%			
		Persentase tingkat waktu tanggap response	100%		100%			
9	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah refill tabung pemadam kebakaran 1000 kg	1000 Kg	104.373.000	1000 Kg	109.591.650	Kota Magelang	DAU
12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah Petugas Piket	13 orang	698.600.000	13 orang	733.530.000	Kota Magelang	DAU
105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Menurunnya penyakit masyarakat (pekat)	100%	182.348.000		191.465.400		
		Persentase penanganan penyakit masyarakat	90%		0,92			
		Perda yang mengatur kontrol tempat hiburan	-		1			
		Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras dan tindak prostitusi	-		1			
		Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA			
	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Terlaksananya kegiatan operasi pekat	12 kegiatan	107.082.000	12 kegiatan	112.436.100	Kota Magelang	DAU
	Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota	Terlaksananya kegiatan operasi penegakan perda	12 bulan	75.266.000	12 bulan	79.029.300	Kota Magelang	DAU
105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Terwujudnya pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana	100%	56.217.000	100%	59.027.850		
		Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	37.5%		0			
		Cakupan tim relawan siaga bencana	2,94		5,88			
		Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	25%		50%			
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	25%		50%			
		Cakupan penanganan korban bencana	1		100%			
1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Leaflet,	2500 lembar	9.190.000	2500 lembar	9.649.500	Kota Magelang	DAU
5	Pelatihan tenaga pengendali bencana	Jumlah peserta pelatihan tenaga pengendali bencana (SAR & PKK)	150 orang	26.868.000	150 orang	28.211.400	Kota Magelang	DAU
6	Simulasi penanggulangan korban bencana alam	Simulasi bencana alam gempa bumi bagi siswa sekolah	100 orang	20.159.000	100 orang	21.166.950	Kota Magelang	DAU
		JUMLAH		4.725.315.000		4.961.580.750		

Matriks
 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
 Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Bidang : Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
 OPD : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian	Tahun 2017		Prakiraan Maju 2018		Lokasi	Sumber Dana
		Tolok Ukur	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan ketertiban administrasi kantor	100%	484.031.000		508.232.550		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah perangko	200 lembar	800.000		840.000	Kesbangpolinmas	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	43.800.000		45.990.000	Kesbangpolinmas	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional	16 unit	5.850.000		6.142.500	Kesbangpolinmas	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor petugas pengelola keuangan dan barang daerah	10 orang/bulan	72.163.000		75.771.150	Kesbangpolinmas	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih serta jasa tenaga kebersihan	37 item & 2 orang/bulan	41.574.000		43.652.700	Kesbangpolinmas	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ATK	46 item	23.934.000		25.130.700	Kesbangpolinmas	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	8 jenis & 45000 lembar	23.745.000		24.932.250	Kesbangpolinmas	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah alat/komponen listrik	13 item	5.240.000		5.502.000	Kesbangpolinmas	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan (surat kabar)	3 jenis/bulan	3.660.000		3.843.000	Kesbangpolinmas	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang gas 12 kg	6 tabung	900.000		945.000	Kesbangpolinmas	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jamuan makan dan minum	55 kegiatan & 12 bulan	46.707.000		49.042.350	Kesbangpolinmas	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pejalanan dinas luar daerah	87 kegiatan	199.566.000		209.544.300	Kesbangpolinmas	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jasa penjaga malam	1 orang/bulan	16.092.000		16.896.600	Kesbangpolinmas	DAU
105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	100%	154.519.000		162.244.950		
20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	9 jenis	9.810.000		10.300.500	Kesbangpolinmas	DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	16 unit	126.074.000		132.377.700	Kesbangpolinmas	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	6 jenis	6.400.000		6.720.000	Kesbangpolinmas	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengecatan dan pemeliharaan gedung kantor	1 paket	10.535.000		11.061.750	Kesbangpolinmas	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur	7 item	1.700.000		1.785.000	Kesbangpolinmas	DAU
105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya dokumen pelaporan kinerja dan laporan keuangan	100%	42.088.000		44.192.400		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	LKPJ, LKJ, Lap realisasi fisik dan keuangan	10 buku dan 24 set	11.702.000		12.287.100	Kesbangpolinmas	DAU
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	3 buku	4.337.000		4.553.850	Kesbangpolinmas	DAU
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen Renja Penetapan dan Perubahan	2 dokumen	6.300.000		6.615.000	Kesbangpolinmas	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	RKA, DPA, RKPA, DPPA	30 buku	15.347.000		16.114.350	Kesbangpolinmas	DAU
27	Penyusunan laporan capaian kinerja instansi pemerintah (LKJ IP) SKPD	LKJ IP SKPD	4 buku	4.402.000		4.622.100	Kesbangpolinmas	DAU
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terpeliharanya situasi kondusif di wilayah Kota Magelang	100%	649.778.000		682.266.900		
		Persentase kriminalitas yang tertangani	80%			80%		
		Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai - nilai luhur Pancasila	0%			0%		
		Perda pelarangan peredaran narkoba	-			1		
		Jumlah Kampung Bebas Narkoba	2			3		
		Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1,13%			1,47%		
		Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	3%			6%		
		Rasio jumlah siskamling aktif	0,78			0,84		
		Frekuensi Patroli Satpol PP	NA			NA		
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA			NA		
2	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah laporan kegiatan Komunitas Intelejen Daerah	12 buku	126.047.000		132.349.350	Kota Magelang	DAU
4	Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah	Lomba Siskamling	17 kelurahan	12.468.000		13.091.400	Kota Magelang	DAU
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Monev RAD 2016 dan RAD 2017	30 buku	131.964.000		138.562.200	Kota Magelang	DAU
7	penyusunan dan pelaporan data strategis daerah	Buku laporan eks G 30.S/PKI, rekomendasi kegiatan dan ijin survei	6 buku	9.099.000		9.553.950	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	pengawasan orang asing dan tenaga kerja orang asing	Buku laporan Orang Asing	24 buku	98.051.000		102.953.550	Kota Magelang	DAU
9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah laporan pemantauan keamanan wilayah	365 laporan	101.287.000		106.351.350	Kota Magelang	DAU
10	operasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN)	Pelaksanaan Operasi P4GN	12 kegiatan	43.517.000		45.692.850	Kota Magelang	DAU
11	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Peserta penyuluhan P4GN dan test urine	150 Orang dan 100 orang	36.856.000		38.698.800	Kota Magelang	DAU
12	penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	Peserta penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS di sekolah	200 orang	23.149.000		24.306.450	Kota Magelang	DAU
13	kegiatan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba	Test urine untuk deteksi narkoba	500 orang	67.340.000		70.707.000	Kota Magelang	DAU
218.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Terdokumentasikannya arsip SKPD secara rapi dan tertib	100%	23.626.000		24.807.300		
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%			52%		
		Persentase arsip dan risalah	82%			82%		
		Persentase Penyelamatan Arsip	47%			53%		
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Penataan penyelamatan arsip aktif dan in aktif	2000 surat dan 10 dos	23.626.000		24.807.300	Kota Magelang	DAU
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terwujudnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan	100%	173.081.000		181.735.050		
		Prosentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	69,6%			72,2%		
		Database ormas yang akurat	69,00%			71,00%		
		Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	27,79%			35,19%		
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta dialog peningkatan kerukunan antar umat beragama bagi toma dan toma	200 orang	27.997.000		29.396.850	Kota Magelang	DAU
2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi peraturan tentang keormasan bagi ormas	200 orang	27.997.000		29.396.850	Kota Magelang	DAU
3	peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa	Peserta dialog tentang wawasan kebangsaan	180 orang	29.980.000		31.479.000	Kota Magelang	DAU
5	Pengembangan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat	Jumlah peserta dialog interaktif pengembangan nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa	100 orang	20.525.000		21.551.250	Kota Magelang	DAU
8	Penyusunan database Organisasi Kemasyarakatan	Data Profil Ormas	60 buku	66.582.000		69.911.100	Kota Magelang	DAU
105.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang kondusif	100%	101.158.000		106.215.900		
		Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	8			10		
		terpublikasikannya dialog antar agama	5			6		
		Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan	1			2		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tingkat kerukunan antar umat beragama	100%		100%			
		Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			
1	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah Peserta sosialisasi kerukunan beragama bagi generasi muda lintas agama	200 orang	27.997.000		29.396.850	Kota Magelang	DAU
2	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah Peserta diskusi wawasan kebangsaan	100 orang	28.751.000		30.188.550	Kota Magelang	DAU
7	Fasilitasi FKUB Kota Magelang	Jumlah rakor FKUB	2 kegiatan dan 10 buku laporan	21.585.000		22.664.250	Kota Magelang	DAU
8	Fasilitasi FPBI Kota Magelang	Jumlah rakor FPBI	2 kegiatan dan 10 buku laporan	22.825.000		23.966.250	Kota Magelang	DAU
105.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	109.997.000		115.496.850		
		Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	18,75%		37,50%			
		Persentase ormas yang difasilitasi	7,87%		8,27%			
2	Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah	Pengiriman anggota Ormas/LSM	30 orang	36.957.000		38.804.850	Kota Magelang	DAU
3	Fasilitasi forum kewaspadaan diri masyarakat	Fasilitasi kegiatan FKDM Tingkat Kota	4 kali dan 12 buku	73.040.000		76.692.000	Kota Magelang	DAU
105.21	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya pendidikan politik masyarakat	100%	98.433.000		103.354.650		
		Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	1		1			
		Tingkat partisipasi politik	-		67			
1	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah peserta dialog interaktif masyarakat dengan Forpimda	180 orang	32.164.000		33.772.200	Kota Magelang	DAU
3	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah peserta forum diskusi politik	36 orang	48.953.000		51.400.650	Kota Magelang	DAU
6	Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol	Berita acara kelengkapan bantuan keuangan parpol	9 parpol	17.316.000		18.181.800	Kota Magelang	DAU
JUMLAH				1.836.711.000		1.928.546.550		

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
OPD : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan ketertiban administrasi kantor	100%	484.031.000	100%	508.232.550		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah perangko	200 lembar	800.000	200 lembar	840.000	Kesbangpolinmas	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	43.800.000	12 bulan	45.990.000	Kesbangpolinmas	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional	16 unit	5.850.000	16 unit	6.142.500	Kesbangpolinmas	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor petugas pengelola keuangan dan barang daerah	10 orang/bulan	72.163.000	10 orang/bulan	75.771.150	Kesbangpolinmas	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih serta jasa tenaga kebersihan	37 item & 2 orang/bulan	41.574.000	37 item & 2 orang/bulan	43.652.700	Kesbangpolinmas	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ATK	46 item	23.934.000	46 item	25.130.700	Kesbangpolinmas	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	8 jenis & 45000 lembar	23.745.000	8 jenis & 45000 lembar	24.932.250	Kesbangpolinmas	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah alat/komponen listrik	13 item	5.240.000	13 item	5.502.000	Kesbangpolinmas	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan (surat kabar)	3 jenis/bulan	3.660.000	3 jenis/bulan	3.843.000	Kesbangpolinmas	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang gas 12 kg	6 tabung	900.000	6 tabung	945.000	Kesbangpolinmas	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jamuan makan dan minum	55 kegiatan & 12 bulan	46.707.000	55 kegiatan & 12 bulan	49.042.350	Kesbangpolinmas	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pejalanan dinas luar daerah	87 kegiatan	199.566.000	87 kegiatan	209.544.300	Kesbangpolinmas	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jasa penjaga malam	1 orang/bulan	16.092.000	1 orang/bulan	16.896.600	Kesbangpolinmas	DAU
105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	100%	154.519.000	100%	162.244.950		
20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	9 jenis	9.810.000	9 jenis	10.300.500	Kesbangpolinmas	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	16 unit	126.074.000	16 unit	132.377.700	Kesbangpolinmas	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	6 jenis	6.400.000	6 jenis	6.720.000	Kesbangpolinmas	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengecatan dan pemeliharaan gedung kantor	1 paket	10.535.000	1 paket	11.061.750	Kesbangpolinmas	DAU
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur	7 item	1.700.000	7 item	1.785.000	Kesbangpolinmas	DAU
105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya dokumen pelaporan kinerja dan laporan keuangan	100%	42.088.000	100%	44.192.400		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	LKPJ, LKJ, Lap realisasi fisik dan keuangan	10 buku dan 24 set	11.702.000	10 buku dan 24 set	12.287.100	Kesbangpolinmas	DAU
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	3 buku	4.337.000	3 buku	4.553.850	Kesbangpolinmas	DAU
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen Renja Penetapan dan Perubahan	2 dokumen	6.300.000	2 dokumen	6.615.000	Kesbangpolinmas	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	RKA, DPA, RKPA, DPPA	30 buku	15.347.000	30 buku	16.114.350	Kesbangpolinmas	DAU
27	Penyusunan laporan capaian kinerja instansi pemerintah (LKJ IP) SKPD	LKJ IP SKPD	4 buku	4.402.000	4 buku	4.622.100	Kesbangpolinmas	DAU
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terpeliharanya situasi kondusif di wilayah Kota Magelang	100%	649.778.000	100%	682.266.900		
		Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%			
		Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai - nilai luhur Pancasila	0%		0%			
		Perda pelarangan peredaran narkoba	-		1			
		Jumlah Kampung Bebas Narkoba	2		3			
		Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1,13%		1,47%			
		Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	3%		6%			
		Rasio jumlah siskamling aktif	0,78		0,84			
		Frekuensi Patroli Satpol PP	NA		NA			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			
2	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah laporan kegiatan Komunitas Intelejen Daerah	12 buku	126.047.000	12 buku	132.349.350	Kota Magelang	DAU
4	Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah	Lomba Siskamling	17 kelurahan	12.468.000	17 kelurahan	13.091.400	Kota Magelang	DAU
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Monev RAD 2016 dan RAD 2017	30 buku	131.964.000	30 buku	138.562.200	Kota Magelang	DAU
7	penyusunan dan pelaporan data strategis daerah	Buku laporan eks G 30.S/PKI, rekomendasi kegiatan dan ijin survei	6 buku	9.099.000	6 buku	9.553.950	Kota Magelang	DAU
8	pengawasan orang asing dan tenaga kerja orang asing	Buku laporan Orang Asing	24 buku	98.051.000	24 buku	102.953.550	Kota Magelang	DAU
9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah laporan pemantauan keamanan wilayah	365 laporan	101.287.000	365 laporan	106.351.350	Kota Magelang	DAU
10	operasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)	Pelaksanaan Operasi P4GN	12 kegiatan	43.517.000	12 kegiatan	45.692.850	Kota Magelang	DAU
11	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Peserta penyuluhan P4GN dan test urine	150 Orang dan 100 orang	36.856.000	150 Orang dan 100 orang	38.698.800	Kota Magelang	DAU
12	penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	Peserta penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS di sekolah	200 orang	23.149.000	200 orang	24.306.450	Kota Magelang	DAU
13	kegiatan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba	Test urine untuk deteksi narkoba	500 orang	67.340.000	500 orang	70.707.000	Kota Magelang	DAU
218.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Terdokumentasikannya arsip SKPD secara rapi dan tertib	100%	23.626.000	100%	24.807.300		
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%		52%			
		Persentase arsip dan risalah	82%		82%			
		Persentase Penyelamatan Arsip	47%		53%			
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Penataan penyelamatan arsip aktif dan in aktif	2000 surat dan 10 dos	23.626.000		24.807.300	Kota Magelang	DAU
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terwujudnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan	100%	173.081.000		181.735.050		
		Prosentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	69,6%		72,2%			
		Database ormas yang akurat	69,00%		71,00%			
		Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	27,79%		35,19%			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta dialog peningkatan kerukunan antar umat beragama bagi toma dan toma	200 orang	27.997.000	200 orang	29.396.850	Kota Magelang	DAU
2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi peraturan tentang keormasan bagi ormas	200 orang	27.997.000	200 orang	29.396.850	Kota Magelang	DAU
3	peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa	Peserta dialog tentang wawasan kebangsaan	180 orang	29.980.000	180 orang	31.479.000	Kota Magelang	DAU
5	Pengembangan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat	Jumlah peserta dialog interaktif pengembangan nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa	100 orang	20.525.000	100 orang	21.551.250	Kota Magelang	DAU
8	Penyusunan database Organisasi Kemasyarakatan	Data Profil Ormas	60 buku	66.582.000	60 buku	69.911.100	Kota Magelang	DAU
105.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang kondusif	100%	101.158.000		106.215.900		
		Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	8		10			
		terpublikasikannya dialog antar agama	5		6			
		Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan	1		2			
		Tingkat kerukunan antar umat beragama	100%		100%			
		Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			
1	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah Peserta sosialisasi kerukunan beragama bagi generasi muda lintas agama	200 orang	27.997.000	200 orang	29.396.850	Kota Magelang	DAU
2	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah Peserta diskusi wawasan kebangsaan	100 orang	28.751.000	100 orang	30.188.550	Kota Magelang	DAU
7	Fasilitasi FKUB Kota Magelang	Jumlah rakor FKUB	2 kegiatan dan 10 buku laporan	21.585.000	2 kegiatan dan 10 buku laporan	22.664.250	Kota Magelang	DAU
8	Fasilitasi FPBI Kota Magelang	Jumlah rakor FPBI	2 kegiatan dan 10 buku laporan	22.825.000	2 kegiatan dan 10 buku laporan	23.966.250	Kota Magelang	DAU
105.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	109.997.000	100%	115.496.850		
		Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	18,75%		37,50%			
		Persentase ormas yang difasilitasi	7,87%		8,27%			
2	Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah	Pengiriman anggota Ormas/LSM	30 orang	36.957.000	30 orang	38.804.850	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Fasilitasi forum kewaspadaan diri masyarakat	Fasilitasi kegiatan FKDM Tingkat Kota	4 kali dan 12 buku	73.040.000	4 kali dan 12 buku	76.692.000	Kota Magelang	DAU
105.21	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya pendidikan politik masyarakat	100%	98.433.000	100%	103.354.650		
		Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	1		1			
		Tingkat partisipasi politik	-		67			
1	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah peserta dialog interaktif masyarakat dengan Forpimda	180 orang	32.164.000	180 orang	33.772.200	Kota Magelang	DAU
3	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah peserta forum diskusi politik	36 orang	48.953.000	36 orang	51.400.650	Kota Magelang	DAU
6	Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol	Berita acara kelengkapan bantuan keuangan parpol	9 parpol	17.316.000	9 parpol	18.181.800	Kota Magelang	DAU
		JUMLAH		1.836.711.000		1.928.546.550		

Matriks
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : Sosial
OPD : Dinas Sosial

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian	Tahun 2017		Prakiraan Maju 2018		Lokasi	Sumber Dana
		Tolok Ukur	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5		5		
106.01	Program pelayanan administrasi perkantoran			283.946.000		298.143.300		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah peranko	150 buah	450.000	150 buah	472.500	Dinsos	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terbayarnya tagihan-tagihan pelanggan	12 Bulan	29.340.000	12 Bulan	30.807.000	Dinsos	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	terpenuhinya perijinan kendaraan bermotor	18 Unit	2.250.000	18 Unit	2.362.500	Dinsos	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terbayarnya honor pejabat pengelola keuangan	12 Orang	61.022.000	12 Orang	64.073.100	Dinsos	DAU
8	penyediaan jasa kebersihan kantor	terciptanya kebersihan kantor	12 Bulan	21.724.000	12 Bulan	22.810.200	Dinsos	DAU
10	penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor tersedia untuk kebutuhan	12 Bulan	10.906.000	12 Bulan	11.451.300	Dinsos	DAU
11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan tersedia untuk	12 Bulan	7.292.000	12 Bulan	7.656.600	Dinsos	DAU
12	penyediaan komponen instalasi listrik \ penerangan bangunan kantor	komponen dan instalasi listrik tersedia untuk kebutuhan	12 Bulan	4.682.000	12 Bulan	4.916.100	Dinsos	DAU
13	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya spanduk	2	672.000	2	705.600	Dinsos	DAU
15	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai	12 Bulan	3.200.000	12 Bulan	3.360.000	Dinsos	DAU
16	penyediaan bahan logistik kantor	bahan logistik tersedia untuk kebutuhan kantor	12 Bulan	840.000	12 Bulan	882.000	Dinsos	DAU
17	penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinyan makan dan minum rapat dan tamu	12 Bulan	15.400.000	12 Bulan	16.170.000	Dinsos	DAU
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi luar daerah	12 Bulan	77.892.000	12 Bulan	81.786.600	Dinsos	DAU
19	penyediaan jasa tenaga kontrak/honorer daerah0 tidak tetap	jasa tenaga kontrak/honda terbayarkan	12 Bulan	48.276.000	12 Bulan	50.689.800	Dinsos	DAU
106.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apatur			120.871.000		126.914.550		
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	perabot rumah tangga yang tersedia	8 jenis	4.049.000	8 jenis	4.251.450	Dinsos	DAU
20	pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	terpeliharanya secara rutin gedung kantor	1 tahun	24.273.000	1 tahun	25.486.650	Dinsos	DAU
22	pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional	terpeliharanya kendaraan dinas	6 unit	76.704.000	6 unit	80.539.200	Dinsos	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5		5		
24	pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kerja	2 jenis	4.475.000	2 jenis	4.698.750	Dinsos	DAU
26	pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan kerja	6 jenis	11.370.000	6 jenis	11.938.500	Dinsos	DAU
106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			83.743.000		87.930.150		
1	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kegiatan SKPD	100 %	5.814.000	100 %	6.104.700	Dinsos	DAU
3	penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	terpenuhinya pelaporan prognosis	8 Bulan	3.161.000	8 Bulan	3.319.050	Dinsos	DAU
6	penyusunan rencana kerja SKPD	Terwujudnya rencana kerja SKPD dengan efektif	2	7.392.000	2	7.761.600	Dinsos	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya RKA- DPA SKPD	100 %	6.913.000	100 %	7.258.650	Dinsos	DAU
25	Monitoring ,evaluasi dan pelaporan pemohon hibah / bantuan sosial	lancarnya penyaluran dan tertibnya administrasi dan pelaksanaan hibah dan bansos	800 pemohon	57.422.000	800 pemohon	60.293.100	Dinsos	DAU
27	penyusunan laporan capaian kinerja instansi pemerintah (LKj IP) SKPD	Tersedianya LAKIP SKPD	100 %	3.041.000	100 %	3.193.050	Dinsos	DAU
106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya			78.860.000		82.803.000		
		Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	100%		100%			
		Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	10,00%		11,00%			
3	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Terselenggaranya koordinasidan fasilitasi kegiatan PKH	1 tahun	78.860.000	1 tahun	82.803.000	Kota Magelang	DAU
106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			364.589.000		382.818.450		
		Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%		100%			
		Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	20,00%		30,00%			
2	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Terlyani dan terlindungi korban perempuan dan anak dari eksploitasi dan perdagangan	28	10.298.000	28	10.812.900	Kota Magelang	DAU
3	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Anak penyandang PMKS mengikuti kegiatan karakter building	60 Orang	42.204.000	60 Orang	44.314.200	Kota Magelang	DAU
4	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	meningkatnya kesadaran anak jalanan yang mandiri	10 Orang	28.504.000	10 Orang	29.929.200	Kota Magelang	DAU
10	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Terselesaikanya masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	105	28.471.000	105	29.894.550	Kota Magelang	DAU
11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporan	12 bulan	37.214.000	12 bulan	39.074.700	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5		5		
12	Penanganan orang terlantar	tidak terlantar di jalan	180 Orang	19.285.000	180 Orang	20.249.250	Kota Magelang	DAU
14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	meningkatnya kemandirian para jompo	51 Orang	14.022.000	51 Orang	14.723.100	Kota Magelang	DAU
15	Pembinaan kepada veteran dan keluarganya	meningkatnya kesadaran veteran akan nilai nilai	30 Orang	6.347.000	30 Orang	6.664.350	Kota Magelang	DAU
16	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	meningkatnya keakuratan data PMKS dan PSKS	50 Buku	14.720.000	50 Buku	15.456.000	Kota Magelang	DAU
17	Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna	meningkatnya kualitas SDM karang taruna	142 Orang	15.596.000	142 Orang	16.375.800	Kota Magelang	DAU
24	monitoring, evaluasi dan pelaporan pendistribusian beras sejahtera	efektifitas pendistribusian Besar sejahtera	12 kegiatan	122.157.000	12 kegiatan	128.264.850	Kota Magelang	DAU
25	Pemetaan Daerah Rawan Bencana dan Rawan Sosial	data desa rawan bencana dan rawan sosial	1 Kegiatan	25.771.000	1 Kegiatan	27.059.550	Kota Magelang	DAU
106.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			50.665.000		53.198.250		
		Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial	15%		20%			
3	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat eks trauma	Korban KDRT dan pelecehan seksual yang mengikuti pelatihan	10 org	24.109.000	10 org	25.314.450	Kota Magelang	DAU
4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	meningkatkan rasa percaya diri penyandang cacat	15 Orang	26.556.000	15 Orang	27.883.800	Kota Magelang	DAU
106.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo			11.888.000		12.482.400		
		Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	50%		58%			
8	Pembinaan yayasan / panti asuhan	Peserta pembinaan	12 yayasan	11.888.000	12 yayasan	12.482.400	Kota Magelang	DAU
106.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			156.273.000		164.086.650		
		Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA	70%		75%			
1	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Terbinanya eks napi	10 Orang	60.630.000	10 Orang	63.661.500	Kota Magelang	DAU
6	Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK	meningkatkan kesadaran PGOT dan PSK	110 kali	95.643.000	110 kali	100.425.150	Kota Magelang	DAU
106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			370.900.000		389.445.000		
		Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100%		100%			
		Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial	3		4			
		Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	20%		30%			
1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Terbinanya dunia usaha	55 perusahaan	9.294.000	55 perusahaan	9.758.700	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5		5		
3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	meningkatnya profesionalisme pekerja sosial masyarakat	68 Orang	120.687.000	68 Orang	126.721.350	Kota Magelang	DAU
4	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	meningkatnya pengetahuan tentang komisi daerah lanjut usia	3 Orang	14.898.000	3 Orang	15.642.900	Kota Magelang	DAU
7	Pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan	terpeliharanya gedung dan pagar keliling TMP	5500 m2	226.021.000	5500 m2	237.322.050	Kota Magelang	DAU
		JUMLAH		1.521.735.000		1.597.821.750		

Matriks
 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 Bidang : Ketenagakerjaan
 OPD : Dinas Tenaga Kerja

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5		5		
201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			437.252.000		459.114.600		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah perangko	370 buah	1.110.000		1.165.500	Disnaker	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terbayarnya tagihan-tagihan pelanggan	12 Bulan	85.200.000		89.460.000	Disnaker	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya perijinan kendaraan bermotor	18 Unit	5.250.000		5.512.500	Disnaker	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terbayarnya honor pejabat pengelola keuangan	12 Orang	86.084.000		90.388.200	Disnaker	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terciptanya kebersihan kantor	12 Bulan	77.099.000		80.953.950	Disnaker	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor tersedia untuk kebutuhan	12 Bulan	14.759.000		15.496.950	Disnaker	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan tersedia untuk	12 Bulan	7.100.000		7.455.000	Disnaker	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen dan instalasi listrik tersedia untuk kebutuhan	12 Bulan	8.107.000		8.512.350	Disnaker	DAU
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya spanduk	2	672.000		705.600	Disnaker	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai	12 Bulan	3.200.000		3.360.000	Disnaker	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	bahan logistik tersedia untuk kebutuhan kantor	12 Bulan	1.680.000		1.764.000	Disnaker	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya makan dan minum rapat dan tamu	12 Bulan	17.723.000		18.609.150	Disnaker	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi luar daerah	12 Bulan	72.892.000		76.536.600	Disnaker	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	jasa tenaga kontrak/honda terbayarkan	12 Bulan	48.276.000		50.689.800	Disnaker	DAU
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	tersedianya data administrasi kepegawaian	12 Bulan	8.100.000		8.505.000	Disnaker	DAU
201.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			185.326.000		194.592.300		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5		5		
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya peralatan rumah tangga untuk BLK	11 jenis	4.700.000		4.935.000	Disnaker	DAU
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya pagar keliling	2 Jenis	50.160.000		52.668.000	Disnaker	DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terawatnya kendaraan dinas operasional	22 Unit	111.536.000		117.112.800	Disnaker	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	2	6.875.000		7.218.750	Disnaker	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan kerja	15	12.055.000		12.657.750	Disnaker	DAU
201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			27.641.000		29.023.050		
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan permohonan hibah/ bantuan sosial	lancarnya penyaluran dan tertibnya administrasi dan pelaksanaan hibah dan bansos	800 pemohon	6.444.000		6.766.200	Disnaker	DAU
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	terpenuhinya pelaporan prognosis	8 Bulan	3.851.000		4.043.550	Disnaker	DAU
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terwujudnya rencana kerja SKPD dengan efektif	2	7.392.000		7.761.600	Disnaker	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya RKA- DPA SKPD	100 %	6.913.000		7.258.650	Disnaker	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota	Tersedianya LAKIP SKPD	100 %	3.041.000		3.193.050	Disnaker	DAU
201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			981.102.000		1.030.157.100		
		Persentase peserta pelatihan tersertifikasi	2%			5%		
		Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kompetensi	65%			65%		
		Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP				5%		
3	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	tersedianya prasarana BLK	2 Jenis	65.000.000		68.250.000	Kota Magelang	DAU
7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK	Terpeliharanya sarana / prasarana gedung BLK	1	10.000.000		10.500.000	Kota Magelang	DAU
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	teridentifikasinya lulusan pelatihan 50 orang	20 Lokasi	4.645.000		4.877.250	Kota Magelang	DAU
11	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja	dimilikinya ketrampilan menjahit bagi pencaker	40 Orang	57.840.000		60.732.000	Kota Magelang	DAU
12	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bordir bagi pencari kerja	Pencari kerja yang memiliki ketrampilan bordir	20 Orang	100.790.000		105.829.500	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5		5		
13	Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)	dipahaminya hak dan kewajiban LPK	13 LPK	11.741.000		12.328.050	Kota Magelang	DAU
16	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja	dimilikinya ketrampilan montir sepeda motor	20 Orang	148.108.000		155.513.400	Kota Magelang	DAU
17	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja	dimilikinya ketrampilan tata boga	20 Orang	61.979.000		65.077.950	Kota Magelang	DAU
18	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja	dimilikinya ketrampilan tata rias	30 Orang	80.636.000		84.667.800	Kota Magelang	DAU
19	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja	Pencari kerja yang memiliki ketrampilan komputer	15 Peserta	52.041.000		54.643.050	Kota Magelang	DAU
20	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi pencari kerja	dimilikinya ketrampilan tehnisi HP	10 Orang	48.988.000		51.437.400	Kota Magelang	DAU
24	Pelatihan bahasa asing	Terlaksananya pelatihan bahasa bagi pencari kerja	60 Orang	165.182.000		173.441.100	Kota Magelang	DAU
25	Pendidikan dan ketrampilan las	Dimiliki ketrampilan Las bagi Pencaker	20	67.748.000		71.135.400	Kota Magelang	DAU
26	Pendidikan dan ketrampilan perkayuan	Dimilikinya Ketrampilan Perkayuan Bagi Pencaker	20	106.404.000		111.724.200	Kota Magelang	DAU
201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			3.735.307.000		3.922.072.350		
		Persentase wirausaha baru	5%			6%		
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	70%			70%		
		Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan						
1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	terlaksananya penyusunan informasi pasar kerja	120 Buku	112.702.000		118.337.100	Kota Magelang	DAU
3	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	terlaksananya pembinaan BKK dan PPTKIS	16 Lembaga	22.724.000		23.860.200	Kota Magelang	DAU
5	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	termotivasinya peserta pelatihan untuk berwirausaha	20 Orang	89.056.000		93.508.800	Kota Magelang	DAU
8	Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan	diketahuinya jenis kegiatan padat karya		15.265.000		16.028.250	Kota Magelang	DAU
11	Perluasan kerja sistem padat karya	terlaksananya kegiatan padat karya	9 Lokasi	1.475.409.000		1.549.179.450	Kota Magelang	DAU
12	Perluasan kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri	terbentuknya tenaga kerja mandiri	20 Orang	83.106.000		87.261.300	Kota Magelang	DAU
13	Penyusunan profil ketenagakerjaan, transmigrasi, dan sosial	tersedianya profil ketenagakerjaan	72 Buku	11.739.000		12.325.950	Kota Magelang	DAU
14	Job Fair	jumlah Pencaker	1000 orang	244.445.000		256.667.250	Kota Magelang	DAU
15	Padat karya non bahan	jumlah pekerja	1088 orang	1.514.453.000		1.590.175.650	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5		5		
17	Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008	Sertifikat ISO 9001 : 2008	1 sertifikat	81.188.000		85.247.400	Kota Magelang	DAU
18	Penyusunan dokumen Perencanaan tenaga kerja	Tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja	1	85.220.000		89.481.000	Kota Magelang	DAU
201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			245.991.000		258.290.550		
		Coverage asuransi tenaga kerja		69%		70%		
		Persentase Perselisihan Hub Industrial terselesaikan melalui perjanjian bersama (PB)		50%		50%		
2	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak	10 Kasus	14.582.000		15.311.100	Kota Magelang	DAU
4	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	terlaksananya sosialisasi peraturan ketenagakerjaan	200 Orang	24.961.000		26.209.050	Kota Magelang	DAU
9	Sidang Dewan Pengupahan	terlaksananya sidang dewan pengupahan	4 sidang kali	32.572.000		34.200.600	Kota Magelang	DAU
10	Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit	terlaksananya sidang LKS tripartit	4	26.019.000		27.319.950	Kota Magelang	DAU
12	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK	terlaksananya survey KHL	8 kali	69.538.000		73.014.900	Kota Magelang	DAU
14	Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)	termonitornya pemberian THR diperusahaan	150 Perusahaan	8.035.000		8.436.750	Kota Magelang	DAU
15	Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)	terlaksananya sosialisasi tentang UMK	200 Perusahaan	22.352.000		23.469.600	Kota Magelang	DAU
18	Bulan Bhakti K3	terlaksananya bulan K-3	1 Kegiatan	21.541.000		22.618.050	Kota Magelang	DAU
23	Penanganan kecelakaan kerja dan kasus jamsostek	tertangani kasus kecelakaan kerja	34 Kasus	9.354.000		9.821.700	Kota Magelang	DAU
25	Pendidikan dan pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	terlaksananya diklat/bimtek K3 bagi tenaga kerja	30 Orang	10.640.000		11.172.000	Kota Magelang	DAU
26	pemantauan pelaksanaan upah minimum	terlaksananya pelaksanaan UMK Kota Magelang	30 Perusahaan	6.397.000		6.716.850	Kota Magelang	DAU
308.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi			198.527.000		208.453.350		
		Persentase (%) calon transmigrasi yang ditempatkan		100%		100%		
2	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	diketahuinya lokasi penempatan transmigrasi		77.982.000		81.881.100	Kota Magelang	DAU
5	Pengarahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	terlaksananya penempatan transmigrasi	5 KK	70.291.000		73.805.550	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5		5		
6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi	terpantaunya kondisi transmigrans	2 Lokasi	50.254.000		52.766.700	Kota Magelang	DAU
308.17	Program Transmigrasi Regional			40.950.000		42.997.500		
		Persentase (%) masyarakat tersosialisasi program transmigrasi		100%		100%		
1	Penyuluhan transmigrasi regional	diketahui gambaran bertransmigrasi	300 KK	40.950.000		42.997.500	Kota Magelang	DAU
		JUMLAH		5.852.096.000		6.144.700.800		

Matriks
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang : Lingkungan Hidup
OPD : Dinas Lingkungan Hidup

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
205.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai aturan yang berlaku	100 %	1.234.967.000	100 %	1.296.715.350		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya pengiriman surat	20 Lembar	566.000	20 Lembar	594.300	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terbayarnya rekening listrik, telepon, air minum dan internet	12 Bulan	116.100.000	12 Bulan	121.905.000	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya perpanjangan STNK	54 Unit	47.670.000	54 Unit	50.053.500	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya pembayaran honor petugas	12 Bulan	152.388.000	12 Bulan	160.007.400	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	20 Jenis	37.495.000	20 Jenis	39.369.750	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	46 jenis	30.000.000	46 jenis	31.500.000	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan	9 Jenis	16.070.000	9 Jenis	16.873.500	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya surat kabar dan majalah	12 bulan	5.700.000	12 bulan	5.985.000	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
15	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat - alat listrik penerangan kantor	8 Jenis	4.220.000	8 Jenis	4.431.000	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya pengisian ulang isi tabung gas	8 kali	3.400.000	8 kali	3.570.000	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya bahan membuat minuman dan snack	125 Jenis	207.027.000	125 Jenis	217.378.350	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya perjalanan Dinas ke luar Daerah	40 Orang	270.760.000	40 Orang	284.298.000	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	terlaksananya pembayaran honorarium tenaga kontrak	12 Bulan	320.880.000	12 Bulan	336.924.000	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
25	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda	terlaksananya pembayaran PBB tanah TPSA	1 Tahun	2.000.000	1 Tahun	2.100.000	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	terkelolanya administrasi kepegawaian	4 kegiatan	20.691.000	4 kegiatan	21.725.550	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
205.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	100 %	1.528.509.000	100 %	1.604.934.450		DAU
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terlaksananya pengecatan dan perbaikan Kantor	6 Unit	89.191.000	6 Unit	93.650.550	Dinas Lingkungan Hidup	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksananya perbaikan kendaraan dinas/operasional kantor	54 Unit	1.401.225.000	54 Unit	1.471.286.250	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perbaikan AC dan Sound System/Wireless	6 Unit	3.500.000	6 Unit	3.675.000	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan alat kantor	50 unit	33.720.000	50 unit	35.406.000	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur kantor	20 unit	873.000	20 unit	916.650	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
205.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya aparatur pegawai yang profesional	100 %	138.853.000	100 %	145.795.650	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
		Persentase kehadiran ASN	97%		97%			DAU
		Persentase pelanggaran disiplin ASN	0,21%		0,21%			DAU
3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	tersedianya pakaian kerja, sepatu boot, topi, mantel hujan, helm	311 set	138.853.000	311 set	145.795.650		DAU
205.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai aturan yang berlaku	100 %	73.234.000	100 %	76.895.700		DAU
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laksanakan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan SKPD	24 Buku	12.844.000	24 Buku	13.486.200	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	6 Buku	3.530.000	6 Buku	3.706.500	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi	6 Buku	3.542.000	6 Buku	3.719.100	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun 2016	4 Buku	6.656.000	4 Buku	6.988.800	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2018 dan perubahan tahun 2017	12 Buku	9.329.000	12 Buku	9.795.450	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	Tersusunnya RKA SKPD	30 Buku	20.545.000	30 Buku	21.572.250	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
10	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Perubahan Renstra PD	1 dokumen	10.125.000	1 dokumen	10.631.250	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	Tersusunnya LKj IP SKPD	6 Buku	6.663.000	6 Buku	6.996.150	Dinas Lingkungan Hidup	DAU
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terwujudnya Kota Magelang yang bersih dari sampah dengan pengelolaan persampahan yang optimal yang didukung oleh sarana dan prasana serta tenaga kerja yang mencukupi sehingga lingkungan kota yang bersih dan nyaman	100 %	6.278.481.000	100 %	6.592.405.050		DAU
		Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	3,3		4,3			DAU
		Persentase sampah perkotaan yang ditangani	88%		89%			DAU
		Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	3,3%		4,3%			DAU
2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	tersedianya Bin Sampah beroda (25), gerobak sampah (25), container (10) tempat sampah (500), excavator (1)	561 unit	210.410.000	561 unit	220.930.500	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terpeliharanya transfer depo dan tps	2 Unit	177.938.000	2 Unit	186.834.900	Kota Magelang	DAU
6	Bimbingan teknis persampahan	meningkatnya kemampuan petugas sampah	125 Orang	142.108.000	125 Orang	149.213.400	Kota Magelang	DAU
7	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	meningkatnya kemampuan aparat dalam pengelolaan sampah	100 Orang	65.000.000	100 Orang	68.250.000	Kota Magelang	DAU
11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah	125 Orang	63.303.000	125 Orang	66.468.150	Kota Magelang	DAU
12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	laporan pengendalian dan pengawasan kebersihan kota	12 Bulan	24.980.000	12 Bulan	26.229.000	Kota Magelang	DAU
24	Penanganan sampah kota	meningkatnya kebersihan Kota	45000 M3	2.994.487.000	45000 M3	3.144.211.350	Kota Magelang	DAU
25	Pengelolaan sampah TPA	Tertatanya sampah di TPSA, pembangunan sel aktif, pembangunan saluran air lindi	60000 M3	1.656.725.000	60000 M3	1.739.561.250	Kota Magelang	DAU
42	Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting	jumlah peserta pelatihan daur ulang	60 orang	26.246.000	60 orang	27.558.300	Kota Magelang	DAU
45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	jumlah kampung organik yang terpantau dan KSM	45 lokasi	88.145.000	45 lokasi	92.552.250	Kota Magelang	DAU
48	Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah	jumlah peserta pelatihan	70 orang	39.113.000	70 orang	41.068.650	Kota Magelang	DAU
49	Pendampingan Pengelolaan Persampahan	peran serta aktif dari kader lingkungan / penggerak lingkungan	12 bulan	164.127.000	12 bulan	172.333.350	Kota Magelang	DAU
50	Peningkatan operasional dan Pemeliharaan TPST	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	12 Bulan	56.350.000	12 Bulan	59.167.500	Kota Magelang	DAU
51	Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik	Pembuatan pupuk granule	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	73.500.000	Kota Magelang	DAU
52	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	52.500.000	Kota Magelang	DAU
54	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Terselenggaranya ekspose dan koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	5 Ekspose dan Koordinasi Adipura	373.768.000	5 Ekspose dan Koordinasi Adipura	392.456.400	Kota Magelang	DAU
55	Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	lokasi Bank Sampah yang dipantau	17 kelurahan	33.544.000	17 kelurahan	35.221.200	Kota Magelang	DAU
58	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian	Tersusunnya buku volume sampah harian	1 dokumen	42.237.000	1 dokumen	44.348.850	Kota Magelang	DAU
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya profil dinas yang representatif	100 %	15.600.000	100 %	16.380.000		DAU
		Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah:						DAU
		a. Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			DAU
		b. Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			DAU
		Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			DAU
		Jumlah KIM	17		17			DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6		7			DAU
		Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-		1			DAU
		Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi						DAU
	Pengelolaan website	Terkelolanya Website SKPD	24 Buah	15.600.000	24 Buah	16.380.000		DAU
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	100 %	742.784.000	100 %	779.923.200	Kota Magelang	DAU
		Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	20%		30%			DAU
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	terlaksananya kerja baki massal	2400 orang	36.475.000	2400 orang	38.298.750	Kota Magelang	DAU
3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	tercapainya kebersihan Kota saat peringatan hari jadi Kota Magelang	1 Paket	59.296.000	1 Paket	62.260.800	Kota Magelang	DAU
4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau dokumen lingkungannya	15 usaha/kegiatan	64.600.000	15 usaha/kegiatan	67.830.000	Kota Magelang	DAU
6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	terkendalinya pengelolaan limbah B3 di TPA	1 Paket	9.330.000	1 Paket	9.796.500	Kota Magelang	DAU
16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	laporan pengelolaan sampah TPSA Banyu urip	12 Buku	19.985.000	12 Buku	20.984.250	Kota Magelang	DAU
17	Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan	Laksanakan koordinasi penyusunan dan pelaporan dokumen lingkungan	50 Peserta	5.200.000	50 Peserta	5.460.000	Kota Magelang	DAU
24	Pemantauan Kualitas Udara	jumlah sampel yang diperiksa	20 sampel	96.523.000	20 sampel	101.349.150	Kota Magelang	DAU
26	Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup	kasus yang tertangani	3 kasus	5.780.000	3 kasus	6.069.000	Kota Magelang	DAU
29	Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri	jumlah sampel yang diperiksa	56 sampel	45.537.000	56 sampel	47.813.850	Kota Magelang	DAU
33	Pemantauan Kualitas Mata Air	Jumlah sampel yang diperiksa	20 sampel	31.264.000	20 sampel	32.827.200	Kota Magelang	DAU
35	Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup	Pelaksanaan penyambutan dan tasyakuran Adipura	2 laporan	238.067.000	2 laporan	249.970.350	Kota Magelang	DAU
38	Pengelolaan Gas Methan	Termanfaatnya Gas Methan untuk masyarakat	1 paket	69.400.000	1 paket	72.870.000	Kota Magelang	DAU
41	Pelayanan Penyedotan Kakus	Jumlah lubang kakus Masyarakat yang disedot	50 Unit	33.250.000	50 Unit	34.912.500	Kota Magelang	DAU
42	Verifikasi Dokumen Lingkungan Hidup	Terverifikasinya dokumen lingkungan	100 %	28.077.000	100 %	29.480.850	Kota Magelang	DAU
205.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			328.124.000		344.530.200		DAU
		Indeks Kualitas Air,	76%		76%			DAU
		Indeks Kualitas Udara	78%		78%			DAU
		Indeks Tutupan Hutan	48%		49%			DAU
		Jumlah SDA yang terkonservasi	47,7		57,7			DAU
		Jenis flora	8 Jenis		10 Jenis			DAU
		Jenis fauna	2 Jenis		3 Jenis			DAU
39	Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup	peserta aksi lingkungan	90 org	26.506.000	90 org	27.831.300	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah	- peserta sosialisasi dan ekpse Adiwiyata Sekolah	170 org	76.111.000	170 org	79.916.550	Kota Magelang	DAU
44	Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Lingkungan Hidup	8 kegiatan	66.130.000	8 kegiatan	69.436.500	Kota Magelang	DAU
45	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Juara Lomba K3	30 Juara	159.377.000	30 Juara	167.345.850	Kota Magelang	DAU
305.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Terwujudnya lampu-lampu jalan dan taman yang berfungsi sebagai penghias wajah kota	100 %	7.153.723.000	100 %	7.511.409.150		DAU
2	Pemasangan instalasi jaringan PJU	terlaksananya penambahan titik lampu PJU (44), Panel surya tunggal (2), panel surya integrated (6)	50 unit	600.000.000	50 unit	630.000.000	Kota Magelang	DAU
3	Pemeliharaan lampu PJU	terlaksananya perbaikan dan penggantian suku cadang lampu PJU	3250 Titik	501.443.000	3250 Titik	526.515.150	Kota Magelang	DAU
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum	tersedianya laporan kondisi PJU	12 buku	25.000.000	12 buku	26.250.000	Kota Magelang	DAU
8	Penyediaan Jasa Listrik PJU	terbayarnya rekening listrik PJU	12 bulan	6.002.280.000	12 bulan	6.302.394.000	Kota Magelang	DAU
9	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang PJU	Raperwal PJU	1 draft	25.000.000	1 draft	26.250.000	Kota Magelang	DAU
205.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			918.396.000		964.315.800		DAU
		Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	6 buah		6 buah			DAU
1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	terlaksananya pameran dan lomba foto lingkungan	2 kali	60.751.000	2 kali	63.788.550	Kota Magelang	DAU
2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersedianya buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	1 Dokumen	38.425.000	1 Dokumen	40.346.250	Kota Magelang	DAU
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	dokumen evaluasi ijin gangguan	1 dokumen	44.354.000	1 dokumen	46.571.700	Kota Magelang	DAU
18	Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-sumber Pencemaran	Dokumen Kualitas Air	1 Dokumen	53.288.000	1 Dokumen	55.952.400	Kota Magelang	DAU
19	Pemeriksaan Sampel Tanah	Jumlah sampel yang dianalisa	20 sampel	19.545.000	20 sampel	20.522.250	Kota Magelang	DAU
20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air	dokumen kualitas air	1 dokumen	33.301.000	1 dokumen	34.966.050	Kota Magelang	DAU
21	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati	Tersedianya Profil Keanekaragaman Hayati	1 dokumen	48.425.000	1 dokumen	50.846.250	Kota Magelang	DAU
22	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Tersusunnya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 dokumen	22.450.000	1 dokumen	23.572.500	Kota Magelang	DAU
23	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Pembuangan Limbah dan Polutan	Tersusunnya Dokumen KLHS dalam Pembuangan Limbah dan Polutan	1 dokumen	35.579.000	1 dokumen	37.357.950	Kota Magelang	DAU
24	Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup	Pemasangan Spanduk	8 bh	126.070.000	8 bh	132.373.500	Kota Magelang	DAU
25	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup	Iklan Informasi Layanan Masyarakat	150 kali	436.208.000	150 kali	458.018.400	Kota Magelang	DAU
205.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi		100 %	69.566.000		73.044.300		DAU
		Persentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin	100%		100%			DAU
18	Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca	Tersedianya Data Gaas Rumah Kaca	1 dokumen	53.380.000	1 dokumen	56.049.000	Kota Magelang	DAU
19	Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3	Tersedianya data Bahan Perusak Ozon (BPO) dan Limbah B-3	1 dokumen	16.186.000	1 dokumen	16.995.300	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104.20	Program pengelolaan areal pemakaman	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang pemakaman	100 %	461.950.000	100 %	485.047.500		DAU
		Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk	29,20%		26,6%			DAU
5	Pemberian perijinan pemakaman	jumlah pemberian rekomendasi pengkaplingan tanah	200 Lembar	4.750.000	200 Lembar	4.987.500	Kota Magelang	DAU
6	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	pembangunan lahan parkir	Paket	75.000.000	Paket	78.750.000	Kota Magelang	DAU
7	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	perawatan dan pengecatan tembok, joglo pela makam, tempat transit, dan Kantor makam	5 Paket	186.100.000	5 Paket	195.405.000	Kota Magelang	DAU
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	laporan pengendalian dan pengawasan TPU Giriloyo	12 Bulan	36.100.000	12 Bulan	37.905.000	Kota Magelang	DAU
11	Pembangunan tembok pemakaman	tembok makam	1 Paket	120.000.000	1 Paket	126.000.000	Kota Magelang	DAU
14	Verifikasi data pemakaman	jumlah data makam yang terverifikasi	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.750.000	Kota Magelang	DAU
15	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pemakaman	Raperwal Pelayanan Pemakaman	1 draft	25.000.000	1 draft	26.250.000	Kota Magelang	DAU
205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terwujudnya Taman Kota dan Aksesoris Kota yang indah dan asri didukung oleh prasarana pengelolaan RTH yang memadai	100 %	9.071.476.000	100 %	9.525.049.800		DAU
		Luas RTH Kota	18%		18%			DAU
6	Pemeliharaan RTH	terlaksananya perawatan taman - taman Kota, pembuatan tulisan Turonggo Seto di patung diponegoro	38 Buah	1.976.635.000	38 Buah	2.075.466.750	Kota Magelang	DAU
9	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	terlaksananya sosialisasi pengelolaan RTH	1 Kegiatan	78.023.000	1 Kegiatan	81.924.150	Kota Magelang	DAU
10	Monitoring dan evaluasi	tersedianya laporan kondisi RTH	12 Buku	22.500.000	12 Buku	23.625.000	Kota Magelang	DAU
18	Penataan Taman Aloun-aloun	Tertatanya taman alun-alun	1 Paket	5.000.000.000	1 Paket	5.250.000.000	Kota Magelang	DAU
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau	Pengadaan Mobil Siram (1), Mesin Pompa (3), instalasi penyiraman (15)	19 unit	650.000.000	19 unit	682.500.000	Kota Magelang	DAU
25	Pengecatan Pohon Turus Jalan	Terlaksananya Pengecatan Pohon Turus Jalan	1300 Buah	68.143.000	1300 Buah	71.550.150	Kota Magelang	DAU
26	Perawatan Pohon Peneduh	terlaksananya Perawatan dan Pemangkasan Pohon Peneduh	100 Buah	67.050.000	100 Buah	70.402.500	Kota Magelang	DAU
29	Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman	Pemeliharaan tiang bendera	1 Paket	37.553.000	1 Paket	39.430.650	Kota Magelang	DAU
30	Pemeliharaan Tugu dan Monumen	terlaksananya pengecatan Tugu dan Monumen	11 Buah	68.371.000	11 Buah	71.789.550	Kota Magelang	DAU
36	Penataan dan peningkatan lahan pembibitan	tersedianya pagar pembatas, pembuatan peneduh kebun bibit, pupuk	Paket	51.651.000	Paket	54.233.550	Kota Magelang	DAU
45	Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan	tersedianya pohon peneduh dengan kriteria rindang	500 Buah	81.550.000	500 Buah	85.627.500	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	Penataan Taman Lansia Selatan	Penataan Taman Lansia Selatan	1 Paket	375.000.000	1 Paket	393.750.000	Kota Magelang	DAU
73	Penataan Taman Jalan Tentara Pelajar	Penataan taman tentara pelajar	1 Paket	195.000.000	1 Paket	204.750.000	Kota Magelang	DAU
80	Penataan Taman Jalan Majapahit	Tertatanya Taman Jl. Majapahit	1 paket	375.000.000	1 paket	393.750.000	Kota Magelang	DAU
83	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Ruang Terbuka Hijau	Tertatanya Taman Trunan	1 Paket	25.000.000	1 Paket	26.250.000	Kota Magelang	DAU
		JUMLAH		28.015.663.000		29.416.446.150		

Matriks
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang : Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
OPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
206.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran kegiatan SKPD	1 tahun	600.221.000	1 tahun	630.232.050		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jumlah surat yang terselesaikan	388 Surat	1.670.000	388 Surat	1.753.500	Dispendukcapil	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Jasa komunikasi, sumber daya air, telepon, dan listrik	12 Bulan	165.000.000	12 Bulan	173.250.000	Dispendukcapil	DAU
5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perizinan kendaraan dinas	10 Unit	5.260.000	10 Unit	5.523.000	Dispendukcapil	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan keuangan yang tepat waktu	12 Laporan	78.816.000,00	12 Laporan	82.756.800	Dispendukcapil	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya alat kebersihan, bahan pembersih dan jasa retribusi sampah serta petugas kebersihan kantor	12 Bulan	42.625.000	12 Bulan	44.756.250	Dispendukcapil	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK kantor	66 Jenis	24.955.000	66 Jenis	26.202.750	Dispendukcapil	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	9 Jenis	12.591.000	9 Jenis	13.220.550	Dispendukcapil	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik dan elektronik	11 Jenis	5.131.000	11 Jenis	5.387.550	Dispendukcapil	DAU
13	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	1 jenis	448.000	1 jenis	470.400	Dispendukcapil	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Melek informasi umum dan sains	2 Jenis	3.480.000,00	2 Jenis	3.654.000	Dispendukcapil	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan pengisian tabung gas dan premium untuk genset	12 Bulan	2.824.000,00	12 Bulan	2.965.200	Dispendukcapil	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan minuman pegawai/tamu dan jasa pembuat minum	310 Orang	19.145.000	310 Orang	20.102.250	Dispendukcapil	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya dana untuk perjalanan dinas	108 ok	190.000.000	108 ok	199.500.000	Dispendukcapil	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terbayarnya honor penjaga malam dan pengemudi	3 orang	48.276.000,00	3 orang	50.689.800	Dispendukcapil	DAU
206.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kelancaran kegiatan SKPD	1 Tahun	555.663.000	1 Tahun	583.446.150	Dispendukcapil	DAU
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kelancaran kegiatan pelayanan kepada masyarakat	1 jenis	327.396.000,00	1 jenis	343.765.800	Dispendukcapil	DAU
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keindahan gedung kantor	2464 m2	50.742.000,00	2464 m2	53.279.100	Dispendukcapil	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kelancaran kegiatan SKPD	10 Unit	96.261.000,00	10 Unit	101.074.050	Dispendukcapil	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan kantor	30 unit/th	14.154.000	30 unit/th	14.861.700	Dispendukcapil	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor	76 unit/th	67.110.000	76 unit/th	70.465.500	Dispendukcapil	DAU
206.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	1 tahun	51.155.000	1 tahun	53.712.750		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya pengendalian operasional kegiatan tahun 2017	4 Laporan	10.235.000	4 Laporan	10.746.750	Dispendukcapil	DAU
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	1 Dokumen	3.584.000	1 Dokumen	3.763.200	Dispendukcapil	DAU
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Data dan dokumen laporan keuangan	1 Dokumen	9.106.000,00	1 Dokumen	9.561.300	Dispendukcapil	DAU
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen Renja SKPD	2 Dokumen	9.426.000,00	2 Dokumen	9.897.300	Dispendukcapil	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen Anggaran SKPD	2 Dokumen	13.756.000,00	2 Dokumen	14.443.800	Dispendukcapil	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	Terwujudnya sinkronisasi anggaran SKPD	1 Dokumen	5.048.000,00	1 Dokumen	5.300.400	Dispendukcapil	DAU
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tertib administrasi kependudukan	1 tahun	1.337.968.000		1.404.866.400		
		Cakupan penduduk memiliki KTP-el		100%		100%		
		Cakupan penduduk memiliki KIA				100%		
		Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan		80%		100%		
		Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk		930		935		
		Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang		100%		100%		
		Persentase kepemilikan akte kematian		45%		50%		
		Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi		15%		40%		
3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Statistik kependudukan untuk penyusunan kebijakan	150 Buku	83.941.000	150 Buku	88.138.050	Kota Magelang	DAU
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Terlaksananya pemberitahuan bagi KTP pemula	6 Laporan	35.477.000	6 Laporan	37.250.850	Kota Magelang	DAU
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlayannya permohonan KTP, KK	18000 pemohon	295.163.000	18000 pemohon	309.921.150	Kota Magelang	DAU
9	Pengembangan data base kependudukan	Tersusunnya buku profil perkembangan kependudukan	30 Buku	21.676.000	30 Buku	22.759.800	Kota Magelang	DAU
12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Penyebarluasan Informasi bagi Kasie Tapem dan Staf	40 Orang	4.152.000	40 Orang	4.359.600	Kota Magelang	DAU
13	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	Tertib administrasi kependudukan	1220 Orang	118.630.000	1220 Orang	124.561.500	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya Laporan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta terpeliharanya berkas dan dokumen pencatatan sipil	4 laporan	18.510.000	4 laporan	19.435.500	Kota Magelang	DAU
17	Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan	Tertib administrasi dan data kependudukan	4 Kegiatan	15.375.000	4 Kegiatan	16.143.750	Kota Magelang	DAU
18	Pencatatan mutasi penduduk	Terakomodirnya data kematian, kelahiran, pindah, kawin, cerai	6 jenis buku	47.830.000	6 jenis buku	50.221.500	Kota Magelang	DAU
19	Pembuatan database backup dokumen Catatan sipil	Terpeliharanya data dokumen akte kelahiran dalam data base	1000 Record akta	23.199.000	1000 Record akta	24.358.950	Kota Magelang	DAU
20	Pelayanan Administrasi Perkawinan,Perceraian,Kelahiran	Tertib administrasi dibidang pencatatan sipil	2459 Lembar	89.032.000	2459 Lembar	93.483.600	Kota Magelang	DAU
28	Pelayanan Akta Kelahiran Keliling	Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran	21 tempat	11.929.000	21 tempat	12.525.450	Kota Magelang	DAU
29	Personalisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Penerbitan KTP Elektronik	12 Laporan	173.242.000	12 Laporan	181.904.100	Kota Magelang	DAU
30	Penuntasan kepemilikan akta pencatatan sipil	Surat Pemberitahuan Pengurusan Akta Kelahiran Balita	1150 Surat	19.201.000	1150 Surat	20.161.050	Kota Magelang	DAU
32	Pengelolaan Database Administrasi Kependudukan	Tersedianya Database Adminduk untuk Kelurahan se-Kota Magelang	6 kali	58.417.000	6 kali	61.337.850	Kota Magelang	DAU
33	Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan	Terselesikannya masalah pengaduan masyarakat	4 laporan	9.029.000	4 laporan	9.480.450	Kota Magelang	DAU
34	Operasi Yustisi Kepemilikan KTP elektronik bagi Warga Kota Magelang	Teribnya masyarakat Kota Magelang membawa KTP elektronik di manapun berada	4 kali	10.136.000	4 kali	10.642.800	Kota Magelang	DAU
35	Pendataan Penduduk Non Permanen	Terdatanya jumlah penduduk non permanen	3 laporan	31.103.000	3 laporan	32.658.150	Kota Magelang	DAU
36	Pemutakhiran database dan dokumen kependudukan	Semakin validnya kondisi DB & dokumen kependudukan	15000 dokumen	70.999.000	15000 dokumen	74.548.950	Kota Magelang	DAU
38	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Terpenuhinya kebutuhan identitas anak	7000 buah	200.927.000	7000 buah	210.973.350	Kota Magelang	DAU
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tertib Administrasi Kependudukan	1 tahun	10.174.000	1 tahun	10.682.700		
		Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah:						
		a. Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			
		b. Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			
		Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin		3		3		
		Jumlah KIM		17		17		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.		6		7		
		Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-			1		
		Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi						
	Pengelolaan Website	Eksistensi website sebagai media komunikasi dan informasi	12 Bulan	10.174.000,00	12 Bulan	10.682.700	Kota Magelang	DAU
218.15	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terjaminnya keamanan fisik dan informasi arsip	100 %	5.832.000	100 %	6.123.600		
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku		34%		52%		
		Persentase arsip dan risalah		82%		82%		
		Persentase Penyelamatan Arsip		47%		53%		
	Fasilitasi dan Penataan Arsip SKPD	Tertatanya arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku	12 bulan	5.832.000,00		6.123.600	Kota Magelang	DAU
		JUMLAH		2.561.013.000		2.689.063.650		

Matriks
 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
 Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 Bidang : Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak,
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
207.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	637.865.000		669.758.250		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya distribusi surat menyurat	1 tahun	1.425.000		1.496.250	DPMP2AP2KB	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	98.850.000		103.792.500	DPMP2AP2KB	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbaharuinya STNK Kendaraan Dinas	40 unit	17.275.000		18.138.750	DPMP2AP2KB	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang	12 bulan	83.595.000		87.774.750	DPMP2AP2KB	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor dan keamanan kantor	12 bulan	44.164.000		46.372.200	DPMP2AP2KB	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	16.000.000		16.800.000	DPMP2AP2KB	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	13.541.000		14.218.050	DPMP2AP2KB	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	14 jenis	14.955.000		15.702.750	DPMP2AP2KB	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	3.600.000		3.780.000	DPMP2AP2KB	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Pengisian tabung gas	20 tbg	3.740.000		3.927.000	DPMP2AP2KB	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian dan tamu	12 bulan	26.866.000		28.209.300	DPMP2AP2KB	DAU
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	226.094.000		237.398.700	DPMP2AP2KB	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya tenaga penjaga malam	12 bulan	80.760.000		84.798.000	DPMP2AP2KB	DAU
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terwujudnya pengelolaan kepegawaian	12 bulan	7.000.000		7.350.000	DPMP2AP2KB	DAU
207.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	303.236.000		318.397.800	DPMP2AP2KB	DAU
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 unit	90.000.000		94.500.000	DPMP2AP2KB	DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	40 unit	159.306.000		167.271.300	DPMP2AP2KB	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya service peralatan kantor	69 unit	48.880.000		51.324.000	DPMP2AP2KB	DAU
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor	79 buah	5.050.000		5.302.500	DPMP2AP2KB	DAU
207.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD	Terciptanya peningkatan kapasitas aparatur	100%	5.600.000		5.880.000		
	Penilaian angka kredit aparatur	pejabat fungsional penyuluh KB	15 orang	5.600.000		5.880.000		
207.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terciptanya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	66.051.000		69.353.550		
1	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	4 Kegiatan	7.580.000		7.959.000	DPMP2AP2KB	DAU
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan realisasi anggaran	1 Laporan	3.420.000		3.591.000	DPMP2AP2KB	DAU
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan	1 Kegiatan	7.444.000		7.816.200	DPMP2AP2KB	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan	2 kegiatan	8.953.000		9.400.650	DPMP2AP2KB	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	Terciptanya sistem penyusunan RKA- SKPD yang accountable dan responsible	2 Kegiatan	9.517.000		9.992.850	DPMP2AP2KB	DAU
10	Penyusunan Renstra SKPD	Terlaksananya penyusunan Renstra DPMP2AP2KB Kota Magelang	2 kegiatan	11.567.000		12.145.350	DPMP2AP2KB	DAU
24	Penyusunan Laporan sinkronisasi aset dan keuangan SKPD	Terdatanya aset BPMPKB yang valid	3 buku	12.600.000		13.230.000	DPMP2AP2KB	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)	Terlaksananya penyusunan laporan LKJIP BPMPKB	1 Kegiatan	4.970.000		5.218.500	DPMP2AP2KB	DAU
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terwujudnya keberdayaan masyarakat	100%	188.797.000		198.236.850		
		1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	10			11		
		2. LPM berprestasi						
		Tingkat kota	41%			47%		
		Tingkat provinsi	peringkat 1			peringkat 1		
		Tingkat nasional	peringkat 1			peringkat 1		
		3. Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	24%			35%		
		4. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143			143		
1	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat Pedesaan	LPM dalam program pembangunan kelurahan	2 keg	70.957.000		74.504.850	DPMP2AP2KB	DAU
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terselenggaranya pelatihan bagi masyarakat untuk menjadi kader PM	34 Orang	24.347.000		25.564.350	DPMP2AP2KB	DAU
3	Penyelenggaraan diseminasi Informasi bagi masyarakat desa	Tersedianya data profil	21 buku	40.000.000		42.000.000	DPMP2AP2KB	DAU
6	Penyelenggaraan pelatihan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	Penyelenggaraan pelatihan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	70 Orang	53.493.000		56.167.650	DPMP2AP2KB	DAU
208.15	Program Keluarga Berencana	Terwujudnya pelayanan KB bagi masyarakat di Kota Magelang	100%	46.772.000		49.110.600		
		1. Rata-rata jumlah anak per keluarga	2			2		
1	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Keluarga miskin yang diberi pelayanan KB	250 orang	8.500.000		8.925.000	DPMP2AP2KB	DAU
2	Pelayanan KIE	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi program KB	1 kegiatan	14.447.000		15.169.350	DPMP2AP2KB	DAU
3	Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu	Terlaksananya pemeriksaan Pupsmeas	75 orang	15.825.000		16.616.250	DPMP2AP2KB	DAU
5	Pembinaan keluarga berencana	Terselenggaranya kegiatan Harganas	185 orang	8.000.000		8.400.000	DPMP2AP2KB	DAU
207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Terwujudnya pengembangan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat	100%	28.662.000		30.095.100		
		Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	29%			35%		
		Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4			4		
2	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Terlaksananya pendampingan LKK	17 Kelompok	28.662.000		30.095.100	DPMP2AP2KB	DAU
106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terfasilitasinya kegiatan Lansia di Kota Magelang	100%	78.885.000		82.829.250		
		Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%			100%		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	20,00%		30,00%			
14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	Terlaksananya pembinaan keluarga lanjut usia	500 Orang	43.885.000		46.079.250	DPMP2AP2KB	DAU
23	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan	meningkatnya peran serta masyarakat lansia dalam pembangunan	100%	35.000.000		36.750.000	DPMP2AP2KB	DAU
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Tercapainya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	100%	424.268.000		445.481.400		
		Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	45%		47%			
2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Terfasilitasinya P2T2A Kota Magelang	5 kegiatan	174.708.000		183.443.400	DPMP2AP2KB	DAU
5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Tercapai penguatan kelembagaan menuju kota layak anak	500 Anak	75.000.000		78.750.000	DPMP2AP2KB	DAU
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya hak dan perlindungan anak	300 Orang	88.810.000		93.250.500	DPMP2AP2KB	DAU
7	Evaluasi pelaksanaan PUG	Meningkatnya Kinerja PUG di Kota Magelang	20 anak	68.000.000		71.400.000	DPMP2AP2KB	DAU
19	Penyusunan Peraturan Walikota tentang PUG, Penanganan KDRT dan Trafficking	P2TP2A Kota Magelang	150 orang	17.750.000		18.637.500	DPMP2AP2KB	DAU
208.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya kualitas informasi KRR bagi siswa di Kota Magelang	100%	11.018.000		11.568.900		
		Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	2%		2%			
1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Meningkatnya kualitas informasi KRR bagi siswa SLTA	80 orang	11.018.000		11.568.900	DPMP2AP2KB	DAU
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	228.105.000		239.510.250		
		Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	87,50%		100,00%			
1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terlaksananya temu kader BPMPKB	1 Kegiatan	30.085.000		31.589.250	DPMP2AP2KB	DAU
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	3 Kegiatan	32.950.000		34.597.500	DPMP2AP2KB	DAU
6	Pelatihan dan pembentukan kelompok BKB dan BKR	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat	70 Kelurahan	25.500.000		26.775.000	DPMP2AP2KB	DAU
13	Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Terlaksananya kegiatan TMMD	2 Kel	139.570.000		146.548.500	DPMP2AP2KB	DAU
202.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan	100%	92.291.000		96.905.550		
		Rasio KDRT	0,06%		0,05%			
		Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	23		20			
		Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%		100%			
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%		100%			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KIP/A dan PPT / PKT di RS	100%		100%			
		Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%		100%			
		Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%		100%			
		Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%		100%			
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%		100%			
		Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	3%		4%			
1	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Terlaksannya TOT bagi anggota kaukus perempuan politik	300 Orang	77.040.000		80.892.000	DPMP2AP2KB	DAU
10	Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga	Terseleenggaranya sosialisasi perlindungan tindak KDRT	100 Orang	15.251.000		16.013.550	DPMP2AP2KB	DAU
208.17	Program Pelayanan kontrasepsi	Terlayannya masyarakat Kota Magelang dalam ber KB	100%	63.077.000		66.230.850		
		Cakupan peserta KB aktif	77,50%		78,00%			
1	Pelayanan konseling KB	Terlaksananya kegiatan konseling KB	209 orang	18.450.000		19.372.500	DPMP2AP2KB	DAU
2	Pelayanan pemasangan alat kontrasepsi KB	Terlayannya pemasangan alat kontrasepsi	240 orang	17.235.000		18.096.750	DPMP2AP2KB	DAU
4	Pelayanan KB medis operasi	Terlayannya calon akseptor MO	25 orang	27.392.000		28.761.600	DPMP2AP2KB	DAU
404.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terseleenggaranya Bulan Bhakti Gotong Royong di kelurahan se Kota Magelang	100%	78.945.000		82.892.250		
		Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100			
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terlaksannya lomba BBGRM di Kelurahan	17 Kelurahan	78.945.000		82.892.250	DPMP2AP2KB	DAU
202.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	100%	182.669.000		191.802.450		
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	17%		20%			
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	20%		23%			
		Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,00%		78,50%			
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan	1 kegiatan	84.000.000		88.200.000	DPMP2AP2KB	DAU
7	Pelatihan penganggaran pembangunan responsif gender	Terlaksananya pelatihan penganggaran yang responsif gender	50 orang	32.669.000		34.302.450	DPMP2AP2KB	DAU
8	Peningkatan peran serta ibu dan anak dalam pembangunan	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	200 orang	66.000.000		69.300.000	DPMP2AP2KB	DAU
208.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Terciptanya peran masyarakat dalam pelayanan KB/KR	100%	124.585.000		130.814.250		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	64%		66%			
1	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program KB	212 orang	78.385.000		82.304.250	DPMP2AP2KB	DAU
2	Koordinasi pengelolaan program	Terlaksananya pertemuan koordinasi tk. Kota, Kecamatan dan Kelurahan	5 pertemuan	26.000.000		27.300.000	DPMP2AP2KB	DAU
4	Pengelolaan data dan informasi Program KB	Terlaksananya pendataan Keluarga Sejahtera	17 kelurahan	20.200.000		21.210.000	DPMP2AP2KB	DAU
207.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Meningkatnya peran perempuan di Kota Magelang	100%	464.500.000		487.725.000		
		PKK Aktif	100%		100%			
1	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Terlaksananya pelatihan ketrampilan untuk masyarakat	50 orang	19.525.000		20.501.250		
2	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Terlaksananya kegiatan-kegiatan organisasi wanita	2 kegiatan	141.515.000		148.590.750		
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terfasilitasinya kegiatan organisasi perempuan (PKK)	1 organisasi	303.460.000		318.633.000		
102.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya kemampuan kader kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	100%	15.000.000		15.750.000		
		Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%		97%			
14	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	Terlaksananya pelatihan Kader posyandu	60 Orang	15.000.000		15.750.000	DPMP2AP2KB	DAU
102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya gizi siswa sekolah	100%	261.068.000		274.121.400		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100		100			
		cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100		100			
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31		<0.31			
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah siswa yang memperoleh PMT dan peningkatan absensi kehadiran siswa di sekolah	1000 Anak	261.068.000		274.121.400	DPMP2AP2KB	DAU
208.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kegiatan PIK KRR	100%	13.800.000		14.490.000		
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	3%		3%			
1	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	Terlaksananya kegiatan PIK KRR	40 orang	6.900.000		7.245.000	DPMP2AP2KB	DAU
2	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Terlaksananya kegiatan PIK KRR	40 orang	6.900.000		7.245.000	DPMP2AP2KB	DAU
208.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Meningkatnya Ketahanan Keluarga melalui kelompok tribina	100%	54.696.000		57.430.800		
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi	5%		4%			
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%)	77%		78%			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)	88%		88%			
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	100%		100%			
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100%		100%			
		Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30%		30%			
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100%		100%			
		Partisipasi laki-laki dalam ber-KB	10%		11%			
		Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri	57%		60%			
		Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out)	13%		12%			
		Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun	3%		3%			
		Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	88%		90%			
		Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR)	95%		95%			
		Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif	100%		100%			
		Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif	100%		100%			
		Prosentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun	3%		3%			
		Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun	2%		1%			
		Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro	100%		100%			
		Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga	100%		100%			
		Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan	100%		100%			
		Persentase Peningkatan jumlah keluarga sejahtera	87%		89%			
		Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	20%		35%			
2	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan	Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader dalam kelompok kegiatan	70 Kelurahan	11.696.000		12.280.800	DPMP2AP2KB	DAU
3	Advokasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kelurahan	Terlaksananya pendampingan advokasi bagi kelompok Bina Keluarga	2 keg	43.000.000		45.150.000	DPMP2AP2KB	DAU
		JUMLAH		3.369.890.000		3.538.384.500		

Matriks
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang : Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
207.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	637.865.000	100%	669.758.250		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya distribusi surat menyurat	1 tahun	1.425.000	1 tahun	1.496.250	DPMP2AP2KB	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	98.850.000	12 bulan	103.792.500	DPMP2AP2KB	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbaharuinya STNK Kendaraan Dinas	40 unit	17.275.000	40 unit	18.138.750	DPMP2AP2KB	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang	12 bulan	83.595.000	12 bulan	87.774.750	DPMP2AP2KB	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor dan keamanan kantor	12 bulan	44.164.000	12 bulan	46.372.200	DPMP2AP2KB	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	16.000.000	12 bulan	16.800.000	DPMP2AP2KB	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	13.541.000	12 bulan	14.218.050	DPMP2AP2KB	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	14 jenis	14.955.000	14 jenis	15.702.750	DPMP2AP2KB	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	3.600.000	12 bulan	3.780.000	DPMP2AP2KB	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Pengisian tabung gas	20 tbg	3.740.000	20 tbg	3.927.000	DPMP2AP2KB	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian dan tamu	12 bulan	26.866.000	12 bulan	28.209.300	DPMP2AP2KB	DAU
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	226.094.000	12 bulan	237.398.700	DPMP2AP2KB	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya tenaga penjaga malam	12 bulan	80.760.000	12 bulan	84.798.000	DPMP2AP2KB	DAU
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terwujudnya pengelolaan kepegawaian	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.350.000	DPMP2AP2KB	DAU
207.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	303.236.000	100%	318.397.800	DPMP2AP2KB	DAU
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 unit	90.000.000	1 unit	94.500.000	DPMP2AP2KB	DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	40 unit	159.306.000	40 unit	167.271.300	DPMP2AP2KB	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya service peralatan kantor	69 unit	48.880.000	69 unit	51.324.000	DPMP2AP2KB	DAU
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor	79 buah	5.050.000	79 buah	5.302.500	DPMP2AP2KB	DAU
207.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD	Terciptanya peningkatan kapasitas aparatur	100%	5.600.000	100%	5.880.000		
	Penilaian angka kredit aparatur	pejabat fungsional penyuluh KB	15 orang	5.600.000	15 orang	5.880.000		
207.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terciptanya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	66.051.000	100%	69.353.550		
1	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	4 Kegiatan	7.580.000	4 Kegiatan	7.959.000	DPMP2AP2KB	DAU
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan realisasi anggaran	1 Laporan	3.420.000	1 Laporan	3.591.000	DPMP2AP2KB	DAU
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan	1 Kegiatan	7.444.000	1 Kegiatan	7.816.200	DPMP2AP2KB	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN		TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR		TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
6	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan		2 kegiatan	8.953.000	2 kegiatan	9.400.650	DPMP2AP2KB	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	Terciptanya sistem penyusunan RKA- SKPD yang accountable dan responsible		2 Kegiatan	9.517.000	2 Kegiatan	9.992.850	DPMP2AP2KB	DAU
10	Penyusunan Renstra SKPD	Terlaksananya penyusunan Renstra DPMP2AP2KB Kota Magelang		2 kegiatan	11.567.000	2 kegiatan	12.145.350	DPMP2AP2KB	DAU
24	Penyusunan Laporan sinkronisasi aset dan keuangan SKPD	Terdatanya aset BPMPKB yang valid		3 buku	12.600.000	3 buku	13.230.000	DPMP2AP2KB	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)	Terlaksananya penyusunan laporan LKJIP BPMPKB		1 Kegiatan	4.970.000	1 Kegiatan	5.218.500	DPMP2AP2KB	DAU
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terwujudnya keberdayaan masyarakat		100%	188.797.000	100%	198.236.850		
		1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat		10		11			
		2. LPM berprestasi							
		Tingkat kota		41%		47%			
		Tingkat provinsi		peringkat 1		peringkat 1			
		Tingkat nasional		peringkat 1		peringkat 1			
		3. Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang		24%		35%			
		4. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		143		143			
1	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat Pedesaan	LPM dalam program pembangunan kelurahan		2 keg	70.957.000	2 keg	74.504.850	DPMP2AP2KB	DAU
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terselenggaranya pelatihan bagi masyarakat untuk menjadi kader PM		34 Orang	24.347.000	34 Orang	25.564.350	DPMP2AP2KB	DAU
3	Penyelenggaraan diseminasi Informasi bagi masyarakat desa	Tersedianya data profil		21 buku	40.000.000	21 buku	42.000.000	DPMP2AP2KB	DAU
6	Penyelenggaraan pelatihan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	Penyelenggaraan pelatihan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)		70 Orang	53.493.000	70 Orang	56.167.650	DPMP2AP2KB	DAU
208.15	Program Keluarga Berencana	Terwujudnya pelayanan KB bagi masyarakat di Kota Magelang		100%	46.772.000	100%	49.110.600		
		1. Rata-rata jumlah anak per keluarga		2		2			
1	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Keluarga miskin yang diberi pelayanan KB		250 orang	8.500.000	250 orang	8.925.000	DPMP2AP2KB	DAU
2	Pelayanan KIE	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi program KB		1 kegiatan	14.447.000	1 kegiatan	15.169.350	DPMP2AP2KB	DAU
3	Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu	Terlaksananya pemeriksaan Pupsmeas		75 orang	15.825.000	75 orang	16.616.250	DPMP2AP2KB	DAU
5	Pembinaan keluarga berencana	Terselenggaranya kegiatan Harganas		185 orang	8.000.000	185 orang	8.400.000	DPMP2AP2KB	DAU
207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Terwujudnya pengembangan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat		100%	28.662.000	100%	30.095.100		
		Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat		29%		35%			
		Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)		4		4			
2	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Terlaksananya pendampingan LKK		17 Kelompok	28.662.000	17 Kelompok	30.095.100	DPMP2AP2KB	DAU
106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terfasilitasinya kegiatan Lansia di Kota Magelang		100%	78.885.000	100%	82.829.250		
		Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos		100%		100%			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	20,00%		30,00%			
14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	Terlaksananya pembinaan keluarga lanjut usia	500 Orang	43.885.000	500 Orang	46.079.250	DPMP2AP2KB	DAU
23	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan	meningkatnya peran serta masyarakat lansia dalam pembangunan	100%	35.000.000	100%	36.750.000	DPMP2AP2KB	DAU
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Tercapainya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	100%	424.268.000	100%	445.481.400		
		Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	45%		47%			
2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Terfasilitasinya P2T2A Kota Magelang	5 kegiatan	174.708.000	5 kegiatan	183.443.400	DPMP2AP2KB	DAU
5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Tercapai penguatan kelembagaan menuju kota layak anak	500 Anak	75.000.000	500 Anak	78.750.000	DPMP2AP2KB	DAU
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya hak dan perlindungan anak	300 Orang	88.810.000	300 Orang	93.250.500	DPMP2AP2KB	DAU
7	Evaluasi pelaksanaan PUG	Meningkatnya Kinerja PUG di Kota Magelang	20 anak	68.000.000	20 anak	71.400.000	DPMP2AP2KB	DAU
19	Penyusunan Peraturan Walikota tentang PUG, Penanganan KDRT dan Trafficking	P2TP2A Kota Magelang	150 orang	17.750.000	150 orang	18.637.500	DPMP2AP2KB	DAU
208.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya kualitas informasi KRR bagi siswa di Kota Magelang	100%	11.018.000	100%	11.568.900		
		Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	2%		2%			
1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Meningkatnya kualitas informasi KRR bagi siswa SLTA	80 orang	11.018.000	80 orang	11.568.900	DPMP2AP2KB	DAU
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	228.105.000	100%	239.510.250		
		Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	87,50%		100,00%			
1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terlaksananya temu kader BPMPKB	1 Kegiatan	30.085.000	1 Kegiatan	31.589.250	DPMP2AP2KB	DAU
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	3 Kegiatan	32.950.000	3 Kegiatan	34.597.500	DPMP2AP2KB	DAU
6	Pelatihan dan pembentukan kelompok BKB dan BKR	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat	70 Kelurahan	25.500.000	70 Kelurahan	26.775.000	DPMP2AP2KB	DAU
13	Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Terlaksananya kegiatan TMMD	2 Kel	139.570.000	2 Kel	146.548.500	DPMP2AP2KB	DAU
202.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan	100%	92.291.000	100%	96.905.550		
		Rasio KDRT	0,06%		0,05%			
		Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	23		20			
		Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%		100%			
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%		100%			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KIP/A dan PPT / PKT di RS	100%		100%			
		Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%		100%			
		Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%		100%			
		Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%		100%			
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%		100%			
		Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	3%		4%			
1	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Terlaksannya TOT bagi anggota kaukus perempuan politik	300 Orang	77.040.000	300 Orang	80.892.000	DPMP2AP2KB	DAU
10	Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga	Terseleenggaranya sosialisasi perlindungan tindak KDRT	100 Orang	15.251.000	100 Orang	16.013.550	DPMP2AP2KB	DAU
208.17	Program Pelayanan kontrasepsi	Terlayannya masyarakat Kota Magelang dalam ber KB	100%	63.077.000	100%	66.230.850		
		Cakupan peserta KB aktif	77,50%		78,00%			
1	Pelayanan konseling KB	Terlaksananya kegiatan konseling KB	209 orang	18.450.000	209 orang	19.372.500	DPMP2AP2KB	DAU
2	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terlayannya pemasangan alat kontrasepsi	240 orang	17.235.000	240 orang	18.096.750	DPMP2AP2KB	DAU
4	Pelayanan KB medis operasi	Terlayannya calon akseptor MO	25 orang	27.392.000	25 orang	28.761.600	DPMP2AP2KB	DAU
404.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terseleenggaranya Bulan Bhakti Gotong Royong di kelurahan se Kota Magelang	100%	78.945.000	100%	82.892.250		
		Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100			
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terlaksannya lomba BBGRM di Kelurahan	17 Kelurahan	78.945.000	17 Kelurahan	82.892.250	DPMP2AP2KB	DAU
202.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	100%	182.669.000	100%	191.802.450		
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	17%		20%			
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	20%		23%			
		Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,00%		78,50%			
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan	1 kegiatan	84.000.000	1 kegiatan	88.200.000	DPMP2AP2KB	DAU
7	Pelatihan penganggaran pembangunan responsif gender	Terlaksananya pelatihan penganggaran yang responsif gender	50 orang	32.669.000	50 orang	34.302.450	DPMP2AP2KB	DAU
8	Peningkatan peran serta ibu dan anak dalam pembangunan	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	200 orang	66.000.000	200 orang	69.300.000	DPMP2AP2KB	DAU
208.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Terciptanya peran masyarakat dalam pelayanan KB/KR	100%	124.585.000	100%	130.814.250		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	64%		66%			
1	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program KB	212 orang	78.385.000	212 orang	82.304.250	DPMP2AP2KB	DAU
2	Koordinasi pengelolaan program	Terlaksananya pertemuan koordinasi tk. Kota, Kecamatan dan Kelurahan	5 pertemuan	26.000.000	5 pertemuan	27.300.000	DPMP2AP2KB	DAU
4	Pengelolaan data dan informasi Program KB	Terlaksananya pendataan Keluarga Sejahtera	17 kelurahan	20.200.000	17 kelurahan	21.210.000	DPMP2AP2KB	DAU
207.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Meningkatnya peran perempuan di Kota Magelang	100%	464.500.000		487.725.000		
		PKK Aktif	100%		100%			
1	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Terlaksananya pelatihan ketrampilan untuk masyarakat	50 orang	19.525.000	50 orang	20.501.250		
2	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Terlaksananya kegiatan-kegiatan organisasi wanita	2 kegiatan	141.515.000	2 kegiatan	148.590.750		
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terfasilitasinya kegiatan organisasi perempuan (PKK)	1 organisasi	303.460.000	1 organisasi	318.633.000		
102.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya kemampuan kader kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	100%	15.000.000	100%	15.750.000		
		Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%		97%			
14	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	Terlaksananya pelatihan Kader posyandu	60 Orang	15.000.000	60 Orang	15.750.000	DPMP2AP2KB	DAU
102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya gizi siswa sekolah	100%	261.068.000	100%	274.121.400		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100		100			
		cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100		100			
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31		<0.31			
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah siswa yang memperoleh PMT dan peningkatan absensi kehadiran siswa di sekolah	1000 Anak	261.068.000	1000 Anak	274.121.400	DPMP2AP2KB	DAU
208.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kegiatan PIK KRR	100%	13.800.000	100%	14.490.000		
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	3%		3%			
1	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	Terlaksananya kegiatan PIK KRR	40 orang	6.900.000	40 orang	7.245.000	DPMP2AP2KB	DAU
2	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Terlaksananya kegiatan PIK KRR	40 orang	6.900.000	40 orang	7.245.000	DPMP2AP2KB	DAU
208.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Meningkatnya Ketahanan Keluarga melalui kelompok tribina	100%	54.696.000	100%	57.430.800		
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi	5%		4%			
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%)	77%		78%			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)	88%		88%			
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	100%		100%			
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100%		100%			
		Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30%		30%			
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100%		100%			
		Partisipasi laki-laki dalam ber-KB	10%		11%			
		Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri	57%		60%			
		Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out)	13%		12%			
		Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun	3%		3%			
		Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	88%		90%			
		Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR)	95%		95%			
		Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif	100%		100%			
		Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif	100%		100%			
		Prosentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun	3%		3%			
		Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun	2%		1%			
		Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro	100%		100%			
		Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga	100%		100%			
		Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan	100%		100%			
		Persentase Peningkatan jumlah keluarga sejahtera	87%		89%			
		Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	20%		35%			
2	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan	Tertindaknya peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader dalam kelompok kegiatan	70 Kelurahan	11.696.000	70 Kelurahan	12.280.800	DPMP2AP2KB	DAU
3	Advokasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kelurahan	Tertindaknya pendampingan advokasi bagi kelompok Bina Keluarga	2 keg	43.000.000	2 keg	45.150.000	DPMP2AP2KB	DAU
		JUMLAH		3.369.890.000		3.538.384.500		

Matriks
 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 Bidang : Perhubungan
 OPD : Dinas Perhubungan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	877.398.000	1 tahun	921.267.900		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya kegiatan surat menyurat pada Dishubkominfo	100 Jenis	1.765.000	100 Jenis	1.853.250	Dishub	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Langganan telepon, air, listrik, sewa bandwidth dan internet	12 Jenis	78.660.000	12 Jenis	82.593.000	Dishub	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK Kendaraan Dinas	27 Unit	9.940.000	27 Unit	10.437.000	Dishub	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan laporan administrasi keuangan	12 Bulan	146.652.000	12 Bulan	153.984.600	Dishub	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan ruangan dan lingkungan gedung Dishubkominfo	15 Jenis	273.558.000	15 Jenis	287.235.900	Dishub	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	1 Jenis	24.000.000	1 Jenis	25.200.000	Dishub	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	1 Jenis	15.806.000	1 Jenis	16.596.300	Dishub	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya ketersediaan komponen/alat listrik untuk penerangan kantor	1 Jenis	15.962.000	1 Jenis	16.760.100	Dishub	DAU
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	6.400.000	3 Jenis	6.720.000	Dishub	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan informasi bagi aparat Dishubkominfo	9 Jenis	5.760.000	9 Jenis	6.048.000	Dishub	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Meningkatnya kelancaran aktifitas kerja	1 tahun	1.800.000	1 tahun	1.890.000	Dishub	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya kinerja pegawai	1 Bulan	49.813.000	1 Bulan	52.303.650	Dishub	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama	1 tahun	142.284.000	1 tahun	149.398.200	Dishub	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terbayarnya jasa tenaga kontrak yang ada di Dishubkominfo	6 Orang	96.552.000	6 Orang	101.379.600	Dishub	DAU
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tersusun dan terkelolanya dokumen administrasi kepegawaian	100 dokumen	8.446.000	100 dokumen	8.868.300	Dishub	DAU
209.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	689.251.000	1 tahun	723.713.550		
3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pos jaga	2 unit	50.750.000	2 unit	53.287.500	Dishub	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan komputer	2 jenis	4.000.000	2 jenis	4.200.000	Dishub	DAU
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	2 Unit	57.050.000	2 Unit	59.902.500	Dishub	DAU
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan kebersihan gedung dan lingkungan Dishubkominfo	3 Jenis	83.662.000	3 Jenis	87.845.100	Dishub	DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kelancaran dan mobilitas kerja aparat	26 Unit	193.449.000	26 Unit	203.121.450	Dishub	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan kantor	5 Jenis	10.180.000	5 Jenis	10.689.000	Dishub	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan kantor	1 Jenis	21.275.000	1 Jenis	22.338.750	Dishub	DAU
30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	Terpeliharanya alat berat yang digunakan untuk operasional dan menguji KBWU	7 Unit	112.535.000	7 Unit	118.161.750	Dishub	DAU
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kenyamanan dan kelancaran tugas	9 Jenis	156.350.000	9 Jenis	164.167.500	Dishub	DAU
209.03	Program peningkatan disiplin aparat	Peningkatan kedisiplinan aparat	73 stel	34.320.000	73 stel	36.036.000		DAU
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya kinerja dan performance	73 stel	34.320.000	73 stel	36.036.000	Dishub	DAU
209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Capaian Kinerja	1 tahun	75.970.000	1 tahun	79.768.500		DAU
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusun dan tersedianya data Rencana kerja RKA/DPA, LAKIP, Renstra Dishubkominfo	12 Bendel	24.981.000	12 Bendel	26.230.050	Dishub	DAU
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Rencana Kerja 1 (satu) SKPD	2 dokumen	14.250.000	2 dokumen	14.962.500	Dishub	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	Tersusunya RKA/RKPA	2 Dokumen	18.079.000	2 Dokumen	18.982.950	Dishub	DAU
10	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen renstra	1 Dokumen	10.810.000	1 Dokumen	11.350.500	Dishub	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	tersusunnya laporan akuntabilitas instansi pemerintah	1 Dokumen	7.850.000	1 Dokumen	8.242.500	Dishub	DAU
209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1 tahun	524.276.000	1 tahun	550.489.800		
		Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	40%		50%			
		Jumlah Sub terminal (TERMINAL Tipe C) yang tertata	1		2			
		Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik	55%		66%			
		Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum	86		90			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)	17		18			
7	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Tercapainya target hasil pengelolaan dan retribusi jasa pelayanan terminal Tidar	3 Jenis	9.526.000	3 Jenis	10.002.300	Kota Magelang	DAU
2	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Rekomendasi Analisa Dampak lalu lintas	2 raperwal	29.896.000	2 raperwal	31.390.800	Kota Magelang	DAU
9	Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas	Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman dan bebas polusi	15 Kegiatan	232.460.000	15 Kegiatan	244.083.000	Kota Magelang	DAU
11	Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan	Rapat koordinasi di bidang Perhubungan	1 kegiatan	25.460.000	1 kegiatan	26.733.000	Kota Magelang	DAU
12	Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ	Kegiatan operasional WTN	1 kegiatan	49.350.000	1 kegiatan	51.817.500	Kota Magelang	DAU
13	Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman dan bebas polusi	4 kegiatan	29.325.000	4 kegiatan	30.791.250	Kota Magelang	DAU
14	Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal	Rekomendasi penendalian persimpangan	1 dokumen	20.600.000	1 dokumen	21.630.000	Kota Magelang	DAU
15	Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas	Kegiatan ANDALALIN	10 Laporan	97.079.000	10 Laporan	101.932.950	Kota Magelang	DAU
16	Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan	Publikasi pembangunan di bidang Perhubungan	1 kegiatan	30.580.000	1 kegiatan	32.109.000	Kota Magelang	DAU
209.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terpeliharanya sarana prasarana dan fasilitas di bidang perhubungan	1 tahun	166.300.000	1 tahun	174.615.000		
		Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	7		7			
	Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ	Terpeliharanya sarana prasarana dan fasilitas LLAJ di Kota Magelang	7 Jenis	166.300.000	7 Jenis	174.615.000	Kota Magelang	DAU
209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Terlaksananya pelayanan angkutan	1 tahun	447.689.000	1 tahun	470.073.450		
		Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.900.000		2.900.000			
		Rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk	5%		5%			
3	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Terbinanya Pengusaha/Pengemudi Angkutan Umum bermotor dan tidak bermotor	270 Peserta	27.953.000	270 Peserta	29.350.650	Kota Magelang	DAU
5	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas	15 Lokasi	105.070.000	15 Lokasi	110.323.500	Kota Magelang	DAU
6	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Meningkatnya kenyamanan dan keamanan LL pada waktu hari raya Idul Fitri / Lebaran dan Perayaan Natal	3 Kegiatan	71.834.000	3 Kegiatan	75.425.700	Kota Magelang	DAU
11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Tersusunnya Laporan Load factor Angkutan Kota	1 Dokumen	15.442.000	1 Dokumen	16.214.100	Kota Magelang	DAU
12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Tersedianya Angkutan Mudik Lebaran Gratis dan Angkutan Paskibraka	2 Jenis	108.880.000	2 Jenis	114.324.000	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Meningkatkan ketertiban administrasi perijinan bagi kendaraan angkutan umum	65 Surat	32.362.000	65 Surat	33.980.100	Kota Magelang	DAU
15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Seleksi Awak Angkutan Umum Teladan	60 Orang	21.546.000	60 Orang	22.623.300	Kota Magelang	DAU
18	Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Peningkatan kesadaran dan ketrampilan keselamatan berlalu lintas	360 orang	64.602.000	360 orang	67.832.100	Kota Magelang	DAU
209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terbangunnya sarana prasarana di bidang perhubungan	1 tahun	702.467.000	1 tahun	737.590.350		
		Jumlah pelayanan umum		1		1		
2	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Terbangunnya Halte	2 unit	91.050.000	2 unit	95.602.500	Kota Magelang	DAU
4	Pengadaan Papan Nama Jalan	Tersedianya Papan Nama Jalan	40 buah	31.085.000	40 buah	32.639.250	Kota Magelang	DAU
6	Perencanaan dan Pembangunan di Bidang Perparkiran	Ketertiban dan kenyamanan parkir di Rumija	3 km	121.630.000	3 km	127.711.500	Kota Magelang	DAU
7	Pembinaan dan pengawasan di bidang parkir	Pembinaan petugas parkir dan pengawasan pengendalian parkir	39 Kegiatan	63.212.000	39 Kegiatan	66.372.600	Kota Magelang	DAU
8	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan	Rapat koordinaasi dan laporan	12 laporan	395.490.000	12 laporan	415.264.500	Kota Magelang	DAU
209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Terpenuhinya fasilitas untuk peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1 tahun	2.424.900.000	1 tahun	2.546.145.000		
		Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum	7,78		8			
		Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	45%		60%			
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Meningkatnya ketersediaan prasarana lalu lintas berupa rambu-rambu standart Dephub	3 Buah	41.075.000	3 Buah	43.128.750	Kota Magelang	DAU
2	Pengadaan marka jalan	Meningkatnya ketersediaan prasarana lalu lintas berupa marka jalan standar Dephub	700 Buah	156.248.000	700 Buah	164.060.400	Kota Magelang	DAU
4	Pengadaan lampu flashing/kedip	Meningkatnya ketersediaan fasilitas lalu lintas berupa flashing light	2 Buah	181.931.000	2 Buah	191.027.550	Kota Magelang	DAU
5	Pengadaan Traffic Light	Meningkatnya ketersediaan traficlight standar	1 Buah	1.410.650.000	1 Buah	1.481.182.500	Kota Magelang	DAU
7	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan	Meningkatnya ketersediaan prasarana lalu lintas berupa (rambu delinator kedip, cermin cembung, pita kejut)	10 buah	194.435.000	10 buah	204.156.750	Kota Magelang	DAU
8	Pembangunan ATCS	Jumlah CCTV berbasis ATCS	3 unit	91.050.000	3 unit	95.602.500	Kota Magelang	DAU
9	Pengadaan VMS KOTA MAGELANG	Terpasangya VMS Kota Magelang	1 Buah	275.000.000	1 Buah	288.750.000	Kota Magelang	DAU
10	Penertiban Kawasan Tertib Lalu Lintas	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas di KTL	5 lokasi	57.980.000	5 lokasi	60.879.000	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Survey Volume Lalu Lintas Ruas jalan	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada ruas jalan	1 kegiatan	16.531.000	1 kegiatan	17.357.550	Kota Magelang	DAU
401.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Peraturan di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	1 tahun	29.896.000	1 tahun	31.390.800		
		Jumlah review PERDA/PERWAL	1		1			
		Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	0		0			
		Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	0		1			
59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Perwal manajemen rekayasa lalu lintas dan forum LLAJ, penyelenggaraan fasilitas parkir	2 perwal	29.896.000	2 perwal	31.390.800	Kota Magelang	DAU
209.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Terlaksananya peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1 tahun	178.055.000	1 tahun	186.957.750		
		Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan	7.936		7.986			
		Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian	4		4			
4	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang laik jalan	4000 %	168.313.000	4000 %	176.728.650	Kota Magelang	DAU
5	Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus	Pembinaan di bengkel dan karoseri	5 Kegiatan	9.742.000	5 Kegiatan	10.229.100	Kota Magelang	DAU
		JUMLAH		6.150.522.000		6.458.048.100		

Matriks
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang : Komunikasi dan Informatika
OPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitika

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1.235.173.000	1 tahun	1.296.931.650		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya kegiatan surat menyurat pada Dishubkominfo	100 Jenis	1.760.000	100 Jenis	1.848.000	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Langganan telepon, air, listrik, sewa bandwidth dan internet	12 Jenis	918.000.000	12 Jenis	963.900.000	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK Kendaraan Dinas	27 Unit	3.330.000	27 Unit	3.496.500	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pengelolaan Keuangan SKPD	12 laporan keuangan	114.159.000	12 laporan keuangan	119.866.950	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan ruangan dan lingkungan gedung Dishubkominfo	15 Jenis	40.684.000	15 Jenis	42.718.200	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	1 Jenis	7.902.000	1 Jenis	8.297.100	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya ketersediaan komponen/alat listrik untuk penerangan kantor	1 Jenis	10.438.000	1 Jenis	10.959.900	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	9.950.000	3 Jenis	10.447.500	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan informasi bagi aparat Dishubkominfo	9 Jenis	8.472.000	9 Jenis	8.895.600	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Meningkatnya kelancaran aktifitas kerja	1 tahun	1.800.000	1 tahun	1.890.000	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya kinerja pegawai	1 Bulan	15.582.000	1 Bulan	16.361.100	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama	1 tahun	62.466.000	1 tahun	65.589.300	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terbayarnya jasa tenaga kontrak yang ada di Dishubkominfo	6 Orang	32.184.000	6 Orang	33.793.200	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Dokumen Kepegawaian	1 dokumen	8.446.000	1 dokumen	8.868.300	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU
210.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	308.861.000	1 tahun	324.304.050		
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya kelancaran aktivitas kerja dengan adanya komunikasi yang memadai	9 Jenis	1.000.000	9 Jenis	1.050.000	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kelancaran dan mobilitas kerja aparat	26 Unit	51.396.000	26 Unit	53.965.800	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan kantor	5 Jenis	4.245.000	5 Jenis	4.457.250	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan kantor	1 Jenis	252.220.000	1 Jenis	264.831.000	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU
210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			75.970.000		79.768.500		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan realisasi fisik dan keuangan	12 Laporan	24.981.000	12 Laporan	26.230.050	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen Renja	2 dokumen	14.250.000	2 dokumen	14.962.500	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen RKA/RKPA	2 dokumen	18.079.000	2 dokumen	18.982.950	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU
10	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra	1 dokumen	10.810.000	1 dokumen	11.350.500	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	Dokumen Laporan LKjIP	1 dokumen	7.850.000	1 dokumen	8.242.500	Dinas komunikasi, informasi dan statistika	DAU
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terlaksananya pengembangan bidang Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1 tahun	1.136.156.000	1 tahun	1.192.963.800		
		Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah:						
		a. Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			
		b. Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			
		Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			
		Jumlah KIM	17		17			
		Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6		7			
		Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-		1			
		Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi						
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	14 Kelompok	186.081.000	14 Kelompok	195.385.050	Kota Magelang	DAU
6	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Terkelolanya sistem informasi publik di Kota Magelang	4 Kegiatan	75.351.000	4 Kegiatan	79.118.550	Kota Magelang	DAU
8	Siaran Radio	Terpublikasinya Kegiatan Pembangunan dan Informasi tentang Kota Magelang melalui Radio Magelang FM	12 Bulan	381.540.000	12 Bulan	400.617.000	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Penerbitan majalah	Terwujudnya majalah dinamika sebagai tambahan informasi baik bagi aparaturnya maupun masyarakat	4 Edisi	95.260.000	4 Edisi	100.023.000	Kota Magelang	DAU
19	Pengelolaan Website	Update Website Kota Magelang	12 bulan	66.836.000	12 bulan	70.177.800	Kota Magelang	DAU
21	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika	pembinaan penyelenggaraan jasa di bidang komunikasi dan informatika	3 kegiatan	51.680.000	3 kegiatan	54.264.000	Kota Magelang	DAU
22	Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika	terpublikasinya kegiatan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1 kegiatan	36.860.000	1 kegiatan	38.703.000	Kota Magelang	DAU
23	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran	Terpantaunya 8 Lembaga Penyiaran di Kota Magelang	6 Lembaga	79.943.000	6 Lembaga	83.940.150	Kota Magelang	DAU
24	Penyelenggaraan Dialog Interaktif	Tertibnya penyelenggaraan jasa di bidang komunikasi dan informatika	6 Kegiatan	162.605.000	6 Kegiatan	170.735.250	Kota Magelang	DAU
214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			263.114.000		276.269.700		
		Meningkatnya ormas yang memiliki SKT		27,79%		35,19%		
		Persentase pemenuhan data statistik		90%		95%		
14	Penyusunan buku data strategis kota Magelang (DSKM)	Tersedianya buku DSKM	100 buku	136.514.000	100 buku	143.339.700	Kota Magelang	
15	Penyusunan Buku Analisis Perkembangan Laju Inflasi Kota Magelang	Jumlah buku Analisis Inflasi Kota Magelang	100 buku	49.100.000	100 buku	51.555.000	Kota Magelang	
16	Penyusunan Buku Analisis Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang	Jumlah buku AIME Kota Magelang	100 buku	77.500.000	100 buku	81.375.000	Kota Magelang	
215.15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi			132.901.000		139.546.050		
1	Pengelolaan Jaringan Persandian dan Telekomunikasi	Pengelolaan komunikasi persandian	12 bulan	111.031.000	12 bulan	116.582.550	Kota Magelang	DAU
2	Penyusun Norma Kebijakan dan Standar di Bidang Persandian	SOP Persandian	1 tahun	21.870.000	1 tahun	22.963.500	Kota Magelang	DAU
210.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Terlaksananya pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	1 tahun	480.372.000	1 tahun	504.390.600		
		Jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi		1		1		
1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Terselenggaranya kajian dan penelitian terhadap pembangunan menera telekomunikasi di Kota Magelang	12 Kegiatan	84.882.000	12 Kegiatan	89.126.100	Kota Magelang	DAU
2	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Komunikasi dan Informasi	Rapat koordinasi dan laporan	12 laporan	395.490.000	12 laporan	415.264.500	Kota Magelang	DAU
210.18	Program Kerjasama Informasi dengan mas media / Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terlaksananya kerjasama informasi dengan mas media	1 tahun	162.780.000	1 tahun	170.919.000		
		Ketersediaan SOP persandian	Ada		Ada			
		Tingkat kapasitas SDM persandian		1		2		
		Jumlah SKPD yang menerapkan SOP persandian		14		21		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ketersediaan SOP persandian	50%		100%			
		Tingkat kapasitas SDM persandian	100%		100%			
		Persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian	60%		90%			
6	Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa	Terlaksananya Publikasi melalui media tradisional	6 Kegiatan	138.520.000	6 Kegiatan	145.446.000	Kota Magelang	DAU
8	Publikasi Kegiatan Bela Negara	Peranserta Pegawai dan masyarakat Kota Magelang	1 kegiatan	24.260.000	1 kegiatan	25.473.000	Kota Magelang	DAU
210.23	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Bidang Teknologi Informatika	Terlaksananya pengembangan bidang Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1 tahun	2.146.010.000	1 tahun	2.253.310.500		
		Interoperabilitas antar system informasi	0		2			
		Cakupan WAN (Wide Area Network) kota (Dishubkominfo)	30%		50%			
		Cakupan data yang terpusat dan terkendali	60%		70%			
		Persentase PD yang menerapkan e-government	100%		100%			
2	Pembangunan WAN Kota	tersedianya jaringan WAN Kota	15 ttk lokasi	1.929.577.000	15 ttk lokasi	2.026.055.850	Kota Magelang	DAU
1	Penyusunan Kamus Data dan E-GIF (E-Government Interoperability Framework)	Jumlah Kamus data dan e-GIF	1 kegiatan	216.433.000	1 kegiatan	227.254.650	Kota Magelang	DAU
210.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan tehnologi informasi	1 tahun	296.583.000	1 tahun	311.412.150		
		Implementasi SIPID (Sistim Invormasi Potensi Investasi Daerah)	0		0			
		Implementasi pemanfaatan SPIPISE	70%		75%			
	Pelayanan Operasional LPSE	Terlaksananya kegiatan LPSE	70 kegiatan	296.583.000	70 kegiatan	311.412.150	Kota Magelang	DAU
		JUMLAH		6.237.920.000		6.549.816.000		

Matriks
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang : Penanaman Modal
OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	691.160.000	100%	725.718.000		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	36 Buah	1.040.000	36 Buah	1.092.000	DPM dan PTSP	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya administrasi perkantoran yang berupa jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	73.200.000	12 Bulan	76.860.000	DPM dan PTSP	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pelayanan administrasi perkantoran yang berupa kelengkapan STNK	13 Unit	6.780.000	13 Unit	7.119.000	DPM dan PTSP	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan dan barang	12 orang orang per bulan	115.997.000	12 orang orang per bulan	121.796.850	DPM dan PTSP	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	46.660.000	12 Bulan	48.993.000	DPM dan PTSP	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Pelayanan administrasi perkantoran yang berupa ATK	12 bulan	26.315.000	12 bulan	27.630.750	DPM dan PTSP	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan administrasi perkantoran yang berupa barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	34.560.000	12 Bulan	36.288.000	DPM dan PTSP	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pelayanan administrasi perkantoran yang berupa alat-alat listrik	14 lampu, 50 m kabel, 55 baterai	6.845.000	14 lampu, 50 m kabel, 55 baterai	7.187.250	DPM dan PTSP	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Adanya surat kabar, majalah dan buku-buku peraturan	12 Bulan	7.760.000	12 Bulan	8.148.000	DPM dan PTSP	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Tahun	7.440.000	1 Tahun	7.812.000	DPM dan PTSP	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	37.608.000	12 Bulan	39.488.400	DPM dan PTSP	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya kegiatan konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah	98 oh	234.320.000	98 oh	246.036.000	DPM dan PTSP	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Pelayanan administrasi perkantoran yang berupa jasa tenaga kontrak dan petugas lapangan/penjaga malam	12 Bulan	92.635.000	12 Bulan	97.266.750	DPM dan PTSP	DAU
212.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	100%	330.427.000	100%	346.948.350		
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Tersediaanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	18.700.000	1 Unit	19.635.000	DPM dan PTSP	DAU
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungan	1 Tahun	59.000.000	1 Tahun	61.950.000	DPM dan PTSP	DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional terpelihara	13 Unit	209.277.000	13 Unit	219.740.850	DPM dan PTSP	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	18 Unit	7.450.000	18 Unit	7.822.500	DPM dan PTSP	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	34.500.000	1 Tahun	36.225.000	DPM dan PTSP	DAU
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya sarana mebeleur		1.500.000		1.575.000	DPM dan PTSP	DAU
212.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tercapainya peningkatan disiplin aparatur	100%	10.240.000	100%	10.752.000		
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya seragam pakaian dinas	20 Stel	10.240.000	20 Stel	10.752.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
212.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	45.524.000	100%	47.800.200		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Adanya laporan RFK dan Jaring laba laba sebagai bahan rakorpok	12 Bulan	11.397.000	12 Bulan	11.966.850	DPM dan PTSP	DAU
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan tahunan sebagai bahan evaluasi	1 Dokumen	3.407.000	1 Dokumen	3.577.350	DPM dan PTSP	DAU
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis SKPD	1 Dokumen	1.897.000	1 Dokumen	1.991.850	DPM dan PTSP	DAU
4	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan semesteran SKPD		3.417.000		3.587.850	DPM dan PTSP	DAU
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya dokumen Renja SKPD dan Renja Perubahan	2 dokumen	8.000.000	2 dokumen	8.400.000	DPM dan PTSP	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA DPA SKPD	2 Dokumen	12.497.000	2 Dokumen	13.121.850	DPM dan PTSP	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) SKPD	Tersedianya dokumen LkjiP SKPD	1 Dokumen	4.909.000	1 Dokumen	5.154.450	DPM dan PTSP	DAU
212.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		100%	799.430.000	100%	839.401.500		
		Pertumbuhan nilai investasi PMA	5%		5%			
1	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya temu usaha antara UB dan UKM	1 Kesepakatan	23.490.000	1 Kesepakatan	24.664.500	Kota Magelang	DAU
6	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Terlaksananya Forum koordinasi dibidang penanaman modal antara pemerintah daerah dan dunia usaha	1 Kegiatan	15.721.000	1 Kegiatan	16.507.050	Kota Magelang	DAU
8	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Tersediaanya Bahan Laporan LKPM	6 Laporan	74.438.000	6 Laporan	78.159.900	Kota Magelang	DAU
10	Penyelenggaraan pameran investasi	Terlaksananya kegiatan pameran investasi	8 Pameran	575.856.000	8 Pameran	604.648.800	Kota Magelang	DAU
11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Data hasil monitoring, evaluasi dan laporan perkembangan penanaman modal	16 Buku	6.600.000	16 Buku	6.930.000	Kota Magelang	DAU
12	Penyusunan profil pameran investasi	Jumlah profil investasi untuk pameran investasi	500 Set	86.750.000	500 Set	91.087.500	Kota Magelang	DAU
14	Pembuatan sarana dan prasarana promosi investasi	Jumlah media untuk promosi investasi	Running Teks dll	16.575.000	Running Teks dll	17.403.750	Kota Magelang	DAU
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			11.016.000		11.566.800		
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%		52%			
		Persentase arsip dan risalah	82%		82%			
		Persentase Penyelamatan Arsip	47%		53%			
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terpeliharanya dokumen arsip	1 tahun	11.016.000	1 tahun	11.566.800	Kota Magelang	DAU
212.17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah			155.800.000		163.590.000		
	Penyusunan profil investasi	Jumlah profil investasi	1 kegiatan	155.800.000	1 kegiatan	163.590.000	Kota Magelang	DAU
401.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksananya pelayanan perizinan dan pengaduan masyarakat	100%	402.232.000	100%	422.343.600		
		Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%		100%			
		Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	56%		60%			
	Survey Pelayanan Perijinan	Tersedianya data obyek perizinan di lapangan yang akurat	288 Kegiatan	267.357.000	288 Kegiatan	280.724.850	Kota Magelang	DAU

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan pelayanan di BP2T	4 Kegiatan	53.426.000	4 Kegiatan	56.097.300	Kota Magelang	DAU
	Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan	Terlayannya pengaduan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan dengan baik	10 Aduan	35.809.000	10 Aduan	37.599.450	Kota Magelang	DAU
	Fasilitasi dan penilaian kinerja unit pelayanan	Terpeliharanya sertifikasi ISO 9001:2008	4 Kegiatan	45.640.000	4 Kegiatan	47.922.000	Kota Magelang	DAU
401.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya legalitas pelayanan perizinan	100%	163.224.000	100%	171.385.200		
		Jumlah review PERDA/PERWAL	1		1			
		Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	0		0			
		Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	0		1			
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersusunnya Rancangan Perda	1 Raperda	163.224.000	1 Raperda	171.385.200	Kota Magelang	DAU
210.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Tercapainya peningkatan pelayanan memanfaatkan sarana teknologi informasi	100%	11.404.000	100%	11.974.200		
		Implementasi SIPID (Sistim Invormasi Potensi Investasi Daerah)	0		0			
		Implementasi pemanfaatan SPIPISE	70%		75%			
	Peningkatan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Tersedianya buku dokumentasi perizinan	5 Dokumen	11.404.000	5 Dokumen	11.974.200	Kota Magelang	DAU
		JUMLAH		2.620.457.000		2.751.479.850		

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang : Pemuda dan Olah Raga
OPD : Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			583.644.000		612.826.200		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	peranko atau bea kirim surat	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.050.000	Disporapar	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	54.600.000	1 Tahun	57.330.000	Disporapar	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor	16 unit	8.000.000	16 unit	8.400.000	Disporapar	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	126.177.000	1 Tahun	132.485.850	Disporapar	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Tahun	65.196.000	1 Tahun	68.455.800	Disporapar	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	20.663.000	1 Tahun	21.696.150	Disporapar	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	11.990.000	1 Tahun	12.589.500	Disporapar	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor	1 Tahun	6.350.000	1 Tahun	6.667.500	Disporapar	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	3.600.000	1 Tahun	3.780.000	Disporapar	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Tahun	1.620.000	1 Tahun	1.701.000	Disporapar	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	1 Tahun	30.721.000	1 Tahun	32.257.050	Disporapar	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	135.000.000	1 Tahun	141.750.000	Disporapar	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah dan penjaga malam	1 Tahun	118.727.000	1 Tahun	124.663.350	Disporapar	DAU
213.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			272.938.000		286.584.900		
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit	83.936.000	1 Unit	88.132.800	Disporapar	DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 Unit	168.662.000	12 Unit	177.095.100	Disporapar	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5 Macam	2.170.000	5 Macam	2.278.500	Disporapar	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	1 Tahun	15.120.000	1 Tahun	15.876.000	Disporapar	DAU
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur	10 1muka	3.050.000	10 1muka	3.202.500	Disporapar	DAU
213.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			64.123.000		67.329.150		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya aparatur pemerintahan yang lebih profesional, peningkatan sarana prasarana aparatur dan penguatan kelembagaan		10.344.000		10.861.200	Disporapar	DAU
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis	10 Eksemplar	2.334.000	10 Eksemplar	2.450.700	Disporapar	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan realisasi APBD di tiap akhir tahun	10 Eksemplar	3.951.000	10 Eksemplar	4.148.550	Disporapar	DAU
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya pedoman kerja selama 1 tahun	2 Bendel	14.324.000	2 Bendel	15.040.200	Disporapar	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	Tersusunnya data RKA dan RKPA	10 Eksemplar	23.353.000	10 Eksemplar	24.520.650	Disporapar	DAU
9	Penyusunan LAKIP SKPD	Tersusunnya LKJIP SKPD	10 Eksemplar	5.168.000	10 Eksemplar	5.426.400	Disporapar	DAU
25	Monitoring, evaluasi dan pelaporan permohonan hibah/ bantuan sosial	Termonitoringnya hibah/bansos yang direkomendasikan disporabudpar	50 Dokumen	4.649.000	50 Dokumen	4.881.450	Disporapar	DAU
213.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda			33.822.000		35.513.100		
		Persentase organisasi kepemudaan yang aktif		79%		82%		
2	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	Terdatanya jumlah organisasi pemuda	1 Buku	12.285.000	1 Buku	12.899.250	Kota Magelang	DAU
5	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Terselenggaranya pertemuan dalam rangka peningkatan iman dan takwa generasi muda	1 Orang	21.537.000	1 Orang	22.613.850	Kota Magelang	DAU
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			1.017.895.000		1.068.789.750		
		Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi		94,00%		95,00%		
		Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi		1		1		
		Persentase pengangguran pemuda		6,65%		6,40%		
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terfasilitasinya organisasi pemuda	28 Kelompok	154.247.000	28 Kelompok	161.959.350	Kota Magelang	DAU
3	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Meningkatnya kepedulian pemuda pada lingkungan	300 Orang	19.491.000	300 Orang	20.465.550	Kota Magelang	DAU
4	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Terfasilitasinya upacara sumpah pemuda & pengiriman	1 Kegiatan	55.439.000	1 Kegiatan	58.210.950	Kota Magelang	DAU
5	penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda	Terselenggaranya penyuluhan Narkoba bagi pemud	200 org	19.624.000	200 org	20.605.200	Kota Magelang	DAU
7	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Terpilihnya pemuda pelopor	1 Orang	9.390.000	1 Orang	9.859.500	Kota Magelang	DAU
10	Pelatihan pramuka penggalang SMP	Meningkatnya kemampuan pramuka penggalang	400 Orang	12.849.000	400 Orang	13.491.450	Kota Magelang	DAU
11	Pelatihan PMR SMP	Meningkatnya kemampuan petugas PMR	50 Orang	12.784.000	50 Orang	13.423.200	Kota Magelang	DAU
14	Pelatihan pramuka penegak SMA	Meningkatnya kemampuan pramuka penegak	300 Orang	15.214.000	300 Orang	15.974.700	Kota Magelang	DAU
18	Lomba tata upacara dan PBB (SMP)	Terpilihnya juara TUB & PBB SMP/MTs	3 Kegiatan	51.271.000	3 Kegiatan	53.834.550	Kota Magelang	DAU
20	Lomba pramuka penggalang SMP	Terpilihnya juara pramuka penggalang SMP/MTs	1 Kegiatan	23.663.000	1 Kegiatan	24.846.150	Kota Magelang	DAU
21	Lomba Paskibraka SMA/ SMK	Terpilihnya dan terfasilitasinya pelatihan juara paskibraka SMA/SMK	40 Orang	326.495.000	40 Orang	342.819.750	Kota Magelang	DAU
22	Lomba tata upacara dan PBB SMA/ SMK	Terpilihnya juara TUB & PBB SMA/SMK	1 Kegiatan	75.271.000	1 Kegiatan	79.034.550	Kota Magelang	DAU
23	Lomba pramuka penegak SMA/ SMK	Terpilihnya juara pramuka penegak SMA/SMK	1 Kegiatan	185.620.000	1 Kegiatan	194.901.000	Kota Magelang	DAU
25	Training of Trainer Tata Upacara Bendera dan baris berbaris	Terlatihnya pelatih TUB dan baris berbaris	50 Kegiatan	18.569.000	50 Kegiatan	19.497.450	Kota Magelang	DAU
26	Lomba Paskibraka SMP	Terselenggaranya Lomba PASKIB SMP/Mts	20 tim	37.968.000	20 tim	39.866.400	Kota Magelang	DAU
213.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			2.085.021.000		2.189.272.050		
		Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional		6		6		
		Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional						
		- Peringkat di POPDA SD		7		6		
		- Peringkat di POPDA SMP		17		15		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Peringkat di POPDA SMA	22		20			
		- Peringkat di Dulongmas	NA		NA			
		- Peringkat di PORPROV	NA		20			
		Jumlah klub olah raga	183		183			
		Jumlah organisasi olah raga	35		35			
3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Terpilihnya dan terbinanya bibit atlit sepak bola, atletik, renang, panahan, dan taekwondo	75 Orang	375.941.000	75 Orang	394.738.050	Kota Magelang	DAU
4	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Kontingen Olahraga dari 17 Kelurahan Klub	101.384.000	Kontingen Olahraga dari 17 Kelurahan Klub	106.453.200	Kota Magelang	DAU
6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	terpilihnya juara lomba tenis lapangan	24 Tim	259.550.000	24 Tim	272.527.500	Kota Magelang	DAU
7	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Terlaksananya olahraga masal	3000 Tim	51.762.000	3000 Tim	54.350.100	Kota Magelang	DAU
11	Pengembangan olahraga rekreasi	Terpilihnya atlit gerak jalan cepat & lintas alam	5 Tim	239.802.000	5 Tim	251.792.100	Kota Magelang	DAU
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terbinanya dan meningkatnya prestasi atlit olahraga yang berkembang di masyarakat	1 Orang	18.138.000	1 Orang	19.044.900	Kota Magelang	DAU
18	POPDA SD	Terselenggaranya POPDA dan pengiriman kontingen tk karesidenan & propinsi	70 Sekolah	105.572.000	70 Sekolah	110.850.600	Kota Magelang	DAU
21	Liga bola basket SMP	Terpilihnya juara bola basket SMP/MTs	24 Sekolah	31.411.000	24 Sekolah	32.981.550	Kota Magelang	DAU
22	Liga sepak bola SMP	Terpilihnya juara sepak bola SMP/MTs	24 Sekolah	29.555.000	24 Sekolah	31.032.750	Kota Magelang	DAU
25	POPDA SMP	Terpilihnya juara dan pengiriman ke karesidenan dan provinsi	1 Sekolah	120.684.000	1 Sekolah	126.718.200	Kota Magelang	DAU
26	POPDA SMA/SMK	Terselenggaranya POPDA TK SMA/SMK/MA & pengiriman tingkat karesidenan & propinsi	2 Sekolah	111.655.000	2 Sekolah	117.237.750	Kota Magelang	DAU
28	Liga sepak bola SMA	Terpilihnya juara sepakbola SMA/SMK	24 Sekolah	29.555.000	24 Sekolah	31.032.750	Kota Magelang	DAU
29	Liga bola basket SMA/ SMK	Terpilihnya juara bola basket SMA/SMK	24 Sekolah	30.779.000	24 Sekolah	32.317.950	Kota Magelang	DAU
35	Pengiriman kontingen tingkat propinsi	Terlaksananya pengiriman kontingen ke tingkat provinsi	2 Event	368.349.000	2 Event	386.766.450	Kota Magelang	DAU
36	Seleksi beladiri pelajar	Meningkatnya prestasi atlet dan meningkatnya masyarakat terhadap gemar olahraga	1 Kegiatan	210.884.000	1 Kegiatan	221.428.200	Kota Magelang	DAU
302.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			1.559.103.000		1.637.058.150		
		Lama Kunjungan Wisatawan	02-Mar		02-Apr			
		Persentase TIC yang representatif	0		100%			
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	1.136.435		1.138.140			
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	5.185		5.193			
3	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Terpromosikannya Kota Magelang melalui Java Promo	Kegiatan	65.140.000	Kegiatan	68.397.000	Kota Magelang	DAU
5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Terlaksananya pameran untuk promosi wisata Kota Magelang	5 Event	218.326.000	5 Event	229.242.300	Kota Magelang	DAU
7	Pengembangan Statistik Kepariwisata	Tersedianya database Pariwisata	500 Buku	40.000.000	500 Buku	42.000.000	Kota Magelang	DAU
9	Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata	Terpilihnya juara Duta Wisata dan penerima tamu HUT RI	14 Orang	232.250.000	14 Orang	243.862.500	Kota Magelang	DAU
12	Pekan seni pariwisata	Terselenggaranya Grebeg Gethuk dan Kirab Budaya	2 Kegiatan	468.147.000	2 Kegiatan	491.554.350	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	pameran magelang tempo dulu	Terselenggaranya Event Pameran Magelang Tempo Doeloe	1 kegiatan	202.502.000	1 kegiatan	212.627.100	Kota Magelang	DAU
14	gebyar pariwisata ahir taun	Koordinasi, kunjungan lapangan dan hiburan malam tahun baru	1 kegiatan	332.738.000	1 kegiatan	349.374.900	Kota Magelang	DAU
302.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			114.868.000		120.611.400		
		Destinasi Wisata Unggulan	3		4			
		Persentase destiasi wisata yang memenuhi sapta pesona	44,44%		55,56%			
2	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Terpeliharanya anjungan yang layak & terehabnya fasilitas wisata religi Gunung Tidar	1 Lokasi	50.000.000	1 Lokasi	52.500.000	Kota Magelang	DAU
3	pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	One day tour	40 orang	33.665.000	40 orang	35.348.250	Kota Magelang	DAU
6	pengembangan daerah tujuan wisata	Terlaksananya FGD, Pembinaan dan Penyuluhan kepada di sekitar Desa Wisata	3 Kegiatan	31.203.000	3 Kegiatan	32.763.150	Kota Magelang	DAU
302.17	Program Pengembangan Kemitraan			70.835.000		74.376.750		
		Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	9		10			
7	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Tersedianya souvenir/cinderamata khas Kota Magelang	2 Kegiatan	17.719.000	2 Kegiatan	18.604.950	Kota Magelang	DAU
8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Terwujudnya pedagang yang sadar wisata	150 Orang	37.921.000	150 Orang	39.817.050	Kota Magelang	DAU
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	terlaksananya monf seluruh UJP Kota Magelang	4 kegiatan	15.195.000	4 kegiatan	15.954.750	Kota Magelang	DAU
401.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			75.001.000		78.751.050		
		Jumlah review PERDA/PERWAL	1		1			
		Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	0		0			
		Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	0		1			
7	Penyusunan Rancangan Perda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPK)	Tersusunnya Raperda RIPK	1 dokumen	75.001.000	1 dokumen	78.751.050	Kota Magelang	DAU
		JUMLAH		5.877.250.000		6.171.112.500		

Matriks
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang : Perpustakaan
OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
217.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100%	566.929.000	100%	595.275.450		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat	12 Bulan	1.155.000	12 Bulan	1.212.750	Disperpusip	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan telepon, air dan listrik	12 Bulan	194.800.000	12 Bulan	204.540.000	Disperpusip	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa perpanjangan STNK kendaraan	10 unit	7.625.000	10 unit	8.006.250	Disperpusip	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelolaan keuangan	10 Orang	96.698.000	10 Orang	101.532.900	Disperpusip	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan	12 Bulan	61.303.000	12 Bulan	64.368.150	Disperpusip	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	12 Bulan	11.700.000	12 Bulan	12.285.000	Disperpusip	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggandaan	12 Bulan	3.570.000	12 Bulan	3.748.500	Disperpusip	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan lainnya	1 paket	12.605.000	1 paket	13.235.250	Disperpusip	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik	12 Bulan	528.000	12 Bulan	554.400	Disperpusip	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum	12 Bulan	28.027.000	12 Bulan	29.428.350	Disperpusip	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah SPPD	12 Bulan	84.250.000	12 Bulan	88.462.500	Disperpusip	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Jasa penjaga malam dan pembuat minuman	12 Bulan	64.668.000	12 Bulan	67.901.400	Disperpusip	DAU
217.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya perlengkapan kantor	100%	8.088.438.000	100%	8.492.859.900		
3	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Fasilitas gedung depo arsip	1 unit	7.861.148.000	1 unit	8.254.205.400	Disperpusip	DAU
20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional	12 Bulan	149.290.000	12 Bulan	156.754.500	Disperpusip	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	peralatan listrik	1 paket	30.000.000	1 paket	31.500.000	Disperpusip	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	53 Unit	27.400.000	53 Unit	28.770.000	Disperpusip	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	12 Bulan	20.600.000	12 Bulan	21.630.000	Disperpusip	DAU
217.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dokumen keuangan dan pemerintahan	100%	33.594.000	100%	35.273.700		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen laporan keuangan	2 dokumen	9.200.000	2 dokumen	9.660.000	Disperpusip	DAU
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	dokumen Renja	2 dokumen	9.011.000	2 dokumen	9.461.550	Disperpusip	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen RKA	2 dokumen	10.283.000	2 dokumen	10.797.150	Disperpusip	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	dokumen LKj IP	2 dokumen	5.100.000	2 dokumen	5.355.000	Disperpusip	DAU
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Masyarakat Kota Magelang	100%	922.011.000	100%	968.111.550		
		Jumlah kunjungan ke Desa Buku	2.000		2.000			
		Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar	80%		85%			
2	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah peserta	300 Orang	66.131.000	300 Orang	69.437.550	Kota Magelang	DAU
9	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Buku perpustakaan yang sesuai klasifikasi	1500 Buku	122.728.000	1500 Buku	128.864.400	Kota Magelang	DAU
10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pelayanan perpustakaan sekolah & kelurahan	12 Laporan	13.792.000	12 Laporan	14.481.600	Kota Magelang	DAU
17	Pameran dan bursa buku	Jumlah peserta pameran	2125 Orang	235.787.000	2125 Orang	247.576.350	Kota Magelang	DAU
19	Pengelolaan buku perpustakaan	jumlah buku terolah	3000 Eksemplar	34.521.000	3000 Eksemplar	36.247.050	Kota Magelang	DAU
30	Orientasi perpustakaan	meningkatkan keahlian pengelolaan perpustakaan	80 pengelola	55.128.000	80 pengelola	57.884.400	Kota Magelang	DAU
31	Lomba perpustakaan	Jumlah peserta	151 Unit	47.183.000	151 Unit	49.542.150	Kota Magelang	DAU
32	Layanan perpustakaan keliling	Laporan pelaksanaan kegiatan keliling	4 Orang	23.952.000	4 Orang	25.149.600	Kota Magelang	DAU
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	laporan pelaksanaan layanan perpustakaan	4 Buku	167.776.000	4 Buku	176.164.800	Kota Magelang	DAU
37	Promosi minat baca	Jumlah media promosi	4 Orang	64.263.000	4 Orang	67.476.150	Kota Magelang	DAU
39	Lomba bercerita	meningkatkan kemampuan siswa bercerita	80 Siswa	28.983.000	80 Siswa	30.432.150	Kota Magelang	DAU
42	Pengembangan Ketrampilan Masyarakat	meningkatkan kemampuan menulis	456 Orang	31.649.000	456 Orang	33.231.450	Kota Magelang	DAU
44	Lomba literasi	Jumlah peserta	30 Siswa	22.468.000	30 Siswa	23.591.400	Kota Magelang	DAU
47	Penyusunan Bulletin KPAD	Jumlah terbitan buletin	2 buletin	7.650.000	2 buletin	8.032.500	Kota Magelang	DAU
210.15	Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	pengembangan portal website perpustakaan kota magelang	100%	7.271.000	100%	7.634.550		
	Pengelolaan Website	up date website	12 bulan	7.271.000	12 bulan	7.634.550	Kota Magelang	DAU
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terjaminnya keamanan fisik dan informasi arsip	100%	358.064.000	100%	375.967.200		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%		52%			
		Persentase arsip dan risalah	82%		82%			
		Persentase Penyelamatan Arsip	47%		53%			
8	Penyelenggaraan Lomba Tertib Administrasi Kearsipan	Terwujudnya Tertib Administrasi	46 SKPD	17.439.000	46 SKPD	18.310.950	Kota Magelang	DAU
5	Akuisisi Arsip	Jumlah dos/berkas	150 dos	87.900.000	150 dos	92.295.000	Kota Magelang	DAU
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah dos arsip	150 dos	85.243.000	150 dos	89.505.150	Kota Magelang	DAU
10	Fasilitasi Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	Terwujudnya tertib administrasi pembangunan gedung sesuai kontrak yang ada	1 laporan	167.482.000	1 laporan	175.856.100	Kota Magelang	DAU
218.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Peningkatan layanan arsip	100%	90.316.000	100%	94.831.800		
		Cakupan pelayanan acces arsip	67%		67%			
		Tingkat Komptensi SDM Pengelola Kearsipan	39%		39%			
4	Orientasi arsip dinamis aktif	meningkatkan kemampuan SDM pengelola kearsipan di Sekolah	92 sekolah	54.850.000	92 sekolah	57.592.500	Kota Magelang	DAU
8	Pendokumentasian Kota Magelang	Tersedianya Buku Dokumentasi Kota Magelang	70 buku	35.466.000	70 buku	37.239.300	Kota Magelang	DAU
		JUMLAH		10.066.623.000		10.569.954.150		

Matriks
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Pilihan
Bidang : Pertanian
OPD : Dinas Pertanian dan Pangan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
303.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			821.492.000		862.566.600		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	865 lembar	2.595.000	865 lembar	2.724.750	Disperpa	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya air, telepon, listrik dan internet	12 bulan	156.000.000	12 bulan	163.800.000	Disperpa	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas yang terpelihara dan perpanjangan ijin	47 kendaraan	13.520.000	47 kendaraan	14.196.000	Disperpa	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah personil pengelola keuangan SKPD	14 orang/bln	114.650.000	14 orang/bln	120.382.500	Disperpa	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	24 jenis	51.494.000	24 jenis	54.068.700	Disperpa	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	39 jenis	33.098.000	39 jenis	34.752.900	Disperpa	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	13 jenis	17.902.000	13 jenis	18.797.100	Disperpa	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat listrik	8 Jenis	12.499.000	8 Jenis	13.123.950	Disperpa	DAU
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya bendera merah putih	17 buah	3.259.000	17 buah	3.421.950	Disperpa	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran dan majalah	12 bulan	4.620.000	12 bulan	4.851.000	Disperpa	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya BBM RPH, Pengisian tabung gas kantor	1095 liter, 54 tabung	21.728.000	1095 liter, 54 tabung	22.814.400	Disperpa	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum pegawai, rapat dan petugas piket	100 %	35.811.000	100 %	37.601.550	Disperpa	DAU
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tertelaksananya rakor dalam dan luar daerah	100 %	231.050.000	100 %	242.602.500	Disperpa	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Tertelaksananya piket, keamanan dan tenaga kontrak	100 %	123.266.000	100 %	129.429.300	Disperpa	DAU
303.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			410.369.000		430.887.450		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun	100 %	76.387.000	100 %	80.206.350	Disperpa	DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas selama 1 tahun	100 %	314.182.000	100 %	329.891.100	Disperpa	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	100 %	15.000.000	100 %	15.750.000	Disperpa	DAU
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur	100 %	4.800.000	100 %	5.040.000	Disperpa	DAU
303.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD			12.506.000		13.131.300		
4	Penilaian angka kredit aparatur	Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	8 orang	12.506.000	8 orang	13.131.300	Kota Magelang	DAU
303.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			84.042.000		88.244.100		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan realisasi pelaksanaan kegiatan	36 Buku	9.820.000	36 Buku	10.311.000	Disperpa	DAU
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan realisasi sebagai bahan evaluasi	1 dokumen	6.381.000	1 dokumen	6.700.050	Disperpa	DAU
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis	1 dokumen	5.627.000	1 dokumen	5.908.350	Disperpa	DAU
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	7.091.000	1 dokumen	7.445.550	Disperpa	DAU
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Buku Renja SKPD	2 dokumen	7.660.000	2 dokumen	8.043.000	Disperpa	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	Buku RKA/RKPA/DPA/DPPA	2 dokumen	38.300.000	2 dokumen	40.215.000	Disperpa	DAU
10	Penyusunan renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.250.000	Disperpa	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) SKPD	Buku LKJIP SKPD	1 dokumen	4.163.000	1 dokumen	4.371.150	Disperpa	DAU
403.15	Program Pengembangan data/informasi			28.605.000		30.035.250		
20	Penyusunan database pertanian, peternakan dan perikanan	Tersajinya buku database yang akurat	15	28.605.000	15	30.035.250	Kota Magelang	DAU
205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			54.509.000		57.234.450		
6	Pemeliharaan RTH	Tertatanya RTH di lingkungan kantor, kebun bibit	3000 Lokasi	54.509.000	3000 Lokasi	57.234.450	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			34.600.000		36.330.000		
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Pengelolaan arsip aktif dan non aktif	2 dokumen	34.600.000	2 dokumen	36.330.000	Kota Magelang	DAU
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			9.400.000		9.870.000		
19	Pengelolaan Website	Data informasi SKPD berbasis website	10000 Record akta	9.400.000	10000 Record akta	9.870.000	Kota Magelang	DAU
303.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			100.391.000		105.410.550		
		Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	4		5			
1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Terciptanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dan pelaku agribisnis	60 Orang	69.891.000	60 Orang	73.385.550	Kota Magelang	DAU
3	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Tercapainya penyusunan RDKK pupuk bersubsidi Kota Magelang dan Lomba Kelompok Tani	2 Orang	30.500.000	2 Orang	32.025.000	Kota Magelang	DAU
203.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan			475.329.000		499.095.450		
		Jumlah regulasi ketahanan pangan	1		2			
		Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%)	92%		95%			
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85		86,3			
		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	80%		80%			
1	Penanganan daerah rawan pangan	Pemetaan, pembinaan/sosialisasi dan pemantauan	1 keg	16.650.000	1 keg	17.482.500	Kota Magelang	DAU
3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai makanan	Dokumen PPH	1 dok	15.104.000	1 dok	15.859.200	Kota Magelang	DAU
4	analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Dokumen Neraca Bahan Makanan	1 dok	7.480.000	1 dok	7.854.000	Kota Magelang	DAU
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	Laporan verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi	12 Laporan	19.935.000	12 Laporan	20.931.750	Kota Magelang	DAU
9	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Peserta pelatihan biofarmaka, tabulampot, aloe vera, jamur tiram, dan verticultur	120 Kelompok	105.035.000	120 Kelompok	110.286.750	Kota Magelang	DAU
11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	dokumen informasi harga pasar	12 Laporan	9.830.000	12 Laporan	10.321.500	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Jumlah peserta pelatihan	60 Unit	63.589.000	60 Unit	66.768.450	Kota Magelang	DAU
15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Terlaksananya intensifikasi padi, jagung, kacang tanah	7 kali	39.144.000	7 kali	41.101.200	Kota Magelang	DAU
16	pengembangan diversifikasi tanaman	Pelatihan pembibitan tanaman buah	1 keg	11.186.000	1 keg	11.745.300	Kota Magelang	DAU
21	Pengembangan sistem informasi pasar	Laporan pemantauan	12 laporan	16.204.000	12 laporan	17.014.200	Kota Magelang	DAU
22	peningkatan mutu dan keamanan pangan	Pembinaan /penyuluhan dan uji laboratorium mutu dan keamanan pangan	2 keg	23.595.000	2 keg	24.774.750	Kota Magelang	DAU
26	Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi	Tersedianya bibit anggrek dalam botol	1000 Bibit	92.405.000	1000 Bibit	97.025.250	Kota Magelang	DAU
30	penyuluhan sumber pangan alternatif	Pengolahan pangan lokal dan festival pangan lokal	2 keg	26.165.000	2 keg	27.473.250	Kota Magelang	DAU
34	pengawasan distribusi pupuk dan pertisida	Jumlah kios yang diawasi	4 kios	29.007.000	4 kios	30.457.350	Kota Magelang	DAU
303.16	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			194.080.000		203.784.000		
		Prosentase Petani yang melaksanakan GHP	1%		3%			
		Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian	10		11			
2	Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	Pasar tani	4 Event	95.330.000	4 Event	100.096.500	Kota Magelang	DAU
7	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Jumlah kegiatan promosi produk	5 pameran	98.750.000	5 pameran	103.687.500	Kota Magelang	DAU
303.17	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			60.603.000		63.633.150		
		Luas lahan pertanian organik	0,94		0,98			
		Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	45%		51,70%			
4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah sosialisasi	7 Kelompok	32.821.000	7 Kelompok	34.462.050	Kota Magelang	DAU
6	Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Luas sawah organik	1 Orang	27.782.000	1 Orang	29.171.100	Kota Magelang	DAU
303.18	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			376.829.000		395.670.450		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Padi	3201		3180			
		Jagung	11		11			
		Ubi kayu	13,5		13,5			
1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah peserta	25 orang	44.214.000	25 orang	46.424.700	Kota Magelang	DAU
23	Penyediaan sarana dan prasarana balai perbenihan/perbibitan	Sapras dan operasional	4 jenis	216.507.000	4 jenis	227.332.350	Kota Magelang	DAU
25	Pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	Jumlah Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	1 lokasi	116.108.000	1 lokasi	121.913.400	Kota Magelang	DAU
303.19	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			15.000.000		15.750.000		
		Prosentase Petani yang melaksanakan GAP	5,88%		11,76%			
		Rasio petani terlatih	85%		85%			
1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah penyuluh pertanian swadaya terlatih	30 orang	15.000.000	30 orang	15.750.000	Kota Magelang	DAU
303.20	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak			287.315.000		301.680.750		
		Persentase hewan sehat	83		83			
1	Pendataan masalah peternakan	Jumlah peserta	25 orang	12.011.000	25 orang	12.611.550	Kota Magelang	DAU
2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah hewan ternak yang ditangani	1350 Komoditas	46.950.000	1350 Komoditas	49.297.500	Kota Magelang	DAU
4	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Jumlah hewan yang diperiksa dan terdiagnosa	350 Ekor	39.807.000	350 Ekor	41.797.350	Kota Magelang	DAU
6	Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang	Jumlah ternak yang dipotong dan diperiksa	4350 Ekor	28.556.000	4350 Ekor	29.983.800	Kota Magelang	DAU
7	Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan hewan	jumlah sampel dan hewan yang diperiksa	300 Ekor	19.106.000	300 Ekor	20.061.300	Kota Magelang	DAU
9	Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas	terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai standarisasi PUSKESWAN	100 %	7.650.000	100 %	8.032.500	Kota Magelang	DAU
10	operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan	Terlaksananya pelayanan jasa medis veteriner dengan baik	100	133.235.000	100	139.896.750	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
303.21	Program peningkatan produksi hasil peternakan			43.605.000		45.785.250		
		Daging Ruminansia	1.177.418		1.233.486			
		Daging Unggas	5.122.583		5.366.516			
		Telur	420.000		440.000			
		Susu	193.800		197.600			
2	Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah ternak yang dipelihara	8	11.700.000	8	12.285.000	Kota Magelang	DAU
8	Pengembangan agribisnis peternakan	Pelatihan budidaya ternak ayam buras dan budidaya komoditas pakan penunjang	3 Komoditas	20.655.000	3 Komoditas	21.687.750	Kota Magelang	DAU
20	Pengadaan IB dan Peralatan IB	Terwujudnya perbibitan ternak di Kota Magelang	1 Ekor	11.250.000	1 Ekor	11.812.500	Kota Magelang	DAU
303.22	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan			165.666.000		173.949.300		
		Persentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi halal	1,82		2,42			
7	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Terfasilitasinya pemasaran komoditas peternakan	100 kali	105.374.000	100 kali	110.642.700	Kota Magelang	DAU
8	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	Pengetahuan pengusaha bidang peternakan	160 Orang	28.967.000	160 Orang	30.415.350	Kota Magelang	DAU
10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Tersedianya laporan informasi harga dan pengawasan obat hewan	16 Laporan	31.325.000	16 Laporan	32.891.250	Kota Magelang	DAU
303.23	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan			58.875.000		61.818.750		
		Jumlah pelaku usaha peternakan organik:						
		Peternak ayam buras/ ayam broiler	1		2			
		Peternak kelinci	1		2			
		Peternak kambing/domba	1		2			
		Rasio peternak terlatih	85%		85%			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Tersedianya sarana dan prasarana RPH	1 Sampel	32.375.000	1 Sampel	33.993.750	Kota Magelang	DAU
4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	Tercapainya peningkatan pengetahuan teknologi pasca panen peternakan	90 Jenis	26.500.000	90 Jenis	27.825.000	Kota Magelang	DAU
303.24	Program pelayanan kesehatan masyarakat veteriner			333.003.000		349.653.150		
		Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV	1,82%		2,42%			
1	Peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan masyarakat kesmavet	Jumlah sampel bahan pangan asal hewan yang diuji	400 sampel	30.788.000	400 sampel	32.327.400	Kota Magelang	DAU
2	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan Asal Hewan	Laksanakan pengujian sampel dan sosialisasi	100 Orang	27.907.000	100 Orang	29.302.350	Kota Magelang	DAU
5	Operasionalisasi Rumah Potong hewan dan labkesmasvet	Jumlah ternak yang diperiksa dan dipotong untuk menghasilkan daging yang ASUH	4350 Ekor	45.945.000	4350 Ekor	48.242.250	Kota Magelang	DAU
5	Pengawasan Peredaran Pangan Asal Hewan	Operasi penertiban dan penjualan daging dan hasil ternak dari luar daerah	6 kali	194.402.000	6 kali	204.122.100	Kota Magelang	DAU
7	Pembinaan pelaku usaha pemotongan di RPH	Pembinaan pelaku usaha di RPH	4 Kegiatan	33.961.000	4 Kegiatan	35.659.050	Kota Magelang	DAU
304.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan			103.943.000		109.140.150		
6	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan	Jumlah wisatawan yang terlayani	50000 orang	103.943.000	50000 orang	109.140.150	Kota Magelang	DAU
304.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan			216.712.000		227.547.600		
4	Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata	Terpeliharanya konservasi hutan Gn. Tidar	100 Ha	201.498.000	100 Ha	211.572.900	Kota Magelang	DAU
5	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pelestarian Gn. Tidar	250 Orang	15.214.000	250 Orang	15.974.700	Kota Magelang	DAU
301.20	Program pengembangan budidaya perikanan			229.385.000		240.854.250		
		Produksi Ikan	160,65		162,41			
		Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB	0		50%			
		Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB	30%		40%			
1	Pengembangan bibit ikan unggul	Terlatihnya pembudidaya ikan	25 orang	22.450.000	25 orang	23.572.500	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA	
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Tertindakannya operasional pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	25 orang	23.600.000	25 orang	24.780.000	Kota Magelang	DAU
	3	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Temu usaha, gelar produk, pembinaan dan lomba serta pelatihan kelembagaan kelompok pelaku perikanan	40 orang	30.471.000	40 orang	31.994.550	Kota Magelang	DAU
	25	Operasional balai benih ikan	Tertindakannya operasionalisasi Balai Benih Ikan Jurang Ombo dan Potrobangsari	1 Tahun	118.192.000	1 Tahun	124.101.600	Kota Magelang	DAU
	26	Pelatihan ikan hias	Tertindakannya pelatihan ikan hias	15 orang	34.672.000	15 orang	36.405.600	Kota Magelang	DAU
301.22		Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan			124.695.000		130.929.750		
			Luas lahan perikanan organik	0,2		0,3			
	3	Penyuluhan Pengelolaan Bidang Perikanan	Penyuluhan gemar ikan dan alih teknologi informasi pengolahan hasil perikanan	1 kegiatan	124.695.000	1 kegiatan	130.929.750	Kota Magelang	DAU
301.23		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			105.092.000		110.346.600		
			Persentase unit pengolahan ikan yang telah bersertifikasi SKP	0		0			
			Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	2		3			
	12	Pembinaan kemampuan dan keterampilan pengelolaan/pemasaran perikanan	Jumlah pengolah hasil perikanan terlatih	40 orang	34.334.000	40 orang	36.050.700	Kota Magelang	DAU
	13	Operasionalisasi sentra pengolahan ikan	Tertindakannya operasionalisasi sentra pengolahan ikan	1 Tahun	39.709.000	1 Tahun	41.694.450	Kota Magelang	DAU
	14	Pembinaan pelaku pemasaran hasil perikanan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pemasar hasil perikanan	40 orang	31.049.000	40 orang	32.601.450	Kota Magelang	DAU
			JUMLAH		4.346.046.000		4.563.348.300		

Matriks
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Pilihan
Bidang : Pertanian
OPD : Dinas Pertanian dan Pangan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
303.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			821.492.000		862.566.600		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	865 lembar	2.595.000	865 lembar	2.724.750	Disperpa	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya air, telepon, listrik dan internet	12 bulan	156.000.000	12 bulan	163.800.000	Disperpa	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas yang terpelihara dan perpanjangan ijin	47 kendaraan	13.520.000	47 kendaraan	14.196.000	Disperpa	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah personil pengelola keuangan SKPD	14 orang/bln	114.650.000	14 orang/bln	120.382.500	Disperpa	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	24 jenis	51.494.000	24 jenis	54.068.700	Disperpa	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	39 jenis	33.098.000	39 jenis	34.752.900	Disperpa	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	13 jenis	17.902.000	13 jenis	18.797.100	Disperpa	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat listrik	8 Jenis	12.499.000	8 Jenis	13.123.950	Disperpa	DAU
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya bendera merah putih	17 buah	3.259.000	17 buah	3.421.950	Disperpa	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran dan majalah	12 bulan	4.620.000	12 bulan	4.851.000	Disperpa	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya BBM RPH, Pengisian tabung gas kantor	1095 liter, 54 tabung	21.728.000	1095 liter, 54 tabung	22.814.400	Disperpa	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum pegawai, rapat dan petugas piket	100 %	35.811.000	100 %	37.601.550	Disperpa	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rakor dalam dan luar daerah	100 %	231.050.000	100 %	242.602.500	Disperpa	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorier daerah/tidak tetap	Terlaksananya piket, keamanan dan tenaga kontrak	100 %	123.266.000	100 %	129.429.300	Disperpa	DAU
303.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			410.369.000		430.887.450		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun	100 %	76.387.000	100 %	80.206.350	Disperpa	DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas selama 1 tahun	100 %	314.182.000	100 %	329.891.100	Disperpa	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	100 %	15.000.000	100 %	15.750.000	Disperpa	DAU
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur	100 %	4.800.000	100 %	5.040.000	Disperpa	DAU
303.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD			12.506.000		13.131.300		
4	Penilaian angka kredit aparatur	Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	8 orang	12.506.000	8 orang	13.131.300	Kota Magelang	DAU
303.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			84.042.000		88.244.100		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan realisasi pelaksanaan kegiatan	36 Buku	9.820.000	36 Buku	10.311.000	Disperpa	DAU
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan realisasi sebagai bahan evaluasi	1 dokumen	6.381.000	1 dokumen	6.700.050	Disperpa	DAU
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis	1 dokumen	5.627.000	1 dokumen	5.908.350	Disperpa	DAU
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	7.091.000	1 dokumen	7.445.550	Disperpa	DAU
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Buku Renja SKPD	2 dokumen	7.660.000	2 dokumen	8.043.000	Disperpa	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	Buku RKA/RKPA/DPA/DPPA	2 dokumen	38.300.000	2 dokumen	40.215.000	Disperpa	DAU
10	Penyusunan renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.250.000	Disperpa	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) SKPD	Buku LKjIP SKPD	1 dokumen	4.163.000	1 dokumen	4.371.150	Disperpa	DAU
403.15	Program Pengembangan data/informasi			28.605.000		30.035.250		
20	Penyusunan database pertanian, peternakan dan perikanan	Tersajinya buku database yang akurat	15	28.605.000	15	30.035.250	Kota Magelang	DAU
205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			54.509.000		57.234.450		
6	Pemeliharaan RTH	Tertatanya RTH di lingkungan kantor, kebun bibit	3000 Lokasi	54.509.000	3000 Lokasi	57.234.450	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			34.600.000		36.330.000		
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Pengelolaan arsip aktif dan non aktif	2 dokumen	34.600.000	2 dokumen	36.330.000	Kota Magelang	DAU
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			9.400.000		9.870.000		
19	Pengelolaan Website	Data informasi SKPD berbasis website	10000 Record akta	9.400.000	10000 Record akta	9.870.000	Kota Magelang	DAU
303.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			100.391.000		105.410.550		
		Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	4		5			
1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Terciptanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dan pelaku agribisnis	60 Orang	69.891.000	60 Orang	73.385.550	Kota Magelang	DAU
3	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Tercapainya penyusunan RDKK pupuk bersubsidi Kota Magelang dan Lomba Kelompok Tani	2 Orang	30.500.000	2 Orang	32.025.000	Kota Magelang	DAU
203.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan			475.329.000		499.095.450		
		Jumlah regulasi ketahanan pangan	1		2			
		Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%)	92%		95%			
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85		86,3			
		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	80%		80%			
1	Penanganan daerah rawan pangan	Pemetaan, pembinaan/sosialisasi dan pemantauan	1 keg	16.650.000	1 keg	17.482.500	Kota Magelang	DAU
3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai makanan	Dokumen PPH	1 dok	15.104.000	1 dok	15.859.200	Kota Magelang	DAU
4	analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Dokumen Neraca Bahan Makanan	1 dok	7.480.000	1 dok	7.854.000	Kota Magelang	DAU
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	Laporan verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi	12 Laporan	19.935.000	12 Laporan	20.931.750	Kota Magelang	DAU
9	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Peserta pelatihan biofarmaka, tabulampot, aloe vera, jamur tiram, dan verticultur	120 Kelompok	105.035.000	120 Kelompok	110.286.750	Kota Magelang	DAU
11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	dokumen informasi harga pasar	12 Laporan	9.830.000	12 Laporan	10.321.500	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Jumlah peserta pelatihan	60 Unit	63.589.000	60 Unit	66.768.450	Kota Magelang	DAU
15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Terlaksananya intensifikasi padi, jagung, kacang tanah	7 kali	39.144.000	7 kali	41.101.200	Kota Magelang	DAU
16	pengembangan diversifikasi tanaman	Pelatihan pembibitan tanaman buah	1 keg	11.186.000	1 keg	11.745.300	Kota Magelang	DAU
21	Pengembangan sistem informasi pasar	Laporan pemantauan	12 laporan	16.204.000	12 laporan	17.014.200	Kota Magelang	DAU
22	peningkatan mutu dan keamanan pangan	Pembinaan /penyuluhan dan uji laboratorium mutu dan keamanan pangan	2 keg	23.595.000	2 keg	24.774.750	Kota Magelang	DAU
26	Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi	Tersedianya bibit anggrek dalam botol	1000 Bibit	92.405.000	1000 Bibit	97.025.250	Kota Magelang	DAU
30	penyuluhan sumber pangan alternatif	Pengolahan pangan lokal dan festival pangan lokal	2 keg	26.165.000	2 keg	27.473.250	Kota Magelang	DAU
34	pengawasan distribusi pupuk dan pertisida	Jumlah kios yang diawasi	4 kios	29.007.000	4 kios	30.457.350	Kota Magelang	DAU
303.16	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			194.080.000		203.784.000		
		Prosentase Petani yang melaksanakan GHP	1%		3%			
		Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian	10		11			
2	Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	Pasar tani	4 Event	95.330.000	4 Event	100.096.500	Kota Magelang	DAU
7	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Jumlah kegiatan promosi produk	5 pameran	98.750.000	5 pameran	103.687.500	Kota Magelang	DAU
303.17	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			60.603.000		63.633.150		
		Luas lahan pertanian organik	0,94		0,98			
		Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	45%		51,70%			
4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah sosialisasi	7 Kelompok	32.821.000	7 Kelompok	34.462.050	Kota Magelang	DAU
6	Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Luas sawah organik	1 Orang	27.782.000	1 Orang	29.171.100	Kota Magelang	DAU
303.18	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			376.829.000		395.670.450		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Padi	3201		3180			
		Jagung	11		11			
		Ubi kayu	13,5		13,5			
1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah peserta	25 orang	44.214.000	25 orang	46.424.700	Kota Magelang	DAU
23	Penyediaan sarana dan prasarana balai perbenihan/perbibitan	Sapras dan operasional	4 jenis	216.507.000	4 jenis	227.332.350	Kota Magelang	DAU
25	Pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	Jumlah Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	1 lokasi	116.108.000	1 lokasi	121.913.400	Kota Magelang	DAU
303.19	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			15.000.000		15.750.000		
		Prosentase Petani yang melaksanakan GAP	5,88%		11,76%			
		Rasio petani terlatih	85%		85%			
1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah penyuluh pertanian swadaya terlatih	30 orang	15.000.000	30 orang	15.750.000	Kota Magelang	DAU
303.20	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak			287.315.000		301.680.750		
		Persentase hewan sehat	83		83			
1	Pendataan masalah peternakan	Jumlah peserta	25 orang	12.011.000	25 orang	12.611.550	Kota Magelang	DAU
2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah hewan ternak yang ditangani	1350 Komoditas	46.950.000	1350 Komoditas	49.297.500	Kota Magelang	DAU
4	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Jumlah hewan yang diperiksa dan terdiagnosa	350 Ekor	39.807.000	350 Ekor	41.797.350	Kota Magelang	DAU
6	Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang	Jumlah ternak yang dipotong dan diperiksa	4350 Ekor	28.556.000	4350 Ekor	29.983.800	Kota Magelang	DAU
7	Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan hewan	jumlah sampel dan hewan yang diperiksa	300 Ekor	19.106.000	300 Ekor	20.061.300	Kota Magelang	DAU
9	Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas	terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai standarisasi PUSKESWAN	100 %	7.650.000	100 %	8.032.500	Kota Magelang	DAU
10	operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan	Terlaksananya pelayanan jasa medis veteriner dengan baik	100	133.235.000	100	139.896.750	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
303.21	Program peningkatan produksi hasil peternakan			43.605.000		45.785.250		
		Daging Ruminansia	1.177.418		1.233.486			
		Daging Unggas	5.122.583		5.366.516			
		Telur	420.000		440.000			
		Susu	193.800		197.600			
2	Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah ternak yang dipelihara	8	11.700.000	8	12.285.000	Kota Magelang	DAU
8	Pengembangan agribisnis peternakan	Pelatihan budidaya ternak ayam buras dan budidaya komoditas pakan penunjang	3 Komoditas	20.655.000	3 Komoditas	21.687.750	Kota Magelang	DAU
20	Pengadaan IB dan Peralatan IB	Terwujudnya perbibitan ternak di Kota Magelang	1 Ekor	11.250.000	1 Ekor	11.812.500	Kota Magelang	DAU
303.22	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan			165.666.000		173.949.300		
		Persentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi halal	1,82		2,42			
7	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Terfasilitasinya pemasaran komoditas peternakan	100 kali	105.374.000	100 kali	110.642.700	Kota Magelang	DAU
8	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	Pengetahuan pengusaha bidang peternakan	160 Orang	28.967.000	160 Orang	30.415.350	Kota Magelang	DAU
10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Tersedianya laporan informasi harga dan pengawasan obat hewan	16 Laporan	31.325.000	16 Laporan	32.891.250	Kota Magelang	DAU
303.23	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan			58.875.000		61.818.750		
		Jumlah pelaku usaha peternakan organik:						
		Peternak ayam buras/ ayam broiler	1		2			
		Peternak kelinci	1		2			
		Peternak kambing/domba	1		2			
		Rasio peternak terlatih	85%		85%			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Tersedianya sarana dan prasarana RPH	1 Sampel	32.375.000	1 Sampel	33.993.750	Kota Magelang	DAU
4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	Tercapainya peningkatan pengetahuan teknologi pasca panen peternakan	90 Jenis	26.500.000	90 Jenis	27.825.000	Kota Magelang	DAU
303.24	Program pelayanan kesehatan masyarakat veteriner			333.003.000		349.653.150		
		Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV	1,82%		2,42%			
1	Peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan masyarakat kesmavet	Jumlah sampel bahan pangan asal hewan yang diuji	400 sampel	30.788.000	400 sampel	32.327.400	Kota Magelang	DAU
2	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan Asal Hewan	Terlaksananya pengujian sampel dan sosialisasi	100 Orang	27.907.000	100 Orang	29.302.350	Kota Magelang	DAU
5	Operasionalisasi Rumah Potong hewan dan labkesmasvet	Jumlah ternak yang diperiksa dan dipotong untuk menghasilkan daging yang ASUH	4350 Ekor	45.945.000	4350 Ekor	48.242.250	Kota Magelang	DAU
5	Pengawasan Peredaran Pangan Asal Hewan	Operasi penertiban dan penjualan daging dan hasil ternak dari luar daerah	6 kali	194.402.000	6 kali	204.122.100	Kota Magelang	DAU
7	Pembinaan pelaku usaha pemotongan di RPH	Pembinaan pelaku usaha di RPH	4 Kegiatan	33.961.000	4 Kegiatan	35.659.050	Kota Magelang	DAU
304.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan			103.943.000		109.140.150		
6	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan	Jumlah wisatawan yang terlayani	50000 orang	103.943.000	50000 orang	109.140.150	Kota Magelang	DAU
304.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan			216.712.000		227.547.600		
4	Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata	Terpeliharanya konservasi hutan Gn. Tidar	100 Ha	201.498.000	100 Ha	211.572.900	Kota Magelang	DAU
5	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pelestarian Gn. Tidar	250 Orang	15.214.000	250 Orang	15.974.700	Kota Magelang	DAU
301.20	Program pengembangan budidaya perikanan			229.385.000		240.854.250		
		Produksi Ikan	160,65		162,41			
		Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB	0		50%			
		Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB	30%		40%			
1	Pengembangan bibit ikan unggul	Terlatihnya pembudidaya ikan	25 orang	22.450.000	25 orang	23.572.500	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Terlaksananya operasional pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	25 orang	23.600.000	25 orang	24.780.000	Kota Magelang	DAU
3	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Temu usaha, gelar produk, pembinaan dan lomba serta pelatihan kelembagaan kelompok pelaku perikanan	40 orang	30.471.000	40 orang	31.994.550	Kota Magelang	DAU
25	Operasional balai benih ikan	Terlaksananya operasionalisasi Balai Benih Ikan Jurang Ombo dan Potrobangsari	1 Tahun	118.192.000	1 Tahun	124.101.600	Kota Magelang	DAU
26	Pelatihan ikan hias	Terlaksananya pelatihan ikan hias	15 orang	34.672.000	15 orang	36.405.600	Kota Magelang	DAU
301.22	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan			124.695.000		130.929.750		
		Luas lahan perikanan organik	0,2		0,3			
3	Penyuluhan Pengelolaan Bidang Perikanan	Penyuluhan gemar ikan dan alih teknologi informasi pengolahan hasil perikanan	1 kegiatan	124.695.000	1 kegiatan	130.929.750	Kota Magelang	DAU
301.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			105.092.000		110.346.600		
		Persentase unit pengolahan ikan yang telah bersertifikasi SKP	0		0			
		Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	2		3			
12	Pembinaan kemampuan dan keterampilan pengelolaan/pemasaran perikanan	Jumlah pengolah hasil perikanan terlatih	40 orang	34.334.000	40 orang	36.050.700	Kota Magelang	DAU
13	Operasionalisasi sentra pengolahan ikan	Terlaksananya operasionalisasi sentra pengolahan ikan	1 Tahun	39.709.000	1 Tahun	41.694.450	Kota Magelang	DAU
14	Pembinaan pelaku pemasaran hasil perikanan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pemasar hasil perikanan	40 orang	31.049.000	40 orang	32.601.450	Kota Magelang	DAU
		JUMLAH		4.346.046.000		4.563.348.300		

Matriks
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Pilihan
Bidang : Perindustrian
OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif	100%	1.651.933.000	100%	1.734.529.650		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran administrasi kantor	12 bulan	4.802.000	12 bulan	5.042.100	Disperindag	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kelancaran tugas	4 langganan	497.280.000	4 langganan	522.144.000	Disperindag	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran Tugas	22 STNK	45.925.000	22 STNK	48.221.250	Disperindag	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertib administrasi dan laporan keuangan	10 Orang	240.684.000	10 Orang	252.718.200	Disperindag	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor	19 jenis/1 orang	73.286.000	19 jenis/1 orang	76.950.300	Disperindag	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	pelayanan administrasi kantor yang baik	35 jenis	35.000.000	35 jenis	36.750.000	Disperindag	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran administrasi kantor	12 jenis	60.000.000	12 jenis	63.000.000	Disperindag	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	11 jenis	23.457.000	11 jenis	24.629.850	Disperindag	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan wawasan PNS	3 jenis	11.880.000	3 jenis	12.474.000	Disperindag	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	16 buah	15.025.000	16 buah	15.776.250	Disperindag	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran pelaksanaan tugas	11 bulan/1 orang	76.427.000	11 bulan/1 orang	80.248.350	Disperindag	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelancaran pelaksanaan tugas	58 kali	200.000.000	58 kali	210.000.000	Disperindag	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Meningkatnya kinerja SKPD	3 orang/bulan	167.567.000	3 orang/bulan	175.945.350	Disperindag	DAU
20	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	PBB Pasar Cacaban dan Rejowinangun	1 thn	200.600.000	1 thn	210.630.000	Disperindag	DAU
307.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif	100%	679.057.000	100%	713.009.850		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tercapainya kebersihan dan kerapian kantor	3.910m2	101.478.000	3.910m2	106.551.900	Disperindag	DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kelancaran pelaksanaan tugas	22 unit	538.478.000	22 unit	565.401.900	Disperindag	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terawatnya perlengkapan kantor	3 unit	10.872.000	3 unit	11.415.600	Disperindag	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terawatnya peralatan kantor	24 unit	24.729.000	24 unit	25.965.450	Disperindag	DAU
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpenuhinya mebeleur yang baik	30 unit	3.500.000	30 unit	3.675.000	Disperindag	DAU
307.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif	100%	94.970.000	100%	99.718.500		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan triwulanan (4), RF (12), LKPJ (1), LPPD (1)	18 Laporan	16.800.000	18 Laporan	17.640.000	Disperindag	DAU
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran dan prognosis	2 Laporan	11.314.000	2 Laporan	11.879.700	Disperindag	DAU
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan akhir tahun	1 dokumen	10.600.000	1 dokumen	11.130.000	Disperindag	DAU
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tercapainya pelaksanaan kegiatan, program dan laporan	2 laporan	6.820.000	2 laporan	7.161.000	Disperindag	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	Akuntabilitas publik	2 Laporan	29.281.000	2 Laporan	30.745.050	Disperindag	DAU
25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Tercapainya pelaksanaan kegiatan, program dan laporan	4 Laporan	13.720.000	4 Laporan	14.406.000	Disperindag	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) SKPD	Akuntabilitas publik	1 laporan	6.435.000	1 laporan	6.756.750	Disperindag	DAU
307.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	4%	23.655.000	4%	24.837.750		
		Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP,haccp, PRODUKSI BERSIH, iso,gkm,sni, DLL)	4,10%		4,15%			
4	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Tersosialisasikannya regulasi penggunaan bahan tambahan makanan dan minuman yang diperkenankan	50 IKM	8.200.000	50 IKM	8.610.000	Kota Magelang	DAU
5	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Terwujudnya penerapan prinsip-prinsip HACCP pada IKM Makanan Ringan	20 orang	15.455.000	20 orang	16.227.750	Kota Magelang	DAU
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			58.986.000		61.935.300		
		Frekuensi Patroli Satpol PP	3 kali/hari		3 kali/hari			
		Tingkat Penyelesaian pelanggaran perda	90%		92%			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,52		6,46			
		Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	10		11,67			
		Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertamanan dan ketertiban umum (K3)	94,50%		95%			
		Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	70,47		74,25			
		Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	11,27%		14,26%			
		cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	9		12			
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah peserta	375 org	42.200.000	375 org	44.310.000	Kota Magelang	DAU
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan situasi dan kondisi keamanan an kenyamanan pasar	4 dokumen	16.786.000	4 dokumen	17.625.300	Kota Magelang	DAU
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			51.132.000		53.688.600		DAU
		Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	3,3		4,3			
		Persentase sampah perkotaan yang ditangani	88%		89%			
		Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	3,30%		4,30%			
7	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Jumlah peserta pelatihan	280 orang	32.610.000	280 orang	34.240.500	Kota Magelang	DAU
12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan pengelolaan persampahan lingkungan pasar	4 buku	18.522.000	4 buku	19.448.100	Kota Magelang	DAU
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City	100%	12.680.000	100%	13.314.000		
19	Pengelolaan Website	Kelancaran pelaksanaan tugas	4 bulan	12.680.000	4 bulan	13.314.000	Kota Magelang	DAU
211.15	Program Peningkatan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	3%	180.619.000	3%	189.649.950		
8	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	UMKM yang bersertifikat halal dan merk	30 UMKM	70.606.000	30 UMKM	74.136.300	Kota Magelang	DAU
18	Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau	Terwujudnya kualitas SDM dan hasil produksi UMKM yang kompetitif	100 UMKM	64.188.000	100 UMKM	67.397.400	Kota Magelang	DAU
23	Sosialisasi Kredit Usaha Produktif dan Izin Usaha Mikro kecil	Forum UMKM Kota Magelang	300 UMKM	45.825.000	300 UMKM	48.116.250	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	2700 unit	653.196.000	2700 unit	685.855.800		
4	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrotlogian daerah	Terlindungnya konsumen pengguna alat UTPP	1 pasar	160.457.000	1 pasar	168.479.850	Kota Magelang	DAU
14	Pembinaan dan Monitoring Barang Legal	Jumlah laporan	4 laporan	40.486.000	4 laporan	42.510.300	Kota Magelang	DAU
15	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan	Rapat Koordinasi dan laporan	12 laporan	452.253.000	12 laporan	474.865.650	Kota Magelang	DAU
307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat		3%	475.020.000	3%		
		Peningkatan daya saing IKM Formal	3,1%		3,15%		Kota Magelang	DAU
1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Terkelolanya Magelang Craft Center	1 unit	59.426.000	1 unit	62.397.300	Kota Magelang	DAU
8	Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau	Meningkatnya ketrampilan pelaku usaha dan kualitas produk IKM Kota Magelang	50 orang	141.594.000	50 orang	148.673.700	Kota Magelang	DAU
12	Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang	Meningkatnya perkembangan industri kerajinan Kota Magelang secara terstruktur	9 kali	199.000.000	9 kali	208.950.000	Kota Magelang	DAU
13	Penyusunan Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota	Naskah Akademik dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota	2 dokumen (Naskah Akademik dan Raperda RPIK)	75.000.000	2 dokumen (Naskah Akademik dan Raperda RPIK)	78.750.000	Kota Magelang	DAU
211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat		25%	67.448.000	25%		
		Jumlah wirausaha baru	75 UMKM		100 UMKM			
10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Semakin meningkatnya tertib administrasi koperasi	3 laporan	13.191.000	3 laporan	13.850.550	Kota Magelang	DAU
18	Penilaian Koperasi Berprestasi	Terwujudnya tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi/ Predikat Koperasi, Penetapan Koperasi Terbaik	50 koperasi	9.517.000	50 koperasi	9.992.850	Kota Magelang	DAU
22	Pembinaan usaha koperasi dan UKM	Meningkatnya kemampuan mengelola usaha koperasi	80 orang	44.740.000	80 orang	46.977.000	Kota Magelang	DAU
307.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat		5%	13.849.000	5%		
		Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi teknologi tepat guna		5,04%		5,09%		
1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Terwujudnya hasil produksi bersih IKM Makanan	20 orang	13.849.000	20 orang	14.541.450	Kota Magelang	DAU
211.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat		3%	163.976.000	3%		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan	3%		3%		Kota Magelang	DAU
12	Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan	Peningkatan kapasitas UKM	50 Orang	120.200.000	50 Orang	126.210.000	Kota Magelang	DAU
13	Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah	Tersedianya data UMKM Kota Magelang	1 laporan	43.776.000	1 laporan	45.964.800	Kota Magelang	DAU
306.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya kontribusi perdagangan bagi perekonomian daerah	100%	7.533.000	100%	7.909.650		
		Jumlah ekspor produk ke LN	US\$950,000		US\$ 1.100.000			
8	Membangun jejaring dengan eksportir	Terwujudnya kepastian pasar produk potensial ekspor	20 orang	7.533.000	20 orang	7.909.650	Kota Magelang	DAU
211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	90%	130.818.000	90%	137.358.900		
		Prosentase koperasi aktif	93,25%		93,40%			
		Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP	25%		27%			
10	Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM	Peningkatan Kapasitas kelembagaan koperasi	145 orang	42.759.000	145 orang	44.896.950	Kota Magelang	DAU
11	Pembentukan Koperasi baru	Meningkatnya jumlah koperasi	4 koperasi	37.857.000	4 koperasi	39.749.850	Kota Magelang	DAU
14	Penyusunan Profil Koperasi	Data koperasi yang akurat	10 buku	6.280.000	10 buku	6.594.000	Kota Magelang	DAU
15	Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	Terwujudnya pengelolaan koperasi sesuai dengan aturan yang berlaku	15 rekomendasi	5.967.000	15 rekomendasi	6.265.350	Kota Magelang	DAU
16	Sarasehan Gerakan Koperasi	Terwujudnya pengelolaan koperasi yang baik dari semua aspek	150 koperasi	31.715.000	150 koperasi	33.300.750	Kota Magelang	DAU
19	Pembinaan prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Terwujudnya organisasi koperasi yang baik/tertib dan tersedianya pedoman kelembagaan koperasi	40 Orang	6.240.000	40 Orang	6.552.000	Kota Magelang	DAU
306.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya kontribusi perdagangan bagi perekonomian daerah	3%	924.021.000	3%	970.222.050		
		Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	3%		4%			
3	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Meningkatnya pangsa pasar IKM/UKM	7 pameran	913.326.000	7 pameran	958.992.300	Kota Magelang	DAU
10	Penyusunan Profil Perusahaan	Tersedianya informasi perusahaan yang akurat	1 jenis	10.695.000	1 jenis	11.229.750	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
307.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	11 sentra	36.256.000	11 sentra	38.068.800		
		Jumlah sentra industri	11		12			
5	Diagnosis sentra-sentra industri	Terwujudnya identifikasi permasalahan sentra-sentra, rekomendasi dan rencana aksi	2 sentra	36.256.000	2 sentra	38.068.800	Kota Magelang	DAU
306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan		100 %	1.140.301.000	100 %	1.197.316.050		
		Cakupan PKL yang dibina	8%		10%			
		Jumlah shelter PKL yang dikelola	13		14			
1	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	PKL yang dibina	400 orang	52.354.000	400 orang	54.971.700	Kota Magelang	DAU
3	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Lokasi PKL yang tertata di Jl. Sigaluh, Jl. Beringin, Rejo Mulyo	3 lokasi	12.237.000	3 lokasi	12.848.850	Kota Magelang	DAU
9	Pendataan pedagang kaki lima	Dokumen pedagang kaki lima	3 dokumen	13.756.000	3 dokumen	14.443.800	Kota Magelang	DAU
17	Pembangunan Shelter PKL Jl. Alibasah Sentot	Terbangunnya shelter PKL	1 unit	188.124.000	1 unit	197.530.200	Kota Magelang	DAU
18	Penerbitan Tanda Daftar Usaha PKL	Tanda daftar usaha PKL	500 lembar	13.674.000	500 lembar	14.357.700	Kota Magelang	DAU
19	Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang	Piket patroli pedagang kaki lima	1 Tahun	83.077.000	1 Tahun	87.230.850	Kota Magelang	DAU
20	Pemeliharaan shelter PKL	Jumlah shelter yang dipelihara	16 shelter	67.274.000	16 shelter	70.637.700	Kota Magelang	DAU
24	Rehabilitasi sedang/berat shelter PKL	Shelter sigaluh	1 lokasi	299.437.000	1 lokasi	314.408.850	Kota Magelang	DAU
26	Penyediaan jasa keamanan shelter PKL	Tenaga keamanan shelter	12 orang	197.506.000	12 orang	207.381.300	Kota Magelang	DAU
28	Pembangunan Shelter PKL Jl. Kalingga	Shelter PKL Jl. Kalingga	1 Paket	212.862.000	1 Paket	223.505.100	Kota Magelang	DAU
306.20	Program Pengelolaan Pasar		100 %	3.990.277.000	100 %	4.189.790.850		
		Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar	7%		23%			
		Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional	10%		10%			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cakupan pedagang pasar yang dibina	8%		10%			
		Persentase pasar tradisional yang dikelola	75%		80%			
1	Penempatan Pedagang Pasar	Jumlah pedagang pasar	700 orang	22.507.000	700 orang	23.632.350	Kota Magelang	DAU
2	Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban	Jumlah pasar yang dikelola	1 pasar	10.770.000	1 pasar	11.308.500	Kota Magelang	DAU
3	Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun	Jumlah pasar yang dikelola	1 pasar	36.395.000	1 pasar	38.214.750	Kota Magelang	DAU
5	Operasi Penertiban Pasar	Jumlah operasi penertiban pasar (Rejowinangun 3x, gotong royong 2x, Cacaban 1x, Kebonpolo 1 x, Sidomukti 1 x)	8 kali	60.587.000	8 kali	63.616.350	Kota Magelang	DAU
6	Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo	Jumlah pasar yang dikelola	1 pasar	21.192.000	1 pasar	22.251.600	Kota Magelang	DAU
7	Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong	Jumlah pasar yang dikelola	1 pasar	24.230.000	1 pasar	25.441.500	Kota Magelang	DAU
11	Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar	Jumlah jasa kebersihan lingkungan pasar-pasar	53 orang	852.876.000	53 orang	895.519.800	Kota Magelang	DAU
13	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)	Administrasi penatausahaan pasar	12 bln	13.000.000	12 bln	13.650.000	Kota Magelang	DAU
14	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)	Administrasi penatausahaan pasar	12 bln	9.000.000	12 bln	9.450.000	Kota Magelang	DAU
15	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)	Administrasi penatausahaan pasar	12 bln	11.000.000	12 bln	11.550.000	Kota Magelang	DAU
16	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)	Administrasi penatausahaan pasar	12 bln	7.673.000	12 bln	8.056.650	Kota Magelang	DAU
17	Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar	Tenaga piket lingkungan pasar	8 orang	708.600.000	8 orang	744.030.000	Kota Magelang	DAU
18	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti	Administrasi penatausahaan pasar	12 bln	11.000.000	12 bln	11.550.000	Kota Magelang	DAU
19	Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti	Jumlah pasar yang dikelola	1 pasar	15.700.000	1 pasar	16.485.000	Kota Magelang	DAU
20	Lomba Penataan Barang Dagangan dan K3 Pasar Tradisional	Jumlah kegiatan lomba	1 kali	53.562.000	1 kali	56.240.100	Kota Magelang	DAU
21	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar	Estalase foodcourt Pasar Rejowinangun	40 buah	122.410.000	40 buah	128.530.500	Kota Magelang	DAU
22	Pendataan Pedagang Pasar	Jumlah buku data pedagang pasar	15 buku	17.104.000	15 buku	17.959.200	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Pembinaan Petugas Retribusi Pasar	Terbinanya petugas retribusi pasar	5 pasar	37.277.000	5 pasar	39.140.850	Kota Magelang	DAU
24	Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar	Penarikan retribusi sesuai aturan yang ada	5 pasar	43.296.000	5 pasar	45.460.800	Kota Magelang	DAU
25	Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar	Laporan administrasi pendapatan daerah	12 laporan	92.634.000	12 laporan	97.265.700	Kota Magelang	DAU
26	Survey Potensi Retribusi Pasar	Laporan data potensi retribusi pasar	1 laporan	46.382.000	1 laporan	48.701.100	Kota Magelang	DAU
27	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar	Laporan adminitrasi pemungutan retribusi pasar	10 laporan	30.700.000	10 laporan	32.235.000	Kota Magelang	DAU
28	Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar	Talud Pasar Cacaban	60 M2	1.428.050.000	60 M2	1.499.452.500	Kota Magelang	DAU
29	Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar	Gedung Kantor Pasar Cacaban 2 lantai	100 M2	171.938.000	100 M2	180.534.900	Kota Magelang	DAU
30	Promosi Pasar Tradisional	Terselenggaranya promosi pasar tradisional	1 kegiatan	142.394.000	1 kegiatan	149.513.700	Kota Magelang	DAU
		JUMLAH		10.355.727.000		10.873.513.350		

Matriks
 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
 Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang : Administrasi Pemerintahan
 OPD : Sekretariat Daerah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan	100%	7.811.253.000	100%	8.201.815.650		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat, materai, perangko dan pengiriman	12 Bulan	16.255.000	12 Bulan	17.067.750	Sekda	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya fasilitas telepon, air, listrik, internet dan TV kabel	12 Bulan	1.906.800.000	12 Bulan	2.002.140.000	Sekda	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya tertib administrasi perijinan kendaraan dinas/operasional	KIR : 9 unit dan STNK 88 lembar	78.901.000	KIR : 9 unit dan STNK 88 lembar	82.846.050	Sekda	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan dan barang di Setda Kota Magelang	12 Bulan	769.786.000	12 Bulan	808.275.300	Sekda	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan gedung kantor di lingkungan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan	12 Bulan	723.067.000	12 Bulan	759.220.350	Sekda	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	179.834.000	12 bulan	188.825.700	Sekda	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	12 Bulan	214.544.000	12 Bulan	225.271.200	Sekda	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 Bulan	64.456.000	12 Bulan	67.678.800	Sekda	DAU
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan karangan bunga, cinderamata dan tempat cinderamata	12 Bulan	263.000.000	12 Bulan	276.150.000	Sekda	DAU
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga secara rutin untuk kelancaran kegiatan kerumahtanggaan	12 Bulan	30.750.000	12 Bulan	32.287.500	Sekda	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan buku/kepuustakaan	12 Bulan	89.196.000	12 Bulan	93.655.800	Sekda	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan kebutuhan pengisian tabung gas rumah tangga	4 rumah tangga	145.571.000	4 rumah tangga	152.849.550	Sekda	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman harian pegawai	12 bulan	1.225.374.000	12 bulan	1.286.642.700	Sekda	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	1.786.705.000	12 Bulan	1.876.040.250	Sekda	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Pegawai honorer/tenaga kontrak	4 orang	84.179.000	4 orang	88.387.950	Sekda	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH	Medical Check Up KDH dan WKDH	1 Kali	20.000.000	1 Kali	21.000.000	Sekda	DAU
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah Bagian yang diampu dan dikelola dalam melaksanakan tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Kota Magelang	9 Bagian	25.360.000	9 Bagian	26.628.000	Sekda	DAU
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD	Pelayanan kedinasan dan pimpinan Sekretariat Daerah Kota Magelang	12 Bulan	187.475.000	12 Bulan	196.848.750	Sekda	DAU
401.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	100%	3.474.978.000	100%	3.648.726.900		
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor Sekretariat Daerah	5 jenis	263.305.000	5 jenis	276.470.250	Sekda	DAU
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor Sekretariat Daerah	5 jenis	506.773.000	5 jenis	532.111.650	Sekda	DAU
10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	4 jenis	155.850.000	4 jenis	163.642.500	Sekda	DAU
18	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Rumah jabatan KDH dan WKDH	2 Unit	134.000.000	2 Unit	140.700.000	Sekda	DAU
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terwujudnya rumah dinas dan mess yang layak dan nyaman	7 Unit	51.790.000	7 Unit	54.379.500	Sekda	DAU
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang memadai	6 Unit	492.400.000	6 Unit	517.020.000	Sekda	DAU
21	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Menambah kelancaran tugas KDH dan Wakil KDH	2 Unit	180.100.000	2 Unit	189.105.000	Sekda	DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai	43 unit roda 2; 45 unit roda 4	1.424.150.000	43 unit roda 2; 45 unit roda 4	1.495.357.500	Sekda	DAU
23	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kelancaran kegiatan kerumahtanggaan rumah jabatan dan rumah dinas karena perlengkapan rumah tangga terpelihara secara rutin/berkala	12 Bulan	16.320.000	12 Bulan	17.136.000	Sekda	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	12 Bulan	73.800.000	12 Bulan	77.490.000	Sekda	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kerja dan kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	12 bulan	166.230.000	12 bulan	174.541.500	Sekda	DAU
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terwujudnya sarana mebeleur kantor yang memadai	4 Jenis	10.260.000	4 Jenis	10.773.000	Sekda	DAU
401.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya aparatur yang tertib dan disiplin dalam penyelenggaraan permintaan	100%	102.200.000	100%	107.310.000		DAU
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas KDH, Wk. KDH dan Sekda	11 Stel	9.900.000	11 Stel	10.395.000	Sekda	DAU
4	Pengadaan pakaian KORPRI	Pakaian KORPRI KDH, Wk.KDH dan Sekda	3 Stel	3.300.000	3 Stel	3.465.000	Sekda	DAU
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian khusus hari-hari tertentu KDH & WKDH, petugas protokoler ajudan, Sekda dan pakaian adat daerah	7 Paket	89.000.000	7 Paket	93.450.000	Sekda	DAU
401.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			42.040.000		44.142.000		
	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Terlaksananya pembinaan terhadap penyelenggaraan administrasi kecamatan dan kelurahan	102 Orang	42.040.000	102 Orang	44.142.000	Sekda	DAU
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan	100%	207.224.000	100%	217.585.200		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi laporan capaian kinerja keuangan/anggaran Setda	4 kegiatan	60.938.000	4 kegiatan	63.984.900	Sekda	DAU
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran dan prognosis Setda Kota Magelang	2 Laporan	10.260.000	2 Laporan	10.773.000	Sekda	DAU
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun realisasi APBD dan Neraca Setda Kota Magelang	2 Laporan	11.705.000	2 Laporan	12.290.250	Sekda	DAU
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya dokumen Monev perencanaan Setda Kota Magelang	2 Dokumen	12.456.000	2 Dokumen	13.078.800	Sekda	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	Data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan	2 kegiatan	42.084.000	2 kegiatan	44.188.200	Sekda	DAU
24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan SKPD	Laporan Sinkronisasi data aset barang dan keuangan	12 Laporan	60.630.000	12 Laporan	63.661.500	Sekda	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) SKPD	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Setda	1 dokumen	9.151.000	1 dokumen	9.608.550	Sekda	DAU
106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya			64.007.000		67.207.350		
		Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	100%		100%			
		Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompk sosial ekonomi sejenis lainnya	10,00%		11,00%			
	Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian	Terpantaunya pelaksanaan pemberian bantuan bansos santunan kematian	12 Bulan	64.007.000	12 Bulan	67.207.350	Kota Magelang	DAU
405.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			276.946.000		290.793.300		
		Persentase ASN yang memiliki kualifikasi:						
		Pendidikan S1	46%		47%			
		Pendidikan S2	8,50%		9%			
		Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKD	100		100			
		Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	0,41		0,46			
		Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	100%		100%			
		Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	5%		5%			
		Persentase ASN yang dijatuhi hukuman	0,10%		0,08%			
		Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	41%		41%			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Penyusunan Analisis Jabatan	Laporan Analisis Jabatan	28 SKPD	146.778.000	28 SKPD	154.116.900	Kota Magelang	DAU
36	Penyusunan Analisis Beban Kerja	Tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja	35 dokumen	130.168.000	35 dokumen	136.676.400	Kota Magelang	DAU
211.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			90.128.000		94.634.400		
		Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM	3%		4%			
		Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	10%		10%			
20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan lembaga keuangan mikro	Monitoring dan pelaporan pengelolaan lembaga keuangan mikro di Kota Magelang	4 Laporan	37.236.000	4 Laporan	39.097.800	Kota Magelang	DAU
22	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat	Pelaksanaan Monev KUR	4 laporan	52.892.000	4 laporan	55.536.600	Kota Magelang	DAU
214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			84.340.000		88.557.000		
		Meningkatnya ormas yang memiliki SKT	27,79%		35,19%			
		Persentase pemenuhan data statistik	90%		95%			
11	Pengendalian Inflasi Daerah	koordinasi pengendalian laju inflasi di Kota Magelang	4 Laporan	84.340.000	4 Laporan	88.557.000		
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			1.104.229.000		1.159.440.450		
		Ketersediaan SOP persandian	Ada		Ada			
		Tingkat kapasitas SDM persandian	1		2			
		Jumlah SKPD yang menerapkan SOP persandian	14		21			
		Ketersediaan SOP persandian	50%		100%			
		Tingkat kapasitas SDM persandian	100%		100%			
		Persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian	60%		90%			
2	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Meningkatnya Sistem Pengamanan Informasi Pemerintah Kota Magelang	12 Bulan	122.921.000	12 Bulan	129.067.050	Kota Magelang	DAU
9	Siaran keliling	Meningkatnya informasi kepada masyarakat melalui publikasi keliling	120 Kegiatan	15.540.000	120 Kegiatan	16.317.000	Kota Magelang	DAU
11	Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik	Meningkatnya arus informasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik	12 Bulan	118.182.000	12 Bulan	124.091.100	Kota Magelang	DAU
15	Pengelolaan Website	Meningkatnya Arus Informasi kepada Masyarakat melalui Website	12 bulan	13.666.000	12 bulan	14.349.300	Kota Magelang	DAU
20	Peningkatan kemitraan dengan media massa dan kinerja kehumasan	Meningkatnya kemitraan dengan media massa dan kinerja kehumasan	1 Kegiatan	471.780.000	1 Kegiatan	495.369.000	Kota Magelang	DAU
25	Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Tersedianya Foto, Baliho/Spanduk, Naskah Sambutan dan Rekaman Audio Video Kegiatan Penting Pemerintah Daerah	12 bulan	362.140.000	12 bulan	380.247.000	Kota Magelang	DAU
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			85.374.000		89.642.700	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Frekuensi Patroli Satpol PP	3 kali/hari		3 kali/hari			
		Tingkat Penyelesaian pelanggaran perda	90%		92%			
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,52		6,46			
		Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	10		11,67			
		Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertaman dan ketertiban umum (K3)	94,50%		95%			
		Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	70,47		74,25			
		Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	11,27%		14,26%			
		cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	9		12			
9	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ormas dan orpol	Terlaksananya kegiatan Tarawih Keliling Walikota dan Forpimda Kota Magelang	4 Kegiatan	85.374.000	4 Kegiatan	89.642.700	Kota Magelang	DAU
402.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			522.070.000		548.173.500		
		Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	30%		35%			
		Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	80%		80%			
		Persentase zona integritas yang terbentuk	10%		20%			
		Nilai hasil LKJip SKPD	CC		BB			
		Persentase SKPD yang direview LKJIP	35%		45%			
		Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	90%		95%			
		Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	60%		50%			
		Penyelesaian TLHP BPK meningkat	90%		95%			
		Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	90%		95%			
		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	65%		70%			
		persentase SPM yang mencapai target nasional	65%		70%			
		Tingkat pemahaman tentang SAKIP						
13	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)	Tersusunnya Buku lkpj Walikota Magelang	95 Buku	182.315.000	95 Buku	191.430.750	Kota Magelang	DAU
15	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	70 Buku	115.931.000	70 Buku	121.727.550	Kota Magelang	DAU
16	Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah	Tersusunnya laporan hasil PKM Kota Magelang	1 Buku	12.801.000	1 Buku	13.441.050	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang	Tersedianya informasi penerapan SAKIP di Pemerintah kota Magelang	3 kegiatan	76.090.000	3 kegiatan	79.894.500	Kota Magelang	DAU
28	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Perjanjian Target Kinerja Tahun 2016	4 dokumen	50.346.000	4 dokumen	52.863.300	Kota Magelang	DAU
29	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2016	1 dokumen	23.136.000	1 dokumen	24.292.800	Kota Magelang	DAU
30	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Kota	Tersedianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kota Magelang	1 dokumen	61.451.000	1 dokumen	64.523.550	Kota Magelang	DAU
306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			24.519.000		25.744.950		
		Jumlah alat UTTP yang ditera		2.700		2.800		
		Data & informasi cukai palsu/illegal	NA		NA			
12	Penyampaian informasi ketentuan di bidang cukai dan program pengelolaan DBHCHT	kegiatan penyampaian informasi ketentuan di bidang cukai dan program pengelolaan DBHCHT	1 Kegiatan	24.519.000	1 Kegiatan	25.744.950	Kota Magelang	DAU
403.16	Program Kerjasama Pembangunan			531.885.000		558.479.250		
		Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti		2		3		
3	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Kajian Teknis dan Pengendalian mutu pekerjaan konstruksi di Kota Magelang	12 paket	531.885.000	12 paket	558.479.250	Kota Magelang	DAU
106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			310.064.000		325.567.200		
		Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos		100%		100%		
		Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		20,00%		30,00%		
22	Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial	Terkelolanya permohonan hibah dan bansos dengan tepat sasaran dan sesuai ketentuan	1500 pemohon	243.609.000	1500 pemohon	255.789.450	Kota Magelang	DAU
27	Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	terwujudnya pelaksanaan program raskin/rastra sesuai dengan ketentuan yang berlaku	12 Kegiatan	66.455.000	12 Kegiatan	69.777.750	Kota Magelang	DAU
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			80.819.000		84.859.950		
		Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati		20%		30%		
4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Teridentifikasinya permasalahan pembangunan Kota Magelang	12 Laporan	72.319.000	12 Laporan	75.934.950	Kota Magelang	DAU
35	Koordinasi penyambutan penghargaan tentang lingkungan hidup	penyambutan dan tasyakuran Adipura	2 Laporan	8.500.000	2 Laporan	8.925.000	Kota Magelang	DAU
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			59.213.000		62.173.650		
		Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga		44,74%		47,37%		DAU
17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Indeks Pembangunan Gender di Kota Magelang	4 Laporan	59.213.000	4 Laporan	62.173.650	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Terwujudnya mutu pelayanan publik yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	12 bulan	2.986.185.000	12 bulan	3.135.494.250		
		Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%		100%			
1	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota ormas dan orsos	12 Bulan	181.740.000	12 Bulan	190.827.000	Kota Magelang	DAU
2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	terlaksananya kegiatan dalam rangka pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	12 Bulan	73.749.000	12 Bulan	77.436.450	Kota Magelang	DAU
5	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Kunjungan kerja / Inspeksi KDH & WKDH ke SKPD dan Institusi lainnya	12 Bulan	465.676.000	12 Bulan	488.959.800	Kota Magelang	DAU
6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terjalin koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	12 Bulan	478.380.000	12 Bulan	502.299.000	Kota Magelang	DAU
7	Koordinasi stabilitas daerah	Terlaksananya fasilitasi koordinasi stabilitas daerah dan laporan kegiatan	100%	743.719.000	100%	780.904.950	Kota Magelang	DAU
15	Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru	Laporan hasil rakor, Kunjungan ke pusat keramaian dan hiburan tahun baru	3 Laporan	48.210.000	3 Laporan	50.620.500	Kota Magelang	DAU
16	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan tamu pemerintah Kota Magelang	12 bulan	994.711.000	12 bulan	1.044.446.550	Kota Magelang	DAU
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terwujudnya tertib administrasi dokumen/kearsipan daerah	12 bulan	28.364.000	12 bulan	29.782.200		
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%		52%			
		Persentase arsip dan risalah	82%		82%			
		Persentase Penyelamatan Arsip	47%		53%			
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah bagian yang diampu dan dikelola dalam arsip surat menyurat dan arsip laporan SPJ/Keuangan di lingkungan Setda Kota Magelang	9 Bagian	28.364.000	9 Bagian	29.782.200	Kota Magelang	DAU
102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			25.120.000		26.376.000		
		Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%		100%			
		Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%			
		Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%			
		Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%			
9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Terselenggaranya pertemuan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota Magelang	150 orang	25.120.000	150 orang	26.376.000	Kota Magelang	DAU
401.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			84.104.000		88.309.200		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%		100%			
		Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	56%		60%			
15	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Tersedianya Data Kepuasan Masyarakat di Bidang Pelayanan Publik	28 SKPD	84.104.000	28 SKPD	88.309.200	Kota Magelang	DAU
402.17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			57.332.000		60.198.600		
		Cakupan pemeriksaan (diperinci dari Orbik SKPD, Satker dan BUMD plus targetnya)	60%		65%			
		Persentase Aparat SPIP aktif	60%		65%			
		Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	75%		80%			
3	Penyusunan Bagan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah	Buku Bagan Jabatan SKPD Kota Magelang	2 Dokumen	19.836.000	2 Dokumen	20.827.800	Kota Magelang	DAU
4	Penyusunan Pedoman Pakaian Dinas	Buku Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang	1 dokumen	37.496.000	1 dokumen	39.370.800	Kota Magelang	DAU
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			746.739.000		784.075.950		
		Prosentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	69,60%		72,20%			
		Database ormas yang akurat	69,00%		71,00%			
		Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	27,79%		35,19%			
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya doa bersama antarumat beragama di Kota Magelang	1 Kegiatan	169.185.000	1 Kegiatan	177.644.250	Kota Magelang	DAU
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	peningkatan wawasan kebangsaan	1 Kegiatan	140.807.000	1 Kegiatan	147.847.350	Kota Magelang	DAU
5	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	Terlaksananya doa bersama / tasyakuran kegiatan Hari Jadi Kota Magelang	1 Kegiatan	53.884.000	1 Kegiatan	56.578.200	Kota Magelang	DAU
6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Meningkatnya jiwa patriotisme bagi ASN Pemerintah Kota Magelang dan Warga Masyarakat Kota Magelang	5 Kegiatan	382.863.000	5 Kegiatan	402.006.150	Kota Magelang	DAU
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			24.747.000		25.984.350		
		Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	87,50%		100,00%			
3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Terselenggaranya koordinasi penanganan anak putus sekolah di Kota Magelang	100 orang	24.747.000	100 orang	25.984.350	Kota Magelang	DAU
205.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			313.766.000		329.454.300		
		Indeks Kualitas Air,	76%		76%			
		Indeks Kualitas Udara	78%		78%			
		Indeks Tutupan Hutan	48%		49%			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah SDA yang terkonservasi	47,7		57,7			
		Jenis flora	8 Jenis		10 Jenis			
		Jenis fauna	2 Jenis		3 Jenis			
9	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	data dan laporan hemat energi, LPG, BBM	36 Laporan	139.269.000	36 Laporan	146.232.450	Kota Magelang	DAU
16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan dan konservasi SDA	monitoring, evaluasi dan pelaporan DBHCHT	12 Laporan	123.140.000	12 Laporan	129.297.000	Kota Magelang	DAU
42	Pengadaan Sumur Resapan	Tersedianya kebutuhan air sumur resapan	2 Titik lokasi	17.825.000	2 Titik lokasi	18.716.250	Kota Magelang	DAU
47	Sosialisasi Penghematan Energi Dan Air Serta Pemanfaatan Energi Terbarukan	Dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi Penghematan energi dan Air Serta Pemanfaatan Energi Terbarukan	2 sosialisasi, 70 org	33.532.000	2 sosialisasi, 70 org	35.208.600	Kota Magelang	DAU
105.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			536.948.000		563.795.400		
		Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	8		10			
		terpublikasikannya dialog antar agama	5		6			
		Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan	1		2			
		Tingkat kerukunan antar umat beragama	100%		100%			
		Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			
5	Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H	Jumlah TPHD yang dikirim	2 Orang	202.587.000	2 Orang	212.716.350	Kota Magelang	DAU
6	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	Terlaksananya kegiatan PHBI dan peringatan natal	3 Kegiatan	247.670.000	3 Kegiatan	260.053.500	Kota Magelang	DAU
9	Pelatihan Pemulasaraan Jenazah	Terselenggaranya Pelatihan Pemulasaraan Jenazah	3 kegiatan	86.691.000	3 kegiatan	91.025.550	Kota Magelang	DAU
210.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa			827.179.000		868.537.950		
		Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah:						
		a. Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			
		b. Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			
		Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			
		Jumlah KIM	17		17			
		Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6		7			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-		1			
		Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi						
2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya sarana penunjang publikasi pesan pemerintah melalui media massa	2 jenis	827.179.000	2 jenis	868.537.950	Kota Magelang	DAU
101.18	Program Pendidikan Non Formal			428.795.000		450.234.750		
		Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96,67%		96,99%			
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%		100%			
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%		100%			
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%		100%			
		Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	10,00%		15,00%			
		Jumlah Juara FASI	-		4			
		Jumlah Juara MTQ	1		1			
14	Festival Anak Soleh Indonesia	Terlaksananya kegiatan Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI)	2 Kegiatan	195.805.000	2 Kegiatan	205.595.250	Kota Magelang	DAU
16	Pelaksanaan MTQ tingkat Kota	Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kota	2 Kegiatan	179.116.000	2 Kegiatan	188.071.800	Kota Magelang	DAU
17	Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional	Juara MTQ Tingkat Kota yang dikirim ke Tingkat Provinsi dan Nasional	2 Kegiatan	53.874.000	2 Kegiatan	56.567.700	Kota Magelang	DAU
401.18	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			300.046.000		315.048.300		
		Cakupan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri	100%		100%			
6	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan	Rapat koordinasi dalam rangka kerjasama daerah	3 MOU	47.187.000	3 MOU	49.546.350	Kota Magelang	DAU
8	Fasilitasi Kegiatan APEKSI	Rapat Koordinasi dalam rangka Kegiatan APEKSI	1 Kegiatan	220.727.000	1 Kegiatan	231.763.350	Kota Magelang	DAU
9	Fasilitasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)	terbinanya kerjasama antar daerah seluruh indonesia	1 Kegiatan	32.132.000	1 Kegiatan	33.738.600	Kota Magelang	DAU
106.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo			35.385.000		37.154.250		
		Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	50%		58%			
7	Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo	Terlaksananya kegiatan pembinaan keagamaan terhadap anak panti asuhan dan jompo	1 Kegiatan	35.385.000	1 Kegiatan	37.154.250		
401.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			1.467.755.000		1.541.142.750		
		Jumlah review PERDA/PERWAL	1		1			
		Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	0		0			
		Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	0		1			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Publikasi peraturan perundang-undangan	Terpublikasinya peraturan perundang-undangan yang ada	5 Laporan	49.937.000	5 Laporan	52.433.850	Kota Magelang	DAU
7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersusunnya raperda pengelolaan BMD	1 konsep	58.500.000	1 konsep	61.425.000	Kota Magelang	DAU
9	Sosialisasi Peraturan Daerah	Perda yang tersosialisasikan	6 Peserta	216.865.000	6 Peserta	227.708.250	Kota Magelang	DAU
10	Pengelolaan JDI Hukum	Terbinanya pengelola JDI Hukum di tingkat SKPD	6 SKPD	61.711.000	6 SKPD	64.796.550	Kota Magelang	DAU
14	Rakor aparat penegak hukum	Jumlah dokumen dan laporan rakor penegakan hukum	12 Dokumen	87.211.000	12 Dokumen	91.571.550	Kota Magelang	DAU
18	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah raperda yang disosialisasikan	12 Raperda	62.220.000	12 Raperda	65.331.000	Kota Magelang	DAU
28	Fasilitasi kegiatan RANHAM	terselesaikannya perda sampai dengan diundangkan	12	36.401.000	12	38.221.050	Kota Magelang	DAU
42	Penyusunan Program Legislasi Daerah	Dokumen Naskah Prolegda 2016	1 Laporan	12.030.000	1 Laporan	12.631.500	Kota Magelang	DAU
43	Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda	Jumlah Raperda yang dikirmkan ke DPRD untuk mendapatkan pembahasan	12 Raperda	223.235.000	12 Raperda	234.396.750	Kota Magelang	DAU
44	Harmonisasi dan sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU	Terlaksananya harmonisasi dann sinkronisasi raperwal, SK dan Mou	100	100.111.000	100	105.116.550	Kota Magelang	DAU
46	Asistensi pembahasan raperda	Terlaksananya pembahasan dan persiapan raperda baik yang akan dibahas maupun yang sedang dalam pembahasan di pansus	12 Laporan	147.825.000	12 Laporan	155.216.250	Kota Magelang	DAU
47	Penyuluhan hukum terpadu	Terwujudnya pemahaman hukum kepada masyarakat dalam rangka pemahaman terhadap hukum dan tugas penegak hukum	150 Orang	27.696.000	150 Orang	29.080.800	Kota Magelang	DAU
48	Pemberian bantuan hukum	Penanganan perkara hukum	4 %	153.053.000	4 %	160.705.650	Kota Magelang	DAU
56	Evaluasi Produk hukum	Jumlah Produk Hukum yang perlu dievaluasi	6 Dokumen	39.498.000	6 Dokumen	41.472.900	Kota Magelang	DAU
57	Pemberian Layanan Hukum	Pemberian Layanan Hukum di lingkungan Pemerintah Kota Magelang	12 Bulan	191.462.000	12 Bulan	201.035.100	Kota Magelang	DAU
210.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			550.437.000		577.958.850		
		Implementasi SIPID (Sistim Invormasi Potensi Investasi Daerah)	0		0			
		Implementasi pemanfaatan SPIPISE	70%		75%			
10	Pelayanan Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	terlaksananya operasional ULP	12 Bulan	550.437.000	12 Bulan	577.958.850	Kota Magelang	DAU
213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			157.650.000		165.532.500		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6			
		Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional						
		- Peringkat di POPDA SD	7		6			
		- Peringkat di POPDA SMP	17		15			
		- Peringkat di POPDA SMA	22		20			
		- Peringkat di Dulongmas	NA		NA			
		- Peringkat di PORPROV	NA		20			
		Jumlah klub olah raga	183		183			
		Jumlah organisasi olah raga	35		35			
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya olahraga senam pagi	40 kali	157.650.000	40 kali	165.532.500	Kota Magelang	DAU
401.20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			97.407.000		102.277.350		
10	Inventarisasi nama gang/jalan	Tersedianya data geografis jalan di Kota Magelang	1 dokumen	41.699.000	1 dokumen	43.783.950	Kota Magelang	DAU
13	Pembinaan organisasi perangkat daerah	Terinformasinya permasalahan pada pembinaan opd sebagai bahan pengambil kebijakan	2 Dokumen	25.081.000	2 Dokumen	26.335.050	Kota Magelang	DAU
18	Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang	Terpenuhinya penerapan SPM dalam penyelenggaraan pemerintahan	2 Kegiatan	30.627.000	2 Kegiatan	32.158.350	Kota Magelang	DAU
307.20	Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah			279.092.000		293.046.600		
1	Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah	Tertib administrasi Perusda	12 Laporan	109.048.000	12 Laporan	114.500.400	Kota Magelang	DAU
2	Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah	Dokumen RKAP Perusda	10 Dokumen	28.547.000	10 Dokumen	29.974.350	Kota Magelang	DAU
4	Penyusunan Laporan Kinerja Perusahaan Daerah	Laporan kinerja Perusahaan Daerah	20 Buku	25.652.000	20 Buku	26.934.600	Kota Magelang	DAU
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja perusda	Laporan tingkat perkembangan Perusda	12 Laporan	79.005.000	12 Laporan	82.955.250	Kota Magelang	DAU
8	Penyusunan kajian atas laporan audit keuangan perusahaan daerah	Disahkannya Laporan Akhir Tahun Perusda	5 Dokumen	36.840.000	5 Dokumen	38.682.000	Kota Magelang	DAU
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			524.467.000		550.690.350		
		Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPDP	100		100			
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	70		75			
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	72		75			
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	35		40			
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	76%		78%			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah	Hasil pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2014 diketahui oleh masyarakat	2 Kegiatan	260.354.000	2 Kegiatan	273.371.700	Kota Magelang	DAU
22	Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah	Terlaksananya kegiatan pendokumentasian kegiatan pembangunan daerah secara tertib dan lancar	3 Laporan	19.569.000	3 Laporan	20.547.450	Kota Magelang	DAU
32	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat	Terlaksananya Kegiatan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana pemerinatah pusat secara tertib dan lancar	6 Laporan	66.042.000	6 Laporan	69.344.100	Kota Magelang	DAU
33	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi	Laporan Movev dan Laporan kegiatan pembangunan yang dananya bersumber dari bantuan keuangan provinsi jawa tengah	6 Dokumen	53.735.000	6 Dokumen	56.421.750	Kota Magelang	DAU
40	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota	Tersedianya target kinerja tahunan Kota Magelang Tahun 2017	1 dokumen	8.278.000	1 dokumen	8.691.900	Kota Magelang	DAU
53	Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)	Terlaksananya pengendalian Operasional kegiatan seluruh SKPD pemerintah Kota Magelang	4 Laporan	56.134.000	4 Laporan	58.940.700	Kota Magelang	DAU
65	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Terlaksananya Kegiatan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah secara tertib dan lancar	6 Laporan	60.355.000	6 Laporan	63.372.750	Kota Magelang	DAU
106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			50.074.000		52.577.700		DAU
		Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif		100%		100%		DAU
		Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial		3		4		DAU
		Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		20%		30%		DAU
1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya kegiatan Forum CSR Kota Magelang	100 %	50.074.000	100 %	52.577.700	Kota Magelang	DAU
401.21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			172.563.000		181.191.150		DAU
2	Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Dokumen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	1 dokumen	8.644.000	1 dokumen	9.076.200	Kota Magelang	DAU
3	Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Buku Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	40 UPP	81.177.000	40 UPP	85.235.850	Kota Magelang	DAU
4	Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1 laporan	82.742.000	1 laporan	86.879.100	Kota Magelang	DAU
105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			65.938.000		69.234.900		DAU
		Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana		37.5%		0		DAU
		Cakupan tim relawan siaga bencana		2,94		5,88		DAU
		Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana		25%		50%		DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	25%		50%			DAU
		Cakupan penanganan korban bencana	100%		100%			DAU
9	Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Terkoordinasinya kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana di Kota Magelang	4 Laporan	65.938.000	4 Laporan	69.234.900	Kota Magelang	DAU
		JUMLAH		24.631.382.000		25.862.951.100		

Matriks
 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang : Administrasi Pemerintahan
 OPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi perkantoran	100 %	8.081.544.000	100 %	8.485.621.200		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	pembelian matere	12 Bulan	357.000	12 Bulan	374.850	Setwan	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Telp, TV Kabel, listrik, air	1 Tahun	203.100.000	1 Tahun	213.255.000	Setwan	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlayananinya izin kendaraan	34 mobil, 15 sepeda motor Buah	36.000.000	34 mobil, 15 sepeda motor Buah	37.800.000	Setwan	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium pengelola keuangan, dan barang	12 Bulan	259.543.000	12 Bulan	272.520.150	Setwan	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa dan alat kebersihan	12 Bulan	149.717.000	12 Bulan	157.202.850	Setwan	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan ATK	12 Bulan	26.076.000	12 Bulan	27.379.800	Setwan	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang celakan dan penggandaan	12 Bulan	32.752.000	12 Bulan	34.389.600	Setwan	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan alat listrik dan komunikasi	12 Bulan	14.308.000	12 Bulan	15.023.400	Setwan	DAU
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan kantor	12 Buah	56.225.000	12 Buah	59.036.250	Setwan	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan buku bacaan dan peraturn perundangan	12 Bulan	12.800.000	12 Bulan	13.440.000	Setwan	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya isi ulang tabung gas	30 Buah	8.596.000	30 Buah	9.025.800	Setwan	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman tamu dan pegawai	12 Bulan	74.419.000	12 Bulan	78.139.950	Setwan	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya perjalanan dinas	12 Bulan	6.788.520.000	12 Bulan	7.127.946.000	Setwan	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	terbayarnya honor tenaga kontrak	12 Bulan	198.504.000	12 Bulan	208.429.200	Setwan	DAU
24	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	Terbayarnya premi asuransi	25 Orang	191.475.000	25 Orang	201.048.750	Setwan	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tersusunya administrasi kepegawaian	12 Bulan	29.152.000	12 Bulan	30.609.600	Setwan	DAU
401.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			720.813.000		756.853.650		DAU
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	1 Tahun	117.116.000	1 Tahun	122.971.800	Setwan	DAU
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	227.443.000	1 Tahun	238.815.150	Setwan	DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	34 mobil, 15 sepeda motor Unit	320.365.000	34 mobil, 15 sepeda motor Unit	336.383.250	Setwan	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	35.210.000	1 Tahun	36.970.500	Setwan	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	20.679.000	1 Tahun	21.712.950	Setwan	DAU
401.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Disiplin aparatur	100 %	199.421.000	100 %	209.392.050	Setwan	DAU
		Persentase kehadiran ASN	97%		97%			
		Persentase pelanggaran disiplin ASN	0,21%		0,21%			
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	110 Buah	199.421.000	110 Buah	209.392.050	Kota Magelang	DAU
401.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas sumber daya aparatur	100 %	1.195.400.000	100 %	1.255.170.000		
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	8 kali	1.195.400.000	8 kali	1.255.170.000	Kota Magelang	DAU
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	56.380.000	100 %	59.199.000		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunya laporan kinerja dan ikhtisar kerja SKPD	4 dokumen	9.450.000	4 dokumen	9.922.500	Setwan	DAU
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunya laporan keuangan semesteran	2 Kegiatan	3.630.000	2 Kegiatan	3.811.500	Setwan	DAU
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.906.000	1 dokumen	3.051.300	Setwan	DAU
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunya laporan keuangan akhir tahun	1 kegiatan	3.743.000	1 kegiatan	3.930.150	Setwan	DAU
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Renja SKPD	2 dokumen	6.860.000	2 dokumen	7.203.000	Setwan	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	Tersusunya RKA SKPD	2 Kegiatan	17.221.000	2 Kegiatan	18.082.050	Setwan	DAU
10	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunya Renstra	1 Dokumen	5.141.000	1 Dokumen	5.398.050	Setwan	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	Tersusunnya LKjIP SKPD	1 dokumen	7.429.000	1 dokumen	7.800.450	Setwan	DAU
401.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	80%	8.608.427.000	80%	9.038.848.350		
		Tingkat Ketersediaan pokok pikiran dewan tepat waktu	50%		100%			
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Pembahasan Raperda	25 Raperda	483.756.000	25 Raperda	507.943.800	Kota Magelang	DAU
3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Rapat-Rapat alat kelengkapan dewan	12 Bulan	260.897.000	12 Bulan	273.941.850	Kota Magelang	DAU
4	Rapat-rapat paripurna	Penyelenggaraan rapat-rapat paripurna	12 Bulan	170.129.000	12 Bulan	178.635.450	Kota Magelang	DAU
5	Kegiatan Reses	Terlaksananya kegiatan reses	3 kali	899.940.000	3 kali	944.937.000	Kota Magelang	DAU
6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Kunjungan kerja	57 kali	4.640.266.000	57 kali	4.872.279.300	Kota Magelang	DAU
8	Sosialisasi peraturan perundang undangan	Peran dewan	1 kegiatan	109.226.000	1 kegiatan	114.687.300	Kota Magelang	DAU
9	Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD	Risalah rapat-rapat DPRD	12 Bulan	36.330.000	12 Bulan	38.146.500	Kota Magelang	DAU
11	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Bintek/workshop	6 kl	1.517.458.000	6 kl	1.593.330.900	Kota Magelang	DAU
12	Kajian pemberian tunjangan perumahan	Adanya appraisal tunjangan perumahan	1 keg	51.100.000	1 keg	53.655.000	Kota Magelang	DAU
13	Fasilitasi dan koordinasi kerjasama pelaksanaan kegiatan setwamda DPRD	Terjalinya kerjasama	9 Bulan	439.325.000	9 Bulan	461.291.250	Kota Magelang	DAU
403.15	Program Pengembangan data/informasi	Pengembangan Data dan Informasi	100 %	33.836.000		35.527.800		
		Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			
		Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	70%		80%			
	Penyusunan Profil DPRD	Profil DPRD	200 buku	33.836.000	200 buku	35.527.800	Kota Magelang	DAU
205.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		1 paket	195.773.000	1 paket	205.561.650		
		Luas RTH Kota	18%		18%			
	Pemeliharaan RTH	Pavingisasi halaman kantor	1 Paket	195.773.000	1 Paket	205.561.650	Kota Magelang	DAU
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Dokumen/arsip daerah	100 %	54.470.000	100 %	57.193.500		
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%		52%			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase arsip dan risalah	82%		82%			
		Persentase Penyelamatan Arsip	47%		53%			
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terfasilitasinya pendataan dan penataan dokumen/arsip	1 Tahun	54.470.000	1 Tahun	57.193.500	Kota Magelang	DAU
210.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Informasi	100 %	53.500.000	100 %	56.175.000		DAU
2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penyebarluasan informasi di media	14 kali	53.500.000	14 kali	56.175.000	Kota Magelang	DAU
JUMLAH				19.199.564.000		20.159.542.200		

Matriks
 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang : Administrasi Pemerintahan
 OPD : Kecamatan Magelang Selatan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1.266.545.000	100 %	1.329.872.250		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan	150.043.000	12 Bulan	157.545.150	Kec. Mgl Selatan	DAU
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah sarana informasi masyarakat melalui media cetak	12 buah	2.880.000	12 buah	3.024.000	Kec. Mgl Selatan	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan perizinan kendaraan dinas/operasional	48 Unit	15.965.000	48 Unit	16.763.250	Kec. Mgl Selatan	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung administrasi keuangan	12 Bulan	297.154.000	12 Bulan	312.011.700	Kec. Mgl Selatan	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung kebersihan kantor	12 Bulan	150.438.000	12 Bulan	157.959.900	Kec. Mgl Selatan	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan alat tulis kantor	12 Bulan	108.747.000	12 Bulan	114.184.350	Kec. Mgl Selatan	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Jenis	43.656.000	12 Jenis	45.838.800	Kec. Mgl Selatan	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 Bulan	15.392.000	12 Bulan	16.161.600	Kec. Mgl Selatan	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	7 Jenis	26.940.000	7 Jenis	28.287.000	Kec. Mgl Selatan	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	9.639.000	12 Bulan	10.120.950	Kec. Mgl Selatan	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu	18 Jenis	130.274.000	18 Jenis	136.787.700	Kec. Mgl Selatan	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya upaya untuk memfasilitasi rakor dan konsultasi ke luar daerah	6 Jenis	207.820.000	6 Jenis	218.211.000	Kec. Mgl Selatan	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan tenaga kontrak/honoror/tidak tetap	8 Orang	48.276.000	8 Orang	50.689.800	Kec. Mgl Selatan	DAU
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan pelayanan kedinasan/pelayanan terpadu perijinan dan non perijinan/kependudukan	12 Bulan	59.321.000	12 Bulan	62.287.050	Kec. Mgl Selatan	DAU
401.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan sarpras aparatur	100 %	499.863.000	100 %	524.856.150		
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan perlengkapan gedung kantor	3 Unit	61.420.000	3 Unit	64.491.000	Kec. Mgl Selatan	DAU
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan peralatan gedung kantor	4 Unit	18.548.000	4 Unit	19.475.400	Kec. Mgl Selatan	DAU
10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	11 buah	91.319.000	11 buah	95.884.950	Kec. Mgl Selatan	DAU
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terselenggaranya upaya untuk memelihara rumah dinas	90 m2	5.190.000	90 m2	5.449.500	Kec. Mgl Selatan	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk memelihara gedung kantor	2609 m2	83.735.000	2609 m2	87.921.750	Kec. Mgl Selatan	DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya upaya untuk memelihara kendaraan dinas/operasional	46 Unit	177.436.000	46 Unit	186.307.800	Kec. Mgl Selatan	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk memelihara perlengkapan gedung kantor	12 bulan	7.395.000	12 bulan	7.764.750	Kec. Mgl Selatan	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk memelihara peralatan gedung kantor	12 bulan	49.120.000	12 bulan	51.576.000	Kec. Mgl Selatan	DAU
33	Pengadaan Papan Informasi	Tersedianya papan informasi	1 unit	5.700.000	1 unit	5.985.000	Kec. Mgl Selatan	DAU
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan	100 %	75.619.000	100 %	79.399.950		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 Dokumen	23.796.000	1 Dokumen	24.985.800	Kec. Mgl Selatan	DAU
6	Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya RKA	2 Dokumen	25.386.000	2 Dokumen	26.655.300	Kec. Mgl Selatan	DAU
8	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Renja PD	2 Dokumen	15.394.000	2 Dokumen	16.163.700	Kec. Mgl Selatan	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)	1 Dokumen	11.043.000	1 Dokumen	11.595.150	Kec. Mgl Selatan	DAU
202.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			6.620.000		6.951.000		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada			
3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	peserta sosialisasi	30 P	6.620.000	30 P	6.951.000	Kota Magelang	DAU
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terfasilitasnya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk penataan administrasi kependudukan	100 %	51.016.000	100 %	53.566.800		
		Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%			
		Cakupan penduduk memiliki KIA			100%			
		Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	80%		100%			
		Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	930		935			
		Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%			
		Persentase kepemilikan akte kematian	45%		50%			
		Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	15%		40%			
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tersampainya informasi kependudukan kepada masyarakat	100 Orang	4.390.000	100 Orang	4.609.500	Kota Magelang	DAU
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana mendukung pelayanan publik	13 Jenis	46.626.000	13 Jenis	48.957.300	Kota Magelang	DAU
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terfasilitasnya pelayanan masyarakat melalui upaya penjagaan kualitas anak usia dini yang dididik	100 %	50.521.000	100 %	53.047.050		
		APK PAUD	65%		66%			
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	51%		53%			
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terbinanya kompetensi tenaga pengelola PAUD	20 Orang	24.612.000	20 Orang	25.842.600	Kota Magelang	DAU
70	Lomba Semarak Anak	Terpilihnya juara ketramprilan anak PAUD	9 Orang	7.952.000	9 Orang	8.349.600	Kota Magelang	DAU
73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terdidiknya kader sebagai tenaga pendidik PAUD	20 orang	17.957.000	20 orang	18.854.850	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan pelayanan perpustakaan	100 %	43.924.000	100 %	46.120.200		
		Jumlah kunjungan ke Desa Buku	2000		2000			
		Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar	80%		85%			
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung peningkatan pengelolaan buku perpustakaan	12 Bulan	43.924.000	12 Bulan	46.120.200	Kota Magelang	DAU
403.15	Program Pengembangan data/informasi	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pengembangan data dan statistik daerah	100 %	37.850.000	100 %	39.742.500		
		Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			
		Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	70%		80%			
1	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya data statistik kecamatan dalam angka	1 Dokumen	37.850.000	1 Dokumen	39.742.500	Kota Magelang	DAU
214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pengembangan data dan statistik daerah	100 %	6.328.000	100 %	6.644.400		
		Meningkatnya ormas yang memiliki SKT	27,79%		35,19%			
		Persentase pemenuhan data statistik	90%		95%			
1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersedianya data statistik kecamatan dalam angka	1 Dokumen	6.328.000	1 Dokumen	6.644.400	Kota Magelang	DAU
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pengelolaan persampahan	100 %	267.169.000	100 %	280.527.450		
		Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	3,3		4,3			
		Persentase sampah perkotaan yang ditangani	88%		89%			
		Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	3,3%		4,3%			
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan sarpras persampahan	48 RW	236.828.000	48 RW	248.669.400	Kota Magelang	DAU
40	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya sampah melalui pengembangan kampung organik	3 Lokasi	30.341.000	3 Lokasi	31.858.050	Kota Magelang	DAU
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	100 %	18.410.000	100 %	19.330.500		
		Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah:						
		a. Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			
		b. Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			
		Jumlah KIM	17		17			
		Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6		7			
		Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-		1			
		Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi						
19	Pengelolaan Website	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pengelolaan website kecamatan	1 jenis	18.410.000	1 jenis	19.330.500	Kota Magelang	DAU
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	98.563.000	100%	103.491.150		
		Frekuensi Patroli Satpol PP	3 kali/hari		3 kali/hari			
		Tingkat Penyelesaian pelanggaran perda	90%		92%			
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,52		6,46			
		Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	10,00		11,67			
		Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertaman dan ketertiban umum (K3)	94,5%		95%			
		Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	70,47		74,25			
		Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	11,27%		14,26%			
		cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	9		12			
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	186 Orang	40.952.000	186 Orang	42.999.600	Kota Magelang	DAU
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	pelatihan linmas	40 orang	20.217.000	40 orang	21.227.850	Kota Magelang	DAU
5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	60 Orang	37.394.000	60 Orang	39.263.700	Kota Magelang	DAU
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	100 %	62.707.000	100 %	65.842.350		
		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	10		11			
		LPM berprestasi						
		Tingkat kota	41%		47%			
		Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1			
		Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1			
		Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	24%		35%			
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143		143			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	150 Orang	9.320.000	150 Orang	9.786.000	Kota Magelang	DAU
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya upaya untuk mendukung administrasi RT/RW	279 Orang	53.387.000	279 Orang	56.056.350	Kota Magelang	DAU
403.16	Program Kerjasama Pembangunan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk kerjasama pembangunan	100 %	12.850.000	100 %	13.492.500	Kota Magelang	DAU
		Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	2		3			
4	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Terjalinnnya koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	4 Laporan	12.850.000	4 Laporan	13.492.500	Kota Magelang	DAU
208.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			9.502.000		9.977.100		
		Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	2%		2%			
1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah remaja yang mendapatkan penyuluhan	60 orang	9.502.000	60 orang	9.977.100	Kota Magelang	DAU
105.16	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk memelihara kanrantibmas	100 %	709.730.000	100 %	745.216.500		
		Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%			
		Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0			
		Perda pelarangan peredaran narkoba	-		1			
		Jumlah Kampung Bebas Narkoba	2		3			
		Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1,13%		1,47%			
		Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	3%		6%			
		Rasio jumlah siskamling aktif	0,78		0,84			
		Frekuensi Patroli Satpol PP	NA		NA			
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya upaya untuk mendukung memelihara stabilitas kanrantibmas	12 Laporan	709.730.000	12 Laporan	745.216.500	Kota Magelang	DAU
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	100 %	64.364.000	100 %	67.582.200		
		Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	20%		30%			
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup melalui lomba K3	6 Lomba	64.364.000	6 Lomba	67.582.200	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk meningkatkan peran serta kepemudaan	100 %	34.418.000	100 %	36.138.900		
		Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	94,00%		95,00%			
		Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1			
		Persentase pengangguran pemuda	6,65%		6,40%			
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pembinaan organisasi pemuda	145 Orang	34.418.000	145 Orang	36.138.900	Kota Magelang	DAU
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	100 %	94.678.000	100 %	99.411.900		
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%		52%			
		Persentase arsip dan risalah	82%		82%			
		Persentase Penyelamatan Arsip	47%		53%			
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pengelolaan dokumen/arsip daerah	12 Bulan	94.678.000	12 Bulan	99.411.900	Kota Magelang	DAU
102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui upaya kegiatan untuk kesehatan masyarakat	100 %	4.118.000	100 %	4.323.900		
		Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%		100%			
		Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%			
		Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%			
		Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%			
9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan pengelolaan penyakit menular dan wabah	40 Orang	4.118.000	40 Orang	4.323.900	Kota Magelang	DAU
404.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa	100 %	66.449.000	100 %	69.771.450		
		Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	54%		61%			
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pelaksanaan bulan bhakti gotong royong	11 Paket	66.449.000	11 Paket	69.771.450	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mengelola keragaman budaya di masyarakat	100 %	100.087.000	100 %	105.091.350		
		Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	14,86		15,32			
		Jumlah festival seni dan budaya.	11		12			
		Cakupan gelar seni 75%	100%		100%			
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	1 Lomba dan 50 Orang	7.920.000	1 Lomba dan 50 Orang	8.316.000	Kota Magelang	DAU
5	Facilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Tersedianya sarana untuk mendukung penyelenggaraan festival budaya daerah	9 Paket	92.167.000	9 Paket	96.775.350	Kota Magelang	DAU
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mengembangkan wawasan kebangsaan	100 %	103.292.000	100 %	108.456.600		
		Prosentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	69,6%		72,2%			
		Database ormas yang akurat	69,00%		71,00%			
		Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	27,79%		35,19%			
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan toleransi dan kerukunan beragama	1 Paket	28.222.000	1 Paket	29.633.100	Kota Magelang	DAU
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai nilai luhur budaya bangsa	10 Paket	75.070.000	10 Paket	78.823.500	Kota Magelang	DAU
105.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			5.735.000		6.021.750		
		Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	8		10			
		terpublikasikannya dialog antar agama	5		6			
		Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan	1		2			
		Tingkat kerukunan antar umat beragama	100%		100%			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			
4	Penyelenggaraan Peringatan Hari besar Keagamaan	Telaksananya kegiatan Syawalan Keluarga Besar Kel. Magesari	13 RW	5.735.000	13 RW	6.021.750	Kota Magelang	DAU
101.18	Program Pendidikan Non Formal	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pendidikan non formal	100 %	29.634.000	100 %	31.115.700		
		Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96,67%		96,99%			
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%		100%			
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%		100%			
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%		100%			
		Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	10,00%		15,00%			
		Jumlah Juara FASI	-		4			
		Jumlah Juara MTQ	1		1			
28	Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	Terpilihnya juara MTQ tingkat kecamatan	24 Orang	29.634.000	24 Orang	31.115.700	Kota Magelang	DAU
207.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			6.221.000		6.532.050		DAU
3	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah aparatur kelurahan yang dibina	90 orang	6.221.000	90 orang	6.532.050	Kota Magelang	DAU
202.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	100 %	77.482.000	100 %	81.356.100		DAU
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	17%		20%			DAU
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	20%		23%			DAU
		Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,00%		78,50%			DAU
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah pembinaan	12 bulan	77.482.000		81.356.100	Kota Magelang	DAU
207.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	100 %	27.940.000	100 %	29.337.000		DAU
		PKK Aktif	100%		100%			DAU
2	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	30 orang	12.208.000	30 orang	12.818.400	Kota Magelang	DAU
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung peran serta PKK dalam pembangunan	185 Orang	15.732.000	185 Orang	16.518.600	Kota Magelang	DAU
102.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			23.573.000		24.751.650		DAU
		Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%		97%			DAU
2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	peserta penyuluhan	20 L	5.943.000	20 L	6.240.150	Kota Magelang	DAU
6	Kader piket bersama davis	Pembinaan kader Davis	13 RW	17.630.000	13 RW	18.511.500	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk memasyarakatkan olah raga	100 %	97.888.000	100 %	102.782.400		DAU
		Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6			
		Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional						
		- Peringkat di POPDA SD	7		6			
		- Peringkat di POPDA SMP	17		15			
		- Peringkat di POPDA SMA	22		20			
		- Peringkat di Dulongmas	NA		NA			
		- Peringkat di PORPROV	NA		20			
		Jumlah klub olah raga	183		183			
		Jumlah organisasi olah raga	35		35			
5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam sehat	24 keg	13.350.000	24 keg	14.017.500	Kota Magelang	DAU
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pembinaan olahraga	90 Orang dan 305 Orang	84.538.000	90 Orang dan 305 Orang	88.764.900	Kota Magelang	DAU
105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk meningkatkan pemberantasan pekat	100 %	16.695.000	100 %	17.529.750		
		Persentase penanganan penyakit masyarakat	90%		92%			
		Perda yang mengatur kontrol tempat hiburan	-		1			
		Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras dan tindak prostitusi	-		1			
		Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA			
		Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA			
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pemberantasan miras dan narkoba	30 Orang	16.695.000	30 Orang	17.529.750	Kota Magelang	DAU
102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk perbaikan gizi	100 %	39.055.000	100 %	41.007.750		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100		100			
		cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100		100			
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31		<0.31			
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Terlaksananya pemberian tambahan makanan dan vitamin bagi anak balita dan lansia	360 Orang	39.055.000	360 Orang	41.007.750		
213.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			9.680.000		10.164.000		
		Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	4		4			
		Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	65%		71%			
7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Terpeliharanya Lapangan Olahraga	12 bulan	9.680.000	12 bulan	10.164.000	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk perencanaan pembangunan	100 %	117.541.000	100 %	123.418.050		
		Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100		100			
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	70		75			
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	72		75			
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	35		40			
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	76%		78%			
1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah peserta yang mengikuti pra musrenbang	125 orang	13.767.000	125 orang	14.455.350	Kota Magelang	DAU
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang kelurahan/kecamatan	2 Dokumen	76.999.000	2 Dokumen	80.848.950	Kota Magelang	DAU
18	Survey hasil Musrenbang	Terlaksananya survey hasil musrenbang	1 Laporan	24.058.000	1 Laporan	25.260.900	Kota Magelang	DAU
21	Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	laporan pembangunan kelurahan	2 kegiatan	2.717.000	2 kegiatan	2.852.850	Kota Magelang	DAU
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	100 %	16.882.000	100 %	17.726.100		
		Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100		100			
		Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100			
		Angka Kesakitan DBD	<50		<50			
		Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<105		<104			
		Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90			
		Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%			
		Penemuan kasus HIV						
		Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%			
		Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS						
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	pengelolaan lembaga WPA	25 Orang	16.882.000	25 Orang	17.726.100	Kota Magelang	DAU
105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			10.320.000		10.836.000		
		Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	37.5%		0			
		Cakupan tim relawan siaga bencana	2,94		5,88			
		Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	25%		50%			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN		TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	25%		50%				
		Cakupan penanganan korban bencana	100%		100%				
1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	60 orang	10.320.000	60 orang	10.836.000	Kota Magelang	DAU	
205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pengelolaan RTH	100 %	92.013.000	100 %	96.613.650			
		Luas RTH Kota	18%		18%				
5	Penataan RTH	Tersedianya ruang terbuka hijau	2 paket	41.132.000	2 paket	43.188.600	Kota Magelang	DAU	
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya ruag terbuka hijau	12 Bulan	50.881.000	12 Bulan	53.425.050	Kota Magelang	DAU	
102.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pelayanan kesehatan anak balita	100 %	19.057.000	100 %	20.009.850			
		Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri	52,94%		58,82%				
2	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita	41 Posyandu	10.634.000	41 Posyandu	11.165.700	Kota Magelang	DAU	
7	kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Terlaksananya kegiatan kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	40 orang	1.668.000	40 orang	1.751.400	Kota Magelang	DAU	
12	Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma	kegiatan PSN berjalan lancar	1 kegiatan	6.755.000	1 kegiatan	7.092.750	Kota Magelang	DAU	
102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pelayanan kesehatan anak balita	100 %	49.099.000	100 %	51.553.950			
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%				
		Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%				
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%				
		Cakupan Puskesmas Ramah Anak	12%		18%				
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita	41 Posyandu	27.416.000	41 Posyandu	28.786.800	Kota Magelang	DAU	
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Posyandu Balita	15 posyandu	21.683.000	15 posyandu	22.767.150	Kota Magelang	DAU	
103.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan	100 %	45.800.000	100 %	48.090.000			
		Pendampingan fisik dan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	100%		100%				
16	Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	1 Paket	45.800.000	1 Paket	48.090.000	Kota Magelang	DAU	
102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pelayanan kesehatan lansia	100 %	25.625.000	100 %	26.906.250			
		Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		75%				
		Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	12%		18%				
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan lansia	36 Posyandu	12.710.000	36 Posyandu	13.345.500	Kota Magelang	DAU	
6	Pelayanan kesehatan	Jumlah Posyandu Lansia	9 Posyandu Lansia	12.915.000	9 Posyandu Lansia	13.560.750	Kota Magelang	DAU	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pelayanan kesehatan lansia	100 %	13.757.000	100 %	14.444.850		
		Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%			
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%			
		Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%			
		Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%			
1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan lansia	36 Posyandu	5.000.000	36 Posyandu	5.250.000	Kota Magelang	DAU
7	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	75 orang	8.757.000	75 orang	9.194.850	Kota Magelang	DAU
103.34	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Selatan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan	100 %	147.558.000	100 %	154.935.900		
		Rasio luas kawasan kumuh	2 ha		1 ha			
31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	49,5 m2	15.426.000	49,5 m2	16.197.300	Kota Magelang	DAU
34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	14 m2, 128,9 m2	35.295.000	14 m2, 128,9 m2	37.059.750	Kota Magelang	DAU
35	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	27,8 m2	8.306.000	27,8 m2	8.721.300	Kota Magelang	DAU
39	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	79 m2	21.680.000	79 m2	22.764.000	Kota Magelang	DAU
49	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	45 m2	12.383.000	45 m2	13.002.150	Kota Magelang	DAU
53	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	7 m2	7.500.000	7 m2	7.875.000	Kota Magelang	DAU
55	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	75 m2	11.968.000	75 m2	12.566.400	Kota Magelang	DAU
92	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	1 paket	35.000.000	1 paket	36.750.000	Kota Magelang	DAU
103.35	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan	100 %	116.691.000	100 %	122.525.550		
		Rasio luas kawasan kumuh	2,5 ha		1 ha			
31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	60 M	31.991.000	60 M	33.590.550	Kota Magelang	DAU
33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	100 M	30.000.000	100 M	31.500.000	Kota Magelang	DAU
34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	100 M	19.700.000	100 M	20.685.000	Kota Magelang	DAU
53	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	13 RW	35.000.000	13 RW	36.750.000	Kota Magelang	DAU
103.36	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Utara	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan	100 %	122.754.000	100 %	128.891.700		
		Rasio luas kawasan kumuh	1,5 ha		0			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	70,5 M'	22.629.000	70,5 M'	23.760.450	Kota Magelang	DAU
27	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	77 M'	35.500.000	77 M'	37.275.000	Kota Magelang	DAU
33	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	12 bulan	35.000.000	12 bulan	36.750.000	Kota Magelang	DAU
36	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	39 M'	6.825.000	39 M'	7.166.250	Kota Magelang	DAU
41	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	75 M'	15.800.000	75 M'	16.590.000	Kota Magelang	DAU
49	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	20 M'	7.000.000	20 M'	7.350.000	Kota Magelang	DAU
103.37	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan	100 %	148.650.000	100 %	156.082.500		
		Rasio luas kawasan kumuh	1 ha		0			
26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	89 meter	44.550.000	89 meter	46.777.500	Kota Magelang	DAU
29	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	31 meter	23.550.000	31 meter	24.727.500	Kota Magelang	DAU
36	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	275 meter	45.550.000	275 meter	47.827.500	Kota Magelang	DAU
37	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	9 RW	35.000.000	9 RW	36.750.000	Kota Magelang	DAU
103.38	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan	100 %	320.000.000	100 %	336.000.000		
		Rasio luas kawasan kumuh	3 ha		1,5 ha			
36	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	74 meter	10.000.000	74 meter	10.500.000	Kota Magelang	DAU
41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	324 meter	130.000.000	324 meter	136.500.000	Kota Magelang	DAU
47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	80 meter	30.000.000	80 meter	31.500.000	Kota Magelang	DAU
48	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	95 meter	40.000.000	95 meter	42.000.000	Kota Magelang	DAU
49	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	173 meter	65.000.000	173 meter	68.250.000	Kota Magelang	DAU
50	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	110 meter	45.000.000	110 meter	47.250.000	Kota Magelang	DAU
103.39	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan	100 %	297.650.000	100 %	312.532.500		
		Rasio luas kawasan kumuh	4 ha		2 ha			
26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	134 m2	22.950.000	134 m2	24.097.500	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	6 m3	24.950.000	6 m3	26.197.500	Kota Magelang	DAU
38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	164 m2	50.750.000	164 m2	53.287.500	Kota Magelang	DAU
39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	60 m2	59.800.000	60 m2	62.790.000	Kota Magelang	DAU
41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	50 m2	15.450.000	50 m2	16.222.500	Kota Magelang	DAU
45	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	170 M	76.800.000	170 M	80.640.000	Kota Magelang	DAU
47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	8 m2	11.950.000	8 m2	12.547.500	Kota Magelang	DAU
49	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	12 RW	35.000.000	12 RW	36.750.000	Kota Magelang	DAU
	JUMLAH			5.561.923.000		5.840.019.150		

Matriks
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang : Administrasi Pemerintahan
OPD : Kecamatan Magelang Tengah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1.410.486.000	100 %	1.481.010.300		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	325 Materai	1.860.000	325 Materai	1.953.000	Kec. Mgl Tengah	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan	124.520.000	12 Bulan	130.746.000	Kec. Mgl Tengah	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan perizinan kendaraan dinas/operasional	48 Unit	15.065.000	48 Unit	15.818.250	Kec. Mgl Tengah	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung adminstrasi keuangan	12 Bulan	310.461.000	12 Bulan	325.984.050	Kec. Mgl Tengah	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung kebersihan kantor	12 Bulan	180.630.000	12 Bulan	189.661.500	Kec. Mgl Tengah	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan alat tulis kantor	12 Bulan	109.478.000	12 Bulan	114.951.900	Kec. Mgl Tengah	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Jenis	66.476.000	12 Jenis	69.799.800	Kec. Mgl Tengah	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 Bulan	11.485.000	12 Bulan	12.059.250	Kec. Mgl Tengah	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	7 Jenis	28.200.000	7 Jenis	29.610.000	Kec. Mgl Tengah	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	13.190.000	12 Bulan	13.849.500	Kec. Mgl Tengah	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu	18 Jenis	130.398.000	18 Jenis	136.917.900	Kec. Mgl Tengah	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya upaya untuk memfasilitasi rakor dan konsultasi ke luar daerah	6 Jenis	239.480.000	6 Jenis	251.454.000	Kec. Mgl Tengah	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorir daerah/tidak tetap	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan tenaga kontrak/honorir/tidak tetap	8 Orang	112.644.000	8 Orang	118.276.200	Kec. Mgl Tengah	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan pelayanan kedinasan/pelayanan terpadu perijinan dan non perijinan/kependudukan	12 Bulan	66.599.000	12 Bulan	69.928.950	Kec. Mgl Tengah	DAU
401.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan sarpras aparatur	100 %	429.731.000	100 %	451.217.550		
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	17.500.000	1 Unit	18.375.000	Kec. Mgl Tengah	DAU
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan perlengkapan gedung kantor	3 Unit	49.240.000	3 Unit	51.702.000	Kec. Mgl Tengah	DAU
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan peralatan gedung kantor	4 Unit	21.250.000	4 Unit	22.312.500	Kec. Mgl Tengah	DAU
10	Pengadaan mebeleur	Jumlah kursi rapat yang dibeli	60 unit	27.550.000	60 unit	28.927.500	Kec. Mgl Tengah	DAU
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terselenggaranya upaya untuk memelihara rumah dinas	90 m2	3.855.000	90 m2	4.047.750	Kec. Mgl Tengah	DAU
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk memelihara gedung kantor	2609 m2	79.380.000	2609 m2	83.349.000	Kec. Mgl Tengah	DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya upaya untuk memelihara kendaraan dinas/operasional	46 Unit	178.346.000	46 Unit	187.263.300	Kec. Mgl Tengah	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk memelihara perlengkapan gedung kantor	12 bulan	2.300.000	12 bulan	2.415.000	Kec. Mgl Tengah	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk memelihara peralatan gedung kantor	12 bulan	50.310.000	12 bulan	52.825.500	Kec. Mgl Tengah	DAU
401.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD			9.504.000		9.979.200		DAU
5	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Kegiatan pembinaan dan evaluasi administrasi yang dilaksanakan	1 kegiatan	9.504.000	1 kegiatan	9.979.200	Kec. Mgl Tengah	DAU
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan	100 %	54.176.000	100 %	56.884.800		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 Dokumen	12.146.000	1 Dokumen	12.753.300	Kec. Mgl Tengah	DAU
6	Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya RKA	2 Dokumen	21.601.000	2 Dokumen	22.681.050	Kec. Mgl Tengah	DAU
8	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Renja PD	2 Dokumen	13.295.000	2 Dokumen	13.959.750	Kec. Mgl Tengah	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)	1 Dokumen	7.134.000	1 Dokumen	7.490.700	Kec. Mgl Tengah	DAU
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk penataan administrasi kependudukan	100 %	43.796.000	100 %	45.985.800		
		Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%			
		Cakupan penduduk memiliki KIA			100%			
		Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	80%		100%			
		Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	930		935			
		Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%			
		Persentase kepemilikan akte kematian	45%		50%			
		Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	15%		40%			
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tersampainya informasi kependudukan kepada masyarakat	100 Orang	18.598.000	100 Orang	19.527.900	Kota Magelang	DAU
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana mendukung pelayanan publik	13 Jenis	25.198.000	13 Jenis	26.457.900	Kota Magelang	DAU
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui upaya penjagaan kualitas anak usia dini yang dididik	100 %	42.692.000	100 %	44.826.600		
		APK PAUD	65%		66%			
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	51%		53%			
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terbinanya kompetensi tenaga pengelola PAUD	20 Orang	25.810.000	20 Orang	27.100.500	Kota Magelang	DAU
70	Lomba Semarak Anak	Terpilihnya juara ketrampilan anak PAUD	9 Orang	16.882.000	9 Orang	17.726.100	Kota Magelang	DAU
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan pelayanan perpustakaan	100 %	52.269.000	100 %	54.882.450		DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah kunjungan ke Desa Buku	2000		2000			DAU
		Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar	80%		85%			DAU
14	Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	67 Buku	3.900.000	67 Buku	4.095.000	Kota Magelang	DAU
19	Pengelolaan buku perpustakaan	Terpenuhinya pelayanan tentang perpustakaan	100 %	18.682.000	100 %	19.616.100	Kota Magelang	DAU
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terseleenggaranya upaya untuk mendukung peningkatan pengelolaan buku perpustakaan	12 Bulan	29.687.000	12 Bulan	31.171.350	Kota Magelang	DAU
403.15	Program Pengembangan data/informasi	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pengembangan data dan statistik daerah	100 %	17.568.000	100 %	18.446.400		
		Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			
		Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	70%		80%			
1	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya data statistik kecamatan dalam angka	1 Dokumen	17.568.000	1 Dokumen	18.446.400	Kota Magelang	DAU
214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pengembangan data dan statistik daerah	100 %	9.649.000	100 %	10.131.450		
		Meningkatnya ormas yang memiliki SKT	27,79%		35,19%			
		Persentase pemenuhan data statistik	90%		95%			
1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersedianya data statistik kecamatan dalam angka	1 Dokumen	9.649.000	1 Dokumen	10.131.450	Kota Magelang	DAU
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pengelolaan persampahan	100 %	365.493.000	100 %	383.767.650		
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan sarpras persampahan	48 RW	308.435.000	48 RW	323.856.750	Kota Magelang	DAU
40	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya sampah melalui pengembangan kampung organik	3 Lokasi	57.058.000	3 Lokasi	59.910.900	Kota Magelang	DAU
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	100 %	12.306.000	100 %	12.921.300		
		Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah:						
		a. Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			
		b. Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			
		Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah KIM		17		17		
		Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.		6		7		
		Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa		-		1		
		Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi						
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah kader yg mendapat pelatihan	30 orang	3.760.000	30 orang	3.948.000	Kota Magelang	DAU
19	Pengelolaan Website	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pengelolaan website kecamatan	1 jenis	8.546.000	1 jenis	8.973.300	Kota Magelang	DAU
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			123.972.000		130.170.600		
		Jumlah gedung kesenian		1		1		
		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya		11		12		
		Cakupan kajian seni 50%		75		76		
		Cakupan fasilitas seni 30%		35		37		
		Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%		77		78		
		Cakupan tempat 100%		100		100		
		Cakupan organisasi 34%		100		100		
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pentas Seni Budaya Daerah (Wayangan)	1 Kegiatan	123.972.000	1 Kegiatan	130.170.600	Kota Magelang	DAU
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 0	32.002.000	100 0	33.602.100		
		Frekuensi Patroli Satpol PP	3 kali/hari		3 kali/hari			
		Tingkat Penyelesaian pelanggaran perda	90%		92%			
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,52		6,46			
		Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	10,00		12			
		Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertaman dan ketertiban umum (K3)	94,5%		95%			
		Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	70,47		74,25			
		Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	11,27%		14,26%			
		cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	9		12			
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	186 Orang	15.910.000	186 Orang	16.705.500	Kota Magelang	DAU
5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	60 Orang	16.092.000	60 Orang	16.896.600	Kota Magelang	DAU
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	100 %	75.785.000	100 %	79.574.250		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	10		11			
		LPM berprestasi						
		Tingkat kota	41%		47%			
		Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1			
		Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1			
		Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	24%		35%			
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143		143			
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	150 Orang	23.118.000	150 Orang	24.273.900	Kota Magelang	DAU
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya upaya untuk mendukung administrasi RT/RW	279 Orang	52.667.000	279 Orang	55.300.350	Kota Magelang	DAU
105.16	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk memelihara kanrantibmas	100 %	798.588.000	100 %	838.517.400		
		Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%			
		Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0			
		Perda pelarangan peredaran narkoba	-		1			
		Jumlah Kampung Bebas Narkoba	2		3			
		Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1,13%		1,47%			
		Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	3%		6%			
		Rasio jumlah siskamling aktif	0,78		0,84			
		Frekuensi Patroli Satpol PP	NA		NA			
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya laporan	1 Laporan	28.479.000	1 Laporan	29.902.950	Kota Magelang	DAU
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya upaya untuk mendukung memelihara stabilitas kanrantibmas	12 Laporan	770.109.000	12 Laporan	808.614.450	Kota Magelang	DAU
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	100 %	54.109.000	100 %	56.814.450		
		Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	20%		30%			
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup melalui lomba K3	6 Lomba	54.109.000	6 Lomba	56.814.450	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	100 %	33.681.000	100 %	35.365.050		
		Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	44,74%		47,37%		Kota Magelang	DAU
5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Kelembagaan anak Kel. Cacaban	12 RW	15.422.000	12 RW	16.193.100	Kota Magelang	DAU
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terseleenggaranya upaya untuk meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak melalui forum anak	55 Orang	18.259.000	55 Orang	19.171.950	Kota Magelang	DAU
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk meningkatkan peran serta kepemudaan	100 %	19.872.000	100 %	20.865.600		
		Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	94,00%		95,00%			
		Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1			
		Persentase pengangguran pemuda	6,65%		6,40%			
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terseleenggaranya upaya untuk mendukung pembinaan organisasi pemuda	145 Orang	19.872.000	145 Orang	20.865.600	Kota Magelang	DAU
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	100 %	125.377.000	100 %	131.645.850		
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%		52%			
		Persentase arsip dan risalah	82%		82%			
		Persentase Penyelamatan Arsip	47%		53%			
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terseleenggaranya upaya untuk mendukung pengelolaan dokumen/arsip daerah	12 Bulan	125.377.000	12 Bulan	131.645.850	Kota Magelang	DAU
102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui upaya kegiatan untuk kesehatan masyarakat	100 %	10.320.000	100 %	10.836.000		
		Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%		100%			
		Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%			
		Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%			
		Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan pengelolaan penyakit menular dan wabah	40 Orang	10.320.000	40 Orang	10.836.000	Kota Magelang	DAU
404.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa	100 %	78.852.000	100 %	82.794.600		
		Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	54%		61%			
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pelaksanaan bulan bhakti gotong royong	11 Paket	78.852.000	11 Paket	82.794.600		
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mengelola keragaman budaya di masyarakat	100 %	145.614.000	100 %	152.894.700		
		Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	14,86		15,32			
		Jumlah festival seni dan budaya.	11		12			
		Cakupan gelar seni 75%	100%		100%			
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	1 Lomba dan 50 Orang	41.342.000	1 Lomba dan 50 Orang	43.409.100	Kota Magelang	DAU
4	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Terlaksananya Lomba Kesenian Antar antar RW	8 Kelompok	16.668.000	8 Kelompok	17.501.400	Kota Magelang	DAU
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Tersedianya sarana untuk mendukung penyelenggaraan festival budaya daerah	9 Paket	87.604.000	9 Paket	91.984.200	Kota Magelang	DAU
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mengembangkan wawasan kebangsaan	100 %	70.870.000	100 %	74.413.500		
		Prosentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	69,6%		72,2%			
		Database ormas yang akurat	69,00%		71,00%			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	27,79%		35,19%			
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan toleransi dan kerukunan beragama	1 Paket	13.783.000	1 Paket	14.472.150	Kota Magelang	DAU
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai nilai luhur budaya bangsa	10 Paket	57.087.000	10 Paket	59.941.350	Kota Magelang	DAU
101.18	Program Pendidikan Non Formal	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pendidikan non formal	100 %	39.020.000	100 %	40.971.000		
		Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96,67%		96,99%			
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%		100%			
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%		100%			
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%		100%			
		Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	10,00%		15,00%			
		Jumlah Juara FASI	-		4			
		Jumlah Juara MTQ	1		1			
28	Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	Terpilihnya juara MTQ tingkat kecamatan	24 Orang	39.020.000	24 Orang	40.971.000		
202.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	100 %	128.788.000	100 %	135.227.400		
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	17%		20%			
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	20%		23%			
		Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,00%		78,50%			
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Pembinaan dan pertemuan kader PKK	12 bln	100.467.000	12 bln	105.490.350	Kota Magelang	DAU
2	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Terselenggaranya upaya bagi ibu rumah tangga dan remaja dalam membangun keluarga sejahtera	2 BKR	21.991.000	2 BKR	23.090.550	Kota Magelang	DAU
5	Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	Jumlah Peserta Pameran	13 RW	6.330.000	13 RW	6.646.500	Kota Magelang	DAU
213.18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba			4.250.000		4.462.500		
		Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1,13%		1,47%			
1	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Tercapainya penyuluhan bahaya narkoba	30 orang	4.250.000	30 orang	4.462.500	Kota Magelang	DAU
207.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	100 %	29.929.000	100 %	31.425.450		
		PKK Aktif	100%		100%			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung peran serta PKK dalam pembangunan	185 Orang	29.929.000	185 Orang	31.425.450	Kota Magelang	DAU
213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk memasyarakatkan olah raga	100 %	145.630.000	100 %	152.911.500		
		Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan regional, nasional, dan internasional	6		6			
		Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional						
		- Peringkat di POPDA SD	7		6			
		- Peringkat di POPDA SMP	17		15			
		- Peringkat di POPDA SMA	22		20			
		- Peringkat di Dulongmas	NA		NA			
		- Peringkat di PORPROV	NA		20			
		Jumlah klub olah raga	183		183			
		Jumlah organisasi olah raga	35		35			
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pembinaan olahraga	90 Orang dan 305 Orang	145.630.000	90 Orang dan 305 Orang	152.911.500	Kota Magelang	DAU
105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk meningkatkan pemberantasan pekat	100 %	15.759.000	100 %	16.546.950		
		Persentase penanganan penyakit masyarakat	90%		92%			
		Perda yang mengatur kontrol tempat hiburan	-		1			
		Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras dan tindak prostitusi	-		1			
		Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA			
		Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA			
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pemberantasan miras dan narkoba	30 Orang	15.759.000	30 Orang	16.546.950	Kota Magelang	DAU
102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk perbaikan gizi	100 %	25.450.000	100 %	26.722.500		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100		100			
		cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100		100			
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31		<0.31			
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Terlaksananya pemberian tambahan makanan dan vitamin bagi anak balita dan lansia	360 Orang	25.450.000	360 Orang	26.722.500	Kota Magelang	DAU
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk perencanaan pembangunan	100 %	142.870.000	100 %	150.013.500		
		Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100		100			
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	70		75			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	72		75			
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	35		40			
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	76%		78%			
1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Laporan Hasil Sarasehan Pra Musrenbang	5 Laporan	13.027.000	5 Laporan	13.678.350	Kota Magelang	DAU
13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah Laporan Monev	4 Laporan	18.680.000	4 Laporan	19.614.000	Kota Magelang	DAU
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang kelurahan/kecamatan	2 Dokumen	88.478.000	2 Dokumen	92.901.900	Kota Magelang	DAU
18	Survey hasil Musrenbang	Terlaksananya survey hasil musrenbang	1 Laporan	22.685.000	1 Laporan	23.819.250	Kota Magelang	DAU
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	100 %	10.450.000	100 %	10.972.500		
		Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100		100			
		Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100			
		Angka Kesakitan DBD	<50		<50			
		Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<105		<104			
		Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90			
		Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%			
		Penemuan kasus HIV						
		Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%			
		Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS						
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	pengelolaan lembaga WPA	25 Orang	10.450.000	25 Orang	10.972.500	Kota Magelang	DAU
205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pengelolaan RTH	100 %	49.128.000	100 %	51.584.400		
		Luas RTH Kota	18%		18%			
5	Penataan RTH	Tersedianya ruang terbuka hijau	2 paket	14.336.000	2 paket	15.052.800	Kota Magelang	DAU
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya ruag terbuka hijau	12 Bulan	34.792.000	12 Bulan	36.531.600	Kota Magelang	DAU
102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pelayanan kesehatan anak balita	100 %	66.564.000	100 %	69.892.200		
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%			
		Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%			
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%			
		Cakupan Puskesmas Ramah Anak	12%		18%			
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita	41 Posyandu	66.564.000	41 Posyandu	69.892.200	Kota Magelang	DAU
103.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan	100 %	54.600.000	100 %	57.330.000		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pendampingan fisik dan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	100%		100%			
1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	neonisasi di RW.I	10 unit	9.600.000	10 unit	10.080.000	Kota Magelang	DAU
16	Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	1 Paket	45.000.000	1 Paket	47.250.000	Kota Magelang	DAU
102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pelayanan kesehatan lansia	100 %	49.063.000	100 %	51.516.150		
		Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		75%			
		Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	12%		18%			
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terseleenggaranya upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan lansia	36 Posyandu	49.063.000	36 Posyandu	51.516.150	Kota Magelang	DAU
103.45	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirejo	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan	100 %	101.750.000	100 %	106.837.500		
		Rasio luas kawasan kumuh	3,5 ha		1,5 ha			
19	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	150 m	31.200.000	150 m	32.760.000	Kota Magelang	DAU
20	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	380 m	26.600.000	380 m	27.930.000	Kota Magelang	DAU
32	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	26 m	9.500.000	26 m	9.975.000	Kota Magelang	DAU
27	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	12 bulan	34.450.000	12 bulan	36.172.500	Kota Magelang	DAU
103.46	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan	100 %	177.750.000	100 %	186.637.500		
		Rasio luas kawasan kumuh	2 ha		1 ha			
30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	90 m	20.000.000	90 m	21.000.000	Kota Magelang	DAU
31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	40 m	10.000.000	40 m	10.500.000	Kota Magelang	DAU
32	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	40 m	15.000.000	40 m	15.750.000	Kota Magelang	DAU
43	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	25 m	10.000.000	25 m	10.500.000	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	100 m	55.000.000	100 m	57.750.000	Kota Magelang	DAU
49	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	12 RW	67.750.000	12 RW	71.137.500	Kota Magelang	DAU
103.47	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan	100 %	325.370.000	100 %	341.638.500		
		Rasio luas kawasan kumuh	5 ha		2,5 ha			
58	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XVI	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	66,25 M2	14.367.000	66,25 M2	15.085.350	Kota Magelang	DAU
60	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XVIII	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	261,3 M2	50.429.000	261,3 M2	52.950.450	Kota Magelang	DAU
64	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	66 M2	34.102.000	66 M2	35.807.100	Kota Magelang	DAU
66	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	22,4 M2	14.724.000	22,4 M2	15.460.200	Kota Magelang	DAU
70	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	52 M	23.006.000	52 M	24.156.300	Kota Magelang	DAU
75	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	68 M2	19.742.000	68 M2	20.729.100	Kota Magelang	DAU
77	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	50 M	21.732.000	50 M	22.818.600	Kota Magelang	DAU
78	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	84 M	25.392.000	84 M	26.661.600	Kota Magelang	DAU
80	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVII	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	22 M	8.882.000	22 M	9.326.100	Kota Magelang	DAU
81	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVIII	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	39 M	24.157.000	39 M	25.364.850	Kota Magelang	DAU
83	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XX	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	94 M	73.127.000	94 M	76.783.350	Kota Magelang	DAU
85	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	1 Paket	15.710.000	1 Paket	16.495.500	Kota Magelang	DAU
103.48	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan	100 %	179.902.000	100 %	188.897.100		
		Rasio luas kawasan kumuh	1,5 ha		0			DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	100 m2	17.119.000	100 m2	17.974.950	Kota Magelang	DAU
31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	115 m	18.669.000	115 m	19.602.450	Kota Magelang	DAU
40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	120 m	18.619.000	120 m	19.549.950	Kota Magelang	DAU
41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	50 m	30.919.000	50 m	32.464.950	Kota Magelang	DAU
46	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	45 m	27.919.000	45 m	29.314.950	Kota Magelang	DAU
47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	50 m	30.919.000	50 m	32.464.950	Kota Magelang	DAU
50	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	40 m	24.619.000	40 m	25.849.950	Kota Magelang	DAU
51	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	30 m	11.119.000	30 m	11.674.950	Kota Magelang	DAU
103.49	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan	100 %	78.350.000	100 %	82.267.500		
		Rasio luas kawasan kumuh	3,88 ha		1 ha			
19	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	170 M2	15.550.000	170 M2	16.327.500	Kota Magelang	DAU
22	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	230 m2	29.700.000	230 m2	31.185.000	Kota Magelang	DAU
23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	129 M2	17.550.000	129 M2	18.427.500	Kota Magelang	DAU
29	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	150 m2	15.550.000	150 m2	16.327.500	Kota Magelang	DAU
103.50	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan	100 %	141.392.000	100 %	148.461.600		
		Rasio luas kawasan kumuh	1 ha		0			DAU
22	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	51 m3	40.000.000	51 m3	42.000.000	Kota Magelang	DAU
27	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	60 m'	48.500.000	60 m'	50.925.000	Kota Magelang	DAU
28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	20 m3	32.986.000	20 m3	34.635.300	Kota Magelang	DAU
36	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	90 m'	19.906.000	90 m'	20.901.300	Kota Magelang	DAU
	JUMLAH			5.782.727.000		6.071.863.350		

Matriks
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang : Administrasi Pemerintahan
OPD : Kecamatan Magelang Utara

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1.156.414.000	100 %	1.214.234.700		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan	100.500.000	12 Bulan	105.525.000	Kec. Magelang Utara	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan perizinan kendaraan dinas/operasional	48 Unit	1.300.000	48 Unit	1.365.000	Kec. Magelang Utara	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung administrasi keuangan	12 Bulan	16.013.000	12 Bulan	16.813.650	Kec. Magelang Utara	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung kebersihan kantor	12 Bulan	286.363.000	12 Bulan	300.681.150	Kec. Magelang Utara	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan alat tulis kantor	12 Bulan	98.441.000	12 Bulan	103.363.050	Kec. Magelang Utara	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Jenis	93.861.000	12 Jenis	98.554.050	Kec. Magelang Utara	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 Bulan	27.809.000	12 Bulan	29.199.450	Kec. Magelang Utara	DAU
12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	13 Jenis	13.093.000	13 Jenis	13.747.650	Kec. Magelang Utara	DAU
13	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis	18.235.000	5 Jenis	19.146.750	Kec. Magelang Utara	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	7 Jenis	18.558.000	7 Jenis	19.485.900	Kec. Magelang Utara	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	10.896.000	12 Bulan	11.440.800	Kec. Magelang Utara	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu	18 Jenis	94.377.000	18 Jenis	99.095.850	Kec. Magelang Utara	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya upaya untuk memfasilitasi rakor dan konsultasi ke luar daerah	6 Jenis	182.346.000	6 Jenis	191.463.300	Kec. Magelang Utara	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan tenaga kontrak/honoror/tidak tetap	8 Orang	128.736.000	8 Orang	135.172.800	Kec. Magelang Utara	DAU
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan pelayanan kedinasan/pelayanan terpadu perijinan dan non perijinan/kependudukan	12 Bulan	65.886.000	12 Bulan	69.180.300	Kec. Magelang Utara	DAU
401.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan sarpras aparatur	100 %	311.924.000	100 %	327.520.200		DAU
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	19.799.000	1 Unit	20.788.950	Kec. Magelang Utara	DAU
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan perlengkapan gedung kantor	3 Unit	9.320.000	3 Unit	9.786.000	Kec. Magelang Utara	DAU
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan peralatan gedung kantor	4 Unit	33.850.000	4 Unit	35.542.500	Kec. Magelang Utara	DAU
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terselenggaranya upaya untuk memelihara rumah dinas	90 m2	12.000.000	90 m2	12.600.000	Kec. Magelang Utara	DAU
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk memelihara gedung kantor	2609 m2	64.937.000	2609 m2	68.183.850	Kec. Magelang Utara	DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya upaya untuk memelihara kendaraan dinas/operasional	46 Unit	125.618.000	46 Unit	131.898.900	Kec. Magelang Utara	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk memelihara perlengkapan gedung kantor	12 bulan	4.770.000	12 bulan	5.008.500	Kec. Magelang Utara	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk memelihara peralatan gedung kantor	12 bulan	41.630.000	12 bulan	43.711.500	Kec. Magelang Utara	DAU
401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan	100 %	65.375.000	100 %	68.643.750		DAU
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 Dokumen	17.691.000	1 Dokumen	18.575.550	Kec. Magelang Utara	DAU
6	Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya RKA	2 Dokumen	25.026.000	2 Dokumen	26.277.300	Kec. Magelang Utara	DAU
8	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Renja PD	2 Dokumen	14.239.000	2 Dokumen	14.950.950	Kec. Magelang Utara	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP)	1 Dokumen	8.419.000	1 Dokumen	8.839.950	Kec. Magelang Utara	DAU
208.15	Program Keluarga Berencana	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan Keluarga Berencana	80 Kader KB	14.415.000	80 Kader KB	15.135.750		DAU
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	2		2			DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terselenggaranya upaya untuk membina keluarga berencana	80 Kader KB	14.415.000	80 Kader KB	15.135.750	Kota Magelang	DAU
202.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk menelaraskan kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	100 %	6.687.000	100 %	7.021.350		DAU
		Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada			DAU
3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tersampainya informasi terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat	50 Orang	6.687.000	50 Orang	7.021.350	Kota Magelang	DAU
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk penataan administrasi kependudukan	100 %	30.824.000	100 %	32.365.200		DAU
		Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%			DAU
		Cakupan penduduk memiliki KIA			100%			DAU
		Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	80%		100%			DAU
		Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	930		935			DAU
		Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%			DAU
		Persentase kepemilikan akte kematian	45%		50%			DAU
		Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	15%		40%			DAU
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana mendukung pelayanan publik	13 Jenis	24.624.000	13 Jenis	25.855.200	Kota Magelang	DAU
12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Tersampainya informasi kependudukan kepada masyarakat	100 Orang	6.200.000	100 Orang	6.510.000	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terfasilitasnya pelayanan masyarakat melalui upaya penjagaan kualitas anak usia dini yang dididik	100 %	43.595.000	100 %	45.774.750		DAU
		APK PAUD	65%		66%			DAU
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	51%		53%			DAU
57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya kompetensi tenaga pengelola PAUD	20 Orang	5.919.000	20 Orang	6.214.950	Kota Magelang	DAU
70	Lomba Semarak Anak	Terpilihnya juara ketrampilan anak PAUD	9 Orang	16.814.000	9 Orang	17.654.700	Kota Magelang	DAU
73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terjaganya ketrampilan tenaga pendidik/pengajar PAUD/pos PAUD	139 Orang	20.862.000	139 Orang	21.905.100	Kota Magelang	DAU
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terfasilitasnya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan pelayanan perpustakaan	100 %	21.838.000	100 %	22.929.900		DAU
		Jumlah kunjungan ke Desa Buku	2000		2000			DAU
		Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar	80%		85%			DAU
19	Pengelolaan buku perpustakaan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung peningkatan pelayanan perpustakaan	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	3.150.000	Kota Magelang	DAU
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung peningkatan pengelolaan buku perpustakaan	12 Bulan	18.838.000	12 Bulan	19.779.900	Kota Magelang	DAU
214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Terfasilitasnya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pengembangan data dan statistik daerah	100 %	6.870.000	100 %	7.213.500		DAU
		Meningkatnya ormas yang memiliki SKT	27,79%		35,19%			DAU
		Persentase pemenuhan data statistik	90%		95%			DAU
1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersedianya data statistik kecamatan dalam angka	1 Dokumen	6.870.000	1 Dokumen	7.213.500	Kota Magelang	DAU
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terfasilitasnya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pengelolaan persampahan	100 %	225.077.000	100 %	236.330.850		DAU
		Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	3,3		4,3			DAU
		Persentase sampah perkotaan yang ditangani	88%		89%			DAU
		Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	3,3%		4,3%			DAU
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan sarpras persampahan	48 RW	190.504.000	48 RW	200.029.200	Kota Magelang	DAU
40	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya sampah melalui pengembangan kampung organik	3 Lokasi	34.573.000	3 Lokasi	36.301.650	Kota Magelang	DAU
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terfasilitasnya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	100 %	24.927.000	100 %	26.173.350		DAU
		Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah:						DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		a. Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			DAU
		b. Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			DAU
		Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			DAU
		Jumlah KIM	17		17			DAU
		Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6		7			DAU
		Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-		1			DAU
		Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi						DAU
19	Pengelolaan Website	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pengelolaan website kecamatan	1 jenis	24.927.000	1 jenis	26.173.350	Kota Magelang	DAU
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 0	31.850.000	100 0	33.442.500		DAU
		Frekuensi Patroli Satpol PP	3 kali/hari		3 kali/hari			DAU
		Tingkat Penyelesaian pelanggaran perda	90%		92%			DAU
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,52		6,46			DAU
		Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	10,00		12			DAU
		Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertamanan dan ketertiban umum (K3)	94,5%		95%			DAU
		Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	70,47		74,25			DAU
		Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	11,27%		14,26%			DAU
		cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	9		12			DAU
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	186 Orang	21.851.000	186 Orang	22.943.550	Kota Magelang	DAU
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	60 Orang	9.999.000	60 Orang	10.498.950	Kota Magelang	DAU
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	100 %	123.213.000	100 %	129.373.650		DAU
		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	10		11			DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LPM berprestasi						DAU
		Tingkat kota	41%		47%			DAU
		Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1			DAU
		Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1			DAU
		Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	24%		35%			DAU
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143		143			DAU
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	150 Orang	53.222.000	150 Orang	55.883.100	Kota Magelang	DAU
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya upaya untuk mendukung administrasi RT/RW	279 Orang	69.991.000	279 Orang	73.490.550	Kota Magelang	DAU
403.16	Program Kerjasama Pembangunan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk kerjasama pembangunan	100 %	44.528.000	100 %	46.754.400		DAU
		Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	2		3			DAU
4	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Terjalinnnya koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	4 Laporan	44.528.000	4 Laporan	46.754.400	Kota Magelang	DAU
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk memelihara kantrantibmas	100 %	651.779.000	100 %	684.367.950		DAU
		Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%			DAU
		Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0			DAU
		Perda pelarangan peredaran narkoba	-		1			DAU
		Jumlah Kampung Bebas Narkoba	2		3			DAU
		Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	0,0113		1%			DAU
		Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	3%		6%			DAU
		Rasio jumlah siskamling aktif	0,78		0,84			DAU
		Frekuensi Patroli Satpol PP	NA		NA			DAU
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			DAU
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya upaya untuk mendukung memelihara stabilitas kantrantibmas	12 Laporan	651.779.000	12 Laporan	684.367.950	Kota Magelang	DAU
207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	100 %	3.280.000	100 %	3.444.000		DAU
		Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	29%		35%			DAU
		Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4			DAU
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev kegiatan lembaga keuangan kelurahan	4 Laporan	3.280.000	4 Laporan	3.444.000	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	100 %	70.984.000	100 %	74.533.200		DAU
		Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	20%		30%			DAU
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tertelaksananya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup melalui lomba K3	6 Lomba	70.984.000	6 Lomba	74.533.200	Kota Magelang	DAU
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	100 %	13.992.000	100 %	14.691.600		DAU
		Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	44,74%		47,37%			DAU
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak melalui forum anak	55 Orang	13.992.000	55 Orang	14.691.600	Kota Magelang	DAU
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk meningkatkan peran serta kepemudaan	100 %	25.188.000	100 %	26.447.400		DAU
		Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	94,00%		95,00%			DAU
		Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1			DAU
		Persentase pengangguran pemuda	6,65%		6,40%			DAU
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pembinaan organisasi pemuda	145 Orang	25.188.000	145 Orang	26.447.400	Kota Magelang	DAU
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	100 %	44.471.000	100 %	46.694.550		DAU
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%		52%			DAU
		Persentase arsip dan risalah	82%		82%			DAU
		Persentase Penyelamatan Arsip	47%		53%			DAU
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pengelolaan dokumen/arsip daerah	12 Bulan	44.471.000	12 Bulan	46.694.550	Kota Magelang	DAU
102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui upaya kegiatan untuk kesehatan masyarakat	100 %	33.283.000	100 %	34.947.150		DAU
		Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%		100%			DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%			DAU
		Proporsi Kasus Diabetes Mellitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%			DAU
		Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%			DAU
4	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan pengelolaan penyakit menular dan wabah	40 Orang	5.133.000	40 Orang	5.389.650	Kota Magelang	DAU
11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan penanggulangan kesehatan	135 Orang	28.150.000	135 Orang	29.557.500	Kota Magelang	DAU
404.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa	100 %	91.238.000	100 %	95.799.900		DAU
		Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	54%		61%			DAU
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pelaksanaan bulan bhakti gotong royong	11 Paket	91.238.000	11 Paket	95.799.900	Kota Magelang	DAU
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mengelola keragaman budaya di masyarakat	100 %	140.262.000	100 %	147.275.100		DAU
		Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	14,86		15,32			DAU
		Jumlah festival seni dan budaya.	11		12			DAU
		Cakupan gelar seni 75%	100%		100%			DAU
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	1 Lomba dan 50 Orang	23.696.000	1 Lomba dan 50 Orang	24.880.800	Kota Magelang	DAU
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Tersedianya sarana untuk mendukung penyelenggaraan festival budaya daerah	9 Paket	116.566.000	9 Paket	122.394.300	Kota Magelang	DAU
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mengembangkan wawasan kebangsaan	100 %	97.913.000	100 %	102.808.650		DAU
		Prosentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	69,6%		72,2%			DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Database ormas yang akurat	69,00%		71,00%			DAU
		Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	27,79%		35,19%			DAU
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan toleransi dan kerukunan beragama	1 Paket	10.504.000	1 Paket	11.029.200	Kota Magelang	DAU
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai nilai luhur budaya bangsa	10 Paket	87.409.000	10 Paket	91.779.450	Kota Magelang	DAU
205.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk perlindungan dan konservasi alam	100 %	6.400.000	100 %	6.720.000		DAU
		Indeks Kualitas Air,	76%		76%			DAU
		Indeks Kualitas Udara	78%		78%			DAU
		Indeks Tutupan Hutan	48%		49%			DAU
		Jumlah SDA yang terkonservasi	47,7		57,7			DAU
		Jenis flora	8 Jenis		10 Jenis			DAU
		Jenis fauna	2 Jenis		3 Jenis			DAU
46	Pemeliharaan Sumur Resapan	Terpeliharanya sumur resapan	3 Sumur	6.400.000	3 Sumur	6.720.000	Kota Magelang	DAU
101.18	Program Pendidikan Non Formal	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pendidikan non formal	100 %	28.922.000	100 %	30.368.100		DAU
		Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96,67%		96,99%			DAU
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%		100%			DAU
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%		100%			DAU
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%		100%			DAU
		Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	10,00%		15,00%			DAU
		Jumlah Juara FASI	-		4			DAU
		Jumlah Juara MTQ	1		1			DAU
28	Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	Terpilihnya juara MTQ tingkat kecamatan	24 Orang	28.922.000	24 Orang	30.368.100	Kota Magelang	DAU
207.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	100 %	4.749.000	100 %	4.986.450		DAU
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev kegiatan kapasitas aparatur pemerintah	1 Laporan	4.749.000	1 Laporan	4.986.450	Kota Magelang	DAU
202.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	100 %	7.794.000	100 %	8.183.700		DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	17%		20%			DAU
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	20%		23%			DAU
		Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,00%		78,50%			DAU
	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terselenggaranya upaya bagi ibu rumah tangga dan remaja dalam membangun keluarga sejahtera	2 BKR	7.794.000	2 BKR	8.183.700	Kota Magelang	DAU
207.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	100 %	80.739.000	100 %	84.775.950		DAU
		PKK Aktif	100%		100%			DAU
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung peran serta PKK dalam pembangunan	185 Orang	80.739.000	185 Orang	84.775.950	Kota Magelang	DAU
103.19	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk memelihara turap/talud/bronjong	100 %	131.800.000	100 %	138.390.000		DAU
5	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Terjaganya turap/talud/bronjong	108 m3	131.800.000	108 m3	138.390.000	Kota Magelang	DAU
213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk memasyarakatkan olah raga	100 %	127.198.000	100 %	133.557.900		DAU
		Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6			DAU
		Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional						DAU
		- Peringkat di POPDA SD	7		6			DAU
		- Peringkat di POPDA SMP	17		15			DAU
		- Peringkat di POPDA SMA	22		20			DAU
		- Peringkat di Dulongmas	NA		NA			DAU
		- Peringkat di PORPROV	NA		20			DAU
		Jumlah klub olah raga	183		183			DAU
		Jumlah organisasi olah raga	35		35			DAU
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pembinaan olahraga	90 Orang dan 305 Orang	127.198.000	90 Orang dan 305 Orang	133.557.900	Kota Magelang	DAU
105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk meningkatkan pemberantasan pekat	100 %	6.045.000	100 %	6.347.250		DAU
		Persentase penanganan penyakit masyarakat	90%		92%			DAU
		Perda yang mengatur kontrol tempat hiburan	-		1			DAU
		Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras dan tindak prostitusi	-		1			DAU
		Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA			DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN		TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA			DAU	
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pemberantasan miras dan narkoba	30 Orang	6.045.000	30 Orang	6.347.250	Kota Magelang	DAU	
102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk perbaikan gizi	100 %	25.920.000	100 %	27.216.000		DAU	
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100		100			DAU	
		cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100		100			DAU	
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31		<0.31			DAU	
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Terlaksananya pemberian tambahan makanan dan vitamin bagi anak balita dan lansia	360 Orang	25.920.000	360 Orang	27.216.000	Kota Magelang	DAU	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk perencanaan pembangunan	100 %	116.883.000	100 %	122.727.150		DAU	
		Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100		100			DAU	
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	70		75			DAU	
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	72		75			DAU	
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	35		40			DAU	
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	76%		78%			DAU	
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang kelurahan/kecamatan	2 Dokumen	95.588.000	2 Dokumen	100.367.400	Kota Magelang	DAU	
18	Survey hasil Musrenbang	Terlaksananya survey hasil musrenbang	1 Laporan	21.295.000	1 Laporan	22.359.750	Kota Magelang	DAU	
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	100 %	22.929.000	100 %	24.075.450		DAU	
		Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100		100			DAU	
		Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100			DAU	
		Angka Kesakitan DBD	<50		<50			DAU	
		Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<105		<104			DAU	
		Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90			DAU	
		Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%			DAU	
		Penemuan kasus HIV						DAU	
		Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%			DAU	
		Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS						DAU	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Tersampainya informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit	50 Orang	6.636.000	50 Orang	6.967.800	Kota Magelang	DAU
15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Tersampainya informasi penanganan penyakit AIDS	70 Orang	12.543.000	70 Orang	13.170.150	Kota Magelang	DAU
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	pengelolaan lembaga WPA	25 Orang	3.750.000	25 Orang	3.937.500	Kota Magelang	DAU
205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pengelolaan RTH	100 %	56.326.000	100 %	59.142.300		DAU
		Luas RTH Kota	18%		18%			DAU
5	Penataan RTH	Tersedianya ruang terbuka hijau	2 paket	18.785.000	2 paket	19.724.250	Kota Magelang	DAU
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya ruag terbuka hijau	12 Bulan	37.541.000	12 Bulan	39.418.050	Kota Magelang	DAU
102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pelayanan kesehatan anak balita	100 %	46.159.000	100 %	48.466.950		DAU
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%			DAU
		Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%			DAU
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%			DAU
		Cakupan Puskesmas Ramah Anak	12%		18%			DAU
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita	41 Posyandu	40.171.000	41 Posyandu	42.179.550	Kota Magelang	DAU
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya movev kegiatan pelayanan kesehatan anak balita	4 Laporan	5.988.000	4 Laporan	6.287.400	Kota Magelang	DAU
103.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan	100 %	59.433.000	100 %	62.404.650		DAU
		Pendampingan fisik dan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	100%		100%			DAU
16	Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	1 Paket	59.433.000	1 Paket	62.404.650	Kota Magelang	DAU
102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pelayanan kesehatan lansia	100 %	30.320.000	100 %	31.836.000		DAU
		Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		75%			DAU
		Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	12%		18%			DAU
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan lansia	36 Posyandu	30.320.000	36 Posyandu	31.836.000	Kota Magelang	DAU
102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk keselamatan ibu melahirkan dan anak	100 %	11.735.000	100 %	12.321.750		DAU
		Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%			DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%			DAU
		Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%			DAU
		Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%			DAU
4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya upaya untuk pemantapan GSI	40 Orang	11.735.000	40 Orang	12.321.750	Kota Magelang	DAU
103.40	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan	100 %	217.350.000	100 %	228.217.500		DAU
		Rasio luas kawasan kumuh	2 ha		1 ha			DAU
27	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	8 m	37.150.000	8 m	39.007.500	Kota Magelang	DAU
33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	282 m	26.840.000	282 m	28.182.000	Kota Magelang	DAU
37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	200 m	57.060.000	200 m	59.913.000	Kota Magelang	DAU
47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	75 m	37.150.000	75 m	39.007.500	Kota Magelang	DAU
48	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Terjaganya infrastruktur perdesaan	12 RW	24.150.000	12 RW	25.357.500	Kota Magelang	DAU
49	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	50 m	35.000.000	50 m	36.750.000	Kota Magelang	DAU
103.41	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsari	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan	100 %	162.785.000	100 %	170.924.250		DAU
		Rasio luas kawasan kumuh	5 ha		2,5 ha			DAU
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	126 m	14.318.000	126 m	15.033.900	Kota Magelang	DAU
	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	35 m	25.080.000	35 m	26.334.000	Kota Magelang	DAU
	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	39 m	19.568.000	39 m	20.546.400	Kota Magelang	DAU
	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	55 m	68.819.000	55 m	72.259.950	Kota Magelang	DAU
	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	7 RW	35.000.000	7 RW	36.750.000	Kota Magelang	DAU
103.42	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan	100 %	235.344.000	100 %	247.111.200		DAU
		Rasio luas kawasan kumuh	2 ha		1 ha			DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN		TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	60 m	57.035.000	60 m	59.886.750	Kota Magelang	DAU	
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	120 m	15.872.000	120 m	16.665.600	Kota Magelang	DAU	
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	400 m	27.738.000	400 m	29.124.900	Kota Magelang	DAU	
	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	70 m	28.512.000	70 m	29.937.600	Kota Magelang	DAU	
	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	95 m	26.826.000	95 m	28.167.300	Kota Magelang	DAU	
	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	50 m	44.361.000	50 m	46.579.050	Kota Magelang	DAU	
	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	7 RW	35.000.000	7 RW	36.750.000	Kota Magelang	DAU	
103.43	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan	100 %	130.329.000	100 %	136.845.450		DAU	
		Rasio luas kawasan kumuh	2 ha		0			DAU	
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	61 m	20.963.000	61 m	22.011.150	Kota Magelang	DAU	
	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	125 m	53.403.000	125 m	56.073.150	Kota Magelang	DAU	
	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	8 m	20.963.000	8 m	22.011.150	Kota Magelang	DAU	
	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	200 m	35.000.000	200 m	36.750.000	Kota Magelang	DAU	
103.44	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan	100 %	200.500.000	100 %	210.525.000		DAU	
		Rasio luas kawasan kumuh						DAU	
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	100 m	12.500.000	100 m	13.125.000	Kota Magelang	DAU	
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	100 m	15.500.000	100 m	16.275.000	Kota Magelang	DAU	
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XI	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	240 m	20.500.000	240 m	21.525.000	Kota Magelang	DAU	
	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	60 m	15.000.000	60 m	15.750.000	Kota Magelang	DAU	
	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	60 m	15.000.000	60 m	15.750.000	Kota Magelang	DAU	
	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	80 m	13.000.000	80 m	13.650.000	Kota Magelang	DAU	
	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	124 m	19.000.000	124 m	19.950.000	Kota Magelang	DAU	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	64 m	16.500.000	64 m	17.325.000	Kota Magelang	DAU
	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	80 m	13.500.000	80 m	14.175.000	Kota Magelang	DAU
	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	50 m	12.500.000	50 m	13.125.000	Kota Magelang	DAU
	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	50 m	12.500.000	50 m	13.125.000	Kota Magelang	DAU
	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	11 RW	35.000.000	11 RW	36.750.000	Kota Magelang	DAU
	JUMLAH			4.989.587.000		5.239.066.350		

Matriks
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang : Pengawasan
OPD : Inspektorat

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
402.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Rutin Perkantoran selama 1 tahun	100 %	293.615.000	100 %	308.295.750		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya pengiriman surat menyurat	925 Lembar	3.000.000	925 Lembar	3.150.000	Inspektorat	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya biaya langganan telepon dinas	1 Tahun	12.500.000	1 Tahun	13.125.000	Inspektorat	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya perpanjangan STNK Kendaraan dinas	16 Unit	8.800.000	16 Unit	9.240.000	Inspektorat	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya honorarium pengelola keuangan SKPD	1 Tahun	60.000.000	1 Tahun	63.000.000	Inspektorat	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya sarana kebersihan kantor	15 Jenis	2.500.000	15 Jenis	2.625.000	Inspektorat	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK SKPD	14 Jenis	10.000.000	14 Jenis	10.500.000	Inspektorat	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya cetakan dan penggandaan naskah Dinas Kantor	3 Jenis	6.000.000	3 Jenis	6.300.000	Inspektorat	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya biaya langganan surat kabar	53 Jenis	20.000.000	53 Jenis	21.000.000	Inspektorat	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya biaya pengisian tabung gas LPG	6 kali	815.000	6 kali	855.750	Inspektorat	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan, minum pegawai dan tamu	27 Tahun	40.000.000	27 Tahun	42.000.000	Inspektorat	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya biaya kebutuhan perjalanan dinas	15 Kegiatan	130.000.000	15 Kegiatan	136.500.000	Inspektorat	DAU
402.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	182.280.000	100 %	191.394.000		
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Tanaman Hias Ruangan Kantor	5 jenis	15.000.000	5 jenis	15.750.000	Inspektorat	DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	16 Unit	144.715.000	16 Unit	151.950.750	Inspektorat	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Peralatan kantor	52 jenis	22.565.000	52 jenis	23.693.250	Inspektorat	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
402.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100 %	38.074.000	100 %	39.977.700		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Bendel	11.074.000	4 Bendel	11.627.700	Inspektorat	DAU
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Bendel	2.000.000	1 Bendel	2.100.000	Inspektorat	DAU
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran	1 Buku	3.000.000	1 Buku	3.150.000	Inspektorat	DAU
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran	2 Bendel	4.000.000	2 Bendel	4.200.000	Inspektorat	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya buku RKA dan RKPA SKPD	2 Bendel	15.000.000	2 Bendel	15.750.000	Inspektorat	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) SKPD	tersedianya buku Lakip SKPD	1 Buku	3.000.000	1 Buku	3.150.000	Inspektorat	DAU
402.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengelolaan pengawasan dalam rangka pembinaan kinerja unit kerja	100 %	1.440.883.000	100 %	1.512.927.150		
		Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	30%		35%			
		Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	80%		80%			
		Persentase zona integritas yang terbentuk	10%		20%			
		Nilai hasil LKJip SKPD	CC		BB			
		Persentase SKPD yang direview LKJIP	35%		45%			
		Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	90%		95%			
		Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	60%		50%			
		Penyelesaian TLHP BPK meningkat	90%		95%			
		Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	90%		95%			
		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	65%		70%			
		persentase SPM yang mencapai target nasional	65%		70%			
		Tingkat pemahaman tentang SAKIP						
33	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Tersusunnya Laporan Reviu RKA dan RKPA SKPD	2 laporan	15.859.000	2 laporan	16.651.950	Kota Magelang	DAU
1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan/entitas	100 entitas	380.032.000	100 entitas	399.033.600	Kota Magelang	DAU
	Review Laporan Keuangan	Telaksananya Review LKPD atas BUD dan SKPD	2 kegiatan	45.557.000	2 kegiatan	47.834.850	Kota Magelang	DAU
	Inventarisasi temuan pengawasan	Penyelesaian temuan BPK dan Inspektorat Provinsi yang ditindaklanjuti	2 semester	45.248.000	2 semester	47.510.400	Kota Magelang	DAU
	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah tindak lanjut rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	1000 TL	202.162.000	1000 TL	212.270.100	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tersusunya Laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi	4 Laporan	45.115.000	4 Laporan	47.370.750	Kota Magelang	DAU
	Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P)	PNS Golongan III/a ke atas dapat melaporkan LP2P secara keseluruhan / 100%	3200 orang	19.551.000	3200 orang	20.528.550	Kota Magelang	DAU
	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Terselenggaranya Rapat Dinas Larwasda	1 Kegiatan	34.413.000	1 Kegiatan	36.133.650	Kota Magelang	DAU
	Penyelesaian kerugian negara	Penyelesaian piutang kerugian negara	1 Tahun	203.386.000	1 Tahun	213.555.300	Kota Magelang	DAU
	Evaluasi LAKIP	Tersusunnya Laporan Reviu LKj IP dan Evaluasi LKj IP SKPD	2 Kegiatan	46.477.000	2 Kegiatan	48.800.850	Kota Magelang	DAU
	Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah	Terselenggaranya SPIP	2 Kegiatan	51.827.000	2 Kegiatan	54.418.350	Kota Magelang	DAU
24	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	Terlaksananya Pemnataan dan Pelaporan LHKPN dan LHKSN Pejabat Eselon II, III, IV dan V	560 Orang	21.000.000	560 Orang	22.050.000	Kota Magelang	DAU
18	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Penilaian SKPD Pelayanan Publik dan Laporan Reformasi Birokrasi	3 SKPD	46.032.000	3 SKPD	48.333.600	Kota Magelang	DAU
21	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	Aktualisasi dan sinkronisasi laporan keuangan/neraca SKPD	12 Laporan	60.220.000	12 Laporan	63.231.000	Kota Magelang	DAU
	Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi	Terselenggaranya Sosialisasi Gratifikasi	1 kegiatan	38.825.000	1 kegiatan	40.766.250	Kota Magelang	DAU
	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah koordinasi pengawasan	4 Kegiatan	78.126.000	4 Kegiatan	82.032.300	Kota Magelang	DAU
	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Obyek Pemeriksaan/entitas	15 Paket	107.053.000	15 Paket	112.405.650	Kota Magelang	DAU
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terwujudnya Transparansi dan akuntabilitas pembinaan pengawasan	100 %	10.000.000	100 %	10.500.000		
	Pengelolaan Website	Transparansi dan akuntabilitas kinerja SKPD	4 Bulan	10.000.000	4 Bulan	10.500.000	Kota Magelang	DAU
402.21	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Tersusunya peningkatan kapasitas SDM dan adminitrasi pengelolaan angka kredit PFA dan P2UPD	100 %	189.426.000	100 %	198.897.300		
		Level APIP Kota Magelang menjadi level 3	Level 2		Level 2			
		Persentase APIP yang bersertifikat Kompetensi meningkat	60%		65%			
		Persentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat	65%		70%			
3	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	Tersusunnya Laporan Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor	2 Semester	36.426.000	2 Semester	38.247.300	Kota Magelang	DAU
6	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Jumlah peserta pelatihan di kantor sendiri (PKS) Aparat Pengawasan	33 peserta	153.000.000	33 peserta	160.650.000	Kota Magelang	DAU
402.22	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan	100 %	20.530.000	100 %	21.556.500		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cakupan pemeriksaan (diperinci dari Orbik SKPD, Satker dan BUMD plus targetnya)	60%		65%			
		Persentase Aparat SPIP aktif	60%		65%			
		Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	75%		80%			
	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersusunnya sistem dan prosedur pengawasan	2 Sisdur	20.530.000	2 Sisdur	21.556.500	Kota Magelang	DAU
		JUMLAH		2.174.808.000		2.283.548.400		

Matriks
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang : Perencanaan
OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
403.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			761.583.000		799.662.150		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	685.000	12 Bulan	719.250	Bappeda	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Layanan Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	96.600.000	12 Bulan	101.430.000	Bappeda	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional	27 unit kendaraan (22 sepeda motor dan 5 mobil)	8.590.000	27 unit kendaraan (22 sepeda motor dan 5 mobil)	9.019.500	Bappeda	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tercapainya capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	12 Bulan	129.522.000	12 Bulan	135.998.100	Bappeda	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan, bahan dan jasa kebersihan	26 Jenis	59.246.000	26 Jenis	62.208.300	Bappeda	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	12 Bulan	16.268.000	12 Bulan	17.081.400	Bappeda	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	34.844.000	12 Bulan	36.586.200	Bappeda	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.250.000	Bappeda	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	12 Bulan	6.720.000	12 Bulan	7.056.000	Bappeda	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya logistik kantor	12 Bulan	1.450.000	12 Bulan	1.522.500	Bappeda	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	12 Bulan	29.271.000	12 Bulan	30.734.550	Bappeda	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	312.936.000	12 Bulan	328.582.800	Bappeda	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/lidak tetap	Tersedianya upah/honor tenaga kontrak	12 Bulan	60.451.000	12 Bulan	63.473.550	Bappeda	DAU
403.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			379.041.000		397.993.050		DAU
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya meja dan kursi rapat	4 item	59.100.000	4 item	62.055.000	Bappeda	DAU
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung Bappeda	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	31.500.000	Bappeda	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 Bulan	196.500.000	12 Bulan	206.325.000	Bappeda	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		17.176.000		18.034.800	Bappeda	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara		71.265.000		74.828.250	Bappeda	DAU
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya meubleur	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.250.000	Bappeda	DAU
403.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			90.292.000		94.806.600		DAU
7	Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	Peserta workshop perencanaan pembangunan bagi pegawai Bappeda Kota Magelang yang mengikuti workshop	41 orang	49.412.000	41 orang	51.882.600	Bappeda	DAU
8	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya sosialisasi perencanaan pembangunan bagi aparatur perencanaan	350 orang	40.880.000	350 orang	42.924.000	Bappeda	DAU
403.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			67.347.000		70.714.350		DAU
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan bulanan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	14.862.000	12 laporan	15.605.100	Bappeda	DAU
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	6 buku	8.550.000	6 buku	8.977.500	Bappeda	DAU
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	5 buku	9.165.000	5 buku	9.623.250	Bappeda	DAU
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen Renja dan Renja perubahan Bappeda Kota Magelang	2 dokumen	10.362.000	2 dokumen	10.880.100	Bappeda	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya dokume RKA dan RKAP SKPD	2 dokumen	18.553.000	2 dokumen	19.480.650	Bappeda	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	Tersedianya dokumen LKj IP SKPD Bappeda	1 laporan	5.855.000	1 laporan	6.147.750	Bappeda	DAU
403.15	Program Pengembangan data/informasi			59.078.000		62.031.900		DAU
		Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			DAU
		Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	70%		80%			DAU
	Penyusunan Profile Daerah	Buku Profil/ SIPD Kota Magelang dan Per Kecamatan Tahun 2016	100 Buku	59.078.000		62.031.900	Kota Magelang	DAU
403.16	Program Kerjasama Pembangunan			118.460.000		124.383.000		DAU
		Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	2		3			DAU
7	Fasilitasi FEDEP	3 Pameran, 6 Fasilitasi UKM, 4 PEL	13 Keg	118.460.000		124.383.000	Kota Magelang	DAU
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		14.160.000		14.868.000		DAU
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%		52%			DAU
		Persentase arsip dan risalah	82%		82%			DAU
		Persentase Penyelamatan Arsip	47%		53%			DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA	
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah pendataan dan penataan arsip	1 Kegiatan	14.160.000	14.868.000	Kota Magelang	DAU	
403.21		Program perencanaan pembangunan daerah			1.555.712.000	1.633.497.600		DAU	
			Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100		100		DAU	
			Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	70		75		DAU	
			Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	72		75		DAU	
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	35		40		DAU	
			Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	76%		78%		DAU	
8		Penyusunan rancangan RKPD	Tersedianya buku rancangan awal RKPD Kota Magelang dan Rancangan Akhir RKPD Kota Magelang tahun 2017	300 Buku	302.504.000	300 Buku	317.629.200	Kota Magelang	DAU
9		Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Penyelenggaraan Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD Kota Magelang Tahun 2017	2 Kegiatan	136.500.000	2 Kegiatan	143.325.000	Kota Magelang	DAU
10		Penetapan RKPD	Tersedianya buku RKPD Kota Magelang tahun 2017	150 Buku	34.855.000	150 Buku	36.597.750	Kota Magelang	DAU
13		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Monev)	4 Laporan	17.671.000	4 Laporan	18.554.550	Kota Magelang	DAU
14		Forum SKPD dan FGD	Penyelenggaraan 1 kali forum SKPD dan 5 kali FGD	200 Peserta	139.620.000	200 Peserta	146.601.000	Kota Magelang	DAU
19		Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya publikasi kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan daerah Kota Magelang (20 poster dan 150 kalender)	20 Poster	49.600.000	20 Poster	52.080.000	Kota Magelang	DAU
31		Pelaksanaan verifikasi renja SKPD	Terlaksananya Verifikasi Renja SKPD	46 SKPD	96.120.000	46 SKPD	100.926.000	Kota Magelang	DAU
35		Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	Terlaksananya penyusunan rancangan perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2017	100 Buku	128.595.000	100 Buku	135.024.750	Kota Magelang	DAU
36		Penetapan perubahan RKPD	Tersedianya buku Penetapan Perubahan RKPD kota Magelang tahun 2017	150 Buku	29.305.000	150 Buku	30.770.250	Kota Magelang	DAU
37		Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD	Terlaksananya verifikasi perubahan renja SKPD	46 SKPD	92.579.000	46 SKPD	97.207.950	Kota Magelang	DAU
39		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi Magelang Kota Sejuta Bunga	50 buku	87.046.000	50 buku	91.398.300	Kota Magelang	DAU
42		Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi RKPD	4 Laporan	46.625.000	4 Laporan	48.956.250	Kota Magelang	DAU
63		Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Terevaluasinya RPJP Kota Magelang 2005-2025	1 dokumen	138.018.000	1 dokumen	144.918.900	Kota Magelang	DAU
64		Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku standarisasi harga tahun 2018	300 buku	162.075.000	300 buku	170.178.750	Kota Magelang	DAU
66		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi Pelaksanaan Masterplan Smart City	50 buku	94.599.000	50 buku	99.328.950	Kota Magelang	DAU
403.22		Program perencanaan pembangunan ekonomi			642.691.000	674.825.550		DAU	
40		Penyusunan Dokumen Pengembangan Pertanian Organik	Dokumen Pengembangan Pertanian Organik	32 buku	150.300.000	32 buku	157.815.000	Kota Magelang	DAU
41		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) Ber-NKV	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan RPH	35 Buku	153.405.000	35 Buku	161.075.250	Kota Magelang	DAU
45		Pemetaan Potensi Ekonomi Kota Magelang	Jumlah dokumen Mapping Potensi ekonomi Kota Magelang	35 buku	99.755.000	35 buku	104.742.750	Kota Magelang	DAU
46		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Jangkauan Pemasaran dalam Skema E-Commerce	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Jangkauan Pemasaran dalam Skema E-Commerce	35 buku	118.365.000	35 buku	124.283.250	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang ekonomi dan prasarana wilayah	4 laporan	120.866.000	4 laporan	126.909.300	Kota Magelang	DAU
403.23	Program perencanaan sosial budaya			657.647.000		690.529.350		DAU
9	Penyusunan Laporan Penanggulangan kemiskinan (TKPKD)	Tersedianya Laporan TKPKD	12 Buku	103.915.000	12 Buku	109.110.750	Kota Magelang	DAU
19	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Jumlah dokumen Monev PUS	40 Buku	53.986.000	40 Buku	56.685.300	Kota Magelang	DAU
25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Pendidikan Sepanjang Hayat	25 buku	62.462.000	25 buku	65.585.100	Kota Magelang	DAU
30	Penyusunan Masterplan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	Tersusunnya Dokumen Masterplan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Kota Magelang	30 dokumen	192.739.000	30 dokumen	202.375.950	Kota Magelang	DAU
32	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi	50 dokumen	110.856.000	50 dokumen	116.398.800	Kota Magelang	DAU
37	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	Terlaksananya Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi	30 dokumen	102.705.000	30 dokumen	107.840.250	Kota Magelang	DAU
38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Koordinasi	12 Dokumen	30.984.000	12 Dokumen	32.533.200	Kota Magelang	DAU
403.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana			368.650.000		387.082.500		DAU
		cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	100%		100%			DAU
13	Penyusunan Blueprint Universal Design	Tersedianya Dokumen Blueprint Universal Design	10 buku	185.000.000	10 buku	194.250.000	Kota Magelang	DAU
14	Review Strategi Sanitasi Kota	Hasil review SSK	1 dokumen	183.650.000	1 dokumen	192.832.500	Kota Magelang	DAU
		JUMLAH		4.714.661.000		4.950.394.050		

Matriks
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang : Keuangan
OPD : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
			TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
404.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya kegiatan perkantoran	100%	2.132.941.000	100%	2.132.941.000		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	teradministrasinya surat-surat dinas	12 Bulan	1.000.000	12 Bulan	1.000.000	BPKAD	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya kebutuhan komunikasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas	12 Bulan	277.800.000	12 Bulan	277.800.000	BPKAD	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya surat-surat kendaraan sesuai ketentuan	64 Kendaraan	20.240.000	64 Kendaraan	20.240.000	BPKAD	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terwujudnya personil pengelolaan keuangan daerah dan laporan pertanggungjawaban	12 Bulan	724.641.000	12 Bulan	724.641.000	BPKAD	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan di lingkungan DPPKD	12 Bulan	86.794.000	12 Bulan	86.794.000	BPKAD	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	meningkatnya kelancaran tugas dinas	12 Bulan	37.338.000	12 Bulan	37.338.000	BPKAD	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	meningkatnya kelancaran tugas dinas	12 Bulan	30.900.000	12 Bulan	30.900.000	BPKAD	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan	12 Bulan	43.600.000	12 Bulan	43.600.000	BPKAD	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	menambah wawasan pengetahuan aparatur	2 Jenis	14.357.000	2 Jenis	14.357.000	BPKAD	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	terpenuhinya logistik kantor	24 Tabung	8.280.000	24 Tabung	8.280.000	BPKAD	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, rapat dan tamu	12 Bulan	97.272.000	12 Bulan	97.272.000	BPKAD	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya koordinasi daerah	12 Bulan	184.695.000	12 Bulan	184.695.000	BPKAD	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorier daerah/tidak tetap	tersedianya pegawai guna memperlancar tugas	7 Orang	421.050.000	7 Orang	421.050.000	BPKAD	DAU
20	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	jumlah pembayaran PBB gedung kantor	0 SPPT	30.400.000	0 SPPT	30.400.000	BPKAD	DAU
25	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda	jumlah pembayaran PBB tanah pemda	198 buah	47.000.000	198 buah	47.000.000	BPKAD	DAU
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	kelancaran urusan kepegawaian	82 File	107.574.000	82 File	107.574.000	BPKAD	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
404.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor	100%	898.112.000	100%	898.112.000		DAU
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Komputer, Laptop	4 unit	46.250.000	4 unit	46.250.000	BPKAD	DAU
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Rumah Dinas yang terpelihara selama satu tahun	6 rumah dinas	181.550.000	6 rumah dinas	181.550.000	BPKAD	DAU
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	meningkatnya kenyamanan tugas	1 Unit	67.610.000	1 Unit	67.610.000	BPKAD	DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas	64 Unit	329.427.000	64 Unit	329.427.000	BPKAD	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	31 Unit	27.400.000	31 Unit	27.400.000	BPKAD	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan kantor	7 Jenis	238.675.000	7 Jenis	238.675.000	BPKAD	DAU
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya sarana kerja kantor	20 buah	7.200.000	20 buah	7.200.000	BPKAD	DAU
404.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	222.212.000	100%	222.212.000		DAU
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tercapainya target kinerja SKPD	12 Dokumen	60.835.000	12 Dokumen	60.835.000	BPKAD	DAU
4	Penyusunan laporan keuangan semesteran	tersedianya laporan keuangan semesteran,prognosis dan akhir tahun	3 Jenis laporan	9.297.000	3 Jenis laporan	9.297.000	BPKAD	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	terwujudnya pelaksanaan anggaran	2 Dokumen	45.522.000	2 Dokumen	45.522.000	BPKAD	DAU
8	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	pedoman rencana kerja skpd	2 jenis dokumen	21.401.000	2 jenis dokumen	21.401.000	BPKAD	DAU
10	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen renstra	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	BPKAD	DAU
20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	SPJ yang diverifikasi dan disahkan	12 Bulan	62.306.000	12 Bulan	62.306.000	BPKAD	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1 dokumen	12.851.000	1 dokumen	12.851.000	BPKAD	DAU
404.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel	100%	6.918.234.000	100%	6.918.234.000		DAU
		Persentase pertumbuhan PAD	18,44%		19,18%			DAU
		Prosentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	81%		84%			DAU
4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	sebagai pedoman bagi pengelola keuangan di jajaran Pemerintah Kota Magelang	75 Buku	56.356.000	75 Buku	56.356.000	Kota Magelang	DAU
6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Raperda dan Perda APBD	4 dokumen Buku	405.534.000	4 dokumen Buku	405.534.000	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Raperwal dan perwal penjabaran APBD	3 dokumen Buku	233.164.000	3 dokumen Buku	233.164.000	Kota Magelang	DAU
8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Raperda dan perda perubahan APBD	4 dokumen Buku	344.285.000	4 dokumen Buku	344.285.000	Kota Magelang	DAU
9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penetapan Perwal tentang penjabaran Perubahan APBD 2016	3 dokumen	337.707.000	3 dokumen	337.707.000	Kota Magelang	DAU
10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah buku Raperda dan perda pertanggungjawaban APBD	468 Buku	202.869.000	468 Buku	202.869.000	Kota Magelang	DAU
11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	120 Buku	219.773.000	120 Buku	219.773.000	Kota Magelang	DAU
13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	3 jenis laporan	254.854.000	3 jenis laporan	254.854.000	Kota Magelang	DAU
16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Data barang milik daerah yang terintegrasi dengan SIMDA BMD	12 laporan	156.311.000	12 laporan	156.311.000	Kota Magelang	DAU
20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Dokumen KUA	2 dokumen Buku	211.457.000	2 dokumen Buku	211.457.000	Kota Magelang	DAU
21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Dokumen PPAS	2 dokumen Buku	95.597.000	2 dokumen Buku	95.597.000	Kota Magelang	DAU
22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	Dokumen perubahan KUA	2 dokumen Buku	177.776.000	2 dokumen Buku	177.776.000	Kota Magelang	DAU
23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Dokumen perubahan PPAS	2 dokumen Buku	92.704.000	2 dokumen Buku	92.704.000	Kota Magelang	DAU
24	Penelitian DPA SKPD	DPA SKPD sesuai dengan Perda dan Perwal APBD 2017	48 SKPD	38.809.000	48 SKPD	38.809.000	Kota Magelang	DAU
25	Pengesahan DPA SKPD	DPA SKPD yang disyahkan	48 skpd SKPD	51.078.000	48 skpd SKPD	51.078.000	Kota Magelang	DAU
27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	Tertib Administrasi	360 berkas	148.205.000	360 berkas	148.205.000	Kota Magelang	DAU
30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	Sebagai pengemдали dalam pelaksanaan pengeluaran belanja	3000 SP2D	172.601.000	3000 SP2D	172.601.000	Kota Magelang	DAU
32	Pengesahan dan penerbitan SPD	Sebagai dasar penerbitan SP2D	170 SPD	82.303.000	170 SPD	82.303.000	Kota Magelang	DAU
36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	Buku laporan keuangan konsolidasi	612 Buku	190.860.000	612 Buku	190.860.000	Kota Magelang	DAU
42	Penelitian dan asistensi laporan keuangan SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	552 Laporan	99.650.000	552 Laporan	99.650.000	Kota Magelang	DAU
43	Pengendalian dan penerbitan SPM	tersedianya SPM sebagai bukti Akurat untuk penerbitan SP2D	1500 SPM	27.286.000	1500 SPM	27.286.000	Kota Magelang	DAU
44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan	48 SKPD	76.520.000	48 SKPD	76.520.000	Kota Magelang	DAU
48	Penyusunan laporan pajak	tersedianya Laporan Pajak setiap bulan	84 buku	88.660.000	84 buku	88.660.000	Kota Magelang	DAU
49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	Laporan anggaran lebih transparan dan akuntabel	2 Laporan	21.408.000	2 Laporan	21.408.000	Kota Magelang	DAU
51	Penyusunan anggaran kas	sebagai rencana penarikan dana pada setiap triwulan	75 buku	18.553.000	75 buku	18.553.000	Kota Magelang	DAU
52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)	DPPA sesuai dengan Perda dan Perwal penjabaran perubahan APBD 2016	48 SKPD	41.263.000	48 SKPD	41.263.000	Kota Magelang	DAU
53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)	DPPA sesuai dengan Perda dan Perwal penjabaran perubahan APBD 2016	48 skpd SKPD	54.369.000	48 skpd SKPD	54.369.000	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Penataan Dokumen Anggaran Elektronik	Kemudahan dalam mengakses arsip dokumen anggaran	12 Bulan	79.893.000	12 Bulan	79.893.000	Kota Magelang	DAU
57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	SP2D Bantuan dan tak terduga sesuai dengan jumlah pernohonan bantuan	2000 berkas	203.620.000	2000 berkas	203.620.000	Kota Magelang	DAU
59	Penghapusan Asset	Penghapusan aset yang sudah tidak layak	1 paket	18.100.000	1 paket	18.100.000	Kota Magelang	DAU
60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Laporan bulanan dan surat menyurat	100%	106.848.000	100%	106.848.000	Kota Magelang	DAU
61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	Laporan bulanan PPKD	100%	58.023.000	100%	58.023.000	Kota Magelang	DAU
65	Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah	Adanya personil pengelola dan pengadministrasian barang milik daerah	20 orang	494.504.000	20 orang	494.504.000	Kota Magelang	DAU
66	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Buku laporan barang milik daerah semester 1, 2, tahunan, buku inventaris, KIB semester 1 dan KIB semester 2	6 jenis	44.231.000	6 jenis	44.231.000	Kota Magelang	DAU
69	Penjualan aset daerah	Terjualnya aset daerah yang dihapus	1 paket	71.832.000	1 paket	71.832.000	Kota Magelang	DAU
72	Pembinaan pengelolaan keuangan dan implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	100 Orang	249.020.000	100 Orang	249.020.000	Kota Magelang	DAU
74	Monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah/ dan atau bangunan	Laporan Monitoring Pelaksanaan Penggunaan/Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Pemkot Magelang	4 laporan	74.048.000	4 laporan	74.048.000	Kota Magelang	DAU
77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D SKPD	SP2D SKPD sebagai Alat Pencairan Dana dari Pemerintah kepada Bendahara Pengeluaran	1350 SP2D	75.750.000	1350 SP2D	75.750.000	Kota Magelang	DAU
79	Penyelamatan aset daerah	Terlaksananya penyelamatan aset daerah	12 bulan	204.390.000	12 bulan	204.390.000	Kota Magelang	DAU
81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	88 Buku	53.998.000	88 Buku	53.998.000	Kota Magelang	DAU
88	Penaksiran barang milik daerah	Penaksiran barang milik daerah	4 kegiatan	39.099.000	4 kegiatan	39.099.000	Kota Magelang	DAU
91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	Bantuan sosial kepada masyarakat	150000%	125.411.000	150000%	125.411.000	Kota Magelang	DAU
93	Penyusunan laporan tugas pembantuan	Tersedianya Bahan Laporan Keuangan Daerah	20 laporan	42.475.000	20 laporan	42.475.000	Kota Magelang	DAU
95	Penataan sistem administrasi arus berkas penerbitan SP2D belanja langsung	Terciptanya tertib Administrasi pemrosesan SP2D Belanja Langsung	12 bulan	26.925.000	12 bulan	26.925.000	Kota Magelang	DAU
96	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	Tersedianya pedoman penganggaran kegiatan	3 dokumen Buku	122.905.000	3 dokumen Buku	122.905.000	Kota Magelang	DAU
104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	Rapat Koordinasi dan Laporan	12 laporan	452.253.000	12 laporan	452.253.000	Kota Magelang	DAU
105	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD	4 kegiatan	48.736.000	4 kegiatan	48.736.000	Kota Magelang	DAU
106	Optimaliasasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Data obyek pemakaian tanah dan atau bangunan Pemkot Magelang	3 kecamatan	44.194.000	3 kecamatan	44.194.000	Kota Magelang	DAU
107	Pembuatan Daftar Gaji	SP2D yang diterbitkan	1400 SP2D	153.078.000	1400 SP2D	153.078.000	Kota Magelang	DAU
108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	pameran hasil pembangunan daerah	1 kegiatan	36.405.000	1 kegiatan	36.405.000	Kota Magelang	DAU
109	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	daftar rencana kebutuhan barang milik daerah	2 dokumen	91.809.000	2 dokumen	91.809.000	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	perwal tentang pengelolaan barang milik daerah	1 perwal	54.595.000	1 perwal	54.595.000	Kota Magelang	DAU
111	Penyusunan Sistem dan Prosedur Penganggaran Daerah	Sistem Penganggaran Daerah	1 dokumen	46.140.000	1 dokumen	46.140.000	Kota Magelang	DAU
204.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			552.465.000		552.465.000		DAU
		Tersedianya informasi pertanahan yang akurat	30%		45%			DAU
1	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Peningkatan penatagunaan tanah Pemkot dan tersedianya data tanah Pemkot yang akurat	3 Kelurahan	77.402.000	3 Kelurahan	77.402.000	Kota Magelang	DAU
7	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	Terkendalinya pemberian hak atas tanah negara	100 %	37.924.000	100 %	37.924.000	Kota Magelang	DAU
8	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen bukti kepemilikan aset tanah pemkot	12 bidang	336.727.000	12 bidang	336.727.000	Kota Magelang	DAU
9	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Tersedianya data tanah milik Pemkot yang mutakhir	1 Tahun	88.162.000	1 Tahun	88.162.000	Kota Magelang	DAU
10	Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Milik Pemda	Terwujudnya batas fisik tanah untuk pembangunan	2 bidang	12.250.000	2 bidang	12.250.000	Kota Magelang	DAU
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Teradministrasinya dokumen arsip daerah	100%	136.130.000		136.130.000		DAU
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%		52%			DAU
		Persentase arsip dan risalah	82%		82%			DAU
		Persentase Penyelamatan Arsip	47%		53%			DAU
	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Pengamanan arsip DPPKD Kota Magelang	6 bidang	136.130.000	6 bidang	136.130.000	Kota Magelang	DAU
404.18	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah			3.151.161.000		3.151.161.000		DAU
1	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Daerah	4 Laporan	357.980.000	4 Laporan	357.980.000	Kota Magelang	DAU
2	Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak	Tersusunnya Data Potensi Pajak Daerah	4 laporan	33.295.000	4 laporan	33.295.000	Kota Magelang	DAU
3	Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan PBB	12 laporan	50.094.000	12 laporan	50.094.000	Kota Magelang	DAU
4	Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah	Tersedianya laporan perkembangan PAD	12 laporan	150.800.000	12 laporan	150.800.000	Kota Magelang	DAU
5	Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah	Terselesaikannya Tunggakan Pajak Daerah	120 wajib pajak	124.453.000	120 wajib pajak	124.453.000	Kota Magelang	DAU
6	Intensifikasi pemungutan PBB	Tercapainya target Penerimaan PBB-P2, Pelaksanaan PBB Panutan, dan Pemberian Penghargaan Kepada Kelurahan, TW, RT, Wajib Pajak dan Sosialisasi kegiatan PBB-P2 di tiap Kelurahan	5 Kegiatan	298.648.000	5 Kegiatan	298.648.000	Kota Magelang	DAU
7	Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB	Tertib Administrasi PBB-P2	28 Laporan	211.138.000	28 Laporan	211.138.000	Kota Magelang	DAU
8	Penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah	Tercapainya target PAD	12 laporan	51.700.000	12 laporan	51.700.000	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Pengelolaan data dan informasi PBB	Tertibnya SPPT,SSPD,DHKP dan DHR PBB	12 Bulan	891.719.000	12 Bulan	891.719.000	Kota Magelang	DAU
10	Penatausahaan Dokumen Reklame Dan Penempatan	tercapainya target PAD	12 laporan	65.649.000	12 laporan	65.649.000	Kota Magelang	DAU
11	Verifikasi Dan Validasi Data Piutang PBB	Data piutang PBB-P2 yang valid	6 bulan	195.613.000	6 bulan	195.613.000	Kota Magelang	DAU
12	Penatausahaan sistem integrasi pendapatan asli daerah	Peningkatan Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli daerah Tepat Waktu dan Akurat	12 laporan	115.525.000	12 laporan	115.525.000	Kota Magelang	DAU
13	Penertiban administrasi wajib pajak daerah	Tercapainya target PAD		48.157.000		48.157.000	Kota Magelang	DAU
15	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	Adanya kenaikan eslimasi potensi PBB-P2	100 OP	267.046.000	100 OP	267.046.000	Kota Magelang	DAU
16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	Tercapainya target PAD	200 WP	47.132.000	200 WP	47.132.000	Kota Magelang	DAU
14	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	Terwujudnya tertib administrasi dan terinformasinya realisasi pencairan dan penyerapan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan	16 Laporan	121.504.000	16 Laporan	121.504.000	Kota Magelang	DAU
17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	Terselesaikannya Pengajuan Keberatan dan Pengurangan Wajib Pajak	50 SK	64.116.000	50 SK	64.116.000	Kota Magelang	DAU
18	Intensifikasi Pendapatan dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Intensifikasi pemanfaatan barang milik daerah	12 bulan	6.592.000	12 bulan	6.592.000	Kota Magelang	DAU
19	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	rancangan peraturan daerah	1 raperda	50.000.000	1 raperda	50.000.000	Kota Magelang	DAU
JUMLAH				14.011.255.000		14.011.255.000		

Matriks
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang : Kepegawaian
OPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	352.466.000	100%	370.089.300		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos	300 Buah	600.000	300 Buah	630.000	BKPP	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemeliharaan jaringan	12 Bulan	29.400.000	12 Bulan	30.870.000	BKPP	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	12 Unit	6.000.000	12 Unit	6.300.000	BKPP	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium penatausaha keuangan dan barang yang mendapat honorarium	96 orang per bulan	98.658.000	96 orang per bulan	103.590.900	BKPP	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan alat kebersihan kantor	12 Bulan	7.300.000	12 Bulan	7.665.000	BKPP	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis kantor	53 Jenis	25.518.000	53 Jenis	26.793.900	BKPP	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13 Jenis	21.195.000	13 Jenis	22.254.750	BKPP	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	6 Jenis	2.000.000	6 Jenis	2.100.000	BKPP	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan Bahan bacaan berupa surat kabar, majalah dan buku perpustakaan	12 Bulan	4.990.000	12 Bulan	5.239.500	BKPP	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makan dan minum	12 Bulan	25.208.000	12 Bulan	26.468.400	BKPP	DAU
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	121.040.000	12 Bulan	127.092.000	BKPP	DAU
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah data penjagaan kenaikan pangkat, KGB, dan pensiun pegawai BKD	41 Buah	10.557.000	41 Buah	11.084.850	BKPP	DAU
405.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	211.589.000	100%	222.168.450		DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	15 Unit	158.749.000	15 Unit	166.686.450	BKPP	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kerja yang terpelihara	9 Jenis	5.965.000	9 Jenis	6.263.250	BKPP	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	9 Unit	41.875.000	9 Unit	43.968.750	BKPP	DAU
27	Pengadaan mebeleur	Jumlah meja kursi	32 Buah	5.000.000	32 Buah	5.250.000	BKPP	DAU
405.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase tingkat kehadiran	100%	112.573.000		118.201.650		DAU
		Persentase kehadiran ASN	97%		97%			DAU
		Persentase pelanggaran disiplin ASN	0,21%		0,21%			DAU
6	Penegakan disiplin PNS	Jumlah Sidak dan laporan absen sidak jari di lingkungan Pemkot Magelang	900 Buah	70.916.000	900 Buah	74.461.800	BKPP	DAU
7	Penyediaan lembaga konsultasi pegawai	Jumlah pegawai yang melakukan konsultasi dan terlaksananya seminar	7 Kegiatan	41.657.000	7 Kegiatan	43.739.850	BKPP	DAU
405.04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Prosentase fasilitas pindah/purna tugas PNS	100%	45.605.000	100%	47.885.250		DAU
		Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	85%		90%			DAU
3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah SK Mutasi PNS	150 SK	45.605.000	150 SK	47.885.250	Kota Magelang	DAU
405.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	29.959.000	100%	31.456.950		DAU
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi	300 Orang	29.959.000	300 Orang	31.456.950	Kota Magelang	DAU
405.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	prosentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	61.425.000	100%	64.496.250		DAU
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	12 Buku	12.956.000	12 Buku	13.603.800	BKPP	DAU
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	6.086.000	1 Laporan	6.390.300	BKPP	DAU
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan BKD untuk satu tahun anggaran	1 Laporan	9.924.000	1 Laporan	10.420.200	BKPP	DAU
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen RENJA 2018 dan RENJA-P 2017	2 Dokumen	7.051.000	2 Dokumen	7.403.550	BKPP	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan DPPA	2 Dokumen	18.850.000	2 Dokumen	19.792.500	BKPP	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	Jumlah dokumen LAKIP SKPD	1 Dokumen	6.558.000	1 Dokumen	6.885.900	BKPP	DAU
405.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase jumlah kasus yang tertangani, Prosentase PNS yang menyusun SKP tepat waktu	100%	3.141.523.000	100%	3.298.599.150		DAU
		Persentase ASN yang memiliki kualifikasi:						DAU
		Pendidikan S1	46%		47%			DAU
		Pendidikan S2	8,5%		9%			DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKD	100		100			DAU
		Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	0,41		0,46			DAU
		Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	100%		100%			DAU
		Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	5%		5%			DAU
		Persentase ASN yang dijatuhi hukuman	0,10%		0,08%			DAU
		Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	41%		41%			DAU
1	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah bahan pertimbangan penetapan kebijakan	12 Buah	123.606.000	12 Buah	129.786.300	Kota Magelang	DAU
2	Seleksi penerimaan calon PNS	Jumlah peserta seleksi CPNS	4500 Orang	569.149.000	4500 Orang	597.606.450	Kota Magelang	DAU
3	Penempatan PNS	Jumlah kegiatan penempatan dan pengucapan janji/sumpah PNS	2 Kegiatan	40.029.000	2 Kegiatan	42.030.450	Kota Magelang	DAU
5	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah data PNS, ID card, DUK, buku jabatan dan dokumen digital PNS	4200 Data	107.400.000	4200 Data	112.770.000	Kota Magelang	DAU
8	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah tanda jasa Satya Lancana yang diusulkan	150 Buah	22.125.000	150 Buah	23.231.250	Kota Magelang	DAU
9	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah kasus yang ditangani	4 Kasus	63.288.000	4 Kasus	66.452.400	Kota Magelang	DAU
13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	Jumlah Diklat dan Bintek	6 Kegiatan	407.409.000	6 Kegiatan	427.779.450	Kota Magelang	DAU
14	Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	Jumlah buku kebutuhan diklat tahun 2018 dan realisasi diklat tahun 2017	4 Buku	46.474.000	4 Buku	48.797.700	Kota Magelang	DAU
22	Penataan sistem administrasi penerbitan ijin belajar dan penggunaan gelar	Jumlah SK ijin belajar dan SK ijin penggunaan gelar	180 SK	13.825.000	180 SK	14.516.250	Kota Magelang	DAU
23	Penataan sistem administrasi penyelenggaraan ujian dinas	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas	30 Orang	40.009.000	30 Orang	42.009.450	Kota Magelang	DAU
24	Penataan administrasi kenaikan gaji berkala PNS	Jumlah SK KGB	650 SK	21.275.000	650 SK	22.338.750	Kota Magelang	DAU
26	Administrasi pemberkasan CPNSD	Jumlah NP NIP dan SK CPNSD	150 Buah	47.848.000	150 Buah	50.240.400	Kota Magelang	DAU
28	Penyelesaian administrasi tenaga honorer	jumlah SK perpanjangan / pemberhentian tenaga honorer	72 Buah	21.181.000	72 Buah	22.240.050	Kota Magelang	DAU
30	Penerpan dan pengembangan (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)	Jumlah pelayanan dan up date data pegawai	900 PNS	56.398.000	900 PNS	59.217.900	Kota Magelang	DAU
31	Penatausahaan Jabatan Fungsional	jumlah keputusan pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional	150 Buah	46.982.000	150 Buah	49.331.100	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Pembekalan PNS yang akan purna tugas	Jumlah PNS menjelang purna tugas yang mendapat pembekalan	179 Orang	331.155.000	179 Orang	347.712.750	Kota Magelang	DAU
34	Pelantikan Pejabat	Jumlah pelantikan pejabat	4 kegiatan	103.831.000	4 kegiatan	109.022.550	Kota Magelang	DAU
35	Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD	Jumlah buku formasi PNSD dan CPNSD	1 Dokumen	55.092.000	1 Dokumen	57.846.600	Kota Magelang	DAU
38	Pembentukan dan penyelenggaraan Assesment Centre	Jumlah hasil assesment PNS	65 Orang	80.134.000	65 Orang	84.140.700	Kota Magelang	DAU
39	Penyusunan Buku Profil Pegawai	Jumlah buku profil pegawai	10 Buah	15.022.000	10 Buah	15.773.100	Kota Magelang	DAU
40	Penataan kenaikan pangkat	Jumlah SK Kenaikan Pangkat	500 Buah	100.438.000	500 Buah	105.459.900	Kota Magelang	DAU
41	Penatausahaan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah dokumen SKP dan dokumen Penilaian Prestasi Kerja PNS	8230 Dokumen	25.890.000	8230 Dokumen	27.184.500	Kota Magelang	DAU
42	Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik	Jumlah dokumen kepegawaian digital	60000 Dokumen	48.186.000	60000 Dokumen	50.595.300	Kota Magelang	DAU
44	penatausahaan administrasi purna tugas / pensiun dan klim otomatis pembayaran pensiun & THT penataan, penyelesaian administrasi TASPEN	Jumlah SK PNS yang purna tugas/pensiun	182 sk	84.261.000	182 sk	88.474.050	Kota Magelang	DAU
45	Penataan , penyelesaian administrasi TASPEN	Jumlah kartu peserta TASPEN	40 dokumen	17.628.000	40 dokumen	18.509.400	Kota Magelang	DAU
46	Penataan , penyelesaian administrasi KARIS/KARSU	Jumlah PNS yang mendapat Karis/Karsu/Karpeg	100 buah	23.467.000	100 buah	24.640.350	Kota Magelang	DAU
53	Mutasi dan seleksi calon jabatan pimpinan tinggi pratama	jumlah jabatan terisi	7 jabatan	185.282.000	7 jabatan	194.546.100	Kota Magelang	DAU
56	Penerbitan dan update Kartu PNS Elektronik	Jumlah PNS yang mendapatkan KPE	100 Orang	45.992.000	100 Orang	48.291.600	Kota Magelang	DAU
59	penetapan jabatan fungsional umum ASN	jumlah surat keputusan	1100 SK	82.158.000	1100 SK	86.265.900	Kota Magelang	DAU
60	pengembangan karakter SDM aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	172 orang	200.000.000	172 orang	210.000.000	Kota Magelang	DAU
61	verifikasi berkas pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja, kematian dan pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	JML Pegawai yg Mendapatkan pelayanan JKK	6 orang	43.999.000	6 orang	46.198.950	Kota Magelang	DAU
62	penyusunan rancangan pengaturan wali kota tentang pemindahan pegawai di lingkungan pemerintah kota magelang	jumlah buku perwal	1 dokumen rancangan perwal	27.490.000	1 dokumen rancangan perwal	28.864.500	Kota Magelang	DAU
63	penatausahaan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah PNS yang mendapat bantuan tugas belajar	5 orang	44.500.000	5 orang	46.725.000	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Prosentase layanan online	100%	9.729.000	100%	10.215.450		DAU
		Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah:						DAU
		a. Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			DAU
		b. Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			DAU
		Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			DAU
		Jumlah KIM	17		17			DAU
		Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6		7			DAU
		Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-		1			DAU
		Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi						DAU
19	Pengelolaan Website	Jumlah layanan on line	12 Bulan	9.729.000	12 Bulan	10.215.450	Kota Magelang	DAU
406.15	Program Pendidikan Kedinasan	Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan non formal	100%	827.070.000		868.423.500		DAU
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	94%		95%			DAU
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	80%		100%			DAU
1	Pendidikan dan pelatihan teknis	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	250 Orang	356.106.000	250 Orang	373.911.300	Kota Magelang	DAU
2	Pendidikan penjenjangan struktural	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan penjenjangan struktural	18 Orang	470.964.000	18 Orang	494.512.200	Kota Magelang	DAU
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Prosentase pendataan dan penataan arsip	100%	14.190.000		14.899.500		DAU
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%		52%			DAU
		Persentase arsip dan risalah	82%		82%			DAU
		Persentase Penyelamatan Arsip	47%		53%			DAU
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah pendataan dan penataan arsip	1 Kegiatan	14.190.000	1 Kegiatan	14.899.500	Kota Magelang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
406.16	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan, Prosentase pegawai yang mengikuti Diklat Fungsional	100%	246.788.000	100%	259.127.400		DAU
1	pendidikan dan pelatihan pejabat bagi calon PNS daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	3 orang	46.788.000	3 orang	49.127.400	Kota Magelang	DAU
4	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional	30 Orang	200.000.000	30 Orang	210.000.000	Kota Magelang	DAU
		JUMLAH		5.052.917.000		5.305.562.850		

Matriks
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang : Penelitian dan Pengembangan
OPD : Badan Penelitian dan Pengembangan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
407.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya tertib administrasi perkantoran	100 %	358.934.000	100 %	376.880.700		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (perangko, jasa pengiriman surat/paket)	1 Tahun	1.000.000	1 Tahun	1.050.000	Litbang	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Layanan Telepon, Iternet, Air dan Listrik	4 Jenis	28.800.000	4 Jenis	30.240.000	Litbang	DAU
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Perpanjangan STNK dan PKB Kendaraan Dinas	7 Unit	6.000.000	7 Unit	6.300.000	Litbang	DAU
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	12 Bulan	64.000.000	12 Bulan	67.200.000	Litbang	DAU
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Peralatan/Bahan Pembersih dan Jasa Tenaga Kebersihan	1 Tahun	45.000.000	1 Tahun	47.250.000	Litbang	DAU
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.750.000	Litbang	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Foto Copy Dokumen Kantor	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.750.000	Litbang	DAU
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat dan Komponen Listrik	1 Tahun	6.000.000	1 Tahun	6.300.000	Litbang	DAU
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga (Kulkas)	1 Tahun	4.350.000	1 Tahun	4.567.500	Litbang	DAU
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Jasa Layanan Surat Kabar dan Pengadaan Buku Perpustakaan	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	5.250.000	Litbang	DAU
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Isi Ulang Tabung Gas	1 Tahun	1.600.000	1 Tahun	1.680.000	Litbang	DAU
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1 Tahun	13.000.000	1 Tahun	13.650.000	Litbang	DAU
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Fasilitasi Perjalanan Dinas Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	1 Tahun	120.000.000	1 Tahun	126.000.000	Litbang	DAU
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorir daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa honorarium jasa tenaga kontrak	1 Tahun	32.184.000	1 Tahun	33.793.200	Litbang	DAU
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD	Tersedianya bendera, umbul-umbul	12 Tahun	2.000.000	12 Tahun	2.100.000	Litbang	DAU
407.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	169.650.000	100 %	178.132.500	Litbang	DAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	AC Split 1 PK, Dispenser	1 unit, 2 unit	11.650.000	1 unit, 2 unit	12.232.500	Litbang	DAU
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun	24.000.000	1 Tahun	25.200.000	Litbang	DAU
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 Unit	79.000.000	10 Unit	82.950.000	Litbang	DAU
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung/kantor	15 Unit	10.000.000	15 Unit	10.500.000	Litbang	DAU
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara (Pemeliharaan alat dan jaringan)	2 Tahun	41.000.000	2 Tahun	43.050.000	Litbang	DAU
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya Mebeleur Kantor	15 Unit	4.000.000	15 Unit	4.200.000	Litbang	DAU
407.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terciptanya tertib penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	100 %	37.500.000	100 %	39.375.000		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja, RKA, renja Lakip dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.500.000	Litbang	DAU
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya dokumen Rencana Kinerja SKPD Tahun 2018 dan Renja perubahan 2017	10 Buku	10.000.000	10 Buku	10.500.000	Litbang	DAU
8	Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA 2017, DPA 2017, RKPA 2016, dan DPPA 2016	20 Buku	10.000.000	20 Buku	10.500.000	Litbang	DAU
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) SKPD	LKJIP SKPD TAHUN 2016	5 Buku	7.500.000	5 Buku	7.875.000	Litbang	DAU
407.15	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi	Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	100 %	276.150.000	100 %	289.957.500		
		Persentase krenova masyarakat yang berkualitas	11%		14%			
		Persentase krenova OPD yang berkualitas	4%		6%			
1	Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova	krenova dan Bulletin Krenova	2 Kegiatan	88.000.000	2 Kegiatan	92.400.000	Kota Magelang	DAU
2	Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat	terjaringnya pemenang lomba roket air	6 Kelompok	79.150.000	6 Kelompok	83.107.500	Kota Magelang	DAU
3	Penyusunan Peraturan tentang Sistem Inovasi Daerah Kota Magelang	Tersusunnya Raperda Inovasi Daerah	1 Raperda	75.000.000	1 Raperda	78.750.000	Kota Magelang	DAU
4	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Tertersedianya penyusunan draf roadmap SIDA dan sosialisasi	3 Kegiatan	34.000.000	3 Kegiatan	35.700.000	Kota Magelang	DAU
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tewujudnya keterbukaan informasi SKPD kepada publik	100 %	12.000.000	100 %	12.600.000		
		Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah:						
		a. Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		b. Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			
		Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			
		Jumlah KIM	17		17			
		Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	6		7			
		Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-		1			
		Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi						
15	Pengelolaan Website	Terpublikasikannya Data dan informasi kelembagaan melalui website	1 Kegiatan	12.000.000	1 Kegiatan	12.600.000	Kota Magelang	DAU
407.16	Program Penelitian dan Pengkajian	Terwujudnya pengembangan data/informasi/hasil riset/rekomendasi kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan	100 %	427.325.000	100 %	448.691.250		
		Persentase hasil riset/kajian yang ditidakanjuti	30%		35%			
1	Studi Kelayakan Kawasan Industri Tahu Tidar Campur sebagai Kawasan Wisata Berbasis Teknologi	Laporan Study Kelayakan	10 Buku	84.000.000	10 Buku	88.200.000	Kota Magelang	DAU
2	Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang	Jumlah dokumen penelitian analisis potensi Peningkatan dan sumber-sumber PAD Kota Magelang	20 Buku	97.000.000	20 Buku	101.850.000	Kota Magelang	DAU
3	Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah	Jumlah dokumen analisis permasalahan dan isu isu strategis daerah	50 Buku	70.000.000	50 Buku	73.500.000	Kota Magelang	DAU
4	Penyusunan Buku Analisis Indikator Makro Sosial Kota Magelang	Buku Analisis Indikator Ekonomi Makro	60 Buku	91.325.000	60 Buku	95.891.250	Kota Magelang	DAU
5	Penyusunan Roadmap Penelitian dan Pengembangan	Roadmap Penelitian dan Pengembangan	100 %	85.000.000	100 %	89.250.000	Kota Magelang	DAU
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terciptanya tertib administrasi pengelolaan dokumen dan arsip	100 %	10.000.000	100 %	10.500.000		
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%		52%			
		Persentase arsip dan risalah	82%		82%			
		Persentase Penyelamatan Arsip	47%		53%			
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terwujudnya pengelolaan dokumen/arsip dan perpustakaan SKPD	4 bulan	10.000.000	4 bulan	10.500.000	Kota Magelang	DAU
407.17	Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan			40.000.000		42.000.000		
		Cakupan Monev dan/atau Pengendalian Riset dan/atau Kebijakan	10%		12%		Kota Magelang	DAU
1	Pengendalian Operasional dan Vokasi Penelitian	Buku Inflasi Kota Magelang	90 Buku	20.000.000	90 Buku	21.000.000	Kota Magelang	DAU
2	Monitoring dan Evaluasi Hasil-Hasil Penelitian	Terevaluasinya hasil-hasil penelitian	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	21.000.000	Kota Magelang	DAU
407.18	Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi			53.000.000		55.650.000		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU 2018		LOKASI	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)	TARGET DAN SATUAN	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual	Terfasilitasinya Pegurusan KI Masyarakat	5 HKI	53.000.000	5 HKI	55.650.000	Kota Magelang	DAU
407.19	Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya kapasitas lembaga kelitbangan di Kota Magelang	100 %	192.500.000	100 %	202.125.000		
1	Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	tersedianya data Jarlit Pendidikan, Jarlit Kesehatan, Jarlit lingkungan	3 Kegiatan	82.500.000	3 Kegiatan	86.625.000	Kota Magelang	DAU
2	Pemberdayaan Forum Alumni Karyasiswa Kota Magelang	Forum Alumni Karya siswa yang berdaya	2 kajian	35.000.000	2 kajian	36.750.000	Kota Magelang	DAU
3	Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Oleh DRD	4 rekomendasi	75.000.000	4 rekomendasi	78.750.000	Kota Magelang	DAU
JUMLAH				1.577.059.000		1.655.911.950		

BAB. VI

PENUTUP



BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2017 merupakan tahun pertama perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016-2021 atau Tahap III RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025 memuat kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2017.

Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD Kota/ Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kota Magelang Tahun 2017.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) melalui Forum SKPD dan FGD serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyesuaian rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Magelang ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kota Magelang, juga diusulkan ke APBD Propinsi Jawa Tengah dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN.

Keberhasilan pembangunan di Kota Magelang selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kota Magelang juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kota Magelang sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Magelang menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Kota Magelang Tahun 2017, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program RKPD Kota Magelang Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya.
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun 2017, RKPD ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Magelang, APBD Propinsi Jawa Tengah maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2017 sebagai penjabaran dari Rencana Starategik Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD).
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum OPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
6. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan. Program tersebut direncanakan berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/ kegiatan pembangunan di Kota Magelang.
7. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, Badan Perencanaan Kota Magelang berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2017 ke dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) dan Kebijakan Umum APBD 2017 serta Prioritas dan Pagu Indikatif OPD 2017.

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO